

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas antara lain menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Bintan mempunyai kewajiban menyelenggarakan pencatatan akuntansi dan melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan laporan keuangan ini merupakan salah satu perwujudan bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Semoga Pelaporan Keuangan Daerah melalui buku Laporan Keuangan Daerah ini dapat menyakinkan segenap komponen masyarakat di Kabupaten Bintan akan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan APBD.

Bandar Seri Bentan, Juni 2022

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Dra. HATRIAH

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xiii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xiv
LAPORAN KEUANGAN POKOK	
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	xvi
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)	xviii
3. NERACA	xix
4. LAPORAN OPERASIONAL (LO)	xxi
5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)	xxiii
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	xxv
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)	
7.1 PENDAHULUAN	
7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
7.1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan	3
7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET PERDA APBD	5
7.2.1 Ekonomi Makro	5
7.2.2 Kebijakan Keuangan	16
7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	18
7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja	24
7.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	26
7.4 DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN	
7.4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	27
7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.	29
7.4.3 Peranan dan tujuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	29
7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Prinsip-prinsip dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	31

7.4.5	Komponen Laporan Keuangan	34
7.5	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
7.5.1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	96
7.5.2	laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL)	162
7.5.3	Neraca	164
7.5.4	Laporan Operasional (LO)	272
7.5.5	Laporan Arus Kas (LAK)	324
7.5.6	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	331
7.6	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	
7.6.1	Kondisi Geografis dan Perangkat Daerah	335
7.6.2	Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah	338
7.6.3	Pembinaan Batas Wilayah	339
7.6.4	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	340
7.6.5	Pengelolaan Kawasan Khusus	349
7.6.6	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	349
7.6.7	Penyelenggaraan Pembinaan Keuangan Desa	350
7.6.8	Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan	351
7.7	PENUTUP	353

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 7.2.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)	7
Tabel 7.2.2	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bintang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	7
Tabel 7.2.3	Laju Pertumbuhan Persektor Kabupaten Bintang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	8
Tabel 7.2.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bintang Tahun 2016 – 2021	9
Tabel 7.2.5	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Bintang TA 2016-2020	12
Tabel 7.2.6	PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bintang Tahun 2018-2020	13
Tabel 7.2.7	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Bintang Tahun 2020 s.d. Tahun 2022	19
Tabel 7.2.8	Realisasi dan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 s.d. Tahun 2022	21
Tabel 7.2.9	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022	23
Tabel 7.3.1	Ikhtisar Realisasi Pendapatan Kabupaten Bintang Tahun 2021	24
Tabel 7.3.2	Ikhtisar Realisasi Belanja Kabupaten Bintang Tahun 2021 ...	25
Tabel 7.4.1	Kebijakan Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang	53
Tabel 7.4.2	Komponen Biaya Perolehan	62
Tabel 7.5.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan - LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	96
Tabel 7.5.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	96
Tabel 7.5.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	97
Tabel 7.5.4	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	97
Tabel 7.5.5	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	98
Tabel 7.5.6	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	98

Tabel 7.5.7	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu - LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021 .	99
Tabel 7.5.8	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	99
Tabel 7.5.9	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	100
Tabel 7.5.10	Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	100
Tabel 7.5.11	Anggaran dan Realisasi Pendapatan JKN di FKTP Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	101
Tabel 7.5.12	Anggaran dan Realisasi Pendapatan JKN FKTP Non Kapitasi Per Puskesmas Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	101
Tabel 7.5.13	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang TA 2021	102
Tabel 7.5.14	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	102
Tabel 7.5.15	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA Dana Perimbangan – LRA Dana Bagi Hasil Pajak – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	103
Tabel 7.5.16	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA Dana Perimbangan – LRA Dana Bagi Hasil Pajak – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	103
Tabel 7.5.17	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA Dana Perimbangan – LRA Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	104
Tabel 7.5.18	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	104
Tabel 7.5.19	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	104
Tabel 7.5.20	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	105
Tabel 7.5.21	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	105
Tabel 7.5.22	Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	106
Tabel 7.5.23	Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	106
Tabel 7.5.24	Anggaran dan Realisasi Dana Desa – LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021.....	106

Tabel 7.5.25	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	107
Tabel 7.5.26	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	107
Tabel 7.5.27	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	107
Tabel 7.5.28	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	108
Tabel 7.5.29	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	108
Tabel 7.5.30	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	108
Tabel 7.5.31	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	108
Tabel 7.5.32	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	109
Tabel 7.5.33	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	109
Tabel 7.5.34	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	110
Tabel 7.5.35	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Jenis Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	111
Tabel 7.5.36	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	115
Tabel 7.5.37	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per jenis Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	116
Tabel 7.5.38	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	123
Tabel 7.5.39	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Perjenis Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	124
Tabel 7.5.40	Anggaran dan Realisasi Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	124
Tabel 7.5.41	Anggaran dan Realisasi Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	125
Tabel 7.5.42	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	125
Tabel 7.5.43	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	

Tabel 7.5.44	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	155
Tabel 7.5.45	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Koperasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	126
Tabel 7.5.46	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	141
Tabel 7.5.47	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Perusahaan Swasta Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	141
Tabel 7.5.48	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Yayasan/Lembaga/Organisasi Keagamaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	141
Tabel 7.5.49	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Yayasan/Lembaga/Organisasi Keagamaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	143
Tabel 7.5.50	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOP PAUD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	144
Tabel 7.5.51	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah BOP Penyelenggara Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	148
Tabel 7.5.52	Anggaran dan Realisasi Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	149
Tabel 7.5.53	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	149
Tabel 7.5.54	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	150
Tabel 7.5.55	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	150
Tabel 7.5.56	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	150
Tabel 7.5.57	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	151
Tabel 7.5.58	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	151
Tabel 7.5.59	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	151
Tabel 7.5.60	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	152
Tabel 7.5.61	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	153
Tabel 7.5.62	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	154

Tabel 7.5.63	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	155
Tabel 7.5.64	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	156
Tabel 7.5.65	Jaminan Pemeliharaan Kegiatan Fisik Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	156
Tabel 7.5.66	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	157
Tabel 7.5.67	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	157
Tabel 7.5.68	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	157
Tabel 7.5.69	Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	158
Tabel 7.5.70	Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Per Desa – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	158
Tabel 7.5.71	Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Per Desa – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	159
Tabel 7.5.72	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	160
Tabel 7.5.73	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	161
Tabel 7.5.74	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	161
Tabel 7.5.75	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	161
Tabel 7.5.76	Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	163
Tabel 7.5.77	Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	164
Tabel 7.5.78	Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	164
Tabel 7.5.79	Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	165
Tabel 7.5.80	Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	165
Tabel 7.5.81	Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	166
Tabel 7.5.82	Kas di Bendahara BLUD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	166
Tabel 7.5.83	Kas Dana BOS Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021 .	167

Tabel 7.5.84	Kas Dana BOS pada Kas Tunai dan Kas di Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	169
Tabel 7.5.85	Kas Dana BOS pada Kas Tunai Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	169
Tabel 7.5.86	Kas Dana BOS pada Kas di Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	170
Tabel 7.5.87	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	170
Tabel 7.5.88	Kas Dana BOS pada Kas Tunai dan Kas di Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	173
Tabel 7.5.89	Kas Dana BOS pada Kas Tunai Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	173
Tabel 7.5.90	Kas Dana BOS pada Kas di Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	173
Tabel 7.5.91	Setara Kas Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	173
Tabel 7.5.92	Piutang Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	174
Tabel 7.5.93	Mutasi Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	174
Tabel 7.5.94	Penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	174
Tabel 7.5.95	Piutang Pajak Setelah Penyisihan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	175
Tabel 7.5.96	Mutasi Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	175
Tabel 7.5.97	Penyisihan Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	176
Tabel 7.5.98	Piutang Retribusi Setelah Penyisihan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	176
Tabel 7.5.99	Mutasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	176
Tabel 7.5.100	Mutasi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	176
Tabel 7.5.101	Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	177
Tabel 7.5.102	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	177
Tabel 7.5.103	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Setelah Penyisihan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	178
Tabel 7.5.104	Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	178
Tabel 7.5.105	Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	179

Tabel 7.5.106	Mutasi Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	179
Tabel 7.5.107	Penyisihan Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	180
Tabel 7.5.108	Piutang Lainnya Setelah Penyisihan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	181
Tabel 7.5.109	Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	181
Tabel 7.5.110	Belanja Dibayar Dimuka Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	181
Tabel 7.5.111	Persediaan Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	182
Tabel 7.5.112	Mutasi Persediaan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	183
Tabel 7.5.113	Persediaan atau Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	185
Tabel 7.5.114	Persediaan Obat-obatan Dalam Kondisi Rusak dan Kadarluasa Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	186
Tabel 7.5.115	Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	210
Tabel 7.5.116	Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	211
Tabel 7.5.117	Mutasi Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	211
Tabel 7.5.118	Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Per Komoditi Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	212
Tabel 7.5.119	Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	212
Tabel 7.5.120	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	213
Tabel 7.5.121	Perhitungan Ekuitas PD BPR Bintang Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	213
Tabel 7.5.122	Perhitungan Ekuitas PT Bintang Inti Sukses Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	214
Tabel 7.5.123	Data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	214
Tabel 7.5.124	Rincian Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	215
Tabel 7.5.125	Data Mutasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	215
Tabel 7.5.126	Data Aset Tetap Tanah per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	217

Tabel 7.5.127	Data Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	219
Tabel 7.5.128	Data Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	219
Tabel 7.5.129	Data Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	230
Tabel 7.5.130	Data Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	231
Tabel 7.5.131	Data Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	236
Tabel 7.5.132	Data Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	237
Tabel 7.5.133	Data Mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	240
Tabel 7.5.134	Data Aset Tetap Lainnya Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	241
Tabel 7.5.135	Data Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	244
Tabel 7.5.136	Data Konstruksi Dalam Pengerjaan Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	244
Tabel 7.5.137	Data Mutasi Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	250
Tabel 7.5.138	Data Akumulasi Penyusutan Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	250
Tabel 7.5.139	Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021 ...	252
Tabel 7.5.140	Data Mutasi Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	252
Tabel 7.5.141	Data Aset Tidak Berwujud Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	253
Tabel 7.5.142	Data Aset Lain-Lain Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	255
Tabel 7.5.143	Data Akumulasi Amortisasi Tidak Berwujud per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	257
Tabel 7.5.144	Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	258
Tabel 7.5.145	Data Mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	259
Tabel 7.5.146	Data Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	259
Tabel 7.5.147	Data Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	259

Tabel 7.5.148	Data Mutasi Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	260
Tabel 7.5.149	Rincian Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	260
Tabel 7.5.150	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	260
Tabel 7.5.151	Utang Obat-obatan pada RSUD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	261
Tabel 7.5.152	Utang Bahan Medis pada RSUD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	265
Tabel 7.5.153	Utang Bahan Kimia pada RSUD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	267
Tabel 7.5.154	Utang Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	271
Tabel 7.5.155	Data Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	271
Tabel 7.5.156	Pendapatan Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	272
Tabel 7.5.157	Pendapatan Asli Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	273
Tabel 7.5.158	Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	273
Tabel 7.5.159	Rincian Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah LO dengan LRA Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	273
Tabel 7.5.160	Selisih Pendapatan Pajak Daerah LO dengan LRAPemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	274
Tabel 7.5.161	Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	274
Tabel 7.5.162	Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	275
Tabel 7.5.163	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	275
Tabel 7.5.164	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	275
Tabel 7.5.165	Rincian Perbedaan Pengakuan Pendapatan Retribusi Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	276
Tabel 7.5.166	Selisih Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	276
Tabel 7.5.167	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	276

Tabel 7.5.168	Rincian Perbedaan Pengakuan Akun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	276
Tabel 7.5.169	Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	277
Tabel 7.5.170	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	277
Tabel 7.5.171	Pendapatan Jasa Giro – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	278
Tabel 7.5.172	Pendapatan Bunga Deposito – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	285
Tabel 7.5.173	Pendapatan Denda Pajak – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	285
Tabel 7.5.174	Pendapatan Denda Retribusi – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	285
Tabel 7.5.175	Pendapatan dari Pengembalian – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	286
Tabel 7.5.176	Rincian Perbedaan Pengakuan Akun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	286
Tabel 7.5.177	Selisih Lain-Lain Pendapatan yang Sah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	286
Tabel 7.5.178	Pendapatan Transfer – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	287
Tabel 7.5.179	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	287
Tabel 7.5.180	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	287
Tabel 7.5.181	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	288
Tabel 7.5.182	Rincian Perbedaan Pengakuan Akun Pendapatan Transfer Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	288
Tabel 7.5.183	Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	288
Tabel 7.5.184	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	289
Tabel 7.5.185	Pendapatan Hibah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	289
Tabel 7.5.186	Pendapatan Hibah – LO per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	289

Tabel 7.5.187	Pendapatan Dana Darurat - LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	290
Tabel 7.5.188	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan - LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	290
Tabel 7.5.189	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan - LO Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	291
Tabel 7.5.190	Rincian Perbedaan Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	291
Tabel 7.5.191	Beban Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	291
Tabel 7.5.192	Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021 .	291
Tabel 7.5.193	Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021 .	292
Tabel 7.5.194	Beban Pegawai - LO Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	294
Tabel 7.5.195	Rincian Perbedaan Beban Pegawai Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	295
Tabel 7.5.196	Beban Persediaan - LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	295
Tabel 7.5.197	Beban Persediaan – LO Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	297
Tabel 7.5.198	Beban Jasa - LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	299
Tabel 7.5.199	Beban Jasa – LO Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	302
Tabel 7.5.200	Beban Pemeliharaan - LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	303
Tabel 7.5.201	Beban Pemeliharaan – LO Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	307
Tabel 7.5.202	Beban Perjalanan Dinas - LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	308
Tabel 7.5.203	Beban Perjalanan Dinas Per OPD – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	308
Tabel 7.5.204	Rincian Perbedaan Beban Barang dan Jasa Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	309
Tabel 7.5.205	Selisih Belanja Barang dan Jasa LRA dan Beban Barang dan Jasa LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	310
Tabel 7.5.206	Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	310
Tabel 7.5.207	Beban Hibah Per Jenis Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	311

Tabel 7.5.208	Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	311
Tabel 7.5.209	Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	312
Tabel 7.5.210	Beban Hibah Uang Kepada Perusahaan Daerah / BUMD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	312
Tabel 7.5.211	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	312
Tabel 7.5.212	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	312
Tabel 7.5.213	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	312
Tabel 7.5.214	Beban Hibah Kepada Koperasi Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	313
Tabel 7.5.215	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	313
Tabel 7.5.216	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	313
Tabel 7.5.217	Rincian Perbedaan Beban Hibah Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	314
Tabel 7.5.218	Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	314
Tabel 7.5.219	Beban Bantuan Sosial Berdasarkan Jenisnya Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	314
Tabel 7.5.220	Rincian Perbedaan Beban Bantuan Sosial Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	314
Tabel 7.5.221	Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	314
Tabel 7.5.222	Beban Lain-Lain Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	315
Tabel 7.5.223	Beban Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	316
Tabel 7.5.224	Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	317
Tabel 7.5.225	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	317
Tabel 7.5.226	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021	318

Tabel 7.5.227	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	318
Tabel 7.5.228	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	319
Tabel 7.5.229	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	320
Tabel 7.5.230	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	320
Tabel 7.5.231	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	321
Tabel 7.5.232	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	321
Tabel 7.5.233	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	321
Tabel 7.5.234	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	322
Tabel 7.5.235	Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021 .	322
Tabel 7.5.236	Beban Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	322
Tabel 7.5.237	Defisit Non Operasional Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	322
Tabel 7.5.238	Defisit Non Operasional Penghapusan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	323
Tabel 7.5.239	Beban Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	324
Tabel 7.5.240	Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	324
Tabel 7.5.241	Arus Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	324
Tabel 7.5.242	Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	325
Tabel 7.5.243	Pendapatan Retribusi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	325
Tabel 7.5.244	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	326
Tabel 7.5.245	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	326
Tabel 7.5.246	Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	327
Tabel 7.5.247	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	327
Tabel 7.5.248	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	327
Tabel 7.5.249	Arus Kas Keluar Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	328

Tabel 7.5.250	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	329
Tabel 7.5.251	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	329
Tabel 7.5.252	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	330
Tabel 7.5.253	Arus Kas Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	330
Tabel 7.5.254	Rincian Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	330
Tabel 7.5.255	Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021 ...	332
Tabel 7.5.256	Surplus/Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	332
Tabel 7.5.257	Koreksi Ekuitas Lain-lain Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	332
Tabel 7.5.258	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	333
Tabel 7.5.259	Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021 ...	334
Tabel 7.6.1	Data Bencana yang terjadi di Kabupaten Bintan Tahun 2021	340
Tabel 7.6.2	Data Anggaran dan Realisasi Dana Desa APBD dan APBN Kabupaten Bintan Tahun 2021	350
Tabel 7.6.3	Kewajiban Perpajakan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021	352

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Grafik Perkembangan Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021	10
Gambar 2 PDRB atas harga berlaku menurut pengeluaran 2015-2019	14

Ringkasan Eksekutif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas antara lain menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud adalah Laporan Keuangan yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Dengan demikian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan / atau barang pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2021 ini telah disusun berdasarkan Laporan Keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2021 setelah perubahan beserta realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.105.990.844.796,92 atau 102,63% dari anggaran sebesar Rp1.077.644.954.892,00 dan Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.117.324.585.307,31 atau 91,20% dari anggaran sebesar Rp1.255.133.748.261,68.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

) Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 149.088.793.369,68
) Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(Rp. 149.088.793.369,68)
) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 136.160.052.859,29
) Koreksi Kesalahan Pembukuan	Rp. 0,00
) Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 136.160.052.859,29

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi / entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

) Aset	Rp. 2.419.336.077.314,71
) Kewajiban	Rp. 5.523.615.961,99
) Ekuitas	Rp. 2.413.336.077.314,71

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

)	Jumlah Pendapatan – LO	Rp.1.068.229.542.386,51
)	Jumlah Beban – LO	Rp.1.085.651.703.687,57
)	Jumlah Surplus/Defisit - LO	(Rp. 133.330.340.710,06)

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasi berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset untuk keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

Informasi tentang Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bintan periode 1 Januari s/d Desember 2021 adalah sebagai berikut :

)	Saldo awal kas per 1 Januari tahun 2021	Rp.	149.088.793.369,68
)	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	138.084.607.314,94
)	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp.	151.013.347.825,33)
)	Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
)	Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	619.117.499,80
)	Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2021	Rp.	136.779.170.359,09

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Ekuitas pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.413.812.461.352,72.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar Penyusunan Laporan Keuangan, Kebijakan Akuntansi dan Informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja diakui berdasarkan basis kas yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah (KUD).



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

No Urut	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021 (AUDITED)	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	7.5.1.1				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	7.5.1.1.1				
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	7.5.1.1.1.1)	144.285.785.000,00	130.059.598.323,77	90,14	107.816.743.354,99
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah	7.5.1.1.1.2)	8.567.875.000,00	7.601.797.691,00	88,72	7.761.066.224,00
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.5.1.1.1.3)	10.477.231.219,00	11.411.312.907,00	108,92	8.959.879.482,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	7.5.1.1.1.4)	36.553.168.343,00	46.673.165.663,15	127,69	41.214.839.776,46
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		199.884.059.562,00	195.745.874.584,92	97,93	165.752.528.837,45
1.2	Pendapatan Transfer	7.5.1.1.2				
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	7.5.1.1.2.1)				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	7.5.1.1.2.1.1)	57.097.237.576,00	98.171.066.468,00	171,94	-
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.1.1.2.1.1.1)	-	-	-	23.975.591.557,00
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	7.5.1.1.2.1.1.2)	-	-	-	169.766.679.316,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	7.5.1.1.2.1.2)	476.841.183.000,00	476.841.183.000,00	100,00	486.117.569.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	7.5.1.1.2.1.3)	-	-	-	141.719.060.458,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus - Fisik	7.5.1.1.2.1.4)	98.679.016.000,00	90.479.520.346,00	91,69	-
1.2.1.5	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	7.5.1.1.2.1.5)	62.011.394.000,00	56.162.194.000,00	90,57	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		694.628.830.576,00	721.653.963.814,00	103,89	821.578.900.331,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	7.5.1.1.2.2)				
	Dana Penyesuaian		-	-	-	87.599.059.000,00
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	7.5.1.1.2.2.1)	44.420.166.000,00	44.420.166.000,00	100,00	-
1.2.2.2	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
1.2.2.3	Dana Keistimewaan		-	-	-	-
1.2.2.4	Dana Desa	7.5.1.1.2.2.2)	40.708.009.000,00	40.186.161.200,00	98,72	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		85.128.175.000,00	84.606.327.200,00	99,39	87.599.059.000,00
1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.5.1.1.2.3)				
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	7.5.1.1.2.3.1)	68.746.363.754,00	63.898.047.803,00	92,95	61.807.106.031,00
1.2.3.2	Bantuan Keuangan		-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		68.746.363.754,00	63.898.047.803,00	92,95	61.807.106.031,00
	Total Pendapatan Transfer		848.503.369.330,00	870.158.338.817,00	102,55	970.985.065.362,00
1.3	Lain-lainnya Pendapatan Daerah yang Sah	7.5.1.1.3				
1.3.1	Pendapatan Hibah	7.5.1.1.3.1)	-	-	-	68.889.521.687,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan lainnya	7.5.1.1.3.3)	29.257.526.000,00	40.086.631.395,00	137,01	500.000.000,00
	Jumlah Lain-lainnya Pendapatan Daerah yang Sah		29.257.526.000,00	40.086.631.395,00	137,01	69.389.521.687,00
	JUMLAH PENDAPATAN		1.077.644.954.892,00	1.105.990.844.796,92	102,63	1.206.127.115.886,45
2	Belanja	7.5.1.2				
2.1	Belanja Operasi	7.5.1.2.1				
2.1.1	Belanja pegawai	7.5.1.2.1.1)	505.700.609.688,68	476.609.153.074,00	94,25	571.093.939.534,00
2.1.2	Belanja barang	7.5.1.2.1.2)	381.489.167.191,00	327.840.463.570,98	85,94	257.761.202.728,82
2.1.3	Belanja bunga		-	-	-	-
2.1.4	Belanja subsidi		-	-	-	-
2.1.5	Belanja hibah	7.5.1.2.1.3)	48.816.713.755,00	45.560.989.228,00	93,33	57.292.591.880,00
2.1.6	Belanja bantuan sosial	7.5.1.2.1.4)	4.080.000.000,00	3.939.600.000,00	96,56	5.530.925.108,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	7.5.1.2.1.5)	-	-	-	109.107.128.560,00
	Jumlah Belanja Operasi		940.086.490.634,68	853.950.205.872,98	90,84	1.000.785.787.810,82

No Urut	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2021 (AUDITED)	%	REALISASI 2020
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Belanja Modal	7.5.1.2.2				
2.2.1	Belanja tanah	7.5.1.2.2.1)	6.416.283.204,00	994.839.115,00	15,50	228.080.000,00
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	7.5.1.2.2.2)	42.791.731.754,00	39.826.077.526,00	93,07	55.685.195.183,00
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	7.5.1.2.2.3)	68.527.121.372,00	63.060.135.647,33	92,02	88.506.594.506,42
2.2.4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	7.5.1.2.2.4)	45.989.192.144,00	43.580.037.497,00	94,76	41.930.206.113,00
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	7.5.1.2.2.5)	2.327.608.206,00	1.954.288.040,00	83,96	5.634.208.496,00
2.2.6	Belanja aset lainnya	7.5.1.2.2.6)	3.000.000,00	2.970.000,00	99,00	99.979.000,00
	Jumlah Belanja Modal		166.054.936.680,00	149.418.347.825,33	89,98	192.084.263.298,42
2.3	Belanja Tak Terduga	7.5.1.2.3)				
2.3.1	Belanja Tak Terduga	7.5.1.2.3)	10.189.062.247,00	5.674.118.343,00	55,69	68.340.725.092,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga		10.189.062.247,00	5.674.118.343,00	55,69	68.340.725.092,00
2.4	Belanja Transfer	7.5.1.2.4)				
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	7.5.1.2.4.1)	15.285.366.000,00	15.285.365.800,00	100,00	
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota					-
2.4.3	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota Daerah Provinsi					
2.4.4	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	7.5.1.2.4.2)	93.517.892.700,00	92.996.547.466,00	99,44	-
	Jumlah Belanja Transfer		108.803.258.700,00	108.281.913.266,00	99,52	-
	JUMLAH BELANJA		1.225.133.748.261,68	1.117.324.585.307,31	91,20	1.261.210.776.201,24
	SURPLUS/DEFISIT		(147.488.793.369,68)	(11.333.740.510,39)	7,68	(55.083.660.314,79)
3	Pembiayaan	7.5.1.3				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	7.5.1.3.1)	149.088.793.369,68	149.093.793.369,68	100,00	206.172.453.684,47
3.1.1	Penggunaan SilPA	7.5.1.3.1)	149.088.793.369,68	149.088.793.369,68	100,00	206.170.203.684,47
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	7.5.1.3.1)	-	5.000.000,00	100,00	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya		-	-	-	-
3.1.7	Pengembalian Pokok Dana Bergulir					2.250.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		149.088.793.369,68	149.093.793.369,68	100,00	206.172.453.684,47
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	7.5.1.3.2)	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
3.2.1	Pembentukan dana cadangan		-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.1.3.2)	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pinjaman Daerah		-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		-	-	-	-
	Jumlah		1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto		147.488.793.369,68	147.493.793.369,68	100,00	204.172.453.684,47
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	7.5.1.4	-	136.160.052.859,29	-	149.088.793.369,68

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	2021	2020
1	2	3		5
	PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	7.5.2		
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1)	149.088.793.369,68	206.170.203.684,47
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2.2)	(149.088.793.369,68)	(206.170.203.684,47)
3	Sub Total		-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	7.5.2.3)	136.160.052.859,29	149.088.013.369,68
5	Sub Total		136.160.052.859,29	149.088.013.369,68
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	7.5.2.4)	-	-
8	Lain-Lain	7.5.2.5)	-	780.000,00
9	Saldo Anggaran Lebih Akhir	7.5.2.6)	136.160.052.859,29	149.088.793.369,68

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

3. NERACA DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
NERACA DAERAH
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REF KALK	Tahun 2021	TAHUN 2020
1	2	3		5
1	ASET			
2	ASET LANCAR	7.5.3.1		
3	Kas dan Setara Kas	7.5.3.1.1		
4	Kas di Kas Daerah	7.5.3.1.1.1)	122.218.026.235,56	123.600.348.361,17
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.1.1.2)	983.581,00	55.596,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.1.1.3)	-	100.000,00
7	Kas di BLUD	7.5.3.1.1.4)	12.940.786.698,47	6.130.190.418,47
8	Kas Dana BOS	7.5.3.1.1.5)	1.619.373.844,06	-
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		-	-
10	Kas Lainnya	7.5.3.1.1.6)	4.363.160,00	3.358.098.994,04
11	Setara Kas	7.5.3.1.1.7)	-	16.000.000.000,00
12	Investasi Jangka Pendek	7.5.3.1.2	-	-
13	Piutang Pajak	7.5.3.1.3.1	63.083.751.216,98	101.494.870.380,12
14	Penyisihan Piutang Pajak		(35.854.338.761,98)	(32.896.198.250,91)
15	Piutang Pajak Netto		27.229.412.455,00	68.598.672.129,21
16	Piutang Retribusi	7.5.3.1.3.2	392.270.333,00	432.869.243,00
17	Penyisihan Piutang Retribusi		(246.297.432,80)	(244.915.047,80)
18	Piutang Retribusi Netto		145.972.900,20	187.954.195,20
19	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	7.5.3.1.3.3	-	1.353.407.486,00
20	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	(1.155.377.612,81)
21	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	198.029.873,19
22	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	7.5.3.1.3.4	-	48.513.271,00
23	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		-	(2.110.863,19)
24	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto		-	46.402.407,81
25	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
26	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
27	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto		-	-
28	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	7.5.3.1.3.5	24.555.303.202,18	-
29	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		(15.921.193.565,87)	-
30	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto		8.634.109.636,31	-
31	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	7.5.3.1.3.6	-	-
32	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
33	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto		-	-
34	Piutang Transfer Antar Daerah	7.5.3.1.3.7	19.731.542.871,00	-
35	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah		-	-
36	Piutang Transfer Antar Daerah Netto		19.731.542.871,00	-
37	Piutang Lainnya	7.5.3.1.3.8	1.385.324.876,00	49.446.920.652,15
38	Penyisihan Piutang Lainnya		(1.183.928.729,88)	(14.728.097.556,63)
39	Piutang Lainnya Netto		201.396.146,12	34.718.823.095,52
40	Penyisihan Piutang	7.5.3.1.3.9	-	-
41	Beban Dibayar Dimuka	7.5.3.1.4	165.587.500,00	151.191.666,67
42	Persediaan	7.5.3.1.5	27.806.798.242,99	15.377.338.182,88
43	Jumlah Aset Lancar		220.698.353.270,71	268.367.204.920,16
44				
45	Investasi Jangka Panjang	7.5.3.2		
46	Investasi Non Permanen	7.5.3.2.1		
47	Investasi kepada BUMN		-	-
48	Investasi kepada BUMD		-	-
49	Investasi dalam Obligasi		-	-
50	Investasi dalam Proyek pembangunan		-	-
51	Dana Bergulir	7.5.3.2.1	3.364.367.000,00	3.369.967.000,00
52	Penyisihan Dana Bergulir	7.5.3.2.1	(3.364.367.000,00)	(3.369.967.000,00)
53	Jumlah Investasi Non Permanen		-	-
54	Investasi Permanen	7.5.3.2.2		
55	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.3.2.2.1	96.104.697.867,00	94.427.683.548,00
56	Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
57	Jumlah Investasi Permanen	7.5.3.2.2.1	96.104.697.867,00	94.427.683.548,00
58	Jumlah Investasi Jangka Panjang		96.104.697.867,00	94.427.683.548,00

No	URAIAN	REF KALK	Tahun 2021	TAHUN 2020
1	2	3		5
59				
60	ASET TETAP	7.5.3.3		
61	Tanah	7.5.3.3.1)	355.655.756.211,00	392.824.023.082,00
62	Peralatan dan Mesin	7.5.3.3.2)	544.776.914.253,00	501.997.357.528,00
63	Gedung dan Bangunan	7.5.3.3.3)	1.154.776.066.415,00	1.119.479.111.686,00
64	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.3.3.4)	1.613.799.500.522,00	1.554.550.989.816,00
65	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.3.5)	53.635.440.194,00	51.866.183.575,00
66	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.3.3.6)	31.785.134.272,00	31.622.021.272,00
67	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.3.7)	(1.665.222.704.151,00)	(1.521.452.865.812,00)
68	Jumlah Aset Tetap		2.089.206.107.716,00	2.130.886.821.147,00
69				
70	DANA CADANGAN			
71	Dana Cadangan		-	-
72	Jumlah Dana Cadangan		-	-
73				
74	ASET LAINNYA	7.5.3.4		
75	Tagihan Jangka Panjang			
77	Tagihan Penjualan Angsuran	7.5.3.4.1	539.716.145,00	701.938.025,00
78	Tuntutan Ganti Rugi	7.5.3.4.2	-	-
79	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.5.3.4.3	75.289.420,00	-
80	Aset Tak Berwujud	7.5.3.4.4	6.425.835.400,00	6.282.835.400,00
81	Aset Lain-lain	7.5.3.4.5	11.286.473.755,00	69.006.947.904,00
82	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.5.3.4.6	(4.997.669.284,00)	(4.798.897.571,00)
83	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		-	-
84	Jumlah Aset Lainnya		13.329.645.436,00	71.192.823.758,00
85				
86	JUMLAH ASET		2.419.338.804.289,71	2.564.874.533.373,16
87	KEWAJIBAN	7.5.3.5		
88	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.3.5.1		
89	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	7.5.3.5.1.1)	619.117.500,00	-
90	Utang Bunga		-	-
91	Utang Pinjaman Jangka Pendek		-	-
92	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
93	Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.3.5.1.2)	816.080.706,56	1.527.476.395,41
94	Utang Belanja	7.5.3.5.1.3)	4.008.765.175,43	3.368.897.812,00
95	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.5.1.4)	79.652.580,00	7.952.914.532,00
96	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		5.523.615.961,99	12.849.288.739,41
97				
98	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.5.3.5.2		
99	Utang kepada Pemerintah Pusat		-	-
100	Utang kepada Lembaga Keuangan BANK		-	-
101	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan BANK		-	-
102	Utang kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-
103	Premium (Diskonto) Obligasi		-	-
104	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
105	JUMLAH KEWAJIBAN		5.523.615.961,99	12.849.288.739,41
106				
107	EKUITAS			
108	JUMLAH EKUITAS	7.5.3.6	2.413.815.188.327,72	2.552.025.244.633,75
109	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.419.338.804.289,71	2.564.874.533.373,16

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	2	3		5	6	7
7	PENDAPATAN - LO	7.5.4.1				
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	7.5.4.1.1				
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	7.5.4.1.1.1	91.687.960.182,63	120.569.011.140,58	(28.881.050.957,95)	(23,95)
7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	7.5.4.1.1.2	8.230.457.748,33	6.924.634.690,00	1.305.823.058,33	18,86
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	7.5.4.1.1.3	11.687.932.218,00	10.871.381.102,00	816.551.116,00	7,51
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	7.5.4.1.1.4	44.123.918.368,55	41.979.492.619,44	2.144.425.749,11	5,11
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		155.730.268.517,51	180.344.519.552,02	(24.614.251.034,51)	(13,65)
7.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	7.5.4.1.2				
7.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	7.5.4.1.2.1				
7.2.1.1	Dana Bagi Hasil	7.5.4.1.2.1	95.825.732.510,00	-	95.825.732.510,00	-
7.2.1.2	Dana Alokasi Umum	7.5.4.1.2.1	476.841.183.000,00	-	476.841.183.000,00	-
7.2.1.3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	7.5.4.1.2.1	90.479.520.346,00	-	90.479.520.346,00	-
7.2.1.4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	7.5.4.1.2.1	56.162.194.000,00	-	56.162.194.000,00	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		719.308.629.856,00	722.155.163.785,00	719.308.629.856,00	(0,39)
7.2.2	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	7.5.4.1.2.2				
7.2.2.1	Dana Insentif Daerah	7.5.4.1.2.2	44.420.166.000,00	-	44.420.166.000,00	-
7.2.2.2	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
7.2.2.3	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-
7.2.2.4	Dana Desa	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		44.420.166.000,00	48.435.489.000,00	44.420.166.000,00	(8,29)
7.2.3	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	7.5.4.1.2.3				
7.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	7.5.4.1.2.3	69.620.460.903,00	-	69.620.460.903,00	-
7.2.3.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		69.620.460.903,00	57.202.425.095,00	69.620.460.903,00	21,71
	Total Pendapatan Transfer		833.349.256.759,00	827.793.077.880,00	833.349.256.759,00	0,67
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	7.5.4.1.3				
7.3.1	Pendapatan Hibah - LO	7.5.4.1.3.1	39.063.385.715,00	69.429.415.687,00	(30.366.029.972,00)	(43,74)
7.3.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - LO	-	-	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(100,00)
7.3.3	Pendapatan Dana Darurat - LO	7.5.4.1.3.2	-	-	-	-
7.3.4	Pendapatan Lainnya	7.5.4.1.3.3	40.086.631.395,00	-	40.086.631.395,00	-
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		79.150.017.110,00	69.929.415.687,00	9.220.601.423,00	13,19
	JUMLAH PENDAPATAN		1.068.229.542.386,51	1.078.067.013.119,02	817.955.607.147,49	(0,91)
8	BEBAN	7.5.4.2				
8.1	BEBAN OPERASI	7.5.4.2.1				
8.1.1	Beban Pegawai - LO	7.5.4.2.1.1	476.609.153.074,00	572.331.639.534,00	(95.722.486.460)	(16,73)
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
	Beban Persediaan	7.5.4.2.1.2	87.788.776.317,85	63.416.991.653,99	24.371.784.664	38,43
	Beban Jasa	7.5.4.2.1.3	183.530.430.162,12	105.269.802.790,25	78.260.627.372	74,34
	Beban Pemeliharaan	7.5.4.2.1.4	19.537.376.812,00	20.295.933.396,00	(758.556.584)	(3,74)
	Beban Perjalanan Dinas	7.5.4.2.1.5	24.922.899.828,00	42.099.547.913,00	(17.176.648.085)	(40,80)
8.1.3	Beban Bunga-LO	-	-	-	-	-
8.1.4	Beban Subsidi-LO	-	-	-	-	-
8.1.5	Beban Hibah-LO	7.5.4.2.1.6	48.297.301.381,00	88.125.075.325,00	(39.827.773.944)	(45,19)
8.1.6	Beban Bantuan Sosial-LO	7.5.4.2.1.7	3.939.600.000,00	56.523.325.108,00	(52.583.725.108)	(93,03)
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	7.5.4.2.1.8	4.173.489.948,07	7.949.506.515,79	(3.776.016.568)	(47,50)
8.1.8	Beban Lain-Lain	7.5.4.2.1.9	3.734.119.468,53	3.393.908.548,42	340.210.920	10,02
	Jumlah Beban Operasi		852.533.146.991,57	959.405.730.784,45	(106.872.583.792,88)	(11,14)
8.2	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	7.5.4.2.2				
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.5.4.2.2.1	50.123.805.027,00	42.675.464.014,00	7.448.341.013	17,45
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.5.4.2.2.2	32.454.466.514,00	24.386.845.473,00	8.067.621.041	33,08
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.4.2.2.3	73.402.803.881,00	71.768.476.934,00	1.634.326.947	2,28
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.5.4.2.2.4	3.166.112.177,00	3.453.940.557,00	(287.828.380)	(8,33)
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-	-
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.5.4.2.2.5	198.771.713,00	260.262.514,00	(61.490.801)	(23,63)
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		159.345.959.312,00	142.544.989.492,00	16.800.969.820,00	11,79
8.3	BEBAN TRANSFER	7.5.4.2.3				
8.3.1	Beban Bagi Hasil	7.5.4.2.3	15.285.365.800,00	-	15.285.365.800	-
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	7.5.4.2.3	52.810.386.266,00	-	52.810.386.266	-
	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	69.943.558.560,00	(69.943.558.560)	(100,00)
	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	2.000.000.000,00	(2.000.000.000)	(100,00)
	Jumlah Beban Transfer		68.095.752.066,00	71.943.558.560,00	(3.847.806.494,00)	(5,35)
8.4	BEBAN TAK TERDUGA	7.5.4.2.4				
8.4.1	Beban Tak Terduga	7.5.4.2.4	5.674.118.343,00	-	5.674.118.343	-
	Jumlah Beban Tak Terduga		5.674.118.343,00	-	5.674.118.343,00	-
	JUMLAH BEBAN		1.085.648.976.712,57	1.173.894.278.836,45	(88.245.302.123,88)	(7,52)
	SURPLUR/DEFISIT DARI OPERASI		(17.419.434.326,06)	(95.827.265.717,43)	906.200.909.271,37	(81,82)

NO	URAIAN	REFF CALK	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	2	3		5	6	7
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	7.5.4.2.5				
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL					
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar		-	-	-	-
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
7.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	-
	Jumlah Surplus Non Operasional		-	-	-	-
8.5	DEFISIT NON OPERASIONAL	7.5.4.2.6				
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	7.5.4.2.6	115.908.179.409,00	94.313.861.948,00	21.594.317.461	22,90
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
8.5.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	-
	Jumlah Defisit Non Operasional		115.908.179.409,00	94.313.861.948,00	21.594.317.461,00	22,90
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(115.908.179.409,00)	(94.313.861.948,00)	(21.594.317.461,00)	22,90
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(133.327.613.735,06)	(190.141.127.665,43)	884.606.591.810,37	(29,88)
	POS LUAR BIASA					
7.5	PENDAPATAN LUAR BIASA					
7.5.1	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
8.6	BEBAN LUAR BIASA	7.5.4.2.7				
8.6.1	Beban Luar Biasa-LO	7.5.4.2.7	-	2.959.000.570,00	(2.959.000.570,00)	(100,00)
	Jumlah Beban Luar Biasa		-	2.959.000.570,00	(2.959.000.570,00)	(100,00)
	POS LUAR BIASA		-	(2.959.000.570,00)	2.959.000.570,00	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT LO	7.5.4.3	(133.327.613.735,06)	(193.100.128.235,43)	887.565.592.380,37	(30,95)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	2021	2020
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	7.5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	7.5.5.1.1.1	130.059.598.323,77	107.816.743.354,99
4	Penerimaan Retribusi Daerah	7.5.5.1.1.2	7.601.797.691,00	7.760.966.224,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.5.1.1.3	11.411.312.907,00	8.959.879.482,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	7.5.5.1.1.4	46.673.165.663,15	53.612.647.311,46
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	7.5.5.1.1.5	98.171.066.468,00	193.742.270.873,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	7.5.5.1.1.6	476.841.183.000,00	486.117.569.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	7.5.5.1.1.7.1	90.479.520.346,00	82.333.109.139,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	7.5.5.1.1.7.2	56.162.194.000,00	59.385.951.319,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	7.5.5.1.1.8	44.420.166.000,00	48.435.489.000,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
13	Penerimaan Dana Keistimewaan		-	-
14	Penerimaan Dana Desa		-	-
15	Penerimaan Dana Bagi Hasil Dari Provinsi	7.5.5.1.1.9	63.898.047.803,00	61.807.106.031,00
16	Penerimaan Bantuan Keuangan	7.5.5.1.1.10	-	500.000.000,00
17	Penerimaan Hibah	7.5.5.1.1.11	-	56.599.313.213,00
18	Penerimaan Dana Darurat		-	-
19	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	7.5.5.1.1.12	40.086.631.395,00	
20	Jumlah Arus Masuk Kas		1.065.804.683.596,92	1.167.071.044.947,45
21	Arus Keluar Kas:	7.5.5.1.2		
22	Pembayaran Pegawai	7.5.5.1.2	476.580.386.274,00	571.093.939.534,00
23	Pembayaran Barang	7.5.5.1.2	327.869.230.370,98	257.761.202.728,82
24	Pembayaran Bunga		-	-
25	Pembayaran Subsidi		-	-
26	Pembayaran Belanja Hibah	7.5.5.1.2	45.560.989.228,00	57.292.591.880,00
27	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	7.5.5.1.2	3.939.600.000,00	5.530.925.108,00
28	Pembayaran Tak Terduga	7.5.5.1.2	5.674.118.343,00	68.340.725.092,00
29	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/kota	7.5.5.1.2	15.285.365.800,00	-
30	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Daerah Provinsi		-	-
31	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	7.5.5.1.2	52.810.386.266,00	69.943.558.560,00
32	Jumlah Arus Keluar Kas		927.720.076.281,98	1.029.962.942.902,82
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		138.084.607.314,94	137.108.102.044,63
34	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	7.5.5.2		
35	Arus Masuk Kas	7.5.5.2.1		
36	Pencairan Dana Cadangan			
37	Penjualan atas Tanah		-	-
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
41	Penjualan Aset Tetap		-	-
42	Penjualan Aset Lainnya		-	-
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	7.5.5.2.1	5.000.000,00	2.250.000,00
45	Jumlah Arus Masuk Kas		5.000.000,00	2.250.000,00

NO	URAIAN	REFE CALK	2021	2020
46	Arus Keluar Kas	7.5.5.2.2		
47	Pembentukan Dana Cadangan			
48	Perolehan Tanah	7.5.5.2.2	994.839.115,00	228.080.000,00
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	7.5.5.2.2	39.826.077.526,00	55.793.587.959,00
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	7.5.5.2.2	63.060.135.647,33	88.506.594.506,42
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.5.2.2	43.580.037.497,00	41.930.206.113,00
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.2.2	1.954.288.040,00	5.634.208.496,00
53	Perolehan Aset Lainnya	7.5.5.2.2	2.970.000,00	99.979.000,00
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.5.2.2	1.600.000.000,00	2.000.000.000,00
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen			
56	Jumlah Arus Keluar Kas		151.018.347.825,33	194.192.656.074,42
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(151.013.347.825,33)	(194.190.406.074,42)
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	7.5.5.3		
59	Arus Masuk Kas			
60	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		-	-
61	Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
62	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		-	-
63	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
64	Penerimaan Pinjaman Daerah - masyarakat (Obligasi Daerah)		-	-
65	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah		-	-
66	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
67	Arus Keluar Kas :		-	-
68	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		-	-
69	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		-	-
70	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		-	-
71	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
72	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi daerah)		-	-
73	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
74	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
75	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
76	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.4		
77	Arus Masuk Kas	7.5.5.4.1		
78	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.5.4.1	62.989.317.921,80	62.309.991.419,00
79	Jumlah Arus Masuk Kas		62.989.317.921,80	62.309.991.419,00
80	Arus Keluar Kas	7.5.5.4.2		
81	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.5.4.2	62.370.200.422,00	62.309.991.869,00
82	Jumlah Arus Keluar Kas		62.370.200.422,00	62.309.991.869,00
83	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		619.117.499,80	(450,00)
84	Kenaikan/penurunan Kas		(12.309.623.010,59)	(57.082.304.479,79)
85	Saldo Awal Kas	7.5.5.5	149.088.793.369,68	206.170.204.134,47
86	Saldo Akhir Kas	7.5.5.5	136.779.170.359,09	149.088.793.369,68

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALC	2021	2020
1	2	4		6
1	PERUBAHAN EKUITAS	7.5.6		
2	EKUITAS AWAL	7.5.6.1)	2.552.025.244.633,75	2.709.676.257.111,53
3	SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.6.2)	(133.327.613.735,06)	(193.100.128.235,43)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	7.5.6.3)		
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)			
	Koreksi Nilai Persediaan		-	(693.628.522,00)
	Selisih Revaluasi Tanah		-	38.700.029.551,00
	Selisih Revaluasi Gedung dan Bangunan			4.764.714.860,00
	Selisih Revaluasi Ekstrakompatabel			(197.921.546,00)
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			(6.642.952.341,00)
	Koreksi Piutang Pajak			(90.080.890,60)
	Koreksi Piutang Lainnya			(160.751.596,12)
	Koreksi Bagian Lancar TPTGR			(6.645.175,00)
	Koreksi Ekuitas Lainnya			(709.458.329,64)
	Koreksi atas Nilai Aset Tetap Tahun Sebelumnya			485.809.747,00
	Lain - lain		(4.882.442.570,97)	-
5	EKUITAS AKHIR	7.5.6.4)	2.413.815.188.327,72	2.552.025.244.633,75

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 PENDAHULUAN

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1) Maksud

Maksud Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021 disajikan dalam rangka pertanggung jawaban pengelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

2) Tujuan

Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021 adalah memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendapat informasi seluas-luasnya tentang keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Landasan hukum penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
24. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 4);



26. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Bintan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan tahun anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 76);
28. Peraturan Bupati Bintan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 79);
29. Peraturan Bupati Bintan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bintan tahun anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 43).

7.1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) adalah sebagai berikut.

7.1. PENDAHULUAN

- 7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

7.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET PERDA APBD

- 7.2.1 Ekonomi Makro
- 7.2.2 Kebijakan Keuangan
- 7.2.3 Indikator Pencapaian target kinerja APBD

7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Daerah
- 7.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

7.4 DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN

- 7.4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



7.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah Daerah.

7.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1 Laporan Realisasi Anggaran

7.5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

7.5.3 Neraca

7.5.4 Laporan Operasional

7.5.5 Laporan Arus Kas

7.5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

7.6. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

7.6.1 Kondisi Geografis dan Perangkat Daerah

7.6.2 Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

7.6.3 Pembinaan Batas Wilayah

7.6.4 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

7.6.5 Pengelolaan Kawasan Khusus

7.6.6 Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

7.6.7 Penyelenggaraan Pembinaan Keuangan Desa

7.6.8 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

7.7. PENUTUP



7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

7.2.1 Ekonomi Makro

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2021 memperhatikan gambaran ekonomi Kabupaten Bintan Tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya.

7.2.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Bintan

Kondisi ekonomi makro di Kabupaten Bintan ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi global dan nasional dimana pada tahun 2021 perekonomian dirasakan kurang baik dikarenakan penyebabnya, tak lain akibat dampak pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19). Kondisi perekonomian Kabupaten Bintan pada tahun 2021 masih mengalami hambatan pertumbuhannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2021 tercatat masih tumbuh di zona negatif. Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat perekonomian Indonesia di tiga bulan pertama tahun ini tumbuh -0,74% secara tahunan (year on year/yoy)

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat Rp3.969,1 triliun. sedangkan PDB atas dasar harga konstan tercatat Rp2.683,1 triliun. Dengan begitu, ekonomi Indonesia pada triwulan I 2021 masih mengalami kontraksi 0,74% yoy, dan secara kuartalan turun 0,96% q to q (quarter to quarter). Kendati tumbuh di zona negatif, ekonomi Indonesia konsisten menunjukkan pemulihan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional sejak mengalami penurunan terdalam di triwulan II 2020. Pada triwulan II 2020 ekonomi Indonesia tercatat tumbuh -5,32% (yoy), naik perlahan di triwulan III 2020 (yoy) menjadi -3,49%, dan di triwulan IV 2020 menjadi -2,19%. “Ini menunjukkan tanda pemulihan ekonomi akan semakin nyata dan tentu kita berharap ke depan pemulihan ekonomi terjadi di akhir Tahun 2021 betul-betul bisa terwujud. Berdasarkan catatan BPS, ada enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif pada triwulan I 2021, yakni, informasi dan komunikasi (8,72%), pengadaan air (5,49%), jasa kesehatan (3,64%), pertanian (2,95%), pengadaan listrik dan gas (1,68%) dan real estate (0,94%). Sedangkan 11 lapangan usaha tercatat masih mengalami pertumbuhan negatif, yakni, konstruksi (-0,79%), perdagangan (-1,23%), industri (-1,38%), jasa pendidikan (-1,61%), pertambangan (-2,02%), administrasi pemerintahan (-2,94%), jasa keuangan (-2,99%), jasa lainnya (-5,15%), jasa perusahaan (-6,10%), akomodasi dan makan minum (-7,26%), dan transportasi dan pergudangan (-13,12%).

Pemerintah menyadari, pemulihan kesehatan adalah prioritas dan prasyarat terjadinya pemulihan sosial ekonomi. Oleh karena itu, APBN 2021 dilakukan refocusing dan realokasi untuk menangani tiga prioritas utama, yaitu: (1) penanganan kesehatan, (2) perluasan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, dan (3) menjaga daya tahan dunia usaha dan mendukung pemulihan aktivitas ekonomi. Dengan mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada, serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,2 – 5,8 persen;
2. inflasi 2,0-4,0 persen;
3. tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,62 - 7,27 persen;
4. nilai tukar Rupiah Rp13.900-Rp15.000/US\$;



5. harga minyak mentah Indonesia US\$55-65/barel;
6. lifting minyak bumi 686-726 ribu barel per hari; dan lifting gas bumi 1.031-1.103 ribu barel setara minyak per hari.

Sedangkan Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika Covid-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari Pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19, termasuk proses vaksinasi. Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2022 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2022. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Bintan baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2022. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi Tahun 2022 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis. Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bias membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sector-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tak kalah penting antara lain inflasi, tingkat kemiskinan, kinerja investasi, nilai tukar dan kinerja ekspor.

Pertumbuhan PDRB yang bernilai positif menunjukkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor yang bergerak maju dan bersifat saling mempengaruhi (antara sektor satu dan lainnya).

Data ini dapat menunjukkan struktur perekonomian di suatu daerah karena ditampilkan berdasarkan sektor (dan subsektor). Selain itu, data PDRB juga dapat menunjukkan tingkat inflasi/deflasi yang terjadi di suatu daerah dengan membandingkan data PDRB berdasarkan harga konstan dan PDRB berdasarkan harga berlaku. PDRB perkapita penduduk juga dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah

Besarnya sumbangan sektor ekonomi dalam PDRB Kab. Bintan Tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :



Tabel 7.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018*	2019**	2020**
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 052,65	1 147,53	1 231,34	1 314,96	1 430,74
B	Pertambangan dan Penggalian	1 833,19	1 583,20	1 313,72	1 240,97	990,87
C	Industri Pengolahan	6 515,20	7 059,79	7 657,43	8 331,30	8 379,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,82	23,60	24,00	25,05	26,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,34	10,43	11,43	12,20	12,72
F	Konstruksi	2 853,20	3 342,69	4 067,02	4 652,21	4 665,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 479,54	1 629,63	1 798,18	1 967,03	1 938,71
H	Transportasi dan Pergudangan	378,72	409,41	445,20	486,04	447,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	863,35	1 026,66	1 164,87	1 244,81	763,40
J	Informasi dan Komunikasi	193,80	208,69	226,17	245,97	249,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	268,59	306,57	321,86	340,63	339,69
L	Real Estat	184,52	201,28	216,51	229,93	238,72
M,N	Jasa Perusahaan	0,15	0,16	0,16	0,17	0,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	436,27	485,56	536,71	582,19	616,28
P	Jasa Pendidikan	320,52	348,07	368,22	389,73	396,43
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155,25	167,76	181,28	202,19	217,16
R,S,T,U	Jasa Lainnya	30,22	31,56	33,64	35,57	31,68
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		16 596,39	17 982,66	19 597,84	21 301,05	20.743,70

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Tabel 7.2.2 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020**
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	758,67	818,85	838,95	865,85	914,27
B	Pertambangan dan Penggalian	1537,93	1314,58	1068,11	985,67	776,48
C	Industri Pengolahan	4868,47	5106,84	5356,75	5590,14	5 488,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18,70	20,00	19,91	20,30	20,88
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7,59	8,22	8,71	8,41	8,63
F	Konstruksi	2089,85	2391,23	2777,20	3037,00	3 044,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1194,54	1265,83	1332,79	1405,95	1 345,12
H	Transportasi dan Pergudangan	282,51	299,71	316,71	335,45	303,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	620,93	695,30	779,86	824,89	530,58



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

	Minum					
J	Informasi dan Komunikasi	183,77	194,77	205,39	214,18	221,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	222,18	239,76	248,36	261,27	258,92
L	Real Estat	147,75	158,66	167,18	175,55	180,65
M,N	Jasa Perusahaan	0,13	0,13	0,14	0,14	0,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	298,55	321,08	342,13	367,23	379,11
P	Jasa Pendidikan	243,28	255,05	261,89	273,20	268,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	121,81	129,93	137,20	145,73	153,88
R,S,T,U	Jasa Lainnya	23,45	24,13	25,23	26,13	22,64
PRODUK DOMESTIK BRUTO		12.620,12	13.244,04	13.886,11	14.540,09	13.917,79

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan mengalami perlambatan dalam waktu 5 tahun terakhir. Sejak tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan mengalami perlambatan. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional yang mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan pada tahun 2020 turun -4,28%, hal ini karena adanya pandemi Covid-19. Sektor yang mengalami penurunan paling tajam adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu -35,68%, selanjutnya yaitu sektor pertambangan dan penggalian turun -21,22

Pada tahun 2016-2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan rata-rata mengalami fluktuasi. Hal ini telah diprediksi dari sektor yang sangat mempengaruhi PDRB secara total yaitu sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan yang negatif. Dimana pada tahun 2012 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang peraturan pertambangan dan penggalian. Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil digunakan PDRB Harga Konstan. PDRB Harga Konstan ini merepresentasikan pertumbuhan ekonomi tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi karena menggunakan harga dasar yang konstan yakni harga dasar tahun tertentu yang dipilih yaitu tahun 2010. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang diukur dari kenaikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berdasarkan harga konstan pada tahun 2021 mengalami percepatan selama 5 tahun terakhir.

Tabel 7.2.3 Laju Pertumbuhan Persektor Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018*	2019**	2020**
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,3	7,93	2,45	3,21	5,60
B	Pertambangan dan Penggalian	-8,77	-14,52	-18,75	-7,72	-21,22
C	Industri Pengolahan	6,05	4,9	4,89	4,36	-1,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,77	6,93	-0,43	1,96	2,86
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,24	8,23	1,11	1,36	2,53
F	Konstruksi	12,5	14,42	16,14	9,46	0,16



G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,45	5,97	5,29	5,49	-4,33
H	Transportasi dan Pergudangan	6,56	6,09	5,67	5,92	-9,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,91	11,98	12,16	5,77	-35,68
J	Informasi dan Komunikasi	5,24	5,99	5,45	4,28	3,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,56	7,91	3,59	5,2	-0,90
L	Real Estate	8,18	7,38	5,37	5,01	2,90
M,N	Jasa Perusahaan	4,64	3,75	1,22	1,82	-11,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,76	7,55	6,56	7,34	3,23
P	Jasa Pendidikan	7,3	4,84	2,68	4,32	-1,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,53	6,66	5,59	6,22	5,59
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,24	2,89	4,57	3,56	-13,37
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,05	4,94	4,85	4,71	-4,28

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

7.2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM mencerminkan capaian kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPM direpresentasikan oleh 3 (tiga) dimensi, dimensi kesehatan diwakili oleh indikator Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pendidikan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah/ Expected Years of Schooling (EYS), dan Rata-rata Lama Sekolah/ Mean Years of Schooling (MYS). Sementara itu, dimensi standar hidup diwakili oleh pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, IPM Kabupaten Bintan mengalami tren yang meningkat. IPM Kabupaten Bintan di tahun 2020 adalah sebesar 74,13. Besaran IPM Kabupaten Bintan adalah yang tertinggi ketiga bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya se-Provinsi Kepulauan Riau. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, beberapa indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan. AHH saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, Angka Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Bintan cukup tinggi yaitu sebesar 70,02 tahun, dan pada tahun 2020 telah mencapai 70,38 tahun. Sementara itu, indikator pengeluaran per kapita disesuaikan di Kabupaten Bintan pada 2020 mencapai 14,48 juta per tahun mengalami penurunan dibandingkan 2019 yang mencapai 14,73 juta per tahun.

Tabel 7.2.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bintan Tahun 2016 – 2021

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
1	2016	72,38
2	2017	72,91



3	2018	73,41
4	2019	73,98
5.	2020	74,13
6.	2021	74,57

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

Grafik 1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Bintan Tahun 2016 – 2021



Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2021

7.2.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2021 disusun berdasarkan pada tema pembangunan Kabupaten Bintan tahun 2021, dan tantangan dan prospek ekonomi daerah, serta memperhatikan arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Kepulauan Riau maka kebijakan ekonomi Kabupaten Bintan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat perekonomian pasca pandemi Covid, peningkatan jaminan perlindungan pada masyarakat dan peningkatan pelayanan publik menuju New Normal, dengan fokus pada Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui:

1. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dan retribusi.
2. Mengoptimalkan realisasi APBD khususnya untuk belanja modal serta melaksanakan dan memonitor perkembangan proyek pembangunan infrastruktur agar dapat berjalan dengan baik sebagai pendorong perekonomian untuk mendukung perkembangan investasi swasta dan kinerja ekspor Kepri.
3. Menjaga iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui percepatan reformasi struktural terutama terkait dengan aspek kemudahan perizinan serta stabilitas keamanan di Kabupaten Bintan.
4. Penguatan kerja sama antara dunia industri dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan pelatihan di lokasi produksi (teaching factory) disertai perbaikan fasilitas



- pembelajaran dan penyusunan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri prioritas nasional serta kebutuhan pasar tenaga kerja.
5. Peningkatan kinerja UMKM dalam rangka meningkatkan perekonomian local.
 6. Penyusunan teknologi dan inovasi dalam rangka pengembangan produk unggulan daerah.
 7. Memaksimalkan potensi kemaritiman dalam rangka meningkatkan pendapatan, pengembangan pariwisata di era new normal pandemi COVID-19.
 8. Mendorong percepatan realisasi dari investasi-investasi baik PMA maupun PMDN yang telah didaftarkan agar dapat mendorong kinerja investasi Kepri serta membuka lapangan kerja baru.
 9. Pengembangan bidang pendidikan menuju SDM yang unggul juga menjadi modal dasar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan akan mengalami pelambatan di tahun 2021 karena pandemic COVID 19. Berdasarkan arahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2021 maka pertumbuhan ekonomi akan ditargetkan sebesar 3,9–5,1. Sehingga pengendalian Inflasi agar tetap terjaga melalui :

1. Keterjangkauan Harga
 - a. Penyelenggaraan kegiatan pasar murah;
 - b. Pelaksanaan kegiatan sidak pasar;
 - c. Mendorong perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - d. Pembuatan mapping produksi komoditas bahan pangan secara berkala bersama kelompok tani agar jumlah produksi dapat terukur sehingga pasokan bahan pangan dari daerah lain tidak melebihi permintaan.
2. Ketersediaan Pasokan
 - a. Mendorong Pemerintah untuk membuka potensi Kerjasama Antar Daerah (KAD) baru dengan daerah pemasok pangan;
 - b. Mendorong pembentukan lumbung pangan bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga masyarakat;
 - c. Melakukan pemantauan pasokan bahan makanan secara berkala bekerjasama dengan Satgas Pangan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan serta menghindari penimbunan;
 - d. Mendorong Kawasan Rumah Pangan Lestari dan klaster- klaster pertanian bahan pangan lokal untuk menekan inflasi dari kelompok bahan makanan;
 - e. Peningkatan pemanfaatan pekarangan dalam penyediaan bahan pangan;
 - f. Penguatan peran UMKM khususnya yang bergerak pada usaha berbasis komoditas ketahanan pangan dari sisi kelembagaan, peningkatan akses, maupun penambahan waktu monitoring pengembangan;
 - g. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan penyediaan tenaga penyuluh dan pendamping untuk meningkatkan skill dan kapasitas petani dan nelayan.
3. Kelancaran Distribusi
 - a. Meningkatkan peran pasar dalam menjamin kelancaran distribusi barang dengan menggunakan standar COVID;
 - b. Mendorong penambahan kapasitas gudang penyimpanan bahan pangan.

7.2.1.4 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bintan

Produksi Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil. Meningkatkan pendapatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat yang



disertai dengan pengurangan jumlah masyarakat miskin dengan cara seperti meningkatkan mutu pendidikan dan juga perbaikan derajat kesehatan, sehingga pada akhirnya akan dapat membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Peningkatan PDRB dan pendapatan per kapita menjadi salah satu ukuran dalam pencapaian tingkat kemakmuran masyarakat disuatu wilayah jika data tersebut disajikan secara berkala.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan pada tahun 2019 tumbuh sebesar 4,71%, relatif melambat dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 5,05% . Sektor pengadaan listrik dan gas merupakan sektor yang mengalami penurunan tajam dari 14,77% di tahun 2016 menjadi 1,96% di tahun 2019. Dampak penyebaran COVID-19 terhadap perlambatan perekonomian diperkirakan semakin kuat pada triwulan II 2020 diprediksikan masih sama sampai tahun 2021, target akhir RPJMD ini berdasarkan kondisi pandemi COVID-19 akan mengalami kendalam pencapaiannya. Dampak Pandemi COVID-19 akan berpengaruh pada sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan melambat tidak sebagaimana target RPJMD. Pembangunan pariwisata sebagai sumber utama PAD dan PDRB Kabupaten Bintan juga mengalami dampak dari Pandemi COVID 19. Sebagaimana kondisi nasional dan Provinsi Kepulauan Riau target pertumbuhan ekonomi akan melambat di kisaran 3% -5% .

Nilai PDRB ADHB maupun ADHK Kabupaten Bintan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB ADHB Kabupaten Bintan pada tahun 2020 mencapai 20.743,70 miliar rupiah. Sementara itu, PDRB ADHK sebesar 13.917,0 miliar rupiah. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan per kapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya, penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Jika PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita maka laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah harus lebih besar dari laju pertumbuhan penduduknya. Pada tahun 2020, PDRB per kapita atas dasar harga konstan Kabupaten Bintan mencapai 86,49 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar -5,18 persen. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada 2020 mencapai 128,91 juta rupiah menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 133,63 juta rupiah.

Tabel 7.2.5
Perkembangan Pendapatan Regional PDRB Perkapita
Kabupaten Bintan TA 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)					
- ADHB	16.596	17.982	19.597	21.301	20.744
- ADHK	12.620	13.244	13.886	14.540	13.918
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	107.361	115.042	114.938	133,64	128,91



- ADHK	81.639	84.727	87.927	91,22	86,49
Pertumbuhan	3,99	3,78	3,78	3,74	-5,18
PDRB perkapita					
Jumlah penduduk (000 org)	154,58	156,31	157,92	159,403	168,921
Pertumbuhan	1,02	1,12	1,03	4,71	-4,28

Sumber : BPS Kabupaten Kabupaten Bintan, Tahun 2021

7.2.1.5 Perkembangan PDRB Pengeluaran

Menurut kaidah ekonomi, pengukuran tingkat kesejahteraan dapat digambarkan dengan besarnya pendapatan seseorang. Namun demikian, kesulitan untuk mengukur pendapatan membuat tingkat kesejahteraan secara moneter seringkali didekati dengan besarnya pengeluaran seseorang. Pengeluaran per kapita penduduk merupakan proksi dari pendapatan per kapita yang selanjutnya dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Data pengeluaran per kapita penduduk diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikelompokkan menjadi pengeluaran makanan dan pengeluaran non makanan. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Bintan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp1.231.160 dengan pengeluaran untuk makanan sebesar Rp 597.333 dan pengeluaran untuk bukan makanan sebesar Rp 633.827. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, pengeluaran per kapita per bulan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 4,73 persen. Pengeluaran untuk makanan mengalami peningkatan sebesar 2,74 persen, dan pengeluaran bukan makanan juga mengalami peningkatan hingga 6,68 persen. Pola konsumsi masyarakat yang Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melambat, perekonomian Kabupaten Bintan periode 2018 - 2020 dapat tetap tumbuh di atas 4 persen, yakni sebesar 5,16 persen; 5,05 persen; 4,94 persen; 4,85 persen; dan 4,71 persen. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan didominasi pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang menyumbang hampir separuh total PDRB.

Tabel 7.2.6
PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Bintan Tahun 2018-2020

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6695149.31	7067952.06	7107642.07
Pengeluaran Konsumsi LNPR	16815.87	18039.48	17904.24
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1046841.81	1146882.02	1046624.28
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6892300.88	7417039.40	7321699.78
Perubahan Inventori	19053.38	50586.37	10011.33
Net Ekspor Barang dan Jasa	-784073.76	-1155424.92	-1586083.93



Produk Domestik Regional Bruto	13886087.50	14540074.42	13917797.76
---------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Sumber : BPS Kab. Bintan, Tahun 2021

Grafik 2
PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Bintan Tahun 2018-2020



Sumber : BPS Kab. Bintan, Tahun 2021

7.2.1.6 Evaluasi Pelaksanaan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan RPJMD sangat penting dilakukan agar dapat menjadi masukan bagi perencanaan tahun-tahun berikutnya. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan telah disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025, sehingga menjadikan setiap periode Pemerintahan Daerah telah tersusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat dijadikan acuan dan terlegitimasi.

Selama periode 2016-2021 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Bintan dalam dua tahun terakhir juga sudah terakomodasi secara optimal. Dengan kata lain, seluruh program yang ada di RPJMD sudah diimplemetasikan lebih lanjut di dalam RKPD.

RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Bintan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan RPJM Provinsi Kepulauan Riau, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi



pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka yang bersifat indikatif yang dibiayai oleh APBD dan sumber dana lainnya yang dapat diperoleh dari APBD Provinsi, APBN maupun sektor swasta. RPJMD tetap memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu-isu strategis yang berkembang.

Evaluasi pelaksanaan RPJMD pada tabel di atas merupakan evaluasi RPJMD pada tiga tahun pertama periode RPJMD tahun 2010-2015 dan tahun kedua periode RPJMD tahun 2016-2021. Sebagian besar indikator kinerja pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya sudah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bintang. Kondisi tersebut menjadi modal dasar untuk dapat mencapai target kinerja akhir pada Tahun 2021.

Target akhir RPJMD berdasarkan kondisi pandemi COVID-19 akan mengalami kendala pencapaiannya. Dampak Pandemi COVID-19 akan berpengaruh pada sector ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan melambat tidak sebagaimana target RPJMD. Pembangunan pariwisata sebagai sumber utama PAD dan PDRB Kabupaten Bintang juga mengalami dampak dari Pandemi COVID 19. Sebagaimana kondisi nasional dan Provinsi Kepulauan Riau target pertumbuhan ekonomi akan melambat di kirasaran 3%-5%.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

RKPD tahun 2021 disusun berdasarkan dokumen RPJMD 2016 – 2021. Tema RKPD Tahun 2021 adalah **“Peningkatan Daya Saing Dan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Bintang Gemilang”**.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM yang semakin memiliki daya saing dan berkeadilan dengan fokus pembangunan sebagai berikut:
 - a. pemerataan kualitas pendidikan (sarana dan prasarana), meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersekolah dalam rangka mewujudkan tujuan 4 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, dan perwujudan target SPM sebagaimana Permendikbud Nomor 32 tahun 2018;
 - b. Mewujudkan pelayanan kesehatan baik primer atau Fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan (sarana dan prasarana), meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, promosi kesehatan dalam rangka menekan kematian baik karena melahirkan maupun penyakit, meningkatkan perbaikan gizi pada masyarakat dalam rangka mengurangi dan mengendalikan stunting dan gizi buruk, mewujudkan tujuan berkelanjutan sebagaimana tujuan 2 dan 3 dalam dokumen SDGs, melaksanakan SPM Kesehatan sebagaimana Permenkes Nomor 4 tahun 2019;
 - c. Mengurangi kesenjangan sosial dengan prioritas pada penanganan kemiskinan dan PMKS. Pemberian bantuan langsung pada keluarga melalui PKH dan jaminan perlindungan dan social sebagaimana amanat SPM dalam Permensos Nomor 9 tahun 2018 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tujuan 2;
 - d. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan prioritas pada penyusunan dokumen perencanaan responsive gender, peningkatan perlindungan perempuan dan



- anak dalam tindak kekerasan, peningkatan kualitas hidup perempuan rentan. Ini dalam rangka melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tujuan 5;
- e. Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga dalam pembangunan, peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan budaya melayu dan memajukan budaya melayu, mengurangi tingkat pengangguran dengan meningkatkan ketrampilan sesuai kebutuhan perusahaan dan pelaksanaan kartu pra kerja;
 - f. Peningkatan partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan dalam peningkatan daya saing daerah. Pengembangan kelembagaan desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten Bintan.
2. Peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan prioritas sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan terutama pada daerah penghubung akses pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pariwisata;
 - b. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak. Ini dalam rangka mewujudkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan juga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tujuan 6;
 - c. Peningkatan kualitas perhubungan terutama perhubungan antar pulau, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan perhubungan, meningkatkan peran masyarakat dalam perhubungan;
 - d. Peningkatan akses masyarakat pada kepemilikan rumah layak huni sebagaimana amanat dalam SPM bidang perumahan dan permukiman.
 3. Peningkatan kualitas perekonomian dengan focus pada pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dengan prioritas
 - a. Meningkatkan ketersediaan pangan dan distribusi pangan, meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas melalui inovasi pembibitan dan penanaman dengan lahan terbatas, pemanfaatan pekarangan meningkatkan kecukupan konsumsi ikan, kualitas perikanan tangkap dan budidaya, serta pengolahan ikan dan system pemasaran;
 - b. Meningkatkan kualitas UMKM, baik produk maupun pemasaran, meningkatkan inovasi produk, memudahkan akses permodalan, serta pendataan usaha mikro;
 - c. Meningkatkan kualitas industri kecil dengan pengembangan kualitas sentra sentra industri;
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan pelaksanaan metrology yang baik.
 4. Peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan prioritas:
 - a. peningkatan kualitas dan disiplin kepegawaian, pengawasan, persandian, perpustakaan dan perencanaan;
 - b. Peningkatan peran kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) dalam pembangunan berkelanjutan dan pemerataan;
 - c. Peningkatan ketentraman, perlindungan masyarakat sebagaimana SPM bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - d. Peningkatan kemandirian keuangan dengan peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas pengelolaan asset;
 - e. Mempermudah pelayanan masyarakat dengan berbasis elektronik menuju kabupaten pintar;
 - f. Peningkatan reformasi birokrasi dengan mewujudkan good government, dan implementasi SPBE (Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik).

7.2.2 Kebijakan Keuangan

Pada tahun 2021, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kebijakan pembiayaan pembangunan daerah yang



terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisien dan efektif.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah yang terdiri dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah yang terdiri dari : Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, sedangkan Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

7.2.2.1 Kebijakan Keuangan Pendapatan Daerah

Penyusunan anggaran tahun 2021 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bintan, antara lain sebagai berikut :

1. Diadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pajak daerah secara intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat dengan dilanjutkan upaya penegakan hukum (law enforcement) secara periodik bersama-sama Tim Pembina Samsat Provinsi Kepulauan Riau (Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Lalu lintas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan PT. Jasa Raharja di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau);
2. Peningkatan pelaksanaan online system dalam akurasi data wajib pajak khususnya terhadap pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang memberikan dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat;
3. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dengan SKPD penghasil terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pemungutan retribusi daerah serta dalam rangka menggali potensi retribusi baru.
4. Peningkatan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat antara lain : Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, Kementerian ESDM, BP Migas dan Kantor Perwakilan Pajak di Batam dan Tanjungpinang.

7.2.2.2 Kebijakan Keuangan Belanja Daerah



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

7.2.2.3 Kebijakan Keuangan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD. Di dalam pengelolaan keuangan daerah dan khususnya yang berkaitan dengan fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah yang merupakan bagian dari anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun 2021 mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menempatkan SiLPA tahun sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit, namun estimasi SiLPA tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun anggaran.

7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Kabupaten Bintan tahun 2021 serta melihat performa pendapatan daerah tahun 2016 hingga tahun 2019, diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan



kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut :

Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa analisis keuangan daerah diperlukan dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Analisa Keuangan Daerah dalam Penyusunan RKPD pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana.

Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD tahun rencana dimaksudkan untuk mengetahui amanat dari RPJMD dalam menentukan kapasitas keuangan daerah serta hasilnya.

7.2.3.1 Target pendapatan daerah

Proyeksi pendapatan daerah dihitung dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat, dihitung dengan memperhatikan realisasi pajak daerah dari tahun 2016 s/d September 2020, memperhatikan regulasi dan potensi sumber pajak dan retribusi daerah;
2. Dana transfer dari Pemerintah pusat menggunakan asumsi anggaran 2020 pasca penyesuaian APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 tahun 2020 Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional untuk penyusunan 2021;
3. Lain lain pendapatan yang sah juga diproyeksikan sesuai realisasi 2020.

Tabel 7.2.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Bintan Tahun 2020 s.d. Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Anggaran Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1	Pendapatan Asli Daerah	165.752.528.837,45	199.884.059.562,00	195.745.874.584,92	393.379.243.878,00
1.1.1	Pajak Daerah	107.816.743.354,99	144.285.785.000,00	130.059.598.323,77	318.379.243.878,00
1.1.2	Retribusi Daerah	7.761.066.224,00	8.567.875.000,00	7.601.797.691,00	10.797.207.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan	8.959.879.482,00	10.477.231.219,00	11.411.312.907,00	10.477.231.219,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

	Kekayaan daerah yang dipisahkan				
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41.214.839.776,46	36.553.168.343,00	46.673.165.663,15	53.680.241.659,00
1.2	Dana Transfer	970.985.065.362,00	848.503.369.330,00	870.158.338.817,00	860.996.881.295,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	193.742.270.873,00	57.097.237.576,00	98.171.066.468,00	85.788.104.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	486.117.569.000,00	476.841.183.000,00	476.841.183.000,00	477.093.608.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus - Fisik	82.333.109.139,00	98.679.016.000,00	90.479.520.346,00	97.507.328.000,00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	59.385.951.319,00	62.011.394.000,00	56.162.194.000,00	101.398.422.000,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
1.2.5	Dana Insentif Daerah	47.935.489.000,00	44.420.166.000,00	44.420.166.000,00	19.885.822.000,00
1.2.6	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Dana Desa	39.163.570.000,00	40.708.009.000,00	40.186.161.200,00	28.338.150.000,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
1.2.9	Pendapatan Bagi Hasil	61.807.106.031,00	68.746.363.754,00	63.898.047.803,00	50.985.447.295,00
1.2.10	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	69.389.521.687,00	29.257.526.000,00	40.086.631.395,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	68.889.521.687,00		0,00	0,00
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00		0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan lainnya	500.000.000,00	29.257.526.000,00	40.086.631.395,00	0,00
	Total Pendapatan Daerah	1.206.127.115.886,45	1.077.644.954.892,00	1.105.990.844.796,92	1.254.376.125.173,00

7.2.3.2 Target Belanja Daerah

Analisis proyeksi belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah selama kurun waktu lima tahun. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 tahun ke depan untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Bintan tahun 2021 dan sebagaimana PP No 12 tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja digunakan untuk belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan belanja



bantuan social. Belanja modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya;

- 2) Pendanaan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk 6 urusan;
- 3) Pendanaan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan;
- 4) Penyediaan anggaran anggaran yang menunjang program penanggulangan kemiskinan antara lain : peningkatan kualitas SDM dibidang perekonomian potensial di Kabupaten Bintan;
- 5) Fungsi Pendidikan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Sekurang-kurangnya 20% dari APBD;
- 6) Anggaran Kesehatan Minimal 10% dari Total Belanja Daerah diluar Gaji;
- 7) Anggaran Infrastruktur yang Bersumber Dari Dana Transfer Umum Sebesar 25%;
- 8) Anggaran Peningkatan Kapasitas SDM Sekurang-kurangnya 0,34% Untuk Pemerintah Provinsi Dan 0,16% Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Dari Total Belanja Daerah.

Rencana Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada kebijakan pendapatan daerah 2021, sebagaimana pada tabel proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 7.2.8 Realisasi dan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 s.d Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Anggaran Tahun 2022 (Rp)
2.1	Belanja Operasi				
2.1.1	Belanja pegawai	571.093.939.534,00	505.700.609.688,68	476.609.153.074,00	531.446.937.391,00
2.1.2	Belanja barang	257.761.202.728,82	381.489.167.191,00	327.840.463.570,98	393.003.590.688,00
2.1.3	Belanja bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja hibah	57.292.591.880,00	48.816.713.755,00	45.560.989.228,00	55.528.599.329,00
2.1.6	Belanja bantuan social	5.530.925.108,00	4.080.000.000,00	3.939.600.000,00	6.528.000.000,00
2.1.7	Belanja bantuan keuangan	109.107.128.560,00	0,00	0,00	
2.2	Belanja Modal				
2.2.1	Belanja tanah	228.080.000,00	6.416.283.204,00	994.839.115,00	7.805.000.000,00
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	55.685.195.183,00	42.791.731.754,00	39.826.077.526,00	49.649.411.461,00
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	88.506.594.506,42	68.527.121.372,00	63.060.135.647,33	84.509.120.931,00
2.2.4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	41.930.206.113,00	45.989.192.144,00	43.580.037.497,00	38.505.120.157,00
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	5.634.208.496,00	2.327.608.206,00	1.954.288.040,00	1.422.043.003,00
2.2.6	Belanja aset lainnya	99.979.000,00	3.000.000,00	2.970.000,00	0,00
2.3	Belanja Tak Terduga				
2.3.1	Belanja Tak Terduga	68.340.725.092,00	10.189.062.247,00	5.674.118.343,00	10.708.506.359,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Anggaran Tahun 2022 (Rp)
2.4	Belanja Transfer				
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/kota	0,00	15.285.366.000,00	15.285.366.000,00	0,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/kota Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/kota Kepada Desa	0,00	93.517.892.700,00	92.996.547.466,00	117.547.499.200,00
	Total Belanja	1.261.210.776.201,24	1.225.133.748.261,68	1.117.324.585.307,31	1.298.285.014.519,00

7.2.3.3 Target Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, atau pencairan dana cadangan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, atau pemberian pinjaman daerah.

Rencana Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada kebijakan Pembiayaan daerah 2021, sebagaimana pada tabel proyeksi pembiayaan Daerah Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun 2021 adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) merupakan sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Penggunaan SiLPA terutama digunakan untuk menutup defisit anggaran setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;



pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun 2021 adalah:

- 1) Meningkatkan *performance* dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- 2) Pengembalian pinjaman daerah yang telah diberikan dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat Kabupaten Bintan.

Berdasarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan, realisasi pengeluaran pembiayaan, dan proyeksi, arah kebijakan pembiayaan daerah selanjutnya dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 7.2.9 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah		
		Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Anggaran Tahun 2022
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)	149.088.793.369,68	149.088.793.369,68	43.908.889.346,00
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5.	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	5.000.000,00	0,00
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah			
3.1.7.	Pengembalian Pokok Dana Bergulir			
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	149.088.793.369,68	149.093.793.369,68	43.908.889.346,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah			
3.2.5.	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir			
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	147.488.793.369,68	147.493.793.369,68	43.908.889.346,00

**7.3. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja****7.3.1.1 Realisasi Pendapatan**

Melalui tabel berikut dapat dilihat ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk pendapatan daerah:

Tabel 7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	4	5	6
1.1	Pendapatan Asli Daerah	199.884.059.562,00	195.745.874.584,92	97,93
1.1.1	Pajak Daerah	144.285.785.000,00	130.059.598.323,77	90,14
1.1.2	Retribusi Daerah	8.567.875.000,00	7.601.797.691,00	88,72
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	10.477.231.219,00	11.411.312.907,00	108,92
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36.553.168.343,00	46.673.165.663,15	127,69
1.2	Dana Transfer	848.503.369.330,00	870.158.338.817,00	102,55
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	694.628.830.576,00	721.653.963.814,00	103,89
1.2.1	Dana Bagi Hasil	57.097.237.576,00	98.171.066.468,00	171,94
1.2.2	Dana Alokasi Umum	476.841.183.000,00	476.841.183.000,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus – Fisik	98.679.016.000,00	90.479.520.346,00	91,69
1.2.4	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	62.011.394.000,00	56.162.194.000,00	90,57
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	85.128.175.000,00	84.606.327.200,00	99,39
1.2.5	Dana Insentif Daerah	44.420.166.000,00	44.420.166.000,00	100,00
1.2.6	Dana Otonomi Khusus	-	-	-
1.2.7	Dana Keistimewaan	-	-	-
1.2.8	Dana Desa	40.708.009.000,00	40.186.161.200,00	98,72
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.746.363.754,00	63.898.047.803,00	92,95
1.2.9	Pendapatan Bagi Hasil	68.746.363.754,00	63.898.047.803,00	92,95
1.2.10	Bantuan Keuangan	-	-	-
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	29.257.526.000,00	40.086.631.395,00	137,01
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Pendapatan lainnya	29.257.526.000,00	40.086.631.395,00	137,01
	Total Pendapatan Daerah	1.077.644.954.892,00	1.105.990.844.796,92	102,63



Realisasi Pendapatan Tahun 2021 secara keseluruhan sebesar Rp 1.105.990.844.796,92 atau 102,63% dari target sebesar Rp1.077.644.954.892,00. Realisasi Pendapatan merupakan gabungan dari realisasi pajak daerah sebesar Rp130.059.598.323,77 atau 90,14%, realisasi retribusi daerah sebesar Rp7.601.797.691,00 atau 88,72% dari target, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp11.411.312.907,00 atau 108,92% dari target dan Realisasi lain-lain PAD yang sah sebesar Rp46.673.165.663,15 atau 127,69% dari target. Dan selebihnya merupakan pendapatan transfer.

7.3.1.2 Realisasi Belanja

Melalui tabel berikut dapat dilihat ikhtisar realisasi target kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021.

Tabel 7.3.2 Ikhtisar Realisasi Belanja Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.1	Belanja Operasi	940.086.490.634,68	853.950.205.872,98	90,84
2.1.1	Belanja pegawai	505.700.609.688,68	476.609.153.074,00	94,25
2.1.2	Belanja barang	381.489.167.191,00	327.840.463.570,98	85,94
2.1.3	Belanja bunga	-	-	-
2.1.4	Belanja subsidi	-	-	-
2.1.5	Belanja hibah	48.816.713.755,00	45.560.989.228,00	93,33
2.1.6	Belanja bantuan sosial	4.080.000.000,00	3.939.600.000,00	96,56
2.2	Belanja Modal	166.054.936.680,00	149.418.347.825,33	89,98
2.2.1	Belanja tanah	6.416.283.204,00	994.839.115,00	15,50
2.2.2	Belanja peralatan dan mesin	42.791.731.754,00	39.826.077.526,00	93,07
2.2.3	Belanja gedung dan bangunan	68.527.121.372,00	63.060.135.647,33	92,02
2.2.4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	45.989.192.144,00	43.580.037.497,00	94,76
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	2.327.608.206,00	1.954.288.040,00	83,96
2.2.6	Belanja aset lainnya	3.000.000,00	2.970.000,00	99,00
2.3	Belanja Tak Terduga	10.189.062.247,00	5.674.118.343,00	55,69
2.3.1	Belanja Tak Terduga	10.189.062.247,00	5.674.118.343,00	55,69
2.4	Belanja Transfer	108.803.258.700,00	108.281.913.466,00	99,52
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	15.285.366.000,00	15.285.366.000,00	100,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/kota	-	-	-
2.4.3	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/kota Daerah Provinsi	-	-	-
2.4.4	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/kota Kepada Desa	93.517.892.700,00	92.996.547.466,00	99,44
	Total Belanja	1.225.133.748.261,68	1.117.324.585.307,31	91,20



Secara keseluruhan realisasi belanja Tahun 2021 sebesar Rp1.117.324.585.307,31 atau 91,20% dari anggaran sebesar Rp1.225.133.748.261,68. Tidak terserapnya seluruh belanja terutama disebabkan oleh efisiensi belanja modal yang dilaksanakan secara pelelangan, terjadinya efisiensi dalam penggunaan belanja pegawai, barang & jasa, pekerjaan belum dilaksanakan serta belum digunakannya belanja bantuan sosial, hibah, subsidi, bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

7.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut.

- a. Masih terdapat beberapa pelaksana kegiatan kurang memahami ketentuan tata kelola keuangan daerah, sehingga dalam merealisasikan kegiatan masih bergantung pada Bendaharawan Pengeluaran. Pertanggungjawaban keuangan (SPJ) yang lambat dari pelaksana kegiatan sehingga mempengaruhi Bendaharawan Pengeluaran yang juga lambat dalam mengusulkan proses pertanggungjawaban dan pencairan dana berikutnya.
- b. Terbatasnya tenaga yang terampil dan telah bersertifikat di bidang pengadaan barang dan jasa sehingga proses pengadaan belum sepenuhnya dapat diselesaikan dan berakibat pelaksanaan fisik kegiatan terhambat.
- c. Perencanaan yang tidak matang sehingga beban pekerjaan tertumpuk pada akhir tahun anggaran atau pada triwulan IV dan kondisi yang mendesak dan berakibat tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan.
- d. Kegiatan fisik pada beberapa program yang ditetapkan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada triwulan IV dalam kondisi yang mendesak dan berakibat tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan.
- e. Pengaruh kondisi ekonomi global dan nasional dimana pada tahun 2021 perekonomian dirasakan kurang baik dikarenakan dampak pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19).



7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

7.4.1.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Dengan demikian, entitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan wewenangnya kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD Kabupaten Bintan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. BKAD Kabupaten Bintan sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan (konsolidasian) berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan keuangan.

7.4.1.2 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah OPD sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan dimaksud berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan keuangan.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bintan adalah:

- 1 Dinas Pendidikan
- 2 Dinas Kesehatan
- 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5 Satuan Polisi Pamong Praja
- 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 7 Dinas Sosial
- 8 Dinas Tenaga Kerja
- 9 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 10 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
- 11 Dinas Lingkungan Hidup
- 12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 14 Dinas Perhubungan



- 15 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 16 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
- 17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 18 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
- 19 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 20 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- 21 Dinas Perikanan
- 22 Sekretariat Daerah
- 23 Inspektorat Daerah
- 24 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 25 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
- 26 Badan Pendapatan Daerah
- 27 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 28 Sekretariat DPRD
- 29 Kecamatan Bintan Utara
- 30 Kecamatan Bintan Pesisir
- 31 Kecamatan Tambelan
- 32 Kecamatan Mantang
- 33 Kecamatan Toapaya
- 34 Kecamatan Teluk Sebong
- 35 Kecamatan Teluk Bintan
- 36 Kecamatan Gunung Kijang
- 37 Kecamatan Bintan Timur
- 38 Kecamatan Seri Kuala Lobam
- 39 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Disamping memiliki 39 (tiga puluh sembilan) OPD di atas, pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bintan juga memiliki 36 (tiga puluh enam) desa, 15 (lima belas) kelurahan, 6 (enam) Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan 2 (dua) Perusahaan Daerah. Adapun Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) terdiri dari:

- 1) Pola Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD Bertahap 5 (lima) Puskesmas;
- 2) Pola Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD Bertahap Dana Bergulir;
- 3) Pola Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD Bertahap RSUD Bintan.

Kedua PPK-BLUD tersebut statusnya adalah PPK-BLUD Bertahap yang berarti belum PPK-BLUD penuh sehingga merupakan entitas akuntansi dari dinas teknis terkait, yaitu untuk PPK-BLUD Bertahap Puskesmas Teluk Sebong, Puskesmas Kawal, Puskesmas Tanjung Uban, Puskesmas Kijang dan Puskesmas Teluk Sasah dengan Dinas Kesehatan.



Sedangkan PPK PPK-BLUD Bertahap Dana Bergulir dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Sedangkan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bintan, terdiri dari:

1. PT Bintan Inti Sukses (BIS) yang memiliki satu anak perusahaan PT Bintan Anugerah Bersama (PT BAB) yang bergerak di bidang SPBU;
2. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bintan.

Perusahaan daerah pada dasarnya adalah suatu entitas pelaporan keuangan namun standar akuntansi dan penyajian laporannya menggunakan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Laporan keuangan perusahaan daerah tidak dikondolidasi ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan, namun disertakan dalam lampiran laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bintan.

7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

7.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis Penyusunan Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja



dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

- c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

- d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

- e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;



- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non-keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Prinsip-prinsip dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam



memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

- a) basis akuntansi;
- b) prinsip nilai perolehan;
- c) prinsip realisasi;
- d) prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e) prinsip periodisitas;
- f) prinsip konsistensi;
- g) prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h) prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian
2. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.
3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.
4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

1. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
2. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.



Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

1. Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.
2. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat dianjurkan.

Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

1. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
2. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

1. Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.



2. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

7.4.5 Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Definisi Pendapatan -LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.



Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Pendapatan LRA terdiri dari

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA
- b. Pendapatan Transfer – LRA
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Pengakuan Pendapatan -LRA

Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran Pendapatan -LRA

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatandimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan



Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan -LRA

Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan Asli Daerah –LRA

Definisi Pendapatan Asli Daerah – LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah)

Pengakuan Pendapatan Asli Daerah –LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah –LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah – LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Transfer –LRA

Definisi Pendapatan Transfer –LRA



Pendapatan Transfer – LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005).

Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA

Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.

Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA

Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Definisi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA (dana perimbangan).

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah – LRA,
- b. Dana Darurat – LRA,
- c. Pendapatan Lainnya – LRA.

.Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh PPKD.

Pengukuran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

Penyajian Dan Pengungkapan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Kebijakan Akuntansi Belanja

Definisi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.

Pengakuan Belanja

Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan hingga tanggal pelaporan belum dipertanggungjawabkan/dimintakan penggantian dari RKUD, dengan ketentuan Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Pengukuran Belanja

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian Dan Pengungkapan Belanja

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.



Belanja Operasi

Definisi Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial adalah Belanja Operasi yang ada di PPKD.

Belanja pegawai serta belanja barang dan jasa adalah Belanja Operasi yang ada di SKPD.

Pengakuan Belanja Operasi

Pengakuan belanja operasi pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD atau bendahara pengeluaran berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan menggunakan dokumen SP2D GU atau SP2D Nihil,

Pengukuran Belanja Operasi

Pengukuran belanja operasi dilakukan dengan azas bruto yaitu sesuai dengan jumlah nominal yang tercantum pada bukti pengeluaran yang sah.

Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Operasi

Belanja operasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Belanja modal

Definisi belanja modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Belanja Modal merupakan akun yang akan dikelola oleh unit SKPD.

Pengakuan Belanja Modal

Pengakuan Belanja Modal dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Bersamaan dengan pengakuan Belanja Modal dilakukan pengakuan atas Aset Tetap (basis akrual).



Pengukuran Belanja Modal

Pengukuran Belanja Modal dilakukan berdasarkan jumlah nominal yang tercantum dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Penyajian dan Pengungkapan Belanja Modal

Belanja Modal disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Belanja tak terduga

Definisi belanja tak terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja Tak Terduga adalah akun yang akan dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau unit Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Pengakuan belanja Tak Terduga

Pengakuan Belanja Tak Terduga pada saat terjadinya pengeluaran kas berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Pengukuran Belanja Tak Terduga

Pengukuran Belanja Tak Terduga berdasarkan nilai yang diterima dalam bukti pengeluaran atas belanja tak terduga atau berdasarkan jumlah nilai dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Kebijakan Akuntansi Transfer

Definisi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk (bagi pemerintah daerah) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Transfer masuk (bagi pemerintah daerah) terklasifikasi dalam Pendapatan Transfer.



Transfer keluar (bagi pemerintah daerah) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, Transfer yang dimaksud adalah transfer keluar yang terdiri dari:

- a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan
- b. Transfer Bantuan Keuangan.

Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke pemerintahan daerah yang lebih rendah.

Transfer Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pengakuan Transfer

Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja.

Transfer hanya dikeluarkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Namun sesuai dengan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Transfer ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Transfer

Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian Dan Pengungkapan Transfer

Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan klasifikasi Transfer dan disajikan setelah klasifikasi Belanja. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan



b. Pengeluaran pembiayaan

Penerimaan pembiayaan definisi

Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian Dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pengeluaran Pembiayaan

Definisi Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.



Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Penyajian Dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

B. Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.

Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.

Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:

- a. Surplus/Defisit - LRA
- b. Pembiayaan Netto
- c. SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
- d. Perubahan SAL

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. (PSAP 01 Paragraf 8).

Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.



Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.

Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.

Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.

Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

penyajian dan pengungkapan saldo anggaran lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (face) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

C. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset nonlancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.



Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Aset lancar

Kas dan setara kas

Definisi Kas Dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas meliputi:

1. Seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan atau yang lebih dikenal sebagai Uang Persediaan,
2. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran,
3. Uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas daerah,
4. Uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kas terdiri dari :

1. Kas di Kas Daerah;
2. Kas di Bendahara Penerimaan;
3. Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas meliputi investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Setara kas terdiri dari :

1. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
2. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau Rekening Kas Umum Daerah.



Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pengukuran Kas Dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengakuan Kas Dan Setara Kas

Terkait dengan pengakuan aset, secara umum pengakuan aset dilakukan:

pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

Penyajian Dan Pengungkapan Kas Dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;

rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.



Investasi jangka pendek

Definisi investasi jangka pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;

Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
2. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (reliable) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

Penyajian Dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

Penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;

Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;

Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);

Penurunan nilai investasijangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;



Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

Piutang

Definisi piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pada bagan akun standar, piutang terbagi menjadi:

1. Piutang pendapatan,
2. Piutang Lainnya.

Piutang Pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari, yang dibedakan menjadi:

1. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/ pungutan pendapatan daerah;
2. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian;
3. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan;

Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/ pungutan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di pemerintah daerah yang meliputi Piutang Lain-lain PAD yang Sah.

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Bantuan Keuangan, Piutang Hibah, dan Piutang Pendapatan Lainnya.

Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer.

Jenis piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan antara lain meliputi:



1. Piutang Transfer Pemerintah Pusat seperti Piutang Bagi Hasil, Piutang DAU, Piutang DAK; Piutang Transfer Pemerintah Pusat-lainnya seperti Piutang Dana otonomi Khusus, Piutang Dana Penyesuaian, dan Piutang Dana Darurat;
2. Piutang Transfer Pemerintah Daerah seperti Piutang Bagi Hasil ke Pemerintah dibawahnya.

Piutang Lainnya dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang, yang dibedakan menjadi

1. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi
2. Piutang berdasarkan peristiwa lainnya.

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Piutang berdasarkan peristiwa lainnya adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa di atas. Piutang ini meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka, dan Panjar Kegiatan.

Uang Muka adalah suatu pengeluaran kas kepada pihak lain yang menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Uang muka ini misalnya adalah uang muka pengadaan barang/jasa.

Panjar Kegiatan adalah suatu pengeluarankas yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran sebagai pada awal pelaksanaan suatu kegiatan dan menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah dengan penyelesaian kegiatan yang dilaksanakan.

Pengukuran Piutang

Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Piutang pendapatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas negara/daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:



1. Untuk metode *official assessment* dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan:
 - a. Dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b. Dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - c. Dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.
2. Untuk metode *self assessment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.
3. Dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang.

Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah, dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
2. Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
3. Piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
4. Piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
5. Piutang Transaksi dibayar di muka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar pemerintah daerah.

Pengukuran Piutang transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2. Dana Alokasi Umum (DAU) dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran Piutang lainnya berdasarkan peristiwa tuntutan ganti rugi dilakukan dengan :

1. Mencatatnya sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Mencatatnya sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran piutang lainnya berdasarkan peristiwa lainnya dicatat sesuai dengan nilai nilai nominal piutang yang belum dibayar atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/dipertanggungjawabkan.

Pengakuan Piutang

Piutang pendapatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari harus dipenuhi kriteria:

1. Telah diterbitkan surat ketetapan;
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pendapatan berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria :

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur;
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pendapatan berdasarkan Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:

1. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, tetapi masih ada hak daerah yang bersangkutan belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah.
2. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU), apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai



piutang oleh pemerintah daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

3. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pemerintah daerah dapat mencatat klaim yang belum ditransfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK.
4. Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak pemerintah daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah.
5. Piutang Transfer Antar Daerah, apabila jumlah/nilai definitif jumlah yang menjadi hakpemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang pemerintah daerah.

Piutang lainnya berdasarkan Peristiwa tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria:

1. Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
2. Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya seperti:

1. Pengakuan Uang Muka Beban Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka, maka transaksi ini akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran Uang Muka Beban Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka.
2. Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapannya.

Penyajian Dan Pengungkapan Piutang

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
4. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan.



Penyesuaian nilai piutang dapat dilakukan dengan cara:

1. Metode Penghapusan Langsung; dan
2. Metode Penyisihan.

Metode Penghapusan Langsung adalah Penghapusan sejumlah piutang yang sudah dipastikan tidak akan tertagih, digunakan ketika tidak memungkinkan mengestimasi piutang tidak tertagih, atau ketika jumlah piutang relatif kecil dibandingkan dengan total aset lancar.

Metode Penyisihan adalah Penyisihan sejumlah piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih, digunakan ketika jumlah piutang relatif besar dibandingkan dengan total aset lancar.

Penyisihan Piutang tak tertagih untuk jenis piutang berikut ini diperlakukan dengan kebijakan persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang yaitu:

Tabel 7.4.1 Kebijakan Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang

Nomor	Jenis Piutang	Umur Piutang			
		< 1 Th	1-3 Th	3-5 Th	>5Th
1	Piutang Pajak Daerah	0,5 %	10%	50%	100%
2	Piutang Retribusi Daerah	0,5 %	10%	50%	100%
3	Piutang Dana Bergulir	0,5 %	10%	50%	100%
4	Selain Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Dana Bergulir	0,5 %	10%	50%	100%

Penyajian Dan Pengungkapan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Pencatatan Perubahan Jumlah Piutang harus disajikan dan diungkapkan jika terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan Penghapusan Piutang oleh Bendahara Umum Daerah dapat dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per Debitor yang memiliki kualitas macet. Penghapusan Piutang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Perlakuan akuntansi penghapusan dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan. Dalam hal terdapat penambahan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara menambah akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan penambahan jumlah Piutang dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/persetujuan/keputusan.



Dalam hal terdapat pengurangan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan pengurangan jumlah Piutang dilakukan apabila:

1. Surat tagihan/persetujuan/keputusan telah terbit; atau
2. Restrukturisasi telah selesai dilaksanakan.

Beban dibayar dimuka

Definisi beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

Persediaan

Definisi persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/instansi pemerintah lainnya;
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan/instansi pemerintah lainnya.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.



Untuk barang yang diproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan meliputi:

1. Barang konsumsi;
2. Barang pakai habis;
3. Barang cetakan;
4. Perangko dan materai;
5. Obat-obatan dan bahan farmasi;
6. Amunisi;
7. Bahan untuk pemeliharaan;
8. Suku cadang;
9. Persediaan untuk tujuan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) /berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras);
10. Pita cukai dan leges;
11. Bahan baku ;
12. Barang dalam proses/setengah jadi;
13. Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
14. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diungkapkan secara jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral).

Persediaan diakui sebagai:

1. Aset, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan dan bahan farmasi.



2. Beban, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenisnya.

Pengukuran Persediaan

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.

Pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan:

1. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenisnya.
2. Persediaan dicatat secara perpetual meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi, jenis persediaan yang sifatnya continues, dan membutuhkan kontrol yang besar antara lain berupa obat-obatan, bahan farmasi dan yang sejenisnya.

Metode periodik adalah metode pencatatan persediaan dimana nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Dengan metode periodik ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

Metode perpetual adalah metode pencatatan persediaan dimana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan.

Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan:

1. Harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.
2. Metode sistematis FIFO (First In First Out) jika persediaan dicatat secara perpetual.

Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.

Metode sistematis FIFO (First In First Out) adalah metode pengukuran nilai persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang digunakan.

Metode FIFO ini memungkinkan harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Penyajian Dan Pengungkapan Persediaan

Pengungkapan untuk persediaan di dalam Laporan Keuangan, antara lain:

1. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



2. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

Aset untuk dikonsolidasikan

Definisi aset untuk dikonsolidasikan

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengakuan Aset Untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengukuran Aset Untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

Pengungkapan Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

Aset Non Lancar

Aset nonlancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi Jangka Panjang

Definisi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.



Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen berupa:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
2. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, berupa:

1. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
2. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
3. Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
4. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

1. Deviden Tunai;
2. Deviden Saham; dan
3. Bagian Laba.

Pengakuan untuk hasil investasi untuk Deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
2. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi



(dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual)

Pengakuan untuk hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.

Pengakuan untuk hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
2. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:

1. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
2. Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
3. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
4. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
5. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.



Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (carrying value) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode Biaya;
2. Metode Ekuitas;
3. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh

yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penyajian Dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Aset tetap

Definisi aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. (PSAP 07 Paragraf 4).

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau



konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Masa manfaat adalah:

1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
2. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
3. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
4. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

Aset Tetap renovasi adalah komponen biaya renovasi atas aset tetap yang digunakan oleh pemerintah daerah, namun kepemilikannya bukan oleh pemerintah daerah.



Penyajian Aset Tetap renovasi termasuk dalam Aset Tetap lainnya dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan Aset Tetap yang diperoleh dari pengadaan barang dan jasa dilakukan bersamaan dengan adanya pengakuan Belanja Modal (basis kas). Pengakuan Belanja Modal (basis kas) didasarkan pada dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.4.2 Komponen Biaya Perolehan

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	Pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan



Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	mesin tersebut siap
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
Jalan, Jaringan, & Instalasi	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
	Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan capitalization threshold. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Penyajian Dan Pengungkapan Aset Tetap

Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
2. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
3. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar



kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

4. Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
5. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
6. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
7. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
8. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (carrying amount).
9. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap

Definisi penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Akumulasi penyusutan (accumulated depreciaton) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

Masa manfaat adalah:

1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi biaya penyusutan. Nilai sisa pada akhir masa manfaat adalah Rp. 1,00 (satu rupiah)



Pengakuan Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (which ever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pengukuran Penyusutan Aset Tetap

Pengukuran penyusutan aset tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aset tetap yang akan disusutkan harus memiliki nilai perolehan.
2. Cara penetapan nilai perolehan aset tetap pada huruf a tersebut antara lain mengacu pada harga pasar setempat, appraisal dan penetapan harga oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
3. Untuk aset tetap yang direnovasi, mekanisme penyusutannya adalah:
 - a. Menentukan nilai buku aset tetap yang akan direnovasi,
 - b. Menambahkan biaya renovasi yang akan mengkapitalisasi aset tetap yang bersangkutan,
 - c. Menentukan kembali umur manfaat ekonomis aset tetap dimulai sejak selesainya kegiatan renovasi,
 - d. Penentuan nilai perolehan aset setelah renovasi adalah sebesar nilai buku dikurangi nilai komponen yang dibongkar ditambah nilai renovasi.
4. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.
5. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.

Penyajian Dan Pengungkapan Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan secara akumulasi.



Dana cadangan

Definisi dana cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

Pengukuran Dana Cadangan

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Penyajian Dan Pengungkapan Dana Cadangan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Aset lainnya

Definisi aset lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang termasuk aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan Pihak Ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Lainnya terdiri dari:

1. Tagihan Jangka Panjang;
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;



3. Aset Tidak Berwujud;
4. Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan Angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.

Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:

1. Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
2. Bangun, Kelola, Serah – BKS (Build, Operate, Transfer – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BKS.
3. Bangun, Serah, Kelola – BSK (Build, Transfer, Operate – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
4. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
5. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Jenis Aset Tak Berwujud adalah:

1. Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
2. Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.



3. Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
4. Software komputer yang termasuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
5. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
6. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
7. Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
8. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan.

Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal, sengketa hukum), piutang tidak tertagih (macet) yang belum terbit surat ketetapan penghapusannya, Detail Engineering Design (DED) dan AMDAL yang belum terealisasi konstruksi pembangunannya.

Pengakuan Aset Lainnya

Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:

1. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.



2. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSK/BTO, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
3. Dalam rangka kerja sama pola BSK/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
4. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
5. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
6. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
7. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

Aset Tak Berwujud diakui pada saat:

1. Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak.

Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

1. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
2. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
3. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar



nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

1. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
2. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1. Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
2. Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
3. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah :

1. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
2. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari.
3. Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.

Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

Proses penghapusan terhadap aset lain-lain diantaranya piutang macet, aset tetap yang kondisinya rusak berat, software (aplikasi) yang sudah tidak dimanfaatkan dan aset lain-lain yang tidak ada manfaatnya dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi, kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.



Penyajian Dan Pengungkapan

Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non-Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.

Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.

Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

1. Masa manfaat dan metode amortisasi;
2. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud;
3. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Amortisasi Aset Lainnya

Definisi Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun “Beban Amortisasi” terhadap akun “Akumulasi Amortisasi”.

Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas dengan :

Amortisasi Atas Aset Tidak Berwujud

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tidak berwujud (ATB) secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Masa Manfaat untuk ATB adalah terbatas atau tak terbatas.

**Aset Tetap Renovasi**

Suatu satuan kerja dapat melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang bukan miliknya. Jika biaya renovasi tersebut material, memenuhi kriteria kapitalisasi dan meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap, maka biaya renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap renovasi dalam kelompok aset tetap lainnya. Tetapi jika biaya renovasi tersebut tidak material, tidak memenuhi kriteria kapitalisasi, dan tidak meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap yang direnovasi tersebut atau manfaat ekonominya kurang dari satu tahun, maka biaya renovasi diperlakukan sebagai beban operasional tahun berjalan. Kriteria kapitalisasi harus memperhatikan kebijakan akuntansi tentang ketentuan nilai minimum kapitalisasi. Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset tetap renovasi tersebut belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi.

Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, tanaman, dan aset tetap renovasi.

Aset tetap lainnya berupa barang bercorak kebudayaan/olah raga, hewan, tanaman dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak digunakan atau mati.

Untuk penyusutan pada aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomisnya, mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset tetap tersebut dengan masa pinjam pakai/sewa. Penyusutan atas aset tetap lainnya pada suatu periodik disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

Metode perhitungan penyusutan aset tetap renovasi adalah dengan- menggunakan metode garis lurus.

Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya

Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”

- b.** Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban muncul antara lain karena:



1. penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
2. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;
3. kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
4. kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu:

1. Kewajiban Jangka Pendek; dan
2. Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban jangka pendek

Definisi kewajiban jangka pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan.

Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek adalah:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
2. Utang Bunga (Accrued Interest);
3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
4. Pendapatan Diterima Dimuka;
5. Utang Beban; dan
6. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

1. Utang Bunga (Accrued Interest);
2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
3. Utang Beban; dan
4. Utang Jangka Pendek Lainnya;

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
2. Pendapatan Diterima Dimuka;
3. Utang Beban; dan
4. Utang Jangka Pendek Lainnya;



Utang perhitungan fihak ketiga (PFK)

Definisi utang perhitungan fihak ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran BPJS, Taspen, dan Taperum.

Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapetarum, dan BPJS) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Utang bunga (accrued interest)

Definisi utang bunga (accrued interest)

Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.

Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

Pengakuan Utang Bunga (Accrued Interest)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya



berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran Utang Bunga (Accrued Interest)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Bunga (Accrued Interest)

Utang bunga maupun commitment fee merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun commitment fee untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang commitment fee diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara terpisah.

Utang jangka pendek lainnya

Definisi utang jangka pendek lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya pendapatan yang ditangguhkan.

Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampe dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

Kewajiban untuk dikonsolidasikan

Definisi kewajiban untuk dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD.

Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.



Akun ini menurut Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.

Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

Pengakuan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

Pengukuran Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.

Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

Pengungkapan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Definisi Bagian

Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand).

Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.



Penyajian Dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan dineraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan diterima dimuka

Definisi pendapatan diterima dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Utang beban

Definisi utang beban

Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (Account Payable).

Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

1. Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
2. Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan dibelakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.



3. Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
4. Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat:

1. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
2. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
3. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Utang jangka pendek lainnya

Definisi utang jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Kewajiban Jangka Panjang

Definisi kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya.

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah:

1. Utang Dalam Negeri;
2. Utang Luar Negeri; dan
3. Utang Jangka Panjang Lainnya.

Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD

Utang Dalam Negeri

Definisi Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

1. Utang Dalam Negeri – sektor perbankan;
2. Utang Dalam Negeri – sektor lembaga keuangan non bank;
3. Utang Dalam Negeri – obligasi;
4. Utang pemerintah pusat;
5. Utang pemerintah provinsi; dan
6. Utang pemerintah kabupaten/kota.

Pengakuan Utang Dalam Negeri

Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

Pengukuran Utang Dalam Negeri

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.



Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman.

Utang Luar Negeri

Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

Definisi Utang Luar Negeri

Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

Pengakuan Utang Luar Negeri

kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran Utang Luar Negeri

Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.



Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (carrying amount) utang tersebut.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (carrying amount).

Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

Utang jangka panjang lainnya

Definisi utang jangka panjang lainnya

Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan

Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK).

Bangun, Serah, Kelola (BSK) merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan para pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.

Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.

Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.



Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013.

Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

Penyajian Dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



D. Laporan Operasional (LO)

Definisi Pendapatan – LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Pendapatan – LO terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah – LO,
- b. Pendapatan Transfer – LO,
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO
- d. Pendapatan NonOperasional – LO
- e. Pos Luar Biasa – LO.

Pengakuan Pendapatan – LO

Pendapatan–LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan; dan
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:

- a. Pendapatan–LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
- b. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pendapatan–LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- a. Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
- b. Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- c. Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.

Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak



pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.

Penetapan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan.

Untuk alasan kepraktisan dan sifat pendapatan daerah serta mempertimbangkan biaya dan manfaat maka Pendapatan–LO dapat diakui pada saat kas diterima (bersamaan dengan penerimaan kas) dengan memperhatikan:

- a. Dalam hal akhir tahun terdapat Surat Ketetapan Pajak yang belum dibayar oleh masyarakat, maka nilainya diakui sebagai penambah Pendapatan Pajak–LO. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Piutang Pajak Daerah” di debit dan “Pendapatan Pajak–LO (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.
- b. Penerimaan kas atas ketetapan tersebut di atas, pada periode akuntansi berikutnya tidak diakui sebagai pendapatan tetapi harus diakui sebagai pengurangan terhadap “Piutang Pendapatan (Piutang Pajak Daerah sesuai dengna rincian obyek terkait)”.
c. Mengadministrasikan Piutang Pendapatan (Piutang Pajak/Retribusi Daerah) tersebut berdasarkan umur piutang dan debitur atau wajib pajak/retribusi sebagai dasar perhitungan beban penyisihan piutang.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan – LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan:

- a. Perbedaan waktu yang terjadi tidak terlalu lama/pendek Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tidak terlalu lama dan masih dalam periode akuntansi maka ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (accounting treatment) yang harus dilakukan.
- b. Ketidakpastian penerimaan yang cukup tinggi

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian akan jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

Penetapan – LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.



Pengukuran Pendapatan – LO

Pendapatan–LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan–LObruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan - LO

Pendapatan – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Asli Daerah – LO

Definisi Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pengakuan Pendapatan Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi pemerintah daerah.

Jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) pengakuan atar Pendapatan Asli Daerah – LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:

- a. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak pemerintah daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
- b. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah – LO dengan pertimbangan kepraktisan; biaya dan manfaat; jangka waktu antara pengakuan hak dan penerimaan kas yang tidak terlalu lama; dan tidak adanya dokumen penetapan maka Pendapatan Asli Daerah – LO dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.
- c. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah – LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.

Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (accounting treatment) pada akhir periode



akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (understated) maupun lebih (overstated).

Pendapatan Asli Daerah – LO untuk rincian Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai karakteristik yang spesifik. Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai siklus yang tetap dan pasti. Misalnya pajak dibayarkan pada bulan Mei, maka wajib pajak membayar untuk waktu 12 (dua belas) bulan. Meskipun hak atas pajak kendaraan pada periode akuntansi berjalan hanya sekitar 8 (delapan) bulan namun pada periode akuntansi berikutnya dan sebelumnya selalu dibayarkan pajak dengan jangka waktu yang sama. Sehingga hak atas pajak kendaraan tersebut diakui dengan jumlah yang sama untuk periode akuntansi bersangkutan.

Dengan pertimbangan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor akan selalu dibayarkan untuk waktu 12 (dua belas) bulan (adanya kepastian jumlah hak yang akan diterima), tidak akan pernah ada klaim (restitusi), kepraktisan pengakuan maka Pajak Kendaraan Bermotor diakui haknya dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas dan nilai yang diakui adalah nilai pajak 12 (dua belas) bulan.

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah – LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah –LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Transfer – LO

Definisi Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO atau Dana Perimbangan adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Alokasi Pendapatan Transfer – LO untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden RI Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Kas Umum Negara.

Pengakuan Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO diakui pada saat hak atas pendapatan tersebut timbul yaitu bersamaan dengan terbitnya peraturan mengenai Alokasi Pendapatan Transfer.

Pada saat Alokasi Pendapatan Transfer diterbitkan dan terjadi pengakuan Pendapatan Transfer – LO, jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pendapatan ini diakui dengan kondisi sebelum penerimaan kas. Oleh sebab itu saat pengakuan Pendapatan Transfer – LO akan menimbulkan akun Piutang Pendapatan Transfer – LO pada sisi debit.



Pencairan atau penerimaan distribusi Pendapatan Transfer – LO secara periodik mengurangi jumlah Piutang Transfer – LO dan tidak akan menambah Pendapatan Transfer – LO. Pencairan ini diakui berdasarkan Nota Kredit yang diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan Transfer – LO hanya dilakukan di unit PPKD.

Pengukuran Pendapatan Transfer – LO

Pengukuran Pendapatan Transfer – LO dilakukan berdasarkan jumlah Alokasi Pendapatan Transfer.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer – LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO

Definisi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LO dan Pendapatan Transfer – LO (dana perimbangan).

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO terdiri dari:

- a. Pendapatan Hibah – LO,
- b. Dana Darurat – LO,
- c. Pendaptan Lainnya – LO.

Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO adalah pada saat pendapatan ini menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan Hibah – LO diakui pada saat perjanjian Hibah disetujui.

Dana Darurat – LO terkait dengan sifatnya ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan dikeluarkannya Kas di Kas Daerah (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.

Pendapatan Lainnya – LO diakui pada saat telah menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah.

Pengukuran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang menjadi hak pemerintah daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.



Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Non Operasional – LO

Definisi Pendapatan Non Operasional – LO

Pendapatan Non Operasional – LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.

Pendapatan Non Operasional – LO terdiri dari:

- a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO.
- b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO.
- c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO.

Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO

Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO pada saat hak atas pendapatan timbul.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misalnya: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

Pengukuran Pendapatan Non Operasional – LO

Pendapatan Non Operasional – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional – LO

Pendapatan Non Operasional - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional – LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pos Luar Biasa – LO

Definisi Pos Luar Biasa – LO

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pengakuan Pos Luar Biasa – LO

Pos Luar Biasa – LO diakui pada saat hak atas pendapatan pos luar biasa timbul.



Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.

Pengukuran Pos Luar Biasa – LO

Pos Luar Biasa – LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan pos Luar Biasa – LO

Pos Luar Biasa - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan Non Operasional. Rincian dari Pendapatan Non Operasional – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Kebijakan Akuntansi Beban

Definisi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban terdiri dari:

- a. Beban Operasi
- b. Beban Transfer
- c. Beban Non Operasional
- d. Beban Luar Biasa

Pengakuan Beban

Beban dapat diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.



Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat

terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (accounting treatment) yang panjang yang harus dilakukan.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian Dan Pengungkapan Beban

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



Beban operasi

Definisi beban operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.



Pengakuan Beban Operasi

Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.

Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.

Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Pengukuran Beban Operasi

Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.



Penyajian Dan Pengungkapan Beban Operasi

Beban Operasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban Transfer

Definisi Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengakuan Beban Transfer

Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian Dan Pengungkapan Beban Transfer

Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban non operasional

Definisi beban non operasional

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Pengakuan Beban Non Operasional

Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.

Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Pengukuran Beban Non Operasional

Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian Dan Pengungkapan Beban Non Operasional

Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban luar biasa

Definisi beban luar biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.



Pengakuan Beban Luar Biasa

Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Pengukuran Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dihasilkan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian Dan Pengungkapan Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Rincian dari Beban Luar Biasa dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

E. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang



diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (on the face) laporan keuangan.

**7.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN****7.5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN****7.5.1.1 PENDAPATAN - LRA**

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Sisa Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Kabupaten Bintan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lainnya Pendapatan yang Sah, dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut.

**Tabel 7.5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan - LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Pendapatan Asli Daerah	199.884.059.562,00	195.745.874.584,92	97,93	(4.138.184.977,08)	165.752.528.837,45	18,10
2	Pendapatan Transfer	848.503.369.330,00	870.158.338.817,00	102,55	21.654.969.487,00	970.985.065.362,00	(10,43)
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	29.257.526.000,00	40.086.631.395,00	137,01	10.829.105.395,00	69.389.521.687,00	(41,81)
	Jumlah	1.077.644.954.892,00	1.105.990.844.796,92	102,63	28.345.889.904,92	1.206.127.115.886,50	(8,30)

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan - LRA TA 2021 adalah sebesar Rp1.077.644.954.892,00 terealisasi sebesar Rp1.105.990.844.796,92 atau 102,63%. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp100.136.271.089,53 atau 8,30%. Penurunan realisasi pendapatan daerah TA 2021 dari TA 2020 terjadi karena adanya penurunan dari Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

7.5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA

Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA yang dicapai pada TA 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Pajak Daerah-LRA	144.285.785.000,00	130.059.598.323,77	90,14	(14.226.186.676,23)	107.816.743.354,99	20,63
2	Retribusi Daerah-LRA	8.567.875.000,00	7.601.797.691,00	88,72	(966.077.309,00)	7.761.066.224,00	(2,05)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA	10.477.231.219,00	11.411.312.907,00	108,92	934.081.688,00	8.959.879.482,00	27,36
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA	36.553.168.343,00	46.673.165.663,15	127,69	10.119.997.320,15	41.214.839.776,46	13,24
	Jumlah	199.884.059.562,00	195.745.874.584,92	97,93	(4.138.184.977,08)	165.752.528.837,45	18,10

Tabel di atas menunjukkan anggaran masing-masing jenis PAD TA 2021 sebesar Rp199.884.059.562,00 terealisasi sebesar Rp195.745.874.584,92 atau 97,93%. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp29.993.345.747,47 atau 18,10%.

7.5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Pendapatan Pajak Daerah merupakan Pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengeloa Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Bintan. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LRA TA 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Pajak Hotel - LRA	38.136.578.000,00	13.241.827.713,99	34,72	(24.894.750.286,01)	26.975.009.780,15	(50,91)
2	Pajak Restoran – LRA	22.722.495.000,00	6.213.190.825,03	27,34	(16.509.304.174,97)	11.134.932.754,04	(44,20)
3	Pajak Hiburan - LRA	5.877.735.000,00	373.205.305,00	6,35	(5.504.529.695,00)	2.093.843.083,80	(82,18)
4	Pajak Reklame – LRA	531.167.000,00	510.125.857,00	96,04	(21.041.143,00)	574.645.756,00	(11,23)
5	Pajak Penerangan Jalan – LRA	12.954.623.000,00	12.984.150.557,00	100,23	29.527.557,00	13.081.011.557,00	(0,74)
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	12.505.700.000,00	13.029.623.287,00	104,19	523.923.287,00	16.822.447.684,00	(22,55)
7	Pajak Parkir - LRA	130.291.000,00	69.858.633,00	53,62	(60.432.367,00)	141.470.500,00	(50,62)
8	Pajak Air Tanah - LRA	5.000.000,00	3.552.000,00	71,04	(1.448.000,00)	5.900.000,00	(39,80)
9	Pajak Sarang Burung Walet – LRA	3.600.000,00	1.450.000,00	40,28	(2.150.000,00)	3.500.000,00	(58,57)
10	BPHTB – LRA	16.965.826.000,00	24.180.312.733,75	142,52	7.214.486.733,75	17.461.344.864,00	38,48
11	PBB-P2-LRA	34.452.770.000,00	59.452.301.412,00	172,56	24.999.531.412,00	19.522.637.376,00	204,53
Jumlah		144.285.785.000,00	130.059.598.323,77	90,14	(14.226.186.676,23)	107.816.743.354,99	20,63

Tabel diatas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp144.285.785.000,00 terealisasi sebesar Rp130.059.598.323,77 atau 90,14%. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp22.242.854.968,78 atau 20,63%. Dari jumlah realisasi pendapatan pajak daerah tersebut, diantaranya sebesar Rp59.452.301.412,00 diperoleh dari obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang merupakan kontribusi pendapatan pajak daerah terbesar.

7.5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Retribusi Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 dipungut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LRA TA 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah –LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Retribusi Jasa Umum – LRA	282.510.000,00	250.559.200,00	88,69	(31.950.800,00)	259.832.400,00	(3,57)
2	Retribusi Jasa Usaha – LRA	1.110.000.000,00	664.506.500,00	59,87	(445.493.500,00)	2.762.036.813,00	(75,94)
3	Retribusi Perijinan Tertentu - LRA	7.175.365.000,00	6.686.731.991,00	93,19	-488.633.009,00	4.739.197.011,00	41,09
Jumlah		8.567.875.000,00	7.601.797.691,00	88,72	(966.077.309,00)	7.761.066.224,00	(2,05)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan retribusi daerah – LRA TA 2021 sebesar Rp8.567.875.000,00 terealisasi sebesar Rp7.601.797.691,00 atau 88,72%. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp159.268.533,00 atau 2,05%. Dari jumlah realisasi pendapatan Retribusi Daerah - LRA tersebut, diantaranya sebesar Rp6.686.731.991,00 atau 93,19% diperoleh dari obyek retribusi Perijinan Tertentu yang merupakan pemberi kontribusi retribusi daerah terbesar. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LRA TA 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

7.5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum - LRA

Retribusi Jasa Umum - LRA merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum – LRA TA 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan) – LRA	60.000.000,00	42.411.500,00	70,69	(17.588.500,00)	56.055.000,00	(24,34)
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LRA	116.000.000,00	123.900.000,00	106,81	7.900.000,00	100.700.000,00	23,04
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LRA	38.000.000,00	11.995.000,00	31,57	(26.005.000,00)	44.563.000,00	(73,08)
4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	68.510.000,00	72.252.700,00	105,46	3.742.700,00	58.514.400,00	23,48
Jumlah		282.510.000,00	250.559.200,00	88,69	(31.950.800,00)	259.832.400,00	(3,57)

Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan Retribusi Jasa Umum – LRA TA 2021 sebesar Rp282.510.000,00 terealisasi sebesar Rp250.559.200,00 atau 88,69%. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp9.273.200,00 atau 3,57%.

7.5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha - LRA

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LRA merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah. Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha - LRA TA 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	354.000.000,00	506.610.000,00	143,11	152.610.000,00	534.268.813,00	(5,18)
2	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LRA	756.000.000,00	151.342.500,00	20,02	(604.657.500,00)	2.227.768.000,00	(93,21)
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga – LRA	0,00	6.554.000,00	0,00	6.554.000,00	0,00	0,00
Jumlah		1.110.000.000,00	664.506.500,00	59,87	(445.493.500,00)	2.762.036.813,00	(75,94)

Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LRA TA 2021 sebesar Rp1.110.000.000,00 terealisasi sebesar Rp664.506.500,00 atau 59,87%. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp2.097.530.313,00 atau 75,94%. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA terdiri dari Sewa Rumah Dinas dan Sewa Laboratorium. Pada Tahun 2021 terjadi



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

penurunan signifikan atas retribusi jasa usaha berupa penurunan retribusi pelayanan kepelabuhanan yang disebabkan karena dampak dari Pandemi COVID-19 dimana kunjungan wisata lagoi di Kecamatan Teluk Sebung mengalami penurunan bahkan kekosongan total.

7.5.1.1.1.2.3 Retribusi Perijinan Tertentu - LRA

Pendapatan retribusi perijinan tertentu - LRA berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan ijin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perijinan Tertentu merupakan sumber PAD – LRA dapat dirinci pada tabel sebagai berikut. Pendapatan retribusi perijinan tertentu - LRA berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan ijin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Anggaran dan realisasi Retribusi Perijinan Tertentu – LRA TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu - LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Retribusi IMB – LRA	5.794.000.000,00	5.201.033.191,00	89,77	(592.966.809,00)	2.303.213.411,00	125,82
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LRA	80.000.000,00	56.000.000,00	70,00	(24.000.000,00)	53.000.000,00	5,66
3	Retribusi Izin Trayek – LRA	1.365.000,00	90.000,00	6,59	(1.275.000,00)	1.365.000,00	(93,41)
4	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing – LRA	1.300.000.000,00	1.429.608.800,00	89,77	(592.966.809,00)	2.381.618.600,00	(39,97)
Jumlah		7.175.365.000,00	6.686.731.991,00	93,19	(488.633.009,00)	4.739.197.011,00	41,09

Tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan retribusi perijinan tertentu – LRA TA 2021 sebesar Rp7.175.365.000,00 terealisasi sebesar Rp6.686.731.991,00 atau 93,19%. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.947.534.980,00 atau 41,09%.

7.5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan yang diterima dan dikelola melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bintan yang berupa PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bintan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Anggaran dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.8 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	BUMD/BPR Bintan – LRA	3.106.224.484,00	1.778.554.464,00	57,26	(1.327.670.020,00)	2.264.445.431,00	(21,46)
2	BUMD PT BIS – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	144.536.026,00	(100,00)
3	Bank Riau Kepri - LRA	7.371.006.735,00	9.632.758.443,00	130,68	2.261.751.708,00	6.550.898.025,00	47,04
Jumlah		10.477.231.219,00	11.411.312.907,00	108,92	934.081.688,00	8.959.879.482,00	27,36

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA tahun 2021 mencapai Rp11.411.312.907,00 atau sebesar 108,92% dari anggaran sebesar Rp10.477.231.219,00 yang berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR Bintan dan Bank Riau Kepri. Dibandingkan dengan realisasi TA 2020 meningkat sebesar Rp2.451.433.425,00 atau 27,36%.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

7.5.1.1.4 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah - LRA

Anggaran dan realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah – LRA TA 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

NO	URAIAN	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	377.868.105,00	0,00	377.868.105,00	89.575.716,00	321,84
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	4.127.200,00	0,00	4.127.200,00	0,00	0,00
3	Jasa Giro	1.567.434.100,00	1.992.359.653,76	127,11	424.925.553,76	2.657.024.904,59	(25,02)
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	600.000,00	100,00	600.000,00	270.000,00	122,22
5	Pendapatan Bunga Deposito	7.500.000.000,00	3.566.857.266,46	47,56	(3.933.142.733,54)	10.079.870.461,70	(64,61)
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah (TGR)	0,00	0,00	0,00	0,00	289.849.200,00	(100,00)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	158.980.221,80	0,00	158.980.221,80	61.574.020,56	158,19
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	4.130.831.096,57	0,00	4.130.831.096,57	1.391.200.341,98	196,93
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	111.933.661,00	(100,00)
10	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	957.705.473,56	0,00	957.705.473,56	648.734.150,92	47,63
11	Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	0,00	0,00	0,00	243.331.400,00	(100,00)
12	Penerimaan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	496.791.149,71	(100,00)
13	Pendapatan BLUD	24.451.491.943,00	32.605.539.485,00	133,35	8.154.047.542,00	22.407.144.223,00	45,51
14	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	4.286.411,00	0,00	4.286.411,00	1.405.447,00	204,99
15	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	3.034.242.300,00	2.874.010.750,00	94,72	(160.231.550,00)	2.628.937.800,00	9,32
16	Pendapatan JKN di FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00	107.197.300,00	(100,00)
Jumlah		36.553.168.343,00	46.673.165.663,15	127,69	10.119.997.320,15	41.214.839.776,46	13,24

Tabel di atas menunjukkan Anggaran lain–lain PAD yang Sah TA 2021 sebesar Rp36.553.168.343,00 terealisasi sebesar Rp46.673.165.663,15 atau 127,69%. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp5.458.325.886,69 atau 13,24%. Sedangkan perbandingan antara target dan realisasi Tahun 2021 melebihi sebesar 27,69%. Pos-pos pendapatan yang melampaui antara lain adalah pendapatan jasa giro sebesar Rp1.992.359.653,76 atau 127,11% dan Pendapatan dari BLUD sebesar Rp32.605.539.485,00 atau 133,35%.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah sudah termasuk pendapatan PPK-BLUD Puskesmas dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir serta pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada sembilan puskesmas Non BLUD serta Pendapatan PPK BLUD RSUD Kabupaten Bintan dapat dijelaskan sebagai berikut

**Tabel 7.5.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	PPK BLUD Puskesmas Teluk Sebong – LRA	1.400.000.000,00	719.589.721,00	51,40	(680.410.279,00)	1.156.338.879,00	(37,77)
2	PPK BLUD Puskesmas Teluk Sasah – LRA	489.350.000,00	442.042.300,00	90,33	(47.307.700,00)	526.738.300,00	(16,08)
3	PPK BLUD Puskesmas Kijang – LRA	944.200.000,00	934.878.200,00	99,01	(9.321.800,00)	1.153.085.000,00	(18,92)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
4	PPK BLUD Puskesmas Tanjung Uban – LRA	1.060.400.000,00	911.495.800,00	85,96	(148.904.200,00)	1.026.592.500,00	(11,21)
5	PPK BLUD Puskesmas Kawal – LRA	696.600.000,00	704.492.500,00	101,13	7.892.500,00	829.837.700,00	(15,10)
6	Pendapatan BLUD RSUD Bintan – LRA	19.860.941.943,00	28.893.040.964,00	145,48	9.032.099.021,00	17.714.551.844,00	63,10
	Jumlah	24.451.491.943,00	32.605.539.485,00	133,35	8.154.047.542,00	22.407.144.223,00	45,51

Pendapatan dari BLUD terdiri dari BLUD Puskesmas sebesar Rp694.725.521,00,00 dan pendapatan BPJS pada BLUD Puskesmas sebesar Rp3.017.773.000,00, Pendapatan BPJS pada BLUD RSUD sebesar Rp28.843.527.724,00 serta Pendapatan Jasa Giro pada BLUD RSUD sebesar Rp49.513.240,00.

Pendapatan dari BLUD TA. 2021 Sebesar Rp32.605.539.485,00 atau 133,35% dari anggaran sebesar Rp24.451.491.943,00. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan TA. 2020 sebesar Rp10.198.395.262,00 atau 45,51%.

Tabel 7.5.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN di FKTP Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Puskesmas Kelong – LRA	340.560.000,00	325.364.000,00	95,54	(15.196.000,00)	324.246.000,00	0,34
2	Puskesmas Mantang - LRA	180.000.000,00	219.211.000,00	121,78	39.211.000,00	214.575.000,00	2,16
3	Puskesmas Toapaya - LRA	432.000.000,00	410.858.100,00	95,11	(21.141.900,00)	396.128.400,00	3,72
4	Puskesmas Teluk Bintan - LRA	312.000.000,00	320.220.000,00	102,63	8.220.000,00	323.430.000,00	(0,99)
5	Puskesmas Tambelan – LRA	322.514.000,00	260.095.500,00	80,65	(62.418.500,00)	220.622.500,00	17,89
6	Puskesmas Berakit - LRA	124.726.800,00	151.313.000,00	121,32	26.586.200,00	148.431.500,00	1,94
7	Puskesmas Sri Bintan - LRA	242.500.000,00	254.502.000,00	104,95	12.002.000,00	260.214.000,00	(2,20)
8	Puskesmas Kuala Sempang – LRA	267.600.000,00	346.248.000,00	129,39	78.648.000,00	335.604.000,00	3,17
9	Puskesmas Sei. Lekop - LRA	402.264.000,00	417.915.450,00	103,89	15.651.450,00	405.686.400,00	3,01
10	JKN FKTP Non Kapitasi - LRA	410.077.500,00	168.283.700,00	41,04	(241.793.800,00)	0,00	0,00
	Jumlah	3.034.242.300,00	2.874.010.750,00	94,72	(160.231.550,00)	2.628.937.800,00	9,32

Pendapatan dari JKN FKTP pada Puskesmas yang terdiri dari pendapatan BPJS TA 2021 sebesar Rp2.705.727.050,00 atau 103,11% dari anggaran sebesar Rp2.624.164.800,00 Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp76.789.250,00 atau 2,92% dan pendapatan dari JKN FKTP Non Kapitasi sebesar Rp168.283.700,00 atau 41,04% dari anggaran sebesar Rp410.077.500,00, untuk pendapatan dari JKN FKTP Non Kapitasi Tahun 2020 sebesar Rp107.197.300,00 terdapat pada rekening Pendapatan JKN di FKTP. Sehingga total pendapatan pada JKN di FKTP TA. 2021 sebesar Rp2.874.010.750,00 atau 94,72% dari anggaran sebesar Rp3.034.242.300,00.

Adapun anggaran dan realisasi JKN FKTP Non Kapitasi – LRA TA 2021 Per Puskesmas adalah sebagai berikut :

Tabel 7.5.12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan JKN FKTP Non Kapitasi Per Puskesmas Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Puskesmas Kelong – LRA	48.615.000,00	0,00	0,00	(48.615.000,00)	0,00	0,00
2	Puskesmas Mantang - LRA	16.000.000,00	0,00	0,00	(16.000.000,00)	0,00	0,00
3	Puskesmas Toapaya - LRA	40.150.000,00	16.725.000,00	41,66	(23.425.000,00)	0,00	0,00
4	Puskesmas Teluk Bintan - LRA	44.318.465,00	27.833.700,00	62,80	(16.484.765,00)	0,00	0,00
5	Puskesmas Tambelan – LRA	53.200.000,00	47.775.000,00	89,90	(5.425.000,00)	0,00	0,00
6	Puskesmas Berakit - LRA	49.944.035,00	13.950.000,00	27,93	(35.994.035,00)	0,00	0,00
7	Puskesmas Sri Bintan - LRA	67.650.000,00	28.700.000,00	42,42	(38.950.000,00)	0,00	0,00



No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
8	Puskesmas Kuala Sempang – LRA	34.200.000,00	400.000,00	1,17	(33.800.000,00)	0,00	0,00
9	Puskesmas Sei. Lekop - LRA	56.000.000,00	32.900.000,00	58,75	(23.100.000,00)	0,00	0,00
Jumlah		410.077.500,00	168.283.700,00	41,04	(241.793.800,00)	0,00	0,00

7.5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA

Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer – LRA TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan TA 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LRA	694.628.830.576,00	721.653.963.814,00	103,89	27.025.133.238,00	821.578.900.331,00	(12,16)
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA	85.128.175.000,00	84.606.327.200,00	99,39	(521.847.800,00)	87.599.059.000,00	(3,42)
3	Transfer Pemerintah Antar Daerah - LRA	68.746.363.754,00	63.898.047.803,00	92,95	(4.848.315.951,00)	61.807.106.031,00	3,38
Jumlah		848.503.369.330,00	870.158.338.817,00	102,55	21.654.969.487,00	970.985.065.362,00	(10,38)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 sebesar Rp870.158.338.817,00 atau 102,55% dari anggaran sebesar Rp848.503.369.330,00. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp100.826.726.545,00 atau 10,38%.

7.5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan yang ditransfer ke daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Anggaran dan realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dana Bagi Hasil – LRA	57.097.237.576,00	98.171.066.468,00	171,94	41.073.828.892,00	0,00	0,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.975.591.557,00	(100,00)
3	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	169.766.679.316,00	(100,00)
4	Dana Alokasi Umum – LRA	476.841.183.000,00	476.841.183.000,00	100,00	0,00	486.117.569.000,00	(1,91)
5	Dana Alokasi Khusus – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	141.719.060.458,00	(100,00)
6	Dana Alokasi Khusus Fisik – LRA	98.679.016.000,00	90.479.520.346,00	91,69	(8.199.495.654,00)	0,00	0,00
7	Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LRA	62.011.394.000,00	56.162.194.000,00	90,57	(5.849.200.000,00)	0,00	0,00
Jumlah		694.628.830.576,00	721.653.963.814,00	103,89	27.025.133.238,00	821.578.900.331,00	(12,16)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan TA 2021 sebesar Rp721.653.963.814,00 atau 103,89% dari anggaran sebesar Rp694.628.830.576,00. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp99.924.936.517,00 atau 12,16%.

**7.5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil - LRA**

Dana Bagi Hasil merupakan jenis transfer yang menurut ketentuan perundang-undangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Pemerintah Pusat yang sebagian dibagikan kepada Daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil - LRA TA 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA
Dana Perimbangan – LRA Dana Bagi Hasil – LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dana Bagi Hasil Pajak – LRA	24.545.405.776,00	26.871.516.690,00	109,48	2.326.110.914,00	23.975.591.557,00	12,08
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA – LRA	32.551.831.800,00	71.299.549.778,00	219,03	38.747.717.978,00	169.766.679.316,00	(58,00)
Jumlah		57.097.237.576,00	98.171.066.468,00	171,94	41.073.828.892,00	193.742.270.873,00	(49,33)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer – Dana Bagi Hasil TA 2021 sebesar Rp98.171.066.468,00 atau 171,94% dari anggaran sebesar Rp57.097.237.576,00. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp95.571.204.405,00 atau 49,33.%

7.5.1.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak – LRA

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak. Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LRA TA 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.5.16 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA
Dana Perimbangan – LRA Dana Bagi Hasil Pajak – LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan – LRA	6.719.567.718,00	9.026.348.987,00	134,33	2.306.781.269,00	5.557.750.170,00	62,41
2	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan pasal 21 – LRA	16.966.847.200,00	16.966.847.200,00	100,00	0,00	17.017.114.942,00	(0,30)
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 25/29 – LRA	857.257.000,00	857.257.000,00	100,00	0,00	1.376.228.679,00	(37,71)
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau – LRA	1.733.858,00	21.063.503,00	1.214,83	19.329.645,00	24.497.766,00	(14,02)
Jumlah		24.545.405.776,00	26.871.516.690,00	109,48	2.326.110.914,00	23.975.591.557,00	12,08

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer – Dana Bagi Hasil Pajak TA 2021 sebesar Rp26.871.516.690,00 atau 109,48% dari anggaran sebesar Rp24.545.405.776,00. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp2.895.925.133,00 atau 12,08.%

7.5.1.1.2.1.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – LRA

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LRA TA 2020 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 7.5.17 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA Dana Perimbangan – LRA Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dana Bagi Hasil dari Pentambangan Minyak Bumi – LRA	2.397.403.700,00	2.397.403.700,00	100,00	0,00	29.998.397.771,00	(92,01)
2	Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA	24.544.518.500,00	63.044.917.349,00	256,86	38.500.398.849,00	134.547.375.146,00	(53,14)
3	Dana Bagi Hasil dari luran Tetap (<i>Land rent</i>) - LRA	24.673.475,00	24.673.475,00	100,00	0,00	18.142.050,00	36,00
4	Dana Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi (Royalti) -LRA	4.081.075.600,00	4.081.075.600,00	100,00	0,00	4.355.407.037,00	(6,30)
5	Dana Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan - LRA	58.960.525,00	76.979.504,00	130,56	18.018.979,00	59.081.023,00	30,29
6	Dana Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA	1.445.200.000,00	1.674.500.150,00	115,87	229.300.150,00	788.276.289,00	112,43
Jumlah		32.551.831.800,00	71.299.549.778,00	219,03	38.747.717.978,00	169.766.679.316,00	(58,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer – Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2021 sebesar Rp71.299.549.778,00 atau 219,03% dari anggaran sebesar Rp32.551.831.800,00. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp98.467.129.538,00 atau 58,00%

7.5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum - LRA

Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.18 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dana Alokasi Umum - LRA	476.841.183.000,00	476.841.183.000,00	100,00	0,00	486.117.569.000,00	(1,91)
Jumlah		476.841.183.000,00	476.841.183.000,00	100,00	0,00	486.117.569.000,00	(1,91)

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2020 tentang Dana Alokasi Umum menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 27 November 2020. DAU Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp476.841.183.000,00 dan terealisasi sebesar Rp Rp476.841.183.000,00 atau 100,00%. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp9.276.386.000,00 atau 1,91%.

7.5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus - LRA

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik -LRA TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dana Alokasi Khusus - LRA	160.690.410.000,00	146.641.714.346,00	91,26	(14.048.695.654,00)	141.719.060.458,00	3,47



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
	Jumlah	160.690.410.000,00	146.641.714.346,00	91,26	(14.048.695.654,00)	141.719.060.458,00	3,47

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2020 tentang Dana Alokasi Khusus menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 27 November 2020. DAK Fisik Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp160.690.410.000,00 terealisasi sebesar Rp146.641.714.346,00 atau 91,26% dari anggarannya. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp4.922.653.888,00 atau 3,47%.

7.5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus Fisik – LRA

Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik merupakan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Khusus. Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik-LRA TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dana Alokasi Khusus Fisik - LRA	98.679.016.000,00	90.479.520.346,00	91,69	(8.199.495.654,00)	82.333.109.139,00	9,89
	Jumlah	98.679.016.000,00	90.479.520.346,00	91,69	(8.199.495.654,00)	82.333.109.139,00	9,89

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2020 tentang Dana Alokasi Khusus Non Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 27 November 2020. DAK Fisik Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp98.679.016.000,00 terealisasi sebesar Rp90.479.520.346,00 atau 91,69% dari anggarannya. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp8.146.411.207,00 atau 9,89%.

7.5.1.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LRA

Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik merupakan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Khusus. Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LRA TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LRA	62.011.394.000,00	56.162.194.000,00	90,57	(5.849.200.000,00)	59.385.951.319,00	(5,43)
	Jumlah	62.011.394.000,00	56.162.194.000,00	90,57	(5.849.200.000,00)	59.385.951.319,00	(5,43)

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2020 tentang Dana Alokasi Khusus Non Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 27 November 2020. DAK Non Fisik Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp62.011.394.000,00 terealisasi sebesar Rp56.162.194.000,00 atau 90,57% dari anggarannya. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.223.757.319,00 atau 5,43%.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

7.5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA

Tabel 7.5.22 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dana Insentif Daerah	44.420.166.000,00	44.420.166.000,00	100,00	0,00	48.435.489.000,00	(8,29)
2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dana Desa	40.708.009.000,00	40.186.161.200,00	98,72	(521.847.800,00)	39.163.570.000,00	2,61
Jumlah		85.128.175.000,00	84.606.327.200,00	99,39	(521.847.800,00)	87.599.059.000,00	(3,42)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2021 sebesar Rp84.606.327.200,00 atau 99,39% dari anggaran sebesar Rp85.128.175.000,00. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp2.992.731.800,00 atau 3,42%.

7.5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID) - LRA

Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.23 Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dana Insentif Daerah (DID) – LRA	44.420.166.000,00	44.420.166.000,00	100,00	0,00	37.878.073.000,00	17,27
2	Dana Insentif Daerah (DID) Kategori Kesehatan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.557.416.000,00	(100,00)
Jumlah		44.420.166.000,00	44.420.166.000,00	100,00	0,00	48.435.489.000,00	(8,29)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Dana Insentif Daerah (DID) TA 2021 sebesar Rp44.420.166.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp44.420.166.000,00. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan TA. 2020 sebesar Rp4.015.323.000,00 atau 8,29%.

7.5.1.1.2.2.2 Dana Desa - LRA

Anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Desa TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.24 Anggaran dan Realisasi Dana Desa – LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dana Desa – LRA	40.708.009.000,00	40.186.161.200,00	98,72	(521.847.800,00)	39.163.570.000,00	2,61
Jumlah		40.708.009.000,00	40.186.161.200,00	98,72	(521.847.800,00)	39.163.570.000,00	2,61

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Dana Desa TA 2021 sebesar Rp40.186.161.200,00 dari anggaran sebesar Rp40.708.009.000,00 atau 98,72%. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan TA. 2020 sebesar Rp1.022.591.200,00 atau 2,61%.

7.5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA

Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2021 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

**Tabel 7.5.25 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA	68.746.363.754,00	63.898.047.803,00	92,95	(4.848.315.951,00)	61.807.106.031,00	3,38
	Jumlah	68.746.363.754,00	63.898.047.803,00	92,95	(4.848.315.951,00)	61.807.106.031,00	3,38

Tabel diatas menunjukkan realisasi penerimaan Transfer Antar Daerah TA 2021 sebesar Rp63.898.047.803,00 atau 92,95% dari anggaran sebesar Rp68.746.363.754,00. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan TA. 2020 sebesar Rp1.590.941.772,00 atau 2,55%.

7.5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA

Anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.5.26 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah
Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	13.227.676.377,00	12.336.609.497,00	93,26	(891.066.880,00)	10.089.895.101,00	22,27
2	Pajak Bahan Bakar Bermotor (PBBKB)	36.582.359.164,00	34.321.216.193,00	93,82	(2.261.142.971,00)	31.660.320.244,00	8,40
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.539.060.642,00	6.400.715.076,00	84,90	(1.138.345.566,00)	7.811.168.163,00	(18,06)
4	Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	78.506.725,00	57.497.607,00	73,24	(21.009.118,00)	48.954.114,00	17,45
5	Pajak Rokok	11.318.760.846,00	10.782.009.430,00	95,26	(536.751.416,00)	12.196.768.409,00	(11,60)
	Jumlah	68.746.363.754,00	63.898.047.803,00	92,95	(4.848.315.951,00)	61.807.106.031,00	3,38

Tabel diatas menunjukkan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2021 yang merupakan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp63.898.047.803,00 atau 92,95% dari anggaran sebesar Rp68.746.363.754,00. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan TA. 2020 sebesar Rp2.090.941.772,00 atau 3,38%.

7.5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA

Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.27 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	43.630.021.987,00	(100,00)
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.259.499.700,00	(100,00)
4	Pendapatan Lainnya	29.257.526.000,00	40.086.631.395,00	137,01	10.829.105.395,00	500.000.000,00	7.917,33
	Jumlah	29.257.526.000,00	40.086.631.395,00	137,01	10.829.105.395,00	69.389.521.687,00	(42,23)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah TA 2021 sebesar Rp40.086.631.395,00 atau 137,01% dari anggaran sebesar Rp29.257.526.000,00. Pendapatan tersebut menurun dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp29.302.890.292,00 atau 42,23%.

**7.5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah****Tabel 7.5.28 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00	43.630.021.987,00	(100,00)
2	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.259.499.700,00	(100,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	68.889.521.687,00	(100,00)

7.5.1.1.3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah

Tidak terdapat Pendapatan Hibah dari Pemerintah TA. 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bintang.

Tabel 7.5.29 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi	0,00	0,00	0,00	0,00	31.339.813.513,00	(100,00)
2	Hibah BA BUN	0,00	0,00	0,00	0,00	12.290.208.474,00	(100,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	43.630.021.987,00	(100,00)

7.5.1.1.3.1.2 Pendapatan Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah merupakan pendapatan Dana BOS yang ditransfer oleh pusat.

Tabel 7.5.30 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2019 (Rp)	Tren
1	Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.259.499.700,00	(100,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	25.259.499.700,00	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Hibah Dana Bos TA 2021 sebesar Rp0,00 karena pendapatan dana bos disajikan dalam pendapatan lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 090 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pendapatan Hibah Dana BOS merupakan bagian dari Pendapatan Lainnya pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

7.5.1.1.3.2 Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya TA. 2021 merupakan Pendapatan Dana BOS dan Pendapatan Atas Pengembalian Hibah.

Tabel 7.5.31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	10.882.193.395,00	0,00	10.882.193.395,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Hibah Dana BOS	29.257.526.000,00	29.204.438.000,00	99,82	(53.088.000,00)	0,00	0,00
3	Bantuan Keuangan dari Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	(100,00)
Jumlah		29.257.526.000,00	40.086.631.395,00	137,01	10.829.105.395,00	500.000.000,00	7.917,33



Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Lainnya TA 2021 sebesar Rp40.086.631.395,00 atau 137,01% dari anggaran sebesar Rp29.257.526.000,00. Pendapatan tersebut meningkat dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp39.586.631.395,00 atau 7.917,33%. Kenaikan tersebut karena pendapatan hibah dana bos TA 2021 disajikan sebagai pendapatan lainnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 090 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pendapatan Hibah Dana BOS merupakan bagian dari Pendapatan Lainnya pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

7.5.1.2 BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam suatu periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada desa/kelurahan, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

Anggaran dan realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan pada TA 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.32 Anggaran dan Realisasi Belanja
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Belanja Operasi	940.086.490.634,68	853.950.205.872,98	90,84	(86.136.284.761,70)	1.000.785.787.810,82	(14,67)
2	Belanja Modal	166.054.936.680,00	149.418.347.825,33	89,98	(16.636.588.854,67)	192.084.263.298,42	(22,21)
3	Belanja Tidak Terduga	10.189.062.247,00	5.674.118.343,00	55,69	(4.514.943.904,00)	68.340.725.092,00	(91,70)
4	Belanja Transfer	108.803.258.700,00	108.281.913.266,00	99,52	(521.345.434,00)	0,00	0,00
	Jumlah	1.225.133.748.261,68	1.117.324.585.307,31	91,20	(107.809.162.954,37)	1.261.210.776.201,24	(11,41)

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Daerah TA 2021 sebesar Rp1.225.133.748.261,68 terealisasi sebesar Rp1.117.324.585.307,31 atau 91,20%. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp143.886.190.893,93 atau 11,41%. Hal ini disebabkan kondisi perekonomian Indonesia pada umumnya dan Pemerintah kabupaten Bintan pada khususnya dirasa kurang baik dikarenakan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Sehingga mempengaruhi serapan anggaran dan belanja keseluruhan Pemerintah Kabupaten Bintan TA 2021.

7.5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Belanja Pegawai	505.700.609.688,68	476.609.153.074,00	94,24	(29.120.223.414,68)	571.093.939.534,00	(16,55)
2	Belanja Barang	381.489.167.191,00	327.840.463.570,98	85,94	(53.619.936.820,02)	257.761.202.728,82	27,20
3	Belanja Hibah	48.816.713.755,00	45.560.989.228,00	93,33	(3.255.724.527,00)	57.292.591.880,00	(20,48)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

4	Belanja Bantuan Sosial	4.080.000.000,00	3.939.600.000,00	96,56	(140.400.000,00)	5.530.925.108,00	(28,77)
5	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	109.107.128.560,00	(100,00)
	Jumlah	940.086.490.634,68	853.950.205.872,98	90,84	(86.136.284.761,70)	1.000.785.787.810,80	(14,67)

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Operasi TA 2021 sebesar Rp940.086.490.634,68 terealisasi sebesar Rp853.950.205.872,98 atau 90,84%. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp146.835.581.937,84 atau 14,67%.

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah, Tambahan Penghasilan, Tunjangan Operasional KDH/WKDH dan Penerimaan pimpinan & anggota DPRD, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Per Jenis Belanja TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.34 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dinas Pendidikan	175.908.715.238,68	169.450.792.115,00	96,33	(6.457.923.123,68)	194.113.796.941,00	(12,71)
2	Dinas Kesehatan	88.675.055.206,00	85.065.101.020,00	95,93	(3.609.954.186,00)	100.517.964.411,00	(15,37)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.051.449.700,00	6.814.069.730,00	96,63	(237.379.970,00)	8.611.604.748,00	(20,87)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.819.165.741,00	3.774.789.982,00	98,84	(44.375.759,00)	14.795.507.106,00	(74,49)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	14.625.433.919,00	14.020.516.855,00	95,86	(604.917.064,00)	16.833.077.445,00	(16,71)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.431.635.832,00	5.991.544.400,00	93,16	(440.091.432,00)	6.813.571.853,00	(12,06)
7	Dinas Sosial	3.605.751.569,00	3.440.731.046,00	95,42	(165.020.523,00)	4.129.218.329,00	(16,67)
8	Dinas Tenaga Kerja	2.939.515.473,00	2.607.806.792,00	88,72	(331.708.681,00)	3.220.418.735,00	(19,02)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.330.016.923,00	4.145.279.951,00	95,73	(184.736.972,00)	5.070.626.567,00	(18,25)
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.777.554.300,00	8.442.566.610,00	96,18	(334.987.690,00)	9.679.305.804,00	(12,78)
11	Dinas Lingkungan Hidup	5.483.261.790,00	5.219.010.001,00	95,18	(264.251.789,00)	5.719.896.312,00	(8,76)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.953.824.950,00	4.325.601.562,00	87,32	(628.223.388,00)	5.069.441.206,00	(14,67)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.682.190.184,00	3.412.735.167,00	92,68	(269.455.017,00)	3.917.294.283,00	(12,88)
14	Dinas Perhubungan	5.404.593.800,00	5.297.088.408,00	98,01	(107.505.392,00)	5.770.721.752,00	(8,21)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.265.408.526,00	5.142.999.866,00	97,68	(122.408.660,00)	5.712.970.593,00	(9,98)
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	5.675.884.260,00	5.202.459.874,00	91,66	(473.424.386,00)	5.883.238.712,00	(11,57)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.044.537.610,00	4.681.495.951,00	92,80	(363.041.659,00)	5.552.751.427,00	(15,69)
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3.452.870.517,00	3.300.773.167,00	95,60	(152.097.350,00)	3.681.726.193,00	(10,35)
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.517.945.625,00	4.352.361.107,00	96,33	(165.584.518,00)	5.686.565.021,00	(23,46)
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3.660.021.298,00	3.384.916.282,00	92,48	(275.105.016,00)	3.605.859.236,00	(6,13)
21	Dinas Perikanan	6.563.760.675,00	6.171.861.437,00	94,03	(391.899.238,00)	6.903.853.601,00	(10,60)
22	Sekretariat Daerah	19.677.267.000,00	18.195.735.434,00	92,47	(1.481.531.566,00)	36.775.824.482,00	(50,52)
23	Inspektorat Daerah	7.674.018.950,00	6.885.643.110,00	89,73	(788.375.840,00)	7.936.137.334,00	(13,24)
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.644.772.000,00	6.218.138.171,00	93,58	(426.633.829,00)	6.981.198.548,00	(10,93)
25	Badan Keuangan dan	26.447.819.015,00	24.128.131.894,00	91,23	(2.319.487.121,00)	24.407.736.626,00	(1,15)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
	Aset Daerah						
26	Badan Pendapatan Daerah	12.227.966.750,00	10.236.467.259,00	83,71	(1.991.499.491,00)	12.053.948.147,00	(15,08)
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.835.796.058,00	9.015.603.015,00	83,20	(1.820.193.043,00)	4.349.767.146,00	107,27
28	Sekretariat DPRD	15.625.810.398,00	14.524.570.108,00	92,95	(1.101.240.290,00)	14.680.989.122,00	(1,07)
29	Kecamatan Bintan Utara	5.131.454.625,00	4.564.599.845,00	88,95	(566.854.780,00)	5.636.956.801,00	(19,02)
30	Kecamatan Bintan Pesisir	1.965.892.976,00	1.699.727.550,00	86,46	(266.165.426,00)	2.236.422.642,00	(24,00)
31	Kecamatan Tambelan	2.586.984.400,00	1.917.587.045,00	74,12	(669.397.355,00)	2.875.210.846,00	(33,31)
32	Kecamatan Mantang	1.971.995.842,00	1.825.759.962,00	92,58	(146.235.880,00)	2.032.406.626,00	(10,17)
33	Kecamatan Toapaya	2.763.699.150,00	2.577.042.506,00	93,25	(186.656.644,00)	3.206.260.443,00	(19,62)
34	Kecamatan Teluk Sebong	3.172.333.859,00	3.049.597.708,00	96,13	(122.736.151,00)	3.535.267.752,00	(13,74)
35	Kecamatan Teluk Bintan	3.237.090.375,00	3.012.251.400,00	93,05	(224.838.975,00)	3.694.780.133,00	(18,47)
36	Kecamatan Gunung Kijang	3.158.534.531,00	3.110.790.346,00	98,49	(47.744.185,00)	3.662.018.931,00	(15,05)
37	Kecamatan Bintan Timur	5.230.626.100,00	4.589.725.541,00	87,75	(640.900.559,00)	7.300.415.814,00	(37,13)
38	Kecamatan Seri Kuala Lobam	3.662.519.475,00	3.277.810.815,00	89,50	(384.708.660,00)	4.248.039.271,00	(22,84)
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.817.435.048,00	3.535.470.042,00	92,61	(281.965.006,00)	4.191.148.595,00	(15,64)
	Jumlah	505.700.609.688,68	476.609.153.074,00	94,25	(29.091.456.614,68)	571.093.939.534,00	(16,54)

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 adalah sebesar Rp476.609.153.074,00 atau sebesar 94,25% dari anggaran sebesar Rp505.700.609.688,68. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp94.484.786.460,00 atau 16,54%. Penurunan disebabkan karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 090 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pada Tahun 2021 Gaji Non ASN serta Honorarium untuk ASN dan Non ASN diklasifikasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa. Dari realisasi belanja pegawai tersebut termasuk didalamnya belanja pegawai pada PPK-BLUD Puskesmas sebesar Rp2.523.188.886,00, PPK-BLUD RSUD sebesar Rp9.483.439.692,00, belanja pegawai dari penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas non BLUD sebesar Rp1.123.667.671,00

Adapun rincian Belanja Pegawai per jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Jenis Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Belanja Gaji Pokok PNS	157.465.144.742,00	153.205.347.898,00	97,29	(4.259.796.844,00)	152.699.087.251,00	0,33
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.995.544.950,00	14.965.530.419,00	93,56	(1.030.014.531,00)	15.011.282.016,00	(0,30)
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.995.893.466,00	6.694.122.396,00	83,72	(1.301.771.070,00)	7.964.435.950,00	(15,95)
4	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.252.695.794,00	8.954.135.190,00	87,33	(1.298.560.604,00)	8.508.575.000,00	5,24
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.393.965.480,00	2.094.961.434,00	87,51	(299.004.046,00)	2.165.200.000,00	(3,24)
6	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.173.536.695,00	9.573.944.703,00	94,11	(599.591.992,00)	8.294.335.020,00	15,43
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	100.940.356,00	74.473.075,00	73,78	(26.467.281,00)	72.199.737,00	3,15
8	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.450.750,68	2.266.927,00	41,59	(3.183.823,68)	2.195.661,00	3,25
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.455.280.000,00	13.977.782.780,00	96,70	(477.497.220,00)	13.236.900.400,00	5,60
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	644.747.312,00	314.656.360,00	48,80	(330.090.952,00)	313.928.647,00	0,23
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.210.249.104,00	943.969.075,00	78,00	(266.280.029,00)	941.815.944,00	0,23
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	378.000.000,00	0,00	0,00	(378.000.000,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	142.768.968.705,00	136.438.167.990,00	95,57	(6.330.800.715,00)	3.142.304.400,00	4.241,98
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.505.748.000,00	1.100.359.280,00	73,08	(405.388.720,00)	1.170.090.000,00	(5,96)
15	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	9.261.873.840,00	7.043.351.600,00	76,05	(2.218.522.240,00)	5.576.169.000,00	26,31
16	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	4.409.868.000,00	3.900.000.000,00	88,44	(509.868.000,00)	3.684.000.000,00	5,86
17	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	57.069.733.603,00	54.018.074.658,00	94,65	(3.051.658.945,00)	191.007.431.531,00	(71,72)
18	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	621.674.475,00	0,00	0,00	(621.674.475,00)	0,00	0,00
19	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	494.145.966,00	0,00	0,00	(494.145.966,00)	0,00	0,00
20	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	260.704.512,00	0,00	0,00	(260.704.512,00)	0,00	0,00
21	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	23.674.102,00	20.639.756,00	87,18	(3.034.346,00)	21.412.900,00	(3,61)
22	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	574.744.036,00	574.743.441,00	100,00	(595,00)	645.447.117,00	(10,95)
23	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	4.908.881,00	0,00	0,00	(4.908.881,00)	0,00	0,00
24	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	557.615.858,00	557.615.212,00	100,00	(646,00)	647.174.132,00	(13,84)
25	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.461.138.281,00	1.461.137.136,00	100,00	(1.145,00)	846.289.169,00	72,65
26	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	755.090.336,00	755.036.036,00	99,99	(54.300,00)	421.882.154,00	78,97
27	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	30.473.034,00	30.473.000,00	100,00	(34,00)	0,00	0,00
28	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	211.481.000,00	211.481.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.920.000,00	1.168.000,00	40,00	(1.752.000,00)	0,00	0,00
30	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	47.450.000,00	47.450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	Belanja TPG PNSD	36.613.552.000,00	33.924.882.200,00	92,66	(2.688.669.800,00)	31.898.708.020,00	6,35
32	Belanja TKG PNSD	493.755.000,00	491.071.800,00	99,46	(2.683.200,00)	207.744.000,00	136,38
33	Belanja Tamsil Guru PNSD	573.000.000,00	523.750.000,00	91,40	(49.250.000,00)	0,00	0,00
34	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.200.483.888,00	1.123.667.671,00	93,60	(76.816.217,00)	0,00	0,00
35	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	558.180.000,00	99,40	(3.360.000,00)	0,00	0,00
37	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	103.635.000,00	73.294.200,00	70,72	(30.340.800,00)	0,00	0,00
38	Belanja Tunjangan Beras DPRD	93.757.440,00	83.717.520,00	89,29	(10.039.920,00)	0,00	0,00
39	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00	47.796.000,00	85,12	(8.358.000,00)	0,00	0,00
40	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	809.361.000,00	99,40	(4.872.000,00)	0,00	0,00
41	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	72.942.000,00	71.983.800,00	98,69	(958.200,00)	0,00	0,00
42	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	150.000.000,00	17.706.675,00	11,80	(132.293.325,00)	0,00	0,00
43	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.129.000.000,00	99,33	(21.000.000,00)	3.118.500.000,00	0,34
44	Belanja Tunjangan Reses DPRD	525.000.000,00	493.500.000,00	94,00	(31.500.000,00)	514.500.000,00	(4,08)
45	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	50.000.006,00	526.749,00	1,05	(49.473.257,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
46	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	120.000,00	0,00	0,00	(120.000,00)	0,00	0,00
47	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	161.280.000,00	137.280.000,00	85,12	(24.000.000,00)	0,00	0,00
48	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.043.088,00	1.147.464,00	28,38	(2.895.624,00)	0,00	0,00
49	Belanja Jaminan Kematian DPRD	167.067.696,00	3.440.952,00	2,06	(163.626.744,00)	0,00	0,00
50	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.915.200.000,00	1.817.000.000,00	94,87	(98.200.000,00)	1.469.700.000,00	23,63
51	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.954.160.000,00	2.954.160.000,00	100,00	0,00	2.587.200.000,00	14,18
52	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	240.660.000,00	0,00	0,00	(240.660.000,00)	0,00	0,00
53	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.972.000,00	54.600.000,00	97,55	(1.372.000,00)	0,00	0,00
54	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.720.000,00	6.708.000,00	99,82	(12.000,00)	0,00	0,00
55	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.744.000,00	98.280.000,00	97,55	(2.464.000,00)	0,00	0,00
56	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.818.000,00	6.807.480,00	99,85	(10.520,00)	0,00	0,00
57	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	392.000,00	234.270,00	59,76	(157.730,00)	0,00	0,00
58	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	84.000,00	2.040,00	2,43	(81.960,00)	0,00	0,00
59	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.338.000,00	5.469.120,00	58,57	(3.868.880,00)	0,00	0,00
60	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	1.209.600,00	112.320,00	9,29	(1.097.280,00)	0,00	0,00
61	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	403.200,00	336.960,00	83,57	(66.240,00)	0,00	0,00
62	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	89.369.977,00	0,00	0,00	(89.369.977,00)	0,00	0,00
63	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	75.606.676,00	0,00	0,00	(75.606.676,00)	0,00	0,00
64	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	33.182.238,00	0,00	0,00	(33.182.238,00)	0,00	0,00
65	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	2.884.248,00	2.352.113,00	81,55	(532.135,00)	0,00	0,00
66	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	72.987.114,00	72.987.100,00	100,00	(14,00)	0,00	0,00
67	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	624.350,00	0,00	0,00	(624.350,00)	0,00	0,00
68	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	67.669.142,00	67.669.135,00	100,00	(7,00)	0,00	0,00
69	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	192.248.594,00	192.248.569,00	100,00	(25,00)	0,00	0,00
70	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	93.200.964,00	93.200.942,00	100,00	(22,00)	0,00	0,00
71	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	78.219.000,00	45.936.750,00	58,73	(32.282.250,00)	0,00	0,00
72	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1.080.000,00	432.000,00	40,00	(648.000,00)	0,00	0,00
73	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	17.550.000,00	11.287.500,00	64,32	(6.262.500,00)	0,00	0,00
74	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	193.200.000,00	76,67	(58.800.000,00)	189.000.000,00	2,22
75	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	450.040.000,00	75,01	(149.960.000,00)	560.000.000,00	(19,64)
76	Belanja Pegawai BOS	13.500.000,00	0,00	0,00	(13.500.000,00)	0,00	0,00
77	Belanja Pegawai BLUD	12.858.562.189,00	12.048.895.378,00	93,70	(809.666.811,00)	9.654.150.751,00	24,81
78	Belanja Uang Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	47.628.000,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
79	Belanja Tunjangan Badan Musyawarah	0,00	0,00	0,00	0,00	16.899.750,00	(100,00)
80	Belanja Tunjangan Komisi	0,00	0,00	0,00	0,00	32.246.550,00	(100,00)
81	Belanja Tunjangan Badan Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	16.899.750,00	(100,00)
82	Belanja Tunjangan Badan Kehormatan	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120.450,00	(100,00)
83	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	17.858.925,00	(100,00)
84	Belanja Uang Jasa Pengabdian	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255.000,00	(100,00)
85	Tunjangan Lainnya –Tunjangan Remunerasi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.269.000,00	(100,00)
86	Belanja Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	(100,00)
87	Insentif Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	764.464.893,00	(100,00)
88	Insentif Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	0,00	529.846.655,00	(100,00)
89	Insentif Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00	85.710.871,00	(100,00)
90	Insentif Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971.362,00	(100,00)
91	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	(100,00)
92	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	(100,00)
93	Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	149.989.856,00	(100,00)
94	Uang Transportasi PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	(100,00)
95	Uang Transportasi Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	895.482.100,00	(100,00)
96	Insentif Jaga Insentif Jaga Medis/Paramedis Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	279.990.000,00	(100,00)
97	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	227.883.100,00	(100,00)
98	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100.000,00	(100,00)
99	Honorarium Peserta Kegiatan (Uang Saku Harian)	0,00	0,00	0,00	0,00	102.300.000,00	(100,00)
100	Honorarium Tim / Kelompok Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	488.786.098,00	(100,00)
101	Honorarium Pengawas Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	30.725.000,00	(100,00)
102	Honorarium Petugas Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	385.100.000,00	(100,00)
103	Honorarium Insentif Petugas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247.803.886,00	(100,00)
104	Honorarium Petugas Lapangan / Upah Pekerja / Buruh	0,00	0,00	0,00	0,00	32.579.011.356,00	(100,00)
105	Belanja Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	56.096.592.560,00	(100,00)
106	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.287.900,00	(100,00)
107	Honorarium Peserta Kegiatan (Uang Saku Harian)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.563.000,00	(100,00)
108	Honorarium Tim / Kelompok Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.814.672,00	(100,00)
109	Honorarium Pengawas Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	557.300.000,00	(100,00)
	Jumlah	505.700.609.688,68	476.609.153.074,00	94,25	(29.091.456.614,68)	571.093.939.534,00	(16,54)

7.5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja bahan dan material, jasa pihak ketiga, cetak dan penggandaan, sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas, pemeliharaan dan perjalanan dinas. Anggaran dan realiasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 7.5.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dinas Pendidikan	56.034.798.223,00	51.717.193.858,98	92,29	(4.317.604.364,02)	34.905.896.722,82	48,16
2	Dinas Kesehatan	118.780.463.330,00	96.929.469.208,00	81,60	(21.850.994.122,00)	55.256.924.081,00	75,42
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.931.954.448,00	14.713.416.310,00	92,35	(1.218.538.138,00)	8.265.376.475,00	78,01
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19.003.456.955,00	17.910.116.193,00	94,25	(1.093.340.762,00)	13.927.630.348,00	28,59
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2.813.051.568,00	2.687.290.786,00	95,53	(125.760.782,00)	1.203.608.391,00	123,27
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.569.820.581,00	1.439.827.514,00	91,72	(129.993.067,00)	1.762.224.195,00	(18,29)
7	Dinas Sosial	3.284.142.165,00	3.128.011.514,00	95,25	(156.130.651,00)	1.444.467.338,00	116,55
8	Dinas Tenaga Kerja	1.179.448.161,00	1.138.073.818,00	96,49	(41.374.343,00)	3.742.372.445,00	(69,59)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.579.694.549,00	2.367.819.621,00	66,15	(1.211.874.928,00)	1.892.503.450,00	25,12
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.011.680.063,00	3.138.312.370,00	78,23	(873.367.693,00)	1.332.461.967,00	135,53
11	Dinas Lingkungan Hidup	16.307.494.356,00	15.430.544.509,00	94,62	(876.949.847,00)	2.570.151.883,00	500,37
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.735.417.600,00	2.596.231.804,00	94,91	(139.185.796,00)	1.098.543.136,00	136,33
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.011.195.711,00	2.677.662.097,00	88,92	(333.533.614,00)	1.956.553.693,00	36,86
14	Dinas Perhubungan	3.455.207.715,00	3.212.610.255,00	92,98	(242.597.460,00)	1.375.319.885,00	133,59
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.509.399.731,00	4.174.410.689,00	92,57	(334.989.042,00)	2.077.654.670,00	100,92
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	2.291.853.118,00	2.068.160.709,00	90,24	(223.692.409,00)	7.868.508.240,00	(73,72)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.143.150.472,00	1.856.332.989,00	86,62	(286.817.483,00)	1.194.998.138,00	55,34
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.258.007.878,00	2.142.551.813,00	94,89	(115.456.065,00)	1.430.895.295,00	49,74
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.861.212.124,00	3.374.009.583,00	87,38	(487.202.541,00)	3.360.138.938,00	0,41
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.087.845.677,00	1.077.434.776,00	99,04	(10.410.901,00)	1.171.151.317,00	(8,00)
21	Dinas Perikanan	2.148.663.770,00	2.066.455.524,00	96,17	(82.208.246,00)	13.502.693.940,00	(84,70)
22	Sekretariat Daerah	36.015.456.648,00	33.315.816.421,00	92,50	(2.699.640.227,00)	5.883.094.690,00	466,30
23	Inspektorat Daerah	2.881.184.049,00	2.070.082.487,00	71,85	(811.101.562,00)	16.406.051.902,00	(87,38)
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.704.421.901,00	6.566.256.679,00	85,23	(1.138.165.222,00)	23.307.105.486,00	(71,83)
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	12.502.769.878,00	10.120.126.572,00	80,94	(2.382.643.306,00)	3.494.654.970,00	189,59
26	Badan Pendapatan Daerah	4.538.128.526,00	3.625.140.966,00	79,88	(912.987.560,00)	2.282.653.600,00	58,81
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.555.776.338,00	2.180.618.299,00	85,32	(375.158.039,00)	1.358.260.402,00	60,54
28	Sekretariat DPRD	16.416.478.720,00	13.189.787.135,00	80,34	(3.226.691.585,00)	2.224.695.269,00	492,88
29	Kecamatan Bintan Utara	4.960.672.703,00	3.179.754.733,00	64,10	(1.780.917.970,00)	1.916.990.113,00	65,87
30	Kecamatan Bintan Pesisir	977.099.590,00	891.658.547,00	91,26	(85.441.043,00)	1.337.208.609,00	(33,32)
31	Kecamatan Tambelan	2.151.132.854,00	1.843.537.430,00	85,70	(307.595.424,00)	1.332.225.248,00	38,38
32	Kecamatan Mantang	1.044.427.194,00	908.939.877,00	87,03	(135.487.317,00)	1.599.392.559,00	(43,17)
33	Kecamatan Toapaya	2.377.357.961,00	1.922.010.208,00	80,85	(455.347.753,00)	1.077.697.373,00	78,34
34	Kecamatan Teluk Sebong	1.513.047.336,00	1.168.610.491,00	77,24	(344.436.845,00)	885.932.995,00	31,91
35	Kecamatan Teluk Bintan	1.480.106.323,00	1.304.336.369,00	88,12	(175.769.954,00)	1.924.982.418,00	(32,24)
36	Kecamatan Gunung Kijang	3.185.943.434,00	2.462.824.362,00	77,30	(723.119.072,00)	7.782.461.470,00	(68,35)
37	Kecamatan Bintan Timur	5.836.843.960,00	2.901.058.953,00	49,70	(2.935.785.007,00)	18.783.733.901,00	(84,56)
38	Kecamatan Seri Kuala Lobam	3.804.031.022,00	2.900.155.366,00	76,24	(903.875.656,00)	2.209.910.054,00	31,23
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.546.330.559,00	1.443.812.735,00	93,37	(102.517.824,00)	2.614.077.122,00	(44,77)
	Jumlah	381.489.167.191,00	327.840.463.570,98	85,94	(53.619.936.820,02)	257.761.202.728,82	27,19



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Realisasi untuk Belanja Barang dan Jasa TA 2021 adalah sebesar Rp327.840.463.50,98 atau sebesar 85,94% dari anggaran sebesar Rp381.489.167.191,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp70.079.260.842,16 atau 27,19%. Dari realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut termasuk didalamnya pengeluaran Belanja Barang dan Jasa PPK-BLUD Puskesmas sebesar Rp1.432.321.851,00 Belanja Barang dan Jasa PPK-BLUD RSUD sebesar Rp10.694.135.715,00 Belanja PPK BLUD Dana Bergulir sebesar Rp192.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Non BLUD sebesar Rp1.097.983.371,00 serta Belanja Barang dan Jasa atas Dana BOS sebesar Rp21.527.922.327,98.

Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa per jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per jenis Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.426.672.969,00	2.789.340.739,00	63,01	(1.637.332.230,00)	4.753.491.437,00	(41,32)
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.518.441.981,00	2.129.226.504,00	84,55	(389.215.477,00)	1.576.176.717,00	35,09
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.011.646.733,00	7.598.628.220,00	94,84	(413.018.513,00)	2.214.998.675,00	243,05
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	537.083,00	500.000,00	93,10	(37.083,00)	0,00	0,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	426.122.724,00	408.811.744,00	95,94	(17.310.980,00)	57.640.798,00	609,24
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	25.710.500,00	19.574.500,00	76,13	(6.136.000,00)	84.229.600,00	(76,76)
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	937.646.451,00	768.467.450,00	81,96	(169.179.001,00)	380.914.900,00	101,74
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	24.187.938,00	14.107.172,00	58,32	(10.080.766,00)	0,00	0,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.425.609.452,00	12.511.469.926,00	93,19	(914.139.526,00)	0,00	0,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	967.896.522,00	939.779.288,00	97,10	(28.117.234,00)	0,00	0,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	248.609.017,00	225.767.849,00	90,81	(22.841.168,00)	349.052.486,00	(35,32)
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	49.998.520,00	49.918.000,00	99,84	(80.520,00)	0,00	0,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	72.765.000,00	72.476.800,00	99,60	(288.200,00)	0,00	0,00
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	81.894.147,00	79.791.200,00	97,43	(2.102.947,00)	0,00	0,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.131.259.225,00	5.651.454.728,00	92,17	(479.804.497,00)	7.747.445.835,00	(27,05)
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	22.886.521,00	22.821.600,00	99,72	(64.921,00)	0,00	0,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.672.166.075,00	8.484.055.222,00	87,72	(1.188.110.853,00)	7.777.571.273,00	9,08
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	216.369.878,00	200.784.000,00	92,80	(15.585.878,00)	398.113.445,00	(49,57)
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	162.384.008,00	151.286.256,00	93,17	(11.097.752,00)	87.387.690,00	73,12
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	654.437.302,00	641.764.424,00	98,06	(12.672.878,00)	0,00	0,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.003.249.496,00	1.902.359.653,00	94,96	(100.889.843,00)	1.750.087.438,00	8,70
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	22.538.300,00	22.466.000,00	99,68	(72.300,00)	1.109.004.031,87	(97,97)
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	56.354.899,00	46.904.000,00	83,23	(9.450.899,00)	256.837.553,00	(81,74)
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	198.744.178,00	133.925.750,00	67,39	(64.818.428,00)	267.142.350,00	(49,87)
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.415.103.152,00	5.140.675.872,00	94,93	(274.427.280,00)	0,00	0,00
26	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.793.200.816,00	2.618.793.905,00	69,04	(1.174.406.911,00)	6.623.874.750,00	(60,46)
27	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obat Lainnya	1.226.206.187,00	1.206.769.897,00	98,41	(19.436.290,00)	0,00	100,00
28	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.967.158.529,00	2.783.115.965,00	93,80	(184.042.564,00)	20.037.886.801,00	(86,11)
29	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	89.408.550,00	89.360.645,00	99,95	(47.905,00)	11.611.423.180,00	(99,23)
30	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.524.590.971,00	2.405.530.470,00	95,28	(119.060.501,00)	0,00	100,00
31	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.525.268.588,00	4.526.712.985,00	69,37	(1.998.555.603,00)	2.464.400.953,00	83,68
32	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan	1.494.840.307,00	1.394.613.909,00	93,30	(100.226.398,00)	1.616.156.260,00	(13,71)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
	Tamu						
33	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	25.865.000,00	25.865.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.335.901.226,00	5.014.026.492,00	79,14	(1.321.874.734,00)	0,00	0,00
35	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	122.372.026,00	120.450.000,00	98,43	(1.922.026,00)	0,00	0,00
36	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	43.444.885,00	42.790.000,00	98,49	(654.885,00)	0,00	0,00
37	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	19.998.000,00	19.800.000,00	99,01	(198.000,00)	0,00	0,00
38	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	67.468.988,00	62.624.100,00	92,82	(4.844.888,00)	259.243.600,00	(75,84)
39	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	468.085.819,00	386.887.610,00	82,65	(81.198.209,00)	36.792.800,00	951,53
40	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	47.268.100,00	46.887.500,00	99,19	(380.600,00)	35.640.000,00	31,56
41	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PDU)	18.670.652,00	17.819.406,00	95,44	(851.246,00)	0,00	100,00
42	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	8.700.000,00	8.531.150,00	98,06	(168.850,00)	338.043.670,00	(97,48)
43	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	5.923.772,00	5.899.300,00	99,59	(24.472,00)	5.940.000,00	(0,69)
44	Belanja Pakaian KORPRI	6.385.232,00	0,00	0,00	(6.385.232,00)	0,00	0,00
45	Belanja Pakaian Jas/ Daerah	920.270.401,00	785.896.199,00	85,40	(134.374.202,00)	757.447.900,00	3,76
46	Belanja Pakaian Batik Tradisional	101.278.787,00	50.184.200,00	49,55	(51.094.587,00)	102.927.000,00	(51,24)
47	Belanja Pakaian Olahraga	543.905.849,00	431.403.126,00	79,32	(112.502.723,00)	985.791.400,00	(56,24)
48	Belanja Pakaian Paskibraka	116.863.576,00	114.889.500,00	98,31	(1.974.076,00)	0,00	0,00
49	Belanja Pakaian Jas/Safari	68.792.810,00	67.375.000,00	97,94	(1.417.810,00)	0,00	0,00
50	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	16.699.320,00	13.540.000,00	81,08	(3.159.320,00)	0,00	0,00
51	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	277.209,00	277.209,00	100,00	-	0,00	0,00
52	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	31.396.850,00	31.109.600,00	99,09	(287.250,00)	0,00	0,00
53	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.971.407.197,00	1.375.534.480,00	69,77	(595.872.717,00)	0,00	0,00
54	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.468.908.249,00	5.293.541.632,00	81,83	(1.175.366.617,00)	0,00	0,00
55	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	485.688.000,00	470.388.000,00	96,85	(15.300.000,00)	0,00	0,00
56	Honorarium Rohaniwan	8.507.300.000,00	8.305.110.000,00	97,62	(202.190.000,00)	0,00	0,00
57	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
58	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	29.620.000,00	23.600.000,00	79,68	(6.020.000,00)	0,00	0,00
59	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	786.000.000,00	733.600.000,00	93,33	(52.400.000,00)	0,00	0,00
60	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	23.283.600.000,00	22.094.700.000,00			0,00	0,00
61	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	22.065.771.054,00	19.442.401.057,00	88,11	(2.623.369.997,00)	0,00	0,00
62	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	73.303.000,00	45.978.000,00	62,72	(27.325.000,00)	0,00	0,00
63	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.582.029.334,00	3.476.358.469,00	62,28	(2.105.670.865,00)	0,00	0,00
64	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	145.220.000,00	144.680.000,00	99,63	(540.000,00)	0,00	0,00
65	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
66	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.825.500.000,00	1.800.700.000,00	98,64	(24.800.000,00)	0,00	0,00
67	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	457.200.000,00	457.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
68	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	687.600.000,00	684.750.000,00	99,59	(2.850.000,00)	0,00	0,00
69	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	316.500.000,00	316.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
70	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	226.900.000,00	120.625.000,00	53,16	(106.275.000,00)	50.200.000,00	140,29
71	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.642.830.000,00	23.555.322.000,00	91,86	(2.087.508.000,00)	0,00	0,00
72	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
73	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	349.200.000,00	335.600.000,00	96,11	(13.600.000,00)	0,00	0,00
74	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.972.150.000,00	2.690.128.000,00	90,51	(282.022.000,00)	0,00	0,00
75	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	14.360.505.000,00	13.548.904.423,00	94,35	(811.600.577,00)	1.708.514.330,00	693,02
76	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	542.100.000,00	495.300.000,00	91,37	(46.800.000,00)	12.900.000,00	3.739,53
77	Belanja Jasa Tenaga Supir	466.066.371,00	460.642.584,00	98,84	(5.423.787,00)	0,00	0,00
78	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	102.402.786,00	100.107.500,00	97,76	(2.295.286,00)	0,00	0,00
79	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	31.500.000,00	30.950.000,00	98,25	(550.000,00)	0,00	0,00
80	Belanja Jasa Tata Rias	17.500.000,00	17.347.000,00	99,13	(153.000,00)	0,00	0,00
81	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	242.400.776,00	208.390.000,00	85,97	(34.010.776,00)	0,00	0,00
82	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	19.030.440,00	18.557.440,00	97,51	(473.000,00)	0,00	0,00
83	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	204.836.630,00	4.579.900,00	2,24	(200.256.730,00)	44.461.335,95	(89,70)
84	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	3.864.000,00	3.864.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	193.000.000,00	189.832.500,00	98,36	(3.167.500,00)	0,00	0,00
86	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	203.559.825,00	181.434.250,00	89,13	(22.125.575,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
87	Belanja Jasa Kalibrasi	196.586.671,00	173.380.244,00	88,20	(23.206.427,00)	0,00	0,00
88	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	956.800.000,00	654.165.610,00	68,37	(302.634.390,00)	0,00	0,00
89	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.581.323.280,00	1.461.447.400,00	92,42	(119.875.880,00)	0,00	0,00
90	Belanja Tagihan Telepon	469.850.006,00	287.436.716,00	61,18	(182.413.290,00)	351.354.004,00	(18,19)
91	Belanja Tagihan Air	409.789.496,00	317.062.950,00	77,37	(92.726.546,00)	378.055.726,00	(16,13)
92	Belanja Tagihan Listrik	15.223.302.030,00	13.284.739.532,00	87,27	(1.938.562.498,00)	14.543.291.258,00	(8,65)
93	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	594.207.701,00	466.929.400,00	78,58	(127.278.301,00)	837.166.000,00	(44,22)
94	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.513.516.204,00	3.225.532.913,00	91,80	(287.983.291,00)	3.244.092.335,00	(0,57)
95	Belanja Paket/Pengiriman	9.539.660,00	7.667.500,00	80,37	(1.872.160,00)	7.011.000,00	9,36
96	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	370.063.097,00	167.085.823,00	45,15	(202.977.274,00)	0,00	0,00
97	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	2.097.600.000,00	2.097.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
98	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	16.970.049.111,00	8.692.598.783,00	51,22	(8.277.450.328,00)	3.121.550.889,00	178,47
99	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	630.597.779,00	596.635.424,00	94,61	(33.962.355,00)	0,00	0,00
100	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	8.400.000.000,00	8.356.189.000,00	99,48	(43.811.000,00)	0,00	0,00
101	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	1.155.840.000,00	1.058.982.400,00	91,62	(96.857.600,00)	0,00	0,00
102	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.930.665.991,00	6.312.235.679,00	91,08	(618.430.312,00)	0,00	0,00
103	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.354.912.154,00	1.777.223.510,00	75,47	(577.688.644,00)	0,00	0,00
104	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	24.066.264,00	0,00	0,00	(24.066.264,00)	0,00	0,00
105	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	721.237.477,00	657.588.300,00	91,18	(63.649.177,00)	3.442.900.300,00	(80,90)
106	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	44.500.980,00	33.105.000,00	74,39	(11.395.980,00)	0,00	0,00
107	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	126.480.000,00	118.800.000,00	93,93	(7.680.000,00)	0,00	0,00
108	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.357.381.640,00	1.858.163.200,00	78,82	(499.218.440,00)	2.640.274.000,00	(29,62)
109	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	130.032.000,00	129.984.800,00	99,96	(47.200,00)	119.975.796,00	8,34
110	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	171.957.286,00	150.172.000,00	87,33	(21.785.286,00)	0,00	0,00
111	Belanja Sewa Mebel	31.215.500,00	21.366.840,00	68,45	(9.848.660,00)	0,00	0,00
112	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	164.697.165,00	141.091.500,00	85,67	(23.605.665,00)	0,00	0,00
113	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	104.350.000,00	98.410.000,00	94,31	(5.940.000,00)	0,00	0,00
114	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	154.300.858,00	112.397.200,00	72,84	(41.903.658,00)	0,00	0,00
115	Belanja Sewa Sumber Tenaga	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	(50.000,00)	0,00	0,00
116	Belanja Sewa Alat Laboratorium Farmasi	10.890.000,00	0,00	0,00	(10.890.000,00)	0,00	0,00
117	Belanja Sewa Personal Computer	220.000,00	130.000,00	59,09	(90.000,00)	0,00	0,00
118	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	70.000.000,00	69.630.000,00	99,47	(370.000,00)	524.968.939,00	(86,74)
119	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	290.242.400,00	256.740.000,00	88,46	(33.502.400,00)	0,00	100,00
120	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	445.177.276,00	406.655.000,00	91,35	(38.522.276,00)	1.349.965.200,00	(69,88)
121	Belanja Sewa Bangunan Gudang	280.000.000,00	263.900.000,00	94,25	(16.100.000,00)	93.500.000,00	182,25
122	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	407.089.250,00	370.797.300,00	91,09	(36.291.950,00)	228.069.200,00	62,58
123	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
124	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	269.470.000,00	225.160.000,00	83,56	(44.310.000,00)	0,00	0,00
125	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II	430.000.000,00	343.000.000,00	79,77	(87.000.000,00)	0,00	0,00
126	Belanja Sewa Hotel	1.737.465.015,00	1.641.125.400,00	94,46	(96.339.615,00)	1.948.642.999,00	(15,78)
127	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	108.354.920,00	46.517.500,00	42,93	(61.837.420,00)	0,00	0,00
128	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	6.040.000,00	1.840.000,00	30,46	(4.200.000,00)	0,00	0,00
129	Belanja Sewa Tanaman	55.055.000,00	41.525.000,00	75,42	(13.530.000,00)	0,00	0,00
130	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.278.308.306,00	1.266.947.800,00	99,11	(11.360.506,00)	0,00	0,00
131	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	18.000.000,00	17.975.000,00	99,86	(25.000,00)	0,00	0,00
132	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	75.000.000,00	74.794.500,00	99,73	(205.500,00)	0,00	0,00
133	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk	1.497.034.500,00	1.489.130.500,00	99,47	(7.904.000,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
	Pekerjaan Teknik Sipil Air						
134	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.021.814.000,00	1.004.860.450,00	98,34	(16.953.550,00)	0,00	0,00
135	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	177.500.000,00	175.824.000,00	99,06	(1.676.000,00)	0,00	0,00
136	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	662.000.000,00	643.134.497,00	97,15	(18.865.503,00)	3.542.746.300,00	(81,85)
137	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.805.898.685,00	1.768.612.150,00	97,94	(37.286.535,00)	0,00	0,00
138	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	100.000.000,00	99.621.500,00	99,62	(378.500,00)	0,00	0,00
139	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	598.150.000,00	595.684.750,00	99,59	(2.465.250,00)	0,00	0,00
140	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	130.471.950,00	7.581.680,00	5,81	(122.890.270,00)	0,00	0,00
141	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	126.000.000,00	124.927.000,00	99,15	(1.073.000,00)	0,00	0,00
142	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	405.000.000,00	403.499.300,00	99,63	(1.500.700,00)	0,00	0,00
143	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.175.370.000,00	1.052.645.000,00	89,56	(122.725.000,00)	298.005.229,00	253,23
144	Belanja Bimbingan Teknis	481.024.700,00	452.980.000,00	94,17	(28.044.700,00)	857.853.000,00	(47,20)
145	Belanja Diklat Kepemimpinan	22.125.000,00	22.125.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00
146	Belanja Pemeliharaan Alat Besar Alat Besar Darat Loader	20.000.000,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)	0,00	0,00
147	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.735.737.304,00	1.697.306.000,00	97,79	(38.431.304,00)	0,00	0,00
148	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.663.745.635,00	1.653.795.790,00	99,40	(9.949.845,00)	0,00	0,00
149	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	417.870.000,00	401.222.000,00	96,02	(16.648.000,00)	0,00	0,00
150	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.151.231,00	7.059.600,00	63,31	(4.091.631,00)	0,00	0,00
151	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	76.724.000,00	76.241.000,00	99,37	(483.000,00)	0,00	0,00
152	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	150.000.000,00	149.954.640,00	99,97	(45.360,00)	0,00	0,00
153	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	130.595.897,00	125.500.450,00	96,10	(5.095.447,00)	0,00	0,00
154	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	39.215.052,00	38.995.000,00	99,44	(220.052,00)	0,00	0,00
155	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
156	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	14.850.000,00	9.405.000,00	63,33	(5.445.000,00)	0,00	0,00
157	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	529.536.959,00	483.603.675,00	91,33	(45.933.284,00)	0,00	0,00
158	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	16.053.040,00	15.974.000,00	99,51	(79.040,00)	0,00	0,00
159	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	739.613.513,00	700.308.740,00	94,69	(39.304.773,00)	0,00	0,00
160	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	216.635.104,00	214.573.600,00	99,05	(2.061.504,00)	0,00	0,00
161	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	19.996.650,00	19.937.045,00	99,70	(59.605,00)	0,00	0,00
162	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	5.674.725,00	5.670.000,00	99,92	(4.725,00)	0,00	0,00
163	Belanja Pemeliharaan Alat Studio,	17.650.000,00	17.517.500,00	99,25	(132.500,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
	Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio						
164	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	44.000.000,00	43.835.000,00	99,63	(165.000,00)	0,00	0,00
165	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone	4.136.000,00	4.134.240,00	99,96	(1.760,00)	0,00	0,00
166	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	19.000.000,00	18.920.000,00	99,58	(80.000,00)	29.920.000,00	(36,76)
167	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	61.316.550,00	61.316.550,00	100,00	0,00	189.979.716,00	(67,72)
168	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
169	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
170	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	14.300.000,00	14.300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
171	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	59.200.000,00	58.206.500,00	98,32	(993.500,00)	0,00	0,00
172	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	2.400.000,00	1.900.000,00	79,17	(500.000,00)	0,00	0,00
173	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	499.572.800,00	475.758.500,00	95,23	(23.814.300,00)	383.400.550,00	24,09
174	Belanja Pemeliharaan Komputer Peralatan Komputer Peralatan Mainframe	990.000,00	0,00	0,00	(990.000,00)	29.964.000,00	(100,00)
175	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	251.814.724,00	230.938.364,00	91,71	(20.876.360,00)	0,00	0,00
176	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	301.615.108,00	297.553.900,00	98,65	(4.061.208,00)	237.148.500,00	25,47
177	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	165.000.000,00	164.769.000,00	99,86	(231.000,00)	0,00	0,00
178	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	51.722.000,00	51.463.500,00	99,50	(258.500,00)	0,00	0,00
179	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.273.557.967,00	5.142.045.095,00	97,51	(131.512.872,00)	6.403.735.271,00	(19,70)
180	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	271.525.600,00	193.325.000,00	71,20	(78.200.600,00)	0,00	0,00
181	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	526.366.300,00	525.899.937,00	99,91	(466.363,00)	0,00	0,00
182	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	30.320.000,00	29.425.000,00	97,05	(895.000,00)	0,00	0,00
183	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	58.000.000,00	57.977.298,00	99,96	(22.702,00)	752.478.479,00	(92,30)
184	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	82.000.000,00	81.941.951,00	99,93	(58.049,00)	0,00	0,00
185	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	17.760.000,00	17.484.500,00	98,45	(275.500,00)	707.988.260,00	(97,53)
186	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Lainnya	138.110.000,00	136.735.500,00	99,00	(1.374.500,00)	0,00	0,00
187	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	131.040.000,00	130.930.000,00	99,92	(110.000,00)	0,00	0,00
188	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	70.000.000,00	69.767.500,00	99,67	(232.500,00)	74.580.000,00	(6,45)
189	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	3.519.993.966,00	3.398.848.900,00	96,56	(121.145.066,00)	84.925.000,00	3.902,18
190	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	792.016.125,00	570.572.288,00	72,04	(221.443.837,00)	0,00	0,00
191	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	993.146.580,00	992.197.243,00	99,90	(949.337,00)	378.761.216,00	161,96



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
192	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	22.000.000,00	21.935.100,00	99,71	(64.900,00)	14.947.075,00	46,75
193	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	20.000.000,00	19.970.500,00	99,85	(29.500,00)	4.100.000,00	387,09
194	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	9.900.000,00	9.887.900,00	99,88	(12.100,00)	0,00	0,00
195	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.883.790.184,00	12.767.617.865,00	67,61	(6.116.172.319,00)	19.659.930.701,00	(35,06)
196	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.284.880.677,00	11.646.123.115,00	63,69	(6.638.757.562,00)	22.439.617.212,00	(48,10)
197	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	716.832.362,00	451.536.340,00	62,99	(265.296.022,00)	0,00	0,00
198	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	91.674.124,00	83.800.000,00	91,41	(7.874.124,00)	0,00	0,00
199	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	4.452.387.000,00	3.792.428.500,00	85,18	(659.958.500,00)	0,00	0,00
200	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.893.600.000,00	2.857.950.000,00	98,77	(35.650.000,00)	0,00	0,00
201	Belanja Barang dan Jasa BOS	23.051.612.179,00	21.570.222.327,98	93,57	(1.481.389.851,02)	0,00	0,00
202	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.554.957.300,00	12.084.190.766,00			0,00	0,00
203	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	0,00	0,00	49.808.000,00	(100,00)
204	Belanja Sewa Alat Ukur/Pembandingan	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923.961.000,00	(100,00)
205	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746.420.280,00	(100,00)
206	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202.976.012,00	(100,00)
207	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072.603.320,00	(100,00)
208	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	75.912.500,00	(100,00)
209	Belanja makanan dan minuman Harian KDHW/KDHW	0,00	0,00	0,00	0,00	906.924.040,00	(100,00)
210	Belanja Pakaian Wearpack	0,00	0,00	0,00	0,00	13.612.500,00	(100,00)
211	Belanja Pakaian Jas Hujan/Mantel	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.584,00	(100,00)
212	Belanja Atribut Pakaian Kerja - Masker Khusus Polusi/Polution Mask	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223.000,00	(100,00)
213	Belanja Atribut Pakaian Kerja - Safety Gloves	0,00	0,00	0,00	0,00	27.076.500,00	(100,00)
214	Belanja Atribut Pakaian Kerja - Safety shoes	0,00	0,00	0,00	0,00	42.096.000,00	(100,00)
215	Belanja Atribut Pakaian Kerja - Topi kontruksi/Safety Hat/Hard Hat	0,00	0,00	0,00	0,00	35.740.000,00	(100,00)
216	Belanja Atribut Pakaian Kerja - Alat Keamanan (Baton/Pentungan/Borgol/Knuckle/StunGun dll)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333.600,00	(100,00)
217	Belanja Atribut Pakaian Kerja - Alat penerang (Senter, Lampu dll)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.919.000,00	(100,00)
218	Belanja Kontribusi Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	45.161.000,00	(100,00)
219	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pemenang Lomba/Barang Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770.000,00	(100,00)
220	Belanja Pengisian Bahan Pendingin AC	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180.000,00	(100,00)
221	Belanja Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	0,00	0,00	0,00	0,00	294.903.771,00	(100,00)
222	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.766.901,00	(100,00)
223	Belanja Alat Rumah Tangga / Dapur	0,00	0,00	0,00	0,00	428.420.373,00	(100,00)
224	Belanja Peralatan Perawatan Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689.600,00	(100,00)
225	Belanja Persediaan Makanan Pokok	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.743.605,00	(100,00)
226	Belanja Bahan Baku Pengecatan	0,00	0,00	0,00	0,00	373.671.290,00	(100,00)
227	Belanja Pupuk	0,00	0,00	0,00	0,00	283.148.500,00	(100,00)
228	Belanja Bahan Medis (ampul, Masker, dll)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.078.283.861,00	(100,00)
229	Belanja Bahan Baku Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885.000,00	(100,00)
230	Belanja Bahan Baku Industri Rumahan (Home Industry)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.804.000,00	(100,00)
231	Bahan Baku Praktek Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	22.305.500,00	(100,00)
232	Bahan Baku Praktek Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	88.897.727,00	(100,00)
233	Belanja Seminar Kit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.002.224,00	(100,00)
234	Belanja Bahan Baku Pakaian (Kain, Benang, Kancing, dll)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.437.500,00	(100,00)
235	Belanja bahan baku tanaman hias dan kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00	281.383.250,00	(100,00)
236	Belanja Bahan Pembelajaran	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.388.397,00	(100,00)
237	Belanja Bahan/Material Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	41.330.290,00	(100,00)
238	Belanja Peralatan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	354.220.410,00	(100,00)
239	Belanja Bahan Penunjang Perlombaan	0,00	0,00	0,00	0,00	111.076.900,00	(100,00)
240	Belanja Perlengkapan Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130.691.565,00	(100,00)
241	Belanja Air Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620.000,00	(100,00)
242	Belanja Bahan Kemasan	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700.000,00	(100,00)
243	Belanja Bahan Pertanian/Perkebunan/Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528.000,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
244	Belanja Bahan Tanah Urug	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520.800,00	(100,00)
245	Belanja Sertifikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	32.382.760,00	(100,00)
246	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi/Publikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	5.906.273.194,00	(100,00)
247	Belanja Jasa Uji Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	66.202.000,00	(100,00)
248	Belanja Jasa TV Kabel	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040.000,00	(100,00)
249	Belanja Jasa Instalasi Jaringan Komputer / LAN	0,00	0,00	0,00	0,00	21.917.000,00	(100,00)
250	Belanja Jasa Instalasi Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	246.989.800,00	(100,00)
251	Belanja Kalibrasi Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	68.054.800,00	(100,00)
252	Belanja Jasa Instalasi Jaringan Telepon/Fax/Internet/PABX	0,00	0,00	0,00	0,00	17.358.000,00	(100,00)
253	Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	14.466.925,00	(100,00)
254	Belanja Jasa Tukang Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	721.991.700,00	(100,00)
255	Belanja Jasa Penyelenggara Kegiatan (Event Organizer)	0,00	0,00	0,00	0,00	248.919.000,00	(100,00)
256	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.829.058,00	(100,00)
257	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.961.245,00	(100,00)
258	Belanja Jasa Service	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.855.255,00	(100,00)
259	Belanja Pakaian Bercorak Kesenian, Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	77.396.000,00	(100,00)
260	Belanja Pakaian Seragam Paripurna	0,00	0,00	0,00	0,00	43.189.300,00	(100,00)
261	Belanja Pakaian Hitam/Putih	0,00	0,00	0,00	0,00	91.748.800,00	(100,00)
262	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	0,00	0,00	0,00	322.863.500,00	(100,00)
263	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	471.409.000,00	(100,00)
264	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	(100,00)
265	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian	0,00	0,00	0,00	0,00	318.631.500,00	(100,00)
266	Belanja Uang hadiah perlombaan/tumamen/pertandingan	0,00	0,00	0,00	0,00	193.950.000,00	(100,00)
267	Belanja Uang Pembinaan Prestasi	0,00	0,00	0,00	0,00	430.500.000,00	(100,00)
268	Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	66.260.000,00	(100,00)
269	Belanja Barang Piala	0,00	0,00	0,00	0,00	221.207.600,00	(100,00)
270	Belanja Barang Souvenir Kerajinan Tradisional Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	(100,00)
271	Belanja Barang Penunjang Perlombaan	0,00	0,00	0,00	0,00	165.507.520,00	(100,00)
272	Belanja Barang Hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	638.850.807,00	(100,00)
273	Belanja Jasa Transportasi Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	52.967.000,00	(100,00)
274	Belanja Jasa Transportasi Mobilitas Air	0,00	0,00	0,00	0,00	30.610.800,00	(100,00)
275	Belanja Jasa Transportasi Mobilitas Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	693.040.656,00	(100,00)
276	Belanja Pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00	(100,00)
277	Belanja Pemeliharaan Website	0,00	0,00	0,00	0,00	369.987.200,00	(100,00)
278	Belanja Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540.000,00	(100,00)
279	Belanja perawatan Bilboard	0,00	0,00	0,00	0,00	82.496.700,00	(100,00)
280	Belanja Perawatan instalasi listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	281.559.910,00	(100,00)
281	Belanja Perawatan instalasi telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	29.573.500,00	(100,00)
282	Belanja Pakaian Khusus Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	523.060.420,00	(100,00)
283	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.835.000,00	(100,00)
284	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745.435.505,00	(100,00)
285	Belanja Jasa Penghargaan Pengabdian	0,00	0,00	0,00	0,00	129.120.000,00	(100,00)
286	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647.704.781,00	(100,00)
287	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286.679.950,00	(100,00)
288	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	256.371.000,00	(100,00)
289	Belanja Pengecatan Kendaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	162.838.000,00	(100,00)
290	Belanja jasa Service/Docking	0,00	0,00	0,00	0,00	84.213.800,00	(100,00)
291	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	409.500.000,00	(100,00)
292	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	(100,00)
293	Belanja sewa mesin Generator/Genset	0,00	0,00	0,00	0,00	63.830.000,00	(100,00)
294	Belanja sewa Proyektor/Infocus	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	(100,00)
295	Belanja sewa Komputer/PC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	(100,00)
296	Belanja sewa Printer	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.025,00	(100,00)
297	Belanja sewa Tenda dan Perlengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00	191.061.000,00	(100,00)
298	Belanja sewa kursi susun/Stacking	0,00	0,00	0,00	0,00	128.577.750,00	(100,00)
299	Belanja Sewa Sound System	0,00	0,00	0,00	0,00	276.558.800,00	(100,00)
300	Belanja sewa Meja	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	(100,00)
301	Belanja Sewa Lampu/Lighting	0,00	0,00	0,00	0,00	24.750.000,00	(100,00)
302	Belanja Barang dan Jasa BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600.000,00	(100,00)
303	Belanja Perawatan Konstruksi/Pembelian	0,00	0,00	0,00	0,00	327.637.000,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
	Gedung Tempat Pendidikan						
304	Belanja Perawatan lampu hias jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	169.772.000,00	(100,00)
305	Belanja Perawatan lampu hias taman	0,00	0,00	0,00	0,00	49.889.000,00	(100,00)
306	Belanja Perawatan Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	12.824.900,00	(100,00)
307	Belanja Perawatan Maket/Miniatur/Diorama	0,00	0,00	0,00	0,00	31.560.100,00	(100,00)
308	Belanja Perawatan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	873.996.172,00	(100,00)
309	Belanja Perawatan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	564.747.500,00	(100,00)
310	Belanja Perawatan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	422.846.340,00	(100,00)
311	Belanja Perawatan Komputer/Notebook	0,00	0,00	0,00	0,00	253.701.136,00	(100,00)
312	Belanja Perawatan Printer	0,00	0,00	0,00	0,00	363.678.900,00	(100,00)
313	Belanja Perawatan Monitor PC	0,00	0,00	0,00	0,00	11.067.000,00	(100,00)
314	Belanja Perawatan CPU	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707.600,00	(100,00)
315	Belanja Perawatan UPS/Stabilizer	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497.000,00	(100,00)
316	Belanja Perawatan Hard Drive/Ekternal Harddisk	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	(100,00)
317	Belanja Perawatan Almari/Locker	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	(100,00)
318	Belanja Perawatan Kamera Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	(100,00)
319	Belanja Perawatan Proyektor	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770.000,00	(100,00)
320	Belanja Perawatan Sound System	0,00	0,00	0,00	0,00	44.805.100,00	(100,00)
321	Belanja Perawatan Wireless/Wired Microphone	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384.000,00	(100,00)
322	Belanja Perawatan Amplifiers/Mixer	0,00	0,00	0,00	0,00	10.995.000,00	(100,00)
323	Belanja Perawatan Speaker	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	(100,00)
324	Belanja Perawatan CCTV	0,00	0,00	0,00	0,00	29.496.500,00	(100,00)
325	Belanja Perawatan Drone	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303.000,00	(100,00)
326	Belanja Perawatan Mesin Generator/Genset	0,00	0,00	0,00	0,00	158.115.100,00	(100,00)
327	Belanja Perawatan Mesin Listrik Tenaga Surya/Solar Cell	0,00	0,00	0,00	0,00	28.552.000,00	(100,00)
328	Belanja Perawatan Network Audio	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290.000,00	(100,00)
329	Belanja Perawatan Alat-alat Laboratorium Teknik	0,00	0,00	0,00	0,00	59.675.000,00	(100,00)
330	Belanja Perawatan Lampu Pengatur Lalulintas (Traffic Light)	0,00	0,00	0,00	0,00	188.809.500,00	(100,00)
331	Belanja Barang Modal Pengadaan Kulkas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	(100,00)
332	Belanja Perawatan Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765.156,00	(100,00)
333	Belanja Perawatan Kamera Potret	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00	(100,00)
334	Belanja Sewa Panggung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00	(100,00)
	Jumlah	381.489.167.191,00	327.840.463.570,98	85,94	(53.648.703.620,02)	257.761.202.728,82	27,19

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp327.840.463.570,98 atau sebesar 85,94% dari anggaran sebesar Rp381.489.167.191,00.

7.5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2021 merupakan hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta. Anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dinas Pendidikan	5.486.382.000,00	5.329.856.645,00	97,15	(156.525.355,00)	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.145.900.000,00	3.119.943.490,00	99,17	(25.956.510,00)	0,00	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.889.458.463,00	4.876.962.871,00	99,74	(12.495.592,00)	0,00	0,00
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	747.381.613,00	747.381.613,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial	146.603.434,00	145.213.400,00	99,05	(1.390.034,00)	0,00	0,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.990.692.058,00	2.832.510.123,00	94,71	(158.181.935,00)	0,00	0,00
9	Dinas Perhubungan	65.000.000,00	64.680.000,00	99,51	(320.000,00)	0,00	0,00
10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	5.338.352.416,00	5.177.988.730,00	97,00	(160.363.686,00)	0,00	0,00
11	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.380.000.000,00	1.378.233.000,00	99,87	(1.767.000,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

12	Dinas Perikanan	13.898.645.330,00	13.752.373.446,00	98,95	(146.271.884,00)	0,00	0,00
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100.000.000,00	99.341.000,00	99,34	(659.000,00)	0,00	0,00
14	Sekretariat Daerah	4.820.000.000,00	2.739.832.150,00	56,84	(2.080.167.850,00)	0,00	0,00
15	Kecamatan Bintan Timur	507.548.841,00	426.948.500,00	84,12	(80.600.341,00)	0,00	0,00
16	Kecamatan Gunung Kijang	552.441.267,00	550.067.760,00	99,57	(2.373.507,00)	0,00	0,00
17	Kecamatan Teluk Bintan	766.000.000,00	396.008.500,00	51,70	(369.991.500,00)	0,00	0,00
18	Kecamatan Bintan Utara	620.520.354,00	613.228.000,00	98,82	(7.292.354,00)	0,00	0,00
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.061.787.979,00	1.010.420.000,00	95,16	(51.367.979,00)	57.292.591.880,00	(98,24)
Jumlah		48.816.713.755,00	45.560.989.228,00	93,33	(3.255.724.527,00)	57.292.591.880,00	(20,48)

Realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp45.560.989.228,00 atau sebesar 93,33% dari anggaran sebesar Rp48.816.713.755,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yaitu sebesar Rp11.731.602.652,00 atau 20,48%

Adapun belanja hibah per jenis belanja adalah sebagai berikut

Tabel 7.5.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Perjenis Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.657.687.979,00	1.582.843.490,00	95,49	(74.844.489,00)	0,00	0,00
3	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.695.000.000,00	1.692.716.400,00	99,87	(2.283.600,00)	0,00	0,00
4	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.308.282.000,00	5.226.658.795,00	71,52	(2.081.623.205,00)	0,00	0,00
5	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Suksrela Bersifat Sosial Masyarakat	33.678.362.163,00	32.590.188.930,00	96,77	(1.088.173.233,00)	0,00	0,00
6	Belanja Hibah Kepada Koperasi	230.000.000,00	221.200.000,00	96,17	(8.800.000,00)	0,00	0,00
7	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	27.130.451.454,00	(100,00)
8	Belanja Hibah Kepada Perusahaan Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00	18.719.590.813,00	(100,00)
9	Belanja Hibah Kepada Organisasi Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064.668.000,00	(100,00)
10	Belanja Hibah Kepada Yayasan/Lembaga/Organisasi Keagamaan	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.200.000,00	(100,00)
11	Belanja Hibah Dana BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802.600.000,00	(100,00)
12	Belanja Hibah BOP Penyelenggaraan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	627.700.000,00	(100,00)
13	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	747.381.613,00	747.381.613,00	100,00	0,00	747.381.613,00	0,00
Jumlah		48.816.713.755,00	45.560.989.228,00	93,33	(3.255.724.527,00)	57.292.591.880,00	(20,48)

Realisasi Belanja Hibah Perjenis Belanja TA 2021 sebesar Rp45.560.989.228,00 atau sebesar 93,33% dari anggaran sebesar Rp48.816.713.755,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp11.731.602.652,00 atau 20,48%.

Tabel 7.5.40 Anggaran dan Realisasi Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Satpol PP	Polres Bintan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TMMD di Kec. Toapaya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Hibah kepada Uang Kepada Pemerintah Pusat TA 2021 sebesar Rp3.500.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00. Belanja tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.500.000.000,00 atau 0,00%.

Tabel 7.5.41 Anggaran dan Realisasi Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Polres Bintan	1.195.900.000,00	1.169.943.490,00	97,83	(25.956.510,00)	0,00	0,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kodim 0315/Bintan	461.787.979,00	412.900.000,00	89,41	(48.887.979,00)	0,00	0,00
Jumlah			1.657.687.979,00	1.582.843.490,00	95,49	(74.844.489,00)	0,00	0,00

Hibah kepada Barang Kepada Pemerintah Pusat TA 2021 sebesar Rp1.582.843.490,00 atau sebesar 95,49% dari anggaran sebesar Rp1.657.687.979,00. Belanja tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yaitu sebesar Rp1.582.843.490,00 atau 0,00%.

Tabel 7.5.42 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Kec. Gunung Kijang	Hibah Kepada Karang Taruna	135.000.000	134.244.000	99,44	(756.000,00)	0,00	0,00
2	Kec. Gunung Kijang	Hibah Kepada Yayasan Al-Furqon	180.000.000	179.190.000	99,55	(810.000,00)	0,00	0,00
3	Kec. Gunung Kijang	Hibah Kepada PKK Kecamatan	180.000.000	179.282.400	99,60	(717.600,00)	0,00	0,00
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	Hibah kepada KONI	600.000.000	600.000.000	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	Hibah Kepada Pramuka	600.000.000	600.000.000	100,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			1.695.000.000,00	1.692.716.400,00	99,87	(2.283.600,00)	0,00	0,00

Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2021 sebesar Rp1.692.716.400,00 atau sebesar 99,87% dari anggaran sebesar Rp1.695.000.000,00. Belanja tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yaitu sebesar Rp1.692.716.400,00 atau 0,00%.

Tabel 7.5.43 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dinas Kesehatan	PMI Kabupaten Bintan	300.000.000	300.000.000	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	TK Ceria	68.600.000	68.470.000	99,81	(130.000,00)	0,00	0,00
3	Sekretariat Daerah	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)	1.500.000.000	1.388.532.150	92,57	(111.467.850,00)	0,00	0,00
4	Sekretariat Daerah	BAZNAS Kab. Bintan	200.000.000	200.000.000	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Sekretariat Daerah	FKUB Kab. Bintan	200.000.000	200.000.000	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Sekretariat Daerah	Badan Kontak Majelis Taklim Kab. Bintan	100.000.000	100.000.000	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Sekretariat Daerah	Surau Al Ikhlas	75.000.000	75.000.000	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Sekretariat Daerah	Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi	50.000.000	50.000.000	100,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
9	Sekretariat Daerah	Majelis Ulama Indonesia (MUJ) Kab. Bintan	200.000.000	200.000.000	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Sekretariat Daerah	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Khatolik (LP3D) Kabupaten Bintan	100.000.000	100.000.000	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Sekretariat Daerah	Dewan Masjid Indonesia Kab. Bintan	150.000.000	150.000.000	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Sekretariat Daerah	Masjid Darussalam	75.000.000	75.000.000	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Sekretariat Daerah	Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Bintan	80.000.000	80.000.000	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Sekretariat Daerah	Masjid Baitur Rahman	70.000.000	51.300.000	73,29	(18.700.000,00)	0,00	0,00
15	Sekretariat Daerah	Musholla Al-Hidayah	70.000.000	70.000.000	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Sekretariat Daerah	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Bintan	75.000.000	0,00	0,00	(75.000.000,00)	0,00	0,00
17	Sekretariat Daerah	Darul Qur'an Kab. Bintan	250.000.000	0,00	0,00	(250.000.000,00)	0,00	0,00
18	Sekretariat Daerah	Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (Lasqi) Kab. Bintan	75.000.000	0,00	0,00	(75.000.000,00)	0,00	0,00
19	Sekretariat Daerah	Masjid Ar-Rahim	500.000.000	0,00	0,00	(500.000.000,00)	0,00	0,00
20	Sekretariat Daerah	Masjid Nurul Istiqomah	1.000.000.000	0,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0,00	0,00
21	Sekretariat Daerah	Musholla Miftahul Huda	50.000.000	0,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	0,00
22	Dinas Pendidikan	SDIT AN NAHL	62.900.000,00	62.865.000,00	99,94	(35.000,00)	0,00	0,00
23	Dinas Pendidikan	SDIT BAHTERA INSANI	88.060.000,00	88.011.000,00	99,94	(49.000,00)	0,00	0,00
24	Dinas Pendidikan	MIS Miftahul Ulum	58.740.000,00	58.630.000,00	99,81	(110.000,00)	0,00	0,00
25	Dinas Pendidikan	MTSN BINTAN TIMUR	18.656.000,00	18.645.000,00	99,94	(11.000,00)	0,00	0,00
26	Dinas Pendidikan	PAUD Gita Ceria	16.236.000,00	16.236.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	Dinas Pendidikan	PAUD Langgeng	8.118.000,00	8.118.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Dinas Pendidikan	PAUD Sabda Betuah	8.118.000,00	8.118.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	Dinas Pendidikan	PAUD Mawar Asri	8.118.000,00	8.118.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	Dinas Pendidikan	PAUD Nusa Indah	8.118.000,00	8.118.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	Dinas Pendidikan	KB Kasih Bunda	8.118.000,00	8.118.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Dinas Pendidikan	TK Terumbu Karang	157.850.000,00	157.779.274,00	99,96	(70.726,00)	0,00	0,00
33	Dinas Pendidikan	KB Al Fathul Ilmi	50.820.000,00	50.816.451,00	99,99	(3.549,00)	0,00	0,00
34	Dinas Pendidikan	TK YKPP	50.820.000,00	50.783.911,00	99,93	(36.089,00)	0,00	0,00
35	Dinas Pendidikan	KB Kasih	36.960.000,00	36.956.428,00	99,99	(3.572,00)	0,00	0,00
36	Dinas Pendidikan	PAUD Tirta Dharma	117.810.000,00	117.533.324,00	99,77	(276.676,00)	0,00	0,00
37	Dinas Pendidikan	PAUD Sri Kemuning	127.380.000,00	127.270.000,00	99,91	(110.000,00)	0,00	0,00
38	Dinas Pendidikan	PAUD Tunas Sahabat	133.760.000,00	133.650.000,00	99,92	(110.000,00)	0,00	0,00
39	Dinas Pendidikan	KB Kasih	20.625.000,00	20.620.000,00	99,98	(5.000,00)	0,00	0,00
40	Dinas Pendidikan	TK Muhammadiyah	20.625.000,00	20.570.689,00	99,74	(54.311,00)	0,00	0,00
41	Dinas Pendidikan	TK Sinar Bahagia	34.650.000,00	34.611.397,00	99,89	(38.603,00)	0,00	0,00
42	Dinas Pendidikan	TK Bahrul Ulum	173.250.000,00	173.147.158,00	99,94	(102.842,00)	0,00	0,00
43	Dinas Pendidikan	PAUD Darul Mutaalim	177.100.000,00	177.048.703,00	99,97	(51.297,00)	0,00	0,00
44	Dinas Pendidikan	TK Amalya	50.050.000,00	50.046.559,00	99,99	(3.441,00)	0,00	0,00
45	Dinas Pendidikan	PAUD Teratai	42.350.000,00	42.331.000,00	99,96	(19.000,00)	0,00	0,00
46	Dinas Pendidikan	TK Nusantara	42.350.000,00	42.331.000,00	99,96	(19.000,00)	0,00	0,00
47	Dinas Pendidikan	PAUD Sri Kemuning	23.100.000	23.083.751,00	99,93	(16.249,00)	0,00	0,00
48	Dinas Pendidikan	PGRI	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
49	Dinas Pendidikan	IGTKI	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
50	Kec. Bintan Timur	Surau Baiturrahman	75.000.000	74.800.000	99,73	(200.000,00)	0,00	0,00
Jumlah			7.308.282.000,00	5.226.658.795,00	71,52	(2.081.623.205,00)	0,00	0,00

Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2021 sebesar Rp5.226.658.795,00 atau sebesar 71,52% dari anggaran sebesar Rp7.308.282.000,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yaitu sebesar Rp5.226.658.795,00 atau 0,00%.

Tabel 7.5.44 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sanggar Joged Dangmong Melayu Serumpun Bersatu	100.000.000,00	99.341.000,00	99,34	(659.000,00)	0,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan	Pamsimas Desa Mapur Kec. Bintan Pesisir	145.000.000,00	145.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
	Penataan Ruang							
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pamsimas Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang	165.000.000,00	165.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pamsimas Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Surau Al-Falah	72.891.000,00	72.680.000,00	99,71	(211.000,00)	0,00	0,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Surau Nurhidayah	72.891.000,00	72.748.000,00	99,80	(143.000,00)	0,00	0,00
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Surau Amalun Shalihen	74.910.000,00	74.770.000,00	99,81	(140.000,00)	0,00	0,00
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan Rumah Ustadz Miftahul Gayat	154.860.000,00	154.820.000,00	99,97	(40.000,00)	0,00	0,00
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Tempat Pengajian Al Qur'an Al Makruf	38.181.000,00	37.989.000,00	99,50	(192.000,00)	0,00	0,00
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Masjid Raya Al-Ma'ruf	48.060.000,00	47.948.000,00	99,77	(112.000,00)	0,00	0,00
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Masjid Jamiatul Mu'Minin	114.543.000,00	114.460.000,00	99,93	(83.000,00)	0,00	0,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Surau Baitul Solihin	152.880.000,00	152.735.000,00	99,91	(145.000,00)	0,00	0,00
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	TPA Karang Rejo	83.304.000,00	83.233.000,00	99,91	(71.000,00)	0,00	0,00
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	TPA Al Amal	83.304.000,00	82.083.000,00	98,53	(1.221.000,00)	0,00	0,00
15	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Mushollah Nurul Hidayah	45.657.000,00	45.029.000,00	98,62	(628.000,00)	0,00	0,00
16	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Masjid An – Nur	146.000.484,00	145.910.000,00	99,94	(90.484,00)	0,00	0,00
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pondok Pesantren Idris	170.880.000,00	170.750.000,00	99,92	(130.000,00)	0,00	0,00
18	Dinas Perumahan Rakyat dan	Masjid Al - Hikmah	173.550.000,00	173.458.000,00	99,95	(92.000,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
	Kawasan Pemukiman							
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Mesjid Al Amin LDII	101.460.000,00	101.313.000,00	99,86	(147.000,00)	0,00	0,00
20	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Mushola Al - Mu'minin	128.310.000,00	128.228.000,00	99,94	(82.000,00)	0,00	0,00
21	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Mesjid Al - Ikhlas	46.959.213,00	46.935.000,00	99,95	(24.213,00)	0,00	0,00
22	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pondok Pesantren Hidayatullah	154.538.524,00	154.435.000,00	99,93	(103.524,00)	0,00	0,00
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan Dinding Penahan Tanah Kelenteng Jalan Lintas Barat RT. 05 RW. 02 Kel. Toapaya Asri Kec. Toapaya	154.860.000,00	154.697.000,00	99,89	(163.000,00)	0,00	0,00
24	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	TPQ Al - Kautsar	40.851.000,00	40.771.000,00	99,80	(80.000,00)	0,00	0,00
25	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Mushola Ar - Rahmat	128.160.000,00	128.067.000,00	99,93	(93.000,00)	0,00	0,00
26	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Mesjid Al Muhajirin	170.880.000,00	170.340.000,00	99,68	(540.000,00)	0,00	0,00
27	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	TPQ An Nur	85.440.000,00	85.380.000,00	99,93	(60.000,00)	0,00	0,00
28	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Masjid AD-Dakwah	133.500.000,00	133.378.000,00	99,91	(122.000,00)	0,00	0,00
29	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Mushola Alif Lamm Mim	170.880.000,00	170.703.000,00	99,90	(177.000,00)	0,00	0,00
30	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Musholla Ar Rozaq	60.075.000,00	60.009.000,00	99,89	(66.000,00)	0,00	0,00
31	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Gereja HKBP	127.359.000,00	127.279.000,00	99,94	(80.000,00)	0,00	0,00
32	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	TPA AL Kaunniyah Berakit	170.880.000,00	170.800.000,00	99,95	(80.000,00)	0,00	0,00
33	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Mesjid Ashhaabul Yamin Berakit	152.880.000,00	152.690.000,00	99,88	(190.000,00)	0,00	0,00
34	Dinas	TPQ AL-AMIN	117.480.000,00	117.250.000,00	99,80	(230.000,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
35	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Mushola Al-Muqlisin	173.550.000,00	173.370.000,00	99,90	(180.000,00)	0,00	0,00
36	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Masjid Al-Muhajirin	85.440.000,00	85.260.000,00	99,79	(180.000,00)	0,00	0,00
37	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Mushola As-Shuffah	86.508.000,00	86.310.000,00	99,77	(198.000,00)	0,00	0,00
38	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	TPQ At - Taubah	73.000.242,00	72.810.000,00	99,74	(190.242,00)	0,00	0,00
39	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Mesjid Al. Fatah	83.304.000,00	83.250.000,00	99,94	(54.000,00)	0,00	0,00
40	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	RA Mattahul Huda	65.520.000,00	64.920.000,00	99,08	(600.000,00)	0,00	0,00
41	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Surau Baitul Mustaqim	43.254.000,00	43.157.000,00	99,78	(97.000,00)	0,00	0,00
42	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	TPQ Jannatul Ma'wa	170.880.000,00	170.860.000,00	99,99	(20.000,00)	0,00	0,00
43	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Masjid Al - Azhar	57.672.000,00	57.600.000,00	99,88	(72.000,00)	0,00	0,00
44	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Mesjid Ikhwanul Muslimin	177.450.000,00	177.390.000,00	99,97	(60.000,00)	0,00	0,00
45	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	masjid Nurul Iman	427.856.000,00	422.677.871,00	98,79	(5.178.129,00)	0,00	0,00
46	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Sentra IKM Sei Lekop	4.750.462.650,00	4.601.988.830,00	96,87	(148.473.820,00)	0,00	0,00
47	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	175.026.066,00	174.984.000,00	99,98	(42.066,00)	0,00	0,00
48	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (KUEP)	179.847.700,00	179.815.900,00	99,98	(31.800,00)	0,00	0,00
49	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Kelompok Usaha Pembuat Leker	3.016.000,00	0,00	0,00	(3.016.000,00)	0,00	0,00
50	Kec. Teluk	Rehap Mesji dan	676.000.000,00	306.041.000,00	45,27	(369.959.000,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
	Bintan	Posyandu serta pembangunan Pembangunan						
51	Kec. Teluk Bintan	Uang Hadiah	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
52	Kec. Teluk Bintan	Alat Tangkap nelayan	50.000.000,00	49.967.500,00	99,94	(32.500,00)	0,00	0,00
53	Dinas Pehubungan	Pembuatan Perahu Motor	65.000.000,00	64.680.000,00	99,51	(320.000,00)	0,00	0,00
54	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Lembaga Adat Melayu	300.000.000,00	298.760.000,00	99,59	(1.240.000,00)	0,00	0,00
55	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Yayasan Bahtera Insani	300.000.000,00	298.760.000,00	99,59	(1.240.000,00)	0,00	0,00
56	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Peralatan DrumBand	180.000.000,00	178.233.000,00	99,02	(1.767.000,00)	0,00	0,00
57	Dinas Pendidikan	TK Permata Bintan	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
58	Dinas Pendidikan	TK Terumbu Karang	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
59	Dinas Pendidikan	TK Sinar Bahagia	24.000.000,00	22.500.000,00	93,75	(1.500.000,00)	0,00	0,00
60	Dinas Pendidikan	TK Gracia	39.000.000,00	33.000.000,00	84,62	(6.000.000,00)	0,00	0,00
61	Dinas Pendidikan	TK Kids Club	76.800.000,00	64.800.000,00	84,38	(12.000.000,00)	0,00	0,00
62	Dinas Pendidikan	TK Amalya	22.800.000,00	21.000.000,00	92,11	(1.800.000,00)	0,00	0,00
63	Dinas Pendidikan	TK Hang Tuah	39.600.000,00	32.100.000,00	81,06	(7.500.000,00)	0,00	0,00
64	Dinas Pendidikan	TK YKPP	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
65	Dinas Pendidikan	TK Fransiskus	13.800.000,00	13.200.000,00	95,65	(600.000,00)	0,00	0,00
66	Dinas Pendidikan	TK Puji	12.600.000,00	11.100.000,00	88,10	(1.500.000,00)	0,00	0,00
67	Dinas Pendidikan	TK Nusantara	11.400.000,00	10.500.000,00	92,11	(900.000,00)	0,00	0,00
68	Dinas Pendidikan	TK Surya Kebenaran	17.400.000,00	13.200.000,00	75,86	(4.200.000,00)	0,00	0,00
69	Dinas Pendidikan	TK Ceria Bintan	26.400.000,00	22.800.000,00	86,36	(3.600.000,00)	0,00	0,00
70	Dinas Pendidikan	TK Angkasa I	10.200.000,00	9.900.000,00	97,06	(300.000,00)	0,00	0,00
71	Dinas Pendidikan	TK Eden Ceria	27.600.000,00	25.800.000,00	93,48	(1.800.000,00)	0,00	0,00
72	Dinas Pendidikan	Paud Nusa Indah Teluk Bakau	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
73	Dinas Pendidikan	Paud Nusa Indah I	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
74	Dinas Pendidikan	Paud Nusa Indah II	31.800.000,00	29.100.000,00	91,51	(2.700.000,00)	0,00	0,00
75	Dinas Pendidikan	Paud Nusa Indah III	17.400.000,00	17.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
76	Dinas Pendidikan	Paud Nusa Indah IV	28.200.000,00	27.000.000,00	95,74	(1.200.000,00)	0,00	0,00
77	Dinas Pendidikan	KB Tunas Bentan	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
78	Dinas Pendidikan	KB Seruni	10.800.000,00	10.500.000,00	97,22	(300.000,00)	0,00	0,00
79	Dinas Pendidikan	KB Al Hikmah	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80	Dinas Pendidikan	KB Kenanga	27.000.000,00	26.100.000,00	96,67	(900.000,00)	0,00	0,00
81	Dinas Pendidikan	KB Harapan Jaya	13.800.000,00	13.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
82	Dinas Pendidikan	KB Al Fathul Ilmi	17.400.000,00	14.700.000,00	84,48	(2.700.000,00)	0,00	0,00
83	Dinas Pendidikan	KB Nurul Istiqomah	16.200.000,00	15.900.000,00	98,15	(300.000,00)	0,00	0,00
84	Dinas Pendidikan	KB Petra Bintan	43.200.000,00	43.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85	Dinas Pendidikan	KB Ananda	13.800.000,00	10.500.000,00	76,09	(3.300.000,00)	0,00	0,00
86	Dinas Pendidikan	KB Tunas Sahabat	18.000.000,00	15.000.000,00	83,33	(3.000.000,00)	0,00	0,00
87	Dinas Pendidikan	KB Nurul Amin	15.000.000,00	12.900.000,00	86,00	(2.100.000,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
	Pendidikan							
88	Dinas Pendidikan	KB Al Furqon	35.400.000,00	34.800.000,00	98,31	(600.000,00)	0,00	0,00
89	Dinas Pendidikan	KB Tiara	16.800.000,00	14.400.000,00	85,71	(2.400.000,00)	0,00	0,00
90	Dinas Pendidikan	KB Al Jannatun Naim	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
91	Dinas Pendidikan	KB Bina Cahaya	21.000.000,00	19.500.000,00	92,86	(1.500.000,00)	0,00	0,00
92	Dinas Pendidikan	KB Ar Riyadhussholihin	18.000.000,00	17.400.000,00	96,67	(600.000,00)	0,00	0,00
93	Dinas Pendidikan	KB Buah Hati	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
94	Dinas Pendidikan	Pos PAUD Seri Melati	25.200.000,00	23.400.000,00	92,86	(1.800.000,00)	0,00	0,00
95	Dinas Pendidikan	KB Al Hasanah I	8.400.000,00	7.200.000,00	85,71	(1.200.000,00)	0,00	0,00
96	Dinas Pendidikan	KB Cahaya Hati	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
97	Dinas Pendidikan	KB Gita Ceria	8.400.000,00	7.800.000,00	92,86	(600.000,00)	0,00	0,00
98	Dinas Pendidikan	KB Nilam Permata Bintan I	21.000.000,00	18.900.000,00	90,00	(2.100.000,00)	0,00	0,00
99	Dinas Pendidikan	KB Cinta Nusantara	12.000.000,00	11.700.000,00	97,50	(300.000,00)	0,00	0,00
100	Dinas Pendidikan	KB Cahaya Indah	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
101	Dinas Pendidikan	KB Kasih Bunda	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
102	Dinas Pendidikan	TK Bhakti Awlya	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
103	Dinas Pendidikan	KB Teratai	22.800.000,00	18.600.000,00	81,58	(4.200.000,00)	0,00	0,00
104	Dinas Pendidikan	KB Mutiara Qur'ani	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
105	Dinas Pendidikan	KB Intan Cahaya	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
106	Dinas Pendidikan	SPS Permata Bunda	36.000.000,00	31.200.000,00	86,67	(4.800.000,00)	0,00	0,00
107	Dinas Pendidikan	KB Mutiara Hati	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
108	Dinas Pendidikan	KB Lentera Hati	15.600.000,00	14.700.000,00	94,23	(900.000,00)	0,00	0,00
109	Dinas Pendidikan	KB Cahaya Numbing	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
110	Dinas Pendidikan	KB Ananda (Kec.Toapaya)	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
111	Dinas Pendidikan	KB Mutiara Bunda	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
112	Dinas Pendidikan	POS PAUD Langgeng	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
113	Dinas Pendidikan	KB Bina Sejahtera	13.800.000,00	13.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
114	Dinas Pendidikan	SPS Berseri	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
115	Dinas Pendidikan	KB Pelita Hati	25.800.000,00	24.300.000,00	94,19	(1.500.000,00)	0,00	0,00
116	Dinas Pendidikan	KB Adinda Mandiri	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
117	Dinas Pendidikan	Pos Paud Air Glubi Indah	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
118	Dinas Pendidikan	KB Tunas Muda	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
119	Dinas Pendidikan	TK Kandil Bahar	35.400.000,00	35.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
120	Dinas Pendidikan	KB Tut Wuri Handayani	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
121	Dinas Pendidikan	KB Nurul 'Ain	21.000.000,00	19.200.000,00	91,43	(1.800.000,00)	0,00	0,00
122	Dinas Pendidikan	KB Al Hasanah II	13.800.000,00	12.600.000,00	91,30	(1.200.000,00)	0,00	0,00
123	Dinas Pendidikan	KB Anggerek Ladi	29.400.000,00	25.200.000,00	85,71	(4.200.000,00)	0,00	0,00
124	Dinas Pendidikan	KB Annida	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
125	Dinas Pendidikan	KB Ar Raudhah	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
126	Dinas Pendidikan	KB FATiharah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
	Pendidikan							
127	Dinas Pendidikan	KB Kasih	9.600.000,00	8.400.000,00	87,50	(1.200.000,00)	0,00	0,00
128	Dinas Pendidikan	KB Kasih Ibu	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
129	Dinas Pendidikan	KB Kasih Sayang	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
130	Dinas Pendidikan	KB Kemala Sari	12.600.000,00	11.700.000,00	92,86	(900.000,00)	0,00	0,00
131	Dinas Pendidikan	KB Kids Club Center 1	9.600.000,00	9.000.000,00	93,75	(600.000,00)	0,00	0,00
132	Dinas Pendidikan	KB Malin Indah	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
133	Dinas Pendidikan	KB Mandiri (Kec.Teluk Seborg)	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
134	Dinas Pendidikan	KB Mawar Asri	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
135	Dinas Pendidikan	KB RA Kartini	28.200.000,00	28.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
136	Dinas Pendidikan	KB Mutiara	13.800.000,00	13.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
137	Dinas Pendidikan	KB Permata Bintan	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
138	Dinas Pendidikan	TK Cendikia Bintan	9.600.000,00	7.800.000,00	81,25	(1.800.000,00)	0,00	0,00
139	Dinas Pendidikan	KB Permata Ibu	16.800.000,00	15.000.000,00	89,29	(1.800.000,00)	0,00	0,00
140	Dinas Pendidikan	KB Putra Putri Ceria	18.600.000,00	15.300.000,00	82,26	(3.300.000,00)	0,00	0,00
141	Dinas Pendidikan	KB Qurrota'ayun	15.600.000,00	14.700.000,00	94,23	(900.000,00)	0,00	0,00
142	Dinas Pendidikan	KB Sengkuang	22.800.000,00	22.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
143	Dinas Pendidikan	KB Tenggara	11.400.000,00	11.100.000,00	97,37	(300.000,00)	0,00	0,00
144	Dinas Pendidikan	KB Tirta Dharma	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
145	Dinas Pendidikan	KB Bukit Timah	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
146	Dinas Pendidikan	KB Alamanda	6.000.000,00	5.700.000,00	95,00	(300.000,00)	0,00	0,00
147	Dinas Pendidikan	Pos Paud Anggur	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
148	Dinas Pendidikan	KB Al Amin	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
149	Dinas Pendidikan	Pos Paud Galang Batang	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
150	Dinas Pendidikan	Pos Paud Harapan bunda	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
151	Dinas Pendidikan	Pos Paud Lestari	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
152	Dinas Pendidikan	Pos Paud Melati Indah	30.600.000,00	30.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
153	Dinas Pendidikan	Pos Paud Telaga Surya	9.600.000,00	8.700.000,00	90,63	(900.000,00)	0,00	0,00
154	Dinas Pendidikan	Pos Paud Tunas Harapan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
155	Dinas Pendidikan	SPS Camar	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
156	Dinas Pendidikan	SPS Lengkuas Indah	24.000.000,00	22.800.000,00	95,00	(1.200.000,00)	0,00	0,00
157	Dinas Pendidikan	SPS Mutiara Ibu	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
158	Dinas Pendidikan	TK Antam Kijang	28.200.000,00	25.200.000,00	89,36	(3.000.000,00)	0,00	0,00
159	Dinas Pendidikan	TK Arlica	10.800.000,00	9.000.000,00	83,33	(1.800.000,00)	0,00	0,00
160	Dinas Pendidikan	TK Muhammadiyah 1	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
161	Dinas Pendidikan	KB Cahaya Fastabiqul Khairat	23.400.000,00	20.700.000,00	88,46	(2.700.000,00)	0,00	0,00
162	Dinas Pendidikan	TK Pedesaan Gunung Kijang	27.000.000,00	22.500.000,00	83,33	(4.500.000,00)	0,00	0,00
163	Dinas Pendidikan	TK Tunas Bangsa	26.400.000,00	19.500.000,00	73,86	(6.900.000,00)	0,00	0,00
164	Dinas Pendidikan	TK Tunas Muda	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
165	Dinas Pendidikan	TK Muhammadiyah 2	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
	Pendidikan							
166	Dinas Pendidikan	KB Tunas Harapan	12.000.000,00	11.700.000,00	97,50	(300.000,00)	0,00	0,00
167	Dinas Pendidikan	KB Janur Bina Maju	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
168	Dinas Pendidikan	Pos Paud Sri Kemuning	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
169	Dinas Pendidikan	KB Nurul Iman	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
170	Dinas Pendidikan	SPS Kemala Kasih	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
171	Dinas Pendidikan	KB Surya Kemenangan	9.000.000,00	7.200.000,00	80,00	(1.800.000,00)	0,00	0,00
172	Dinas Pendidikan	KB Nusantara	9.000.000,00	8.100.000,00	90,00	(900.000,00)	0,00	0,00
173	Dinas Pendidikan	KB Bhakti Awlya	8.400.000,00	7.500.000,00	89,29	(900.000,00)	0,00	0,00
174	Dinas Pendidikan	KB Killah	14.400.000,00	13.800.000,00	95,83	(600.000,00)	0,00	0,00
175	Dinas Pendidikan	KB Cipta Insantama	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
176	Dinas Pendidikan	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
177	Dinas Pendidikan	TK Yuliana	13.200.000,00	9.900.000,00	75,00	(3.300.000,00)	0,00	0,00
178	Dinas Pendidikan	KB Padi Mas	14.400.000,00	13.800.000,00	95,83	(600.000,00)	0,00	0,00
179	Dinas Pendidikan	TK SD Satu Atap SDN 001 Teluk Bintan	21.000.000,00	16.500.000,00	78,57	(4.500.000,00)	0,00	0,00
180	Dinas Pendidikan	KB Mandiri	27.600.000,00	24.600.000,00	89,13	(3.000.000,00)	0,00	0,00
181	Dinas Pendidikan	TK Tirta Eka Pertiwi	22.200.000,00	22.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
182	Dinas Pendidikan	KB Terumbu Karang	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
183	Dinas Pendidikan	TK Satu Atap SDN 007 Teluk Sebung	14.400.000,00	12.000.000,00	83,33	(2.400.000,00)	0,00	0,00
184	Dinas Pendidikan	TK Tadika Berseri	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
185	Dinas Pendidikan	KB Gin Kecil Indah	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
186	Dinas Pendidikan	KB Permata Mantang	15.600.000,00	15.300.000,00	98,08	(300.000,00)	0,00	0,00
187	Dinas Pendidikan	Pos Paud Mutiara	30.600.000,00	30.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
188	Dinas Pendidikan	Pos Paud Angrek	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
189	Dinas Pendidikan	TK Numbing Jaya	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
190	Dinas Pendidikan	KB Millatiasri	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
191	Dinas Pendidikan	Pos Paud Widuri	25.800.000,00	25.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
192	Dinas Pendidikan	TK SD Satu Atap SDN 002 Bintan Pesisir	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
193	Dinas Pendidikan	KB Sri Kemalai	15.600.000,00	11.700.000,00	75,00	(3.900.000,00)	0,00	0,00
194	Dinas Pendidikan	TK-SD Satu Atap SDN 008 Gunung Kijang	15.600.000,00	12.600.000,00	80,77	(3.000.000,00)	0,00	0,00
195	Dinas Pendidikan	KB Bintang Kejora	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
196	Dinas Pendidikan	KB Kasih Bunda	12.600.000,00	11.100.000,00	88,10	(1.500.000,00)	0,00	0,00
197	Dinas Pendidikan	KB Rosella	10.200.000,00	8.700.000,00	85,29	(1.500.000,00)	0,00	0,00
198	Dinas Pendidikan	SPS Sengkuang	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
199	Dinas Pendidikan	KB Sayang Ibu	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
200	Dinas Pendidikan	TK-SD Satu Atap SDN 003 Tambelan	37.800.000,00	37.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
201	Dinas Pendidikan	KB Permata Hati	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
202	Dinas Pendidikan	TK IT Alamanda	12.600.000,00	10.800.000,00	85,71	(1.800.000,00)	0,00	0,00
203	Dinas Pendidikan	TPA Bintan Sari	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
204	Dinas Pendidikan	Pos Paud Nala	28.800.000,00	27.300.000,00	94,79	(1.500.000,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
	Pendidikan							
205	Dinas Pendidikan	KB Sabda Bertuah	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
206	Dinas Pendidikan	KB Harapan Insan	9.600.000,00	9.000.000,00	93,75	(600.000,00)	0,00	0,00
207	Dinas Pendidikan	KB Asy-Syifa	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
208	Dinas Pendidikan	KB Intan Payung	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
209	Dinas Pendidikan	KB Kandil Bahar	22.800.000,00	22.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
210	Dinas Pendidikan	KB Sri Merak	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
211	Dinas Pendidikan	TK SD Satu Atap SDN 001 Mantang	17.400.000,00	14.400.000,00	82,76	(3.000.000,00)	0,00	0,00
212	Dinas Pendidikan	PKBM Harapan Insan (Paket B)	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
213	Dinas Pendidikan	PKBM Insan Cendikia (Paket B)	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
214	Dinas Pendidikan	PKBM Nilam Permata Bintan (Paket B)	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
215	Dinas Pendidikan	PKBM Bintang Sari (Paket B)	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
216	Dinas Pendidikan	PKBM Intan Payung (Paket B)	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
217	Dinas Pendidikan	PKBM Maju Lestari (Paket B)	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
218	Dinas Pendidikan	PKBM Persada Bahari (Paket B)	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
219	Dinas Pendidikan	Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Bintan (Paket B)	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
220	Dinas Pendidikan	PKBM Karang Bertuah (Paket B)	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
221	Dinas Pendidikan	PKBM Bestari (Paket B)	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
222	Dinas Pendidikan	PKBM Harapan Insan (Paket C)	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
223	Dinas Pendidikan	PKBM Persada Bahari (Paket C)	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
224	Dinas Pendidikan	PKBM Insan Cendikia (Paket C)	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
225	Dinas Pendidikan	PKBM Nilam Permata Bintan (Paket C)	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
226	Dinas Pendidikan	PKBM Bintang Sari (Paket C)	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
227	Dinas Pendidikan	PKBM Intan Payung (Paket C)	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
228	Dinas Pendidikan	PKBM Maju Lestari (Paket C)	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
229	Dinas Pendidikan	PKBM Bestari (Paket C)	28.900.000,00	28.900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
230	Dinas Pendidikan	Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Bintan (Paket C)	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
231	Dinas Pendidikan	PKBM Karang Bertuah (Paket C)	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
232	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Sri Rejeki (Bibit Kurma dan Pupuk Kandang)	54.073.839,00	48.676.750,00	90,02	(5.397.089,00)	0,00	0,00
233	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Flo Java (Bibit Kelapa Genjah)	45.000.000,00	44.250.000,00	98,33	(750.000,00)	0,00	0,00
234	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Beringin Jaya (Mashal 200 EC)	9.818.825,00	9.790.000,00	99,71	(28.825,00)	0,00	0,00
235	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Ronggo Lawe dan Kelompok Tani Harapan Jaya (Pupuk Urea)	50.490.000,00	50.439.510,00	99,90	(50.490,00)	0,00	0,00
236	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Wanita Tani Sumber Rejeki (Ayam Buras dan Pakan Ternak)	165.286.412,00	162.702.100,00	98,44	(2.584.312,00)	0,00	0,00
237	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Maju Bersama,KT. Tunas Indah, KT. Bina Mandiri, KT. Beringin Jaya, KT. Sido Makmur,KT. Suri Mandiri (Pupuk Kompos	139.999.831,00	131.180.797,00	93,70	(8.819.034,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
		dan Pupuk NPK)						
238	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	KWT Kusuma Jaya, KWT Melati Indah, KWT Al Ikhsar, KWT Selada (Bibit Benih)	121.121.656,00	119.296.716,00	98,49	(1.824.940,00)	0,00	0,00
239	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Utama II (Traktor Roda 4)	162.000.000,00	160.501.000,00	99,07	(1.499.000,00)	0,00	0,00
240	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Air Sembat, KT. Hulu Air, KT. Bangun Tirta, KT. Batu Belah, KT. Bintang Timur, KT. Berkat Tani, KT. Beringin, KT. Gunung Lancang, KT. Mekar Sari, KT. Harum Manis, KT. Tirta Bharu (Mesin Rumput 35 Unit)	87.863.518,00	86.047.500,00	97,93	(1.816.018,00)	0,00	0,00
241	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Maju Jaya (Sapi Jantan)	177.000.000,00	173.400.000,00	97,97	(3.600.000,00)	0,00	0,00
242	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Maju Jaya, KT. Pelita Jaya, KT. Tani Mandiri, KT. Tani Mandiri, KT. Ngadi Luhur, KT. Cahaya Tani, KT. Horti Sukses, KT. Mulia Sejahtera, KT. Unggul Jaya, KT. Maju Jaya, KT. Sumber Makmur, KT. Tunas Muda (Belanja Obat-Obatan)	66.808.500,00	62.150.000,00	93,03	(4.658.500,00)	0,00	0,00
243	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Berkah (Traktor)	1.069.200.000,00	1.024.996.500,00	95,87	(44.203.500,00)	0,00	0,00
244	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Flo Java (Pupuk dan Obat-Obatan)	129.579.725,00	127.183.650,00	98,15	(2.396.075,00)	0,00	0,00
245	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Flo Java (Benih Jagung)	66.000.000,00	60.720.000,00	92,00	(5.280.000,00)	0,00	0,00
246	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Utama II, KT. Maju Jaya, KT. Pelita Jaya, KT. Mandiri, KT. Ngudi Luhur, KT. Cahaya Tani, KT. Horti Sukses, KT. Mulia Sejahtera, KT. Unggul Jaya, KT. Maju Jaya, KT. Sumber Makmur, KT. Tunas Muda (Belanja Pupuk)	177.586.310,00	171.094.000,00	96,34	(6.492.310,00)	0,00	0,00
247	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Maju Bersama, KT. Harapan Jaya, KT. Ronggo Lawe, KT. Sari Makmur, KT. Berakit Jaya, KT. Kya Asrri, KT. Flo Java, KT. Mitra Tani, KT. Sido Makmur, KT. Mandiri (Belanja Pupuk NPK)	334.721.950,00	334.133.800,00	99,82	(588.150,00)	0,00	0,00
248	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Tunas Muda II (Kunyit dan Jahe Merah)	4.258.370,00	4.235.000,00	99,45	(23.370,00)	0,00	0,00
249	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kelompok Tani Sari Makmur dan KT. Sido Makmur (Hand Traktor)	81.818.182,00	61.712.800,00	75,43	(20.105.382,00)	0,00	0,00
250	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bibit Durian Tembaga	48.064.940,00	0,00	0,00	(48.064.940,00)	0,00	0,00
251	Dinas Sosial	Bantuan Untuk Kube	139.894.976,00	138.508.900,00	99,01	(1.386.076,00)	0,00	0,00
252	Dinas Sosial	Bantuan Kursi Roda	6.708.458,00	6.704.500,00	99,94	(3.958,00)	0,00	0,00
253	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Penangkap Ikan 3 GT Kayu untuk Nelayan Kabupaten Bintan	918.069.075	910.710.900,00	99,20	(7.358.175,00)	0,00	0,00
254	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Fiber 15 PK dilengkapi Alat Tangkap untuk Nelayan Kec. Seri Kuala Lobam	194.290.100	194.187.510,00	99,95	(102.590,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
255	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Fiber 3GT untuk Nelayan Desa Kelong Kec. Bintang Pesisir	189.050.240	186.882.960,00	98,85	(2.167.280,00)	0,00	0,00
256	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Fiber 1GT Mesin 7PK untuk Nelayan Kec. Bintang Timur	119.995.530,00	118.924.159,00	99,11	(1.071.371,00)	0,00	0,00
257	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Fiber 1GT beserta alat tangkap untuk Nelayan Desa Pangkil Kec. Teluk Bintang	69.297.100,00	68.903.263,00	99,43	(393.837,00)	0,00	0,00
258	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Fiber 1GT untuk Nelayan Desa Penghujan Kec. Teluk Bintang	159.341.280,00	158.615.028,00	99,54	(726.252,00)	0,00	0,00
259	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Fiber 1GT beserta alat tangkap untuk Nelayan Kec. Seri Kuala Lobam	61.338.200,00	61.105.754,00	99,62	(232.446,00)	0,00	0,00
260	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Fiber 1GT beserta alat tangkap untuk Nelayan Kec. Teluk Sebung	148.594.200,00	148.082.176,00	99,66	(512.024,00)	0,00	0,00
261	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Fiber 1GT beserta alat penangkap untuk Nelayan Kec. Teluk Sebung	171.600.000,00	171.517.500,00	99,95	(82.500,00)	0,00	0,00
262	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Ikan utk Nelayan Desa Kelong Kec. Bintang Pesisir	186.000.000,00	185.367.600,00	99,66	(632.400,00)	0,00	0,00
263	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Fiber 40PK beserta alat tangkap untuk Nelayan Kec. Bintang Timur	193.646.821,00	193.054.400,00	99,69	(592.421,00)	0,00	0,00
264	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Kayu 1GT untuk Nelayan Desa Penghujan Kec. Teluk Bintang	194.416.590,00	194.334.800,00	99,96	(81.790,00)	0,00	0,00
265	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor 1GT untuk Nelayan Kec. Teluk Sebung	194.479.950,00	194.312.800,00	99,91	(167.150,00)	0,00	0,00
266	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Kayu 2GT beserta alat tangkap utk Nelayan Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang	109.956.520,00	109.511.600,00	99,60	(444.920,00)	0,00	0,00
267	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Penangkap Ikan 3GT Kayu utk Nelayan Kec. Tambelan	194.000.000,00	193.610.120,00	99,80	(389.880,00)	0,00	0,00
268	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Penangkap Ikan 3GT utk Nelayan Kel. Teluk Sekuni	190.000.000,00	189.370.720,00	99,67	(629.280,00)	0,00	0,00
269	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Penangkap Ikan 3GT utk Nelayan Kab. Bintang	197.000.000,00	195.553.600,00	99,27	(1.446.400,00)	0,00	0,00
270	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Tempel Fiber 15PK untuk Nelayan Kab. Binta	79.998.200,00	79.594.020,00	99,49	(404.180,00)	0,00	0,00
271	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Tempel Kayu 15HP untuk Nelayan Desa Pangkil Kec. Teluk Bintang	190.205.175,00	189.535.500,00	99,65	(669.675,00)	0,00	0,00
272	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Tempel Mesin 40 PK untuk Nelayan Kec. Gunung Kijang	99.500.016,00	99.125.400,00	99,62	(374.616,00)	0,00	0,00
273	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Penangkap Ikan 3GT Kayu utk Nelayan Kab. Bintang	190.000.000,00	189.588.960,00	99,78	(411.040,00)	0,00	0,00
274	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Penangkap Ikan 3GT	197.000.000,00	196.698.920,00	99,85	(301.080,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
		Kayu utk Nelayan Desa Hilir Kec. Tambelan						
275	Dinas Perikanan	Pengadaan Kelong Apung untuk Nelayan Desa Malang Rapat Kabupaten Bintan	188.938.700,00	187.916.828,00	99,46	(1.021.872,00)	0,00	0,00
276	Dinas Perikanan	Pengadaan Sarana Pendukung Fiber Box Kapasitas 400 Kg untuk Nelayan Kabupaten Bintan	98.997.580,00	98.807.390,00	99,81	(190.190,00)	0,00	0,00
277	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Jaring Udang untuk Nelayan Kec. Seri Kuala Lobam	99.000.250,00	98.348.454,00	99,34	(651.796,00)	0,00	0,00
278	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Ikan Bubu Rajungan Oval+Tali PE untuk Nelayan Kab. Bintan	97.500.000,00	97.061.250,00	99,55	(438.750,00)	0,00	0,00
279	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Ikan Bubu Rajungan Oval Tali PE untuk Nelayan Kab. Bintan	63.000.000,00	62.716.500,00	99,55	(283.500,00)	0,00	0,00
280	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Ikan untuk Nelayan Kec. Teluk Bintan	191.071.600,00	190.206.500,00	99,55	(865.100,00)	0,00	0,00
281	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Ikan untuk Nelayan Pulau Ladi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan	75.998.080,00	75.645.000,00	99,54	(353.080,00)	0,00	0,00
282	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Jaring Karang utk Nelayan Kec. Tambelan	49.999.000,00	49.863.000,00	99,73	(136.000,00)	0,00	0,00
283	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Ikan/Udang Lengkap Untuk Nelayan Kab. Bintan	188.979.520,00	187.924.660,00	99,44	(1.054.860,00)	0,00	0,00
284	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Jaring Udang lengkap utk Nelayan Desa Pangkil Kec. Teluk Bintan	96.250.450,00	95.717.000,00	99,45	(533.450,00)	0,00	0,00
285	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Jaring Udang tidak lengkap utk Nelayan Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam	40.000.000,00	39.916.800,00	99,79	(83.200,00)	0,00	0,00
286	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Jaring Udang utk Nelayan Kelurahan Tembeling Tanjung	75.998.080,00	75.589.000,00	99,46	(409.080,00)	0,00	0,00
287	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Tangkap Jaring Udang dan Jaring Karang utk Nelayan Kab. Bintan	97.884.800,00	97.482.000,00	99,59	(402.800,00)	0,00	0,00
288	Dinas Perikanan	Pengadaan Bahan Jaring Ikan Teri (Bilis) untuk Nelayan Desa Pangkil	149.940.000,00	149.429.000,00	99,66	(511.000,00)	0,00	0,00
289	Dinas Perikanan	Pengadaan Bahan Jaring Selangit tidak lengkap utk Nelayan Kab. Bintan	101.250.000,00	101.017.125,00	99,77	(232.875,00)	0,00	0,00
290	Dinas Perikanan	Pengadaan Bahan Jaring Udang tidak lengkap utk Nelayan Kec. Teluk Bintan	37.500.000,00	37.422.000,00	99,79	(78.000,00)	0,00	0,00
291	Dinas Perikanan	Pengadaan Bahan Jaring Udang tidak lengkap utk Nelayan Desa Pangkil	80.000.000,00	79.376.000,00	99,22	(624.000,00)	0,00	0,00
292	Dinas Perikanan	Pengadaan Bahan Kawat Bubu Ikan untuk Nelayan Kec. Seri Kuala Lobam	30.000.000,00	29.997.000,00	99,99	(3.000,00)	0,00	0,00
293	Dinas Perikanan	Pengadaan Bahan Kawat Bubu untuk Nelayan Kec. Bintan Timur	180.000.000,00	179.388.000,00	99,66	(612.000,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
294	Dinas Perikanan	Pengadaan bahan kelengkapan Rumpon Ikan utk Nelayan Kec. Mantang	99.961.500,00	99.090.200,00	99,13	(871.300,00)	0,00	0,00
295	Dinas Perikanan	Pengadaan Radio Pantai (Marine) untuk Nelayan Kabupaten Bintan	120.000.000,00	119.816.400,00	99,85	(183.600,00)	0,00	0,00
296	Dinas Perikanan	Pengadaan Sarana Pendukung GPS untuk Nelayan Kabupaten Bintan	154.000.000,00	153.621.600,00	99,75	(378.400,00)	0,00	0,00
297	Dinas Perikanan	Pengadaan Sarana Pendukung Satelit (Fush Finder) untuk Nelayan Kab. Bintan	144.000.000,00	143.220.000,00	99,46	(780.000,00)	0,00	0,00
298	Dinas Perikanan	Pengadaan Alat Penangkap Ikan untuk Nelayan Kec. Gunung Kijang dan Kec. Bintan Timur	144.310.760,00	144.310.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
299	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Motor Fiber 40 PK utk Nelayan Kec. Binta Pesisir	99.500.016,00	98.765.873,00	99,26	(734.143,00)	0,00	0,00
300	Dinas Perikanan	Pembuatan Kapal Penangkap Ikan Fiber kurang dari 5 GT beserta Alat Penangkap Ikan di Kabupaten Bintan (DAK)	1.771.559.997,00	1.695.214.925,00	95,69	(76.345.072,00)	0,00	0,00
301	Dinas Perikanan	Pengadaan Pakan Ikan (Pelet) untuk Pokdakan di Kabupaten Bintan	727.650.000,00	712.565.700,00	97,93	(15.084.300,00)	0,00	0,00
302	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Lele, Nila dan Pakan Buatan (Pelet) utk Pokdakan Bintan Mina Sukses	49.975.000,00	49.975.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
303	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Lele dan Pakan Buatan (Pelet) untuk Pokdakan Dumbo Lengkuas	44.905.000,00	44.905.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
304	Dinas Perikanan	Pengadaan Kolam Bioflok Fullset, Benih Ikan Lele dan Pakan Buatan (Pelet) utk Pokdakan Wahana Tani	169.520.000,00	169.030.000,00	99,71	(490.000,00)	0,00	0,00
305	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Lele dan Pakan Buatan (Pelet) untuk Pokdakan Melati Sumber Rezeki	89.810.000,00	89.050.000,00	99,15	(760.000,00)	0,00	0,00
306	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Kerapu Cantang dan Pakan Buatan (Pelet) utk Pokdakan Cahaya Mantang	94.560.000,00	94.076.000,00	99,49	(484.000,00)	0,00	0,00
307	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Lele dan Pakan Buatan (Pelet) utk Pokdakan Sukses Bersama	44.905.000,00	44.905.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
308	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Lele dan Pakan Buatan (Pelet) utk Pokdakan Kawal Makmur	134.880.000,00	134.438.000,00	99,67	(442.000,00)	0,00	0,00
309	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Lele dan Pakan Buatan (Pelet) utk Pokdakan Pelita Baru Jaya	175.974.000,00	175.361.000,00	99,65	(613.000,00)	0,00	0,00
310	Dinas Perikanan	pengadaan Benih Ikan Kerapu Cantang utk Pokdakan Jembelang	179.910.000,00	179.177.000,00	99,59	(733.000,00)	0,00	0,00
311	Dinas Perikanan	pengadaan Benih Ikan Kerapu Cantang dan Pakan Buatan utk Pokdakan Kerapu Belang	99.660.000,00	99.252.000,00	99,59	(408.000,00)	0,00	0,00
312	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Bawal Air Tawar, Ikan Nila dan Pakan Buatan (pelet) utk Pokdakan Harapan Jaya	187.970.000,00	187.494.000,00	99,75	(476.000,00)	0,00	0,00
313	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Kerapu Cantang dan	94.560.000,00	94.172.000,00	99,59	(388.000,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
		Pakan Buatan (Pelet) utk Pokdakan Cahaya Kelong						
314	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Gurami dan Pakan Buatan (Pelet) utk Pokdakan Berkah	49.950.000,00	49.950.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
315	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Kerapu Cantang dan Pakan Buatan (Pelet) untuk Pokdakan Sumber Jaya	189.510.000,00	189.377.000,00	99,93	(133.000,00)	0,00	0,00
316	Dinas Perikanan	Pengadaan Keramba Ikan Air Tawar, Benih Ikan Nila, Benih Ikan Gurami dan Pakan Buatan (Pelet) utk Pokdakan Mina Sejahtera	76.010.000,00	75.628.000,00	99,50	(382.000,00)	0,00	0,00
317	Dinas Perikanan	Penataan Kolam utk Budidaya Ikan Air Tawar utk Pokdakan Harapan Jaya	187.000.000,00	185.929.700,00	99,43	(1.070.300,00)	0,00	0,00
318	Dinas Perikanan	Pembuatan Kolam Tanah utk Budidaya Ikan Air Tawar utk Pokdakan Sejahtera	165.000.000,00	164.339.938,00	99,60	(660.062,00)	0,00	0,00
319	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Lele dan Pakan Buatan (pelet) utk Pokdakan Sahabat Mandiri	187.810.000,00	187.236.000,00	99,69	(574.000,00)	0,00	0,00
320	Dinas Perikanan	Pengadaan Bak Fiber dan Atap Pendukung Unit Pembenhian Rakyat (UPR) utk Pokdakan Bintang Mina Sukses	179.300.000,00	179.000.000,00	99,83	(300.000,00)	0,00	0,00
321	Dinas Perikanan	Pembuatan Unit Pembenhian Rakyat (UPR) & Runah Jaga utk Pokdakan Aur Kuning	99.000.000,00	98.711.000,00	99,71	(289.000,00)	0,00	0,00
322	Dinas Perikanan	Pembuatan Kolam Beton Uk. 6mx9m utk Pokdakan Jaya Bersama	108.702.000,00	108.322.000,00	99,65	(380.000,00)	0,00	0,00
323	Dinas Perikanan	Pembuatan Unit Atap dan Bak Tandon Air utk Pokdakan Jaya Bersama	49.995.000,00	49.982.397,00	99,97	(12.603,00)	0,00	0,00
324	Dinas Perikanan	Pekerjaan Pengadaan Benih Ikan Kerapu Cantang dan Pakan Buatan (Pelet) untuk Pokdakan Kelana	39.780.000,00	39.780.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
325	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Kerapu Cantang dan Pakan Buatan (pelet) utk Pokdakan Usaha Mandiri	134.940.000,00	134.179.200,00	99,44	(760.800,00)	0,00	0,00
326	Dinas Perikanan	Pengadaan Unit Media Pemeliharaan Budidaya Kepiting Bangkang utk Pokdakan Bahari Serantau	94.600.000,00	94.166.172,00	99,54	(433.828,00)	0,00	0,00
327	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Lele, Benih Gurami dan Pakan Buatan (Pelet) utk Pokdakan Gurami Jaya	57.750.000,00	57.571.300,00	99,69	(178.700,00)	0,00	0,00
328	Dinas Perikanan	Pembuatan Hachery Skala Rumah Tangga (HSRT) utk Pokdakan Jaya Abadi	95.150.000,00	94.622.984,00	99,45	(527.016,00)	0,00	0,00
329	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Kepiting Bangkang dan Pakan Rucuh utk Pokdakan Bahari Serantau	133.000.000,00	132.601.000,00	99,70	(399.000,00)	0,00	0,00
330	Dinas Perikanan	Pengadaan Keramba Apung Air Tawar utk Pokdakan Kec. SKL & Binut	198.000.000,00	197.280.600,00	99,64	(719.400,00)	0,00	0,00
331	Dinas Perikanan	Pengadaan Kolam Bioflok utk Pokdakan Kecamatan Toapaya	185.000.000,00	182.754.000,00	98,79	(2.246.000,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
332	Dinas Perikanan	Pengadaan Benih Ikan Air Tawar utk Pokdakan Kec. SKL, Binut dan Kec. Toapaya	174.050.000,00	173.435.000,00	99,65	(615.000,00)	0,00	0,00
333	Dinas Perikanan	Pengadaan Pakan Ikan Air Tawar utk Pokdakan Kec. SKL, Binut dan Kec. Toapaya	197.400.000,00	196.802.000,00	99,70	(598.000,00)	0,00	0,00
334	Dinas Perikanan	Paket Budidaya Ikan Gurami dikolam	165.000.000,00	164.496.000,00	99,69	(504.000,00)	0,00	0,00
335	Dinas Perikanan	Paket Budidaya Ikan Hias	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
336	Dinas Perikanan	Paket Budaya Ikan Lele dikolam	220.000.000,00	211.990.000,00	96,36	(8.010.000,00)	0,00	0,00
337	Dinas Perikanan	Paket Budidaya Ikan Nila dikolam	55.000.000,00	54.367.500,00	98,85	(632.500,00)	0,00	0,00
338	Kec. Bintan Timur	Surau Pintu Hidayah	30.000.000,00	29.975.000,00	99,92	(25.000,00)	0,00	0,00
339	Kec. Bintan Timur	Tenda Kerucut dan Plafon 5x5 Kelurahan Sungai Lekop	45.917.971,00	45.870.000,00	99,90	(47.971,00)	0,00	0,00
340	Kec. Bintan Timur	Tenda Kerucut dan Plafon 5x5 Kel. Gunung Lengkuas	45.917.971,00	45.914.000,00	99,99	(3.971,00)	0,00	0,00
341	Kec. Bintan Timur	Mesjid Nurul Huda	70.000.000,00	69.960.000,00	99,94	(40.000,00)	0,00	0,00
342	Kec. Bintan Timur	Tenda Kerucut dan Plafon 5x5 Kel. Gunung Lengkuas	160.712.899,00	160.429.500,00	99,82	(283.399,00)	0,00	0,00
343	Kec. Bintan Timur	Rumah Hidroponik	80.000.000,00	0,00	0,00	(80.000.000,00)		0,00
344	Kec. Bintan Utara	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan - Pengadaan Alat Kebersihan (Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Uban Timur) Tahun Anggaran 2021	45.000.000,00	44.990.000,00	99,98	(10.000,00)	0,00	0,00
345	Kec. Bintan Utara	Mesin Potong Rumput Gendong	20.539.524,00	20.532.600,00	99,97	(6.924,00)	0,00	0,00
346	Kec. Bintan Utara	Kursi Plastik Kelurahan Tanjung Uban	45.000.000,00	44.946.000,00	99,88	(54.000,00)	0,00	0,00
347	Kec. Bintan Utara	Belanja Hibah Tenda Kerucut (5m x 5m) Kelurahan Tanjung Uban	125.230.830,00	125.070.000,00	99,87	(160.830,00)	0,00	0,00
348	Kec. Bintan Utara	Kursi Plastik	74.750.000,00	72.358.000,00	96,80	(2.392.000,00)	0,00	0,00
349	Kec. Bintan Utara	TPQ Madalwa	60.000.000,00	59.125.000,00	98,54	(875.000,00)	0,00	0,00
350	Kec. Bintan Utara	Sanggar Sang Nila Utama	200.000.000,00	197.868.000,00	98,93	(2.132.000,00)	0,00	0,00
351	Kec. Bintan Utara	Sanggar Minang Serumpun	50.000.000,00	48.338.400,00	96,68	(1.661.600,00)	0,00	0,00
352	Kec. Gunung Kijang	Sanggar Seni Krida Budaya Kecamatan Gunung Kijang	16.500.000,00	16.437.300,00	99,62	(62.700,00)	0,00	0,00
353	Kec. Gunung Kijang	Karang Taruna Kecamatan Gunung Kijang	16.914.784,00	16.904.800,00	99,94	(9.984,00)	0,00	0,00
354	Kec. Gunung Kijang	Gereja Pantekosta Kecamatan Gunung Kijang	16.500.000,00	16.483.500,00	99,90	(16.500,00)	0,00	0,00
355	Kec. Gunung Kijang	Karang Taruna Kelurahan Kawal	7.526.483,00	7.525.760,00	99,99	(723,00)	0,00	0,00
Jumlah			33.678.365.095,00	32.590.188.930,00	96,77	(1.088.173.233,00)	0,00	0,00

Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2021 sebesar Rp32.590.188.930,00 atau sebesar 96,77% dari anggaran sebesar Rp33.678.365.095,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp32.590.188.930,00 atau 0,00%.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 7.5.45 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Koperasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dinas koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan	Koperasi Usaha Karya Sejahtera	230.000.000,00	221.200.000,00	96,17	(8.800.000,00)	0,00	0,00
Jumlah			230.000.000,00	221.200.000,00	96,17	(8.800.000,00)	0,00	0,00

Belanja Hibah Kepada Koperasi TA 2021 sebesar Rp221.200.000,00 atau sebesar 96,17% dari anggaran sebesar Rp230.000.000,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp221.200.000,00 atau 0,00%.

Tabel 7.5.46 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Polres Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000.000,00	(100,00)
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Hibah Kepada KPU Kab. Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080.451.454,00	(100,00)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Hibah Kepada Bawaslu Kab. Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000.000,00	(100,00)
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Hibah Kepada KODIM	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	(100,00)
Jumlah			0,00	0,00	0,00	0,00	27.130.451.454,00	(100,00)

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2021 sebesar Rp0,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp27.130.451.454,00 atau 100,00%.

Tabel 7.5.47 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Perusahaan Swasta Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	CV. MADU TIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.009.483,00	(100,00)
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. ALAM INDAH BINTAN / NIRWANA GARDENS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.517.735,00	(100,00)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. ALAM INDAH GEMILANG	0,00	0,00	0,00	0,00	400.071.006,00	(100,00)
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. BALI HOLIDAY VILLAGE CLUB MED BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712.697.902,00	(100,00)
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. BBH INVESTMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.899.745,00	(100,00)
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. BINTAN BHADRA BERJAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	43.383.459,00	(100,00)
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. BINTAN HOTEL / ANGSANA BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.154.293,00	(100,00)
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. BINTAN HOTEL / BANYAN TREE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.813.616,00	(100,00)
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. BINTAN HOTEL UTAMA CANOPI	0,00	0,00	0,00	0,00	979.709.688,00	(100,00)
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. BINTAN HOTEL UTAMA NATRA	0,00	0,00	0,00	0,00	144.586.533,00	(100,00)
11	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. BINTAN PUTRA BERJAYA (HOOK ON)	0,00	0,00	0,00	0,00	33.885.688,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. BINTAN PUTRA BERJAYA (TEE OFF)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.543.373,00	(100,00)
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. BINTAN VISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241.901.798,00	(100,00)
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. BIZNAZ HOTEL AND LEISURE (DOULOS PHOS THE SHIP HOTEL)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.756.598,00	(100,00)
15	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. BUKIT BINTAN RAYA DE BINTAN VILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	74.936.021,00	(100,00)
16	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. BUKIT BINTAN RAYA DE BINTAN VILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	31.773.568,00	(100,00)
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. CASSIA RESORTS INVESTMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	698.858.516,00	(100,00)
18	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. FORDATE ESTATE VILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	397.897.132,00	(100,00)
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. GALANG BATANG INDAH	0,00	0,00	0,00	0,00	71.298.168,00	(100,00)
20	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. INDOBINTAN TRIJAYA WHITE SAND ISLAND	0,00	0,00	0,00	0,00	10.327.248,00	(100,00)
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. LAGOI BINTAN PASIFIK (LAGOI BAY VILLAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	122.711.744,00	(100,00)
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. MARJOLY MUTIARA BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	6.679.939,00	(100,00)
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. MUTIARA BINTAN DISCOVERY	0,00	0,00	0,00	0,00	63.019.597,00	(100,00)
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. PULAU CEMPEDAK	0,00	0,00	0,00	0,00	765.323.838,00	(100,00)
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. PULAU NIKOI	0,00	0,00	0,00	0,00	838.939.973,00	(100,00)
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. RIAU ISLAND DEVELOPMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	120.782.383,00	(100,00)
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. SEBUNG BATU BERDAUN / BINTAN SAYANG RESORT	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122.923,00	(100,00)
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. SPA VILLA WISATA BAHARI BINTAN SPA VILLA BEACH RESORT	0,00	0,00	0,00	0,00	134.753.874,00	(100,00)
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. TAMAN INDAH (HOLIDAY VILLA PANTAI INDAH)	0,00	0,00	0,00	0,00	459.860.781,00	(100,00)
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PT. TRIKORA BEACH RESORT	0,00	0,00	0,00	0,00	129.844.476,00	(100,00)
31	Badan Keuangan dan Aset Daerah	WISMA RAHMAT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.883,00	(100,00)
32	Badan Keuangan dan Aset Daerah	WISMA SARI BINTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144.832,00	(100,00)
Jumlah			0,00	0,00		0,00	18.719.590.813,00	(100,00)

Belanja Hibah Kepada Perusahaan Swasta TA 2021 sebesar Rp0,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp18.719.590.813,00 atau 100,00%.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

**Tabel 7.5.48 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Organisasi
 Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KONI/ Persatuan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	(100,00)
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Hibah Pramuka Kab. Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	796.678.000,00	(100,00)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tanjungpinang-Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	32.990.000,00	(100,00)
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Toapaya	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	(100,00)
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Panti Asuhan Miftahul Hasannah	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	(100,00)
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	(100,00)
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	(100,00)
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kab.Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	(100,00)
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kab.Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	(100,00)
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PMI Kabupaten Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	(100,00)
11	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Perkumpulan Sanggar Seni Budaya Minang Serumpun	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	(100,00)
Jumlah			0,00	0,00	0,00	0,00	3.064.668.000,00	(100,00)

Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan TA 2021 sebesar Rp0,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.064.668.000,00 atau 100,00%.

**Tabel 7.5.49 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Yayasan/Lembaga/Organisasi
 Keagamaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	LPTQ Kab. Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00	(100,00)
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	BAZNAS Kab. Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	(100,00)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ikatan Pelajar Muslim Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	(100,00)
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PC NU Kab. Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000.000,00	(100,00)
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Surau Nurul Haqq	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	(100,00)
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Masjid Jami' Al Hidayah	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	(100,00)
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	151.200.000,00	(100,00)
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Yayasan Al Idris Kepri	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	(100,00)
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kab.Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	(100,00)
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Masjid Al Ashr'i	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	(100,00)
11	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Masjid Besar Nurul Iman	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	(100,00)
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Madrasah Ibtidaiyah Sabilul	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
		Muhtadin						
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Mesjid Al Kautsar	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	(100,00)
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pesantren Madani Tebu ireng	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	(100,00)
15	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Mesjid Al Syuran	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	(100,00)
16	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Musholla As Salam	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	(100,00)
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Masjid Al Isro	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	(100,00)
18	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TPQ Nurul Iman	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	(100,00)
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Masjid Nurul Iman	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	(100,00)
Jumlah			0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.200.000,00	(100,00)

Belanja Hibah Kepada Yayasan/Lembaga/Organisasi TA 2021 sebesar R0,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp4.200.200.000,00 atau 100,00%.

Tabel 7.5.50 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOP PAUD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Permata Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00	(100,00)
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Terumbu Karang	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	(100,00)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Sinar Bahagia	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	(100,00)
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Gracia	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800.000,00	(100,00)
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Kids Club	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600.000,00	(100,00)
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Amalya	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800.000,00	(100,00)
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Hang Tuah	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800.000,00	(100,00)
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK YKPP	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800.000,00	(100,00)
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Fransiskus	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	(100,00)
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Puji	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00	(100,00)
11	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Nusantara	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	(100,00)
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Surya Kebenaran	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	(100,00)
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Ceria Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00	(100,00)
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Angkasa	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00	(100,00)
15	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Eden Ceria	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00	(100,00)
16	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Paud Nusa Indah	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800.000,00	(100,00)
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Paud Nusa Indah I	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	(100,00)
18	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Paud Nusa Indah II	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	(100,00)
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Paud Nusa Indah III	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	(100,00)
20	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Paud Nusa Indah IV	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	(100,00)
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Tunas Bentan	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	(100,00)
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Seruni	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	(100,00)
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Al Hikmah	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	(100,00)
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Paud Kenanga	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
	dan Aset Daerah							
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Harapan Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	(100,00)
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Al Fathul Ilmi	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	(100,00)
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Nurul Istiqomah	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(100,00)
28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Petra Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	(100,00)
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Ananda	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	(100,00)
30	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Tunas Sahabat	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	(100,00)
31	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Nurul Amin	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	(100,00)
32	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Al Furqon	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800.000,00	(100,00)
33	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Tiara	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	(100,00)
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Al Jannatun Naim	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	(100,00)
35	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Bina Cahaya	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	(100,00)
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Ar Riyadhushsholihin	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	(100,00)
37	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Buah Hati	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(100,00)
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pos PAUD Seri Melati	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00	(100,00)
39	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Al Hasanah I	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	(100,00)
40	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Cahaya Hati	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(100,00)
41	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Gita Ceria	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	(100,00)
42	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Nilam Permata Bintan I	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	(100,00)
43	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Cinta Nusantara	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	(100,00)
44	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Cahaya Indah	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	(100,00)
45	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Kasih Bunda	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	(100,00)
46	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Bhakti Awlya	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	(100,00)
47	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Teratai	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00	(100,00)
48	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Mutiara Qur'ani	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	(100,00)
49	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Intan Cahaya	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	(100,00)
50	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SPS Permata Bunda	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	(100,00)
51	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PAUD Mutiara Hati	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00	(100,00)
52	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Lentera Hati	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	(100,00)
53	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Cahaya Numbing	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	(100,00)
54	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PAUD Ananda	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00	(100,00)
55	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PAUD Mutiara Bunda	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00	(100,00)
56	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PAUD Langgeng	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	(100,00)
57	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PAUD Bina Sejahtera	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	(100,00)
58	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SPS Berseri	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	(100,00)
59	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Pelita Hati	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	(100,00)
60	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Adinda Mandiri	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(100,00)
61	Badan Keuangan	Pos Paud Air Glubi	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
	dan Aset Daerah	Indah						
62	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Tunas Muda	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	(100,00)
63	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Kandil Bahar	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400.000,00	(100,00)
64	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Tut Wuri Handayani	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	(100,00)
65	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Nurul 'Ain	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	(100,00)
66	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Al Hasanah II	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	(100,00)
67	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Angrek Ladi	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200.000,00	(100,00)
68	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Annida	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	(100,00)
69	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Ar Raudhah	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	(100,00)
70	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB FATiharah	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	(100,00)
71	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB IT Kids Club Center 2	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	(100,00)
72	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Kasih	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	(100,00)
73	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Kasih Ibu	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	(100,00)
74	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Kasih Sayang	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(100,00)
75	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Kemala Sari	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	(100,00)
76	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Kids Club Center 1	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(100,00)
77	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Malin Indah	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	(100,00)
78	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Mandiri	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	(100,00)
79	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Mawar Asri	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	(100,00)
80	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB RA Kartini	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00	(100,00)
81	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Mutiara	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	(100,00)
82	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Permata Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(100,00)
83	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Cendikia Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	(100,00)
84	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Permata Ibu	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	(100,00)
85	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Putra Putri Ceria	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	(100,00)
86	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Qurrota'ayun	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	(100,00)
87	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Sengkuang	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00	(100,00)
88	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Tenggiri	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	(100,00)
89	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Tirta Dharma	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	(100,00)
90	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB YKPP	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	(100,00)
91	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Paud Bukit Timah	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	(100,00)
92	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Paud Terpadu Alamanda	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	(100,00)
93	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pos Paud Anggur	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	(100,00)
94	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Al Amin	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400.000,00	(100,00)
95	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pos Paud Galang Batang	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	(100,00)
96	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pos Paud Harapan bunda	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	(100,00)
97	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pos Paud Kencana	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	(100,00)
98	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pos Paud Lestari	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
	dan Aset Daerah							
99	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pos Paud Melati Indah	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	(100,00)
100	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pos Paud Telaga Surya	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	(100,00)
101	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pos Paud Tunas Harapan	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	(100,00)
102	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SPS Camar	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	(100,00)
103	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SPS Lengkuas Indah	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	(100,00)
104	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SPS Mutiara Ibu	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00	(100,00)
105	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Antam Kijang	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800.000,00	(100,00)
106	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Arlica	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	(100,00)
107	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Muhammadiyah 1	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	(100,00)
108	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Fastabiqul Khairat	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	(100,00)
109	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Pedesaan Gunung Kijang	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	(100,00)
110	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Tunas Bangsa	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400.000,00	(100,00)
111	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Tunas Muda	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	(100,00)
112	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Muhammadiyah 2	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800.000,00	(100,00)
113	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pos Paud Tunas Harapan	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	(100,00)
114	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Janur Bina Maju	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	(100,00)
115	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pos Paud Sri Kemuning	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	(100,00)
116	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Nurul Iman	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	(100,00)
117	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SPS Kemala Kasih	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	(100,00)
118	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Surya Kemenangan	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	(100,00)
119	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Nusantara	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	(100,00)
120	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TKIA 42 Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	(100,00)
121	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Bhakti Awlya	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	(100,00)
122	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Killah	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	(100,00)
123	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Cipta Insantama	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(100,00)
124	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	(100,00)
125	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Yuliana	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00	(100,00)
126	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Padi Mas	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	(100,00)
127	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK SD Satu Atap SDN 001 Teluk Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	(100,00)
128	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Mandiri	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00	(100,00)
129	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Tirta Eka Pertiwi	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00	(100,00)
130	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Terumbu Karang	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	(100,00)
131	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Eden Ceria	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	(100,00)
132	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Satu Atap SDN 007 Teluk Sebong	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00	(100,00)
133	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Tadika Berseri	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	(100,00)
134	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Gin Kecil Indah	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
135	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Permata Mantang	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	(100,00)
136	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pos Paud Mutiara	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000,00	(100,00)
137	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pos Paud Angrek	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	(100,00)
138	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK Numbing Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	(100,00)
139	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Millatiasri	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	(100,00)
140	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pos Paud Widuri	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00	(100,00)
141	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK SD Satu Atap SDN 002 Bintang Pesisir	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	(100,00)
142	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Sri Kemalai	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	(100,00)
143	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK-SD Satu Atap SDN 008 Gunung Kijang	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	(100,00)
144	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Bintang Kejora	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	(100,00)
145	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Kasih Bunda	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	(100,00)
146	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Rosella	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	(100,00)
147	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SPS Sengkuang	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00	(100,00)
148	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Sayang Ibu	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	(100,00)
149	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Mutiara Mantang	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	(100,00)
150	Badan Keuangan dan Aset Daerah	TK-SD Satu Atap SDN 003 Tambelan	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600.000,00	(100,00)
151	Badan Keuangan dan Aset Daerah	KB Permata Hati	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	(100,00)
Jumlah			0,00	0,00	0,00	0,00	2.802.600.000,00	(100,00)

Belanja Hibah Dana BOP PAUD TA 2021 sebesar R0,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp2.802.600.000,00 atau 100,00%.

Tabel 7.5.51 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah BOP Penyelenggara Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PKBM Harapan Insan (Paket B)	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	(100,00)
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PKBM Insan Cendikia (Paket B)	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500.000,00	(100,00)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PKBM Nilam Permata Bintang (Paket B)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	(100,00)
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PKBM Bintang Sari (Paket B)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00	(100,00)
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PKBM Intan Payung (Paket B)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	(100,00)
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PKBM Maju Lestari (Paket B)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000,00	(100,00)
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PKBM Persada Bahari (Paket B)	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	(100,00)
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Bintan (Paket B)	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	(100,00)
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PKBM Karang Bertuah (Paket B)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	(100,00)
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PKBM Harapan Insan (Paket C)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800.000,00	(100,00)
11	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PKBM Persada Bahari (Paket C)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	(100,00)
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PKBM Insan Cendikia (Paket C)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100.000,00	(100,00)
13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PKBM Nilam Permata	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
	dan Aset Daerah	Bintan (Paket C)						
14	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PKBM Bintang Sari (Paket C)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	(100,00)
15	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PKBM Intan Payung (Paket C)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400.000,00	(100,00)
16	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PKBM Maju Lestari (Paket C)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	(100,00)
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PKBM Bestari (Paket C)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	(100,00)
18	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Bintan (Paket C)	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600.000,00	(100,00)
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	PKBM Karang Bertuah (Paket C)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	(100,00)
Jumlah			0,00	0,00	0,00	0,00	627.700.000,00	(100,00)

Belanja Hibah BOP Penyelenggara Pendidikan TA 2021 sebesar R0,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp627.700.000,00 atau 100,00%.

Tabel 7.5.52 Anggaran dan Realisasi Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Ketua Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Bintan	164.711.701,00	164.711.701,00	100,00	0,00	164.711.701,00	0,00
2	Ketua Partai Demokrat (PD) Kabupaten Bintan	330.256.520,00	330.256.520,00	100,00	0,00	330.256.520,00	0,00
3	Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bintan	55.690.734,00	55.690.734,00	100,00	0,00	55.690.734,00	0,00
4	Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bintan	55.348.942,00	55.348.942,00	100,00	0,00	55.348.942,00	0,00
5	Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bintan	28.347.374,00	28.347.374,00	100,00	0,00	28.347.374,00	0,00
6	Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Bintan	24.801.282,00	24.801.282,00	100,00	0,00	24.801.282,00	0,00
7	Ketua Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kabupaten Bintan	88.225.060,00	88.225.060,00	100,00	0,00	88.225.060,00	0,00
Jumlah		747.381.613,00	747.381.613,00	100,00	0,00	747.381.613,00	0,00

Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2021 sebesar Rp747.381.613,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp747.381.613,00. Belanja tersebut tidak mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp747.381.613,00 atau 0,00%.

7.5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan bentuk pemberian bantuan keuangan kepada individu/keluarga dan masyarakat. Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.53 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Bantuan Sosial Kepada Individu/Keluarga	3.780.000.000,00	3.639.600.000,00	96,29	(140.400.000,00)	5.252.045.108,00	(30,70)
2	Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	278.880.000,00	(100,00)
Jumlah		4.080.000.000,00	3.939.600.000,00	96,56	(140.400.000,00)	5.530.925.108,00	(28,77)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Belanja Bantuan Sosial TA 2021 realisasi sebesar Rp3.939.600.000,00 atau sebesar 96,56% dari anggaran sebesar Rp4.080.000.000,00. Belanja tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.591.325.108,00 atau 28,77%.

Tabel 7.5.54 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Bantuan Sosial Tidak Terencana	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252.045.108,00	(100,00)
	- Belanja Bantuan Pengobatan Masyarakat tak mampu	0,00	0,00	0,00	0,00	272.317.906,00	(100,00)
	- Belanja Bantuan Uang Duka Bagi Masyarakat Kab. Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00	402.791.503,00	(100,00)
	- Belanja Bantuan Individu Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	33.685.699,00	(100,00)
	- Belanja Bantuan Mahasiswa Tidak Mampu	0,00	0,00	0,00	0,00	534.000.000,00	(100,00)
	- Belanja Bantuan Pembangun Rumah Swadaya (Pembanguna baru pengganti RTLH, Pembangunan Rumah baru (PB), Peningkatan Kualitas (PK) DAK Afimasi)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009.250.000,00	(100,00)
2	Bantuan Sosial Terencana	3.780.000.000,00	3.639.600.000,00	96,29	(140.400.000,00)	0,00	0,00
	- BLT Lansia	3.780.000.000,00	3.639.600.000,00	96,29	(140.400.000,00)	0,00	0,00
	Jumlah	3.780.000.000,00	3.639.600.000,00	96,29	(140.400.000,00)	5.252.045.108,00	(30,70)

Belanja Bansos kepada Individu dan/atau keluarga TA 2021 terealisasi sebesar Rp3.639.600,00 atau 96,29% dari anggaran sebesar Rp3.780.000.000,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.612.445.108,00 atau 30,70%.

Tabel 7.5.55 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Bantuan Sosial Panti Asuhan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Bantuan Sosial Kepada Anak Cacat (FKKDAC)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah TA 2021 terealisasi sebesar Rp300.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp300.000.000,00 atau 0,00%.

Tabel 7.5.56 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Bantuan Sosial Panti Asuhan	0,00	0,00	0,00	0,00	178.880.000,00	(100,00)
2	Bantuan Sosial Kepada Anak Cacat (FKKDAC)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	(100,00)
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	278.880.000,00	(100,00)

Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat TA 2021 sebesar R0,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yaitu sebesar Rp278.880.000,00 atau 100,00%.

7.5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.5.57 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Bantuan kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	69.943.558.560,00	(100,00)
2	Bantuan Dana Desa (APBN)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.163.570.000,00	(100,00)
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	109.107.128.560,00	(100,00)

Belanja Bantuan Keuangan TA 2021 sebesar R0,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yaitu sebesar Rp109.107.128.560,00 atau 100,00%. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pada Tahun 2021 Belanja Bantuan Keuangan merupakan bagian Belanja Transfer.

7.5.1.2.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dan Aset Lainnya. Anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.58 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Belanja Tanah	6.416.283.204,00	994.839.115,00	15,50	(5.421.444.089,00)	228.080.000,00	336,18
2	Belanja Peralatan dan Mesin	42.791.731.754,00	39.826.077.526,00	93,07	(2.965.654.228,00)	55.685.195.183,00	(28,48)
3	Belanja Gedung dan Bangunan	68.527.121.372,00	63.060.135.647,33	92,02	(5.466.985.724,67)	88.506.594.506,42	(28,75)
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	45.989.192.144,00	43.580.037.497,00	94,76	(2.409.154.647,00)	41.930.206.113,00	3,93
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.327.608.206,00	1.954.288.040,00	83,96	(373.320.166,00)	5.634.208.496,00	(65,31)
6	Belanja Aset Lainnya	3.000.000,00	2.970.000,00	99,00	(30.000,00)	99.979.000,00	(97,03)
Jumlah		166.054.936.680,00	149.418.347.825,33	89,98	(16.636.588.854,67)	192.084.263.298,42	(22,21)

Realisasi Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp149.418.347.825,33 atau 89,98% dari anggaran sebesar Rp166.054.936.680,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp42.665.915.473,09 atau 22,21%.

7.5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. . Anggaran dan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.59 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.000.000.000,00	994.839.115,00	99,48	(5.160.885,00)	0,00	0,00
2	Sekretariat Daerah	5.416.283.204,00	0,00	0,00	(5.416.283.204,00)	228.080.000,00	(100,00)
Jumlah		6.416.283.204,00	994.839.115,00	15,50	(5.421.444.089,00)	228.080.000,00	336,18



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 sebesar Rp994.839.115,00 atau 15,50% dari anggaran sebesar Rp6.416.283.204,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp766.759.115,00 atau 336,18%. Terdapat belanja modal tanah pada tahun 2021, yang merupakan pekerjaan Penyiapan lahan untuk gedung kantor pemerintah, adapun lokasi yang dimaksud berada pada pusat pemerintahan ibukota kabupaten Bintan Desa Bintan Buyu. Rencananya akan dibangun 10 gedung kantor pemerintah, namun karena kondisi eksisting lahannya yang berkontur maka diperlukan penyiapan lahan sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan. Adapun item pekerjaan penyiapan lahan antara lain adalah pembersihan lokasi dimana tanaman yang menutupi permukaan lahan dikupas/dibersihkan dengan menggunakan alat berat. Lalu untuk lahan yang berbukit dilakukan pemotongan tanah yang selanjutnya akan dilakukan penimbunan di area yang lebih rendah. Setelah itu dilakukan pemadatan dengan menggunakan alat berat. Proses penimbunan tanah tersebut dilakukan perlayer sehingga diperoleh kepadatan tanah yang sesuai dengan persyaratan. Jadi lahan yang awalnya memiliki perbedaan ketinggian (berkontur) akhirnya kondisinya berubah menjadi relatif rata sehingga lahan tersebut kedepannya dapat digunakan untuk pembangunan gedung kantor pemerintahan.

7.5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.60 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dinas Pendidikan	15.240.093.964,00	15.018.141.296,00	98,54	(221.952.668,00)	10.396.199.260,00	44,46
2	Dinas Kesehatan	18.023.807.116,00	15.889.751.010,00	88,16	(2.134.056.106,00)	30.983.729.674,00	(48,72)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	959.243.939,00	942.891.840,00	98,30	(16.352.099,00)	621.118.784,00	51,81
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	86.067.370,00	85.877.000,00	99,78	(190.370,00)	614.042.000,00	(86,01)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	313.349.694,00	309.748.400,00	98,85	(3.601.294,00)	251.541.400,00	23,14
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	41.200.000,00	41.085.000,00	99,72	(115.000,00)	68.912.000,00	(40,38)
7	Dinas Sosial	78.254.724,00	72.286.500,00	92,37	(5.968.224,00)	19.999.100,00	261,45
8	Dinas Tenaga Kerja	18.199.954,00	18.189.600,00	99,94	(10.354,00)	93.877.660,00	(80,62)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	289.650.025,00	276.331.920,00	95,40	(13.318.105,00)	1.066.494.100,00	(74,09)
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.839.434,00	2.570.000,00	90,51	(269.434,00)	49.533.000,00	(94,81)
11	Dinas Lingkungan Hidup	646.387.449,00	534.580.800,00	82,70	(111.806.649,00)	80.377.000,00	565,09
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	344.539.913,00	343.360.688,00	99,66	(1.179.225,00)	412.904.800,00	(16,84)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22.845.042,00	20.460.000,00	89,56	(2.385.042,00)	14.850.000,00	37,78
14	Dinas Perhubungan	637.196.452,00	634.305.650,00	99,55	(2.890.802,00)	19.998.000,00	3.071,85
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	222.816.400,00	221.551.000,00	99,43	(1.265.400,00)	121.856.350,00	81,81
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	65.031.858,00	65.000.000,00	99,95	(31.858,00)	255.647.600,00	(74,57)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	215.787.000,00	(100,00)



No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
	Satu Pintu						
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	86.562.565,00	84.095.000,00	97,15	(2.467.565,00)	14.800.500,00	468,19
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	101.332.069,00	93.225.000,00	92,00	(8.107.069,00)	38.115.000,00	144,59
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	302.282.169,00	298.650.000,00	98,80	(3.632.169,00)	71.613.000,00	317,03
21	Dinas Perikanan	273.400.000,00	272.454.420,00	99,65	(945.580,00)	128.447.000,00	112,11
22	Sekretariat Daerah	198.009.519,00	192.130.500,00	97,03	(5.879.019,00)	1.986.899.475,00	(90,33)
23	Inspektorat Daerah	71.888.568,00	20.519.400,00	28,54	(51.369.168,00)	37.400.000,00	(45,14)
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	90.000.000,00	89.958.000,00	99,95	(42.000,00)	347.244.700,00	(74,09)
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.025.281.632,00	987.746.700,00	96,34	(37.534.932,00)	3.840.760.500,00	(74,28)
26	Badan Pendapatan Daerah	373.397.457,00	360.495.000,00	96,54	(12.902.457,00)	123.035.000,00	193,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52.500.000,00	52.481.000,00	99,96	(19.000,00)	66.550.000,00	(21,14)
28	Sekretariat DPRD	961.689.839,00	942.575.400,00	98,01	(19.114.439,00)	1.236.160.000,00	(23,75)
29	Kecamatan Bintan Utara	581.551.134,00	524.411.066,00	90,17	(57.140.068,00)	207.251.000,00	153,03
30	Kecamatan Bintan Pesisir	120.942.766,00	113.270.000,00	93,66	(7.672.766,00)	0,00	100,00
31	Kecamatan Tambelan	9.220.457,00	3.720.456,00	40,35	(5.500.001,00)	208.015.500,00	(98,21)
32	Kecamatan Mantang	370.293.228,00	317.896.700,00	85,85	(52.396.528,00)	84.590.000,00	275,81
33	Kecamatan Toapaya	161.778.079,00	100.137.000,00	61,90	(61.641.079,00)	158.400.000,00	(36,78)
34	Kecamatan Teluk Sebong	208.729.772,00	208.310.180,00	99,80	(419.592,00)	252.862.500,00	(17,62)
35	Kecamatan Teluk Bintan	475.961.508,00	470.112.500,00	98,77	(5.849.008,00)	76.363.200,00	515,63
36	Kecamatan Gunung Kijang	10.010.000,00	10.010.000,00	100,00	0,00	536.362.200,00	(98,13)
37	Kecamatan Bintan Timur	105.220.847,00	104.626.000,00	99,43	(594.847,00)	659.905.200,00	(84,15)
38	Kecamatan Seri Kuala Loban	166.857.563,00	49.888.000,00	29,90	(116.969.563,00)	195.015.700,00	(74,42)
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	53.299.248,00	53.234.500,00	99,88	(64.748,00)	128.536.980,00	(58,58)
	Jumlah	42.791.731.754,00	39.826.077.526,00	93,07	(2.965.654.228,00)	55.685.195.183,00	(28,48)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp39.826.077.526,00 atau 93,07% dari anggaran sebesar Rp42.791.731.754,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp15.859.117.657,00 atau 28,48%.

Realisasi Belanja Modal tersebut termasuk didalamnya Belanja Modal BLUD RSUD sebesar Rp1.160.059.091,00, Belanja Modal PPK-BLUD Puskesmas sebesar Rp.248.559.000,00, Belanja Modal dari penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas non BLUD sebesar Rp522.634.867,00 dan Belanja Modal dari penggunaan Dana BOS SD dan SMP sebesar Rp7.840.143.782,00.

7.5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.61 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dinas Pendidikan	32.299.702.012,00	29.183.650.652,00	90,35	(3.116.051.360,00)	31.186.645.623,00	(6,42)
2	Dinas Kesehatan	12.061.178.479,00	11.573.826.963,00	95,96	(487.351.516,00)	19.977.607.055,00	(42,07)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.186.847.200,00	8.163.255.080,00	99,71	(23.592.120,00)	14.937.987.995,00	(45,35)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.743.290.000,00	3.275.209.599,00	87,50	(468.080.401,00)	16.313.695.220,00	(79,92)
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	678.410.530,00	604.060.345,00	89,04	(74.350.185,00)	0,00	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	755.000.002,00	707.481.712,33	93,71	(47.518.289,67)	0,00	0,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	199.465.000,00	199.017.500,00	99,78	(447.500,00)	0,00	0,00
8	Dinas Perhubungan	7.340.468.018,00	6.844.477.840,00	93,24	(495.990.178,00)	2.643.325.551,00	158,93
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998.500,00	(100,00)
10	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	653743007	591.470.095,00	90,47	(62.272.912,00)	0,00	0,00
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	98.224.019,00	97.053.000,00	98,81	(1.171.019,00)	645.280.661,00	(84,96)
12	Sekretariat Daerah	130.000.000,00	0,00	0,00	(130.000.000,00)	198.825.000,00	(100,00)
13	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	228.840.000,00	(100,00)
14	Sekretariat DPRD	263.366.400,00	261.804.440,00	99,41	(1.561.960,00)	0,00	0,00
15	Kecamatan Bintan Utara	720.240.000,00	370.084.000,00	51,38	(350.156.000,00)	625.400.000,00	(40,82)
16	Kecamatan Tambelan	53.778.546,00	0,00	0,00	(53.778.546,00)	55.407.000,00	(100,00)
17	Kecamatan Toapaya	190.000.000,00	189.944.092,00	99,97	(55.908,00)	340.013.848,00	(44,14)
18	Kecamatan Teluk Sebong	107.000.000,00	0,00	0,00	(107.000.000,00)	74.643.754,00	(100,00)
19	Kecamatan Teluk Bintan	75.000.000,00	74.822.000,00	99,76	(178.000,00)	246.709.000,00	(69,67)
20	Kecamatan Gunung Kijang	0,00	0,00	0,00	0,00	84.773.000,00	(100,00)
21	Kecamatan Bintan Timur	946.792.000,00	899.395.529,00	94,99	(47.396.471,00)	507.563.559,42	77,20
22	Kecamatan Seri Kuala Lobam	24.616.159,00	24.582.800,00	99,86	(33.359,00)	424.878.740,00	(94,21)
	Jumlah	68.527.121.372,00	63.060.135.647,33	92,02	(5.466.985.724,67)	88.506.594.506,42	(28,75)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp63.060.135.647,33 atau 92,02% dari anggaran sebesar Rp68.527.121.372,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp25.446.458.859,09 atau 28,75%.

Realisasi Belanja Modal tersebut termasuk didalamnya Belanja Modal BLUD RSUD sebesar Rp295.074.962,00, Belanja Modal PPK-BLUD Puskesmas Teluk Sasah sebesar Rp16.885.000,00.

7.5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.62 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dinas Pendidikan	51.968.162,00	51.905.894,00	99,88	(62.268,00)	45.264.001,00	14,67
2	Dinas Kesehatan	60.500.000,00	49.995.000,00	82,64	(10.505.000,00)	3.251.742.388,00	(98,46)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.885.047.550,00	25.513.797.733,00	94,90	(1.371.249.817,00)	15.338.360.079,00	66,34
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	13.609.448.928,00	13.503.035.500,00	99,22	(106.413.428,00)	15.652.542.517,00	(13,73)



No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
5	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	14.993.000,00	(100,00)
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820.110,00	(100,00)
7	Dinas Lingkungan Hidup	55.660.000,00	54.837.750,00	98,52	(822.250,00)	0,00	0,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	(100,00)
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	77.000.000,00	76.395.000,00	99,21	(605.000,00)	344.615.839,00	(77,83)
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah	198.000.000,00	197.450.000,00	99,72	(550.000,00)	0,00	0,00
11	Sekretariat DPRD	99.999.900,00	99.100.000,00	99,10	(899.900,00)	92.345.000,00	7,31
12	Kecamatan Bintan Utara	1.594.760.000,00	1.284.558.000,00	80,55	(310.202.000,00)	2.621.421.300,00	(51,00)
13	Kecamatan Tambelan	141.334.182,00	0,00	0,00	(141.334.182,00)	550.264.772,00	(100,00)
14	Kecamatan Toapaya	540.000.000,00	464.847.885,00	86,08	(75.152.115,00)	299.977.610,00	54,96
15	Kecamatan Teluk Sebong	795.999.600,00	780.285.520,00	98,03	(15.714.080,00)	59.576.000,00	1.209,73
16	Kecamatan Teluk Bintan	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	0,00	391.109.740,00	(53,98)
17	Kecamatan Gunung Kijang	0,00	0,00	0,00	0,00	517.682.937,00	(100,00)
18	Kecamatan Bintan Timur	1.699.473.822,00	1.323.829.215,00	77,90	(375.644.607,00)	1.476.054.320,00	(10,31)
19	Kecamatan Seri Kuala Lobam	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.536.500,00	(100,00)
Jumlah		45.989.192.144,00	43.580.037.497,00	94,76	(2.409.154.647,00)	41.930.206.113,00	3,93

Realisasi Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2021 sebesar Rp43.580.037.497,00 atau 94,76% dari anggaran sebesar Rp45.989.192.144,00. Belanja tersebut meningkat dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.649.831.384,00 atau 3,93%.

7.5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, bukubuku, dan jurnal ilmiah Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.63 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dinas Pendidikan	1.797.311.787,00	1.702.897.040,00	94,75	(94.414.747,00)	5.542.756.696,00	(69,28)
2	Dinas Kesehatan	98.180.000,00	53.600.000,00	54,59	(44.580.000,00)	3.550.800,00	1.409,52
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	340.000.000,00	183.535.000,00	53,98	(156.465.000,00)	0,00	0,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.400.000,00	0,00	0,00	(14.400.000,00)	0,00	0,00
5	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	87.901.000,00	(100,00)
6	Kecamatan Tambelan	14.285.500,00	14.256.000,00	99,79	(29.500,00)	0,00	0,00
7	Kecamatan Bintan Timur	22.221.303,00	0,00	0,00	(22.221.303,00)	0,00	0,00
8	Kecamatan Seri Kuala Lobam	41.209.616,00	0,00	0,00	(41.209.616,00)	0,00	0,00
Jumlah		2.327.608.206,00	1.954.288.040,00	83,96	(373.320.166,00)	5.634.208.496,00	(65,31)



Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 sebesar Rp1.954.288.040,00 atau 83,96% dari anggaran sebesar Rp2.327.608.206,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp3.679.920.456,00 atau 65,31%.

Realisasi Belanja Modal tersebut termasuk didalamnya Belanja Modal PPK-BLUD Puskesmas Teluk Sasah sebesar Rp9.600.000,00 dan Belanja Modal dari penggunaan Dana BOS SD dan SMP sebesar Rp1.575.097.040,00.

7.5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja modal aset lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan terhadap Aplikasi berbentuk Software. Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.64 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Dinas Kesehatan	3.000.000,00	2.970.000,00	99,00	(30.000,00)	0,00	0,00
2	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	99.979.000,00	(100,00)
Jumlah		3.000.000,00	2.970.000,00	99,00	(30.000,00)	99.979.000,00	(97,03)

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2021 sebesar Rp2.970.000,00 atau 99,00% dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp97.009.000,0 atau 97,03%. Realisasi Belanja Modal TA 2021 tersebut merupakan belanja modal pada Puskesmas Teluk Sasah.

**Tabel 7.5.65 Jaminan Pemeliharaan Kegiatan Fisik
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	OPD	Jaminan Pemeliharaan 2021 (Rp)	Jaminan Pemeliharaan 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.571.413.177,50	746.067.259,65
2	Dinas Kesehatan	512.850.329,85	850.340.030,80
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	1.180.590.275,61	1.671.808.031,61
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.648.478.304,00	1.436.620.934,77
5	Dinas Perhubungan	290.686.619,00	102.761.097,00
6	Dinas Pariwisata	0,00	40.260.464,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	19.420.686,00	0,00
Jumlah		5.223.439.391,96	4.847.857.817,83

Jumlah nilai retensi Jaminan Pemeliharaan kegiatan fisik TA. 2021 yang bersumber dari belanja modal terdapat pada enam SKPD pada TA 2021 sebesar Rp5.223.439.391,96. Nilai tersebut meningkat dibandingkan dengan TA. 2020 sebesar Rp375.581.574,13 dari realisasi 2020 sebesar Rp4.847.857.817,83.

7.5.1.2.3 BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.66 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Belanja Tidak Terduga	10.189.062.247,00	5.674.118.343,00	55,69	(4.514.943.904,00)	68.340.725.092,00	(91,70)
	Jumlah	10.189.062.247,00	5.674.118.343,00	55,69	(4.514.943.904,00)	68.340.725.092,00	(91,70)

Adapun rincian belanja tidak terduga per OPD Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 7.5.67 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	10.189.062.247,00	5.674.118.343,00	55,69	(4.514.943.904,00)	1.575.000.000,00	260,26
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.430.063,00	(100,00)
3	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	13.299.079.289,00	(100,00)
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	551.607.740,00	(100,00)
5	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	51.309.608.000,00	(100,00)
	Jumlah	10.189.062.247,00	5.674.118.343,00	55,69	(4.514.943.904,00)	68.340.725.092,00	(91,70)

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2021 sebesar Rp5.674.118.343,00 atau 55,69% dari anggaran sebesar Rp10.189.062.247,00. Belanja tersebut menurun dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp62.66.606.749,00 atau 91,70%.

Pada Tahun 2021 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah namun pengelolaan belanja tersebut dilaksanakan oleh BKAD, BPBD dan Dinas Sosial. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA. 2021 antara lain pengembalian kelebihan dana hibah pariwisata Tahun 2020 sebesar Rp2.513.352.941,00, pengembalian atas kesalahan penyeteroran jasa giro Pemerintah kota Tanjungpinang sebesar Rp206.949.497,00, penanganan Covid-19 dan korban bencana alam dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp2.294.732.835,00 serta bantuan pengobatan masyarakat tidak mampu dan bantuan musibah meninggal dunia dikelola oleh Dinas Sosial sebesar Rp659.083.070,00.

7.5.1.2.4 BELANJA TRANSFER

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Anggaran dan realisasi Belanja Transfer TA 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.68 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Belanja Bagi Hasil – LRA	15.285.366.000,00	15.285.365.800,00	100,00	(200,00)	0,00	0,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota Daerah Provinsi – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa – LRA	93.517.892.700,00	92.996.547.466,00	99,44	(521.345.234,00)	0,00	0,00
	Jumlah	108.803.258.700,00	108.281.913.266,00	99,52	(521.345.434,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Transfer TA 2021 sebesar Rp108.803.258.700,00 terealisasi sebesar Rp108.281.913.266,00 atau 99,52%.

7.5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil - LRA

Anggaran dan realisasi Belanja Bagi Hasil - LRA TA 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.69 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil - LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Belanja Bagi Hasil Pajak – LRA	14.428.578.500,00	14.428.578.300,00	100,00	(200,00)	0,00	0,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi - LRA	856.787.500,00	856.787.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	15.285.366.000,00	15.285.365.800,00	100,00	(200,00)	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bagi Hasil TA 2021 sebesar Rp15.285.366.000,00 terealisasi sebesar Rp15.285.365.800,00 atau 100,00%.

7.5.1.2.2.1.1 Belanja Bagi Hasil Pajak – LRA

Anggaran dan realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak per Desa TA 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.5.70 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Per Desa - LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Gunung Kijang	Gunung Kijang	469.884.000,00	469.884.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Gunung Kijang	Malang Rapat	464.722.000,00	464.722.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Gunung Kijang	Teluk Bakau	482.147.000,00	482.147.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Bintan Utara	Lancang Kuning	375.363.000,00	375.363.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Teluk Bintan	Bintan Buyu	450.774.000,00	450.774.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Teluk Bintan	Pangkil	385.591.000,00	385.591.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Teluk Bintan	Penaga	415.680.000,00	415.680.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Teluk Bintan	Pengujan	379.273.000,00	379.273.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	Teluk Bintan	Tembeling	420.496.000,00	420.496.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Tambelan	Batu Lepuk	281.273.000,00	281.273.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Tambelan	Kampung Hilir	349.562.000,00	349.562.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Tambelan	Kampung Melayu	284.990.000,00	284.990.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Tambelan	Pulau Mentebung	263.819.000,00	263.819.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Tambelan	Pulau Pinang	262.562.000,00	262.562.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Tambelan	Kukup	263.593.000,00	263.593.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Tambelan	Pengikk	261.677.000,00	261.677.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Telok Sebong	Berakit	428.028.000,00	428.028.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Telok Sebong	Ekan Aculai	485.560.000,00	485.560.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Telok Sebong	Pengudang	396.806.000,00	396.806.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Telok Sebong	Sebong Lagoi	535.787.000,00	535.787.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Telok Sebong	Sebong Pereh	503.286.000,00	503.286.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Telok Sebong	Sri Bintan	518.033.000,00	518.033.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Toapaya	Toapaya	404.893.000,00	404.893.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
24	Toapaya	Toapaya Utara	462.558.000,00	462.558.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	Toapaya	Toapaya Selatan	470.648.000,00	470.648.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Mantang	Mantang Baru	389.416.000,00	389.416.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	Mantang	Mantang Besar	432.016.000,00	432.016.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Mantang	Mantang Lama	281.061.000,00	281.061.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	Mantang	Dendun	343.425.000,00	343.425.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	Bintan Pesisir	Kelong	430.454.000,00	430.454.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	Bintan Pesisir	Mapur	316.005.000,00	316.005.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Bintan Pesisir	Numbing	481.731.000,00	481.731.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	Bintan Pesisir	Air Gelubi	366.076.000,00	366.075.800,00	100,00	200,00	0,00	0,00
34	Seri Kuala Lobam	Busung	413.875.000,00	413.875.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35	Seri Kuala Lobam	Teluk Sasah	517.964.000,00	517.964.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	Seri Kuala Lobam	Kuala Sempang	439.550.500,00	439.550.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			14.428.578.500,00	14.428.578.300,00	100,00	200,00	0,00	0,00

7.5.1.2.2.1.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi – LRA

Anggaran dan realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi per Desa TA 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.5.71 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Per Desa - LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Gunung Kijang	Gunung Kijang	26.978.000,00	26.978.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Gunung Kijang	Malang Rapat	26.716.000,00	26.716.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Gunung Kijang	Teluk Bakau	28.008.000,00	28.008.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Bintan Utara	Lancang Kuning	21.159.000,00	21.159.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Teluk Bintan	Bintan Buyu	27.129.000,00	27.129.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Teluk Bintan	Pangkil	21.615.000,00	21.615.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Teluk Bintan	Penaga	23.410.000,00	23.410.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Teluk Bintan	Pengujan	21.234.000,00	21.234.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	Teluk Bintan	Tembeling	21.905.000,00	21.905.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Tambelan	Batu Lepuk	16.980.000,00	16.980.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Tambelan	Kampung Hilir	28.105.000,00	28.105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Tambelan	Kampung Melayu	17.076.000,00	17.076.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Tambelan	Pulau Mentebung	15.785.000,00	15.785.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Tambelan	Pulau Pinang	15.737.000,00	15.737.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Tambelan	Kukup	17.211.000,00	17.211.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Tambelan	Pengikik	15.614.000,00	15.614.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Telok Sebong	Berakit	25.847.000,00	25.847.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Telok Sebong	Ekang Anculai	25.606.000,00	25.606.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Telok Sebong	Pengudang	23.925.000,00	23.925.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Telok Sebong	Sebong Lagoi	32.213.000,00	32.213.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
21	Telok Sebong	Sebong Perek	30.113.000,00	30.113.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	Telok Sebong	Sri Bintan	31.541.000,00	31.541.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Toapaya	Toapaya	24.289.000,00	24.289.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Toapaya	Toapaya Utara	24.240.000,00	24.240.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	Toapaya	Toapaya Selatan	28.245.000,00	28.245.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Mantang	Mantang Baru	21.446.000,00	21.446.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	Mantang	Mantang Besar	26.007.000,00	26.007.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Mantang	Mantang Lama	16.962.000,00	16.962.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	Mantang	Dendun	20.670.000,00	20.670.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	Bintan Pesisir	Kelong	25.980.000,00	25.980.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	Bintan Pesisir	Mapur	19.088.000,00	19.088.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Bintan Pesisir	Numbing	31.890.000,00	31.890.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	Bintan Pesisir	Air Gelubi	21.797.000,00	21.797.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	Seri Kuala Lobam	Busung	24.719.000,00	24.719.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
35	Seri Kuala Lobam	Teluk Sasah	31.052.000,00	31.052.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	Seri Kuala Lobam	Kuala Sempang	26.495.500,00	26.495.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			856.787.500,00	856.787.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

7.5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan - LRA

Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2021 adalah sebagai berikut

Tabel 7.5.72 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - LRA Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/(Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - LRA	93.517.892.700,00	92.996.547.466,00	99,44	(521.345.234,00)	0,00	0,00
Jumlah		93.517.892.700,00	92.996.547.466,00	99,44	(521.345.234,00)	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2021 sebesar Rp93.517.892.700,00 terealisasi sebesar Rp92.996.547.466,00 atau 99,44%.

7.5.1.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal antara lain dari pinjaman dan hasil divestasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bintan meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Anggaran dan realisasi Pembiayaan TA 2021 adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 7.5.73 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Penerimaan Pembiayaan	149.088.793.369,68	149.093.793.369,68	100,00	5.000.000,00	206.172.453.684,47	(27,69)
2	Pengeluaran Pembiayaan	(1.600.000.000,00)	(1.600.000.000,00)	100,00	0,00	(2.000.000.000,00)	(20,00)
	Jumlah	147.488.793.369,68	147.493.793.369,68	100,00	5.000.000,00	204.172.453.684,47	(27,76)

Tabel di atas menunjukkan Realisasi Pembiayaan *Netto* TA 2021 sebesar Rp147.493.793.369,68 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp147.488.793.369,68. Pembiayaan *Netto* menurun dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp56.678.660.314,79 atau 27,76%.

7.5.1.3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan daerah merupakan penerimaan yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA) tahun lalu. Anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.74 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Lebih/ (Kurang)	Realisasi 2020 (Rp)	Tren
1	Penggunaan SILPA Tahun lalu	149.088.793.369,68	149.088.793.369,68	100,00	0,00	206.170.203.684,47	(27,69)
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	0,00	0,00
3	Pengembalian Pokok Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	(100,00)
	Jumlah	149.088.793.369,68	149.093.793.369,68	100,00	5.000.000,00	206.172.453.684,47	(27,68)

Tabel di atas menunjukkan realisasi Penggunaan SILPA APBD Tahun 2021 sebesar Rp149.093.793.369,68 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp149.088.793.369,68 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp5.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2020 menurun sebesar Rp57.078.660.314,79 atau 27,68%.

7.5.1.3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pengeluaran yang penggunaannya antara lain untuk penyertaan modal daerah, pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah. Realisasi pengeluaran pembiayaan APBD Tahun 2021 merupakan Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada PD. BPR Bintan sebesar Rp1.600.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.600.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2020 menurun sebesar Rp400.000.000,00 atau 20,00%.

7.5.1.4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SILPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SILPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah. Dalam TA 2021 realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah sebesar Rp136.160.052.859,29 di jelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 7.5.75 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	APBD (Rp)	Dana Kapitasi (Rp)	BLUD (Rp)	Dana BOS (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Daerah	1.041.408.657.269,92	2.705.727.050,00	32.672.022.477,00	29.204.438.000,00	1.105.990.844.796,92



No	Uraian	APBD (Rp)	Dana Kapitasi (Rp)	BLUD (Rp)	Dana BOS (Rp)	Jumlah (Rp)
2	Belanja Daerah	1.057.770.710.051,33	2.744.285.909,00	25.866.426.197,00	30.943.163.149,98	1.117.324.585.307,31
3	Surplus (Defisit) : 1-2	(16.362.052.781,41)	(38.558.859,00)	6.805.596.280,00	(1.738.725.149,98)	(11.333.740.510,39)
4	Penerimaan Pembiayaan	149.088.793.369,68	0,00	5.000.000,00	0,00	149.093.793.369,68
5	Pengeluaran Pembiayaan	1.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00
6	Pembiayaan Netto : 4-5	147.488.793.369,68	0,00	5.000.000,00	0,00	147.493.793.369,68
	SILPA (SIKPA) : 3+6	131.126.740.588,27	(38.558.859,00)	6.810.596.280,00	(1.738.725.149,98)	136.160.052.859,29

Terdapat selisih antara nilai SiLPA Tahun 2021 pada LRA dan saldo akhir kas Tahun 2021 pada LAK sebesar Rp619.117.499,80. Selisih ini terjadi karena terdapat kelebihan setoran pajak non anggaran 0,20 dan penerimaan retribusi IMB dan IMTA yang harus disetorkan ke kas negara. Pemerintah Kabupaten Bintan belum menyetorkan Retribusi IMB sebesar Rp593.407.500,00 dan Retribusi IMTA sebesar Rp25.710.000,00 dengan total sebesar Rp619.117.500,00 ke kas negara sesuai dengan SE Mendagri Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggara Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

7.5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan-SAL adalah untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

Penjelasan atas pos-pos dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah sebagai berikut.

7.5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal Tahun 2021 sebesar Rp149.088.793.369,68.

7.5.2.2 PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2021 Penggunaan SAL tersebut yang merupakan Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp149.088.793.369,68.

7.5.2.3 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan, yaitu:

- Surplus/Defisit Anggaran (Rp11.333.740.510,39)
- Pembiayaan *Netto* Rp147.493.793.369,68
- SILPA Tahun berjalan Rp136.160.052.859,29

SiLPA Tahun 2021 sebesar Rp136.160.052.859,29 atau menurun sebesar 8.67% yaitu sebesar Rp12.928.740.510,39 dari Tahun 2020 sebesar Rp149.088.793.369,68.

**7.5.2.4 KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA**

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk Tahun 2021 tidak terdapat kesalahan koreksi pembukuan atas silpa tahun 2021.

7.5.2.5 KOREKSI PENAMBAHAN SALDO KAS PADA BLUD

Tidak terdapat Koreksi Penambahan saldo kas pada BLUD pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2020 terdapat Koreksi Penambahan Saldo Kas Pada BLUD yang terdapat pada Puskesmas Kawal sebesar Rp780.000,00.

7.5.2.6 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR

Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Akhir diperoleh dengan terlebih dahulu memperhitungkan Surplus/Defisit dan SiLPA/SiKPA. Surplus/Defisit tersebut diperoleh dari realisasi Pendapatan dikurangi realisasi Belanja selama 1 (satu) periode pelaporan.

SiLPA TA 2021 merupakan jumlah Kas Daerah per 31 Desember 2021 yang berada pada Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara BLUD, Dana BOS, Dana Kapitasi pada FKTP dan Kas Lainnya pada Bendahara Pengeluaran serta dikurangi Utang PFK pada Bendahara Umum Daerah yang belum disetor pada akhir TA 2021 dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp136.160.052.859,29. Saldo tersebut terdiri dari:

Tabel 7.5.76 Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)
1	Kas	
A	Kas di Kas Daerah	122.218.026.235,56
B	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
C	Kas di Bendahara Pengeluaran	983.581,00
D	Kas di Bendahara BLUD	12.940.786.698,47
E	Kas Dana BOS	1.619.373.844,06
Jumlah Kas		136.779.170.359,09
2	Utang	
A	Utang PFK BUD	619.117.500,00
Jumlah Utang		619.117.500,00
Jumlah (1 – 2)		136.160.052.859,09

Nilai SAL berdasarkan Neraca yaitu sebesar Rp136.160.052.859,09 sedangkan nilai SiLPA Tahun 2021 (LRA) sebesar Rp136.160.052.859,29. Terdapat selisih antara Nilai SiLPA Tahun 2021 (LRA) dan nilai SAL berdasarkan Neraca yaitu sebesar Rp0,20 (Rp136.160.052.859,29 - Rp136.160.052.859,09). Selisih tersebut merupakan kesalahan penyetoran PPh 21 atas belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum antara lain kekurangan setoran pajak PPh 21 atas SP2D Nomor 32.01/04.0/03790/SP2D/2021 sebesar Rp0,20 dan kelebihan setoran pajak PPh 21 atas SP2D Nomor 32.01/04.0/03793/SP2D/2021 sebesar Rp0,40.

**7.5.3 NERACA****7.5.3.1 ASET LANCAR**

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp220.698.353.270,71 terdiri dari Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan, dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 7.5.77 Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	%
Kas dan Setara Kas	136.783.533.519,09	149.088.793.369,68	(8,25)
Piutang	55.942.434.008,63	103.505.449.419,93	(45,95)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	198.029.873,19	(100,00)
Bagian Lancar TGR	0,00	46.402.407,81	(100,00)
Belanja Dibayar Dimuka	165.587.500,00	151.191.666,67	9,52
Persediaan	27.806.798.242,99	15.377.338.182,88	80,83
Jumlah	220.698.353.270,71	268.367.204.920,16	(17,76)

7.5.3.1.1 Kas dan Setara Kas

Pos ini menunjukkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), Bendahara FKTP Puskesmas Non BLUD, Bendahara BLUD RSUD, BLUD Dana Bergulir, BLUD Puskesmas, Bendahara pada OPD, serta Bendahara Dana BOS SD dan SMP baik berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank.

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp136.164.416.020,09 atau turun sebesar Rp12.305.259.850,59 atau 8,25% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp149.088.793.369,68 sebagai berikut.

Tabel 7.5.78 Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	%
1	Kas di Kas Daerah	122.218.026.235,56	123.600.348.361,17	(1,12)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	983.581,00	55.596,00	1.669,16
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	100.000,00	(100,00)
4	Kas di BLUD	12.940.786.698,47	6.130.190.418,47	111,10
5	Kas Dana BOS	1.619.373.844,06	0,00	0,00
6	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	4.363.160,00	3.358.098.994,04	(99,87)
7	Setara kas	0,00	16.000.000.000,00	(100,00)
	Jumlah	136.783.533.519,09	149.088.793.369,68	(8,25)

Adapun rincian saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020, dapat disajikan sebagai berikut.

**7.5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah**

Pos ini menunjukkan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp122.218.026.235,56 atau turun sebesar Rp1.382.322.125,61 atau 1,12% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp123.600.348.361,17 sebagai berikut.

Tabel 7.5.79 Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	%
a.	Rekening Kas Daerah			
	- Bank Riau Kepri No Rek. 135.02.01010	121.893.481.631,56	123.237.244.898,17	(1,09)
	Jumlah a	121.893.481.631,56	123.237.244.898,17	(1,09)
b.	Rekening Puskesmas Non BLUD			
	Berakit (BNI No. Rek. 0471361776)	28.044.189,00	26.934.071,00	4,12
	Toapaya (BNI No. Rek. 0469397752)	25.409.878,00	20.935.975,00	21,37
	Sei Lekop (BNI No. Rek. 0466657761)	43.389.731,00	65.322.272,00	(33,58)
	Kelong (BNI No. Rek. 0469795979)	3.734.307,00	41.031.917,00	(90,90)
	Teluk Bintan (BNI No. Rek. 046967507)	29.408.245,00	19.765.899,00	48,78
	Sri Bintan (BNI No. Rek. 0469458967)	33.687.847,00	45.477.904,00	(25,92)
	Tambelan (BNI No. Rek. 0476538366)	1.449.278,00	3.262.178,00	(55,57)
	Kuala Sempang (BNI No. Rek. 0469679667)	89.065.696,00	83.148.935,00	7,12
	Mantang (BNI No. Rek. 0466643453)	70.355.433,00	57.224.312,00	22,95
	Jumlah b	324.544.604,00	363.103.463,00	(10,62)
	Jumlah a+b	122.218.026.235,56	123.600.348.361,17	(1,12)

7.5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp983.581,00 atau naik sebesar Rp927.985,00 atau 1.669,16% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp55.596,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.80 Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	%
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	983.581,00	0,00	0,00
2	Kelurahan Kijang Kota	0,00	189,00	(100,00)
3	Kelurahan Sei Lekop	0,00	814,00	(100,00)
4	Kelurahan Tembeling Tanjung	0,00	53.604,00	(100,00)
5	Kelurahan Teluk Sekuni	0,00	889,00	(100,00)
6	Kelurahan Tanjung Uban Utara	0,00	100,00	(100,00)
	Jumlah	983.581,00	55.596,00	1.669,16

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2021 sebesar Rp983.581,00 merupakan kas di bendahara pengeluaran Badan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari sisa UP sebesar Rp754.481,00, pengembalian atas kelebihan tunjangan beban kerja sebesar Rp200.000,00 dan pengembalian pajak sebesar Rp29.100,00



7.5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp100.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.81 Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	%
Kas di Bendahara Penerima	0,00	100.000,00	(100,00)
Jumlah	0,00	100.000,00	(100,00)

7.5.3.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD

Saldo Kas BLUD adalah kas tunai dan di rekening giro bank yang berada pada BLUD Puskesmas, BLUD RSUD, dan BLUD Dana Bergulir per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.940.786.698,47 atau meningkat sebesar Rp6.810.596.280,00 atau sekitar 111,10% dari saldo kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.130.190.418,47 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.82 Kas di Bendahara BLUD pada Kas Tunai dan Rekening BLUD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	%
a. BLUD Puskesmas			
- Teluk Sebong (No. Rek. 146.20.00097 dan kas tunai)	57.405.452,00	252.070.407,00	(77,23)
- Kawal No. Rek. 0471363003	13.305.642,00	160.201.479,00	(91,69)
- Kijang No. Rek. 0469647342	81.990.897,00	272.069.761,00	(69,86)
- Tanjung Uban No. Rek. 146.20.00312	21.457.889,00	7.373.019,00	191,03
- Teluk Sasah No. Rek. 146.20.00313	35.565.555,00	39.036.985,00	(8,89)
Jumlah a	209.725.435,00	730.751.651,00	(71,30)
b. BLUD RSUD No. Rek. 135.20.00046	9.399.389.561,00	2.139.058.057,00	339,42
c. BLUD Dana Bergulir			
- Bank Riau Kepri No. Rek. 135.02.00013	3.029.088.528,47	2.969.895.854,47	1,99
- BPR Bintan No. Rek. 00101000408	302.583.174,00	290.484.856,00	4,16
Jumlah c	3.331.671.702,47	3.260.380.710,47	2,19
Jumlah a+b+c	12.940.786.698,47	6.130.190.418,47	111,10

Saldo Kas tunai pada Kas BLUD hanya sebesar Rp1.140.000,00 yang berada pada Puskesmas Teluk Sebong.

7.5.3.1.1.5 Kas Dana BOS

Saldo Kas Dana BOS termasuk di dalamnya saldo kas dana BOS yang berada pada SD Negeri dan SMP Negeri pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.619.373.844,06 atau menurun sebesar Rp1.738.725.149,98 atau sekitar 51,78% dari saldo kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.358.098.994,04 dengan rincian sebagai berikut. Tetapi untuk tahun 2020 penyajian saldo Kas Dana BOS terdapat pada Kas Lainnya.



Tabel 7.5.83 Kas Dana BOS Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	Saldo 31 Des 2020 (Rp)	%
I. SEKOLAH DASAR (SD)				
1	SD Negeri 001 Bintan Pesisir	15.345.867,36	0,00	0,00
2	SD Negeri 002 Bintan Pesisir	4.813.661,57	0,00	0,00
3	SD Negeri 003 Bintan Pesisir	8.940.531,22	0,00	0,00
4	SD Negeri 004 Bintan Pesisir	502.828,38	0,00	0,00
5	SD Negeri 005 Bintan Pesisir	2.739.709,51	0,00	0,00
6	SD Negeri 006 Bintan Pesisir	8.770.715,36	0,00	0,00
7	SD Negeri 002 Bintan Timur	913.102,01	0,00	0,00
8	SD Negeri 003 Bintan Timur	643.695,19	0,00	0,00
9	SD Negeri 006 Bintan Timur	55.459.257,29	0,00	0,00
10	SD Negeri 007 Bintan Timur	237.706,45	0,00	0,00
11	SD Negeri 008 Bintan Timur	4.292.812,21	0,00	0,00
12	SD Negeri 009 Bintan Timur	16.400.903,73	0,00	0,00
13	SD Negeri 010 Bintan Timur	1.957.338,47	0,00	0,00
14	SD Negeri 011 Bintan Timur	2.239.015,28	0,00	0,00
15	SD Negeri 012 Bintan Timur	875.232,35	0,00	0,00
16	SD Negeri 013 Bintan Timur	9.818.123,41	0,00	0,00
17	SD Negeri 014 Bintan Timur	506.366,56	0,00	0,00
18	SD Negeri 015 Bintan Timur	1.584.571,84	0,00	0,00
19	SD Negeri 016 Bintan Timur	162.072,39	0,00	0,00
20	SD Negeri 017 Bintan Timur	56.581.247,33	0,00	0,00
21	SD Negeri 018 Bintan Timur	122.267,16	0,00	0,00
22	SD Negeri 019 Bintan Timur	9.169.691,36	0,00	0,00
23	SD Negeri 001 Bintan Utara	2.980.316,93	0,00	0,00
24	SD Negeri 003 Bintan Utara	1.359.322,70	0,00	0,00
25	SD Negeri 004 Bintan Utara	14.133.060,63	0,00	0,00
26	SD Negeri 005 Bintan Utara	442.898,11	0,00	0,00
27	SD Negeri 006 Bintan Utara	22.122.955,17	0,00	0,00
28	SD Negeri 008 Bintan Utara	16.402.734,01	0,00	0,00
29	SD Negeri 009 Bintan Utara	13.161.558,45	0,00	0,00
30	SD Negeri 010 Bintan Utara	68,87	0,00	0,00
31	SD Negeri 001 Gunung Kijang	5.567.828,91	0,00	0,00
32	SD Negeri 002 Gunung Kijang	36.413.966,03	0,00	0,00
33	SD Negeri 003 Gunung Kijang	858.662,07	0,00	0,00
34	SD Negeri 004 Gunung Kijang	340.060,61	0,00	0,00
35	SD Negeri 005 Gunung Kijang	3.216.924,75	0,00	0,00
36	SD Negeri 006 Gunung Kijang	169.592,97	0,00	0,00
37	SD Negeri 007 Gunung Kijang	26.714.042,54	0,00	0,00
38	SD Negeri 008 Gunung Kijang	4.638.150,41	0,00	0,00
39	SD Negeri 009 Gunung Kijang	3.655.567,59	0,00	0,00
40	SD Negeri 001 Mantang	745.321,27	0,00	0,00
41	SD Negeri 002 Mantang	49.281,78	0,00	0,00
42	SD Negeri 003 Mantang	155.035,89	0,00	0,00
43	SD Negeri 004 Mantang	3.045.823,05	0,00	0,00
44	SD Negeri 001 Seri Kuala Lobam	12.778.397,71	0,00	0,00
45	SD Negeri 002 Seri Kuala Lobam	15.843.178,10	0,00	0,00
46	SD Negeri 003 Seri Kuala Lobam	12.065.616,76	0,00	0,00
47	SD Negeri 004 Seri Kuala Lobam	2.605.106,50	0,00	0,00
48	SD Negeri 005 Seri Kuala Lobam	1.735.714,11	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	Saldo 31 Des 2020 (Rp)	%
49	SD Negeri 006 Seri Kuala Lobam	48.683,72	0,00	0,00
50	SD Negeri 007 Seri Kuala Lobam	2.970.000,00	0,00	0,00
51	SD Negeri 001 Tambelan	93.337,15	0,00	0,00
52	SD Negeri 002 Tambelan	40.000,00	0,00	0,00
53	SD Negeri 003 Tambelan	353.464,06	0,00	0,00
54	SD Negeri 004 Tambelan	55.591,26	0,00	0,00
55	SD Negeri 005 Tambelan	1.092.488,71	0,00	0,00
56	SD Negeri 006 Tambelan	1.563.788,52	0,00	0,00
57	SD Negeri 007 Tambelan	626.468,88	0,00	0,00
58	SD Negeri 001 Teluk Sebong	7.902.006,52	0,00	0,00
59	SD Negeri 002 Teluk Sebong	10.217.600,54	0,00	0,00
60	SD Negeri 003 Teluk Sebong	1.537,84	0,00	0,00
61	SD Negeri 004 Teluk Sebong	2.940.155,50	0,00	0,00
62	SD Negeri 005 Teluk Sebong	2.773.048,00	0,00	0,00
63	SD Negeri 006 Teluk Sebong	1.800.000,12	0,00	0,00
64	SD Negeri 007 Teluk Sebong	7.049.364,33	0,00	0,00
65	SD Negeri 008 Teluk Sebong	14.798.428,38	0,00	0,00
66	SD Negeri 009 Teluk Sebong	689.367,37	0,00	0,00
67	SD Negeri 010 Teluk Sebong	222,07	0,00	0,00
68	SD Negeri 001 Teluk Bintan	2.116.255,99	0,00	0,00
69	SD Negeri 002 Teluk Bintan	448.506,79	0,00	0,00
70	SD Negeri 003 Teluk Bintan	2.531.010,49	0,00	0,00
71	SD Negeri 004 Teluk Bintan	1.396.674,72	0,00	0,00
72	SD Negeri 005 Teluk Bintan	1.179.300,00	0,00	0,00
73	SD Negeri 006 Teluk Bintan	6.150.826,39	0,00	0,00
74	SD Negeri 007 Teluk Bintan	58.177,00	0,00	0,00
75	SD Negeri 008 Teluk Bintan	2.222.832,59	0,00	0,00
76	SD Negeri 009 Teluk Bintan	5.505.396,32	0,00	0,00
77	SD Negeri 010 Teluk Bintan	602,65	0,00	0,00
78	SD Negeri 011 Teluk Bintan	2.381.589,80	0,00	0,00
79	SD Negeri 012 Teluk Bintan	2.883.826,85	0,00	0,00
80	SD Negeri 013 Teluk Bintan	1.921.000,00	0,00	0,00
81	SD Negeri 014 Teluk Bintan	479.624,56	0,00	0,00
82	SD Negeri 001 Toapaya	19.860.982,57	0,00	0,00
83	SD Negeri 002 Toapaya	33.756.879,52	0,00	0,00
84	SD Negeri 003 Toapaya	57.939,27	0,00	0,00
85	SD Negeri 004 Toapaya	29.523.221,06	0,00	0,00
86	SD Negeri 005 Toapaya	219.506,52	0,00	0,00
87	SD Negeri 006 Toapaya	1.864.612,15	0,00	0,00
Jumlah A		572.852.220,56	0,00	0,00
I. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)				
1	SMP Negeri 1 Bintan	62.720.330,82	0,00	0,00
2	SMP Negeri 2 Bintan	64.301.539,76	0,00	0,00
3	SMP Negeri 3 Bintan	37.892.190,70	0,00	0,00
4	SMP Negeri 4 Bintan	2.931.752,32	0,00	0,00
5	SMP Negeri 5 Bintan	135.958.977,53	0,00	0,00
6	SMP Negeri 6 Bintan	68.141.675,35	0,00	0,00
7	SMP Negeri 7 Bintan	63.565.885,22	0,00	0,00
8	SMP Negeri 8 Bintan	18.545.397,38	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	Saldo 31 Des 2020 (Rp)	%
9	SMP Negeri 9 Bintan	33.337.475,78	0,00	0,00
10	SMP Negeri 10 Bintan	2.974.395,78	0,00	0,00
11	SMP Negeri 11 Bintan	81.693.765,30	0,00	0,00
12	SMP Negeri 12 Bintan	92.372.636,80	0,00	0,00
13	SMP Negeri 13 Bintan	25.968.549,43	0,00	0,00
14	SMP Negeri 14 Bintan	14.106.553,82	0,00	0,00
15	SMP Negeri 15 Bintan	47.028.953,38	0,00	0,00
16	SMP Negeri 16 Bintan	5.837.259,01	0,00	0,00
17	SMP Negeri 17 Bintan	69.977.074,75	0,00	0,00
18	SMP Negeri 18 Bintan	98.550.626,91	0,00	0,00
19	SMP Negeri 19 Bintan	89.162.089,70	0,00	0,00
20	SMP Negeri 20 Satu Atap Pulau Pucung	906.677,68	0,00	0,00
21	SMP Negeri 21 Satu Atap Teluk Bintan	17.060,98	0,00	0,00
22	SMP Negeri 22 Satu Atap Mapur	1.017.325,26	0,00	0,00
23	SMP Negeri 23 Satu Atap Mantang	345.806,34	0,00	0,00
24	SMP Negeri 24 Bintan	16.790.801,58	0,00	0,00
25	SMP Negeri 25 Satu Atap Mantang	2.817.131,60	0,00	0,00
26	SMP Negeri 26 Bintan	4.533.890,70	0,00	0,00
27	SMP Negeri 27 Bintan	3.064.300,72	0,00	0,00
28	SMP Negeri 28 Bintan	1.961.498,90	0,00	0,00
	Jumlah B	1.046.521.623,50	0,00	0,00
	Total (A+B)	1.619.373.844,06	0,00	0,00

Kas Dana BOS yang berada pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.619.373.844,06 yang merupakan kas tunai dan kas di rekening giro Bank Riau Kepri yang berada pada SD dan SMP per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Kas tunai dan kas di rekening giro pada Bank Riau Kepri yang berada pada SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.84 Kas Dana BOS pada Kas Tunai dan Kas di Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	%
1.	SD (87 sekolah)	572.852.220,56	0,00	0,00
2.	SMP (28 sekolah)	1.046.521.623,50	0,00	0,00
	Jumlah	1.619.373.844,06	0,00	0,00

kas tunai yang berada pada SD dan SMP pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 7.5.85 Kas Dana BOS pada Kas Tunai Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

NO	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	%
1.	SD (87 sekolah)	12.961.267,11	0,00	0,00
2.	SMP (28 sekolah)	0,45	0,00	0,00
	Jumlah	12.961.267,56	0,00	0,00

kas di rekening giro pada Bank Riau yang berada pada SD dan SMP pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 7.5.86 Kas Dana BOS pada Kas di Rekening Giro
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

NO	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	%
1.	SD (87 sekolah)	559.890.953,45	0,00	0,00
2.	SMP (28 sekolah)	1.046.521.623,05	0,00	0,00
	Jumlah	1.606.412.576,50	0,00	0,00

7.5.3.1.1.6 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 merupakan saldo kas lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.363.160,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Tahun 2021 saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran merupakan potongan gaji yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran atas pinjaman pegawai antara lain arisan, pinjaman koperasi dan pinjaman bank, sedangkan untuk Tahun 2020 saldo kas lainnya merupakan saldo Kas Dana BOS. Saldo Kas Dana BOS Tahun 2021 direklas ke Kas Dana BOS sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 7.5.87 Kas Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	Saldo 31 Des 2020 (Rp)	%
I. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)				
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.363.160,00	0,00	0,00
	Jumlah A	4.363.160,00	0,00	0,00
II. SEKOLAH DASAR (SD)				
1	SD Negeri 001 Bintan Pesisir	0,00	114.034.437,36	(100,00)
2	SD Negeri 002 Bintan Pesisir	0,00	14.133.811,57	(100,00)
3	SD Negeri 003 Bintan Pesisir	0,00	19.700.231,22	(100,00)
4	SD Negeri 004 Bintan Pesisir	0,00	27.298.328,38	(100,00)
5	SD Negeri 005 Bintan Pesisir	0,00	7.976.609,51	(100,00)
6	SD Negeri 006 Bintan Pesisir	0,00	8.957.088,36	(100,00)
7	SD Negeri 002 Bintan Timur	0,00	7.715,01	(100,00)
8	SD Negeri 003 Bintan Timur	0,00	26.486.689,19	(100,00)
9	SD Negeri 006 Bintan Timur	0,00	61.220.723,29	(100,00)
10	SD Negeri 007 Bintan Timur	0,00	788.174,45	(100,00)
11	SD Negeri 008 Bintan Timur	0,00	18.429.312,21	(100,00)
12	SD Negeri 009 Bintan Timur	0,00	52.695.535,73	(100,00)
13	SD Negeri 010 Bintan Timur	0,00	25.400.676,47	(100,00)
14	SD Negeri 011 Bintan Timur	0,00	100.100.846,28	(100,00)
15	SD Negeri 012 Bintan Timur	0,00	5.395.232,35	(100,00)
16	SD Negeri 013 Bintan Timur	0,00	27.200.190,41	(100,00)
17	SD Negeri 014 Bintan Timur	0,00	1.379.266,56	(100,00)
18	SD Negeri 015 Bintan Timur	0,00	41.639.981,84	(100,00)
19	SD Negeri 016 Bintan Timur	0,00	3.473.772,39	(100,00)
20	SD Negeri 017 Bintan Timur	0,00	114.550.247,33	(100,00)
21	SD Negeri 018 Bintan Timur	0,00	4.960.267,16	(100,00)
22	SD Negeri 019 Bintan Timur	0,00	28.711.389,36	(100,00)
23	SD Negeri 001 Bintan Utara	0,00	33.295.584,93	(100,00)
24	SD Negeri 003 Bintan Utara	0,00	30.624.936,70	(100,00)
25	SD Negeri 004 Bintan Utara	0,00	14.733.717,63	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	Saldo 31 Des 2020 (Rp)	%
26	SD Negeri 005 Bintan Utara	0,00	12.930.752,11	(100,00)
27	SD Negeri 006 Bintan Utara	0,00	21.055.360,17	(100,00)
28	SD Negeri 008 Bintan Utara	0,00	24.529.808,01	(100,00)
29	SD Negeri 009 Bintan Utara	0,00	19.960.376,45	(100,00)
30	SD Negeri 010 Bintan Utara	0,00	13.783.968,87	(100,00)
31	SD Negeri 001 Gunung Kijang	0,00	3.922.292,91	(100,00)
32	SD Negeri 002 Gunung Kijang	0,00	25.532.259,03	(100,00)
33	SD Negeri 003 Gunung Kijang	0,00	5.416.245,07	(100,00)
34	SD Negeri 004 Gunung Kijang	0,00	11.694.560,61	(100,00)
35	SD Negeri 005 Gunung Kijang	0,00	120.324,75	(100,00)
36	SD Negeri 006 Gunung Kijang	0,00	1.828.556,97	(100,00)
37	SD Negeri 007 Gunung Kijang	0,00	50.837.237,54	(100,00)
38	SD Negeri 008 Gunung Kijang	0,00	13.476.100,41	(100,00)
39	SD Negeri 009 Gunung Kijang	0,00	9.428.430,59	(100,00)
40	SD Negeri 001 Mantang	0,00	19.401.121,27	(100,00)
41	SD Negeri 002 Mantang	0,00	6.065.581,78	(100,00)
42	SD Negeri 003 Mantang	0,00	6.225.035,89	(100,00)
43	SD Negeri 004 Mantang	0,00	282.323,05	(100,00)
44	SD Negeri 001 Seri Kuala Lobam	0,00	36.952.797,71	(100,00)
45	SD Negeri 002 Seri Kuala Lobam	0,00	10.156.958,10	(100,00)
46	SD Negeri 003 Seri Kuala Lobam	0,00	22.004.216,76	(100,00)
47	SD Negeri 004 Seri Kuala Lobam	0,00	144.606,50	(100,00)
48	SD Negeri 005 Seri Kuala Lobam	0,00	3.480.033,11	(100,00)
49	SD Negeri 006 Seri Kuala Lobam	0,00	15.686.683,72	(100,00)
50	SD Negeri 007 Seri Kuala Lobam	0,00	10.556.079,96	(100,00)
51	SD Negeri 001 Tambelan	0,00	113.337,15	(100,00)
52	SD Negeri 002 Tambelan	0,00	939.239,17	(100,00)
53	SD Negeri 003 Tambelan	0,00	4.643.294,06	(100,00)
54	SD Negeri 004 Tambelan	0,00	5.310.591,26	(100,00)
55	SD Negeri 005 Tambelan	0,00	10.227.838,71	(100,00)
56	SD Negeri 006 Tambelan	0,00	10.425.388,52	(100,00)
57	SD Negeri 007 Tambelan	0,00	8.381.568,88	(100,00)
58	SD Negeri 001 Teluk Sebong	0,00	5.252.706,52	(100,00)
59	SD Negeri 002 Teluk Sebong	0,00	49.554.876,54	(100,00)
60	SD Negeri 003 Teluk Sebong	0,00	1.024.407,84	(100,00)
61	SD Negeri 004 Teluk Sebong	0,00	36.788.755,50	(100,00)
62	SD Negeri 005 Teluk Sebong	0,00	8.283.148,00	(100,00)
63	SD Negeri 006 Teluk Sebong	0,00	858.600,12	(100,00)
64	SD Negeri 007 Teluk Sebong	0,00	50.117.364,33	(100,00)
65	SD Negeri 008 Teluk Sebong	0,00	56.228.368,38	(100,00)
66	SD Negeri 009 Teluk Sebong	0,00	585.767,37	(100,00)
67	SD Negeri 010 Teluk Sebong	0,00	6.815.222,07	(100,00)
68	SD Negeri 001 Teluk Bintan	0,00	3.190.875,99	(100,00)
69	SD Negeri 002 Teluk Bintan	0,00	539.506,79	(100,00)
70	SD Negeri 003 Teluk Bintan	0,00	6.485.510,49	(100,00)
71	SD Negeri 004 Teluk Bintan	0,00	1.717.174,72	(100,00)
72	SD Negeri 005 Teluk Bintan	0,00	14.166.578,13	(100,00)
73	SD Negeri 006 Teluk Bintan	0,00	7.572.026,39	(100,00)
74	SD Negeri 007 Teluk Bintan	0,00	4.952.177,00	(100,00)
75	SD Negeri 008 Teluk Bintan	0,00	3.131.382,59	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2021 (Rp)	Saldo 31 Des 2020 (Rp)	%
76	SD Negeri 009 Teluk Bintan	0,00	9.379.746,32	(100,00)
77	SD Negeri 010 Teluk Bintan	0,00	7.649.702,65	(100,00)
78	SD Negeri 011 Teluk Bintan	0,00	4.013.889,80	(100,00)
79	SD Negeri 012 Teluk Bintan	0,00	2.553.926,85	(100,00)
80	SD Negeri 013 Teluk Bintan	0,00	2.860.632,21	(100,00)
81	SD Negeri 014 Teluk Bintan	0,00	720.324,56	(100,00)
82	SD Negeri 001 Toapaya	0,00	13.675.912,57	(100,00)
83	SD Negeri 002 Toapaya	0,00	83.971.849,43	(100,00)
84	SD Negeri 003 Toapaya	0,00	279.939,27	(100,00)
85	SD Negeri 004 Toapaya	0,00	96.438.236,06	(100,00)
86	SD Negeri 005 Toapaya	0,00	4.354.651,52	(100,00)
87	SD Negeri 006 Toapaya	0,00	1.505.632,15	(100,00)
Jumlah B		0,00	1.653.376.626,94	(100,00)
III. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)				
1	SMP Negeri 1 Bintan	0,00	312.423.215,82	(100,00)
2	SMP Negeri 2 Bintan	0,00	77.931.355,76	(100,00)
3	SMP Negeri 3 Bintan	0,00	38.080.688,70	(100,00)
4	SMP Negeri 4 Bintan	0,00	56.893.752,32	(100,00)
5	SMP Negeri 5 Bintan	0,00	169.434.174,53	(100,00)
6	SMP Negeri 6 Bintan	0,00	92.032.475,35	(100,00)
7	SMP Negeri 7 Bintan	0,00	65.696.495,22	(100,00)
8	SMP Negeri 8 Bintan	0,00	11.015.357,38	(100,00)
9	SMP Negeri 9 Bintan	0,00	30.239.450,78	(100,00)
10	SMP Negeri 10 Bintan	0,00	60.449.795,78	(100,00)
11	SMP Negeri 11 Bintan	0,00	160.785.883,30	(100,00)
12	SMP Negeri 12 Bintan	0,00	247.735.046,80	(100,00)
13	SMP Negeri 13 Bintan	0,00	34.126.408,43	(100,00)
14	SMP Negeri 14 Bintan	0,00	1.927.553,82	(100,00)
15	SMP Negeri 15 Bintan	0,00	21.437.799,38	(100,00)
16	SMP Negeri 16 Bintan	0,00	54.219.338,01	(100,00)
17	SMP Negeri 17 Bintan	0,00	84.611.604,75	(100,00)
18	SMP Negeri 18 Bintan	0,00	24.071.326,91	(100,00)
19	SMP Negeri 19 Bintan	0,00	29.766.289,70	(100,00)
20	SMP Negeri 20 Satu Atap Pulau Pucung	0,00	30.225.727,68	(100,00)
21	SMP Negeri 21 Satu Atap Teluk Bintan	0,00	16.052.721,58	(100,00)
22	SMP Negeri 22 Satu Atap Mapur	0,00	5.644.525,26	(100,00)
23	SMP Negeri 23 Satu Atap Mantang	0,00	12.375.806,34	(100,00)
24	SMP Negeri 24 Bintan	0,00	20.889.651,58	(100,00)
25	SMP Negeri 25 Satu Atap Mantang	0,00	12.070.931,60	(100,00)
26	SMP Negeri 26 Bintan	0,00	5.294.590,70	(100,00)
27	SMP Negeri 27 Bintan	0,00	3.458.900,72	(100,00)
28	SMP Negeri 28 Bintan	0,00	25.831.498,90	(100,00)
Jumlah C		0,00	1.704.722.367,10	(100,00)
Total (A+B+C)		4.363.160,00	3.358.098.994,04	(100,00)

Kas tunai dan kas di rekening giro pada Bank Riau Kepri yang berada pada SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.88 Kas Dana BOS pada Kas Tunai dan Kas di Rekening Giro
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	%
1.	SD (87 sekolah)	0,00	1.653.376.626,94	(100,00)
2.	SMP (28 sekolah)	0,00	1.704.722.367,10	(100,00)
	Jumlah	0,00	3.358.098.994,04	(100,00)

kas tunai yang berada pada SD dan SMP pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 7.5.89 Kas Dana BOS pada Kas Tunai Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

NO	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	%
1.	SD (87 sekolah)	0,00	38.190.304,82	(100,00)
2.	SMP (28 sekolah)	0,00	(866.262,62)	(100,00)
	Jumlah	0,00	37.324.042,20	(100,00)

kas di rekening giro pada Bank Riau yang berada pada SD dan SMP pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 7.5.90 Kas Dana BOS pada Kas di Rekening Giro
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

NO	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	%
1.	SD (87 sekolah)	0,00	1.615.186.322,12	(100,00)
2.	SMP (28 sekolah)	0,00	1.705.588.629,72	(100,00)
	Jumlah	0,00	3.320.774.951,84	(100,00)

7.5.3.1.1.7 Setara Kas

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Tidak terdapat Setara kas Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2021 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp16.000.000.000,00 atau 100,00% dari TA 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.91 Setara Kas Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	%
1	BPR Bintan	0,00	16.000.000.000,00	(100,00)
	Jumlah	0,00	16.000.000.000,00	(100,00)

7.5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PENDEK

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020.

7.5.3.1.3 PIUTANG

Piutang adalah hak Pemerintah Kabupaten Bintan untuk mendapat suatu pembayaran dari pemerintah/entitas pelaporan lainnya. Saldo piutang Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 7.5.92 Piutang Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

Uraian		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	%
1	Piutang Pajak	63.083.751.216,98	101.494.870.380,12	(37,85)
2	Piutang Retribusi	392.270.333,00	432.869.243,00	(9,38)
3	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	1.353.407.486,00	(100,00)
4	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	48.513.271,00	(100,00)
5	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	24.555.303.202,18	0,00	0,00
6	Piutang Transfer Antar Daerah	19.731.542.871,00	0,00	0,00
7	Piutang Lainnya	1.385.324.876,00	49.446.920.652,15	(97,20)
Jumlah		109.148.192.499,16	152.776.581.032,27	(28,56)

7.5.3.1.3.1 Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp63.083.751.216,98 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.93 Mutasi Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	URAIAN	Saldo 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2021 (Rp)
1	Pajak Hotel	6.182.916.180,17	8.024.676.609,88	13.241.827.713,99	965.765.076,06
2	Pajak Restoran	5.665.561.076,66	1.930.678.833,03	6.213.190.825,03	1.383.049.084,66
3	Pajak Hiburan	1.360.401.136,53	344.898.283,00	373.205.305,00	1.332.094.114,53
4	Pajak Reklame	492.246.896,71	324.490.303,72	510.125.857,00	306.611.343,43
5	Pajak Penerangan Jalan	3.440.451.897,01	12.984.150.557,00	12.984.150.557,00	3.440.451.897,01
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.732.864.351,86	12.294.623.287,00	13.029.623.287,00	6.997.864.351,86
7	Pajak Parkir	580.000,00	69.278.633,00	69.858.633,00	0,00
8	Pajak BPHTB	15.135.600,00	24.181.722.559,00	24.180.312.733,75	16.545.425,25
9	Pajak PBB P2	76.604.713.241,18	31.487.113.095,00	59.452.301.412,00	48.639.524.924,18
10	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
11	Pajak Air Tanah	0,00	5.397.000,00	3.552.000,00	1.845.000,00
JUMLAH		101.494.870.380,12	91.648.479.160,63	130.059.598.323,77	63.083.751.216,98

Saldo Piutang pajak per 31 Desember 2021 yang merupakan pokok piutang pajak bruto sebesar Rp63.083.751.216,98 apabila dibandingkan dengan Saldo Piutang pajak per 31 desember 2020 sebesar Rp101.494.870.380,12 terjadi penurunan trend sebesar 37,85 % bila dibanding periode yang sama pada tahun 2020. Adapun penyisihan piutang pajak tersebut sebagai berikut:

Tabel 7.5.94 Penyisihan Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

NO	Jenis Pajak	0 Bln s/d 12 Bln (0,5%)	13 Bln s/d 36 Bln (10%)	37 Bln s/d 60 Bln (50%)	> 60 Bln (100%)	PENYISIHAN PIUTANG
		Pokok	Pokok	Pokok	Pokok	
1	Pajak Hotel	1.948.252,72	3.750.000,00	240.430.382,23	57.753.768,40	303.882.403,35
2	Pajak Restoran	63.296,38	5.172.215,02	142.154.154,78	1.034.359.349,32	1.181.749.015,50
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	1.332.094.114,53	1.332.094.114,53
4	Pajak Reklame	141.793,75	1.128.484,91	80.524.655,60	153.913.375,00	235.708.309,26
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	190.681,70	0,00	3.438.545.080,01	3.438.735.761,71
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	660.980,50	44.533.242,15	6.902.188.062,56	6.947.382.285,21



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

NO	Jenis Pajak	0 Bln s/d 12 Bln (0,5%)	13 Bln s/d 36 Bln (10%)	37 Bln s/d 60 Bln (50%)	> 60 Bln (100%)	PENYISIHAN PIUTANG
		Pokok	Pokok	Pokok	Pokok	
7	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pajak BPHTB	35.000,00	819.360,00	0,00	0,00	854.360,00
9	PBB	51.792.887,50	1.157.448.953,49	5.501.776.442,84	15.702.905.003,59	22.413.923.287,42
10	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pajak Air Tanah	9.225,00	0,00	0,00	0,00	9.225,00
	JUMLAH	53.990.455,34	1.169.170.675,63	6.009.418.877,60	28.621.758.753,40	35.854.338.761,98

Adapun piutang pajak setelah penyisihan sebagai berikut.

Tabel 7.5.95 Piutang Pajak Setelah Penyisihan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	URAIAN	SALDO 31 DES 2021 (SEBELUM PENYISIHAN) (Rp)	PENYISIHAN PIUTANG (PER 31 DES 2021) (Rp)	SALDO 31 DES 2021 (SETELAH PENYISIHAN) (Rp)
1	Pajak Hotel	965.765.076,06	303.882.403,35	661.882.672,71
2	Pajak Restoran	1.383.049.084,66	1.181.749.015,50	201.300.069,16
3	Pajak Hiburan	1.332.094.114,53	1.332.094.114,53	0,00
4	Pajak Reklame	306.611.343,43	235.708.309,26	70.903.034,17
5	Pajak Penerangan Jalan	3.440.451.897,01	3.438.735.761,71	1.716.135,30
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.997.864.351,86	6.947.382.285,21	50.482.066,65
7	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
8	Pajak BPHTB	16.545.425,25	854.360,00	15.691.065,25
9	Pajak PBB P2	48.639.524.924,18	22.413.923.287,42	26.225.601.636,76
10	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00
11	Pajak Air Tanah	1.845.000,00	9.225,00	1.835.775,00
	JUMLAH	63.083.751.216,98	35.854.338.761,98	27.229.412.455,00

7.5.3.1.3.2 Piutang Retribusi Daerah

Perincian saldo piutang retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp392.270.333,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.96 Mutasi Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	Ret. Jasa Usaha	228.136.515,00	5.000.000,00	8.000.000,00	225.136.515,00
2	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	204.732.728,00	0,00	37.598.910,00	167.133.818,00
	Jumlah	432.869.243,00	5.000.000,00	45.598.910,00	392.270.333,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 merupakan Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Sewa Rumah Dinas) dan Izin Mendirikan Bangunan. Apabila dibandingkan dengan saldo Piutang per 31 Desember 2020 terjadi penurunan sebesar 12,19%. Penurunan ini disebabkan karena adanya pembayaran piutang retribusi sewa rumah dinas dan retribusi izin mendirikan bangunan pada tahun 2020.



Tabel 7.5.97 Penyisihan Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	NILAI PENYISIHAN PIUTANG				Total Penyisihan Piutang
		0 Bln s/d 12 Bln (0,5%)	13 Bln s/d 36 Bln (10%)	37 Bln s/d 60 Bln (50%)	> 60 Bln (100%)	
1	Ret. Jasa Usaha	0,00	450.000,00	0,00	220.636.515,00	221.086.515,00
2	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	0,00	14.588.997,80	10.621.920,00	0,00	25.210.917,80
	Jumlah	0,00	15.038.997,80	10.621.920,00	220.636.515,00	246.297.432,80

Adapun piutang retribusi setelah penyisihan sebagai berikut.

Tabel 7.5.98 Piutang Retribusi Setelah Penyisihan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2021 Sebelum Penyisihan	Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2021	Saldo 31 Desember 2021 Setelah Penyisihan
1	Ret. Jasa Usaha	225.136.515,00	221.086.515,00	4.050.000,00
2	Ret. Izin Mendirikan Bangunan	167.133.818,00	25.210.917,80	141.922.900,20
	Jumlah	392.270.333,00	246.297.432,80	145.972.900,20

7.5.3.1.3.3 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak terdapat Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Tahun 2021 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran direklas ke Piutang Lainnya. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.5.99 Mutasi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	Angsuran Rumah Dinas	1.099.927.986,00	0,00	1.099.927.986,00	0,00
2	Angsuran Kendaraan Dinas Roda 4	78.961.000,00	0,00	78.961.000,00	0,00
3	Angsuran Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4	174.518.500,00	0,00	174.518.500,00	0,00
	Jumlah	1.353.407.486,00	0,00	1.353.407.486,00	0,00

7.5.3.1.3.4 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Tidak terdapat Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Tahun 2021 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi direklas ke Piutang Lainnya. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.5.100 Mutasi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	48.513.271,00	0,00	48.513.271,00	0,00
	Jumlah	48.513.271,00	0,00	48.513.271,00	0,00

**7.5.3.1.3.5 Piutang Lain-lain PAD yang Sah**

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp24.555.303.202,18. Untuk Saldo Tahun 2020 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah terdapat pada Piutang Lainnya. Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2021 dapat dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 7.5.101 Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	Denda Pajak Hotel	0,00	2.221.050.813,73	1.810.796.526,08	410.254.287,65
2	Denda Pajak Restoran	0,00	2.107.749.812,61	1.416.614.093,22	691.135.719,39
3	Denda Pajak Hiburan	0,00	525.442.748,13	0,00	525.442.748,13
4	Denda Pajak Reklame	0,00	20.693.255,00	62.825,00	20.630.430,00
5	Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	2.096.858.786,44	0,00	2.096.858.786,44
6	Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	2.142.746.242,29	18.945.633,00	2.123.800.609,29
7	Denda Pajak Parkir	0,00	0	0,00	0,00
8	Denda Pajak BPHTB	0,00	1.280.320,00	860.320,00	420.000,00
9	Denda Pajak PBB P2	0,00	18.835.985.558,87	889.679.955,00	17.946.305.603,87
10	Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0	0,00	0,00
11	Denda Pajak Air Tanah	0,00	154.980,00	29.520,00	125.460,00
12	Denda Retribusi Sewa Rumah Dinas	0,00	0	0,00	0,00
13	Denda Izin Mendirikan Bangunan	0,00	120.226.310,66	0,00	120.226.310,66
14	Piutang Pendapatan BLUD	0,00	807.513.416,00	243.453.859,00	564.059.557,00
15	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	0,00	56.725.100,75	4.286.411,00	52.438.689,75
16	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	148.045.000,00	144.440.000,00	3.605.000,00
	Jumlah	0,00	29.084.472.344,48	4.529.169.142,30	24.555.303.202,18

Adapun penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah tersebut sebagai berikut.

**Tabel 7.5.102 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

Jenis Pajak	0 Bin s/d 12 Bin (0,5%)		13 Bin s/d 36 Bin (10%)		37 Bin s/d 60 Bin (50%)		> 60 Bin (100%)		Pokok	Denda	Jumlah
	Pokok	Denda	Pokok	Denda	Pokok	Denda	Pokok	Denda			
Denda Pajak Hotel	0,00	1.085.790,93	0,00	15.397.102,73	0,00	13.013.655,87	0,00	13.097.764,57	0,00	42.594.314,10	42.594.314,10
Denda Pajak Restoran	0,00	71.168,05	0,00	12.860.577,57	0,00	7.886.163,74	0,00	525.238.730,55	0,00	546.056.639,91	546.056.639,91
Denda Pajak Hiburan	0,00	-	0,00	44.448,00	0,00	0,00	0,00	524.998.268,13	0,00	525.042.716,13	525.042.716,13
Denda Pajak Reklame	0,00	3.498,05	0,00	301.414,00	0,00	0,00	0,00	16.916.680,00	0,00	17.221.592,05	17.221.592,05
Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	1.540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.550.696,44	0,00	2.096.552.236,89	2.096.552.236,89
Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.091.340,20	0,00	1.949.617.928,89	0,00	2.036.709.269,09	2.036.709.269,09
Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denda Pajak BPHTB	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Denda Pajak PBB P2	0,00	504.517,00	0,00	519.012.984,20	0,00	2.555.530.301,23	0,00	7.544.211.758,22	0,00	10.619.259.560,65	10.619.259.560,65
Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denda Pajak Air Tanah	0,00	627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,30	627,30
Denda Retribusi Sewa Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denda Izin Mendirikan Bangunan	0,00	193.867,43	0,00	7.570.167,09	0,00	1.176.855,00	0,00	3.397.444,08	0,00	12.338.333,59	12.338.333,59
Piutang Pendapatan	2.820.297,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.297,79	0,00	2.820.297,79



BLUD											
Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	0,00	45.712,11	0,00	1.593.631,50	0,00	6.421.443,75	0,00	14.517.066,00	0,00	22.577.853,36	22.577.853,36
Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	18.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.025,00	0,00	18.025,00
Total Penyisihan	2.838.322,79	1.908.821,32	0,00	556.780.325,09	0,00	2.671.119.759,79	0,00	12.688.546.336,88	2.838.322,79	15.918.355.243,07	15.921.193.565,86

Adapun piutang lain-lain PAD yang sah setelah penyisihan sebagai berikut.

Tabel 7.5.103 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Setelah Penyisihan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	URAIAN	SALDO 31 DES 2021 (SEBELUM PENYISIHAN) (Rp)	PENYISIHAN PIUTANG (PER 31 DES 2021) (Rp)	SALDO 31 DES 2021 (SETELAH PENYISIHAN) (Rp)
1	Denda Pajak Hotel	410.254.287,65	42.594.314,10	367.659.973,55
2	Denda Pajak Restoran	691.135.719,39	546.056.639,91	145.079.079,48
3	Denda Pajak Hiburan	525.442.748,13	525.042.716,13	400.032,00
4	Denda Pajak Reklame	20.630.430,00	17.221.592,05	3.408.837,95
5	Denda Pajak Penerangan Jalan	2.096.858.786,44	2.096.552.236,89	306.549,55
6	Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.123.800.609,29	2.036.709.269,09	87.091.340,20
7	Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
8	Denda Pajak BPHTB	420.000,00	2.100,00	417.900,00
9	Denda Pajak PBB P2	17.946.305.603,87	10.619.259.560,66	7.327.046.043,21
10	Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00
11	Denda Pajak Air Tanah	125.460,00	627,30	124.832,70
12	Denda Retribusi Sewa Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00
13	Denda Izin Mendirikan Bangunan	120.226.310,66	12.338.333,59	107.887.977,07
14	Piutang Pendapatan BLUD	564.059.557,00	2.820.297,79	561.239.259,21
15	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	52.438.689,75	22.577.853,36	29.860.836,39
16	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.605.000,00	18.025,00	3.586.975,00
JUMLAH		24.555.303.202,18	15.921.193.565,87	8.634.109.636,31

7.5.3.1.3.6 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Tidak terdapat Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021. Penambahan pada Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan reklas dari Piutang Lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Pengurangan merupakan realisasi pembayaran atas Piutang tersebut.

Tabel 7.5.104 Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	0,00	2.144.427.379,00	2.144.427.379,00	0,00
2	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	0,00	10.743.035,00	10.743.035,00	0,00
3	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA	0,00	12.101.257,00	12.101.257,00	0,00



No	Uraian	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
	Kehutanan-PSDH				
4	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan	0,00	229.300.150,00	229.300.150,00	0,00
	Jumlah	0,00	2.396.571.821,00	2.396.571.821,00	0,00

7.5.3.1.3.7 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp19.731.542.871,00. Penambahan pada Piutang Transfer Antar Daerah merupakan penambahan piutang transfer dari Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp19.731.542.871,00 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 221 Tahun 2022 dan reklas dari Piutang Lainnya Tahun 2020 sebesar Rp14.009.129.771,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Pengurangan merupakan realisasi pembayaran atas Piutang tersebut.

**Tabel 7.5.105 Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	7.004.428.603,00	3.297.448.291,00	3.706.980.312,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	3.478.250.660,00	1.847.332.810,00	1.630.917.850,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	23.223.200.241,00	8.843.774.505,00	14.379.425.736,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	0,00	34.793.138,00	20.574.165,00	14.218.973,00
	Jumlah	0,00	33.740.672.642,00	14.009.129.771,00	19.731.542.871,00

7.5.3.1.3.8 Piutang Lainnya

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Per 30 Desember 2021 Piutang Lainnya terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan Bagian Lancar TGR. Sedangkan untuk Piutang 31 Desember 2020 sudah di reklas ke Piutang Transfer Pemerintah Pusat, Piutang Transfer Antar Daerah dan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah. Perincian saldo piutang lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.385.324.876,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.106 Mutasi Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

NO.	URAIAN	SALDO 31 DES 2020 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO 31 DES 2021 (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil Pajak				
	- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	2.144.427.379,00	0,00	2.144.427.379,00	0,00
	- Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	10.743.035,00	0,00	10.743.035,00	0,00
	- Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Kehutanan	12.101.257,00	0,00	12.101.257,00	0,00
	- Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan	229.300.150,00	0,00	229.300.150,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

2	Transfer Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kepri				
	- Piutang PKB	3.297.448.291,00	0,00	3.297.448.291,00	0,00
	- Piutang BBN KB	1.847.332.810,00	0,00	1.847.332.810,00	0,00
	- Piutang PBB KB	8.843.774.505,00	0,00	8.843.774.505,00	0,00
	- Piutang PAP	20.574.165,00	0,00	20.574.165,00	0,00
3	Angsuran Rumah Dinas	0,00	1.262.149.866,00	178.817.761,00	1.083.332.105,00
4	Angsuran Kendaraan Dinas Roda 4	0,00	78.961.000,00	0,00	78.961.000,00
5	Angsuran Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4	0,00	174.518.500,00	0,00	174.518.500,00
8	Bagian Lancar TGR	0,00	48.513.271,00	0,00	48.513.271,00
9	Denda Pajak Hotel	3.154.820.471,43	0,00	3.154.820.471,43	0,00
10	Denda Pajak Restoran	3.014.414.216,39	0,00	3.014.414.216,39	0,00
11	Denda Pajak Hiburan	528.273.450,13	0,00	528.273.450,13	0,00
12	Denda Pajak Reklame	19.930.820,00	0,00	19.930.820,00	0,00
13	Denda Pajak Penerangan Jalan	2.096.550.696,44	0,00	2.096.550.696,44	0,00
14	Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.123.800.609,29	0,00	2.123.800.609,29	0,00
15	Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Denda Pajak BPHTB	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Denda Pajak PBB P2	21.851.013.190,53	0,00	21.851.013.190,53	0,00
18	Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Denda Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Denda Retribusi Sewa Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	81.452.824,94	0,00	81.452.824,94	0,00
22	Piutang BLUD	165.557.781,00	0,00	165.557.781,00	0,00
23	Piutang JKN	5.405.000,00	0,00	5.405.000,00	0,00
	JUMLAH	49.446.920.652,15	1.564.142.637,00	49.625.738.413,15	1.385.324.876,00

Adapun penyisihan piutang lainnya tersebut sebagai berikut.

Tabel 7.5.107 Penyisihan Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

Jenis Pajak	0 Bln s/d 12 Bln (0,5%)		13 Bln s/d 36 Bln (10%)		37 Bln s/d 60 Bln (50%)		> 60 Bln (100%)		Pokok	Denda	Jumlah
	Pokok	Denda	Pokok	Denda	Pokok	Denda	Pokok	Denda			
Angsuran Rumah Dinas	300.709,38	0,00	9.393.355,00	0,00	32.758.150,00	0,00	863.740.380,00	0,00	906.192.594,38	0,00	906.192.594,38
Angsuran Kendaraan Dinas Roda 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.961.000,00	0,00	78.961.000,00	0,00	78.961.000,00
Angsuran Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.518.500,00	0,00	174.518.500,00	0,00	174.518.500,00
Bagian Lancar TGR	0,00	0,00	0,00	0,00	24.256.635,50	0,00	0,00	0,00	24.256.635,50	0,00	24.256.635,50
Total Penyisihan	300.709,38	0,00	9.393.355,00	0,00	57.014.785,50	0,00	1.117.219.880,00	0,00	1.183.928.729,88	0,00	1.183.928.729,88

Adapun piutang lainnya setelah penyisihan sebagai berikut.

**Tabel 7.5.108 Piutang Lainnya Setelah Penyisihan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2021 (SEBELUM PENYISIHAN) (Rp)	PENYISIHAN PIUTANG (PER 31 DES 2021) (Rp)	SALDO 31 DES 2021 (SETELAH PENYISIHAN) (Rp)
1	Angsuran Rumah Dinas	1.083.332.105,00	906.192.594,38	177.139.510,62
2	Angsuran Kendaraan Dinas Roda 4	78.961.000,00	78.961.000,00	0,00
3	Angsuran Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	0,00	0,00
4	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2	0,00	0,00	0,00
5	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4	174.518.500,00	174.518.500,00	0,00
6	Bagian Lancar TGR	48.513.271,00	24.256.635,50	24.256.635,50
JUMLAH		1.385.324.876,00	1.183.928.729,88	201.396.146,12

7.5.3.1.3.9 Penyisihan Piutang

Perincian saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp53.205.758.490,53 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.5.109 Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2021 (Rp)	SALDO 31 DES 2020 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	35.854.338.761,98	32.896.198.250,91
2	Penyisihan Piutang Retribusi	246.297.432,80	244.915.047,80
3	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	2.110.863,19
4	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	1.155.377.612,81
5	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	15.921.193.565,87	0,00
6	Penyisihan Piutang Lainnya	1.183.928.729,88	14.728.097.556,63
JUMLAH		53.205.758.490,53	49.026.699.331,34

7.5.3.1.4 Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp165.587.500,00. Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 pada OPD dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 7.5.110 Beban Dibayar Dimuka Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

NO	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	(%)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	Ruko 3 Lantai di Perumahan Taman Sari Kec. Bintan Utara	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00
	Ruko 2 Lantai di Jl. Nusantara	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
	Ruko 2 Lantai di Desa Taopaya Selatan Nomor Bukti Sertifikat 01795	8.100.000,00	7.500.000,00	8,00
	Ruko 2 Lantai di Desa Taopaya Selatan Nomor Bukti Sertifikat 01796 (Gudang)	12.150.000,00	13.500.000,00	(10,00)



NO	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	(%)
Jumlah a		50.625.000,00	51.375.000,00	(1,46)
2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			
	Gedung/Rumah di Jl. Kesatria Blok A No. 1 Tanjungpinang	10.312.500,00	4.166.666,67	147,50
Jumlah b		10.312.500,00	4.166.667,67	147,50
3	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan			
	Ruko di Jl. Raya Tanjung Pinang - Tanjung Uban Mo. 4 Km. 16	4.500.000,00	31.500.000,00	(85,71)
Jumlah c		4.500.000,00	31.500.000,00	(85,71)
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah			
	Ruko (Gudang Arsip) di Jl. Hang Jebat Kijang Bintan Timur	24.166.666,67	24.166.666,67	0,00
	2 Ruko di Jl. Perikanan No. 80 C 80 D Berek Motor Kijang	4.983.333,33	4.983.333,33	0,00
	Ruko 3 Lantai di Jl Baru KM. 8 Tanjungpinang	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00
Jumlah d		37.900.000,00	37.900.000,00	0,00
5	Badan Pendapatan Daerah			
	Ruko 3 Lantai di Jl. Pasar Berdikari Kijang	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00
	2 Unit Mobil Avanza	36.000.000,00	0,00	100,00
Jumlah e		62.250.000,00	26.250.000,00	137,14
TOTAL (a+b+c+d+e)		165.587.500,00	151.191.666,67	9,52

7.5.3.15 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp27.806.798.242,99 dan terjadi kenaikan sebesar Rp12.429.460.060,11 atau 80,83% dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.377.338.182,88.

Jumlah persediaan tersebut merupakan sisa barang habis pakai dan barang yang akan dihibahkan pada OPD per 31 Desember 2021. Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 pada OPD dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 7.5.111 Persediaan Per SKPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Persediaan Per SKPD	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Saldo Tahun 2020 (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	15.671.715,00	8.739.150,00	79,33
2	Dinas Kesehatan	4.557.430.067,00	6.466.378.902,40	(29,52)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.836.562.582,00	1.489.900,00	458.760,50
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.528.500,00	2.935.500,00	(47,93)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	159.080.000,00	161.236.100,00	(1,34)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	101.287.250,00	207.380.650,00	(51,16)
7	Dinas Sosial	701.000,00	11.022.200,00	(93,64)
8	Dinas Tenaga Kerja	497.200,00	589.600,00	(15,67)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27.661.704,00	27.939.300,00	(0,99)
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	115.614.893,00	139.205.408,00	(16,95)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Persediaan Per SKPD	Saldo Tahun 2021 (Rp)	Saldo Tahun 2020 (Rp)	(%)
11	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	136.684.680,00	226.543.861,00	(39,67)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	192.860,00	125.000,00	54,29
14	Dinas Perhubungan	475.743.545,00	1.349.600,00	35.150,71
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	203.200,00	719.700,00	(71,77)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.228.500,00	831.600,00	47,73
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	360.657.600,00	403.845.850,00	(10,69)
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.113.500,00	1.047.000,00	6,35
21	Dinas Perikanan	13.104.422,22	516.000,00	2.439,62
22	Sekretariat Daerah	88.297.925,00	12.574.200,00	602,22
23	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.000.555,00	853.000,00	134,53
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	17.152.475,00	1.632.550,00	950,66
26	Badan Pendapatan Daerah	2.086.100,00	11.170.300,00	(81,32)
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	484.000,00	1.345.000,00	(64,01)
28	Sekretariat DPRD	1.198.000,00	1.767.700,00	(32,23)
29	Kecamatan Bintan Utara	635.500,00	605.500,00	4,95
30	Kecamatan Bintan Pesisir	305.000,00	180.000,00	69,44
31	Kecamatan Tambelan	976.000,00	940.000,00	3,83
32	Kecamatan Mantang	4.590.000,00	346.000,00	1.226,59
33	Kecamatan Toapaya	2.543.500,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Teluk Sebong	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Teluk Bintan	1.154.000,00	215.000,00	436,74
36	Kecamatan Gunung Kijang	1.398.815,00	5.758.500,00	(75,71)
37	Kecamatan Bintan Timur	1.840.000,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Seri Kuala Lobam	547.300,00	496.100,00	10,32
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00
40	RSUD Bintan	9.718.057.093,09	6.699.481.918,00	45,06
41	BLUD Puskesmas	2.342.103.170,17	522.372.881,72	348,36
42	Puskesmas JKN	2.816.465.591,51	455.704.211,76	518,05
Jumlah		27.806.798.242,99	15.377.338.182,88	80,83

Adapun mutasi tambah kurang atas saldo persediaan tersebut sebagai berikut.

Tabel 7.5.112 Mutasi Persediaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Persediaan	Saldo Tahun 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	392.891.383,00	5.651.454.728,00	5.851.889.356,60	192.456.754,40
2	Alat Listrik	13.246.700,00	1.902.359.653,00	1.899.581.656,20	16.024.696,80
3	Alat Kebersihan	39.686.170,00	5.782.624.296,00	5.761.704.248,90	60.606.217,10
4	Obat-Obatan	9.152.054.245,00	2.726.049.187,00	4.050.202.180,07	7.827.901.251,93
5	Barang yang akan Dihilangkan	472.501.808,00	10.179.743.292,00	2.891.018.825,00	7.761.226.275,00
6	Cetak dan Penggandaan	35.856.425,00	8.484.055.222,00	8.367.979.668,00	151.931.979,00
7	Bahan Bakar Minyak	49.111.850,00	7.598.628.220,00	7.624.748.570,00	22.991.500,00
8	Pakaian Khusus Kegiatan	159.080.000,00	0,00	0,00	159.080.000,00
9	Bahan Medis Habis Pakai	1.702.415.876,00	19.321.185.024,60	10.319.924.016,00	10.703.676.884,60
10	Bahan Kimia	392.953.330,00	2.835.572.576,00	2.522.179.834,00	706.346.072,00
11	Benda Pos/Materai	4.044.900,00	200.784.000,00	203.058.900,00	1.770.000,00
12	Persediaan Bantuan COVID	2.710.571.805,00	106.093.400,00	2.710.571.805,00	106.093.400,00
13	Makanan Tambahan Dinas Kesehatan	252.923.690,88	2.405.530.470,00	2.574.540.370,94	83.913.789,94
14	Obat-Obatan Ikan	0,00	159.466,66	0,00	159.466,66



No	Persediaan	Saldo Tahun 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Tahun 2021 (Rp)
15	Pakan Ikan	0,00	12.420.000,00	0,00	12.420.000,00
16	Vitamin Ikan	0,00	199.955,56	0,00	199.955,56
	Jumlah	15.377.338.182,88	67.206.859.490,82	54.777.399.430,71	27.806.798.242,99

Penambahan persediaan sebesar Rp67.206.859.490,82 terdiri dari:

- Penambahan *netto* pada pengadaan Alat Tulis Kantor Tahun 2021 sebesar Rp5.651.454.728,00;
- Penambahan *netto* pada Alat Listrik Tahun 2021 sebesar Rp1.902.359.653,00;
- Penambahan *netto* pada Alat Kebersihan Tahun 2021 yang merupakan Bahan Medis Habis Pakai sebesar Rp5.782.624.296,00;
- Penambahan *netto* pada Obat-Obatan Tahun 2021 sebesar Rp2.726.049.187,00;
- Penambahan *netto* pada Barang yang akan dihibahkan Tahun 2021 sebesar Rp10.179.743.292,00;
- Penambahan *netto* pada Cetak dan Penggandaan Tahun 2021 sebesar Rp8.484.055.222,00;
- Penambahan *netto* pada Bahan Bakar Minyak Tahun 2021 sebesar Rp7.598.628.220,00;
- Penambahan *netto* pada Bahan Medis Habis Pakai Tahun 2021 sebesar Rp19.321.185.024,60;
- Penambahan *netto* pada Bahan Kimia Tahun 2021 sebesar Rp2.835.572.576,00;
- Penambahan *netto* pada Benda Pos/Materai Tahun 2021 sebesar Rp200.784.000,00;
- Penambahan *netto* pada Persediaan Bantuan COVID Tahun 2021 sebesar Rp106.093.400,00;
- Penambahan *netto* pada Makanan Tambahan Pendamping ASI Tahun 2021 sebesar Rp2.405.530.470,00;
- Penambahan *netto* pada Obat-Obatan Ikan Tahun 2021 sebesar Rp159.466,66;
- Penambahan *netto* pada Pakan Ikan Tahun 2021 sebesar Rp12.420.000,00;
- Penambahan *netto* pada Vitamin Ikan Tahun 2021 sebesar Rp199.955,56.

Sedangkan pengurangan persediaan sebesar Rp54.777.399.430,71 terdiri dari:

- Pengurangan *netto* pada pengadaan Alat Tulis Kantor Tahun 2021 sebesar Rp5.851.889.356,60;
- Pengurangan *netto* pada Alat Listrik Tahun 2021 sebesar Rp1.899.581.656,20,00;
- Pengurangan *netto* pada Alat Kebersihan Tahun 2021 yang merupakan Bahan Medis Habis Pakai sebesar Rp5.761.704.248,90;
- Pengurangan *netto* pada Obat-Obatan Tahun 2021 sebesar Rp4.050.202.180,07,00;
- Pengurangan *netto* pada Barang yang akan dihibahkan Tahun 2021 sebesar Rp2.891.018.825,00;



- Pengurangan *netto* pada Cetak dan Penggandaan Tahun 2021 sebesar Rp8.367.979.668,00;
- Pengurangan *netto* pada Bahan Bakar Minyak Tahun 2021 sebesar Rp7.624.748.570,00;
- Pengurangan *netto* pada Bahan Medis Habis Pakai Tahun 2021 sebesar Rp10.319.924.016,00;
- Pengurangan *netto* pada Bahan Kimia Tahun 2021 sebesar Rp2.522.179.834,00;
- Pengurangan *netto* pada Benda Pos/Materai Tahun 2021 sebesar Rp203.058.900,00;
- Pengurangan *netto* pada Persediaan Bantuan COVID Tahun 2021 sebesar Rp2.710.571.805,00;
- Pengurangan *netto* pada Makanan Tambahan Pendamping ASI Tahun 2021 sebesar Rp2.574.540.370,94;

Adapun persediaan atau barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebagai berikut.

Tabel 7.5.113 Persediaan atau Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	OPD	TOTAL (Rp)	KET	SUMBER DANA	JUMLAH DITERIMA/PENERIMA
1	Dinas Pendidikan	2.270.400,00	Baju Osis (Topi, Dasi)	PAD	12 stel
		1.188.000,00	Baju Batik	PAD	12 piece
		1.438.800,00	Tas	PAD	12 piece
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan	24.409.000,00	Pakaian Olahraga	PAD	70 Buah
		19.910.000,00	Pakaian Pawai/Bunga Telor dan Bunga Manggar	PAD	50 Stell
		69.206.500,00	Pakaian Penari Pawai Budaya	PAD	50 Stell
		4.812.500,00	Bunga Manggar	PAD	25 Set
		9.212.500,00	Bunga Telur	PAD	25 Set
		2.750.000,00	Dayung Kayu	PAD	25 Buah
		5.280.000,00	Bendera Kecil	PAD	600 Buah
		4.950.000,00	Parfum	PAD	250 Botol
		962.500,00	Tongkat Bendera	PAD	25 Batang
		2.337.500,00	Bendera Merah Putih	PAD	25 Lembar
		5.280.000,00	Pin MTQ	PAD	400 Buah
		3.850.000,00	Payung	PAD	25 Buah
		4.620.000,00	Piala (Trophy) Bergilir	PAD	1 Buah
		6.050.000,00	Piala (Trophy) Pemenang	PAD	5 Buah
		2.970.000,00	Piala (Trophy) Penata Terbaik	PAD	3 Buah
		6.050.000,00	Pakaian Panitia	PAD	25 Buah
		19.470.000,00	Topi	PAD	300 Pcs
		59.840.000,00	Pakaian Olahraga VIP	PAD	200 Pcs
		71.280.000,00	Pakaian Olahraga Panitia	PAD	800 Pcs
		1.842.500,00	Peluru Air Soft Gun Magazine	PAD	5
220.000,00	Kertas Karton Target	PAD	100 Lembar		
1.644.500,00	Baricade Tape (Police Line)	PAD	10 Roll		
1.760.000,00	Carabine Snap	PAD	4 Buah		
198.000,00	Papan Target	PAD	4 Set		
16.225.000,00	Pakaian Olahraga	PAD	125 Buah		
3	Kecamatan Mantang	4.290.000,00	Kasur	PAD	3 Buah
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	99.641.893,00	Beras Bulog	PAD	9452 Kg



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	OPD	TOTAL (Rp)	KET	SUMBER DANA	JUMLAH DITERIMA/PENERIMA
5	Dinas Perhubungan	473.000.000,00	Mini Bus	PAD	2
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.834.266.682,00	Bangunan Gedung Kantor	PAD	1

Adapun persediaan obat-obatan dalam kondisi rusak dan kadaluarsa sebagai berikut.

Tabel 7.5.114 Persediaan Obat-obatan Dalam Kondisi Rusak dan Kadaluarsa Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
BFAK Dinas Kesehatan					
1	zink tablet	ktk/100 tab	60.400,00	336	20.294.400,00
2	piridoxin tablet	ktk/ 100 tab	14.100,00	720	10.152.000,00
3	rdt malaria pan/pf	ktk/25 test	47.397,00	3	142.191,00
4	Prednisone	ktk/ 100 tab	7.900,00	44	347.600,00
5	chlorampenikol salep mata	ktk/24	46.200,00	13	600.600,00
6	oat kategori I	ktk	430.539,00	63	27.123.957,00
7	oat kategori I	ktk	430.539,00	194	83.524.566,00
8	acyclovir 400 tab	ktk/50 tab	21.250,00	39	828.750,00
9	oxytetrasiklin salep kulit	ktk/24	42.240,00	29	1.224.960,00
10	oxytetrasiklin salep mata	ktk/24	62.400,00	92	5.740.800,00
11	ACT Arterakine tablet (Kombipak)	ktk/9 tab	12.681,00	24	304.344,00
12	ranitidin injeksi	ktk/100 amp	115.500,00	14	1.617.000,00
13	zink tablet	ktk/100 tab	60.400,00	390	23.556.000,00
14	retinol 100.000	ktk/ 50 tab	16.350,00	63	1.030.050,00
15	stik asam urat	Ktk/25	277.150,00	80	22.172.000,00
16	piridoxin tablet	ktk/ 100 tab	14.100,00	780	10.998.000,00
17	sirup besi	botol	40.250,00	399	16.059.750,00
18	pirantel sirup	botol	11.050,00	404	4.464.200,00
19	Fenol Gliserol tetes telinga	botol	2.590,00	336	870.240,00
20	metformin tablet	ktk/ 100 tab	10.200,00	1.200	12.240.000,00
21	norepinefrine injeksi	ktk/ 5 ampul	129.195,00	12	1.550.340,00
22	phytomedion injeksi 10 mg	Ktk / 30 amp	137.490,00	33	4.537.170,00
23	tumpatan composite A3	tube	572.600,00	3	1.717.800,00
24	Oat kategori II	ktk	1.492.574,00	2	2.985.148,00
25	Aminophyllin tablet	btl / 100 Tab	10.100,00	78	787.800,00
26	simvastatin 10 mg tab	Ktk / 30 Tab	3.300,00	12.756	42.094.800,00
27	simvastatin 20 mg tab	blister	2.250,00	24.000	54.000.000,00
28	Amoksisilin tablet 500 mg	ktk/ 100 tab	24.800,00	780	19.344.000,00
29	griseofulvin 500 mg tab	ktk/ 100 tab	104.000,00	43	4.472.000,00
30	Infuseton set Anak	pcs	5.445,00	818	4.454.010,00
31	Digoxin Tab	ktk/ 100 tab	10.400,00	154	1.601.600,00
32	paracetamol sirup	btl	5.500,00	4.300	23.650.000,00
33	amoksisilin 125 mg sirup	Botol	5.500,00	1.344	7.392.000,00
34	lidocain copositum	ktk/ 30 amp	39.510,00	54	2.133.540,00
35	lidocain copositum	ktk/ 30 amp	39.510,00	450	17.779.500,00



	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
36	kanamicin injeksi	ktk/ 10 amp	160.000,00	54	8.640.000,00
37	kasa steril 16*16	kotak	8.800,00	205	1.804.000,00
38	Alat suntik 3 cc	ktk/ 100 pcs	85.700,00	18	1.542.600,00
39	larutan ziehl nelsen	kotak	178.750,00	30	5.362.500,00
40	guaifenesin guaiyakolat tablet	ktk/ 100 tab	16.500,00	534	8.811.000,00
41	Infusetlon set Anak	pcs	5.445,00	400	2.178.000,00
42	infuset anak	pcs	5.445,00	810	4.410.450,00
43	etamoxul forte 960 mg tablet	ktk/ 100 tab	51.200,00	28	1.433.600,00
44	formula - 75 sachet 16,5 gr	sachet	5.692,00	332	1.889.744,00
45	dexametason injeksi	Ampul	1.210,00	2.680	3.242.800,00
46	rapit tes hiv lini I	ktk/ 25 tes	2.147.350,00	10	21.473.500,00
47	isoniazid tablet 300 mg	ktk/ 100 tab	17.700,00	30	531.000,00
48	etil klorida	btl	198.000,00	271	53.658.000,00
49	amoksisilin 250 mg tab	Ktk / 100 mg	20.900,00	75	1.567.500,00
50	cefadroxil sirup 250	botol	5.826,00	3.053	17.786.778,00
51	ibuprofen sirup	botol	2.858,00	160	457.280,00
52	cetirizin sirup	botol	3.861,00	1.734	6.694.974,00
53	amoksisilin 250 mg sirup	botol	3.846,00	3.650	14.037.900,00
54	acyclovir 400 mg tab	ktk/ 50 tab	21.250,00	51	1.083.750,00
55	povidon 300 ml	botol	20.700,00	192	3.974.400,00
56	rivanol 300 ml	Botol	3.450,00	226	779.700,00
57	larutan cairan 1:4 500 ml	botol	9.840,00	175	1.722.000,00
58	Hydroclortiazide	kotak/ 100 tab	17.800,00	52	925.600,00
59	needle 24	ktk/100	31.100,00	19	590.900,00
60	Metoklopramid injeksi	ktk/ 10 amp	39.040,00	8	312.320,00
61	haloperidol injeksi	ktk/ 5 amp	506.500,00	27	13.675.500,00
62	antalgin injeksi	ktk/ 100 amp	305.000,00	12	3.660.000,00
63	sianokobalamin injeksi	ktk/ 100 amp	116.000,00	9	1.044.000,00
64	rdt malaria pan/pf	ktk/ 25 tes	1.184.925,00	2	2.369.850,00
65	obat anti tuberkulosis kombipak azitromicin-cefixime	ktk	31.231,00	14	437.234,00
66	larutan eugenol gigi	botol	21.648,00	3	64.944,00
67	devitalisasi pasta	pcs	255.800,00	5	1.279.000,00
68	kalsium hidroksida pasta	pcs	91.000,00	2	182.000,00
69	cairan irigasi NaOCL 5%	botol	158.125,00	1	158.125,00
70	Kotrimoksazol 960 mg	ktk/ 100tab	51.200,00	33	1.689.600,00
71	metildopa tablet	ktk/ 100 tab	108.800,00	19	2.067.200,00
72	kuinin tablet	ktk/ 100 tab	73.700,00	8	589.600,00
73	larutan ziehl nelsen Tb	Paket	178.750,00	40	7.150.000,00
74	nifedifine tablet	ktk/ 100 tab	14.900,00	137	2.041.300,00
75	sirup besi	botol	40.250,00	244	9.821.000,00
76	anvomer b6	ktk/ 30 tab	87.990,00	48	4.223.520,00
77	hyosin butil bromide injeksi	ktk/ 5 amp	50.600,00	14	708.400,00
78	glimepiride 2 mg	ktk/ 100	20.700,00	576	11.923.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Nama obat		Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
79	Bisoprolol	ktk/ 30 tab	9.480,00	27	255.960,00
80	citoswab collection swab	pcs	1.167,00	600	700.200,00
81	Larutan KOH 10%	BTL/100ML	56.000,00	42	2.352.000,00
82	LARUTAN MEYTILEN BLUE 0.1 %	BTL/ 100 ML	59.216,00	37	2.190.992,00
83	Lorazepam 2 mg tab	ktk/100 tab	93.200,00	48	4.473.600,00
84	Lini 1	KTK/ 25 TES	2.147.350,00	150	322.102.500,00
85	Larutan Asam Asetat	botol	37.800,00	24	907.200,00
86	Rapit tes sipilis	ktk/25	232.500,00	27	6.277.500,00
87	Lorazepam 2 mg tab	ktk/ 100 tab	93.200,00	48	4.473.600,00
88	haloperidol deconat injeksi	ktk/ 5 vial	506.500,00	27	13.675.500,00
89	klobazam 10 mg	ktk/ 100 tab	73.900,00	59	4.360.100,00
90	fitomenadion tablet 10 mg	ktk/ 100 tab	81.800,00	29	2.372.200,00
Jumlah A					1.023.927.237,00
Puskesmas Kijang					
1	Anti Skabies (Permetrin) 5% krim 10 gr	tube	11.825,00	12	141.900,00
2	Amoksisilin kaplet 500 mg	kaplet	248,00	1.830	453.840,00
3	Asam Askorbat tablet 50 mg	tablet	120,00	800	96.000,00
4	Asiklovir krim 5 % @ 5 gram	tube	3.850,00	13	50.050,00
5	Cefadroksil 125 mg / 5 ml sirup kering @ 60ml	botol	4.360,00	30	130.800,00
6	Furosemid tablet 40 mg	tablet	79,00	600	47.400,00
7	Ibuprofen tablet 400 mg	tablet	242,00	100	24.200,00
8	Karbol (Fenol) Gliserol tetes telinga 10% @ 5 ml	botol	2.590,00	46	119.140,00
9	Kloramfenikol salap mata 1 % @ 3,5 g.	tube	1.925,00	13	25.025,00
10	Klobazam tab 10 mg	tablet	739,00	80	59.120,00
11	Klorpromazin HCl injeksi 25 mg / ml - 1 ml	ampul	1.425,00	30	42.750,00
12	Lidocain HCL 2% + Epinefrin 1:80.000 inj @ 2 ml	ampul	1.317,00	90	118.530,00
13	Metformin tablet 500 mg	tablet	102,00	200	20.400,00
14	Metformin tablet 500 mg	tablet	102,00	120	12.240,00
15	Natrium Bikarbonat tablet 500 mg	tablet	10,00	46	460,00
16	Nifedipin tablet 10 mg	tablet	149,00	440	65.560,00
17	Nistatin tablet vaginal 100.000 IU / g	tablet	645,00	46	29.670,00
18	Oksitetrasiklin HCl salap mata 1 % @ 3,5 g.	tube	2.600,00	18	46.800,00
19	Oksitetrasiklin HCl salap 3 % 5 g	tube	1.760,00	21	36.960,00
20	Simvastatin tablet 10 mg	tablet	110,00	940	103.400,00
21	Cat Gut Plain No. 3/0 DS 19 mm	pcs	40.865,00	30	1.225.950,00
22	S i l k (Benang Bedah Sutera) No. 3/0 DS 19 mm	sachet	31.125,00	36	1.120.500,00
23	A C T (Artesunat 50 mg + Amodiaquin 200 mg) tablet	tablet	1.409,00	35	49.315,00
24	Amoksisilin sirup kering 250 mg / 5 ml	botol	3.846,00	16	61.536,00
25	Anti Bakteri DOEN salap komb : Basitrasin 500 IU/g + Polimiksin 1000 IU/g	tube	3.490,00	53	184.970,00
26	Furosemid tablet 40 mg	tablet	79,00	200	15.800,00
27	Glimepiride 2 mg	tablet	207,00	600	124.200,00
28	Griseofulvin 500 mg tab	tablet	1.040,00	275	286.000,00
29	Hyoscine-N-Butilbromide injeksi	ampul	10.120,00	37	374.440,00



	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
30	Larutan NaCl 0,225 %+ Dextrose 5 % (cairan 1 : 4) infus @ 500 ml.	botol	9.840,00	16	157.440,00
31	Lidocain HCL 2% + Epinefrin 1:80.000 inj @ 2 ml	ampul	1.317,00	50	65.850,00
32	Lidocain injeksi 2 % @ 2 ml	ampul	1.317,00	50	65.850,00
33	Ondansetron injeksi 4mg/2ml @ 2ml	ampul	1.258,00	20	25.160,00
34	Parasetamol syr 120mg / 5 ml @ 60 ml	botol	5.500,00	112	616.000,00
35	Parasetamol syr 120mg / 5 ml @ 60 ml	botol	5.500,00	134	737.000,00
36	Simvastatin 20 mg tablet	tablet	225,00	642	144.450,00
37	Gentamisin Sulfat tetes mata 0.3%	botol	4.885,00	7	34.195,00
38	Alcohol swab	pcs	105,00	400	42.000,00
39	Needle 23 G	pcs	311,00	225	69.975,00
40	Echant (etching)	set	113.850,00	1	113.850,00
41	Asiklovir krim 5 % @ 5 gram	tube	3.850,00	25	96.250,00
42	Amoksisilin kapsul 250 mg	kapsul	209,00	750	156.750,00
43	Amoksisilin sirup kering 125 mg / 5 ml	botol	5.111,00	23	117.553,00
44	Bisoprolol tablet 5 mg	tablet	316,00	200	63.200,00
45	Bromheksin tablet 8 mg	tablet	440,00	480	211.200,00
46	Cefotaksim injeksi 1 g	vial	4.706,00	10	47.060,00
47	Cetirizina kapsul 10 mg	kapsul	104,00	1.109	115.336,00
48	Cetirizina sirup 5 mg / 5 ml @ 60 ml	botol	3.861,00	10	38.610,00
49	Eugenol cairan 10 ml.	botol	21.648,00	2	43.296,00
50	Etil Klorida semprot @100 ml	botol	198.000,00	10	1.980.000,00
51	Etakridin (Rivanol) larutan 0,1 % @ 300 ml.	botol	3.450,00	3	10.350,00
52	Glimepiride tablet 1 mg	tablet	174,00	150	26.100,00
53	Gliseril Guayakolat tablet 100 mg	tablet	165,00	9.022	1.488.630,00
54	Ibuprofen tablet 400 mg	tablet	236,00	1.550	365.800,00
55	Kanamycin injeksi 1 gram	vial	12.100,00	16	193.600,00
56	Kalium Permanganat serbuk 5 g.	pot	5.149,00	21	108.129,00
57	Klorfeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg	tablet	24,00	130	3.120,00
58	Kotrimoksazol tab dewasa komb : Sulfametoksazol 800 mg+Trimetoprim 160 mg	kaplet	512,00	570	291.840,00
59	Natrium Diklofenak tab. 50 mg	tablet	136,00	1.200	163.200,00
60	Natrium Diklofenak tab. 25 mg	tablet	142,00	1.500	213.000,00
61	Pancreatin komb. Tablet	tablet	2.070,00	120	248.400,00
62	Simvastatin tablet 10 mg	tablet	110,00	1.900	209.000,00
63	Simvastatin tablet 10 mg	tablet	110,00	1.940	213.400,00
64	Bromheksin sirup 4mg/ 5ml 60 ml	botol	10.500,00	11	115.500,00
65	Domperidon tablet 10 mg	tablet	86,00	440	37.840,00
66	Griseofulvin tablet 125 mg, micronized	tablet	223,00	100	22.300,00
67	Gentian Violet larutan 1 % 10 ml	botol	3.476,00	12	41.712,00
68	Hidroklortiazida tablet 25 mg	tablet	178,00	365	64.970,00
69	Nifedipin tablet 10 mg	tablet	13,00	610	7.930,00
70	Omeprazol kapsul 20 mg	kapsul	426,00	900	383.400,00
71	Oksitetrasiklin HCl salap mata 1 % @ 3,5 g.	tube	2.600,00	73	189.800,00
72	Needle 24 G	pcs	311,00	310	96.410,00



Nama obat		Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
73	Lactobacillus	sachet	4.600,00	120	552.000,00
74	Serum Anti Bisa Ular I injeksi (ABU I) (im/iv) @ 5ml	vial	479.996,00	2	959.992,00
75	Simvastatin tablet 10 mg	tablet	110,00	7.000	770.000,00
76	Salbutamol tablet 2 mg	tablet	64,00	100	6.400,00
77	Klobazam tab 10 mg	tablet	739,00	100	73.900,00
Jumlah B					16.864.704,00
Puskesmas Kawal					
1	Furosemid tablet 40 mg	tablet	79,00	380	30.020,00
2	Zink tablet 20 mg	tablet	604,00	862	520.648,00
3	Piridoksin tablet 10 mg	tablet	141,00	414	58.374,00
4	Metformin tablet 500 mg	tablet	102,00	90	9.180,00
5	Hyoscine-N-Butilbromide tablet 10 mg	tablet	1.705,00	620	1.057.100,00
6	Prednison tablet	botol	79,00	107	8.453,00
7	Tes kehamilan	pcs	2.133,00	15	31.995,00
8	Kloramfenikol salep mata	tube	1.925,00	38	73.150,00
9	Acyclovir salep	tube	3.850,00	26	100.100,00
10	Vit A 100.00 lu	kapsul	327,00	50	16.350,00
11	Metformin tablet 500 mg	tablet	102,00	400	40.800,00
12	Natrium bikarbonat 500 mg	tablet	10,00	100	1.000,00
13	Tiamfenikol 500 mg	capsul	1.132,00	70	79.240,00
14	Larutan Eosin 2 % 100 ml	botol	183.228,00	4	732.912,00
15	Stik kolesterol	pcs	27.395,00	1	27.395,00
16	Stik asam urat	pcs	11.086,00	1	11.086,00
17	Nifedipin 10 mg	tablet	149,00	20	2.980,00
18	Ranitidine inj 25 mg/ml	ampul	1.155,00	97	112.035,00
19	Pyrantel pamoat suspensi 125 mg/5 ml	botol	11.050,00	2	22.100,00
20	Obat anti malaria/OAM (DHP)	tablet	2.000,00	77	154.000,00
21	Oksitetrasiklin salep mata	tube	2.600,00	24	62.400,00
22	OKsitetrasiklin salep kulit	tube	1.760,00	20	35.200,00
23	Asam askorbat 50 mg	tablet	120,00	48	5.760,00
24	Primakuin 15 mg	tablet	258,00	300	77.400,00
25	Amoksisillin 500 mg	kaplet	248,00	1.364	338.272,00
26	OAT Kategori 1 (FDC)	paket	430.539,00	2	861.078,00
27	Simvastatin 20 mg	tablet	225,00	695	156.375,00
28	Acyclovir tablet 200 mg	tablet	236,00	446	105.256,00
29	Larutan giemsa stain	botol	363.253,00	1	363.253,00
30	Hyoscine N Butilbromide injeksi	ampul	10.120,00	33	333.960,00
31	Antalgin injeksi	ampul	3.050,00	100	305.000,00
32	Haloperidol decanoat inj 50 mg/ml	ampul	101.300,00	5	506.500,00
33	Primakuin 15 mg	tablet	258,00	190	49.020,00
34	Phytomenadion inj	ampul	4.236,00	77	326.172,00
35	Larutan NaCl 0,225% + Dextrose 5 % infus	botol	9.840,00	44	432.960,00
36	Vit A 100.000 UI	capsul	327,00	200	65.400,00



	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
37	Kanamycin inj 1 gram	vial	16.000,00	10	160.000,00
38	Dexametasone inj	ampul	1.210,00	77	93.170,00
39	Anti bakteri DOEN : Basitrasin	tube	3.490,00	56	195.440,00
40	Betahistine tablet 6 mg	tablet	110,00	1.421	156.310,00
41	Larutan Ziehl niesen	paket	178.750,00	2	357.500,00
42	Cefixime 100 mg tab	tablet	1.650,00	7	11.550,00
43	Glimipirid 2 mg	tablet	207,00	250	51.750,00
44	RAPID TEST HIV lini 1 SD	pcs	85.894,00	50	4.294.700,00
45	Furosemid 40 mg tablet	tablet	79,00	910	71.890,00
46	Fero sulfat	tablet	43,00	120	5.160,00
47	Zink syr 20 mg	botol	3.285,00	2	6.570,00
48	PK	pcs	5.089,00	24	122.136,00
49	Cefotaxime inj	vial	225,00	25	5.625,00
50	Glimipirid 1 mg	tablet	236,00	40	9.440,00
51	Microlax	tube	18.883,00	27	509.841,00
52	ceterizine 10 mg tab	capsul	104,00	1.400	145.600,00
53	Ibuprofen 400 mg tab	tablet	242,00	1.099	265.958,00
54	Cetirizine 10 mg/5ml syr	botol	3.861,00	63	243.243,00
55	Ibuprofen suspensi 100 mg/5 ml	botol	2.858,00	3	8.574,00
56	Bisoprolol tab 5 mg	tablet	316,00	55	17.380,00
57	Acyclovir 5 % krim	tube	3.850,00	9	34.650,00
58	Griseril guaikolat 100 mg tab	tablet	165,00	2.130	351.450,00
59	dexametasone tab	tablet	160,00	730	116.800,00
60	amoxicillin sirup 125 mg/5 ml	botol	5.500,00	36	198.000,00
61	Amoxicillin 250 mg tab	capsul	209,00	650	135.850,00
62	Bromhexin tablet 8 mg	tablet	440,00	180	79.200,00
63	Etil klorida	botol	198.000,00	7	1.386.000,00
64	chloramfenikol salep mata	tube	1.925,00	14	26.950,00
65	loratadine tab	tablet	127,00	50	6.350,00
66	natrium dikofenak 25 mg	tablet	115,00	204	23.460,00
67	simvastatin10 mg	tablet	110,00	280	30.800,00
68	Rivanol	botol	3.450,00	4	13.800,00
69	Hydrochlortiazide 10 mg	tablet	178,00	100	17.800,00
70	Omeprazole 20 mg	tablet	147,00	876	128.772,00
71	Domperidone 10 mg	tablet	86,00	80	6.880,00
72	Salbutamol 2 mg	tablet	64,00	172	11.008,00
73	Bromhexin	botol	13.200,00	2	26.400,00
74	DHP PRIMAL	tablet	2.000,00	27	54.000,00
75	Dopamet	tablet	1.088,00	268	291.584,00
76	Oxytetracyclin salep mata	tube	2.600,00	35	91.000,00
77	Isoniazide 100 mg	tablet	79,00	100	7.900,00
78	Furosemide 10 mg	tablet	79,00	50	3.950,00
79	Domperidone 10 mg	tablet	86,00	2.130	183.180,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)	
Jumlah C				17.070.545,00	
Puskesmas Teluk Bintan					
1	Furosemid tablet 40 mg	tablet	79,00	52	4.108,00
2	Piridoksin tablet 10 mg	tablet	141,00	292	41.172,00
3	Zinc tablet dispersible 20 mg	tablet	604,00	85	51.340,00
4	S i l k (Benang Bedah Sutura) No. 3/0 DS 19 mm	sachet	31.125,00	1	31.125,00
5	Anti Skabies (Permetrin) 5% krim 10 gr	tube	11.825,00	4	47.300,00
6	Asiklovir krim 5 % @ 5 gram	tube	3.850,00	23	88.550,00
7	Natrium Bikarbonat tablet 500 mg	tablet	10,00	90	900,00
8	Salbutamol Nebules cairan ih 0.1% @ 2.5ml	ampul	10.725,00	6	64.350,00
9	Tiamfenikol kapsul 500 mg	capsul	1.132,00	100	113.200,00
10	Asam Asetil Salisilat (Asetosal) tablet 80 mg	tablet	99,00	10	990,00
11	Cefadroksil 125 mg / 5 ml sirup kering @ 60ml	botol	4.360,00	4	17.440,00
12	Ibuprofen tablet 400 mg	tablet	242,00	234	56.628,00
13	Karbol (Fenol) Gliserol tetes telinga 10% @ 5 ml	botol	2.590,00	13	33.670,00
14	Lidocain HCL 2% + Epinefrin 1:80.000 inj @ 2 ml	ampul	1.317,00	69	90.873,00
15	Nifedipin tablet 10 mg	tablet	149,00	40	5.960,00
16	Obat Anti Malaria/OAM (DHP)	tablet	2.000,00	9	18.000,00
17	Oksitetrasiklin HCl salap mata 1 % @ 3,5 g.	tube	2.600,00	40	104.000,00
18	Ranitidine Inj 25 mg/ml @ 2 ml	ampul	1.155,00	83	95.865,00
19	Vitamin B-Kompleks tablet	tablet	135,00	15	2.025,00
20	Alat Suntik Sekali Pakai 1 ml	pcs	1.614,00	3	4.842,00
21	Difenhidramin HCl injeksi 10 mg / ml - 1 ml	ampul	1.262,00	3	3.786,00
22	Infus Set Anak	set	9.504,00	7	66.528,00
23	Hyoscine-N-Butilbromide injeksi	ampul	10.120,00	10	101.200,00
24	Primakuin tablet 15 mg	tablet	258,00	100	25.800,00
25	Sianokobalamin injeksi 500 mcg/ml - 1 ml	ampul	1.160,00	1	1.160,00
26	Mask (sungkup) oksigen anak	pcs	8.400,00	1	8.400,00
27	Anti Bakteri DOEN salap komb : Basitrasin 500 IU/g + Polimiksin 1000 IU/g	tube	3.490,00	9	31.410,00
28	Betahistin Mesilat tablet 6 mg	tablet	110,00	120	13.200,00
29	Deksametason injeksi 5 mg / ml - 1 ml	ampul	1.210,00	16	19.360,00
30	Furosemid tablet 40 mg	tablet	79,00	100	7.900,00
31	Kanamycin injeksi 1 gram	vial	16.000,00	10	160.000,00
32	Lidocain HCL 2% + Epinefrin 1:80.000 inj @ 2 ml	ampul	1.317,00	19	25.023,00
33	Zinc tablet dispersible 20 mg	tablet	604,00	300	181.200,00
34	Kasa hidofil 36 x 80 cm	roll	143.500,00	1	143.500,00
35	Asiklovir krim 5 % @ 5 gram	tube	3.850,00	3	11.550,00
36	Cetirizina kapsul 10 mg	kapsul	104,00	24	2.496,00
37	Ibuprofen tablet 400 mg	tablet	242,00	200	48.400,00
38	Kotrimoksazol tab dewasa komb : Sulfametoksazol 800 mg+Trimetoprim 160 mg	kaplet	512,00	100	51.200,00
39	Natrium laurilsulfoasetat, Natrium sulfat, Sorbitol, PEG 400 enema @ 5 ml	Tube	18.883,00	3	56.649,00
40	Amoksisilin sirup kering 125 mg / 5 ml	botol	5.500,00	1	5.500,00
41	Etil Klorida semprot @100 ml	botol	198.000,00	5	990.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Nama obat		Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
42	Pancreatin komb. Tablet	tablet	3.080,00	68	209.440,00
43	Needle 24 G	pcs	311,00	70	21.770,00
44	Tumpatan sementara	set	250.900,00	1	250.900,00
45	Kloramfenikol salap mata 1 % @ 3,5 g.	tube	1.925,00	4	7.700,00
46	Aqua Pro Injeksi steril 25 ml	botol	2.860,00	5	14.300,00
47	Hidroklortiazida tablet 25 mg	tablet	178,00	40	7.120,00
48	Obat Anti Malaria/OAM (DHP)	tablet	2.000,00	18	36.000,00
49	Serum Anti Bisa Ular I injeksi (ABU I) (im/iv) @ 5ml	vial	479.996,00	1	479.996,00
50	Lactobacillus	sachet	4.950,00	12	59.400,00
51	Domperidon tablet 10 mg	tablet	86,00	47	4.042,00
52	Simvastatin tablet 10 mg	tablet	110,00	230	25.300,00
53	Stick kolesterol	pcs	27.395,00	80	2.191.600,00
54	Rapid test for Dengue IgG/IgM	pcs	22.631,00	24	543.144,00
55	Fero Sulfat tablet 300 mg (tablet tambah darah)	tablet	43,00	870	37.410,00
56	Rapid test HIV Lini I	pcs	85.894,00	38	3.263.972,00
57	Rapid test sipilis	pcs	13.904,00	13	180.752,00
58	Rapid test HIV Lini I	pcs	85.894,00	75	6.442.050,00
59	Rapid Test Covid-19 (Panbio)	pcs	73.000,00	138	10.074.000,00
Jumlah D					26.675.496,00
Puskesmas Sri Bintan					
1	Amoksisilin kaplet 500 mg	kaplet	248,00	1.861	461.528,00
2	Amoksisilin kaplet 500 mg	kaplet	248,00	150	37.200,00
3	Amoksisilin sirup kering 125 mg / 5 ml	botol	5.500,00	115	632.500,00
4	Anti Bakteri DOEN salap komb : Basitrasin 500 IU/g + Polimiksin 1000 IU/g	tube	3.490,00	65	226.850,00
5	Anti Skabies (Permetrin) 5% krim 10 gr	tube	11.825,00	3	35.475,00
6	Aqua Dest Steril 500 ml	botol	12.100,00	1	12.100,00
7	Asam Asetil Salisilat (Asetosal) tablet 80 mg	tablet	99,00	100	9.900,00
8	Asam Askorbat tablet 50 mg	tablet	120,00	5.210	625.200,00
9	Asiklovir krim 5 % @ 5 gram	tube	3.850,00	4	15.400,00
10	Asiklovir krim 5 % @ 5 gram	tube	3.850,00	28	107.800,00
11	Asiklovir krim 5 % @ 5 gram	tube	3.850,00	14	53.900,00
12	Betametason Krem 0,1 % @ 5 g	tube	1.373,00	4	5.492,00
13	Bromheksin tablet 8 mg	tablet	440,00	120	52.800,00
14	Cefadroksil 125 mg / 5 ml sirup kering @ 60ml	botol	4.360,00	4	17.440,00
15	Cetirizina kapsul 10 mg	kapsul	104,00	100	10.400,00
16	Cetirizina sirup 5 mg / 5 ml @ 60 ml	botol	3.861,00	6	23.166,00
17	Deksametason injeksi 5 mg / ml - 1 ml	ampul	1.210,00	49	59.290,00
18	Difenhidramin HCl injeksi 10 mg / ml - 1 ml	ampul	1.262,00	45	56.790,00
19	Etakridin (Rivanol) larutan 0,1 % @ 300 ml.	botol	3.450,00	5	17.250,00
20	Fitomenadion (Vitamin K1) 2 mg/ml injeksi	ampul	4.236,00	35	148.260,00
21	Fitomenadion (Vitamin K1) tablet salut gula 10 mg	tablet	818,00	140	114.520,00
22	Furosemid tablet 40 mg	tablet	79,00	160	12.640,00
23	Furosemid tablet 40 mg	tablet	79,00	200	15.800,00



	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
24	Gliseril Guayakolat tablet 100 mg	tablet	165,00	2.490	410.850,00
25	Griseofulvin 500 mg tab	tablet	223,00	160	35.680,00
26	Hidroklortiazida tablet 25 mg	tablet	178,00	300	53.400,00
27	Hidrokortison krim 2,5 % @ 5g.	tube	2.533,00	4	10.132,00
28	Ibuprofen 400 mg	tablet	113,00	50	5.650,00
29	Ibuprofen Suspensi 100 mg / 5 ml	botol	2.858,00	5	14.290,00
30	Jelly USG @ 250 g	botol	14.472,00	1	14.472,00
31	Kalium Permanganat serbuk 5 g.	pot	5.500,00	18	99.000,00
32	Kanamycin injeksi 1 gram	vial	16.000,00	14	224.000,00
33	Karbol (Fenol) Gliserol tetes telinga 10% @ 5 ml	botol	2.590,00	51	132.090,00
34	Ketokonazol tablet 200 mg	tablet	305,00	30	9.150,00
35	Kloramfenikol salap mata 1 % @ 3,5 g.	tube	1.925,00	31	59.675,00
36	Lidocain injeksi 2 % @ 2 ml	ampul	1.317,00	2	2.634,00
37	Lidocain HCL 2% + Epinefrin 1:80.000 inj @ 2 ml	ampul	1.317,00	60	79.020,00
38	Lidocain injeksi 2 % @ 2 ml	Ampul	1.317,00	6	7.902,00
39	Lidocain injeksi 2 % @ 2 ml	ampul	1.317,00	2	2.634,00
40	Lidocain injeksi 2 % @ 2 ml	Ampul	1.317,00	6	7.902,00
41	Lidocain injeksi 2 % @ 2 ml	ampul	1.317,00	203	267.351,00
42	Metformin tablet 500 mg	tablet	102,00	100	10.200,00
43	Metformin tablet 500 mg	tablet	102,00	420	42.840,00
44	Metoklopramid injeksi 5 mg/ml @ 2 ml	ampul	3.904,00	2	7.808,00
45	Metoklopramid tablet 10 mg	tablet	83,00	30	2.490,00
46	Mikonazol krim 2 % @ 10 g	tube	3.926,00	1	3.926,00
47	Natrium Bikarbonat tablet 500 mg	tablet	10,00	200	2.000,00
48	Needle Terumo 24 G	pcs	311,00	10	3.110,00
49	Nifedipin tablet 10 mg	tablet	149,00	2.090	311.410,00
50	Nifedipin tablet 10 mg	tablet	149,00	350	52.150,00
51	Obat Anti Malaria/OAM (DHP)	tablet	2.000,00	63	126.000,00
52	Obat Batuk Hitam (O B H) sirup 100 ml.	botol	5.500,00	18	99.000,00
53	Ondansetron injeksi 4mg/2ml @ 2ml	ampul	1.258,00	3	3.774,00
54	Oksitetrasiklin HCl salap 3 % 5 g	tube	1.760,00	67	117.920,00
55	Oksitetrasiklin HCl salap mata 1 % @ 3,5 g.	tube	2.600,00	34	88.400,00
56	Parasetamol syr 120mg / 5 ml @ 60 ml	botol	5.500,00	74	407.000,00
57	Piridoksin tablet 10 mg	tablet	141,00	540	76.140,00
58	Piridoksin tablet 10 mg	tablet	141,00	80	11.280,00
59	Prednison tablet 5 mg	tablet	79,00	520	41.080,00
60	Ranitidine Inj 25 mg/ml @ 2 ml	ampul	1.155,00	100	115.500,00
61	Rapid test for Dengue IgG/IgM	pcs	22.631,00	9	203.679,00
62	Rapid test for Dengue Ns1	pcs	34.890,00	25	872.250,00
63	Rapid test for Malaria Pan/Pf	pcs	47.397,00	50	2.369.850,00
64	Rapid test HIV ½	pcs	15.377,00	13	199.901,00
65	Rapid test HIV ½	pcs	15.377,00	5	76.885,00
66	Salbutamol Nebules cairan ih 0.1% @ 2.5ml	ampul	10.725,00	10	107.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Nama obat		Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
67	Sianokobalamin injeksi 500 mcg/ml - 1 ml	ampul	1.160,00	13	15.080,00
68	Simvastatin 20 mg tablet	tablet	225,00	95	21.375,00
69	Simvastatin tablet 10 mg	tablet	110,00	240	26.400,00
70	Simvastatin tablet 10 mg	tablet	110,00	2.700	297.000,00
71	Vitamin B-Kompleks tablet	tablet	135,00	584	78.840,00
72	Zinc tablet dispersible 20 mg	tablet	604,00	120	72.480,00
Jumlah E					10.050.551,00
Puskesmas Tanjung Uban					
1	Piridoksin tablet 10 mg	tablet	141,00	1.400	197.400,00
2	Prednison tablet 5 mg	tablet	79,00	998	78.842,00
3	Piridoksin tablet 10 mg	tablet	141,00	1.200	169.200,00
4	Besi (Fe) 15 mg per 15 ml suspensi 120 ml	botol	44.000,00	20	880.000,00
5	Stick kolesterol	pcs	27.395,00	40	1.095.800,00
6	Amoksisilin kaplet 500 mg	kaplet	248,00	3.550	880.400,00
7	Aminofilin tablet 200 mg	tablet	101,00	100	10.100,00
8	Obat Anti Malaria/OAM (DHP)	tablet	2.000,00	9	18.000,00
9	Lidocain HCL 2% + Epinefrin 1:80.000 inj @ 2 ml	ampul	1.317,00	257	338.469,00
10	Pirantel pamoat suspensi 125 mg/ 5 ml	botol	11.050,00	10	110.500,00
11	Amoksisilin sirup kering 125 mg / 5 ml	botol	5.500,00	68	374.000,00
12	Obat Anti Malaria/OAM (DHP)	tablet	2.000,00	72	144.000,00
13	Parasetamol syr 120mg / 5 ml @ 60 ml	botol	5.500,00	290	1.595.000,00
14	Simvastatin 20 mg tablet	tablet	225,00	500	112.500,00
15	Griseofulvin 500 mg tab	tablet	1.040,00	200	208.000,00
16	Fitomenadion (Vitamin K1) 2 mg/ml injeksi	ampul	4.236,00	26	110.136,00
17	Betahistin Mesilat tablet 6 mg	tablet	110,00	800	88.000,00
18	Anti Bakteri DOEN salap komb : Basitrasin 500 IU/g + Polimiksin 1000 IU/g	tube	3.490,00	25	87.250,00
19	Glimepiride 2 mg	tablet	207,00	600	124.200,00
20	Cetirizina kapsul 10 mg	kapsul	104,00	150	15.600,00
21	Cetirizina sirup 5 mg / 5 ml @ 60 ml	botol	3.861,00	24	92.664,00
22	Klorfeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg	tablet	26,00	100	2.600,00
23	Kotrimoksazol tab dewasa komb : Sulfametoksazol 800 mg+Trimetoprim 160 mg	kaplet	512,00	80	40.960,00
24	Cefotaksim injeksi 1 g	vial	4.706,00	10	47.060,00
25	Amoksisilin capsul 250 mg	kapsul	209,00	200	41.800,00
26	Amoksisilin sirup kering 125 mg / 5 ml	botol	5.500,00	33	181.500,00
27	Simvastatin tablet 10 mg	tablet	110,00	7.140	785.400,00
28	Fitomenadion (Vitamin K1) tablet salut gula 10 mg	tablet	818,00	100	81.800,00
29	Serum Anti Bisa Ular I injeksi (ABU I) (im/iv) @ 5ml	vial	479.996,00	1	479.996,00
30	Stick kolesterol	pcs	27.395,00	200	5.479.000,00
31	Simvastatin tablet 10 mg	tablet	110,00	9.720	1.069.200,00
Jumlah F					14.939.377,00
Puskesmas Tambelan					
1	plester anti air (25 cmx 10 cm)	pcs	14.459,00	10	144.590,00
2	folley cateter no 14	pcs	20.450,00	1	20.450,00



Nama obat		Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
3	folley cateter no 16	pcs	20.450,00	10	204.500,00
4	silk no 3/0	pcs	31.125,00	45	1.400.625,00
5	Nifedipin	Tablet	130,00	1.200	156.000,00
7	Cefadroksil syr 250mg	Botol	5.660,00	2	11.320,00
8	Cefadroksil syr 250mg	Botol	5.660,00	24	135.840,00
9	cefadroksil syr 125 mg	Botol	4.360,00	4	17.440,00
10	oksitetrasiklin salep mata	tube	2.600,00	43	111.800,00
11	simvastatin 10 mg	Tablet	330,00	270	89.100,00
12	simvastatin 10 mg	tablet	330,00	2.940	970.200,00
13	Domperidone	Tablet	86,00	370	31.820,00
14	Domperidone	Tablet	86,00	300	25.800,00
15	rapid tes shipilis	kotak	232.500,00	10	2.325.000,00
16	ferro susp	Botol	12.270,00	3	36.810,00
17	eflin syr	Botol	22.425,00	17	381.225,00
18	vitamin B 6	Tablet	141,00	340	47.940,00
19	vitamin B 6	Tablet	141,00	20	2.820,00
20	Zinc	Tablet	497,00	100	49.700,00
21	prednison 5 mg	Tablet	79,00	120	9.480,00
22	Betahistin	Tablet	110,00	50	5.500,00
23	Attapulgit	Tablet	187,00	10	1.870,00
24	Metilprednisolon	Tablet	139,00	10	1.390,00
25	kloramfenikol salep mata	tube	1.925,00	8	15.400,00
26	miconazole salep	tube	3.926,00	2	7.852,00
27	rivanol 300 ml	Botol	3.450,00	9	31.050,00
28	etil klorid	botol	182.965,00	5	914.825,00
29	stik glukosa(human)	kotak	258.100,00	1	258.100,00
30	stik kolestrol (human)	kotak	550.200,00	2	1.100.400,00
31	needle terumo(24GX1)	kotak	139.150,00	2	278.300,00
32	Phytomenadion 2 mg/ml	ampul	4.236,00	30	127.080,00
33	Rapid HIV ½	pcs	15.377,00	50	768.850,00
34	Rdt malaria	kotak	449.975,00	6	2.699.850,00
35	Hidroclortiazid	Tablet	178,00	100	17.800,00
36	cefixime 100 mg	kapsul	923,00	50	46.150,00
37	cefixime 100 mg	kapsul	923,00	260	239.980,00
38	ibuprofen 200 mg	tablet	112,00	30	3.360,00
39	Domperidone	Tablet	86,00	40	3.440,00
40	Betahistin	Tablet	110,00	41	4.510,00
41	Loperamide	Tablet	171,00	8	1.368,00
42	captopril 25 mg	Tablet	144,00	14	2.016,00
43	Betahistin	Tablet	110,00	58	6.380,00
44	tablet tambah darah	Tablet	409,00	70	28.630,00
45	stik glukosa (easy touch)	pcs	5.162,00	125	645.250,00
46	stik asam urat (easy touch)	kotak	556.600,00	3	1.669.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Nama obat		Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
47	abocath no 20	pcs	12.631,00	2	25.262,00
48	amoksilin syr 125 mg	botol	5.111,00	4	20.444,00
49	ferro susp	Botol	40.250,00	2	80.500,00
50	zinc zulfat syr	botol	3.285,00	6	19.710,00
51	cefadrokisil syr 250 mg/5 ml+B80	Botol	5.660,00	24	135.840,00
Jumlah G					15.333.367,00
Puskesmas Teluk Seborg					
1	Asiklovir tablet 200 mg	tablet	236,00	300	70.800,00
2	Piridoksin tablet 10 mg	tablet	141,00	200	28.200,00
3	Prednison tablet 5 mg	tablet	79,00	1.000	79.000,00
4	Metformin tablet 500 mg	tablet	102,00	1.000	102.000,00
5	Oksitetrasiklin HCl salap mata 1 % @ 3,5 g.	tube	2.600,00	25	65.000,00
6	Amoksisilin kaplet 500 mg	kaplet	248,00	1.300	322.400,00
7	Asam Askorbat tablet 50 mg	tablet	120,00	1.800	216.000,00
8	Ibuprofen tablet 400 mg	tablet	242,00	300	72.600,00
9	Nifedipin tablet 10 mg	tablet	149,00	600	89.400,00
10	Ranitidine Inj 25 mg/ml @ 2 ml	ampul	1.155,00	99	114.345,00
11	Lidocain injeksi 2 % @ 2 ml	ampul	1.317,00	24	31.608,00
12	Ondansetron injeksi 4mg/2ml @ 2ml	ampul	1.258,00	5	6.290,00
13	Asiklovir tablet 200 mg	tablet	236,00	150	35.400,00
14	Griseofulvin 500 mg tab	tablet	1.040,00	100	104.000,00
15	Cetirizina kapsul 10 mg	kapsul	104,00	200	20.800,00
16	Ibuprofen Suspensi 100 mg / 5 ml	botol	2.858,00	12	34.296,00
17	Bromheksin tablet 8 mg	tablet	440,00	50	22.000,00
18	Gliseril Guayakolat tablet 100 mg	tablet	165,00	2.500	412.500,00
19	Simvastatin tablet 10 mg	tablet	110,00	800	88.000,00
20	Omeprazol kapsul 20 mg	kapsul	147,00	180	26.460,00
21	Nifedipin tablet 10 mg	tablet	149,00	200	29.800,00
22	Rapid Test Corona Virus	pcs	73.000,00	151	11.023.000,00
23	Simvastatin tablet 10 mg	tablet	110,00	3.360	369.600,00
Jumlah H					13.363.499,00
Puskesmas Berakit					
1	Furosemid tablet 40 mg	tablet	79,00	140	11.060,00
2	S i l k (Benang Bedah Sutura) No. 3/0 DS 19 mm	sachet	31.125,00	7	217.875,00
3	Zinc tablet dispersible 20 mg	tablet	604,00	69	41.676,00
4	Cat Gut Chromic No. 3/0 DS 19 mm	pcs	41.685,00	3	125.055,00
5	Piridoksin tablet 10 mg	tablet	141,00	141	19.881,00
6	Metformin tablet 500 mg	tablet	102,00	168	17.136,00
7	Simvastatin tablet 10 mg	tablet	110,00	130	14.300,00
8	Glimepiride tablet 1 mg	tablet	174,00	100	17.400,00
9	Salbutamol Nebules cairan ih 0.1% @ 2.5ml	ampul	10.725,00	3	32.175,00
10	A C T (Artesunat 50 mg + Amodiaquin 200 mg) tablet	tablet	1.409,00	27	38.043,00
11	Amoksisilin kaplet 500 mg	kaplet	248,00	368	91.264,00



	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
12	Asam Askorbat tablet 50 mg	tablet	120,00	370	44.400,00
13	I.V. Catheter Nomor 20	pcs	12.631,00	2	25.262,00
14	Ranitidine Inj 25 mg/ml @ 2 ml	ampul	1.155,00	23	26.565,00
15	Lidocain HCL 2% + Epinefrin 1:80.000 inj @ 2 ml	ampul	1.317,00	22	28.974,00
16	Karbol (Fenol) Gliserol tetes telinga 10% @ 5 ml	botol	2.590,00	1	2.590,00
17	Cefadroksil 125 mg / 5 ml sirup kering @ 60ml	botol	4.360,00	10	43.600,00
18	Pirantel pamoat suspensi 125 mg/ 5 ml	botol	11.050,00	1	11.050,00
19	Prednison tablet 5 mg	tablet	79,00	62	4.898,00
20	Kloramfenikol salap mata 1 % @ 3,5 g.	tube	1.925,00	4	7.700,00
21	Plester Tahan Air (25 cm x 10 cm)	pcs	14.459,00	2	28.918,00
22	Pirantel pamoat suspensi 125 mg/ 5 ml	botol	11.050,00	3	33.150,00
23	Cat Gut Chromic No. 3/0 DS 19 mm	pcs	41.685,00	6	250.110,00
24	Larutan infus Glukosa 5% steril @ 500 ml	botol	6.900,00	2	13.800,00
25	Simvastatin 20 mg tablet	tablet	225,00	80	18.000,00
26	Larutan infus Glukosa 40% steril	botol	1.525,00	1	1.525,00
27	Rapid test for Malaria Pf dan Pv	pcs	53.260,00	13	692.380,00
28	Oksitetrasiklin HCl salap 3 % 5 g	tube	1.760,00	24	42.240,00
29	Metampiron (Antalgin) tablet 500 mg	tablet	242,00	100	24.200,00
30	Natrium Heparina gel @ 20 g	tube	54.450,00	1	54.450,00
31	Asiklovir tablet 400 mg	tablet	425,00	110	46.750,00
32	Epinefrin HCl (Adrenalin) inj 0,1 % - 1 ml	ampul	1.518,00	7	10.626,00
33	Parasetamol syr 120mg / 5 ml @ 60 ml	botol	5.500,00	105	577.500,00
34	Simvastatin 20 mg tablet	tablet	225,00	70	15.750,00
35	Lidocain injeksi 2 % @ 2 ml	ampul	1.317,00	134	176.478,00
36	Asiklovir tablet 200 mg	tablet	236,00	27	6.372,00
37	Larutan Ziehl Nielsen	paket	178.750,00	4	715.000,00
38	Kanamycin injeksi 1 gram	vial	16.000,00	6	96.000,00
39	Diazepam injeksi 5 mg / ml - 2 ml	ampul	1.913,00	10	19.130,00
40	Povidon Iodida 10 % 30 ml	botol	3.335,00	4	13.340,00
41	Obat Anti Tuberkulosis Kategori I (FDC)	paket	430.539,00	1	430.539,00
42	Metampiron (Antalgin) injeksi 500 mg /1 ml	ampul	3.050,00	78	237.900,00
43	Lidocain HCL 2% + Epinefrin 1:80.000 inj @ 2 ml	ampul	1.317,00	26	34.242,00
44	Hyoscine-N-Butilbromide injeksi	ampul	10.120,00	15	151.800,00
45	Metoklopramid injeksi 5 mg/ml @ 2 ml	ampul	3.904,00	2	7.808,00
46	Cefadroksil 250 mg / 5 ml sirup kering @ 60 ml	botol	5.826,00	5	29.130,00
47	Primakuin tablet 15 mg	tablet	258,00	13	3.354,00
48	Attapulgit tablet 600 mg	tablet	187,00	19	3.553,00
49	Jelly USG @ 250 g	botol	14.472,00	2	28.944,00
50	Obat Anti Tuberkulosis Kategori II (FDC)	paket	1.492.574,00	1	1.492.574,00
51	Amoksisilin sirup kering 125 mg / 5 ml	botol	5.500,00	39	214.500,00
52	Natrium Diklofenak tab. 25 mg	tablet	142,00	570	80.940,00
53	Etil Klorida semprot @100 ml	botol	198.000,00	10	1.980.000,00
54	Gliseril Guayakolat tablet 100 mg	tablet	165,00	744	122.760,00



Nama obat		Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
55	Klorfeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg	tablet	26,00	519	13.494,00
56	Simvastatin tablet 10 mg	tablet	110,00	330	36.300,00
57	Loratadin tablet 10 mg	tablet	127,00	10	1.270,00
58	Ibuprofen Suspensi 100 mg / 5 ml	botol	2.858,00	2	5.716,00
59	Diazepam tablet 5 mg	tablet	114,00	90	10.260,00
60	Natrium laurilsulfoasetat, Natrium sulfat, Sorbitol, PEG 400 enema @ 5 ml	Tube	18.883,00	3	56.649,00
61	Deksametason tablet 0,5 mg	tablet	160,00	50	8.000,00
62	Bromheksin tablet 8 mg	tablet	440,00	10	4.400,00
63	Amoksisilin kapsul 250 mg	kapsul	209,00	30	6.270,00
64	Ciprofloksasin kaplet 500 mg	kaplet	572,00	30	17.160,00
Jumlah I					8.634.186,00
Puskesmas Toapaya					
1	ACT tab	Tablet	1.409,00	6	8.454,00
2	Amoksisillin tab 500mg	Tablet	248,00	980	243.040,00
3	Asam Salisilat /Miniasi	Tablet	99,00	10	990,00
4	Asiklovir tab 200 mg	Tablet	236,00	45	10.620,00
5	Asiklovir zalf	tube	3.850,00	21	80.850,00
6	Besi Syrup	Botol	40.250,00	2	80.500,00
7	Furosemid tab	Tablet	79,00	140	11.060,00
8	Karbol Fenol Gliserol	Botol	2.590,00	11	28.490,00
9	Kloramfenicol zalf mata	tube	1.925,00	4	7.700,00
10	Lidocain HCl + Epinefrin	Ampul	1.317,00	30	39.510,00
11	Natrium Bicarbonat	Tablet	10,00	100	1.000,00
12	Oksitetrasiklin zalf kulit	tube	1.600,00	22	35.200,00
13	Oksitetrasiklin zalf mata	tube	2.600,00	4	10.400,00
14	Piridoksin tab	Tablet	141,00	290	40.890,00
15	Pyrantel Pamoat syr	Botol	11.050,00	5	55.250,00
16	Ranitidin injeksi	Ampul	1.155,00	95	109.725,00
17	Simvastatin tab 10 mg	Tablet	110,00	540	59.400,00
18	S I L K	pcs	3.150,00	26	81.900,00
19	Bisturi	pcs	3.150,00	29	91.350,00
20	Chlorpromazin inj	Ampul	1.425,00	28	39.900,00
21	OAT KATEGORI 1	Paket	430.539,00	3	1.291.617,00
22	Isoniazid tab 300mg	Tablet	170,00	80	13.600,00
23	Lidocain composite	Ampul	1.317,00	30	39.510,00
24	Deksamethasone inj	Ampul	1.210,00	20	24.200,00
25	Phytomenadion / Vit K inj 2 mg	Ampul	4.236,00	8	33.888,00
26	Furosemid tab	Tablet	79,00	400	31.600,00
27	Primaquin tab	Tablet	258,00	100	25.800,00
28	Grisefulvin tab 500mg	Tablet	1.040,00	270	280.800,00
29	Metoclopramid injeksi	Ampul	3.904,00	2	7.808,00
30	Tablet tambah darah (PROGRAM)	Tablet	43,00	42.320	1.819.760,00
31	Amoksisillin kaps 250mg	Kapsul	209,00	75	15.675,00



Nama obat		Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
32	Cefadroksil syr 250mg	botol	5.826,00	41	238.866,00
33	Cetirizin tab	Tablet	104,00	300	31.200,00
34	Cetirizin syr	botol	3.861,00	16	61.776,00
35	Etil Chlorida	botol	198.000,00	16	3.168.000,00
36	Etamoxul tab	Tablet	512,00	95	48.640,00
37	Eugenol	botol	21.648,00	1	21.648,00
38	Gliseril Guaykolat	Tablet	165,00	483	79.695,00
39	Ibuprofen susp	botol	2.858,00	1	2.858,00
40	Etakridin /Rivanol	botol	3.450,00	4	13.800,00
41	Ibuprofen tab 400mg	Tablet	242,00	240	58.080,00
42	Kalium Permanganat	pot	5.500,00	6	33.000,00
43	Kanamycin inj	vial	16.000,00	25	400.000,00
44	Natrium Diclofenac 50mg	Tablet	136,00	140	19.040,00
45	Pancreatin tab	Tablet	3.080,00	120	369.600,00
46	Bisturi	pcs	3.150,00	59	185.850,00
47	Infus set anak	set	9.504,00	10	95.040,00
48	Simvastatin tab 10 mg	Tablet	110,00	1.150	126.500,00
49	Larutan Rees ecker	botol	75.900,00	1	75.900,00
50	Larutan Zeihl Nelsen	paket	178.750,00	2	357.500,00
51	Amoksisillin syr 250mg/ml	botol	3.846,00	8	30.768,00
52	Larutan KOH	botol	56.900,00	2	113.800,00
53	Nipedifin tab	Tablet	149,00	120	17.880,00
54	Sinvastatin tab 10mg	Tablet	110,00	3.760	413.600,00
55	Rapid test Syphilis	pcs	13.904,00	50	695.200,00
56	Hidroclortiazida 25mg	Tablet	178,00	100	17.800,00
57	Oksitetrasiklin zalf mata	tube	2.600,00	40	104.000,00
58	A C T (Artesunat 50 mg + Amodiaquin 200 mg) tablet	ktk/9 tab	12.681,00	1	12.681,00
59	Lactobacillus	sachet	4.950,00	15	74.250,00
60	Formula - 100 (Program Gizi)	sachet	5.700,00	204	1.162.800,00
61	Formula - 75 (Program Gizi)	sachet	5.692,00	63	358.596,00
62	Multivitamin Taburia (Program Gizi)	sachet	1.018,00	390	397.020,00
Jumlah J					13.405.875,0
Puskesmas Mantang					
1	Aminofilin tablet 200 mg	Tablet	101,00	300	30.300,00
2	Amoksisilin kaplet 500 mg	kapsul	248,00	641	158.968,00
3	Anti Bakteri DOEN salap komb : Basitrasin 500 IU/g + Polimiksin 1000 IU/g	Tube	3.490,00	26	90.740,00
4	Anti Malaria DOEN kombinasi : Pirimetamin 25 mg + Sulfadoksin 500 mg	Tablet	546,00	39	21.294,00
5	Anti Skabies (Permetrin) 5% krim 10 gr	Tube	11.825,00	4	47.300,00
6	Asam Asetil Salisilat (Asetosal) tablet 80 mg	Tablet	99,00	18	1.782,00
7	Asam Askorbat tablet 50 mg	Tablet	120,00	399	47.880,00
8	Asetil sisteina 200 mg kapsul	Kapsul	440,00	120	52.800,00
9	Asiklovir tablet 400 mg	Tablet	425,00	17	7.225,00
10	Betahistin Mesilat tablet 6 mg	Tablet	110,00	56	6.160,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
11	Bromheksin tablet 8 mg	Tablet	440,00	140	61.600,00
12	Cefadrosil 125 mg / 5 ml sirup kering @ 60ml	Botol	4.360,00	30	130.800,00
13	Cefixime 100 mg/5 ml sirup kering @ 30ml	Botol	18.700,00	15	280.500,00
14	Deksametason injeksi 5 mg / ml - 1 ml	Ampul	1.210,00	30	36.300,00
15	Difenhidramin HCl injeksi 10 mg / ml - 1 ml	Ampul	1.262,00	5	6.310,00
16	Digoksin tablet 0,25 mg	Tablet	104,00	300	31.200,00
17	Fero Sulfat tablet 300 mg (tablet tambah darah)	Tablet	43,00	224	9.632,00
18	Fitomenadion (Vitamin K1) 2 mg/ml injeksi	Ampul	4.236,00	25	105.900,00
19	Furosemid tablet 40 mg	Tablet	79,00	246	19.434,00
20	Furosemid tablet 40 mg	Tablet	79,00	180	14.220,00
21	Glimepiride 2 mg	Tablet	207,00	173	35.811,00
22	Griseofulvin 500 mg tab	Tablet	1.040,00	274	284.960,00
23	Hyoscine-N-Butilbromide injeksi	Vial	10.120,00	14	141.680,00
24	I.V. Catheter Nomor 22	Pcs	12.631,00	2	25.262,00
25	Ibuprofen tablet 400 mg	Tablet	242,00	100	24.200,00
26	Kanamycin injeksi 1 gram	Vial	16.000,00	7	112.000,00
27	Karbol (Fenol) Gliserol tetes telinga 10% @ 5 ml	Botol	2.590,00	5	12.950,00
28	Kloramfenikol salap mata 1 % @ 3,5 g.	Tube	1.925,00	9	17.325,00
29	Larutan infus Glukosa 5% steril @ 500 ml	Botol	6.900,00	20	138.000,00
30	Lidocain HCL 2% + Epinefrin 1:80.000 inj @ 2 ml	Ampul	1.317,00	52	68.484,00
31	Magnesium Sulfat injeksi (IV) 40 % - 25 ml	Ampul	3.650,00	4	14.600,00
32	Meloksikam kapsul 15 mg	kapsul	1.210,00	10	12.100,00
33	Metampiron (Antalgin) injeksi 500 mg /1 ml	Ampul	3.050,00	77	234.850,00
34	Metformin tablet 500 mg	Tablet	102,00	745	75.990,00
35	Natrium Bikarbonat tablet 500 mg	Tablet	10,00	100	1.000,00
36	Nifedipin tablet 10 mg	Tablet	149,00	49	7.301,00
37	Obat Anti Tuberkulosis Kategori I (FDC)	Paket	430.539,00	2	861.078,00
38	Oksitetrasiklin HCl salap 3 % 5 g	Tube	1.760,00	13	22.880,00
39	Oksitetrasiklin HCl salap mata 1 % @ 3,5 g.	Tube	2.600,00	25	65.000,00
40	Omeprazole inj 40 mg/ 10 ml	Ampul	11.245,00	6	67.470,00
41	Parasetamol syr 120mg / 5 ml @ 60 ml	Botol	5.500,00	143	786.500,00
42	Piridoksin tablet 10 mg	Tablet	141,00	160	22.560,00
43	Piridoksin tablet 10 mg	Tablet	141,00	180	25.380,00
44	Primakuin tablet 15 mg	Tablet	258,00	125	32.250,00
45	Ranitidine Inj 25 mg/ml @ 2 ml	Ampul	1.155,00	164	189.420,00
46	Ranitidine tablet 150 mg	Tablet	220,00	15	3.300,00
47	Sianokobalamin injeksi 500 mcg/ml - 1 ml	Ampul	1.160,00	35	40.600,00
48	Simvastatin 20 mg tablet	Tablet	225,00	268	60.300,00
49	Simvastatin tablet 10 mg	Tablet	110,00	395	43.450,00
50	Stick asam urat	Pcs	11.086,00	4	44.344,00
51	Stick asam urat	Pcs	11.086,00	1	11.086,00
52	Tiamfenikol kapsul 500 mg	Tablet	1.132,00	36	40.752,00
53	Zinc sirup 20 mg/5 ml @ 60 ml	Botol	3.285,00	4	13.140,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
54	Zinc tablet dispersible 20 mg	Tablet	604,00	239	144.356,00
55	Lidocain HCL 2% + Epinefrin 1:80.000 inj @ 2 ml	Ampul	1.317,00	25	32.925,00
56	Larutan NaCl 0,225 %+ Dextrose 5 % (cairan 1 : 4) infus @ 500 ml.	Botol	9.840,00	4	39.360,00
57	Larutan NaCl 1,75 g, KCl 1,5 g, Na Laktat 2,24 g, Dextrose 27 g @ 500 ml (KaEN 3B)	Botol	11.314,00	15	169.710,00
58	Obat Anti Tuberkulosis Kategori I (FDC)	Paket	430.539,00	3	1.291.617,00
59	Stick kolesterol	Pcs	27.395,00	6	164.370,00
60	Amoksisilin sirup kering 125 mg / 5 ml (yusimox)	Botol	5.500,00	15	82.500,00
61	Amoksisilin sirup kering 250 mg / 5 ml	Botol	3.846,00	9	34.614,00
62	Bisoprolol tablet 5 mg	Tablet	316,00	26	8.216,00
63	Bromheksin tablet 8 mg	Tablet	440,00	90	39.600,00
64	Cefotaksim injeksi 1 g	Ampul	4.706,00	9	42.354,00
65	Cetirizina kapsul 10 mg	kapsul	104,00	200	20.800,00
66	Cetirizina sirup 5 mg / 5 ml @ 60 ml	Botol	3.861,00	20	77.220,00
67	Deksametason injeksi 5 mg / ml - 1 ml	Ampul	1.210,00	8	9.680,00
68	Domperidon tablet 10 mg	Tablet	86,00	60	5.160,00
69	Domperidon tablet 10 mg	Tablet	86,00	35	3.010,00
70	Etil Klorida semprot @100 ml	Botol	198.000,00	8	1.584.000,00
71	Fitomenadion (Vitamin K1) tablet salut gula 10 mg	Tablet	818,00	118	96.524,00
72	Folamil	Tablet	1.650,00	17	28.050,00
73	Gentian Violet larutan 1 % 10 ml	Botol	3.850,00	9	34.650,00
74	Gliseril Guayakolat tablet 100 mg	Tablet	165,00	691	114.015,00
75	Hidroklortiazida tablet 25 mg	Tablet	178,00	77	13.706,00
76	Ibuprofen Suspensi 100 mg / 5 ml	Botol	2.858,00	15	42.870,00
77	Ibuprofen tablet 400 mg	Tablet	242,00	50	12.100,00
78	Isoniazid tablet 300 mg	Tablet	170,00	100	17.000,00
79	Kotrimoksazol tab dewasa komb : Sulfametoksazol 800 mg+Trimetoprim 160 mg	Tablet	512,00	69	35.328,00
80	Metampiron (Antalgin) injeksi 500 mg /1 ml	Ampul	3.050,00	100	305.000,00
81	Metildopa 250 mg tablet	Tablet	1.088,00	80	87.040,00
82	Natrium Diklofenak tab. 25 mg	Tablet	142,00	13	1.846,00
83	Natrium laurilsulfoasetat, Natrium sulfat, Sorbitol, PEG 400 enema @ 5 ml	Tube	19.742,00	12	236.904,00
84	Nifedipin tablet 10 mg	Tablet	149,00	70	10.430,00
85	Pancreatin komb. Tablet	Tablet	3.080,00	61	187.880,00
86	Pirantel pamoat suspensi 125 mg/ 5 ml	Botol	11.050,00	4	44.200,00
87	Prednison tablet 5 mg	Tablet	79,00	10	790,00
88	Prednison tablet 5 mg	Tablet	79,00	100	7.900,00
89	Simvastatin tablet 10 mg	Tablet	110,00	270	29.700,00
90	Simvastatin tablet 10 mg	Tablet	110,00	3.535	388.850,00
91	Simvastatin tablet 10 mg	Tablet	110,00	30	3.300,00
92	Stick kolesterol	Pcs	11.086,00	290	3.214.940,00
Jumlah K					13.358.883,00
Puskesmas Kelong					
1	Amoksisillin tab 500mg	Tablet	248,00	1.150	285.200,00



	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
2	Asam Askorbat tablet 50 mg	tablet	120,00	1.687	202.440,00
3	Cat Gut Plain No. 3/0 DS 19 mm	pcs	40.865,00	11	449.515,00
4	Asiklovir zalf	tube	3.850,00	15	57.750,00
5	Metformin tablet 500 mg	tablet	102,00	1.159	118.218,00
6	Furosemid tab	Tablet	79,00	60	4.740,00
7	Karbol Fenol Gliserol	Botol	2.590,00	5	12.950,00
8	Kloramfenicol zalf mata	tube	1.925,00	5	9.625,00
9	Lidocain HCl + Epinefrin	Ampul	1.317,00	26	34.242,00
10	Retinol (Vitamin A) Dosis Tinggi 100.000 IU	capsul	327,00	350	114.450,00
11	Oksitetrasiklin zalf kulit	tube	1.600,00	25	40.000,00
12	Oksitetrasiklin zalf mata	tube	2.600,00	40	104.000,00
13	Piridoksin tab	Tablet	141,00	270	38.070,00
14	Simvastatin 20 mg tablet	tablet	225,00	200	45.000,00
15	Ranitidin injeksi	Ampul	1.155,00	66	76.230,00
16	S I L K	pcs	3.150,00	26	81.900,00
17	Bisturi	pcs	3.150,00	29	91.350,00
18	OAT KATEGORI 1	Paket	430.539,00	1	430.539,00
19	Isoniazid tab 300mg	Tablet	170,00	80	13.600,00
20	Lidocain composite	Ampul	1.317,00	20	26.340,00
21	Deksamethasone inj	Ampul	1.210,00	115	139.150,00
22	Phytomenadion / Vit K inj 2 mg	Ampul	4.236,00	8	33.888,00
23	Furosemid tab	Tablet	79,00	400	31.600,00
24	Betahistin Mesilat tablet 6 mg	tablet	110,00	865	95.150,00
25	Bromheksin tablet 8 mg	tablet	440,00	650	286.000,00
26	Tablet tambah darah (PROGRAM)	Tablet	43,00	1.800	77.400,00
27	Cetirizin tab	Tablet	104,00	1.100	114.400,00
28	Etil Chlorida	botol	198.000,00	21	4.158.000,00
29	Gliseril Guaykolat	Tablet	165,00	3.239	534.435,00
30	Ibuprofen susp	botol	2.858,00	5	14.290,00
31	Etakridin /Rivanol	botol	3.450,00	1	3.450,00
32	Deksametason tablet 0,5 mg	tablet	34,00	2.200	74.800,00
33	Kanamycin inj	vial	16.000,00	25	400.000,00
34	Natrium Diclofenac 50mg	Tablet	136,00	1.000	136.000,00
35	Klorfeniramin Maleat (CTM) tablet 4 mg	tablet	26,00	1.100	28.600,00
36	Bisturi	pcs	3.150,00	106	333.900,00
37	Natrium Diklofenak tab. 25 mg	tablet	142,00	480	68.160,00
38	Sinvastatin tab 10mg	Tablet	110,00	7.392	813.120,00
39	Oksitetrasiklin zalf mata	tube	2.600,00	42	109.200,00
40	Kanamycin injeksi 1 gram	vial	16.000,00	12	192.000,00
41	Domperidon tablet 10 mg	tablet	86,00	200	17.200,00
42	Stick kolesterol	pcs	27.395,00	300	8.218.500,00
43	Salbutamol tablet 2 mg	tablet	64,00	97	6.208,00
Jumlah L					18.121.610,00



	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
Puskesmas Teluk Sasah					
1	Asiklovir 200mg	tablet	236,00	438	103.368,00
2	Catgut Plain 3/0	pcs	40.865,00	12	490.380,00
3	Epinefrin	ampul	1.518,00	6	9.108,00
4	Metformin	tablet	102,00	86	8.772,00
5	Piridoksin	tablet	141,00	200	28.200,00
6	Tes kehamilan	pcs	2.133,00	39	83.187,00
7	Zink	tablet	604,00	101	61.004,00
8	Asiklovir 5%	tube	3.850,00	37	142.450,00
9	Epinefrin	ampul	1.518,00	6	9.108,00
10	Glass ionomer	set	362.667,00	1	362.667,00
11	Metformin	tablet	102,00	125	12.750,00
12	Retinol 100.000 IU	kapsul	327,00	21	6.867,00
13	Salbutamol nebulas	ampul	10.750,00	5	53.750,00
14	Simvastatin 10mg	tablet	110,00	360	39.600,00
15	Tiamfenikol	kapsul	1.132,00	82	92.824,00
16	ACT	tablet	1.409,00	9	12.681,00
17	Aminofilin	tablet	101,00	132	13.332,00
18	Amoksisilin	tablet	248,00	755	187.240,00
19	Asam askorbat	tablet	120,00	150	18.000,00
20	Betametasone	tube	1.373,00	4	5.492,00
21	Fenol gliserol	botol	2.590,00	30	77.700,00
22	Lidokain compositum	ampul	1.317,00	29	38.193,00
23	Nifedipine 10mg	tablet	143,00	74	10.582,00
24	OAT Anak	paket	267.400,00	1	267.400,00
25	Oksitetrasiklin 1%	tube	2.600,00	39	101.400,00
26	Ranitidine	ampul	1.155,00	10	11.550,00
27	Difenhidramin	ampul	1.262,00	45	56.790,00
28	HRZE	kaplet		418	-
29	Infuset anak	pcs	9.504,00	16	152.064,00
30	Lidokain compositum	ampul	1.317,00	60	79.020,00
31	OAT I	paket	430.539,00	3	1.291.617,00
32	Parasetamol sirup	botol	1.238,00	129	159.702,00
33	Povidon iodine 30ml	botol	3.335,00	8	26.680,00
34	Retinol 200.000 IU	kapsul	582,00	64	37.248,00
35	Fitomenadion	ampul	4.236,00	19	80.484,00
36	Griseofulvin 500mg	tablet	1.040,00	531	552.240,00
37	Hiosin	ampul	10.120,00	10	101.200,00
38	Masker oksigen	pcs	8.400,00	2	16.800,00
39	Serum ABU	vial	479.996,00	2	959.992,00
40	USG gel	botol	14.472,00	2	28.944,00
41	Basitrasin polimiksin	tube	3.490,00	48	167.520,00
42	Deksametason injeksi	ampul	1.210,00	30	36.300,00



Nama obat		Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
43	Glimepirid 2mg	tablet	207,00	100	20.700,00
44	Asiklovir 5%	tube	3.850,00	12	46.200,00
45	CTM	tablet	26,00	1.450	37.700,00
46	Glimepirid 1mg	tablet	174,00	171	29.754,00
47	Kalium permanganate	pcs	5.500,00	15	82.500,00
48	Mikrolax	tube	18.883,00	20	377.660,00
49	OAT II	paket	1.492.574,00	1	1.492.574,00
50	Amoksisilin	tablet	248,00	60	14.880,00
51	Amoksisilin sirup	botol	5.500,00	32	176.000,00
52	Deksametason	tablet	1.595,00	132	210.540,00
53	GG	tablet	165,00	1.057	174.405,00
54	Natrium diklofenak 50mg	tablet	136,00	30	4.080,00
55	Kloramfenikol 1%	tube	1.925,00	10	19.250,00
56	ACT	tablet	1.409,00	18	25.362,00
57	Gentian violet	botol	3.850,00	13	50.050,00
58	Hidroklortiazid	tablet	178,00	98	17.444,00
59	Omeprazole	kapsul	147,00	224	32.928,00
60	Tes Covid19	pcs	65.000,00	200	13.000.000,00
61	Tes HIV	pcs	72.700,00	25	1.817.500,00
62	Griseofulvin 125mg	tablet	223,00	9	2.007,00
63	Simvastatin 10mg	tablet	110,00	620	68.200,00
64	Tes Covid19	pcs	65.000,00	151	9.815.000,00
65	Serum ABU	vial	479.996,00	2	959.992,00
66	Prednison	tablet	79,00	529	41.791,00
67	Ziehl neelsen	paket	178.750,00	1	178.750,00
68	Tes sifilis	pcs	13.904,00	118	1.640.672,00
69	Clindamisin	kapsul	754,00	2	1.508,00
Jumlah M					36.331.653,00
Puskesmas Sei Lekop					
1	Asyclovir tab 200 mg	Tablet	236,00	115	27.140,00
2	Furosemid tab 40 mg	Tablet	79,00	31	2.449,00
3	Piridoxin tab	Tablet	141,00	200	28.200,00
4	Besi syr (Ferro K)	sirup	44.000,00	10	440.000,00
5	Atrofine sulfate inj	Ampul	1.815,00	8	14.520,00
6	Natrium Bicarbonate tab	Tablet	10,00	100	1.000,00
7	Aqua Pro injeksi	botol	2.860,00	18	51.480,00
8	Amoxicillin tab 500 mg	Tablet	248,00	490	121.520,00
9	Pirantel Pamoat syr	botol	11.050,00	4	44.200,00
10	Oxytetrasklin salep kulit	tube	1.760,00	29	51.040,00
11	Oxytetrasklin salep Mata	tube	2.600,00	34	88.400,00
12	Phenol Glyserol 10 %	botol	2.590,00	24	62.160,00
13	Ranitidine inj	Ampul	1.155,00	28	32.340,00
14	Nifedipin tab	Tablet	149,00	110	16.390,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
15	Aminophyllin tab 200 mg	Tablet	101,00	100	10.100,00
16	Miniaspi tab	Tablet	99,00	40	3.960,00
17	DHP-Frimal tab	Tablet	1.409,00	18	25.362,00
18	Simvastatin tab 20 mg	Tablet	225,00	58	13.050,00
19	Parasetamol syr	Botol	5.500,00	7	38.500,00
20	Antalgin inj	Ampul	3.050,00	69	210.450,00
21	Griseofulvin tab 500 mg	Tablet	1.040,00	380	395.200,00
22	Phytomenadion inj	Ampul	4.236,00	15	63.540,00
23	Hyoscine Butylbromide inj	Ampul	10.120,00	10	101.200,00
24	Dexamethasone inj	Ampul	1.210,00	63	76.230,00
25	Lidocain compositum inj	Ampul	1.317,00	25	32.925,00
26	Bacitracin-Polymyxin B salep	Tube	3.490,00	26	90.740,00
27	Glimepirid 2 mg tab	Tablet	207,00	100	20.700,00
28	Ibuprofen syr	Botol	2.858,00	22	62.876,00
29	Ibuprofen tab 400 mg	Tablet	242,00	139	33.638,00
30	Bisoprolol tab 5 mg	Tablet	316,00	150	47.400,00
31	Cotrimoxazol Forte tab	Tablet	512,00	65	33.280,00
32	Glimepirid 1 mg	Tablet	174,00	110	19.140,00
33	Cefadroxyl syr 250 mg/ 5 ml	Botol	5.826,00	17	99.042,00
34	Eugenol cairan	Botol	21.648,00	1	21.648,00
35	Besi syr	Botol	44.000,00	9	396.000,00
36	Microlax tube	tube	18.883,00	24	453.192,00
37	Amoxicillin syr 125 mg/ 5 ml	Botol	5.500,00	30	165.000,00
38	Guayafenesin tab	Tablet	165,00	1.100	181.500,00
39	Simvastatin tab 10 mg	Tablet	110,00	120	13.200,00
40	Simvastatin tab 10 mg	Tablet	110,00	300	33.000,00
41	DHF-FRIMAL	Tablet	1.409,00	32	45.088,00
42	Oxitetrasiklin salep mata	tube	2.600,00	37	96.200,00
43	Aqua Pro injeksi	botol	2.860,00	10	28.600,00
44	Hidroclorothiazid tab	Tablet	178,00	20	3.560,00
45	Nifedipin tab	Tablet	143,00	100	14.300,00
46	Simvastatin tab 10 mg	Tablet	110,00	1.620	178.200,00
47	Clobazam tab 10mg	Tablet	739,00	30	22.170,00
48	Chlorpromazine inj 25 mg/ml	Ampul	1.425,00	27	38.475,00
49	Risperidon tab 2 mg	Tablet	273,00	142	38.766,00
50	Clobazam tab 10mg	Tablet	739,00	90	66.510,00
51	Rapid test HIV lini 3	pcs	13.735,00	108	1.483.380,00
52	Rapid tes HIV lini 1	pcs	21.815,00	22	479.930,00
53	Rapid test Hiv lini 2	pcs	57.684,00	97	5.595.348,00
54	Rapid test Malaria	pcs	47.397,00	25	1.184.925,00
55	OAT Kategori I	paket	430.539,00	7	3.013.773,00
Jumlah N					15.910.937,00
Puskesmas Kuala Sempang					



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
1	Prednison tablet 5 mg	tablet	79,00	189	14.931,00
2	Zinc tablet dispersible 20 mg	tablet	604,00	80	48.320,00
3	Furosemid tablet 40 mg	tablet	79,00	54	4.266,00
4	Folley Catheter 2. W 30 cc No.16	pcs	20.450,00	1	20.450,00
5	S i l k (Benang Bedah Sutera) No. 3/0 DS 19 mm	sachet	31.125,00	1	31.125,00
6	Simvastatin tablet 10 mg	tablet	110,00	120	13.200,00
7	Anti Skabies (Permetrin) 5% krim 10 gr	tube	11.825,00	4	47.300,00
8	Kloramfenikol salap mata 1 % @ 3,5 g.	tube	1.925,00	1	1.925,00
9	Amoksisilin kaplet 500 mg	kaplet	248,00	710	176.080,00
10	Ranitidine Inj 25 mg/ml @ 2 ml	ampul	1.155,00	143	165.165,00
11	Ketorolac 30 mg/ml injeksi @ 1ml	ampul	1.045,00	1	1.045,00
12	Nistatin tablet vaginal 100.000 IU / g	tablet	645,00	8	5.160,00
13	Cefadroksil kapsul 500 mg	capsul	825,00	4	3.300,00
14	Obat Anti Tuberkulosis Kategori I (FDC)	paket	430.539,00	3	1.291.617,00
15	Parasetamol syr 120mg / 5 ml @ 60 ml	botol	5.500,00	22	121.000,00
16	Lidocain injeksi 2 % @ 2 ml	ampul	1.317,00	39	51.363,00
17	Simvastatin 20 mg tablet	tablet	225,00	290	65.250,00
18	Difenhidramin HCl injeksi 10 mg / ml - 1 ml	ampul	1.262,00	12	15.144,00
19	Griseofulvin 500 mg tab	tablet	1.040,00	350	364.000,00
20	Gentamisin Sulfat tetes mata 0.3%	botol	4.885,00	3	14.655,00
21	Metampiron (Antalgin) injeksi 500 mg / 1 ml	ampul	3.050,00	100	305.000,00
22	Deksametason tablet 0,5 mg	tablet	160,00	31	4.960,00
23	Betahistin Mesilat tablet 6 mg	tablet	110,00	209	22.990,00
24	Furosemid tablet 40 mg	tablet	79,00	354	27.966,00
25	Fero Sulfat tablet 300 mg (tablet tambah darah)	tablet	43,00	570	24.510,00
26	Kloramfenikol tetes mata 0,5 %	botol	11.330,00	3	33.990,00
27	Ibuprofen tablet 400 mg	tablet	242,00	1.470	355.740,00
28	Natrium laurilsulfoasetat, Natrium sulfat, Sorbitol, PEG 400 enema @ 5 ml	Tube	18.883,00	26	490.958,00
29	Kalium Permanganat serbuk 5 g.	pot	5.500,00	24	132.000,00
30	Ibuprofen Suspensi 100 mg / 5 ml	botol	2.858,00	3	8.574,00
31	Needle 25 G	pcs	311,00	10	3.110,00
32	Amoksisilin sirup kering 125 mg / 5 ml	botol	5.500,00	40	220.000,00
33	Simvastatin tablet 10 mg	tablet	110,00	180	19.800,00
34	Bromheksin tablet 8 mg	tablet	440,00	270	118.800,00
35	Gliseril Guayakolat tablet 100 mg	tablet	165,00	505	83.325,00
36	Etakridin (Rivanol) larutan 0,1 % @ 300 ml.	botol	3.450,00	4	13.800,00
37	Prednison tablet 5 mg	tablet	79,00	65	5.135,00
38	Kloramfenikol salap mata 1 % @ 3,5 g.	tube	1.925,00	21	40.425,00
39	Fitomenadion (Vitamin K1) injeksi 10 mg/ml - 1 ml	ampul	4.583,00	100	458.300,00
40	Hidroklortiazida tablet 25 mg	tablet	178,00	239	42.542,00
41	Simvastatin tablet 10 mg	tablet	110,00	3.180	349.800,00
Jumlah O					5.217.021,00
Puskesmas Numbing					



	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
1	Prednison 5 mg	tablet	79,00	120	9.480,00
2	Piridoksin 10 mg	tablet	141,00	200	28.200,00
3	Zink tablet dispersible 20 mg	tablet	604,00	460	277.840,00
4	Furosemide 40 mg	tablet	79,00	530	41.870,00
5	Metformin 500 mg	tablet	102,00	340	34.680,00
			102,00	250	25.500,00
6	Tes Kehamilan	pcs	2.133,00	6	12.798,00
7	Folley Chateter No. 16	pcs	20.450,00	1	20.450,00
8	Metformin 500 mg	tablet	102,00	280	28.560,00
			102,00	80	8.160,00
9	Simvastatin 10 mg	tablet	110,00	54	5.940,00
10	Piridoksin 10 mg	tablet	141,00	173	24.393,00
11	Acyklovir krim 5 % @ 5 gram	tube	3.850,00	25	96.250,00
12	Anti Skabies (Permetrin) 5% krim 10 gr	tube	11.825,00	2	23.650,00
13	Besi (Fe) 15 mg per 15 ml suspensi 120 ml	botol	44.000,00	2	88.000,00
14	Asam Askorbat 50 mg	tablet	120,00	394	47.280,00
15	Karbol (Fenol) Gliserol tetes telinga 10% @ 5 ml	botol	2.590,00	14	36.260,00
16	Asam Asetil Salisilat (Asetosal) tablet 80 mg	tablet	99,00	40	3.960,00
17	Oksitetrasiklin HCl salap 3 % 5 g	tube	1.760,00	15	26.400,00
18	Oksitetrasiklin HCl salap mata 1 % @ 3,5 g.	tube	2.600,00	10	26.000,00
19	Amoksisilin kaplet 500 mg	kaplet	248,00	319	79.112,00
20	Ranitidine Inj 25 mg/ml @ 2 ml	ampul	1.155,00	23	26.565,00
21	Pirantel Pamoat syr	botol	11.050,00	1	11.050,00
22	Lidocain injeksi 2 % @ 2 ml	ampul	1.317,00	1	1.317,00
23	Oksitosin injeksi	ampul	1.232,00	3	3.696,00
24	Ibuprofen 400 mg	tablet	242,00	39	9.438,00
25	Parasetamol syr 120mg / 5 ml @ 60 ml	botol	5.500,00	63	346.500,00
26	Obat Anti Malaria/OAM (DHP)	tablet	2.000,00	27	54.000,00
27	Infus Set Anak	set	9.504,00	21	199.584,00
28	Povidon Iodida 10 % 30 ml	botol	3.335,00	10	33.350,00
29	Lidocain injeksi 2 % @ 2 ml	ampul	1.317,00	13	17.121,00
30	Larutan Natrium Klorida Infus 0,9 % steril @ 500 ml.	botol	6.410,00	1	6.410,00
31	Obat Anti Tuberkulosis Kategori I (FDC)	paket	430.539,00	1	430.539,00
32	Asiklovir krim 5 % @ 5 gram	tube	3.850,00	12	46.200,00
33	Asiklovir tablet 200 mg	tablet	236,00	517	122.012,00
34	Fitomenadion (Vitamin K1) 2 mg/ml injeksi	ampul	4.236,00	30	127.080,00
35	Jelly USG @ 250 g	botol	14.472,00	2	28.944,00
36	Sianokobalamin injeksi 500 mcg/ml - 1 ml	ampul	1.160,00	55	63.800,00
37	Larutan Ringer Laktate 500 ml	botol	7.150,00	1	7.150,00
38	Phytomenadion injeksi	ampul	4.236,00	6	25.416,00
39	Larutan Ziehl Nielsen	paket	178.750,00	1	178.750,00
40	Betahistin Mesilat tablet 6 mg	tablet	110,00	868	95.480,00
41	Furosemid tablet 40 mg	tablet	79,00	545	43.055,00



Nama obat		Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
42	Deksametason injeksi 5 mg / ml - 1 ml	ampul	1.210,00	71	85.910,00
43	Kanamycin injeksi 1 gram	vial	16.000,00	10	160.000,00
44	zink syr	botol	3.285,00	6	19.710,00
45	Fero Sulfat tablet 300 mg (tablet tambah darah)	tablet	43,00	40	1.720,00
46	Kotrimoksazol tab dewasa komb : Sulfametoksazol 800 mg+Trimetoprim 160 mg	kaplet	512,00	150	76.800,00
47	Natrium laurilsulfoasetat, Natrium sulfat, Sorbitol, PEG 400 enema @ 5 ml (microlax)	Tube	18.883,00	27	509.841,00
48	Ibuprofen syr	botol	2.858,00	9	25.722,00
49	Cetirizin syr	botol	3.861,00	9	34.749,00
50	Infus Set Anak	pcs	9.504,00	8	76.032,00
51	Cetirizin tab 10 mg	tablet	104,00	110	11.440,00
52	Ketokenazol tab	tablet	305,00	70	21.350,00
53	Ekstrak Plasenta gel	tube	16.500,00	2	33.000,00
54	Folley Chateter No. 14	pcs	20.450,00	2	40.900,00
55	Obat Anti Tuberkulosis Kategori I (FDC)	paket	430.539,00	1	430.539,00
56	Amoksisilin syr	botol	5.500,00	3	16.500,00
57	Bromhexin tab	tablet	440,00	402	176.880,00
58	Gliseril Guaicolate 100 mg	tablet	165,00	1.810	298.650,00
59	Simvastatin 10 mg	tablet	110,00	30	3.300,00
60	Etil Klorida semprot @100 ml	botol	198.000,00	9	1.782.000,00
61	Needle 24 G	pcs	311,00	81	25.191,00
62	Bistury / mata pisau bedah	pcs	3.150,00	20	63.000,00
63	Tabung Vacutener tutup merah dengan anti koagulan (PL)	ktk	264.000,00	1	264.000,00
64	Folley Chateter No. 16	pcs	20.450,00	2	40.900,00
65	Simvastatin 10 mg	tablet	110,00	90	9.900,00
66	Nifedipin tablet 10 mg	tablet	149,00	290	43.210,00
67	Oksitetrasiklin HCl salap mata 1 % @ 3,5 g.	tube	2.600,00	7	18.200,00
68	Furosemid tablet 40 mg	tablet	79,00	30	2.370,00
69	Salbutamol tablet 2 mg	tablet	64,00	20	1.280,00
70	Anti Hemoroid DOEN kombinasi	supp	3.642,00	4	14.568,00
71	Rapid test for Malaria Pf dan Pv	pcs	53.260,00	24	1.278.240,00
72	Rapid Test Antigen Covid-19 (CPNS)	pcs	73.000,00	47	3.431.000,00
73	Kuinin (Kina) tablet 200 mg	tablet	737,00	228	168.036,00
74	Simvastatin tablet 10 mg	tablet	110,00	3.670	403.700,00
75	Domperidon tablet 10 mg	tablet	86,00	159	13.674,00
76	Stick kolesterol	pcs	27.395,00	320	8.766.400,00
77	Lactobacillus	sachet	4.950,00	10	49.500,00
Jumlah P					21.220.452,00
RSUD					
1	Norepineprine Injeksi	Ampul	25.839,00	300	7.751.700,00
2	Epedhrine HCL 50 mg / mL	Ampul	15.180,00	200	3.036.000,00
3	Epedhrine HCL 50 mg / mL	Ampul	15.180,00	90	1.366.200,00
4	Topsy Cream (Lidocain 2.5%, Prilocaine 2.5%)	Tube	36.960,00	71	2.624.160,00
5	Domperidone syr	botol	3.179,00	395	1.255.705,00



	Nama obat	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah	Total harga (Rp)
6	Cendo Catarlent	Strip	20.460,00	50	1.023.000,00
7	Vermox (Albendazole)	Box (24 tab)	219.600,00	935	205.326.000,00
8	Periokin Spray	Pcs	124.355,00	21	2.611.455,00
10	Carbazochrome Injeksi	Ampul	13.112,00	100	1.311.200,00
11	Gelofusion Infus 500 ml	Botol	145.015,00	70	10.151.050,00
12	Salap – 24	Pot	2.797,00	90	251.730,00
13	Atracurium 25 mg / 2,5 ml	Ampul	29.700,00	180	5.346.000,00
14	MgSO4 40%	Vial	3.796,00	10	37.960,00
15	Lidocain Compositum Injeksi	Ampul	1.167,00	130	151.710,00
16	Alprazolam 0,25 mg tablet	Tablet	316,00	700	221.200,00
17	Co-Amoxiclave 625 mg	Tablet	5.808,00	900	5.227.200,00
18	Dopamet (Methyldopa)	Tablet	1.087,00	2.500	2.717.500,00
19	Forumen	Pcs	26.015,00	16	416.240,00
20	MgSO4 20%	Vial	3.328,00	69	229.632,00
21	Ethyl Chloride	Botol	175.010,00	4	700.040,00
22	Ambroxol Syrup	Botol	4.290,00	110	471.900,00
23	Bio Cream	Tube	29.282,00	14	409.948,00
24	Simvastatin 10 mg	Tablet	185,00	68.460	12.665.100,00
25	Amoxicillin 500 mg	Tablet	616,00	7.200	4.435.200,00
26	Farnormin (Atenolol 50 mg)	Tablet	297,00	800	237.600,00
27	Anti Hemorroid Supp	Supp	3.642,00	290	1.056.180,00
28	Diazepam injeksi 5 mg / mL	Ampul	873,00	690	602.370,00
29	Farnormin (Atenolol 50 mg)	Ampul	297,00	2.400	712.800,00
30	Domperidone 10 mg tab	Tablet	339,00	23.900	8.102.100,00
31	Farsorbid (ISDN 1mg/ml)	ampul	63.113,00	130	8.204.690,00
32	Griseofulvin 125 mg tab	Tablet	239,00	4.800	1.147.200,00
33	Colchicine 0,5 mg	Tablet	2.644,00	2.190	5.790.360,00
34	Ciprofloxacin 500 mg tab	Tablet	608,00	950	577.600,00
35	Ofloxacin 200 mg	Tablet	462,00	350	161.700,00
36	Micardis (Telmisartan 40 mg)	Tablet	3.045,00	260	791.700,00
Jumlah P					297.122.130,00
TOTAL (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P)					1.567.547.523,00

7.5.3.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih 12 bulan. Investasi Jangka Panjang meliputi Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2021 sebesar Rp96.104.697.867,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.115 Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	%
Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
Investasi Permanen	96.104.697.867,00	94.427.683.548,00	1,78
Jumlah	96.104.697.867,00	94.427.683.548,00	1,78



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

7.5.3.2.1 Investasi jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintang berupa dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepala kelompok masyarakat, meliputi Dana Bergulir Sapi, Ayam Buras, Sayur-sayuran, Padi Polybag dan Koperasi. Metode penilaian Investasi Non Permanen yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bintang adalah metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Bintang per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.116 Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2021 (Rp)
1	Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Investasi dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	3.369.967.000,00	0,00	5.600.000,00	3.364.367.000,00
6	Penyisihan Non Permanen Dana Bergulir	3.369.967.000,00	0,00	5.600.000,00	3.364.367.000,00
	Investasi Non Permanen Dana Bergulir Netto	0,00			0,00

Pengurangan Investasi Non Permanen Dana Bergulir sebesar Rp5.600.000,00 disebabkan pembayaran pokok dan bagi hasil atas dana bergulir usaha pengembangan sayur tahun 2008 sebesar Rp5.600.000,00 yang sudah disisihkan sebesar 100%. Tarif penyisihan Piutang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.117 Mutasi Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2021 (Rp)
1	Usaha Penggemukan Sapi	1.253.877.500,00	0,00	0,00	1.253.877.500,00
2	Pengembangan Ayam Buras	39.200.000,00	0,00	0,00	39.200.000,00
3	Pengembangan Sayur-sayuran	791.739.500,00	0,00	5.600.000,00	786.139.500,00
4	Padi Polybag 2008	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00
5	Koperasi	1.229.150.000,00	0,00	0,00	1.229.150.000,00
	Jumlah	3.369.967.000,00	0,00	5.600.000,00	3.364.367.000,00
	Penyisihan Piutang :				
6	0 s.d 12 bulan = 0,5%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	13 s.d 36 bulan = 10%	0,00	0,00	0,00	0,00
8	37 s.d 60 bulan = 50%	0,00	0,00	0,00	0,00
9	60 bulan = 100%	3.369.967.000,00	0,00	0,00	3.364.367.000,00
	Jumlah Penyisihan	3.369.967.000,00	0,00	5.600.000,00	3.364.367.000,00
	Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan	0,00			0,00



Tabel 7.5.118 Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Per Komoditi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo Bruto 31 Des 2021 (Rp)	Penyisihan Piutang				Saldo Netto 31 Des 2021 (Rp)	
			0 sd 12 Bln = 0,5 %	13 sd 36 Bln = 10 %	37 sd 60 Bln = 50 %	60 Bln > 100 %		Jumlah
1	Usaha Penggemukan Sapi	1.253.877.500,00	0,00	0,00	0,00	1.253.877.500,00	1.253.877.500,00	0,00
	- Sumber Dana 2008	392.280.000,00	0,00	0,00	0,00	392.280.000,00	392.280.000,00	0,00
	- Sumber Dana 2009	604.845.000,00	0,00	0,00	0,00	604.845.000,00	604.845.000,00	0,00
	- Sumber Dana 2012	88.200.000,00	0,00	0,00	0,00	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00
	- Sumber Dana 2013	121.652.500,00	0,00	0,00	0,00	121.652.500,00	121.652.500,00	0,00
	- Sumber Dana 2014	46.900.000,00	0,00	0,00	0,00	46.900.000,00	46.900.000,00	0,00
2	Pengembangan Ayam Buras	39.200.000,00	0,00	0,00	0,00	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00
	- Sumber Dana 2013	39.200.000,00	0,00	0,00	0,00	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00
3	Pengembangan Sayur-Sayuran	786.139.500,00	0,00	0,00	0,00	786.139.500,00	791.739.500,00	0,00
	- Sumber Dana 2005	34.132.500,00	0,00	0,00	0,00	34.132.500,00	34.132.500,00	0,00
	- Sumber Dana 2007	167.842.500,00	0,00	0,00	0,00	167.842.500,00	167.842.500,00	0,00
	- Sumber Dana 2008	584.164.500,00	0,00	0,00	0,00	584.164.500,00	584.164.500,00	0,00
4	Padi Polybag	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
5	Koperasi	1.229.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.229.150.000,00	1.229.150.000,00	0,00
	-DPC SPSI Reformasi	707.875.000,00	0,00	0,00	0,00	707.875.000,00	707.875.000,00	0,00
	-DPC SPSI	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
	-DPC SBSI	372.275.000,00	0,00	0,00	0,00	372.275.000,00	372.275.000,00	0,00
	-UKM Kusmayadi	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
	JUMLAH (1+2+3+4+5)	3.364.367.000,00	0,00	0,00	0,00	3.364.367.000,00	3.364.367.000,00	0,00

7.5.3.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka Panjang Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2021 sebesar Rp96.104.697.867,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.119 Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Investasi Permanen	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo 31 Desember 2020 – Mapping PMDN 90/2019 (Rp)	(%)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	96.104.697.867,00	94.427.683.548,00	1,78
2	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	96.104.697.867,00	94.427.683.548,00	1,78

7.5.3.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 7.5.120 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2020 – Mapping PMDN – 90/2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	(%)
1	PT Bank Riau Kepri	38.078.900.000,00	0,00	0,00	38.078.900.000,00	0,00
2	PD BPR Bintan	39.627.006.760,00	2.074.627.868,00	135.457.625,00	41.566.177.003,00	4,89
3	PT Bintan Inti Sukses	16.721.776.788,00	0,00	262.155.924,00	16.459.620.864,00	(1,57)
	Jumlah	94.427.683.548,00	2.074.627.868,00	397.613.549,00	96.104.697.867,00	1,78

7.5.3.2.2.1.1 PT Bank Riau Kepri

Realisasi penyertaan modal pada PT Bank Riau Kepri Tahun 2021 adalah nihil sehingga saldo penyertaan modal tetap sebesar Rp38.078.900.000,00. Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bintan pada PT Bank Riau Kepri adalah sebesar 3,45% dengan jumlah saham yang dimiliki sebanyak 380.789 lembar.

7.5.3.2.2.1.2 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan (PD BPR Bintan)

PD BPR Bintan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005. Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bintan pada PD BPR Bintan sebesar 100%. Modal Dasar PD BPR Bintan adalah sebesar Rp5.600.000.000,00 telah seluruhnya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Nilai penyertaan modal sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp18.400.000.000,00, sedangkan tahun 2021 terdapat penyertaan modal sebesar Rp1.600.000.000,00.

Jumlah ekuitas akhir *netto* menurut Laporan Keuangan PD BPR Bintan Tahun 2021 (*Audited*) adalah Rp39.966.177.003,00 sehingga terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp474.627.868,00 dari jumlah ekuitas akhir pada PD BPR Bintan Tahun 2020 adalah sebesar Rp39.491.549.135,00 dan koreksi saldo awal PD BPR Bintan Tahun 2020 (*Audited*) sebesar (Rp135.457.625,00). Adapun perhitungan Ekuitas PD BPR Bintan Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 7.5.121 Perhitungan Ekuitas PD BPR Bintan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Neraca PD BPR Bintan		
		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)
1	Modal Disetor	18.400.000.000,00	20.000.000.000,00	1.600.000.000,00
2	Pengurangan Modal (sumbangan)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
3	Pengurangan Modal (Kewajiban)	0,00	0,00	0,00
4	Cadangan Umum	8.502.266.598,00	8.825.640.137,00	323.373.539,00
5	Cadangan Tujuan	7.855.547.148,00	8.178.920.687,00	323.373.539,00
6	Laba Ditahan	2.264.445.431,00	1.778.554.464,00	(485.890.967,00)
7	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.233.735.389,00	1.461.616.179,00	(1.772.119.210,00)
	Jumlah Ekuitas PD BPR	41.755.994.566,00	41.744.731.467,00	(11.263.099,00)
8	Pembagian Dividen	(2.264.445.431,00)	(1.778.554.464,00)	485.890.967,00
	Jumlah Ekuitas Pemda	39.491.549.135,00	39.966.177.003,00	474.627.868,00

7.5.3.2.2.1.3 PT Bintan Inti Sukses (PT BIS)

PT BIS didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2007 dan telah direvisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010. Kepemilikan Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Kabupaten Bintan pada PT BIS sebesar 99,70%. Modal dasar menjadi sebesar Rp27.755.193.360,00 yang terdiri dari inbreng sebesar Rp12.755.193.360,00 dan setoran tunai sebesar Rp15.000.000.000,00.

Untuk setoran tunai sebesar Rp15.000.000.000,00 sudah dilakukan penyertaan modal berupa setoran tunai Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar Rp6.000.000.000,00 terdiri dari sebesar Rp1.000.000.000,00 telah dibayarkan Tahun 2007, Rp2.000.000.000,00 dibayarkan Tahun 2008 dan Tahun 2010 dibayarkan sebesar Rp3.000.000.000,00. Pada Tahun 2011 sampai Tahun 2021 tidak ada pembayaran penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bintan kepada PT BIS, dikarenakan keuangan perusahaan masih cukup membiayai operasional perusahaan dan belum adanya kebutuhan modal yang diperlukan untuk membiayai bidang usaha/rencana investasi yang feasible dan memberikan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan.

Jumlah ekuitas menurut Laporan Keuangan PT BIS Tahun 2021 (*Unaudited*) per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.459.620.864,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp198.008.557,00 dari jumlah ekuitas Tahun 2020 sebesar Rp16.657.629.421,00 00 dan koreksi saldo awal PT. BIS Tahun 2020 (*Audited*) sebesar (Rp64.147.367,00).

**Tabel 7.5.122 Perhitungan Ekuitas PT Bintan Inti Sukses
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Neraca PT BIS		
		31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)
1	Modal Inbreng	12.755.193.360,00	12.755.193.360,00	0,00
2	Modal Uang Tunai	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
3	Rugi ditaham	(2.097.563.939,00)	(2.295.572.496,00)	(198.008.557,00)
4	Koreksi Laba(Rugi)	0,00	0,00	0,00
5	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	228.099.952,00	198.008.575,00	(30.091.377,00)
	Jumlah Ekuitas PT BIS	16.885.729.373,00	16.657.629.439,00	(228.099.934,00)
6	Pembagian Dividen	(228.099.952,00)	(198.008.575,00)	30.091.377,00
	Jumlah Ekuitas Pemda	16.657.629.421,00	16.459.620.864,00	(198.008.557,00)

7.5.3.3 ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan aset tetap. Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.089.206.107.716,00 mengalami penurunan nilai sebesar Rp41.680.713.431,00 atau -1,96% dari Tahun 2020 sebesar Rp2.130.886.821.147,00 dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 7.5.123 Data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	(%)
1	Tanah	355.655.756.211,00	392.824.023.082,00	(9,46)
2	Peralatan dan Mesin	544.776.914.253,00	501.997.357.528,00	8,52
3	Gedung dan Bangunan	1.154.776.066.415,00	1.119.479.111.686,00	3,15
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.613.799.500.522,00	1.554.550.989.816,00	3,81
5	Aset Tetap Lainnya	53.635.440.194,00	51.866.183.575,00	3,41



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)	(%)
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	31.785.134.272,00	31.622.021.272,00	0,52
7	Akumulasi Penyusutan	(1.665.222.704.151,00)	(1.521.452.865.812,00)	9,45
	Jumlah	2.089.206.107.716,00	2.130.886.821.147,00	(1,96)

Adapun rincian mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7.5.124 Rincian Mutasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	Tambah	Kurang	31 Desember 2021 (Rp)
1	Tanah	392.824.023.082,00	6.196.713.615,00	43.364.980.486,00	355.655.756.211,00
2	Peralatan dan Mesin	501.997.357.528,00	55.371.892.791,00	12.592.336.066,00	544.776.914.253,00
3	Gedung dan Bangunan	1.119.479.111.686,00	93.227.435.943,00	57.930.481.214,00	1.154.776.066.415,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.554.550.989.816,00	59.248.510.706,00	0,00	1.613.799.500.522,00
5	Aset Tetap Lainnya	51.866.183.575,00	1.827.682.615,00	58.425.996,00	53.635.440.194,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	31.622.021.272,00	270.622.000,00	107.509.000,00	31.785.134.272,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.521.452.865.812,00)	(165.319.220.106)	(21.549.381.767)	(1.665.222.704.151,00)
	Jumlah	2.130.886.821.147,00	50.823.637.564,00	92.504.350.995,00	2.089.206.107.716,00

7.5.3.3.1 TANAH

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp355.655.756.211,00 mengalami penurunan sebesar Rp37.168.266.871,00 atau -9,46% dari Tahun 2020 sebesar Rp392.824.023.082,00.

Jumlah Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 merupakan mutasi Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang terdiri dari:

Tabel 7.5.125 Data Mutasi Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	Tanah	392.626.449.882,00	6.196.713.615,00	43.364.980.486,00	355.655.756.211,00
	Jumlah	392.824.023.082,00	6.196.713.615,00	43.364.980.486,00	355.655.756.211,00

Penambahan aset tanah sebesar Rp6.196.713.615,00 berasal dari:

- Belanja Modal Tanah tahun 2021 sebesar Rp994.839.115,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa menjadi Belanja Modal Aset Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan sebesar Rp84.254.500,00;
- Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Kantor ke Aset Tetap Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp42.435.000,00 dan dari Jalan Kabupaten ke Aset Tetap Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp49.684.500,00;
- Hibah Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja dari Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 sebesar Rp1.965.285.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan SK Nomor 436/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021;
- Hibah Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja dari Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun 2021 sebesar Rp1.813.000.000,00 pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan SK Nomor 435/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021;



- Hibah Tanah Untuk Bangunan pada tahun 2021 sebesar Rp1.247.215.500,00 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan SK Nomor 318/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021;

Sedangkan pengurangan aset tanah sebesar Rp43.364.980.486,00 berasal dari :

- Penghapusan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Tahun 2021 sebesar Rp39.168.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 109/I/2021 tanggal 25 Januari 2021;
- Penghapusan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja Tahun 2021 sebesar Rp48.000.000,00 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 01/SK/2021 tanggal 15 April 2021;
- Penghapusan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja Tahun 2021 sebesar Rp93.750.000,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 02/SK/2021 tanggal 02 Juni 2021;
- Penghapusan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja dan Tanah Hutan Tahun 2021 sebesar Rp19.655.000.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 04/SK/2021 tanggal 02 Agustus 2021;
- Penghapusan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja Tahun 2021 sebesar Rp1.315.000.000,00 pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 05/SK/2021 tanggal 04 Agustus 2021;
- Penghapusan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja Tahun 2021 sebesar Rp1.465.200.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 06/SK/2021 tanggal 04 Agustus 2021;
- Penghapusan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja Tahun 2021 sebesar Rp3.240.000.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 07/SK/2021 tanggal 04 Agustus 2021;
- Penghapusan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja Tahun 2021 sebesar Rp2.941.200.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 08/SK/2021 tanggal 04 Agustus 2021;
- Penghapusan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja Tahun 2021 sebesar Rp3.567.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 09/SK/2021 tanggal 04 Agustus 2021;
- Penghapusan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja Tahun 2021 sebesar Rp840.000.000,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 10/SK/2021 tanggal 04 Agustus 2021;
- Penghapusan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja Tahun 2021 sebesar Rp1.965.285.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 11/SK/2021 tanggal 04 Agustus 2021;
- Penghapusan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja dan Tanah Bangunan Perumahan /Gedung Tempat Tinggal Tahun 2021 sebesar Rp6.115.377.486,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 12/SK/2021 tanggal 04 Agustus 2021;
- Penghapusan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja dan Tanah Bangunan Perumahan /Gedung Tempat Tinggal Tahun 2021 sebesar Rp800.000.000,00 pada Dinas Sosial Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 14/SK/2021 tanggal 04 Agustus 2021;



- Penghapusan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Tahun 2021 sebesar Rp1.280.000.000,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 15/SK/2021 tanggal 04 Agustus 2021;

Aset Tanah per OPD selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.126 Data Aset Tetap Tanah per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Nama OPD	Tanah		Selisih	(%)
		2021	2020		
1	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sekretariat Daerah	97.645.930.121,00	97.739.680.121,00	(93.750.000,00)	(0,10)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.782.060.930,00	9.653.282.815,00	1.128.778.115,00	11,69
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.106.007.582,00	5.063.572.582,00	42.435.000,00	0,84
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	3.671.487.000,00	3.671.487.000,00	-	-
7	Dinas Kesehatan	7.848.316.363,00	9.128.316.363,00	(1.280.000.000,00)	(14,02)
8	Dinas Pendidikan	78.287.766.001,00	77.088.550.501,00	1.199.215.500,00	1,56
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Sosial	3.300.000.000,00	4.100.000.000,00	(800.000.000,00)	(19,51)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	1.465.200.000,00	(1.465.200.000,00)	(100,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Tenaga Kerja	0,00	2.941.200.000,00	(2.941.200.000,00)	(100,00)
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	22.907.359.361,00	29.022.736.847,00	(6.115.377.486,00)	(21,07)
16	Dinas Perikanan	1.059.261.600,00	1.059.261.600,00	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	840.000.000,00	(840.000.000,00)	(100,00)
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	2.078.410.000,00	2.078.410.000,00	0,00	0,00
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	99.876.966.637,00	119.571.134.637,00	(19.694.168.000,00)	(16,47)
20	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.813.000.000,00	1.315.000.000,00	498.000.000,00	37,87
23	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	3.567.000.000,00	(3.567.000.000,00)	(100,00)
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.209.125.675,00	2.209.125.675,00	0,00	0,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.998.000.000,00	8.238.000.000,00	(3.240.000.000,00)	(39,33)
26	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Bintan Utara	476.400.000,00	476.400.000,00	0,00	0,00



No	Nama OPD	Tanah		Selisih	(%)
		2021	2020		
31	Kecamatan Bintan Timur	5.577.286.601,00	5.577.286.601,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Tambelan	38.736.000,00	38.736.000,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Gunung Kijang	2.508.400.000,00	2.508.400.000,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Teluk Bintan	199.175.000,00	199.175.000,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Teluk Sebong	1.776.000.000,00	1.776.000.000,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Toapaya	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Mantang	10.458.500,00	10.458.500,00	-	-
38	Kecamatan Bintan Pesisir	106.773.840,00	106.773.840,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Seri Kuala Lobam	3.378.835.000,00	3.378.835.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	355.655.756.211,00	392.824.023.082,00	(37.168.266.871,00)	(9,46)

7.5.3.3.2 PERALATAN DAN MESIN

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp544.776.914.253,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp42.779.556.725,00 atau 8,52% dari Tahun 2020 sebesar Rp501.997.357.528,00.

Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 merupakan mutasi Aset Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang terdiri dari:

Penambahan Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar Rp57.948.679.569,00 yang berasal dari :

- Penambahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar Rp39.826.077.526;
- Penambahan Sumber Lainnya (Hibah) Peralatan dan Mesin Aset tahun 2021 sebesar Rp9.765.910.308,00;
- Penambahan Reklas Belanja Barang/Jasa/Pemeliharaan Tahun 2021 sebesar Rp56.100.000,00;
- Mutasi Antar OPD sebesar Rp7.665.868.000,00;
- Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp632.728.735,00 yang terdiri dari Reklasifikasi dari Gedung Bangunan sebesar Rp321.225.985,00, Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp60.337.750,00, Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp251.165.000,00;
- Koreksi Audited BPK atas Penambahan Reklas Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 sebesar Rp1.995.000,00;

Pengurangan Peralatan dan Mesin 2021 sebesar Rp15.169.122.844,00 yang berasal dari:

- Aset yang dibawah minimal Kapitalisasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.705.765.066,00;
- Penghapusan Peralatan dan Mesin sebesar Rp389.400.000,00
- Mutasi Antar OPD sebesar Rp7.665.868.000,00;
- Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp169.319.690,00;
- Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp225.583.572,00 yang terdiri dari Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp35.638.570,00, Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung Bangunan sebesar Rp187.523.420,00, Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.421.582,00;
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Rusak Berat) sebesar Rp2.181.883.516,00;
- Koreksi Audited BPK Tahun 2021 sebesar Rp831.303.000,00 yang terdiri atas Reklasifikasi Kendaraan Bermotor Penumpang pada Dinas Perhubungan ke Persediaan untuk diserahkan ke pihak lainnya sebesar Rp473.000.000,00 dan



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Penghapusan Kendaraan Bermotor Penumpang pada Sekretariat Daerah karena double catat sebesar Rp358.303.000,00.

Mutasi tambah kurang Aset Peralatan dan Mesin selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.127 Data Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Peralatan Dan Mesin	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	Alat Besar	10.168.609.702,00	312.519.240,00	7.150.000,00	10.473.978.942,00
2	Alat Angkutan	142.103.457.734,00	9.332.972.400,00	8.654.483.000,00	142.781.947.134,00
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	9.665.420.243,00	5.590.482.642,00	1.943.083.892,00	13.312.818.993,00
4	Alat Pertanian	5.248.814.664,00	3.357.088.170,00	963.061.920,00	7.642.840.914,00
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	118.951.353.014,00	14.005.849.412,00	2.313.743.861,00	130.643.458.565,00
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	23.556.788.505,00	1.300.213.883,00	293.257.457,00	24.563.744.931,00
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	89.544.519.243,00	10.319.042.519,00	454.808.866,00	99.408.752.896,00
8	Alat Laboratorium	17.760.637.419,00	1.349.145.877,00	261.099.198,00	18.848.684.098,00
9	Alat Persenjataan	1.291.920.500,00	4.386.800,00	1.136.300,00	1.295.171.000,00
10	Komputer	73.469.528.951,00	11.261.497.476,00	113.653.600,00	84.617.372.827,00
11	Alat Eksplorasi	0,00	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00
12	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	449.865.903,00	212.821.750,00	129.219.750,00	533.467.903,00
16	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Peralatan Proses/Produksi	0,00	540.042.400,00	0,00	540.042.400,00
18	Rambu-Rambu	9.373.348.649,00	277.481.000,00	15.560.000,00	9.635.269.649,00
19	Peralatan Olah Raga	413.093.001,00	80.406.000,00	18.865.000,00	474.634.001,00
	Jumlah	501.997.357.528,00	57.948.679.569,00	15.169.122.844,00	544.776.914.253,00

Aset Peralatan dan Mesin per OPD selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.128 Data Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Nama OPD	Peralatan Dan Mesin		Selisih	(%)
		2021 (Rp)	2020 (Rp)		
1	Sekretariat DPRD	14.853.695.717,00	12.850.264.317,00	2.003.431.400,00	15,59
2	Sekretariat Daerah	43.768.279.612,00	40.905.064.612,00	2.863.215.000,00	7,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.817.605.139,00	10.913.258.399,00	904.346.742,00	8,29
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.371.114.141,00	20.280.221.141,00	90.893.000,00	0,45
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.955.045.484,00	9.908.944.484,00	46.101.000,00	0,47
6	Dinas Perhubungan	18.885.490.074,00	18.745.383.074,00	140.107.000	0,75
7	Dinas Kesehatan	164.613.254.437,00	149.275.175.177,00	15.338.079.260,00	10,28
8	Dinas Pendidikan	60.848.324.663,00	47.524.401.902,00	13.323.922.761,00	28,04
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.105.787.069,00	1.016.676.069,00	89.111.000,00	8,76
10	Dinas Sosial	3.281.073.110,00	2.478.468.210,00	802.604.900,00	32,38
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	5.931.816.654,00	5.295.441.334,00	636.375.320,00	12,02
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.257.925.565,00	8.715.838.877,00	542.086.688,00	6,22



No	Nama OPD	Peralatan Dan Mesin		Selisih	(%)
		2021 (Rp)	2020 (Rp)		
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.595.744.825,00	1.570.268.825,00	25.476.000,00	1,62
14	Dinas Tenaga Kerja	1.815.717.961,00	1.516.852.361,00	298.865.600,00	19,70
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.328.553.410,00	11.321.737.410,00	6.816.000,00	0,06
16	Dinas Perikanan	18.799.451.940,00	12.235.144.840,00	6.564.307.100,00	53,65
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	4.601.356.623,00	4.531.340.623,00	70.016.000,00	1,55
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	5.451.905.966,00	5.446.889.966,00	5.016.000,00	0,09
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	24.955.537.857,00	30.926.450.157,00	(5.970.912.300,00)	(19,31)
20	Badan Pendapatan Daerah	7.295.959.116,00	6.231.798.116,00	1.064.161.000,00	17,08
21	Inspektorat Daerah	2.052.622.017,00	2.027.086.617,00	25.535.400,00	1,26
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.851.991.709,00	9.757.017.709,00	94.974.000,00	0,97
23	Dinas Lingkungan Hidup	9.790.246.404,00	9.195.811.854,00	594.434.550,00	6,46
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.479.332.270,00	7.381.091.270,00	98.241.000,00	1,33
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.077.611.062,00	2.019.360.562,00	58.250.500,00	2,88
26	Satuan Polisi Pamong Praja	4.962.912.800,00	4.543.636.700,00	419.276.100,00	9,23
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.950.447.705,00	3.892.950.705,00	57.497.000,00	1,48
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4.430.448.576,00	4.122.162.576,00	308.286.000,00	7,48
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.525.706.850,00	3.284.179.850,00	241.527.000,00	7,35
30	Kecamatan Bintan Utara	7.982.764.345,00	7.940.282.345,00	42.482.000,00	0,54
31	Kecamatan Bintan Timur	7.968.328.539,00	7.530.253.013,00	438.075.526,00	5,82
32	Kecamatan Tambelan	3.863.928.989,00	3.614.170.989,00	249.758.000,00	6,91
33	Kecamatan Gunung Kijang	7.736.959.177,00	7.366.848.997,00	370.110.180,00	5,02
34	Kecamatan Teluk Bintan	6.136.820.776,00	6.128.944.776,00	7.876.000,00	0,13
35	Kecamatan Teluk Sebong	5.591.175.064,00	5.548.562.064,00	42.613.000,00	0,77
36	Kecamatan Toapaya	6.709.319.968,00	6.391.483.468,00	317.836.500,00	4,97
37	Kecamatan Mantang	2.763.328.321,00	2.587.812.321,00	175.516.000,00	6,78
38	Kecamatan Bintan Pesisir	2.457.525.720,00	2.350.473.720,00	107.052.000,00	4,55
39	Kecamatan Seri Kuala Lobam	4.911.804.598,00	4.625.608.098,00	286.196.500,00	6,19
	Jumlah	544.776.914.253,00	501.997.357.528,00	42.779.556.725,00	8,52

7.5.3.3.2.1 Alat Besar

Saldo Aset Tetap berupa Alat Besar per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.473.978.942,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp305.369.240,00 atau 3,00% dari Tahun 2020 sebesar Rp10.168.609.702,00 yang dikarenakan adanya Belanja Modal Alat Besar Tahun 2021 sebesar Rp284.579.240,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan serta adanya Penerimaan Alat Besar dari Hibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2021 sebesar Rp27.940.000,00 Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan SK Bupati Bintan Nomor 468/XI/2021 tanggal 01 November 2021. Terdapat pengurangan Alat Berat Sebesar Rp7.150.000,00 dari Hibah dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2021 yang direklas ke Aset Lainnya dikarenakan dalam kondisi rusak berat Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan SK Bupati Bintan Nomor 468/XI/2021 tanggal 01 November 2021.

7.5.3.3.2.2 Alat Angkutan

Saldo Aset Tetap berupa Alat Angkutan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp142.781.947.134,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp678.489.400,00 atau 0,48% dari Tahun 2020 sebesar Rp142.103.457.734,00 yang dikarenakan adanya Penambahan



dari Belanja Modal Alat Angkutan, Penambahan Sumber Lainnya, mutasi pencatatan antar OPD, Aset yang dibawah minimal kapitalisasi dan Penghapusan Aset Alat Angkutan.

Penambahan alat angkutan Tahun 2021 sebesar Rp9.332.972.400,00 berasal dari:

- Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp1.639.262.400,00 pada Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan;
- Penambahan alat angkutan sebesar Rp175.000.000,00 yang berasal dari (Hibah) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau SK Bupati Bintan Nomor 320/VI/2021 Tanggal 30 Juni 2021 pada Dinas Sosial Kabupaten Bintan;
- Penambahan alat angkutan sebesar Rp88.330.000,00 yang berasal dari (Hibah) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau SK Bupati Bintan Nomor 468/XI/2021 Tanggal 01 November 2021 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan;
- Mutasi tambah pencatatan antar OPD sebesar Rp7.430.380.000,00 pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja, Badan Pendapatan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Toapaya, dan Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan.

Pengurangan alat angkutan sebesar Rp8.654.483.000,00 berasal dari:

- Mutasi kurang pencatatan antar OPD sebesar Rp7.430.380.000,00 berasal dari mutasi kurang pencatatan antar OPD pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
- Aset yang dibawah minimal kapitalisasi sebesar Rp3.400.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.
- Penghapusan Alat Angkutan Sebesar Rp230.000.000,00 Pada Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 03/SK/2021 Tanggal 13 Juli 2021.
- Penghapusan Alat Angkutan Sebesar Rp159.400.000,00 Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Nomor 17/SK/2021 Tanggal 06 Oktober 2021.
- Koreksi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audited Tahun 2021 berupa Penghapusan Aset Kendaraan Dinas yang diyakini terjadi double pencatatan pada Buku Inventaris Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dengan Buku Inventaris Dinas Perikanan Kabupaten Bintan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan. Dimana untuk Alat Angkut Mini Bus BP 1068 B telah dilakukan penghapusan dengan SK Penghapusan Nomor 18/XII/2019 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan. Sedangkan untuk Alat Angkut Mini Bus BP 1053 B telah dilakukan penghapusan dengan SK Penghapusan Nomor 595/XI/2014 pada DPPKD Kabupaten Bintan. Total harga perolehan aset yang double catat sebesar Rp358.303.000,00 di Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.



- Koreksi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audited Tahun 2021 berupa Reklas Alat Angkut ke Persediaan sebesar Rp473.000.000,00 yang disebabkan oleh terjadinya kesalahan penganggaran Barang yang akan diserahkan (Persediaan) kepada Pemerintah desa Berakit menggunakan rekening Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan.

7.5.3.3.2.3 Alat Bengkel dan Alat Ukur

Saldo Aset Tetap berupa Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.312.818.993,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp3.647.398.750,00 atau 37,74% dari Tahun 2020 sebesar Rp9.665.420.243,00 yang dikarenakan adanya Penambahan dari Belanja modal Alat Bengkel dan Alat Ukur, Penambahan dari Hibah, dan Aset yang dibawah minimal Kapitalisasi Alat Bengkel dan Alat Ukur dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2021 sebesar Rp5.590.482.642,00 berasal dari :

- Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2021 sebesar Rp121.149.126,00 pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Usaha Mikro Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan bintan Pesisir, dan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.
- Penambahan Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp5.469.333.516,00 yang berasal dari (Hibah) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau SK Bupati Bintan Nomor 468/XI/2021 Tanggal 01 November 2021 dan SK Bupati Bintan Nomor 416/IX/2021 tanggal 10 September 2021 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.

Pengurangan Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp1.943.083.892,00 berasal dari:

- Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi pada Tahun 2021 sebesar Rp31.415.376,00 pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Pesisir, dan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku *Ekstrakomptabel*.
- Pengurangan Alat Bengkel dan Alat Ukur pada tahun 2021 yang dalam kondisi rusak berat sebesar Rp1.911.668.516,00 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan yang diperoleh dari dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau SK Bupati Bintan Nomor 468/XI/2021 Tanggal 01 November 2021 dan SK Bupati Bintan Nomor 416/IX/2021 tanggal 10 September 2021 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.

7.5.3.3.2.4 Alat Pertanian

Saldo Aset Tetap berupa Alat Pertanian per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.642.840.914,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.394.026.250,00 atau 45,61% dari Tahun 2020 sebesar Rp5.248.814.664,00. Mutasi Alat Pertanian tahun 2021 yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan Alat Pertanian Tahun 2021 sebesar Rp3.357.088.170,00 berasal dari:

- Belanja Modal Alat Pertanian Tahun 2021 sebesar Rp346.389.820,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.



- Penambahan Alat Pertanian yang bersumber dari reklasifikasi dari asset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp54.837.750,00;
- Penambahan Alat Pertanian sebesar Rp2.955.860.600,00 yang berasal yang berasal dari (Hibah) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau SK Bupati Bintan Nomor 468/XI/2021 Tanggal 01 November 2021 dan SK Bupati Bintan Nomor 416/IX/2021 tanggal 10 September 2021 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.

Pengurangan Alat Pertanian Tahun 2021 sebesar Rp963.061.920,00 berasal dari:

- Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi pada Tahun 2021 sebesar Rp690.607.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.
- Pengurangan Alat Pertanian yang bersumber dari reklasifikasi dari asset Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Bangunan dan Gedung Sebesar Rp185.290.420,00 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.
- Pengurangan Alat Pertanian yang bersumber dari reklasifikasi dari asset Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya Sebesar Rp56.725.750,00 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.
- Koreksi Audited BPK LKPD 2021 berupa Pengurangan Alat Pertanian yang bersumber dari reklasifikasi dari asset Peralatan dan Mesin ke Belanja Barang/jasa berupa Persediaan dikarenakan barang yang dibelanjakan berupa pakan ikan, vitamin ikan dan Obat Ikan Sebesar Rp30.438.250,00 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.

7.5.3.3.2.5 Alat Kantor dan Rumah Tangga

Saldo Aset Tetap berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp130.643.458.565,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp11.692.105.551,00 atau 9,83% dari Tahun 2020 sebesar Rp118.951.353.014,00. Mutasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Penambahan alat kantor dan rumah tangga Tahun 2021 sebesar Rp14.005.849.412,00 berasal dari :

- Belanja Modal alat kantor dan alat rumah tangga tahun 2021 sebesar Rp12.892.944.477,00 pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Perempuan dan Keluarga Berencana , Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian , Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Inspektorat daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan bintang Pesisir, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Toapaya, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan;



- Penambahan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp804.561.450,00 yang berasal dari (Hibah) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau SK Bupati Bintan Nomor 468/XI/2021 Tanggal 01 November 2021 dan SK Bupati Bintan Nomor 416/IX/2021 tanggal 10 September 2021 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.
- Penambahan aset alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp56.100.000,00 yang berasal dari Reklasifikasi Belanja Barang/Jasa/Pemeliharaan tahun 2021 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.
- Penambahan Alat Kantor dan Rumah Tangga yang bersumber dari reklasifikasi Aset Tetap sebesar Rp252.243.485,00 yang terdiri dari reklasifikasi dari aset Bangunan dan gedung sebesar Rp122.208.485,00, reklasifikasi dari aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp5.500.000,00 dan reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp124.535.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;

Pengurangan alat kantor dan rumah tangga Tahun 2021 sebesar Rp2.313.743.861,00 berasal dari :

- Pengurangan alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp2.019.756.829,00 berasal dari Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Perikanan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Toapaya, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku Ekstrakomptabel.
- Pengurangan Alat Kantor dan rumah Tangga yang bersumber dari reklasifikasi dari aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.654.582,00 yang terdiri dari reklasifikasi ke Aset Bangunan dan Gedung sebesar Rp2.233.000,00 dan reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya Sebesar Rp2.421.582,00 pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
- Pengurangan Alat Kantor dan rumah Tangga yang bersumber dari reklasifikasi dari aset Peralatan dan Mesin ke Barang/Jasa sebesar Rp26.267.450,00 pada Dinas Pendidikan Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, dan Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan.
- Pengurangan Alat Kantor dan Rumah Tangga pada tahun 2021 yang dalam kondisi rusak berat sebesar Rp263.065.000,00 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan yang diperoleh dari dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau SK Bupati Bintan Nomor 468/XI/2021 Tanggal 01 November 2021 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.

**7.5.3.3.2.6 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**

Saldo Aset Tetap berupa Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tanggal per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp24.563.744.931,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.006.956.426,00 atau 4,27% dari Tahun 2020 sebesar Rp23.556.788.505,00. Mutasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun 2021 sebesar Rp1.300.213.883,00 berasal dari:

- Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp902.223.983,00 pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, dan Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.
- Penambahan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp8.364.400,00 yang berasal dari (Hibah) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau SK Bupati Bintan 416/IX/2021 tanggal 10 September 2021 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.
- Mutasi Tambah antar OPD Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp190.608.000 pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, , Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perikanan , Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Usaha Mikro Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pendapatan daerah , Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan.
- Penambahan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang bersumber dari reklasifikasi Aset Tetap dari aset Bangunan dan gedung sebesar Rp199.017.500,00, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Timur Kabupaten Bintan;

Pengurangan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun 2021 sebesar Rp293.257.457,00 berasal dari:

- Pengurangan aset alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp67.010.887,00 pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan yang tidak memenuhi kapitalisasi dipindahkan pencatatannya ke Buku Ekstrakomptabel.



- Mutasi kurang antar OPD Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp190.608.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
- Pengurangan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang bersumber dari reklasifikasi dari asset Peralatan dan Mesin ke Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Sebesar Rp35.638.570,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.

7.5.3.3.2.7 Alat Kedokteran dan Kesehatan

Saldo Aset Tetap berupa Alat Kedokteran dan Kesehatan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp99.408.752.896,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp9.864.233.653,00 atau 11,02% dari Tahun 2020 sebesar Rp89.544.519.243,00. Mutasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2021 sebesar Rp10.319.042.519,00 berasal dari:

- Penambahan Alat Kedokteran dan Kesehatan Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp10.248.037.527,00 pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan;
- Penambahan Alat Kedokteran dan Kesehatan yang bersumber dari reklasifikasi Aset Tetap dari aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.800.000,00, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
- Penambahan Alat Kedokteran dan Kesehatan yang berasal dari Hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2021 sebesar Rp13.613.644,00 pada Kecamatan Bintan Utara sebesar SK Nomor 574/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021,
- Penambahan Alat Kedokteran dan Kesehatan yang berasal dari Hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2021 sebesar Rp880.000,00 pada Kecamatan Bintan Pesisir SK Nomor 575/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021.
- Penambahan Alat Kedokteran dan Kesehatan yang berasal dari Hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2021 sebesar Rp4.691.614,00 pada Kecamatan Gunung Kijang SK Nomor 576/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021.
- Penambahan Alat Kedokteran dan Kesehatan yang berasal dari Hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2021 sebesar Rp880.000,00 pada Kecamatan Mantang SK SK Nomor 577/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021.
- Penambahan Alat Kedokteran dan Kesehatan yang berasal dari Hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2021 sebesar Rp5.362.213,00 pada Kecamatan Seri Kuala Lobam SK Nomor 578/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021.
- Penambahan Alat Kedokteran dan Kesehatan yang berasal dari Hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2021 sebesar Rp24.921.298,00 pada Kecamatan Bintan Timur SK Nomor 579/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021.
- Penambahan Alat Kedokteran dan Kesehatan yang berasal dari Hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2021 sebesar Rp2.807.005,00 pada Kecamatan Teluk Bintan SK Nomor 580/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021.
- Penambahan Alat Kedokteran dan Kesehatan yang berasal dari Hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2021 sebesar Rp3.016.406,00 pada Kecamatan Teluk Sebong SK Nomor 581/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021.



- Penambahan Alat Kedokteran dan Kesehatan yang berasal dari Hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2021 sebesar Rp2.178.802,00 pada Kecamatan Tambelan SK Nomor 582/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021.
- Penambahan Alat Kedokteran dan Kesehatan yang berasal dari Hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2021 sebesar Rp3.854.010,00 pada Kecamatan Toapaya SK Nomor 583/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021.

Pengurangan Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2021 sebesar Rp454.808.866,00 berasal dari:

- Pengurangan Alat Kedokteran dan Kesehatan yang tidak memenuhi kapitalisasi sebesar Rp454.808.866,00 pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan bintang Pesisir, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Toapaya, Kecamatan Mantang, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku *Ekstrakomptabel*.

7.5.3.3.2.8 Alat Laboratorium

Saldo Aset Tetap berupa Alat Laboratorium per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.848.684.098,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.088.046.679,00 atau 6,13% dari Tahun 2020 sebesar Rp17.760.637.419,00. Mutasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan Alat Laboratorium Tahun 2021 sebesar Rp1.349.145.877,00 berasal dari:

- Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun 2021 sebesar Rp1.269.375.877 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Bintan Timur, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam Pendidikan Kabupaten Bintan.
- Penambahan Alat Laboratorium yang bersumber dari reklasifikasi Aset Tetap dari aset Tetap Lainnya sebesar Rp28.070.000,00, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan;
- Penambahan Alat Laboratorium sebesar Rp51.700.000,00 yang berasal yang berasal dari (Hibah) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau SK Bupati Bintan Nomor 468/XI/2021 Tanggal 01 November 2021 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.;

Pengurangan Alat Laboratorium Tahun 2021 sebesar Rp261.099.198,00 berasal dari:

- Pengurangan Aset Alat Laboratorium Tahun 2021 sebesar Rp228.035.958,00 berasal dari aset yang tidak memenuhi kapitalisasi pada Dinas Pendidikan, dan Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku *Ekstrakomptabel*.
- Pengurangan Alat Laboratorium yang bersumber dari reklasifikasi dari asset Peralatan dan Mesin ke Barang/Jasa sebesar Sebesar Rp33.063.240,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.

7.5.3.3.2.9 Alat Persenjataan

Saldo Aset Tetap berupa Alat Persenjataan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.295.171.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.250.500,00 atau 0,25% dari



Tahun 2020 sebesar Rp1.291.920.500,00. Mutasi Alat Persenjataan Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan Belanja Modal Alat Persenjataan Tahun 2021 sebesar Rp4.386.800,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan.

Terdapat Pengurangan Aset Alat Persenjataan Tahun 2021 sebesar Rp1.136.300,00 berasal dari aset yang tidak memenuhi kapitalisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku Ekstrakomptabel.

7.5.3.3.2.10 Komputer

Saldo Aset Tetap berupa Komputer per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp84.617.372.827,00 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp11.147.843.876,00 atau 15,17% dari Tahun 2020 sebesar Rp73.469.528.951,00. Mutasi Komputer Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan Komputer Tahun 2021 sebesar Rp11.261.497.476,00 berasal dari :

- Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp11.107.022.126,00 pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Usaha Mikro Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan daerah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Teluk Sebong, dan Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan;
- Penambahan Komputer yang bersumber dari reklasifikasi Aset Tetap dari aset Tetap Lainnya sebesar Rp89.760.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan;
- Penambahan Komputer sebesar Rp17.840.350,00 yang berasal dari (Hibah) dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau SK Bupati Bintan 416/IX/2021 tanggal 10 September 2021 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.
- Mutasi Tambah antar OPD Komputer sebesar Rp44.880.000,00 pada Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan
- Koreksi Audited Penambahan Aset Komputer berupa Belanja Printer menggunakan sumber dana BOP PAUD Tahun 2021 sebesar Rp1.995.000,00 di TK Pembina Kecamatan Bintan Timur yang tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.

Pengurangan Komputer Tahun 2021 sebesar Rp113.653.600,00 berasal dari :



- Mutasi Kurang antar OPD Alat Komputer sebesar Rp44.880.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan;
- Pengurangan Komputer sebesar Rp64.813.600,00 berasal dari Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku Ekstrakomptabel.
- Pengurangan Komputer yang bersumber dari reklasifikasi dari asset Peralatan dan Mesin ke Barang/Jasa sebesar Sebesar Rp3.960.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.

7.5.3.3.2.11 Alat Eksplorasi

Saldo Aset Tetap berupa Alat Eksplorasi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.730.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.730.000,00 atau 100,00% dari Tahun 2020 sebesar Rp0,00. Penambahan Alat Eksplorasi Tahun 2021 diperoleh dari Belanja Modal sebesar Rp4.730.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan.

7.5.3.3.2.12 Alat Pengeboran

Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki Aset Tetap Alat Pengeboran.

7.5.3.3.2.13 Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki Aset Tetap Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian.

7.5.3.3.2.14 Alat Bantu Eksplorasi

Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki Aset Tetap Alat Bantu Eksplorasi.

7.5.3.3.2.15 Alat Keselamatan Kerja

Saldo Aset Tetap berupa Alat Keselamatan Kerja per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp533.467.903,00 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp83.602.000,00 atau 18,58% dari Tahun 2020 sebesar Rp449.865.903,00. Mutasi Alat Keselamatan Kerja Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan Alat Keselamatan Kerja tahun 2021 sebesar Rp212.821.750,00 berasal dari:

- Penambahan Aset Alat Keselamatan Kerja yang berasal dari Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp108.046.750,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
- Penambahan aset Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp104.775.000,00 yang berasal dari Hibah Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan;

Terdapat Pengurangan Alat Keselamatan Kerja tahun 2021 sebesar Rp129.219.750,00 yang berasal dari Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku Ekstrakomptabel.

**7.5.3.3.2.16 Alat Peraga**

Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki Aset Tetap Alat Peraga.

7.5.3.3.2.17 Peralatan Proses/Produksi

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan Proses/Produksi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp540.042.400,00 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp540.042.400,00 atau 100,00% dari Tahun 2020 sebesar Rp0,00. Penambahan Peralatan Proses/Produksi Tahun 2021 diperoleh dari Belanja Modal sebesar Rp540.042.400,00 pada Dinas Kesehatan, dan Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan.

7.5.3.3.2.18 Rambu-rambu

Saldo Aset Tetap berupa Rambu-Rambu per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.635.269.649,00 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp261.921.000,00 atau 2,79% dari Tahun 2020 sebesar Rp9.373.348.649,00. Mutasi Rambu-Rambu Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan Rambu-Rambu tahun 2021 sebesar Rp277.481.000,00 berasal dari Belanja Modal Tahun 2020 pada Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan.

Pengurangan Rambu-Rambu sebesar Rp15.560.000,00 berasal dari Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan yang dipindahkan pencatatannya ke Buku Ekstrakomptabel.

7.5.3.3.2.19 Peralatan Olah Raga

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan Olah Raga per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp474.634.001,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp61.541.000,00 atau 14,90% dari Tahun 2020 sebesar Rp413.093.001,00. Mutasi Peralatan Olah Raga Kerja Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Penambahan Aset Peralatan Olah Raga yang berasal dari Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp80.406.000,00 pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan.
- Pengurangan Peralatan Olah Raga yang bersumber dari reklasifikasi dari asset Peralatan dan Mesin ke Barang/Jasa sebesar Sebesar Rp18.865.000,00 pada Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan.

7.5.3.3.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo Aset Tetap berupa Bangunan Gedung per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.154.776.066.415,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp35.296.954.729,00 atau 3,15% dari Tahun 2020 sebesar Rp1.119.479.111.686,00.

Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 merupakan mutasi Aset Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang terdiri dari:

**Tabel 7.5.129 Data Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Gedung dan Bangunan	Saldo 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2021 (Rp)
1	Bangunan Gedung	1.108.377.198.745,00	102.781.021.483,33	68.019.117.485,33	1.143.139.102.743,00
2	Monumen	8.506.305.869,00	74.822.000,00	0,00	8.581.127.869,00



No	Gedung dan Bangunan	Saldo 31 Des 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Des 2021 (Rp)
3	Bangunan Menara	0,00	199.017.500,00	199.017.500,00	0,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.595.607.072,00	470.513.731,00	10.285.000,00	3.055.835.803,00
	Jumlah	1.119.479.111.686,00	103.525.374.714,33	68.228.419.985,33	1.154.776.066.415,00

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2021 sebesar Rp103.525.374.714,33 terdiri dari:

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp63.060.135.647,33;
- Penambahan Aset Sumber Lainnya yang berasal dari hibah sebesar Rp21.968.453.907,00;
- Penambahan Aset yang bersumber dari barang dan jasa reklas ke Belanja Modal sebesar Rp760.396.537,00;
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp187.523.420,00;
- Mutasi Tambah pencatatan antar OPD sebesar Rp17.548.865.203,00.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp68.228.419.985,33 berasal dari:

- Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp33.317.159.255,00;
- Mutasi Kurang pencatatan antar OPD sebesar Rp17.548.865.203,00;
- Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp491.653.029,00;
- Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp9.806.285.742,00 yang terdiri dari Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp42.435.000,00, Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp318.255.985,00, Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp9.251.367.757,00 dan Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pekerjaan sebesar Rp194.227.000,00;
- Pembulatan atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp0,33;
- Koreksi Audited BPK 2021 atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang terdiri dari Koreksi Kesalahan Penganggaran Barang yang akan diserahkan kepada Instansi Vertikal dengan menggunakan rekening Belanja Modal sebesar Rp6.834.266.682,00 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan tahun 2021 dan Koreksi Reklas ke Aset Tetap Lainnya dan Aset Lain-Lain (khusus Tanaman dalam Kondisi Mati) atas Belanja Modal Pengadaan Landscape Taman RSUD (Tanaman) sebesar Rp230.190.074,00 Tahun 2020 dan 2021.

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.130 Data Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Nama OPD	Gedung Dan Bangunan		Selisih	(%)
		2021	2020		
1	Sekretariat DPRD	78.142.341.101,00	78.023.691.101,00	118.650.000,00	0,15
2	Sekretariat Daerah	99.963.955.278,00	99.963.955.278,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	134.026.031.935,00	150.009.503.350,00	(15.983.471.415)	(10,65)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Nama OPD	Gedung Dan Bangunan		Selisih	(%)
		2021	2020		
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	123.262.662.976,00	122.915.973.988,00	346.688.988,00	0,28
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	105.248.000,00	105.248.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	13.114.562.301,00	12.994.868.566,00	119.693.735,00	0,92
7	Dinas Kesehatan	126.296.435.655,00	117.416.849.717,00	8.879.585.938	7,56
8	Dinas Pendidikan	294.654.329.455,00	268.696.564.105,00	25.957.765.350,00	9,66
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.107.515.803,00	516.045.708,00	591.470.095,00	114,62
10	Dinas Sosial	17.649.809.715,00	17.869.809.715,00	(220.000.000,00)	(1,23)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	4.608.833.333,00	4.020.117.988,00	588.715.345,00	14,64
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	1.980.769.450,00	(1.980.769.450,00)	(100,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Tenaga Kerja	0,00	1.418.970.000,00	(1.418.970.000,00)	(100,00)
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.442.821.040,00	8.854.874.211,00	(2.412.053.171,00)	(27,24)
16	Dinas Perikanan	8.658.594.504,00	3.362.200.684,00	5.296.393.820,00	157,53
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	4.410.292.433,00	5.451.300.033,00	(1.041.007.600,00)	(19,10)
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	15.067.863.677,00	14.472.529.130,00	595.334.547,00	4,11
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	12.800.872.820,00	15.055.792.820,00	(2.254.920.000,00)	(14,98)
20	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.777.955.450,00	3.777.955.450,00	0,00	0,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	4.822.303.055,00	4.677.553.743,00	144.749.312,00	3,09
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	51.896.688.053,00	34.583.922.850,00	17.312.765.203,00	50,06
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	225.000.000,00	1.093.381.400,00	(868.381.400,00)	(79,42)
26	Satuan Polisi Pamong Praja	329.419.000,00	329.419.000,00	0,00	0,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.312.054.576,00	7.312.054.576,00	0,00	0,00
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	12.084.959.209,00	12.084.959.209,00	0,00	0,00
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	47.753.387,00	47.753.387,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Bintan Utara	18.247.892.165,00	17.877.808.165,00	370.084.000,00	2,07
31	Kecamatan Bintan Timur	16.824.607.886,00	16.134.256.946,00	690.350.940,00	4,28
32	Kecamatan Tambelan	13.424.759.488,00	13.424.759.488,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Gunung Kijang	11.448.785.063,00	11.448.785.063,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Teluk Bintan	10.436.349.662,00	10.361.527.662,00	74.822.000,00	0,72
35	Kecamatan Teluk Sebong	16.822.291.219,00	16.722.654.419,00	99.636.800,00	0,60
36	Kecamatan Toapaya	12.611.443.318,00	12.421.499.226,00	189.944.092,00	1,53
37	Kecamatan Mantang	12.125.543.995,00	12.125.543.995,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Bintan Pesisir	13.185.826.947,00	13.185.826.947,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Seri Kuala Lobam	8.840.263.916,00	8.740.386.316,00	99.877.600,00	1,14
	Jumlah	1.154.776.066.415,00	1.119.479.111.686,00	35.296.954.729,00	3,15

7.5.3.3.3.1 Bangunan Gedung

Saldo Aset Tetap berupa Bangunan Gedung per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.143.139.102.743,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp34.761.903.998,00 atau 3,14% dari Tahun 2020 sebesar Rp1.108.377.198.745,00. Mutasi Aset Tetap Bangunan Gedung Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.



Penambahan bangunan gedung Tahun 2021 sebesar Rp102.781.021.483,33 berasal dari:

- Belanja Modal Tahun 2021 sebesar Rp62.315.782.416,33 pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Dinas Kepemudaan Dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan.
- Penambahan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp3.347.028.000,00 yang berasal dari Hibah PT.Aneka Tambang Tbk Tahun 2021 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan SK Bupati Nomor 318/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.
- Penambahan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp3.777.955.450,00 yang berasal dari Hibah Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan SK Bupati Nomor 435/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021.
- Penambahan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp9.732.367.057,00 yang berasal dari Hibah Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan SK Bupati Nomor 436/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021.
- Penambahan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp5.111.103.400,00 yang berasal dari Hibah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan SK Bupati Nomor 416/IX/2021 tanggal 10 September 2021 dan 468/XI/2021 tanggal 01 November 2021 .
- Penambahan Aset yang bersumber dari barang dan jasa sebesar Rp585.464.937,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Bintan
- Penambahan Aset yang bersumber dari barang dan jasa sebesar Rp99.636.800,00 pada Kecamatan Teluk Sebong
- Penambahan Aset yang bersumber dari barang dan jasa sebesar Rp75.294.800,00 pada Kecamatan Teluk Sebong
- Penambahan asset yang bersumber dari reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Perikanan dan Dinas Kesehatan sebesar Rp187.523.420,00;
- Mutasi tambah pencatatan antar OPD sebesar Rp17.548.865.203,00 pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.

Sedangkan pengurangan bangunan gedung Tahun 2021 sebesar Rp68.019.117.485,33 berasal dari:

- Penghapusan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp868.381.400,00 pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bintan SK Penghapusan Bupati Bintan Nomor 07/SK/2021 Tanggal 04 Agustus 2021.
- Penghapusan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp2.254.920.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Bupati Bintan Nomor 04/SK/2021 Tanggal 02 Agustus 2021 dan 109/I/2021 Tanggal 25 Januari 2021.



- Penghapusan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp3.777.955.450,00 pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan SK Penghapusan Bupati Bintan Nomor 05/SK/2021 Tanggal 04 Agustus 2021.
- Penghapusan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp1.980.769.450,00 pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan SK Penghapusan Bupati Bintan Nomor 06/SK/2021 Tanggal 04 Agustus 2021.
- Penghapusan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp2.412.053.171,00 pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Bintan SK Penghapusan Bupati Bintan Nomor 12/SK/2021 Tanggal 04 Agustus 2021.
- Penghapusan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp1.041.007.600,00 pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Bupati Bintan Nomor 10/SK/2021 Tanggal 04 Agustus 2021.
- Penghapusan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp562.732.400,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan SK Penghapusan Bupati Bintan Nomor 09/SK/2021 Tanggal 04 Agustus 2021.
- Penghapusan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp595.334.547,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan SK Penghapusan Bupati Bintan Nomor 13/SK/2021 Tanggal 04 Agustus 2021.
- Penghapusan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp9.137.032.510,00 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bintan SK Penghapusan Bupati Bintan Nomor 11/SK/2021 Tanggal 04 Agustus 2021.
- Penghapusan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp6.544.486.116,00 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan SK Penghapusan Bupati Bintan Nomor 01/SK/2021 Tanggal 25 Desember 2020 dan 18/SK/2021 Tanggal 04 Agustus 2021.
- Penghapusan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp2.503.516.611,00 pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan SK Penghapusan Bupati Bintan Nomor 16/SK/2021 Tanggal 04 Agustus 2021.
- Penghapusan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp220.000.000,00 pada Dinas Sosial Kabupaten Bintan SK Penghapusan Bupati Bintan Nomor 14/SK/2021 Tanggal 04 Agustus 2021.
- Penghapusan Aset Bangunan Gedung sebesar Rp1.418.970.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan SK Penghapusan Bupati Bintan Nomor 08/SK/2021 Tanggal 04 Agustus 2021.
- Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp491.653.029,00 pada Sekretariat DPRD dan Kecamatan Bintan Timur.
- Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp9.596.983.242,00 yang terdiri dari Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp42.435.000,00, Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp108.953.485,00, Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp9.251.367.757,00 dan Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pekerjaan sebesar Rp194.227.000,00;
- Pembulatan atas Belanja Modal Bangunan Gedung pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp0,33.



- Mutasi kurang pencatatan antar OPD sebesar Rp17.548.865.203,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.
- Koreksi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audited Tahun 2021 berupa Reklas Gedung dan Bangunan ke Persediaan sebesar Rp6.834.266.682,00 yang disebabkan oleh terjadinya kesalahan penganggaran Barang yang akan diserahkan (Persediaan) kepada Instansi Vertikal (Satlantas Kabupaten Bintan) menggunakan rekening Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan.
- Koreksi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audited Tahun 2021 berupa Reklas Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp230.190.074,00 atas Belanja Modal Landscape Taman RSUD Kabupaten Bintan Tahun 2020 dan 2021 dimana terdapat Pengadaan Tanaman yang dicatatkan ke dalam Aset Tetap Lainnya. Terdapat juga koreksi sebagian tanaman yang dicatatkan ke dalam Aset Lain-lain untuk Tanaman yang dalam kondisi mati untuk diusulkan penghapusan pada tahun 2022.

7.5.3.3.3.2 Bangunan Monumen

Saldo Aset Tetap berupa Bangunan Monumen per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.581.127.869,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp74.822.000,00 atau 0,88 % dari Tahun 2020 sebesar Rp8.506.305.869,00.

- Penambahan Bangunan Monumen Tahun 2021 sebesar Rp74.822.000,00 berasal dari Belanja Modal Tahun 2021 pada Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan.
- Tidak terdapat Pengurangan Bangunan Monumen tahun 2021.

7.5.3.3.3.3 Bangunan Menara

Saldo Aset Tetap berupa Bangunan Menara per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00. Terdapat penambahan belanja modal bangunan Menara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp199.017.500,00 berupa Switcher/Menara Antena Lainnya tetapi direklasifikasi ke Peralatan Mesin karena Swticher/Menara Antena Lainnya diklasifikasikan sebagai asset tetap peralatan mesin.

7.5.3.3.3.4 Tugu Titik Kontrol/Pasti

Saldo Aset Tetap berupa Tugu Titik Kontrol/Pasti per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.055.835.803,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp460.228.731,00 atau 17,73% dari Tahun 2020 sebesar Rp2.595.607.072,00. Penambahan Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun 2021 sebesar Rp470.513.731,00 berasal dari Belanja Modal Tahun 2021 pada Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Seri Kuala Lobam, dan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan dan Pengurangan Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun 2021 sebesar Rp10.285.000,00 merupakan reklasifikasi ke asset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan.

**7.5.3.3.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**

Saldo Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.613.799.500.522,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp59.248.510.706,00 atau 3,81 % dari Tahun 2020 sebesar Rp1.554.550.989.816,00.

Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 merupakan mutasi tambah kurang Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Bintan selama Tahun 2021 yang terdiri dari:

**Tabel 7.5.131 Data Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Jalan, Irigasi, Jembatan	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	Jalan dan jembatan	1.181.030.478.710,00	35.280.654.934,00	126.079.500,00	1.216.185.054.144,00
2	Bangunan air (irigasi)	235.395.257.871,00	8.238.268.861,00	5.500.000,00	243.628.026.732,00
3	Instalasi	44.342.897.476,00	11.721.693.286,00	439.837.750,00	55.624.753.012,00
4	Jaringan	93.782.355.759,00	4.739.748.075,00	160.437.200,00	98.361.666.634,00
	Jumlah	1.554.550.989.816,00	59.980.365.156,00	731.854.450,00	1.613.799.500.522,00

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp59.980.365.156,00 berasal dari:

- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 sebesar Rp43.580.037.497,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Teluk Sebong, dan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan;
- Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklas Barang dan Jasa Tahun 2021 sebesar Rp3.149.565.609,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan.
- Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hasil Hibah dari Pemerintah Provinsi Kepri tahun 2021 sebesar Rp2.303.521.000,00 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.
- Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp9.287.006.327,00 yang berasal dari Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp35.638.570,00 dan Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung Bangunan sebesar Rp9.251.367.757,00;
- Terdapat Koreksi BPK Audited Tahun 2021 berupa Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan atas reklas Belanja Pemeliharaan ke Belanja Modal sebesar Rp1.552.725.723,00 serta Koreksi Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) yang dikapitalisasikan ke Induknya sebesar Rp107.509.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan.
- Tidak ada mutasi tambah pencatatan antar OPD.

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2021 sebesar Rp731.854.450,00 yang terdiri dari :

- Reklasifikasi ke Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp160.437.200,00;
- Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp186.417.250,00 yang terdiri dari Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp49.684.500,00, Reklasifikasi ke Aset



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp60.337.750,00 dan Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pekerjaan sebesar Rp76.395.000,00;

- Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Rusak Berat) sebesar Rp385.000.000,00.

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per OPD selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 7.5.132 Data Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Nama OPD	Jalan Irigasi Dan Jaringan		Selisih	(%)
		2021	2020		
1	Sekretariat DPRD	382.295.000,00	288.695.000,00	93.600.000,00	32,42
2	Sekretariat Daerah	1.136.904.800,00	1.136.904.800,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.283.378.421.673	1.255.116.426.667	28.261.995.006	2,25
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	157.410.866.135,00	143.462.846.635,00	13.948.019.500,00	9,72
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	92.640.281.440,00	85.995.412.335,00	6.644.869.105,00	7,73
7	Dinas Kesehatan	10.588.462.078,00	8.152.239.612,00	2.436.222.466,00	29,88
8	Dinas Pendidikan	1.109.675.347,00	1.029.342.267,00	80.333.080,00	7,80
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	19.791.200,00	19.791.200,00	0,00	0,00
10	Dinas Sosial	48.230.000,00	48.230.000,00	0,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	713.143.683,00	663.755.113,00	49.388.570,00	7,44
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31.625.000,00	31.625.000,00	0,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Tenaga Kerja	24.992.000,00	24.992.000,00	0,00	0,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	670.722.510,00	670.722.510,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan	7.303.879.815,00	5.385.358.815,00	1.918.521.000,00	35,62
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	111.808.894,00	111.808.894,00	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	104.390.000,00	104.390.000,00	0,00	0,00
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	35.616.820.441,00	35.419.370.441,00	197.450.000,00	0,56
20	Badan Pendapatan Daerah	19.415.000,00	19.415.000,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	125.358.281,00	125.358.281,00	0,00	0,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	397.313.965,00	397.313.965,00	0,00	0,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	866.996.672,00	866.996.672,00	0,00	0,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	62.786.418,00	62.786.418,00	0,00	0,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	72.364.237,00	72.364.237,00	0,00	0,00
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	34.980.000,00	34.980.000,00	0,00	0,00
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Bintan Utara	6.216.594.300,00	4.271.434.950,00	1.945.159.350,00	45,54
31	Kecamatan Bintan Timur	4.475.130.692,00	3.109.501.477,00	1.365.629.215,00	43,92
32	Kecamatan Tambelan	1.112.864.043,00	1.112.864.043,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Gunung Kijang	986.675.145,00	986.675.145,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Teluk Bintan	844.360.100,00	664.360.100,00	180.000.000,00	27,09
35	Kecamatan Teluk Sebong	2.989.561.899,00	2.209.276.379,00	780.285.520,00	35,32
36	Kecamatan Toapaya	1.404.814.445,00	939.966.560,00	464.847.885,00	49,45
37	Kecamatan Mantang	117.904.600,00	117.904.600,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Bintan Pesisir	151.944.100,00	151.944.100,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Seri Kuala Lobam	2.531.326.609,00	1.649.136.600,00	882.190.009,00	53,49
	Jumlah	1.613.799.500.522,00	1.554.550.989.816,00	59.248.510.706,00	3,81

**7.5.3.3.4.1 Jalan dan Jembatan**

Saldo Aset Tetap berupa Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.216.185.054.144,00 mengalami kenaikan sebesar Rp35.154.575.434,00 atau 2,98% dari Tahun 2020 sebesar Rp1.181.030.478.710,00 disebabkan adanya Penambahan Jalan dan Jembatan sebagai berikut.

Penambahan Jalan dan Jembatan sebesar Rp35.280.654.934,00 terdiri dari:

- Penambahan jalan dan jembatan Tahun 2021 sebesar Rp32.179.671.796,00 berasal dari Belanja Modal Tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan;
- Penambahan Aset yang bersumber dari barang dan jasa sebesar Rp660.601.350 pada Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan;
- Penambahan Aset yang bersumber dari barang dan jasa sebesar Rp669.306.565,00 pada Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan;
- Penambahan Reklasifikasi dari Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp110.840.500,00;
- Koreksi BPK Audited 2021 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan berupa penambahan Jalan dan Jembatan atas reklas Belanja Pemeliharaan ke Belanja Modal sebesar Rp1.552.725.723,00 serta Koreksi Reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) yang dikapitalisasikan ke Induknya sebesar Rp107.509.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan

Pengurangan Jalan dan Jembatan Tahun 2021 sebesar Rp126.079.500,00 merupakan reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pekerjaan sebesar Rp76.395.000,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp49.684.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

7.5.3.3.4.2 Bangunan Air/Irigasi

Saldo Aset Tetap berupa Bangunan Air/Irigasi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp243.628.026.732,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp8.232.768.861,00 atau 3,50% dari Tahun 2020 sebesar Rp235.395.257.871,00. disebabkan adanya Penambahan Bangunan Air/Irigasi sebagai berikut :

Penambahan Bangunan Air/Irigasi Tahun 2020 sebesar Rp8.238.268.861,00 berasal dari:

- Penambahan Bangunan Air/Irigasi Tahun 2020 sebesar Rp1.353.614.478,00 berasal dari Belanja Modal Tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Bintan, Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan.
- Penambahan Aset yang bersumber dari barang dan jasa atas sebesar Rp212.883.444,00 pada Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan.
- Penambahan Aset yang bersumber dari barang dan jasa atas sebesar Rp219.977.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruan Kabupaten Bintan.



- Penambahan Aset yang bersumber dari barang dan jasa atas sebesar Rp308.690.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bintan
- Penambahan Aset Bangunan Air/Irigasi sebesar Rp9.553.500,00 yang berasal dari Hibah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan SK Bupati Nomor 468/XI/2021 tanggal 01 November 2021;
- Penambahan reklasifikasi dari Aset Tetap Bangunan Gedung sebesar Rp6.133.550.439,00 pada Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan Kecamatan Bintan Timur

Pengurangan Aset Bangunan Air/Irigasi tahun 2021 sebesar Rp5.500.000,00 yang merupakan reklasifikasi ke asset tetap peralatan mesin – alat rumah tangga lainnya pada Sekretariat DPRD.

7.5.3.3.4.3 Instalasi

Saldo Aset Tetap berupa Instalasi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp55.624.753.012,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp11.281.855.536,00 atau 25,44% dari Tahun 2020 sebesar Rp44.342.897.476,00. Jumlah Aset Tetap Instalasi per 31 Desember 2021 merupakan mutasi tambah Aset Instalasi milik Pemerintah Kabupaten Bintan dengan rincian sebagai berikut.

Penambahan instalasi Tahun 2021 sebesar Rp11.721.693.286,00 berasal dari:

- Belanja Modal Instalasi Tahun 2021 sebesar Rp6.098.500.000,00 pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Kb, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.
- Penambahan Aset yang bersumber dari barang dan jasa atas sebesar Rp Rp893.609.750,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan
- Penambahan Aset Instalasi sebesar Rp2.026.310.000,00 yang berasal dari Hibah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan SK Bupati Nomor 468/XI/2021 tanggal 01 November 2021;
- Penambahan Aset Instalasi sebesar Rp267.657.500,00 yang berasal dari Hibah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan SK Bupati Nomor 416/IX/2021 tanggal 10 September 2021;
- Penambahan Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp2.435.616.036,00 yang terdiri dari penambahan reklasifikasi dari asset tetap peralatan mesin pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp35.638.570,00 dan reklasifikasi dari asset tetap bangunan Gedung pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp2.399.977.466,00

Pengurangan Aset Bangunan Air/Irigasi tahun 2021 sebesar Rp439.837.750,00 yang terdiri dari :

- Pengurangan atas Reklasifikasi ke asset tetap peralatan dan mesin - alat pengolahan lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp54.837.750,00;



- Pengurangan atas Reklasifikasi ke asset lainnya (rusak berat) pada Dinas Perikanan sebesar Rp385.000.000,00.

7.5.3.3.4 Jaringan

Saldo Aset Tetap berupa Jaringan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp98.361.666.634,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.579.310.875 atau 4,88% dari Tahun 2020 sebesar Rp93.782.355.759,00. Jumlah Aset Tetap Jaringan per 31 Desember 2020 merupakan mutasi tambah Aset Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Bintan dengan rincian sebagai berikut.

Penambahan Aset Tetap Jaringan sebesar Rp4.739.748.075,00 berasal dari:

- Penambahan Jaringan Tahun 2021 sebesar Rp3.948.251.223,00 berasal dari Belanja Modal Tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan.
- Penambahan Aset yang bersumber dari barang dan jasa atas sebesar Rp184.497.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Bintan
- Penambahan atas Reklasifikasi dari Aset Tetap Bangunan Gedung sebesar Rp606.999.352,00 pada Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Pengurangan Aset Jaringan tahun 2021 sebesar Rp160.437.200,00 merupakan reklasifikasi ke belanja barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

7.5.3.3.5 ASET TETAP LAINNYA

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp53.635.440.194,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.769.256.619,00 atau 3,41% dari Tahun 2020 sebesar Rp51.866.183.575,00.

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 merupakan mutasi tambah kurang Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang terdiri dari:

Tabel 7.5.133 Data Mutasi Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Aset Tetap Lainnya	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	Bahan perpustakaan	16.670.505.250,00	1.547.888.622,00	0,00	18.218.393.872,00
2	Barang bercorak kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3.554.290.551,00	0,00	0,00	3.554.290.551,00
3	Hewan/Ternak & Tumbuhan	464.833.000,00	0,00	0,00	464.833.000,00
4	Biota Perairan	105.710.000,00	70.981.750,00	14.256.000,00	162.435.750,00
5	Tanaman	536.585.814,00	230.190.074,00	65.547.827,00	701.228.061,00
6	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Aset Tetap Renovasi	30.534.258.960,00	0,00	0,00	30.534.258.960,00
8	Software	0,00	326.535.000,00	326.535.000,00	0,00
9	Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	1.603.897.040,00	1.603.897.040,00	0,00
10	Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
	Jumlah	51.866.183.575,00	3.789.092.486,00	2.019.835.867,00	53.635.440.194,00



Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.789.092.486,00 berasal dari :

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2021 sebesar Rp1.954.288.040,00;
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.547.888.622,00;
- Koreksi BPK Audited Tahun 2021 berupa penambahan Aset Tetap Lainnya atas Hasil Koreksi Reklas Pencatatan Tanaman sebesar Rp230.190.074,00 di RSUD Kabupaten Bintan yang sebelumnya tercatat di Bangunan dan Gedung RSUD Kabupaten Bintan (Tercatat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan).
- Koreksi BPK Audited tahun 2021 berupa penambahan Biota Laut sebesar Rp56.725.750,00 di Dinas Perikanan Kabupaten Bintan berupa bibit Ikan Lele dan Ikan Gurami.

Terdapat Pengurangan Aset Tetap Lainnya tahun 2021 sebesar Rp2.019.835.867,00 berasal dari :

- Reklasifikasi ke Belanja Barang Jasa sebesar Rp14.656.000,00;
- Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp1.939.632.040,00 yang terdiri dari Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya BOS ke Bahan Perpustakaan sebesar Rp1.545.467.040,00, Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp251.165.000,00 dan Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp143.000.000,00;
- Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp65.547.827,00 yang harga perolehannya dibawah nilai kapitalisasi sehingga tercatat pada Buku Ekstracomptable pada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.

Aset Tetap Lainnya per OPD selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.5.134 Data Aset Tetap Lainnya Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Nama OPD	Aset Tetap Lainnya		Selisih	(%)
		2021	2020		
1	Sekretariat DPRD	84.221.500,00	84.221.500,00	0,00	0,00
2	Sekretariat Daerah	283.365.600,00	283.365.600,00	0,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30.822.190.235,00	30.822.190.235,00	0,00	0,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	419.978.750,00	419.978.750,00	0,00	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00
7	Dinas Kesehatan	204.027.747,00	39.385.500,00	164.642.247	418,03
8	Dinas Pendidikan	16.859.909.690,00	15.312.021.068,00	1.547.888.622,00	10,11
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	519.687.948,00	519.687.948,00	0,00	0,00
16	Dinas Perikanan	242.050.750,00	185.325.000,00	56.725.750	30,61
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	67.817.999,00	67.817.999,00	0,00	0,00
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	84.182.250,00	84.182.250,00	0,00	0,00



No	Nama OPD	Aset Tetap Lainnya		Selisih	(%)
		2021	2020		
20	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	696.500,00	696.500,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.830.100,00	4.830.100,00	0,00	0,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	77.180.839,00	77.180.839,00	0,00	0,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	474.939.304,00	474.939.304,00	0,00	0,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	1.753.476.000,00	1.753.476.000,00	0,00	0,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23.338.700,00	23.338.700,00	0,00	0,00
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.397.635.832,00	1.397.635.832,00	0,00	0,00
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Bintan Utara	27.280.000,00	27.280.000,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Bintan Timur	8.140.000,00	8.140.000,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Tambelan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Gunung Kijang	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Teluk Bintan	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Teluk Sebong	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Toapaya	194.490.450,00	194.490.450,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Mantang	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Bintan Pesisir	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Seri Kuala Lobam	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	53.635.440.194,00	51.866.183.575,00	1.769.256.619,00	3,41

7.5.3.3.5.1 Bahan Perpustakaan

Saldo Aset Tetap lainnya berupa Bahan Perpustakaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.218.393.872,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.547.888.622,00 atau 9,29% dari Tahun 2020 sebesar Rp16.670.505.250,00. Jumlah Buku Perpustakaan milik Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2021 merupakan mutasi tambah dengan rincian sebagai berikut.

Penambahan Bahan Perpustakaan sebesar Rp1.547.888.622,00 bersumber dari :

- Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.421.582,00;
- Reklasifikasi dari aset tetap lainnya BOS pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.545.467.040,00.

Tidak ada Pengurangan Bahan Perpustakaan pada Tahun 2021.

7.5.3.3.5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Saldo Aset Tetap lainnya berupa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.554.290.551,00 dan tidak mengalami perubahan dari Tahun 2020 sebesar Rp3.554.290.551,00.

7.5.3.3.5.3 Hewan

Saldo Aset Tetap lainnya berupa Hewan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp464.833.000,00 dan tidak mengalami perubahan dari Tahun 2020 Sebesar Rp464.833.000,00.

**7.5.3.3.5.4 Biota Perairan**

Saldo Aset Tetap lainnya berupa Biota Perairan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp162.435.750,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp56.725.750,00 atau 53,66% dari Tahun 2020 Sebesar Rp105.710.000,00.

Penambahan Biota Perairan sebesar Rp70.981.750,00 terdiri dari :

- Penambahan belanja modal pada Kelurahan Teluk Sekuni sebesar Rp14.256.000,00;
- Koreksi BPK Audited tahun 2021 yakni penambahan Biota Laut sebesar Rp56.725.750,00 di Dinas Perikanan Kabupaten Bintan berupa bibit Ikan Lele dan Ikan Gurami.

Pengurangan Biota Perairan sebesar Rp14.256.000,00 atas reklasifikasi ke belanja barang dan jasa.

7.5.3.3.5.5 Tanaman

Saldo Aset Tetap lainnya berupa Tanaman per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp701.228.061,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp164.642.247,00 atau 30,68% dari Tahun 2020 Sebesar Rp536.585.814,00.

Terdapat Penambahan /Koreksi BPK Audited tahun 2021 berupa penambahan Aset Tetap Lainnya atas Hasil Koreksi Reklas Pencatatan Tanaman sebesar Rp230.190.074,00 di RSUD Kabupaten Bintan yang sebelumnya tercatat di Bangunan dan Gedung RSUD Kabupaten Bintan (Tercatat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan).

Terdapat Pengurangan Aset Tetap Lainnya tahun 2021 sebesar Rp65.547.827,00 yang harga perolehannya dibawah nilai kapitalisasi sehingga tercatat pada Buku Ekstracomtable pada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.

7.5.3.3.5.6 Barang Koleksi Non Budaya

Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki Aset Barang Koleksi Non Budaya.

7.5.3.3.5.7 Aset Tetap Renovasi

Saldo Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.534.258.960,00 dan tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun 2020 sebesar Rp30.534.258.960,00.

7.5.3.3.5.8 Aset Tetap Lainnya – Software

Saldo Aset Tetap lainnya berupa Software per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00. Terdapat penambahan belanja modal asset tetap lainnya – software sebesar Rp326.535.000,00 pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan direklasifikasi ke asset tak berwujud – software sebesar Rp326.535.000,00.

7.5.3.3.5.9 Aset Tetap Lainnya BOS

Saldo Aset Tetap Lainnya BOS per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00. Terdapat penambahan belanja modal asset tetap lainnya BOS sebesar Rp1.603.897.040,00 pada Dinas Pendidikan dan direklasifikasi ke belanja barang dan



jasa sebesar Rp400.000,00, ke bahan perpustakaan sebesar Rp1.545.467.040,00 dan ke asset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp58.030.000,00.

7.5.3.3.5.10 Aset Tetap Lainnya BLUD

Saldo Aset Tetap Lainnya BLUD per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00. Terdapat penambahan belanja modal asset tetap lainnya BLUD sebesar Rp9.600.000,00 pada Dinas Kesehatan dan direklasifikasi ke asset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp9.600.000,00.

7.5.3.3.6 KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN

Aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.785.134.272,00 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp163.113.000,00 atau 0,52% dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp31.622.021.272,00.

Jumlah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 merupakan mutasi tambah kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Kabupaten Bintan yang terdiri dari:

- Penambahan dari Reklasifikasi antar Aset Tetap pada Tahun 2021 sebesar Rp270.622.000,00 yang terdiri dari Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung Bangunan sebesar Rp194.227.000,00 dan Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp76.395.000,00;
- Pengurangan Kontruksi Dalam Pengerjaan atas Koreksi BPK Audited 2021 sebesar Rp107.509.000,00 yang direklas ke KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan) untuk dilakukan kapitalisasi di Aset Induknya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan yakni untuk pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Bakti Praja Kel. Tanjunguban Selatan Kec. Bintan Utara.

Tabel 7.5.135 Data Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Konstruksi Dalam Pekerjaan	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	Tanah	90.365.000,00	0,00	0,00	90.365.000,00
2	Gedung dan Bangunan	26.047.362.746,00	194.227.000,00	0,00	26.241.589.746,00
3	Jalan, irigasi dan jaringan	5.484.293.526,00	76.395.000,00	107.509.000,00	5.453.179.526,00
	Jumlah	31.622.021.272,00	270.622.000,00	107.509.000,00	31.785.134.272,00

Tabel 7.5.136 Data Konstruksi Dalam Pengerjaan Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Nama Pelaksana/Pekerjaan	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RSUD Kijang (Tahap 3)	9.923.667.951,00	KDP Tahun 2014
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RSUD Kijang (Tahap 4)	12.640.498.667,00	KDP Tahun 2015
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan Paving Block Lr. Nangka RT. 03 RW. 14 Tokojo Kp. Beringin Indah Barat Kel. Kijang Kota Kec.Bintan Timur	2.367.246,00	KDP Tahun 2016
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan Paving Block Gg.	2.603.970,00	KDP Tahun 2016



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Nama Pelaksana/Pekerjaan	Nilai (Rp)	Keterangan
	Alumina I RT. 01 RW. 22 Kp. Kolong Enam Kel.Kijang Kota Kec.Bintan Timur		
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan Semenisasi Beton Buras Bertulang Jalan Pasar Baru Gg. Raflesia RT. 04 RW. 001 Desa Sebong Lagoi Kec. Teluk Sebong	4.063.265,00	KDP Tahun 2016
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan Insfarstruktur SPAM Perdesaan Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya	88.192.000,00	KDP Tahun 2016
7	Dinas Perhubungan yaitu DED Fasilitas Pendukung Pelabuhan Tanjung Berakit	142.175.000,00	KDP Tahun 2016
8	Dinas Perhubungan yaitu UPL/UKL Pembangunan Dermaga Nelayan RT. 04/01 Dusun I Desa Sebong Pereh Kec. Teluk Sebong	49.665.000,00	KDP Tahun 2016
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu Perencanaan Teknis Pemasangan Jaringan Listrik dan Penyambungan Daya Listrik Pabrik Es Tanjung Uban Kec. Bintan Utara	24.420.000,00	KDP Tahun 2016
10	Dinas Pekerjaan Umum yaitu Perencanaan Teknis Jalan Kp. Tekis Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya	197.800.000,00	KDP Tahun 2016
11	Dinas Pekerjaan Umum yaitu Penyusunan Detail Desain Peningkatan Kapasitas Jalan Perbaikan Geometrik Jalan : Ruas Jalan Ibukota Bandar Seri Bentan, Ruas Jalan KM. 15 Gesek	148.621.000,00	KDP Tahun 2016
12	Dinas Pekerjaan Umum yaitu Review Desain Perencanaan Jalan Lintas Barat (Lanjutan)	189.777.000,00	KDP Tahun 2016
13	Dinas Pekerjaan Umum yaitu Konsultan DED	289.113.000,00	KDP Tahun 2016
14	Dinas Pekerjaan Umum yaitu Perencanaan Teknis DED IKK Teluk Sebong Kec. Teluk Sebong	49.914.000,00	KDP Tahun 2016
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Pengawasan Teknis Pengadaan Sarana Budidaya Pertanian Pekerjaan Saung Tani perlengkapan, Gudang Pupuk/ Alat, Tower Air cor beton, Land Clearing jalan usaha tani (JUT), jalan produksi 0,90 KMx4M, Embung, Mesin Air Instalasi Tiang Beton	99.401.000,00	KDP Tahun 2016
16	Dinas Perumahan dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Posyandu Pandan Wangi RT. 02 RW. 05 Kp. Sei Datok Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur	4.674.684,00	KDP Tahun 2017
17	Dinas Perumahan dan Penataan Ruang yaitu Pembangunan Gerbang Koridor Simpang 3 Lintas Barat Menuju Ibukota Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan	1.291.896.084,00	KDP Tahun 2017
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan Balai Pertemuan Pemuda Kamboja. Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara	5.981.000,00	KDP Tahun 2017
19	Dinas Kesehatan yaitu Jasa Perencanaan Rehab Berat Puskesmas Kijang	49.610.000,00	KDP Tahun 2017
20	Dinas Kesehatan yaitu Jasa Perencanaan Rehab Bangunan Puskesmas Teluk Bintan	7.999.063,00	KDP Tahun 2017
21	Dinas Kesehatan yaitu Jasa Perencanaan Rehab Bangunan Puskesmas Sri Bintan	7.999.063,00	KDP Tahun 2017
22.	Dinas Kesehatan yaitu Jasa Perencanaan Rehab sedang Puskesmas Tanjung Uban	49.500.000,00	KDP Tahun 2017
23	Dinas Kesehatan yaitu Jasa Perencanaan Rehab Bangunan Puskesmas Berakit	7.999.063,00	KDP Tahun 2017
24	Dinas Kesehatan yaitu Jasa Perencanaan Rehab Bangunan Puskesmas Toapaya	7.999.061,00	KDP Tahun 2017
25	Dinas Kesehatan yaitu Jasa Perencanaan Rehab sedang Puskesmas Mantang	32.120.000,00	KDP Tahun 2017
26	Dinas Kesehatan yaitu Jasa Perencanaan Rehab Berat Puskesmas Teluk Sasah	49.992.250,00	KDP Tahun 2017
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Desa Mapur	44.522.500,00	KDP Tahun 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Nama Pelaksana/Pekerjaan	Nilai (Rp)	Keterangan
	Kec. Bintan Pesisir		
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya	49.857.500,00	KDP Tahun 2017
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Perdesaan Desa Pulau Pinang Kec. Tambelan	49.527.500,00	KDP Tahun 2017
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Optimalisasi SPAM IKK Kawal Kec. Gunung Kijang	74.307.500,00	KDP Tahun 2017
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Optimalisasi Desa Penaga Kec. Teluk Bintan	29.672.500,00	KDP Tahun 2017
32.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Optimalisasi SPAM Kp. Bina Desa Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur	49.912.500,00	KDP Tahun 2017
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan SPAM Perdesaan Desa Pulau Mentebung Kec. Tambelan	49.527.500,00	KDP Tahun 2017
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan RT. 02 RW. 01 Cikolek Kec. Toapaya	24.436.500,00	KDP Tahun 2017
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pengerasan Jalan SDIT An. Nahl Kel. Teluk Lobam Kec. Seri Kuala Lobam	19.800.000,00	KDP Tahun 2017
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Wacopek - PPI Kec. Bintan Timur	160.961.500,00	KDP Tahun 2017
37.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan/Pengaspalan Jalan Lingkar Wacopek - Sp. Wacopek Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur	166.995.000,00	KDP Tahun 2017
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Kp. Pelita - Kp. Beringin Desa Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam	155.940.000,00	KDP Tahun 2017
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pelebaran Jalan Berdikari II Kel. Tanjunguban Timur Kec. Bintan Utara	159.652.500,00	KDP Tahun 2017
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan/Peningkatan Pengaspalan Jalan Kp. Siantan menuju Kp. Balai Rejo Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan	126.154.000,00	KDP Tahun 2017
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan/Pengaspalan Jalan Pepaya Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya	118.371.500,00	KDP Tahun 2017
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan/Pengaspalan Jalan Pesantren Hidayatullah RT. 01/RW. 01 Kel. Toapaya Asri Kec. Toapaya	123.493.000,00	KDP Tahun 2017
43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pengaspalan Jalan Siantan - SMP N 28 Bintan Kec. Teluk Bintan	49.582.500,00	KDP Tahun 2017
44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan/Pengaspalan Jalan Maju Jaya Kel. Toapaya Asri Kec. Toapaya	98.304.000,00	KDP Tahun 2017
45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan/Pengaspalan Jalan SDN. 006 Pulau Ladi Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan	49.582.500,00	KDP Tahun 2017
46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Desa Batu Lepuk - Bandara/Air Strip Pulau Tambelan	178.424.000,00	KDP Tahun 2017
47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Kp. Belak - Kemalai Kec. Teluk Sebong	168.150.000,00	KDP Tahun 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Nama Pelaksana/Pekerjaan	Nilai (Rp)	Keterangan
48	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Perencanaan Penyusunan Penerangan Umum Rayon Tanjung Uban	79.970.000,00	KDP Tahun 2018
49	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Perencanaan Penyusunan Penerangan Umum Rayon Kijang Dan Bintan Centre	79.970.000,00	KDP Tahun 2018
50	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Pengawasan Teknis Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	19.000.000,00	KDP Tahun 2018
51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Perencanaan Pembangunan Duiker Jalan Namling Kec. Toapaya	9.790.000,00	KDP Tahun 2018
52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Review Desain Pembangunan/Penataan Persimpangan KM. 16 Toapaya Kec. Toapaya	138.369.000,00	KDP Tahun 2018
53	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Perencanaan Teknis (DED) Saluran Tersier Permukiman Kecamatan Bintan Utara	81.664.495,00	KDP Tahun 2018
54	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Cendana RT. 005 RW. 002 Pasar Baru Kel. Tanjunguban Selatan Kec. Bintan Utara	2.745.000,00	KDP Tahun 2018
55	Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Monumen Kp. Tua Mentigi Kel. Tanjunguban Kec. Bintan Utara	99.850.000,00	KDP Tahun 2019
56	Jasa Perencanaan Ruang pertemuan Puskesmas Teluk Bintan	7.205.000,00	KDP Tahun 2019
57	Perencanaan Teknis Gedung Arsip Dinas PUPR Kabupaten Bintan	41.690.000,00	KDP Tahun 2019
58	Perencanaan Pengadaan Mesin Pompa Air dan Peninggian Tangki Air RT.04 RT.06 RW.03 Lobam Mas Asri Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam	17.930.000,00	KDP Tahun 2020
59	Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan di Kec. Bintan Timur	20.735.000,00	KDP Tahun 2020
60	Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan di Kelurahan Sei Lekop dan Kel. Gunung Lengkuas	20.735.000,00	KDP Tahun 2020
61	Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan lampu Jalan Menuju Tempat Ibadah, simpang Jalan Dan Fasilitas Umum Kab. Bintan	99.980.000,00	KDP Tahun 2020
62	Perencanaan Pembangunan saluran drainase lingkungan RT.002 RW.005 Kelurahan Sei Lekop Kec. Bintan Timur	14.048.333,00	KDP Tahun 2020
63	Perencanaan Pembangunan sarana RTH Kolam Kijang (Pagar Pengaman Keliling Kolam) Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (tahap 2)	89.837.000,00	KDP Tahun 2020
64	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan di Kampung Berek Motor RW 008 Kec. Bintan Timur	20.735.000,00	KDP Tahun 2020
65	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Jl. Nusantara RT.002 RW.002 Kec. Bintan Timur	14.048.333,00	KDP Tahun 2020
66	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan RW.001 RW.003 RW.005 RW.006 Kelurahan Sei Lekop Kec. Bintan Timur	14.048.333,00	KDP Tahun 2020
67	Perencanaan Pembangunan saluran drainase lingkungan RT.002 RW.003 Kelurahan Sei Enam Kec. Bintan Timur	14.048.333,00	KDP Tahun 2020
68	Perencanaan Pembangunan pelantar Permukiman Kp. Panglong Desa Berakit Kec. Teluk Sebong	57.986.000,00	KDP Tahun 2020
69	Perencanaan pembangunan pelantar Permukiman RT.004 RW.003 Desa Mantang Lama Kec. Mantang	5.712.857,00	KDP Tahun 2020
70	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Kec. Bintan Timur	14.048.333,00	KDP Tahun 2020
71	Perencanaan Pembangunan Paving Blok Gg. Kaswari Rt. 01 Rw.05 Kec. Gunung Kijang (242 M2)	5.989.000,00	KDP Tahun 2020
72	Perencana Pembangunan Paving Blok, Batu Miring dan Timbunan Jalan Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang (276 M2)	5.989.000,00	KDP Tahun 2020
73	Perencanaan pembangunan pelantar Permukiman Kp. Mentigi Kec. Bintan Utara	5.712.858,00	KDP Tahun 2020
74	Perencanaan Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Jl. Mulya Sari RT.012 RW.002 Tanjung Uban Selatan Kota Kec. Bintan utara (Lanjutan) (266 M2)	5.578.750,00	KDP Tahun 2020
75	Perencanaan Pembangunan Pembangunan Jalan	5.989.000,00	KDP Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Nama Pelaksana/Pekerjaan	Nilai (Rp)	Keterangan
	Semenisasi Beton Bertulang Sidodadi RT.03 RW.02 Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan (226 M2)		
76	Perencanaan Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Jl. Pasar Baru Blok A. RT.05 RW.01 Kamboja Luar Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan utara (204 M2)	5.578.750,00	KDP Tahun 2020
77	Perencanaan Pembangunan Pembangunan Dinding penahan Tanah RT.03 RW.01 Kelurahan Teluk Lobam Kec. Seri Kuala Lobam	9.988.000,00	KDP Tahun 2020
78	Perencanaan Pembangunan Pembangunan Fasilitas Umum (Sumur) RT. 01 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir (1 Kegiatan)	6.182.000,00	KDP Tahun 2020
79	Perencanaan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Gg. Lengkuas Rt. 008 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir (192 M2)	5.989.000,00	KDP Tahun 2020
80	Perencanaan Pembangunan / Peningkatan Saluran Drainase lingkungan Gg. Sepat RT. 004 RW 004 Perumahan Telaga Surya Kelurahan Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara	16.567.500,00	KDP Tahun 2020
81	Perencanaan pembangunan Dinding penahan Tanah Kp. Kolam Renang RT.004 RW.003 Kecamatan Bintan Timur	9.988.000,00	KDP Tahun 2020
82	Perencanaan Pembangunan Pembangunan Dinding penahan Tanah RT.01 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir	9.988.000,00	KDP Tahun 2020
83	Perencanaan Pembangunan Paving Blok Gg. Kemunting RT.04 RW.03 Kelurahan Gunung Lengkuas Kec. Bintim (Lanjutan) (190 M2)	6.440.000,00	KDP Tahun 2020
84	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kampung Budi Mulya Gg. Seta RT.002 RW.004 Kelurahan Kijang Kota Kec. Bintan Timur (Tahap 4)	14.214.285,00	KDP Tahun 2020
85	Pembangunan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kampung Kolam Renang RT.004 RW. 003 Kelurahan Kijang Kota Kec. Bintan Timur	14.214.285,00	KDP Tahun 2020
86	Perencanaan Pembangunan Pembangunan Semenisasi Beton Gg. Pala 1 RT.001 RW002 Kec. Bintan Timur (226 M2)	5.593.750,00	KDP Tahun 2020
87	Perencanaan Pembangunan Semenisasi Beton Jl. Kampung Baru Kelurahan Sei Lekop Kec. Bintan Timur (538 M2)	5.593.750,00	KDP Tahun 2020
88	Perencanaan Pembangunan Paving Blok RT.04 RW.04 Gunung Lengkuas Kec. Bintim (390 M2)	6.440.000,00	KDP Tahun 2020
89	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok Kampung Nosari Timur RT.003 RW.015 Kec. Bintan Timur (190 M2)	5.593.750,00	KDP Tahun 2020
90	Perencanaan Pembangunan Jalan Paving Blok Jl. Jahe RT.004 RW.002 Kec. Bintan Timur(Lanjutan) (292 M2)	5.593.750,00	KDP Tahun 2020
91	Perencanaan Pembangunan Paving Blok Gg. Anggur RT. 05 RW. 01 Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam (190 M2)	6.996.000,00	KDP Tahun 2020
92	Perencanaan Pembangunan Jalan Semenisasi Beton bertulang Gg. Harahap Desa Kuala Sempang Kec Seri Kuala Lobam (226 M2)	6.996.000,00	KDP Tahun 2020
93	Perencanaan Pembangunan Jalan Semenisasi Beton bertulang menuju TK/PAUD PETRA Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam (72 m2)	6.996.000,00	KDP Tahun 2020
94	Perencanaan Pembangunan Jalan Semenisasi Beton bertulang Perumahan Lobam Mas Asri 2 RT.01 RW. 01 Kel. Tanjung Permai Kec Seri Kuala Lobam (150 M2)	6.996.000,00	KDP Tahun 2020
95	Perencanaan Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Gg. Garuda VIII RT. 01 RW. 01 Kel. Tanjung Permai Kec. Seri Kuala Lobam (304 M2)	6.996.000,00	KDP Tahun 2020
96	Perencanaan Rehap Balai Pertemuan Kp. Lengkuas Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (Lanjutan)	12.405.000,00	KDP Tahun 2020
97	Perencanaan bangunan tugu tulisan di Kec. Bintan Utara (1 lokasi)	69.910.000,00	KDP Tahun 2020
98	Pengawasan Pembangunan pagar TPU Kecamatan Binpes (1 Lokasi) (1 Kegiatan)	15.000.000,00	KDP Tahun 2020
99	Perencanaan Pembangunan Pagar Makam Jl. Lama Tg.	11.980.833,00	KDP Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Nama Pelaksana/Pekerjaan	Nilai (Rp)	Keterangan
	Uban Km. 27 Kec. Toapaya		
100	Detail Engineering Design (DED) Penataan Kawasan Pujasera dan Kios Kolam Tasek Gemilang Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur	99.957.000,00	KDP Tahun 2020
101	Perencanaan Pembangunan Ruang Pertemuan Perumahan Telaga Surya Kelurahan Tanjung Uban Utara Kecamatan Bintan Utara Kab. Bintan	12.405.000,00	KDP Tahun 2020
102	Perencanaan Pembangunan Taman bermain di kec. Seri Kuala Lobam (1 lokasi)	19.910.000,00	KDP Tahun 2020
103	Perencanaan DED Mesjid Terapung Tambelan Kec. Tambelan (1 Kegiatan)	99.850.000,00	KDP Tahun 2020
104	Jasa Perencanaan Posyandu Wijaya Kesuma	6.340.277,00	KDP Tahun 2020
105	MASTER PLAN RSUD 2020 (BLUD 2020)	636.460.000,00	KDP Tahun 2020
106	DED Bangunan Tempat Parkir	14.998.500,00	KDP Tahun 2020
107	Perencanaan Teknis/Ded Pembangunan Kantor Pelayanan Sim Satlantas (Koreksi Bpk Tahun 2020)	99.715.000,00	KDP Tahun 2020
108	Perencanaan Teknis Penataan Bundaran Simpang Km. 16 Toapaya (Koreksi Bpk Tahun 2020)	94.600.000,00	KDP Tahun 2020
109	Perencanaan Teknis/Ded Pembangunan Gedung Nasional Dan Rumah Dinas Bupati Di Bintan Utara (Koreksi Bpk Tahun 2020)	99.825.000,00	KDP Tahun 2020
110	Perencanaan Teknis/Ded Pembangunan Batu Miring Kantor Bp3bk Kab. Bintan (Koreksi Bpk Tahun 2020)	69.850.000,00	KDP Tahun 2020
111	Belanja Jasa Konsultan Individu Perencanaan Dan Pengawasan Teknis Peningkatan Sarana Bangunan Balai Tenun Kec. Bintan Utara (Koreksi Bpk Tahun 2020)	18.499.250,00	KDP Tahun 2020
112	Belanja Perencanaan Teknis/Ded Resettlement, Pematangan Lahan Dan Grading Kawasan Desa Pengudang (Koreksi Bpk Tahun 2020)	99.888.000,00	KDP Tahun 2020
113	Perencanaan /Desain Engineering Kegiatan Dak Pembangunan /Perbaikan Balai Penyuluhan Bpp (Koreksi Bpk Th 2020)	27.445.000,00	KDP Tahun 2020
114	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan/Desain Engineering- Pembuatan Plaza Pusat Jajanan/Kuliner Km 52 (Koreksi Bpk Tahun 2020)	19.943.000,00	KDP Tahun 2020
115	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan/Desain Engineering Pembuatan Menara Pandang Km.52 (Koreksi Bpk Tahun 2020)	13.942.500,00	KDP Tahun 2020
116	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan/Desain Engineering Pembangunan Gazebo Km.52 (Koreksi Bpk Th 2020)	6.979.500,00	KDP Tahun 2020
117	Perencanaan Teknis (DED) Sarana Dan Prasarana SPAM IKK Kawal (Koreksi BPK Tahun 2020)	54.175.000,00	KDP Tahun 2020
118	Perencanaan Teknis (DED) Sarana Dan Prasarana SPAM IKK Teluk Bintan (Koreksi BPK TH 2020)	63.525.000,00	KDP Tahun 2020
119	Perencanaan Teknis/DED Jalan Jalan Kec. Seri Kuala Lobam (Koreksi BPK Tahun 2020)	99.550.000,00	KDP Tahun 2020
120	Perencanaan Teknis (DED) Jalan Dan Jembatan (Koreksi BPK Tahun 2020)	89.870.000,00	KDP Tahun 2020
121	Perencanaan Teknis Sistem Drainase Area Simpang Km.16 (Koreksi BPK Tahun 2020)	84.920.000,00	KDP Tahun 2020
122	Perencanaan Teknis (DED) Jalan Dan Jembatan (Koreksi BPK Tahun 2020)	29.796.800,00	KDP Tahun 2020
123	Perencanaan Teknis Peningkatan Kapasitas Jl. Sp. Wacopek-Batu Licin (Koreksi Bpk Tahun 2020)	84.964.000,00	KDP Tahun 2020
124	Perencanaan Teknis (DED) Sarana Dan SPAM IKK Kp Bugis (Koreksi BPK Tahun 2020)	39.900.300,00	KDP Tahun 2020
125	Perencanaan Teknis Overlay Jl. Utama Perumahan Lobam Bestari (Koreksi Bpk Tahun 2020)	84.683.500,00	KDP Tahun 2020
126	Perencanaan Teknis Pengaspalan Jl. Semangka Tr.01 Rw.01 Desa Toapaya (Koreksi Bpk Tahun 2020)	99.844.800,00	KDP Tahun 2020
127	Perencanaan Teknis DED Jalan Kp. Limau Kec. Seri Kuala Lobam (Koreksi BPK Tahun 2020)	99.539.000,00	KDP Tahun 2020
128	Perencanaan Teknis Jalan Bansun Kec. Gunung Kijang (Koreksi Bpk Tahun 2020)	89.760.000,00	KDP Tahun 2020
129	Perencanaan Teknis/DED Jl. Wakatobi Kec. Gunung Kijang (Koreksi BPK Tahun 2020)	99.385.000,00	KDP Tahun 2020
130	Perencanaan Teknis/DED Jl. Kimbong Desa Sri Bintan Kec. Teluk Sebong (Koreksi BPK Tahun 2020)	99.488.000,00	KDP Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Nama Pelaksana/Pekerjaan	Nilai (Rp)	Keterangan
131	Perencanaan Teknis/DED Jl. Lintas 2 Kp. Sirjang Rt.04/Rw.02 Desa Toapaya (Koreksi BPK Tahun 2020)	99.682.000,00	KDP Tahun 2020
132	Perencana Teknis Peningkatan Jl. Karet Kec. Bintan Utara (Koreksi Bpk Th 2020)	84.777.000,00	KDP Tahun 2020
133	Pembayaran Termin Perencanaan Teknis Pengaspalan Sei Jeram (Koreksi BPK Tahun 2020)	89.817.200,00	KDP Tahun 2020
134	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan/Design Engenering - Pembuatan Jalur Pejalan Kaki/Pedestrian Km.35 (Koreksi BPK Tahun 2020)	8.992.500,00	KDP Tahun 2020
135	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pengadaan Tanah Embung Hulu Sungai (Koreksi BPK Tahun 2020)	90.365.000,00	KDP Tahun 2020
136	Dinas Kesehatan yaitu belanja biaya kosultasi perencanaan pembangunan tempat pelayanan bencana pandemi	15.532.000,00	Penambahan KDP Tahun 2021
137	Dinas Kesehatan yaitu belanja biaya kosultasi perencanaan Rehab ruang Mobile X-Ray	11.902.000,00	Penambahan KDP Tahun 2021
138	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum, output Dokumen Lingkungan Amdal / UKL-UPL Pantai Dugong KM.52 Trikora (Bagian Destinasi)	86.878.000,00	Penambahan KDP Tahun 2021
139	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu Belanja Modal Jalan Khusus. Output Dokumen Lingkungan Amdal / UKL-UPL Pantai Nara, Trikora (Bagian Destinasi)	76.395.000,00	Penambahan KDP Tahun 2021
140	Dinas Perhubungan yaitu Belanja Konsultan Perencanaan Tenis (Pembangunan, Rekonstruksi, Rehabilitasi, Pemeliharaan Berkala Dermaga / Pelabuhan Kabupaten) Di Kp. Telang Kecamatan Mantang	79.915.000,00	Penambahan KDP Tahun 2021
	Jumlah	31.785.134.272,00	

7.5.3.3.7 AKUMULASI PENYUSUTAN

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.665.222.704.151,00 mengalami kenaikan sebesar Rp143.769.838.339,00 atau 9,45% dari Tahun 2020 sebesar Rp1.521.452.865.812,00.

Tabel 7.5.137 Data Mutasi Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Akumulasi Penyusutan	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	365.968.046.637,00	415.344.148.664,00
2	Gedung dan Bangunan	217.316.765.315,00	235.141.585.569,00
3	Jalan, irigasi dan jaringan	910.799.907.077,00	984.202.710.958,00
4	Aset Tetap Lainnya	27.368.146.783,00	30.534.258.960,00
	Jumlah	1.521.452.865.812,00	1.665.222.704.151,00

Tabel 7.5.138 Data Akumulasi Penyusutan Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Nama OPD	Akumulasi Penyusutan 2021 (Rp)			
		Peralatan Dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya
1	Sekretariat DPRD	11.471.385.872,00	16.857.336.811,00	65.909.469,00	0,00
2	Sekretariat Daerah	38.607.955.875,00	21.799.683.066,00	323.747.713,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.549.574.489,00	17.150.745.494,00	896.874.844.740,00	30.534.258.960,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	17.009.784.266,00	9.894.355.386,00	37.020.258.267,00	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.133.524.221,00	10.622.902,00	0,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	15.325.824.748,00	2.476.374.866,00	33.105.570.399,00	0,00
7	Dinas Kesehatan	108.262.557.443,00	18.271.697.117,00	953.120.742,00	0,00
8	Dinas Pendidikan	37.575.654.141,00	87.651.012.089,00	412.009.470,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Nama OPD	Akumulasi Penyusutan 2021 (Rp)			
		Peralatan Dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	948.190.880,00	34.869.882,00	2.061.584,00	0,00
10	Dinas Sosial	2.749.088.605,00	2.625.399.988,00	10.541.970,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	4.061.836.798,00	670.434.539,00	285.735.355,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.498.503.338,00	0,00	11.159.615,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.304.925.463,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Tenaga Kerja	1.386.903.044,00	0,00	1.520.344,00	0,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.033.692.214,00	2.777.453.440,00	173.209.327,00	0,00
16	Dinas Perikanan	17.279.990.880,00	1.507.904.145,00	1.938.540.184,00	0,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	3.551.232.825,00	681.156.563,00	25.474.418,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	4.769.836.045,00	8.300.254.537,00	22.078.375,00	0,00
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	21.184.853.722,00	4.722.140.797,00	9.222.380.759,00	0,00
20	Badan Pendapatan Daerah	5.770.897.546,00	0,00	1.294.333,00	0,00
21	Inspektorat Daerah	1.927.688.079,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.143.491.274,00	1.473.914.984,00	59.447.047,00	0,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	5.928.380.593,00	856.143.487,00	323.916.572,00	0,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.370.433.655,00	6.521.486.683,00	206.980.696,00	0,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.924.314.660,00	63.375.000,00	25.245.369,00	0,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	4.247.761.235,00	75.994.803,00	14.612.927,00	0,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.705.238.308,00	1.649.527.296,00	16.521.882,00	0,00
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3.592.970.956,00	1.004.141.738,00	14.137.750,00	0,00
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.997.523.729,00	2.944.793,00	3.277.083,00	0,00
30	Kecamatan Bintan Utara	7.410.995.889,00	3.224.871.118,00	718.332.997,00	0,00
31	Kecamatan Bintan Timur	6.799.879.073,00	3.061.677.835,00	567.980.965,00	0,00
32	Kecamatan Tambelan	3.248.230.344,00	3.333.021.549,00	133.517.751,00	0,00
33	Kecamatan Gunung Kijang	6.518.692.244,00	2.696.691.709,00	272.904.020,00	0,00
34	Kecamatan Teluk Bintan	5.810.685.807,00	2.434.522.540,00	133.110.037,00	0,00
35	Kecamatan Teluk Sebong	4.760.974.297,00	4.204.795.188,00	481.505.441,00	0,00
36	Kecamatan Toapaya	5.621.723.099,00	2.235.426.142,00	306.813.844,00	0,00
37	Kecamatan Mantang	2.454.683.444,00	2.617.530.959,00	28.455.869,00	0,00
38	Kecamatan Bintan Pesisir	2.210.126.482,00	2.631.966.578,00	33.462.835,00	0,00
39	Kecamatan Seri Kuala Lobam	4.194.143.081,00	1.622.111.545,00	413.030.809,00	0,00
	Total	415.344.148.664,00	235.141.585.569,00	984.202.710.958,00	30.534.258.960,00

Akumulasi penyusutan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021 sebesar Rp1.665.222.704.151,00 terdiri dari Peralatan Mesin sebesar Rp415.344.148.664,00, Gedung Bangunan sebesar Rp235.141.585.569,00, Jalan Irigasi Jaringan sebesar Rp984.202.710.958,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp30.534.258.960,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

7.5.3.4 ASET LAINNYA

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2021 sebesar Rp13.329.645.436,00. Jumlah Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021 yang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp539.716.145,00, Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp75.289.420,00, Aset Tak Berwujud *netto* sebesar Rp1.428.166.116,00 dan Aset Lain-Lain sebesar Rp11.286.473.755,00, terdiri dari:

Tabel 7.5.139 Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Aset Lainnya	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)
1	Tagihan Penjualan Angsuran	539.716.145,00	701.938.025,00
2	Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00
3	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	75.289.420,00	0,00
5	Aset Tak Berwujud	6.425.835.400,00	6.282.835.400,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(4.997.669.284,00)	(4.798.897.571,00)
	Aset Tak Berwujud Netto	1.428.166.116,00	1.483.937.829,00
6	Aset Lain-lain	11.286.473.755,00	69.006.947.904,00
	Jumlah	13.329.645.436,00	71.192.823.758,00

Tabel 7.5.140 Data Mutasi Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Aset Lainnya	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	Tagihan Penjualan Angsuran	701.938.025,00	(162.221.880,00)	0,00	539.716.145,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	8.007.713.162,00	7.932.423.742,00	75.289.420,00
3	Aset Tak Berwujud	6.282.835.400,00	143.000.000,00	0,00	6.425.835.400,00
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(4.798.897.571,00)	(198.771.713,00)	0,00	(4.997.669.284,00)
	Aset Tak Berwujud Netto	1.483.937.829,00	(55.771.713,00)	0,00	1.428.166.116,00
4	Aset lain-lain	69.006.947.904,00	4.646.917.746,00	62.367.391.895,00	11.286.473.755,00
	Jumlah	71.192.823.758,00	12.436.637.315,00	70.299.815.637,00	13.329.645.436,00

7.5.3.4.1 TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp539.716.145,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp162.221.880,00 atau 23,11% dari Tahun 2020 yang dikarenakan adanya reklas terhadap piutang lain-lain yang merupakan tagihan penjualan atas angsuran rumah dinas yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan.

7.5.3.4.2 TUNTUTAN GANTI RUGI

Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 adalah nihil.

7.5.3.4.3 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp75.289.420,00 dan mengalami kenaikan sebesar RpRp75.289.420,00 atau 100% dari Tahun 2020. Mutasi kemitraan dengan pihak ketiga Tahun 2021 disebabkan karena :

- Penambahan atas reklas asset lain lain Tahun 2020 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebesar Rp7.952.914.532,00.



- Penambahan Dana Jaminan Bongkar sebesar Rp54.798.630,00.
- Pengurangan Dana Jaminan Pelestarian Lingkungan Sebesar Rp7.916.122.119,00 disebabkan karena Dana Jaminan Pelestarian Lingkungan sudah beralih ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Pengurangan Dana Jaminan Bongkar Reklame sebesar Rp16.301.623,00 disebabkan karena telah disetor ke rekening wajib pajak.

7.5.3.4.4 ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.425.835.400,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp143.000.000,00 atau 2,28% dari Tahun 2020 sebesar Rp6.282.835.400,00 yang dikarenakan adanya Penambahan aset tidak berwujud tahun 2020 sebesar Rp145.970.000,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Penambahan Belanja Modal Tahun 2021 Aset Tak Berwujud sebesar Rp2.970.000,00,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp143.000.000,00.

Pengurangan Aset Tidak Berwujud tahun 2021 sebesar Rp2.970.000,00 merupakan Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan Mesin (Alat Rumah Tangga Lainnya) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.

Adapun Rincian Aset Tidak Berwujud per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 7.5.141 Data Aset Tidak Berwujud Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Nama OPD	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	474.111.000,00	375.111.000,00
2	Dinas Kesehatan	856.255.100,00	812.255.100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	114.806.000,00	114.806.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37.950.000,00	37.950.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	95.250.000,00	95.250.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.500.000,00	49.500.000,00
8	Dinas Sosial	48.785.000,00	48.785.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.120.000,00	10.120.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	145.232.500,00	145.232.500,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	97.570.000,00	97.570.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	961.700.000,00	961.700.000,00
13	Dinas Perhubungan	262.871.000,00	262.871.000,00
14	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	95.250.000,00	95.250.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90.595.000,00	90.595.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Arsip	143.289.500,00	143.289.500,00
17	Dinas Perikanan	174.863.000,00	174.863.000,00
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	39.600.000,00	39.600.000,00
19	Sekretariat DPRD	244.514.500,00	244.514.500,00
20	Sekretariat Daerah	291.680.500,00	291.680.500,00
21	Kecamatan Teluk Bintan	95.250.000,00	95.250.000,00
22	Kecamatan Bintan Utara	4.972.000,00	4.972.000,00
23	Kecamatan Teluk Sebong	94.558.000,00	94.558.000,00
24	Kecamatan Seri Kuala Lobam	99.000.000,00	99.000.000,00
25	Kecamatan Toapaya	56.335.000,00	56.335.000,00



No	Nama OPD	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)
26	Kecamatan Bintan Pesisir	48.800.000,00	48.800.000,00
27	Kecamatan Mantang	48.800.000,00	48.800.000,00
28	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	497.211.400,00	497.211.400,00
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	473.070.000,00	473.070.000,00
30	Badan Pendapatan Daerah	330.480.000,00	330.480.000,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	443.415.900,00	443.415.900,00
	Total	6.425.835.400,00	6.282.835.400,00

7.5.3.4.5 ASET LAIN-LAIN

Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.286.473.755,00 mengalami penurunan sebesar Rp57.720.474.149,00 atau 83,64% dari Tahun 2020 sebesar Rp69.006.947.904,00. Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2021 yang terdiri dari aset lain –lain rumah dinas sebesar Rp3.368.634.250,00 dan aset lain-lain sebesar Rp7.917.839.505,00. Saldo asset lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp57.720.474.149,00 yang dikarenakan adanya mutasi asset lainnya sebagai berikut :

Penambahan aset lain-lain sebesar Rp4.646.917.746,00 :

- Penambahan Aset Lain-Lain sebesar Rp2.566.883.516,00 yang bersumber dari Hibah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tercatat pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan yang dalam kondisi Rusak Berat (Reklas dari KIB Peralatan dan Mesin dan KIB Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lain-Lain) SK Bupati Nomor: 468/XI/2021 tanggal 01 November 2021;
- Penambahan atas koreksi kurang penyajian saldo asset rumah dinas sebesar Rp2.072.737.149,00;
- Koreksi BPK Audited 2021 Aset Lain-Lain berupa Tanaman hasil reklas dari KIB E Aset Tetap Lainnya RSUD Kabupaten Bintan sebesar Rp5.047.831,00 dalam Kondisi Rusak Berat (mati) yang akan diusulkan Penghapusan pada tahun 2022 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
- Koreksi BPK Audited 2021 Aset Lain-Lain berupa Biota Perairan (Ikan Gurami) hasil reklas dari KIB E Aset Tetap Lainnya Dinas Perikanan Kabupaten Bintan sebesar Rp2.249.250,00 dalam Kondisi Rusak Berat (mati) yang akan diusulkan Penghapusan pada tahun 2022 oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bintan.

Pengurangan asset lain-lain sebesar Rp62.367.391.895,00 :

- Pengurangan Aset Lain-Lain yang bernilai dibawah kapitalisasi sebesar Rp2.530.000,00 yang bersumber dari Hibah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tercatat pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan yang dalam kondisi Rusak Berat (Reklas dari KIB Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-Lain) SK Bupati Nomor: 468/XI/2021 tanggal 01 November 2021;
- Pengurangan Penghapusan Aset Lain-Lain sebesar Rp53.659.068.363,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan Nomor SK Penghapusan 04/SK/2021 tanggal 02 Agustus 2021;
- Pengurangan atas reklas asset ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2020 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebesar Rp7.952.914.532,00.



- Koreksi BPK Audited 2021 berupa penghapusan Aset Lain-Lain sebesar Rp100.185.000,00 Tanah dan Bangunan Rumah Dinas di Jalan Transito KM. 8 No. 16 Tanjungpinang yang berdasarkan SK Penghapusan No. 173/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
- Koreksi BPK Audited 2021 untuk Aset Lain-Lain Rumah Dinas berupa pengurangan sebesar Rp306.614.000,00 atas pelunasan dan Penghapusan Rumah Dinas yang terletak di Jalan Tugu Pahlawan No. 26 Tanjungpinang dan Jalan Kuantan KM. 6 No. 06 Tanjungpinang berdasarkan SK Penghapusan No. 275/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 dan SK Penghapusan No. 363/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang tercatat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
- Koreksi BPK Audited 2021 untuk Aset Lain-Lain Rumah Dinas berupa pengurangan sebesar Rp149.700.000,00 atas pelunasan dan Penghapusan Rumah Dinas yang terletak di Jalan Peralatan KM. 7 Tanjungpinang berdasarkan SK Penghapusan No. 140/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 yang tercatat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
- Koreksi BPK Audited 2021 untuk Aset Lain-Lain Rumah Dinas berupa pengurangan sebesar Rp196.380.000,00 atas pelunasan dan Penghapusan Rumah Dinas yang terletak di Jalan JL. Transito KM. 8 NO. 08 TPI dan JL. Transito KM. 8 NO. 06 TPI berdasarkan SK Penghapusan 231/IV/2021 tanggal 21 April 2021 dan SK Penghapusan 440/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 yang tercatat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.

Adapun rincian asset lain-lain yang tercatat dalam neraca asset sebagai berikut :

**Tabel 7.5.142 Data Aset Lain-Lain Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Nama Pelaksana/Pekerjaan	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang : Pembelian Dan Pemasangan Patok/Plang Tanah Untuk Lahan Embung Hulu Sungai Bintn Kec.Teluk Bintan (1paket)	16.000.133,00	Tercatat Pada DPUPR Kabupaten Bintan
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang : Pembangunan Asrama Pelajar (Rumah Adat) Tambelan Di Tanjungpinang (1 Gedung) Tahap I	915.830.048,00	Tercatat Pada DPUPR Kabupaten Bintan
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang : Pembelian Dan Pemasangan Patok/Plang Tanah Untuk Lahan Prasarana Spam Toapaya (1paket)	1.579.667,00	Tercatat Pada DPUPR Kabupaten Bintan
4	Dinas Perhubungan : Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Dermaga Desa Malang Rapat / Sungai Hangus Kec Gunung Kijang Ref Adm	49.442.800,00	Tercatat Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan
5	Dinas Perhubungan : Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Dermaga Desa Mantang Baru Pulau Alang Kp Cenut Tahap Ii Kec Mantang Ref Adm	33.522.500,00	Tercatat Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan
6	Dinas Perhubungan : Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Dermaga Telang Kec Mantang Ref Adm	9.938.800,00	Tercatat Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan
7	Dinas Perhubungan : Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Ref Adm	89.732.000,00	Tercatat Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan
8	Dinas Perhubungan : Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Dermaga Nelayan Rt 005/03 Kp Galang Batang Ref Adm	27.937.200,00	Tercatat Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan
9	Dinas Perhubungan : Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Dermaga Tanjung Kudus Pangkil (Lanjutan) Kec Teluk Bintan Ref Adm	24.933.100,00	Tercatat Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan
10	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian : Bangunna	216.093.000,00	Tercatat Pada DKPP



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Nama Pelaksana/Pekerjaan	Nilai (Rp)	Keterangan
	Gedung Permanen Kantor Bpp Jl.Kawal Kec.Gunung Kijang		Kabupaten Bintan
11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian : Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Kantor Bpp Jl. Wisata Kawal	15.000.000,00	Tercatat Pada DKPP Kabupaten Bintan
12	Badan Keuangan Dan Aset Daerah : Bangunan Gedung Kantor Permanen Jl. Tugu Pahlawan Kantor Hutbun Kabupaten Bintan	1.125.483.200,00	Tercatat Pada BKAD Kabupaten Bintan
13	Badan Keuangan Dan Aset Daerah : Rumah Negara Golongan li Type A Jl. Kawal Kec. Gunung Kijang (Rumah Penyuluh)	8.040.000,00	Tercatat Pada BKAD Kabupaten Bintan
14	Badan Keuangan Dan Aset Daerah : Rumah Negara Golongan li Type A Jl. Kawal Kec. Gunung Kijang (Rumah Penyuluh)	8.040.000,00	Tercatat Pada BKAD Kabupaten Bintan
15	Badan Keuangan Dan Aset Daerah : Bangunan Gedung Kantor Permanen Jl. Tugu Pahlawan Kantor Hutbun Kabupaten Bintan	154.812.960,00	Tercatat Pada BKAD Kabupaten Bintan
16	Badan Keuangan Dan Aset Daerah : Tanah Bangunan Rumah Golongan Iii Jl. Tugu Pahlawan Tanjungpinang An Jongkas Togatorop	150.000.000,00	Tercatat Pada BKAD Kabupaten Bintan
17	Badan Keuangan Dan Aset Daerah : Tanah Bangunan Rumah Golongan Iii Jl. Tugu Pahlawan No. 43 Tanjungpinang Siti Syariah Sihite	142.000.000,00	Tercatat Pada BKAD Kabupaten Bintan
18	Badan Keuangan Dan Aset Daerah : Rumah Negara Golongan li Type A Jl. Kawal Kec. Gunung Kijang (Rumah Kepala Bpp Kawal)	9.270.000,00	Tercatat Pada BKAD Kabupaten Bintan
19	Badan Keuangan Dan Aset Daerah : Tanah Bangunan Rumah Golongan Iii Jl. Tugu Pahlawan No. 38 Tanjungpinang An Fachrimsyah	116.000.000,00	Tercatat Pada BKAD Kabupaten Bintan
20	Badan Keuangan Dan Aset Daerah : Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan (Bpp) Jl. Raya Wisata Bahari Kec. Gunung Kijang	525.000.000,00	Tercatat Pada BKAD Kabupaten Bintan
21	Badan Keuangan Dan Aset Daerah : Bangunan Balai Sidang/Pertemuan (Kantor Bpp Kawal) Jl. Raya Wisata Bahari Kec. Gunung Kijang	109.440.000,00	Tercatat Pada BKAD Kabupaten Bintan
22	Badan Keuangan Dan Aset Daerah : Bangunan Eks Kantor Kantor BLH Kabupaten Bintan	800.000.000,00	Tercatat Pada BKAD Kabupaten Bintan
23	Badan Keuangan Dan Aset Daerah : Bangunan Gedung Kantor Permanen Eks Kantor BLH Kabupaten Bintan	601.320.000,00	Tercatat Pada BKAD Kabupaten Bintan
24	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata : Aset Lain-Lain (Tambur) Ref Adm	118.800.000,00	Tercatat Pada Disbudpar Kabupaten Bintan
25	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata : Aset Lain-Lain (Peralatan Pembuatan Gasing Dan Jong) Ref Adm	77.973.500,00	Tercatat Pada Disbudpar Kabupaten Bintan
26	Dinas Perikanan : Perkakas Pabrik Es Lainnya (berasal dari Hibah Provinsi Kepri tahun 2021 dalam Kondisi Rusak Berat)	75.383.516,00	Tercatat Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
27	Dinas Perikanan : Mesin Pabrik Es (berasal dari Hibah Provinsi Kepri tahun 2021 dalam Kondisi Rusak Berat)	1.407.120.000,00	Tercatat Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
28	Dinas Perikanan : Compressor Open Type (berasal dari Hibah Provinsi Kepri tahun 2021 dalam Kondisi Rusak Berat)	84.150.000,00	Tercatat Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
29	Dinas Perikanan : Compressor Open Type (berasal dari Hibah Provinsi Kepri tahun 2021 dalam Kondisi Rusak Berat)	84.150.000,00	Tercatat Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
30	Dinas Perikanan : Condensor (berasal dari Hibah Provinsi Kepri tahun 2021 dalam Kondisi Rusak Berat)	74.800.000,00	Tercatat Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
31	Dinas Perikanan : Condensor (berasal dari Hibah Provinsi Kepri tahun 2021 dalam Kondisi Rusak Berat)	74.800.000,00	Tercatat Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
32	Dinas Perikanan : Condensor (berasal dari Hibah Provinsi Kepri tahun 2021 dalam Kondisi Rusak Berat)	74.800.000,00	Tercatat Pada Dinas Perikanan Kabupaten



No	Nama Pelaksana/Pekerjaan	Nilai (Rp)	Keterangan
			Bintan
33	Dinas Perikanan : Compressor Open Type (berasal dari Hibah Provinsi Kepri tahun 2021 dalam Kondisi Rusak Berat)	86.845.000,00	Tercatat Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
34	Dinas Perikanan : Compressor Open Type (berasal dari Hibah Provinsi Kepri tahun 2021 dalam Kondisi Rusak Berat)	86.845.000,00	Tercatat Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
35	Dinas Perikanan : Compressor Open Type (berasal dari Hibah Provinsi Kepri tahun 2021 dalam Kondisi Rusak Berat)	86.845.000,00	Tercatat Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
36	Dinas Perikanan : Water Filler / Tangki Pengisian (berasal dari Hibah Provinsi Kepri tahun 2021 dalam Kondisi Rusak Berat)	14.850.000,00	Tercatat Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
37	Dinas Perikanan : Elektrik Chain Hoist 2 Ton (berasal dari Hibah Provinsi Kepri tahun 2021 dalam Kondisi Rusak Berat)	21.615.000,00	Tercatat Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
38	Dinas Perikanan : Pompa Air 2" (berasal dari Hibah Provinsi Kepri tahun 2021 dalam Kondisi Rusak Berat)	7.150.000,00	Tercatat Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
39	Dinas Perikanan : Generator Set (Genset) (berasal dari Hibah Provinsi Kepri tahun 2021 dalam Kondisi Rusak Berat)	192.500.000,00	Tercatat Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
40	Dinas Perikanan : Generator Set (Genset) (berasal dari Hibah Provinsi Kepri tahun 2021 dalam Kondisi Rusak Berat)	192.500.000,00	Tercatat Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
41	Dinas Perikanan: Ikan Gurame Betina (Koreksi BPK Th.2021) dalam keadaan Mati untuk diusulkan penghapusan	749.750,00	Tercatat Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
42	Dinas Perikanan: Ikan Gurame Betina (Koreksi BPK Th.2021) dalam keadaan Mati untuk diusulkan penghapusan	749.750,00	Tercatat Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
43	Dinas Perikanan: Ikan Gurame Jantan (Koreksi BPK Th.2021) dalam keadaan Mati untuk diusulkan penghapusan	749.750,00	Tercatat Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
44	Dinas Kesehatan: Tanaman Tabebuaya + Tanah Hitam (APBD 2020) Halaman Taman Angrek (Koreksi BPK Th. 2021) dalam keadaan mati untuk diusulkan penghapusan	1.046.902,00	Tercatat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
45	Dinas Kesehatan: Tanaman Melati Mini + Tanah Hitam (APBD 2020) Halaman Taman Angrek (Koreksi BPK Th. 2021) dalam keadaan mati untuk diusulkan penghapusan	4.000.929,00	Tercatat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
	Jumlah	7.917.839.505,00	

7.5.3.4.6 AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021 sebesar Rp4.997.669.284,00 mengalami kenaikan sebesar Rp198.771.713,00 atau 4,14% dari Tahun 2020 sebesar Rp4.798.897.571,00.

Adapun Rincian Akumulasi Tidak Berwujud per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 7.5.143 Data Akumulasi Amortisasi Tidak Berwujud per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Nama OPD	Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2021
1	Sekretariat DPRD	244.514.500,00
2	Sekretariat Daerah	204.363.473,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	114.806.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.500.000,00
6	Dinas Perhubungan	103.285.842,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Nama OPD	Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2021
7	Dinas Kesehatan	525.376.890,00
8	Dinas Pendidikan	113.057.267,00
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	0,00
10	Dinas Sosial	48.785.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	10.120.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	790.796.667,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00
14	Dinas Tenaga Kerja	0,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	131.632.500,00
16	Dinas Perikanan	144.014.667,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	95.250.000,00
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	90.595.000,00
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	463.298.333,00
20	Badan Pendapatan Daerah	326.727.166,00
21	Inspektorat Daerah	0,00
22	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	440.475.738,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	97.570.000,00
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	39.600.000,00
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37.950.000,00
26	Satuan Polisi Pamong Praja	95.250.000,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	247.488.691,00
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	143.289.500,00
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
30	Kecamatan Bintan Utara	1.574.467,00
31	Kecamatan Bintan Timur	0,00
32	Kecamatan Tambelan	0,00
33	Kecamatan Gunung Kijang	0,00
34	Kecamatan Teluk Bintan	95.250.000,00
35	Kecamatan Teluk Sebong	94.558.000,00
36	Kecamatan Toapaya	51.939.583,00
37	Kecamatan Mantang	48.800.000,00
38	Kecamatan Bintan Pesisir	48.800.000,00
39	Kecamatan Seri Kuala Lobam	99.000.000,00
	Jumlah	4.997.669.284,00

7.5.3.5 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

7.5.3.5.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.532.615.961,99 terdiri dari:

Tabel 7.5.144 Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	619.117.500,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00



Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka	816.080.706,56	1.527.476.395,41
Utang Belanja	4.008.765.175,43	3.368.897.812,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	79.652.580,00	7.952.914.532,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5.523.615.961,99	12.849.288.739,41

7.5.3.5.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tidak terdapat Saldo Utang PFK per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.145 Data Mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	0,00	11.524.585.689,00	11.524.585.689,00	0,00
2	Taperum	0,00	3.530.132.975,00	3.530.132.975,00	0,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	0,00	20.243.358.168,80	20.243.358.168,80	0,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	1.453.970.942,00	1.453.970.942,00	0,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	506.859.209,00	506.859.209,00	0,00
6	Pajak PPh Ps. 4 ayat 2	0,00	2.660.856.761,00	2.660.856.761,00	0,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0,00	22.338.808.485,00	22.338.808.485,00	0,00
8	Pajak PPh – Final	0,00	111.628.192,00	111.628.192,00	0,00
9	Penerimaan Retribusi	0,00	619.117.500,00	0,00	619.117.500,00
	Jumlah	0,00	62.989.317.921,80	62.370.200.421,80	619.117.500,00

Penambahan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2021 sebesar Rp62.989.317.921,80 terdiri dari Rp62.370.200.421,80 berasal dari pemungutan PFK oleh BUD selama Tahun 2021 dan Rp619.117.500,00 merupakan Penerimaan Retribusi IMB Rp593.407.500,00 dan Penerimaan Retribusi IMTA Rp25.710.000,00 yang akan disetor ke Kas Negara. Sedangkan pengurangan utang PFK sebesar Rp62.370.200.421,80.

7.5.3.5.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp816.080.706,56 terdiri dari:

**Tabel 7.5.146 Data Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Reklame	249.214.961,41	207.078.239,89	249.214.961,41	207.078.239,89
2	Pendapatan Retribusi IMTA	1.260.969.767,00	591.335.800,00	1.260.969.767,00	591.335.800,00
3	Pendapatan Retribusi SITU Mikol	17.291.667,00	17.666.666,67	17.291.667,00	17.666.666,67
4	Pendapatan Retribusi IMB	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.527.476.395,41	816.080.706,56	1.527.476.395,41	816.080.706,56

**Tabel 7.5.147 Data Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	BAPENDA	249.214.961,41	207.078.239,89	249.214.961,41	207.078.239,89
2	DPMPSTSP	1.278.261.434,00	609.002.466,67	1.278.261.434,00	609.002.466,67
	Jumlah	1.527.476.395,41	816.080.706,56	1.527.476.395,41	816.080.706,56



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

7.5.3.5.1.3 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.141.049.504,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.148 Data Mutasi Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	250.958.649,00	235.899.323,00	250.958.649,00	235.899.323,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	2.556.850.479,00	3.772.865.852,43	2.556.850.479,00	3.772.865.852,43
3	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	561.088.684,00	0,00	561.088.684,00	0,00
Jumlah		3.368.897.812,00	4.008.765.175,43	3.368.897.812,00	4.008.765.175,43

Adapun rincian Utang Belanja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7.5.149 Rincian Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	SKPD	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	250.958.649,00	235.899.323,00	250.958.649,00	235.899.323,00
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Rujukan Parsial / PMI)	250.958.649,00	235.899.323,00	250.958.649,00	235.899.323,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	2.556.850.479,00	3.772.865.852,43	2.556.850.479,00	3.772.865.852,43
a	- Belanja Obat-obatan	1.358.621.781,00	1.443.400.667,13	1.358.621.781,00	1.443.400.667,13
b	- Belanja Bahan Medis (ampul, Masker, dll)	246.808.812,00	893.824.676,30	246.808.812,00	893.824.676,30
c	- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Rujukan Parsial / PMI)	227.257.247,00	122.211.010,00	227.257.247,00	122.211.010,00
d	- Belanja Bahan Kimia	724.162.639,00	1.313.429.499,00	724.162.639,00	1.313.429.499,00
3	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	561.088.684,00	0,00	561.088.684,00	0,00
a	- Listrik Lampu Jalan	547.465.217,00	0,00	547.465.217,00	0,00
b	- Listrik Kantor	10.644.824,00	0,00	10.644.824,00	0,00
c	- Telepon	2.186.443,00	0,00	2.186.443,00	0,00
d	- Air	792.200,00	0,00	792.200,00	0,00
Jumlah		3.368.897.812,00	4.008.765.175,43	3.368.897.812,00	4.008.765.175,43

7.5.3.5.1.3.1 Utang Jasa Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Tabel 7.5.150 Utang Jasa Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Instansi	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Total (Rp)	Ket
1	RSUD Raja Ahmad Tabib	22/12/2021	956/6031/3.3/RSUD	13.259.730,00	Periode Desember 2021
2	RSUD Raja Ahmad Tabib	07/01/2022	956/205/3.3/RSUD	5.966.668,00	Periode Susulan Desember 2021
3	RSUD Engku Haji Daud	04/01/2022	P/956/04/RSUD-EHD/2022	18.110.925,00	Tagihan biaya perawatan dan pengobatan pasien kelas III Kabupaten Bintan Bulan Desember 2021
4	RSUD Bintan	09/11/2021	B/5033/900/XII/2021	30.582.000,00	Tagihan biaya perawatan dan pengobatan pasien kelas III Kabupaten Bintan



No	Instansi	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Total (Rp)	Ket
					Bulan November 2021
5	RSUD Bintan	12/01/2022	B/435/900/I/2022	167.980.000,00	Tagihan biaya perawatan dan pengobatan pasien kelas III Kabupaten Bintan Bulan Desember 2022
Jumlah				235.899.323,00	

7.5.3.5.1.3.2 Utang Obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah**Tabel 7.5.151 Utang Obat-obatan pada RSUD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Distributor	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Nama Obat	Total (Rp)
1	Anugerah Pharmindo Lestari	03 Mei 2021	8540108172	Lansoprazole 30 Mg	2.918.876,00
2	Anugerah Pharmindo Lestari	05 Juni 2021	8530183996	Glimepiride 1 Mg	23.965.040,00
3				Glimepiride 2 Mg	
4				Glimepiride 3 Mg	
5	Anugerah Pharmindo Lestari	07 Juni 2021	8530184151	Cilostazol 100 Mg	15.675.000,00
6	Anugerah Pharmindo Lestari	26 Juni 2021	8530189138	Simvastatin 10 Mg	22.961.811,00
7				Rifampicin 450 Mg	
8				Methylprednisolone 4 Mg	
9	Anugerah Pharmindo Lestari	26 Juni 2021	8530189231	Symbicort Turb 160 Dos 60	32.538.528,00
10	Anugerah Pharmindo Lestari	29 Juni 2021	8530189926	Citicoline Sodium 250 Mg/2 MI	17.325.000,00
11	Anugerah Pharmindo Lestari	30 Juli 2021	8530197929	Oxytocin 10 Iu	2.097.001,00
12	Anugerah Pharmindo Lestari	30 Juli 2021	8530197914	Norepinephrine Bitartrat	2.376.000,00
13	Anugerah Pharmindo Lestari	30 Juli 2021	8530197911	Combivent 2,5 MI	1.749.989,58
14	Anugerah Pharmindo Lestari	15 September 2021	8530209340	Lovenox 40 Mg	18.131.960,00
15	Anugerah Pharmindo Lestari	15 September 2021	8530209341	Lovenox 60 Mg	37.597.560,00
16	Anugerah Pharmindo Lestari	09 Desember 2021	8530228748	Pulmicort Resp 0,25 Mh/0,5	2.095.599,00
17	Anugerah Pharmindo Lestari	09 Desember 2021	8530228824	Thyrozol 10 Mg	5.604.607,00
18				Thyrozol 5 Mg	
19	Anugerah Pharmindo Lestari	16 Desember 2021	8530230639	Combivent 2,5 MI	839.995,00
20	Parit Padang Global	09 Juni 2021	8360091706	Vasola Ijeksi	26.455.000,00
21				Vancomycin Injeksi 500 Mg	
22	Parit Padang Global	23 Juni 2021	8360092872	Candesartan Cilexetil 16 Mg	89.320.000,00
23				Ranitidin 50 Mg/2 MI	
24	Parit Padang Global	26 Juni 2021	8360093198	Adalat Oros 30 Mg	28.699.200,00
25	Parit Padang Global	30 Juni 2021	8360093576	Lansoprazole 30 Mg	11.351.186,00
26	Parit Padang Global	30 Juni 2021	8360093578	Amlodipin 5 Mg	18.006.117,00
27				Flunarizin Hcl 5 Mg	
28				Glimepiride 4 Mg	
29	Parit Padang Global	30 Juni 2021	8360093619	Lansoprazole 30 Mg	47.921.484,00
30				Candesartan Cilexetil 16 Mg	
31	Parit Padang Global	06 Juli 2021	8360094275	Calos Shewable	44.687.239,00
32				Digoxin 0,25 Mg	
33				Curcuma Force	
34				Resfar 25 MI	
35	Parit Padang Global	16 Juli 2021	8360095102	Farsix	1.131.350,00
36	Parit Padang Global	31 Juli 2021	8360096365	Bisoprolol Fumarate 5 Mg	28.956.613,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Distributor	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Nama Obat	Total (Rp)
37				Ethambutol 500 Mg	
38				Dexamethasone 5 Mg/MI	
39	Parit Padang Global	02 Agustus 2021	8360096559	Farbion 5000 3 MI	3.267.000,00
40	Parit Padang Global	14 Agustus 2021	8360097433	Bisoprolol Fumarate 5 Mg	8.316.000,00
41	Parit Padang Global	30 Nopember 2021	8360105009	Lansoprazole 30 Mg	15.097.077,38
42	Parit Padang Global	30 Nopember 2021	8360104995	Ceftazidime 1g	19.800.000,00
43				Lansoprazole 30 Mg	
44				Ceftazidime 1g	
45	Parit Padang Global	30 Nopember 2021	8360104953	Norepinefrin Bitartrat 4 Mg/MI	20.665.154,00
46				Nicardipine Hcl 10 Mg/10 MI	
47	Parit Padang Global	21 Desember 2021	8360106320	Plasbumin 205 50 MI	4.449.984,00
48	Parit Padang Global	21 Desember 2021	8360106321	Plasbumin 205 50 MI	4.894.982,40
49	Parit Padang Global	21 Desember 2021	8360106322	Plasbumin 205 50 MI	4.894.982,40
50	Parit Padang Global	21 Desember 2021	8360106323	Plasbumin 205 50 MI	4.894.982,40
51	Parit Padang Global	21 Desember 2021	8360106324	Plasbumin 205 50 MI	4.894.982,40
52	Parit Padang Global	21 Desember 2021	8360106325	Plasbumin 205 50 MI	4.894.982,40
53	Parit Padang Global	21 Desember 2021	8360106326	Plasbumin 205 50 MI	4.894.982,40
54	Parit Padang Global	21 Desember 2021	8360106327	Plasbumin 205 50 MI	4.894.982,40
55	Parit Padang Global	21 Desember 2021	8360106328	Plasbumin 205 50 MI	4.894.982,40
56	Parit Padang Global	21 Desember 2021	8360106329	Plasbumin 205 50 MI	4.894.982,40
57	Parit Padang Global	21 Desember 2021	8360106330	Plasbumin 205 50 MI	4.894.982,40
58				Farmabes	
59	Parit Padang Global	21 Desember 2021	8360106338	Vancomycin Injeksi 500 Mg	4.926.768,00
60				Farmabes	
61	Parit Padang Global	21 Desember 2021	8360106337	Vancomycin Injeksi 500 Mg	4.813.512,00
62	Parit Padang Global	21 Desember 2021	8360106309	Primperan Injeksi	477.399,96
63				Lisinopril 5 Mg	
64	Anugrah Argon Medica	03 Mei 2021	191221008247	Spironolakton 25 Mg	2.148.000,00
65	Anugrah Argon Medica	05 Mei 2021	191221008424	Levemir	4.449.999,95
66	Anugrah Argon Medica	05 Mei 2021	191221008426	Metformin 500 Mg	5.431.387,50
67	Anugrah Argon Medica	05 Mei 2021	191221008428	Cefotaxime 1g	4.299.080,25
68	Anugrah Argon Medica	05 Mei 2021	191221008417	Novorapid	10.739.999,95
69	Anugrah Argon Medica	05 Mei 2021	191221008418	Novorapid	10.739.999,95
70	Anugrah Argon Medica	05 Mei 2021	191221008415	Novorapid	10.739.999,95
71	Anugrah Argon Medica	05 Mei 2021	191221008430	Tetagam 1ml	1.886.630,00
72	Anugrah Argon Medica	05 Mei 2021	191221008431	Novorapid	895.000,00
73	Anugrah Argon Medica	09 Juli 2021	191221012909	Ksr 600 Mg	8.289.023,00
74	Anugrah Argon Medica	09 Juli 2021	191221012919	Alprazolam 0,5 Mg	3.522.750,00
75				Ramipril 5 Mg	
76	Anugrah Argon Medica	09 Juli 2021	191221012922	Candesartan 16 Mg	4.128.200,00
77	Anugrah Argon Medica	09 Juli 2021	191221012914	Recofol N	8.882.500,00
78	Anugrah Argon Medica	09 Juli 2021	191221012908	Recofol N	8.882.500,00
79	Anugrah Argon Medica	09 Juli 2021	191221012916	Recofol N	8.882.500,00
80	Anugrah Argon Medica	12 Juli 2021	191221013053	Tetagam 1ml	7.340.000,25
81	Anugrah Argon Medica	12 Juli 2021	191221013054	Fibrion 1.500.000 lu	10.200.000,00
82	Anugrah Argon	12 Juli 2021	191221013052	Fibrion 1.500.000 lu	10.200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Distributor	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Nama Obat	Total (Rp)
	Medica				
83	Anugrah Argon Medica	30 Juli 2021	191221014523	Clobazam 10 Mg	11.640.000,00
84	Anugrah Argon Medica	07 Desember 2021	191221023482	Novorapid	8.054.999,96
85	Anugrah Argon Medica	07 Desember 2021	191221023480	Cefixime 200 Mg	7.490.000,00
86	Anugrah Argon Medica	07 Desember 2021	191221023479	Doxycycline	144.500,00
87	Anugrah Argon Medica	07 Desember 2021	191221023476	Acarbose 50 Mg	8.016.900,00
88	Anugrah Argon Medica			Ceftazidime Dry Injection 1g	
89	Anugrah Argon Medica	07 Desember 2021	191221023475	Desoximetasone 0,25 Cr 15 G	1.614.000,00
90	Anugrah Argon Medica			Candesartan 8 Mg	
91	Anugrah Argon Medica	07 Desember 2021	191211023473	Acarbose 100 Mg	5.608.720,00
92	Anugrah Argon Medica			Atorvastatin 20 Mg	
93	Anugrah Argon Medica	07 Desember 2021	191221023472	Clozapine 100 Mg	1.439.750,00
94	Anugrah Argon Medica			Gliquidone 30 Mg	
95	Anugrah Argon Medica	07 Desember 2021	191221023471	Cefixime 200 Mg	7.490.000,00
96	Anugrah Argon Medica	07 Desember 2021	191221023477	Clindamycine 150 Mg	7.633.949,00
97	Anugrah Argon Medica			Clindamycine 300 Mg	
98	Anugrah Argon Medica			Propranolol 10 Mg	
99	Anugrah Argon Medica	08 Desember 2021	191221023591	Amlodipine Besilate 5 Mg	4.838.381,00
100	Anugrah Argon Medica	08 Desember 2021	191221023593	Domperidone 10 Mg	258.000,00
101	Anugrah Argon Medica	08 Desember 2021	191221023595	Leparon	7.377.274,00
102	Anugrah Argon Medica			Co-Amoxiclav 500/125 Mg	
103	Anugrah Argon Medica			Meloxicam 15 Mg	
104	Anugrah Argon Medica	08 Desember 2021	191221023597	Omeprazole Injeksi 40 Mg	361.284,00
105	Anugrah Argon Medica	08 Desember 2021	191221023592	Clopidogrel 75 Mg	7.609.140,00
106	Anugrah Argon Medica	10 Desember 2021	191221023760	Glimepiride 4 Mg	8.208.849,00
107	Anugrah Argon Medica	10 Desember 2021	191221023759	Glimepiride 4 Mg	8.208.849,00
108	Anugrah Argon Medica	17 Desember 2021	191221024209	Alprazolam 0,5 Mg	4.227.300,00
109	Anugrah Argon Medica	18 Desember 2021	191221024241	Stesolide Injeksi 2 MI	2.435.004,00
110	Anugrah Argon Medica	21 Desember 2021	191221024335	Candesartan 8 Mg	9.751.800,00
111	Anugrah Argon Medica			Candesartan 16 Mg	
112	Anugrah Argon Medica	21 Desember 2021	191221024339	Clobazam 10 Mg	9.311.908,00
113	Anugrah Argon Medica	21 Desember 2021	191221024340	Sedacum Injeksi 15 Mg	830.775,00
114	Merapi Utama Pharma	07 Mei 2021	210191007026	Citicoline 500 Mg	11.880.000,00
115	Merapi Utama Pharma	08 Mei 2021	210191007087	Citicoline Sodium 250 Mg/2 MI	3.712.500,00
116	Merapi Utama Pharma	12 Mei 2021	210191007305	Amlodipine 10 Mg	674.575,00
117	Merapi Utama Pharma	21 Mei 2021	210191007584	Amlodipine 10 Mg	10.793.199,98
118	Merapi Utama Pharma	21 Mei 2021	210191007641	Amlodipine 10 Mg	6.610.834,99
119	Merapi Utama Pharma	23 Juni 2021	210191009819	Citicoline Sodium 250 Mg/2 MI	5.989.500,00
120	Merapi Utama Pharma	30 Juni 2021	210191010366	Citicoline Sodium 250 Mg/2 MI	14.850.000,00
121	Merapi Utama Pharma	30 Nopember 2021	210191018723	Omeprazole Injeksi 40 Mg	66.528.000,00
122	Bina San Prima	04 Mei 2021	FKBTM/202105/00172	Akilen Tetes Telinga	3.900.688,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Distributor	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Nama Obat	Total (Rp)
123				Otilon Tetes Telinga	
124	Bina San Prima	05 Mei 2021	FKBTM/202105/00266	Hypofil	3.167.450,00
125	Bina San Prima	05 Mei 2021	FKBTM/202105/00269	Uresix 40 Mg	4.455.000,00
126	Bina San Prima	23 Juni 2021	FKBTM/202106/02241	Tremenza	16.005.000,00
127	Bina San Prima	23 Juni 2021	FKBTM/202106/02267	Sagestam Cream	5.412.000,00
128	Bina San Prima	30 Nopember 2021	FKBTM/202111/02996	Infusan D10	2.890.800,00
129	Bina San Prima	04 Desember 2021	FKBTM/202112/020257	Infusan Ns	7.590.528,00
130	Millennium Pharmacon International	09 Juni 2021	133221006559	Xepazym	13.639.725,00
131	Millennium Pharmacon International	10 Jun1 2021	133221006576	Risperidon 2 Mg	3.562.515,00
132	Millennium Pharmacon International	10 Jun1 2021	133221006579	Suprafenid	1.372.800,00
133	Millennium Pharmacon International	14 Juni 2021	133221006729	Eperisone Hcl 50 Mg	10.780.000,00
134	Millennium Pharmacon International	17 Juni 2021	133221006920	Suprafenid	2.230.800,00
135	Millennium Pharmacon International	17 Juni 2021	133221006921	Meloxicam 15 Mg	4.239.785,00
136	Millennium Pharmacon International			Cefadroxil Monohidrat 500 Mg	
137	Millennium Pharmacon International	21 Juni 2021	133221007093	Xepazym	12.087.900,00
138	Millennium Pharmacon International	22 Juni 2021	133221007120	Meloxicam 15 Mg	2.900.480,00
139	Millennium Pharmacon International	25 Juni 2021	133221007372	Ondansentron 4 Mg	2.121.625,00
140	Millennium Pharmacon International			Metformin Xr 500 Mg	
141	Millennium Pharmacon International	26 Juni 2021	133221007396	Metilprednisolone 8 Mg	13.398.003,00
142				Flunarizine Hcl 5 Mg	
143				Mecobalamin 500 Mcg	
144				Acetylsistein 200 Mg	
145				Gabapentin 100 Mg	
146	Millennium Pharmacon International	30 Juni 2021	133221007556	Sukralfat Suspensi 100 MI	37.125.000,00
147	Millennium Pharmacon International	30 Juni 2021	133221007559	Cefadroxil Monohidrat 500 Mg	8.467.635,00
148	Millennium Pharmacon International	30 Juni 2021	133221007636	Risperidon 2 Mg	7.125.030,00
149	Antarmitra Sembada	06 Mei 2021	INV BTM210500305	Prorenal	22.184.800,00
150				Sildenafil	
151	Penta Valent	28 April 2021	40-0138-21-0004202	Domperidone Suspensi 60 MI	8.754.707,00
152				Phenytoin Sodium 50 Mg/MI	
153	Penta Valent	28 April 2021	40-0138-21-0004203	Mecobalamin 500 Mcg	9.306.000,00
154				Gabapentin 100 Mg	
155	Penta Valent	28 April 2021	40-0138-21-0004204	Acetylsistein 200 Mg	6.160.000,00
156	Penta Valent	30 April 2021	40-0138-21-0004385	Pantocain 2% 5 MI	6.622.390,00
157				Cenfresh 0,6 MI	
158				Poly Nel 0,6 MI	
159				Polyrgan O,6 MI	
160				Timol 0,5% 0,6	
161				Vitrolenta 5 MI	
162				Protagenta O,6 MI	



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Distributor	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Nama Obat	Total (Rp)
163	Penta Valent	30 April 2021	40-0138-21-0004384	Gabapentin 100 Mg	20.790.000,00
164	Penta Valent	07 Mei 2021	40-0138-21-0004626	Dobutamin 150 Mg/5 MI	7.341.719,00
165	United Dico Citas	31 Mei 2021	0087630	Bamgetol 200 Mg	15.840.000,00
166	Rajawali Nusindo	02 Juni 2021	FKT/BTM/2021/00001346	Phytomenadion 10 Mg	2.887.500,00
167	Rajawali Nusindo	15 Juni 2021	FKT/BTM/2021/00001482	Ambroxol 30 Mg	1.152.360,00
168	Rajawali Nusindo	21 Juli 2021	FKT/BTM/2021/00001915	Fucilex Krim	1.980.000,00
169	Rajawali Nusindo	02 Agustus 2021	FKT/BTM/2021/00002081	Gabapentin 100 Mg	5.568.750,00
170	Rajawali Nusindo	09 Agustus 2021	FKT/BTM/2021/00002136	Gabapentin 300 Mg	17.077.455,98
171	Rajawali Nusindo	09 Agustus 2021	FKT/BTM/2021/00002135	Gabapentin 100 Mg	37.125.000,00
172	Rajawali Nusindo	10 Agustus 2021	FKT/BTM/2021/00002165	Scabimate Krim 5% 10 G	14.850.000,00
173	Rajawali Nusindo	07 September 2021	FKT/BTM/2021/00002460	Gabapentin 100 Mg	31.556.250,00
174	Enseval Megatrading	02 Juni 2021	321000915	Octalbin 25% 50 MI	39.700.900,00
175	Enseval Megatrading	05 Juli 2021	321001174	Octalbin 25% 50 MI	39.699.990,00
176	Pelangi Rapha Semesta	26 Nopember 2021	12337	Kapsul Kosong No.00	1.293.600,00
177	Pelangi Rapha Semesta	30 Nopember 2021	12348	Kapsul Kosong No.00	2.479.400,00
178	Omega Surya Anugerah	26 Nopember 2021	PBF/21/00014	Widatra Ns 0,9% 500 MI	3.277.642,50
179	Omega Surya Anugerah	15 Desember 2021	PBF/21/00015	Otsu Steril Water For Injection 25 MI	6.864.000,00
Jumlah					1.443.400.667,13

7.5.3.5.1.3.3 Utang Bahan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah

Tabel 7.5.152 Utang Bahan Medis pada RSUD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Distributor	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Nama Obat	Total (Rp)
1	PT.Pelangi	21 April 2021	11770	Wristband Ultra Soft Anak Blue	31.663.401,00
2	PT.Pelangi	08 April 2021	11732	Handsoap 500 MI	10.560.000,00
3	PT.Pelangi	08 April 2021	11731	Masker	16.500.000,00
4	PT.Pelangi	09 April 2021	11734	Handsoap 500 MI	10.560.000,00
5	PT.Pelangi	22 April 2021	11769	Wristband Ultra Soft Anak Pink	31.663.401,00
6	PT.Pelangi	17 April 2021	11751	Handscoon Non Sterile M	3.465.000,00
7	PT.Pelangi	19 April 2021	11760	Masker Kn95	8.068.500,00
8	PT.Pelangi	20 April 2021	11764	Handscoon Non Sterile M	23.100.000,00
9	PT.Pelangi	23 April 2021	11768	Wristband Ekonomis Pink	27.454.779,00
10	PT.Pelangi	23 April 2021	11768	Wristband Ekonomis Blue	21.353.717,00
11	PT.Pelangi	27 September 2021	12164	Steriflo 350 MI	15.482.500,00
12	PT.Pelangi	23 Juni 2021	11893	Feeding Tube No 8/40	423.500,00
13				Kertas Usg Sony Upp110hg	3.058.000,00
14	PT.Pelangi	20 September 2021	12148	Erbe Nussy Split Vio Icc Acc Contact	11.000.000,00
15	PT.Pelangi	15 September 2021	12134	Cliper Blade 50 Blades/Cv	9.900.000,00
16	PT.Pelangi	10 September 2021	12121	Handscon Non Sterile M	43.560.000,00
17	PT.Pelangi	11 September 2021	12122	Handscon Non Sterile M	10.890.000,00
18				Handscoon Non Sterile S	21.780.000,00
19	PT.Pelangi	30 Agustus 2021	12090	Ngt No 18	3.696.000,00
20	PT.Pelangi	30 Agustus 2021	12091	Masker Kn95 Medis	9.735.000,00
21	PT.Pelangi	27 September 2021	12165	Kertas Ctg 150mm X 30m	2.302.300,00
22				Kertas Ekg 63 X 30 M	1.974.720,00
23				Suction Catheter No 12	495.000,00
24	PT.Pelangi	09 Nopember 2021	12278	Iv Dresing 4,4 Cm X 4 Cm	2.183.176,00
25				Iv Dresing 6 Cm X 7 Cm	
26	PT.Pelangi	06 Desember 2021	12370	Refill Pack Including Seal Kit Bowie Dick	29.201.150,00
27	PT.Pelangi	08 Desember 2021	12372	Refill Pack Including Seal Kit	29.201.150,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Distributor	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Nama Obat	Total (Rp)
				Bowie Dick	
28	PT.Pelangi	07 Desember 2021	12371	Refill Pack Including Seal Kit Bowie Dick	29.201.150,00
29	PT.Pelangi	06 Oktober 2021	12201	T Syringe 5 Cc	7.524.000,00
30	PT.Pelangi	03 Nopember 2021	12253	T Syringe 5 Cc	12.276.000,00
31				Alkohol Swab	1.485.000,00
32	PT.Pelangi	18 Desember 2021	12394	My Jelly 82 Gr	1.567.500,00
33				Guedel Airway 80mm	222.530,00
34				Blood Lancet 28g Onemed 100's	731.500,00
35				Infuset Anak	25.410.000,00
36	PT.Pelangi	18 Januari 2021	11506	Sput 50 Cc Chateter Tip	11.698.500,00
37	PT.Pelangi	18 Januari 2021	11511	Erbe Nussy Split Vio Icc Acc Contact	8.250.000,00
38	PT.Pelangi	29 Desember 2021	12415	Connection Suction	2.310.000,00
39	PT.Pelangi	29 Desember 2021	12409	Thermal Paper 57 X 50	82.500,00
40	PT.Pelangi	30 Nopember 2021	12348	Kapsul Kosong 00	2.479.400,00
41	PT.Pelangi	23 Desember 2021	12322	Non Rebreathing, Oxygen Mask-Adult	3.850.000,00
42	PT.Pelangi	28 Oktober 2021	12235	Iv Dressing 4,4cm X 4 Cm	9.800.157,00
43				Iv Dressing 6 Cm X 7 Cm	
44	PT.Pelangi	25 Agustus 2021	12073	Kantong Mayat	8.800.000,00
45	PT.Pelangi	26 Agustus 2021	12042	Microtube Rak Cooling	4.378.000,00
46	PT.Pelangi	19 Juli 2021	11969	Kantong Mayat	1.920.000,00
47	PT. Oasis	01 Desember 2021	JL-OMA/0104	Terumo Blood Bag Double 350 MI	34.650.000,00
48				Objek Glass	297.000,00
49				Cosmomed Alkohol Swab	3.300.000,00
50				Pipet Hematokrit	1.430.000,00
51				Aximed Lancet	1.650.000,00
52	PT. Oasis	08 Maret 2021	JL-OMA/0015	Com Iodine Sterilis 8 Cm	225.000,00
53				Com Iodine Sterilis 15 Cm	1.275.000,00
54	PT. Oasis	15 Maret 2021	JL-OMA/0020	Assistant Deck Glass 18 X 018 Cm	1.540.000,00
55	PT. Oasis	23 Maret 2021	JL-OMA/0023	Onelab Object Glass Frosted 7105"72 Pcs	1.250.000,00
56	PT. Oasis	29 April 2021	JL-OMA/0035	Bd Sput Heparin Agd	3.025.000,00
57	PT. Oasis	02 Desember 2021	JL-OMA/0106	Jms Blood Bag Double 250 MI	31.350.000,00
58	PT. Oasis	02 Nopember 2021	JL-OMA/0081	Kasa Lipat 7,5 X 7,5 Cm	3.353.671,20
59	PT. Oasis	04 Nopember 2021	JL-OMA/0088	Nipro Syringe 10 MI	22.814.470,80
60				Bbraun Spinocain 26g	
61	UGA	04 September 2021	12370	St Latex Non Steril Uk L Softskin	20.279.710,00
62	UGA	19 Maret 2021	8452	Handrub Sanitizer 500 MI	34.155.000,00
63	UGA	08 Oktober 2021	13032	Umbilical Cord Nilon Onemed Isi 50	1.524.600,00
64				Condom Chateter L Gea	357.500,00
65				Blood Lancet 28g Isi 100 Onemed	762.418,80
66				My Jelly 83 Gram Onemed	938.916,00
67	UGA	19 April 2021	9012	St. Non Steril Uk S-Safeglove	5.383.840,00
68	UGA	29 Oktober 2021	13039	St Latex Non Steril M	20.980.080,00
69				St Latex Non Steril S	
72	Rajawali	25 Oktober 2021	FKT/BTM/2021/0003033	Kit Cesarean Kitcsr001	11.550.000,00
73	MPI	30 Oktober 2021	753221000028	Pouches Flat, 15cm/200m	3.577.200,00
75	MPI	30 Oktober 2021	753221000030	Tro-Sensosurge Sterile 7,5	2.637.800,00
76				Tro-Sensosurge Sterile 6,5	2.637.800,00
77	MPI	30 Nopember 2021	223221000006	Hm33 T-Hernia Mesh Heavv Mesh Souare 7,5 Cm	24.651.000,00
78				L42 T-Lene Polvvinlidene 6-0, 45 Cm Reverse	1.529.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Distributor	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Nama Obat	Total (Rp)
79				P89 T-Plaincat Cut Plain1,90 Cm Round Bodied	6.006.000,00
80				P180 T-Plain Catcut Plain 2-0, 90 Cm Round Bodix	5.566.000,00
81				S82 T-Silksilk/Sutera 0,76cm Reverse Cutting	1.240.800,00
82				S84 T-Silk Silk/Sutera 1,90 Cm Round Bodied 1/2	1.097.800,00
83				V41 T-Vio Polvalvolide 1,90 Cm Reverse Cutting	1.588.400,00
84				C55 T-Chromic Cat Cut Chromic 1,90 Cm Heavy	10.025.400,00
85	PPG	11 Nopember 2021	8360103557	Innoo Ecg Roll Paper 210x30cm	595.815,00
86	Karirah	21 Oktober 2021	0021/INV-KBB/1021	Urine Bag Hanger 2.000 MI	3.118.500,00
87				Ngt No 18	4.804.800,00
88	Karirah	28 Oktober 2021	0025/INV-KBB/1021	Extension Tube 150 MI	24.599.520,00
89	Saba	09 Desember 2021	020.000-21.46768527	Vacurette@Visio Plus Needle 21g X 1 1/2"	1.871.870,00
90				Vacurette@Visio Plus Needle 22g X 1 1/2"	2.139.280,00
91				Blood Collection Set +La 23g X 19cm Sp	1.716.660,00
92				Minicollect@0.25/0.5ml K3e K3edta Lav	2.234.650,00
93				Samplix@4ml Cat Serum	4.959.240,00
94				Samplix@4ml Cat Serum Sep	5.363.160,00
95				Samplix@3ml K2edta	4.959.240,00
96	Indomedik Niaga Perkasa	13 Oktober 2021	SI.2021.10.0025	Nibp Cuff Yp-714t, Adult	17.800.002,00
97				Nibp Cuff Yp-711t, Child	17.800.002,00
98				Chest Electrode	3.450.001,50
99	Cobra	19 Agustus 2021	C032.22878	Single Bon Universal	9.200.000,00
100	Cobra	19 Agustus 2021	C032.22878	Komposit A	994.999,00
101	Cobra	19 Agustus 2021	C032.22878	Komposit A3	994.999,00
102	Cobra	19 Agustus 2021	C032.22878	Scotbond	979.000,00
103	Cobra	19 Agustus 2021	C032.22878	Solare Anterior A2	1.298.000,00
104	Cobra	19 Agustus 2021	C032.22878	Solare Anterior A3	1.298.000,00
105	Cobra	19 Agustus 2021	C032.22878	Epoxidine Paste 4 MI	2.475.000,00
106	Cobra	19 Agustus 2021	C032.22878	Calcerin Paste 2d	330.000,00
107	Cobra	19 Agustus 2021	C032.22878	Gutta Percha Dentplus 15-40	242.000,00
108	Cobra	19 Agustus 2021	C032.22878	Gutta Percha Dentplus 45-80	242.000,00
109	Cobra	19 Agustus 2021	C032.22878	Paper Point Dentplus 15-40	242.000,00
110	Cobra	19 Agustus 2021	C032.22878	Paper Point Dentplus 45-80	242.000,00
111	Cobra	19 Agustus 2021	C032.22878	Fuji I	3.171.300,00
112	Cobra	19 Agustus 2021	C032.22878	Endoseal Denpro	203.500,00
113	Cobra	19 Agustus 2021	C032.22878	Articulating Paper Part Dc	187.000,00
114	Cobra	19 Agustus 2021	C032.22878	Celulose Matrix Stri	962.500,00
115	Cobra	19 Agustus 2021	C032.22878	Cotton Roll Prodental	142.700,00
116	Cobra	19 Agustus 2021	C032.22878	Devital Tehnoden	1.300.000,00
Jumlah					893.824.676,30

7.5.3.5.1.3.4 Utang Bahan Kimia pada Rumah Sakit Umum Daerah

Tabel 7.5.153 Utang Bahan Kimia pada RSUD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Distributor	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Nama Obat	Total (Rp)
1	PT. Espana	08 Januari 2021	2021/Ep//010	Sigpro Rapid Tes Cov Igg/Igm Cassete	4.125.000,00
2	PT. Espana	29 Januari 2021	2021/Ep//042	Quintus 5part Diluent	12.100.000,00
3	PT. Espana	02 Februari 2021	2021/Ep//045	Di Hbsag Cassete Fdi	12.100.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Distributor	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Nama Obat	Total (Rp)
4	PT. Espana	02 Maret 2021	2021/Ep/Iii/101	Ise Calibrating Kits	31.777.350,00
5				Urea Bun UV	
6	PT. Espana	05 Maret 2021	2021/Ep/Iii/109	Golongan Darah Set (A, B, Ab, D)	19.392.450,00
7				Urea Bun UV	
8				Creatinine	
9				ISE Calibrating Kits	
10	PT. Espana	13 Maret 2021	2021/Ep/Iii/125	Biochemistry Control Serum	22.999.768,00
11				Multiple Calibrator	
12				Albumin	
13				Washing Solution	
14				Boditech Ichroma Hba1c	
15	PT. Espana	15 Maret 2021	2021/Ep/Iii/126	Cholesterol Hdl Direct	48.400.000,00
16				Cholesterol LDL Direct	
17	PT. Espana	26 Maret 2021	2021/Ep/Iii/143	Swelab Alfa Diluent	17.019.200,00
18				Quintus 5Part Diluent	
19				Golongan Darah A	
20				Golongan Darah B	
21				Golongan Darah Rhesus	
22				Boule Con-Diff 4,5 MI	
23	PT. Espana	01 April 2021	2021/Ep/Iv/154	Ise Calibrating Kits	40.829.052,00
24				Boditech Ichroma Hba1c	
25				Swelab Alfa Diluent	
26	PT. Espana	06 April 2021	2021/Ep/Iv/165	Albumin	21.028.150,00
27				Cholesterol	
28				Swelab Alfa Lyse	
29	PT. Espana	26 April 2021	2021/Ep/Iv/203	Cholesterol Hdl Direct	48.400.000,00
30				Cholesterol LDL Direct	
31	PT. Espana	27 April 2021	2021/Ep/Iv/204	Diestro Control	37.626.380,00
32				Boditech Ichroma Hba1c	
33				Swelab Alfa Diluent	
34				Boditech Ichroma Troponin	
35				Sodium Conditioner	
36	PT. Espana	29 April 2021	2021/Ep/Iv/210	Sigpro Doa 5	17.974.000,00
37				SIGPRO DOA 6	
38				DOA 3p	
39				Boule Con-Diff 6x3 MI	
40	PT. Espana	03 Mei 2021	2021/Ep/V/219	Di Anti Hiv 1/2 Cassete	3.259.300,00
41	PT. Espana	02 Juni 2021	2021/Ep/Vi/271	Tryglicerides	36.452.350,00
42				AST/GOT	
43				Cholesterol	
44				Creatinine	
45				Billirubin Total	
46				Billirubin Direct	
47				ISE Calibrating Kits	
48	PT. Espana	09 Juni 2021	2021/Ep/Vi/286	Cholesterol	46.864.400,00
49				Albumin	
50				AST/GOT	
51				Glucose	
52				Tryglicerides	
53				Diestro Control	
54				ISE Calibrating Kits	
55	PT. Espana	10 Juni 2021	2021/Ep/Vi/287	Ise Calibrating Kits	33.440.000,00
56				Swelab Alfa Diluent	
57				Swelab Alfa Lyse	
58				Quintus 5Part Diluent	



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Distributor	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Nama Obat	Total (Rp)	
59	PT. Espana	24 Juni 2021	2021/Ep/Vi/319	Biochemistry Control Serum I	45.870.000,00	
60				Biochemistry Control Serum II		
61				AST/GOT		
62				Cholesterol HDL Direct		
63				Cholesterol LDL Direct		
64	Creatinine	PT. Espana	25 Juni 2021	2021/Ep/Vi/320	Uric Acid	18.350.068,00
65	Boditech Ichroma Hba1c					
66	Boule Con Diff 4,5ml					
68	PT. Espana	08 September 2021	2021/Ep/Ix/497	Albumin	35.789.050,00	
69				AST/GOT		
70				ALT/GPT		
71				Creatinine		
72				Billirubin Direct		
73	Cholesterol LDL Direct	PT. Espana	09 September 2021	2021/Ep/Ix/503	Boule Con Diff 4,5ml	6.600.000,00
74	PT. Espana				20 September 2021	
76	PT. Espana	27 September 2021	2021/Ep/Ix/536	Swelab Alfa Lyse	38.795.328,00	
77				ISE Calibrating Kits		
78				Boditech Ichroma Troponin		
79	PT. Espana	11 Oktober 2021	2021/Ep/Xi/571	Urean Bun/Uv	32.646.570,00	
80				Cholesterol		
81				Trigliceryde		
82				Quintus 5Part Diluent		
83				Quintus 5Part Lyse		
84	Swelab Alfa Diluent	PT. Espana	12 Oktober 2021	2021/Ep/Xi/572	Cholesterol Hdl Direct	24.200.000,00
85	Cholesterol LDL Direct					
87	PT. Espana	28 Oktober 2021	2021/Ep/Xi/608	Biochemistry Control I	22.000.000,00	
88				Biochemistry Control II		
89	PT. Espana	02 Nopember 2021	2021/Ep/Xi/614	Boditech Ichroma Troponin	46.457.752,00	
90				Boditech Ichroma TSH		
91				Boditech Ichroma Hba1c		
92				Multiple Calibrator		
93				AST/GOT		
94				Cholesterol		
95	Diestro Control	PT. Espana	03 Nopember 2021	2021/Ep/Xi/615	Ise Calibrating Kits	23.760.000,00
96	Swelab Alfa Diluent					
97	Swelab Alfa Lyse					
99	PT. Espana	09 Nopember 2021	2021/Ep/Xi/639	Golongan Darah A	16.196.400,00	
100				Golongan Darah B		
101				Golongan Darah Rhesus		
102	PT. Espana	15 Nopember 2021	2021/Ep/Xi/653	Albumin	31.504.000,00	
103				ALT/GPT		
104				Cholesterol HDL Direct		
105				Cholesterol LDL Direct		
106	PT. Espana	16 Nopember 2021	2021/Ep/Xi/662	Golongan Darah A	5.854.200,00	
107				Golongan Darah B		
108				Golongan Darah Rhesus		
109				Boule Con Diff 4,5ml		
110	PT. Espana	07 Desember 2021	2021/Ep/Xii/710	Biochemistry Control I	49.196.840,00	
111				Biochemistry Control II		
112				Multiple Calibrator		
113				AST/GOT		



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Distributor	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Nama Obat	Total (Rp)
114				ALT/GPT	
115				Creatinine	
116				Billirubin Direct	
117				Glucose	
118				Boditech Ichroma Hba1c	
119	PT. Espana	08 Desember 2021	2021/Ep/Xii/714	Boditech Ichroma Troponin	27.556.716,00
120				ISE Calibrating Kits	
121	PT. Espana	20 Desember 2021	2021/Ep/Xii/734	Swelab Alfa Diluent	14.850.000,00
122				Swelab Alfa Lyse	
123	PT. Pelangi	14 Agustus 2021	12046	Sd Bioline Hcv	33.968.000,00
124				SD Bioline HIV	
125	PT. Pelangi	30 Juli 2021	12021	Accu Check Performa	42.212.500,00
126	PT. Pelangi	30 Juli 2021	12016	Refill Pack Including Seal Kit	40.881.610,00
127	PT. Pelangi	30 Juli 2021	12014	Ichroma Hba 1c	7.392.000,00
128	PT. Pelangi	17 Juli 2021	11966	Tubex Tf	42.240.000,00
129	PT. Pelangi	05 Juli 2021	11919	Accu Check Performa	8.442.500,00
130				Ichroma Troponin	
131	PT. Pelangi	30 Juni 2021	11912	Ichroma TSH	12.663.200,00
132	PT. Pelangi	03 Mei 2021	11794	Deconex Prozyme Active	10.995.160,00
133	PT. Pelangi	30 April 2021	11792	Stabimed 1 L	3.058.000,00
134				Septalkan Wipes	
135	PT. Mpi	22 Maret 2021	7280	Septalkan Spray	6.102.800,00
136	PT. Mpi	31 Mei 2021	7281	Alkacid 1l	21.621.600,00
137	PT. Mpi	31 Mei 2021	7282	Alkazyme 25x25mg	15.218.585,00
138	PT. Mpi	30 Mei 2021	3740	Alkacid 1l	16.216.200,00
139	PT. Oasis	01 Desember 2022	Oma 103	Sd Bioline	11.825.000,00
140				Medika Povidone	
141				Stabimed 1 L	
142				Family DR Hb Test	
143	PT. Oasis	06 Juli 2022	Oma 055	SD Hbsag	31.965.120,00
144				SD Bioline	
145				Hexaquart 1L	
146				Tubex TF	
147				Onemed Hcg Pregnancy Rapid Test Cassete	
148				GLORY ANTI A	
149				GLORY ANTI B	
150				GLORY ANTI D	
151	PT. Oasis	01 Desember 2022	Oma 105	MEDI TEST URYXXON STICK 10	15.444.000,00
152				MEDIKA ALKOHOL 70% 1 LITER	
153				AQUADEST	
154				D-SPEED DENTAL FILM X RAY 100S	
155				CAIRAN FORMALIN 1L	
156				Rightsign Hcg Pregnancy	
157	PT. Oasis	04 Nopember 2022	Oma 089	Abon Hbsab	9.916.500,00
158				SD Bioline Malaria	
159				Dental Film X-Ray	
160				Sd Bioline Dengue Duo	
161				SD Bioline Dengue Ns1 Ag	
162	PT. Oasis	16 Juli 2022	Oma 060	One Step Anti Hiv	29.453.600,00
163				Focus Diagnostic Hiv Test	
164				Family Dr Hb Strip	
165	PT. Oasis	27 September 2022	Oma 080	Prontosan Wound Gel	9.075.000,00
166				Prontosan Solution	
167	PT. Oasis	09 Desember 2022	Oma 117	Sd Bioline Hbsag S/P 30t	40.268.800,00



No	Distributor	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Nama Obat	Total (Rp)
168				SD BIOLINE DENGUE IGG/IGM 25T	
169				SD BIOLINE DENGUE	
170				SD BIOLINE SYPHILIS 3.0 30T	
171				SD BIOLINE MALARIA Ag.P.F/Pan 25T	
172				SD BIOLINE DENGUE NS1 Ag 25T	
173	PT.Widoadses	14 Desember 2021		Istat Cartridge	4.455.000,00
Jumlah					1.313.429.499,00

7.5.3.5.1.3.5 Utang Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah**Tabel 7.5.154 Utang Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Instansi	Tanggal Faktur	Nomor Faktur	Total (Rp)	Ket
1	RSUD Raja Ahmad Tabib	07/10/2021	956/4465.3.3/RSUD	12.994.000,00	Periode September 1
2	RSUD Raja Ahmad Tabib	21/10/2021	956/4728/3.3/RSUD	2.900.000,00	Periode September 2
3	RSUD Raja Ahmad Tabib	08/11/2021	956/5070/3.3/RSUD	25.655.035,00	Periode Oktober
4	PMI Kota Tanjungpinang	03/12/2021		21.240.000,00	Periode November BPJS
5	PMI Kota Tanjungpinang	03/12/2021		720.000,00	Periode November kk/ktp
6	RSUD Raja Ahmad Tabib	07/12/2021	956/5760/3.3/RSUD	22.184.742,00	Periode November
7	RSUD Raja Ahmad Tabib	22/12/2021	956/6035/3.3/RSUD	17.797.233,00	Periode Desember
8	PMI Kota Tanjungpinang	03/12/2021		16.920.000,00	Periode Desember BPJS
9	PMI Kota Tanjungpinang	03/12/2021		1.800.000,00	Periode Desember kk/ktp
Jumlah				122.211.010,00	

7.5.3.5.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 bersumber dari kewajiban atas jaminan reklamasi pertambangan dan jaminan bongkar penayangan reklame sebesar Rp79.652.580,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.155 Data Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	PT. Sindo Mandiri	795.825.050,00	0,00	795.825.050,00	0,00
2	PT. Tunggul Ulung Makmur	6.820.973.440,00	0,00	6.820.973.440,00	0,00
3	PT. Shanindo	33.936.771,00	0,00	33.936.771,00	0,00
4	PT. Bukit Panglong	265.386.858,00	0,00	265.386.858,00	0,00
5	Jaminan Bongkar Penayangan Reklame	36.792.413,00	54.798.630,00	16.301.623,00	75.289.420,00
6	Kesalahan Setor	0,00	4.363.160,00		4.363.160,00
Jumlah		7.952.914.532,00	59.161.790,00	7.932.423.742,00	79.652.580,00

Kewajiban atas Jaminan Bongkar Penayangan Reklame Per 31 Desember 2021 sebesar Rp79.652.580,00. Jaminan Bongkar merupakan Pendapatan yang dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Yang kemudian pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame dimana



pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Jaminan Bongkar Penayangan Reklame dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bintan.

Jaminan Bongkar Penayangan Reklame adalah segala biaya yang dibebankan kepada penyelenggara reklame berupa dana yang disetorkan kepada pemerintah daerah melalui rekening penampung pada Bank yang ditunjuk oleh BKAD selaku bendahara umum daerah, dengan Nomor Rekening : 13-50-20012-6 (Jaminan Bongkar Penayangan Reklame).

Saldo Jaminan Bongkar Penayangan Reklame per 31 Desember 2021 yang merupakan Jaminan Bongkar Penayangan Reklame yang belum jatuh tempo sebesar Rp35.117.560,00. Jaminan Bongkar Penayangan Reklame yang sudah jatuh tempo namun belum dilakukan pemberitahuan ke wajib pajak dan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp22.788.620,00, selisih lebih pembayaran Jaminan Bongkar yang harus disetorkan kembali ke rekening Jaminan Bongkar Penayangan Reklame sebesar Rp337.000,00 dan selisih lebih penyetoran Jasa Giro ke Kas Daerah yang harus disetorkan kembali ke rekening Jaminan Bongkar Penayangan Reklame sebesar Rp540,00.

7.5.3.5.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan. Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2021 nihil.

7.5.3.6 EKUITAS

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Bintan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.413.815.188.327,72

7.5.4 LAPORAN OPERASIONAL

7.5.4.1 PENDAPATAN – LO

Pendapatan LO adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Bintan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.068.229.542.386,51.

**Tabel 7.5.156 Pendapatan Daerah - LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	(%)
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	155.730.268.517,51	180.344.519.552,02	(13,65)
2	Pendapatan Transfer - LO	833.349.256.759,00	827.793.077.880,00	0,67
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO	79.150.017.110,00	69.929.415.687,00	13,19
4	Surplus Non Operasional	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.068.229.542.386,51	1.078.067.013.119,02	(0,91)

7.5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp155.730.268.517,51 yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

**Tabel 7.5.157 Pendapatan Asli Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Saldo 2020 (Rp)	(%)
1	Pajak Daerah - LO	91.687.960.182,63	120.569.011.140,58	(23,95)
2	Retribusi Daerah – LO	8.230.457.748,33	6.924.634.690,00	18,86
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	11.687.932.218,00	10.871.381.102,00	7,51
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO	44.123.918.368,55	41.979.492.619,44	5,11
Jumlah		155.730.268.517,51	180.344.519.552,02	(13,65)

Masing-masing realisasi jenis PAD – LO Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

7.5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2020, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada Tahun 2021 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2021. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

**Tabel 7.5.158 Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	Pajak Hotel	8.024.676.609,88	27.628.586.787,05	(19.603.910.177,17)	(70,96)
2	Pajak Restoran	1.930.678.833,03	11.147.408.850,55	(9.216.730.017,52)	(82,68)
3	Pajak Hiburan	373.205.305,00	1.757.536.475,00	(1.384.331.170,00)	(78,77)
4	Pajak Reklame	324.490.303,72	491.793.615,40	(167.303.311,68)	(34,02)
5	Pajak Penerangan Jalan	12.984.150.557,00	13.082.918.374,00	(98.767.817,00)	(0,75)
6	Pajak Parkir	80.452.633,00	142.050.500,00	(61.597.867,00)	(43,36)
7	Pajak Air Tanah	5.397.000,00	5.900.000,00	(503.000,00)	(8,53)
8	Pajak Sarang Burung Walet	1.450.000,00	3.500.000,00	(2.050.000,00)	(58,57)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.294.623.287,00	15.849.057.489,00	(3.554.434.202,00)	(22,43)
10	PBB-P2	31.487.113.095,00	32.983.778.585,58	(1.496.665.490,58)	(4,54)
11	BPHTB	24.181.722.559,00	17.476.480.464,00	6.705.242.095,00	38,37
Jumlah		91.687.960.182,63	120.569.011.140,58	(28.881.050.957,95)	(23,95)

**Tabel 7.5.159 Rincian Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah LO dengan LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	91.687.960.182,63	130.059.598.323,77	(38.371.638.141,14)

Selisih antara pendapatan pajak LO dan pendapatan pajak LRA Tahun 2021 adalah sebesar (Rp38.371.638.141,14). Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7.5.160 Selisih Pendapatan Pajak Daerah LO dengan LRA
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
Penambahan		
1	Penambahan Piutang Pajak Hotel Tahun 2021	272.521.102,89
2	Penambahan Piutang Pajak Parkir Tahun 2021	11.174.000,00
3	Penambahan Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2021	1.845.000,00
4	Penambahan Piutang BPHTB Tahun 2021	8.351.825,25
5	Penambahan Piutang Pajak PBB Tahun 2021	5.342.155.208,00
	Jumlah	5.636.047.136,14
Pengurangan		
1	Realisasi Piutang Pajak Hotel Tahun 2020	5.489.672.207,00
2	Realisasi Piutang Pajak Restoran Tahun 2020	4.282.511.992,00
3	Realisasi Piutang Pajak Reklame Tahun 2020	5.583.750,00
4	Realisasi Piutang Pajak MBLB Tahun 2020	735.000.000,00
5	Realisasi Piutang Pajak Parkir Tahun 2020	580.000,00
6	Realisasi Piutang Pajak BPHTB Tahun 2020	6.942.000,00
7	Realisasi Piutang PBB Tahun 2020	33.307.343.525,00
8	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Tahun 2020	180.051.803,28
	Jumlah	44.007.685.277,28
	Total Selisih	(38.371.638.141,14)

7.5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bintan dipungut dan dikelola oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bintan didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel 7.5.161 Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Kesehatan	42.411.500,00	56.055.000,00	(13.643.500,00)	(24,34)
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	498.610.000,00	502.585.000,00	(3.975.000,00)	(0,79)
2	Dinas Perhubungan	287.327.500,00	2.373.031.000,00	(2.085.703.500,00)	(87,89)
3	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	72.252.700,00	58.514.400,00	13.738.300,00	23,48
4	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	7.318.302.048,33	3.934.449.290,00	4.002.970.258,33	86,01
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.554.000,00	0,00	6.554.000,00	0,00
6	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	Jumlah	8.230.457.748,33	6.924.634.690,00	1.305.823.058,33	18,86

Realisasi pendapatan retribusi pada tabel tersebut di atas merupakan pendapatan Laporan Operasional Tahun 2021 dan menurut jenisnya ada tiga retribusi yaitu retribusi jasa



usaha, retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu dengan rincian sebagai berikut.

7.5.4.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum, Terdiri dari :

**Tabel 7.5.162 Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO Pemerintah Kabupaten Bintang
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Retribusi Jasa Umum	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	42.411.500,00	56.055.000,00	(13.643.500,00)	(24,34)
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Jalan Umum	123.900.000,00	100.700.000,00	23.200.000,00	23,04
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	11.995.000,00	44.563.000,00	(32.568.000,00)	(73,08)
4	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Retribusi Tera-Tera	72.252.700,00	58.514.400,00	13.738.300,00	23,48
Jumlah		250.559.200,00	259.832.400,00	(9.273.200,00)	(3,57)

7.5.4.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:

**Tabel 7.5.163 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO Pemerintah Kabupaten Bintang
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2020**

No	Retribusi Jasa Usaha	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	498.610.000,00	502.585.000,00	(3.975.000,00)	(0,79)
2	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	151.342.500,00	2.227.768.000,00	(2.076.425.500,00)	(93,21)
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	6.554.000,00	0,00	6.554.000,00	0,00
4	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Jumlah		661.506.500,00	2.730.353.000,00	(2.068.846.500,00)	(75,77)

7.5.4.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari:

**Tabel 7.5.164 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Retribusi Perizinan Tertentu	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Retribusi Izin Mendirikan bangunan	5.163.434.281,00	2.151.351.304,00	3.012.082.977,00	140,01
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	55.625.000,33	86.208.333,00	(30.583.332,67)	(35,48)
3	Retribusi Izin Gangguan / Keramaian	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi Izin Trayek	90.000,00	1.365.000,00	(1.275.000,00)	(93,41)
5	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	2.099.242.767,00	1.695.524.653,00	403.718.114,00	23,81
Jumlah		7.318.392.048,33	3.934.449.290,00	3.383.942.758,33	86,01



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 7.5.165 Rincian Perbedaan Pengakuan Pendapatan Retribusi Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Retribusi	8.230.457.748,33	7.601.797.691,00	628.660.057,33

Selisih antara pendapatan retribusi LO dan pendapatan retribusi LRA Tahun 2021 adalah sebesar Rp628.660.057,33. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 7.5.166 Selisih Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Penambahan		
1	Penambahan Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas Tahun 2021	3.600.000,00
2	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Izin Tempat Penjualan MIKOL Tahun 2020	17.291.667,00
3	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi IMTA Tahun 2020	1.260.969.767,00
Jumlah		1.281.861.434,00
Pengurangan		
1	Realisasi Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas	6.600.000,00
2	Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi IMTA Tahun 2021	591.335.800,00
3	Pendapatan diterima dimuka retribusi Izin tempat penjualan MIKOL tahun 2021	17.666.666,67
4	Realisasi Pembayaran Retribusi IMB Tahun 2020	37.598.910,00
Jumlah		653.201.376,67
Total Selisih		628.660.057,33

7.5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan yang diterima dan dikelola melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bintan yang berupa PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bintan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.167 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	BUMD/BPR Bintan	2.253.182.332,00	4.320.483.077,00	(2.067.300.745,00)	(47,85)
2	PT Bintan Inti Sukses	(198.008.557,00)	0,00	(198.008.557,00)	(100,00)
3	Bank Riau Kepri	9.632.758.443,00	6.550.898.025,00	3.081.860.418,00	47,04
Jumlah		11.687.932.218,00	10.871.381.102,00	816.551.116,00	7,51

Tabel 7.5.168 Rincian Perbedaan Pengakuan Akun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.687.932.218,00	11.411.312.907,00	276.619.311,00



Selisih antara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA Tahun 2020 adalah sebesar Rp276.619.311,00. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 7.5.169 Selisih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Penambahan		
1	Penambahan dari Sisi Ekuitas Pembagian Dividen PD.BPR Bintan	474.627.868,00
Jumlah		474.627.868,00
Pengurangan		
1	Pengurangan dari Sisi Ekuitas Pembagian Dividen PT. Bintan Inti Sukses	198.008.557,00
Jumlah		198.008.557,00
Total Selisih		276.619.311,00

7.5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah TA 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.170 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan	246.680.000,00	89.575.716,00	157.104.284,00	175,39
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	4.127.200,00	0,00	4.127.200,00	0,00
3	Pendapatan Jasa Giro	1.992.415.249,76	2.657.024.904,59	(664.609.654,83)	(25,01)
4	Pendapatan Bunga Deposito	3.566.857.266,46	10.079.870.461,70	(6.513.013.195,24)	(64,61)
5	Pendapatan denda atas keterlambatan	158.980.221,80	61.574.020,56	97.406.201,24	158,19
6	Pendapatan denda pajak	1.273.087.611,50	5.286.719.359,32	(4.013.631.747,82)	(75,92)
7	Pendapatan denda retribusi	0,00	59.155.999,14	(59.155.999,14)	(100,00)
8	Pendapatan dari Pengembalian	957.649.877,56	648.734.150,92	308.915.726,64	47,62
9	Penerimaan Lain-lain	0,00	496.791.149,71	(496.791.149,71)	(100,00)
10	Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan	0,00	123.848.051,00	(123.848.051,00)	(100,00)
11	Pendapatan dari BLUD	33.004.041.261,00	19.730.665.276,00	13.273.375.985,00	67,27
12	Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP/Puskesmas yang disetor ke Kas Daerah	0,00	107.197.300,00	(107.197.300,00)	(100,00)
13	Pendapatan Denda Hasil Penjualan Aset Daerah Yg Tidak terpisahkan	9.095.444,75	14.193.430,50	(5.097.985,75)	(35,92)
14	Pendapatan JKN di FKTP	2.872.210.750,00	2.624.142.800,00	248.067.950,00	9,45
15	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	38.773.485,72	0,00	38.773.485,72	0,00
Jumlah		44.123.918.368,55	41.979.492.619,44	2.144.425.749,11	5,11

**7.5.4.1.1.4.1 Pendapatan Jasa Giro**

Pendapatan Jasa Giro terdiri dari :

**Tabel 7.5.171 Pendapatan Jasa Giro – LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.863.386.434,00	2.464.799.573,00	(601.413.139,00)	(24,40)
2	Dinas Pendidikan	6.692.849,00	5.662.356,00	1.030.493,00	18,20
3	Dinas Kesehatan	7.691.271,00	55.205.240,00	(47.513.969,00)	(86,07)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	213.568,00	94.814,00	118.754,00	125,25
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	673.657,00	382.094,00	291.563,00	76,31
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	112.248,00	43.096,00	69.152,00	160,46
7	Satuan Polisi Pamong Praja	124.077,00	141.931,00	(17.854,00)	(12,58)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	299.025,00	1.335.300,00	(1.036.275,00)	(77,61)
9	Dinas Sosial	1.773.912,00	8.115.661,00	(6.341.749,00)	(78,14)
10	Dinas Tenaga Kerja	67.715,00	58.312,00	9.403,00	16,13
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	113.294,00	118.029,00	(4.735,00)	(4,01)
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	86.781,00	1.224.896,00	(1.138.115,00)	(92,92)
13	Dinas Lingkungan Hidup	334.628,00	52.711,00	281.917,00	534,84
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.423,00	40.582,00	(15.159,00)	(37,35)
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	76.361,00	39.953,00	36.408,00	91,13
16	Dinas Perhubungan	102.144,00	88.682,00	13.462,00	15,18
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	146.031,00	145.638,00	393,00	0,27
18	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	120.103,00	78.348,00	41.755,00	53,29
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	95.602,00	66.168,00	29.434,00	44,48
20	Dinas Kepemudaan dan olah raga	34.536,00	57.540,00	(23.004,00)	(39,98)
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip	38.390,00	25.939,00	12.451,00	48,00
22	Dinas Perikanan	143.726,00	130.389,00	13.337,00	10,23
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	45.371,00	136.249,00	(90.878,00)	(66,70)
24	Sekretariat DPRD	254.549,00	495.371,00	(240.822,00)	(48,61)
25	Sekretariat Daerah	1.633.520,00	834.443,00	799.077,00	95,76
26	Kecamatan BintanTimur	106.425,00	80.173,00	26.252,00	32,74
27	Kecamatan Gunung Kijang	58.480,00	88.953,00	(30.473,00)	(34,26)
28	Kecamatan Teluk Bintan	39.731,00	77.360,00	(37.629,00)	(48,64)
29	Kecamatan BintanUtara	64.255,00	139.222,00	(74.967,00)	(53,85)
30	Kecamatan Teluk Sebong	35.407,00	38.732,00	(3.325,00)	(8,58)
31	Kecamatan Tambelan	32.138,00	55.510,00	(23.372,00)	(42,10)
32	Kecamatan Seri Kuala Lobam	34.794,00	26.439,00	8.355,00	31,60
33	Kecamatan Toapaya	54.419,00	47.249,00	7.170,00	15,17
34	Kecamatan BintanPesisir	46.491,00	34.993,00	11.498,00	32,86
35	Kecamatan Mantang	21.847,00	18.375,00	3.472,00	18,90



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
36	Inspektorat Daerah	152.772,00	92.434,00	60.338,00	65,28
37	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	151.332,00	454.620,00	(303.288,00)	(66,71)
38	Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	1.425.592,00	11.555.053,00	(10.129.461,00)	(87,66)
39	Badan Pendapatan Daerah	308.231,00	445.293,00	(137.062,00)	(30,78)
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	130.343,00	98.047,00	32.296,00	32,94
41	SDN 001 BintanPesisir	599.303,00	1.169.175,63	(569.872,63)	(48,74)
42	SDN 002 BintanPesisir	200.191,00	219.895,06	(19.704,06)	(8,96)
43	SDN 003 BintanPesisir	71.751,00	44.601,25	27.149,75	60,87
44	SDN 004 BintanPesisir	186.956,00	623.051,22	(436.095,22)	(69,99)
45	SDN 005 BintanPesisir	70.701,00	133.485,50	(62.784,50)	(47,03)
46	SDN 006 BintanPesisir	62.964,00	94.033,14	(31.069,14)	(33,04)
47	SDN 002 BintanTimur	463.048,00	255.809,78	207.238,22	81,01
48	SDN 003 BintanTimur	895.368,44	620.238,29	275.130,15	44,36
49	SDN 006 BintanTimur	538.425,00	469.710,59	68.714,41	14,63
50	SDN 007 BintanTimur	56.969,00	61.980,47	(5.011,47)	(8,09)
51	SDN 008 BintanTimur	69.394,00	170.493,20	(101.099,20)	(59,30)
52	SDN 009 BintanTimur	621.557,00	973.835,05	(352.278,05)	(36,17)
53	SDN 010 BintanTimur	534.670,00	424.057,79	110.612,21	26,08
54	SDN 011 BintanTimur	1.032.581,00	859.067,55	173.513,45	20,20
55	SDN 012 BintanTimur	60.326,65	146.299,83	(85.973,18)	(58,77)
56	SDN 013 BintanTimur	328.563,00	231.908,18	96.654,82	41,68
57	SDN 014 BintanTimur	65.067,02	76.886,76	(11.819,74)	(15,37)
58	SDN 015 BintanTimur	608.716,00	240.264,78	368.451,22	153,35
59	SDN 016 BintanTimur	42.470,00	52.954,59	(10.484,59)	(19,80)
60	SDN 017 BintanTimur	761.985,00	744.202,56	17.782,44	2,39
61	SDN 018 BintanTimur	22.223,00	48.480,13	(26.257,13)	(54,16)
62	SDN 019 BintanTimur	505.767,00	331.377,24	174.389,76	52,63
63	SDN 001 BintanUtara	515.104,78	483.476,56	31.628,22	6,54
64	SDN 003 BintanUtara	412.305,00	335.004,35	77.300,65	23,07
65	SDN 004 BintanUtara	101.564,47	137.715,66	(36.151,19)	(26,25)
66	SDN 005 BintanUtara	220.652,40	204.122,95	16.529,45	8,10
67	SDN 006 BintanUtara	183.173,16	127.201,39	55.971,77	44,00
68	SDN 008 BintanUtara	86.524,96	73.963,77	12.561,19	16,98
69	SDN 009 BintanUtara	201.455,05	579.981,57	(378.526,52)	(65,27)
70	SDN 010 BintanUtara	39.988,92	30.247,80	9.741,12	32,20
71	SDN 001 Tambelan	9.428,00	570.912,50	(561.484,50)	(98,35)
72	SDN 002 Tambelan	48.002,00	743.430,96	(695.428,96)	(93,54)
73	SDN 003 Tambelan	55.134,00	93.002,52	(37.868,52)	(40,72)
74	SDN 005 Tambelan	73.044,00	157.459,38	(84.415,38)	(53,61)
75	SDN 006 Tambelan	85.228,00	55.859,71	29.368,29	52,58
76	SDN 007 Tambelan	35.913,00	513.327,62	(477.414,62)	(93,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
77	SDN 001 Gunung Kijang	139.958,51	123.187,56	16.770,95	13,61
78	SDN 002 Gunung Kijang	363.632,00	250.550,23	113.081,77	45,13
79	SDN 003 Gunung Kijang	103.995,03	124.474,46	(20.479,43)	(16,45)
80	SDN 004 Gunung Kijang	61.956,08	34.600,46	27.355,62	79,06
81	SDN 005 Gunung Kijang	32.824,00	49.239,99	(16.415,99)	(33,34)
82	SDN 006 Gunung Kijang	70.288,00	100.319,03	(30.031,03)	(29,94)
83	SDN 007 Gunung Kijang	370.756,00	147.185,98	223.570,02	151,90
84	SDN 008 Gunung Kijang	74.410,03	66.446,04	7.963,99	11,99
85	SDN 009 Gunung Kijang	58.386,00	138.579,08	(80.193,08)	(57,87)
86	SDN 001 Mantang	102.320,00	144.494,08	(42.174,08)	(29,19)
87	SDN 002 Mantang	37.062,00	69.418,59	(32.356,59)	(46,61)
88	SDN 003 Mantang	37.499,00	66.469,58	(28.970,58)	(43,58)
89	SDN 004 Mantang	43.013,00	158.694,03	(115.681,03)	(72,90)
90	SDN 001 Seri Kuala Lobam	598.689,29	393.995,82	204.693,47	51,95
91	SDN 002 Seri Kuala Lobam	96.761,36	85.069,42	11.691,94	13,74
92	SDN 003 Seri Kuala Lobam	134.482,23	109.606,23	24.876,00	22,70
93	SDN 004 Seri Kuala Lobam	39.994,98	50.444,21	(10.449,23)	(20,71)
94	SDN 005 Seri Kuala Lobam	700.176,00	1.114.425,46	(414.249,46)	(37,17)
95	SDN 006 Seri Kuala Lobam	141.067,17	208.223,64	(67.156,47)	(32,25)
96	SDN 007 Sri Kuala Lobam	241.241,42	142.636,04	98.605,38	69,13
97	SDN 001 Teluk Sebong	45.974,00	16.277,93	29.696,07	182,43
98	SDN 002 Teluk Sebong	265.237,27	164.061,87	101.175,40	61,67
99	SDN 003 Teluk Sebong	244.318,07	168.643,89	75.674,18	44,87
100	SDN 004 Teluk Sebong	117.527,00	132.578,12	(15.051,12)	(11,35)
101	SDN 005 Teluk Sebong	91.489,63	82.320,37	9.169,26	11,14
102	SDN 006 Teluk Sebong	29.348,27	47.169,06	(17.820,79)	(37,78)
103	SDN 007 Teluk Sebong	283.433,18	444.921,95	(161.488,77)	(36,30)
104	SDN 008 Teluk Sebong	440.600,89	353.599,90	87.000,99	24,60
105	SDN 009 Teluk Sebong	32.161,81	117.977,08	(85.815,27)	(72,74)
106	SDN 010 Teluk Sebong	45.036,12	78.046,83	(33.010,71)	(42,30)
107	SDN 001 Teluk Bintan	49.047,00	65.720,57	(16.673,57)	(25,37)
108	SDN 002 Teluk Bintan	24.671,00	75.427,20	(50.756,20)	(67,29)
109	SDN 003 Teluk Bintan	37.363,00	64.644,00	(27.281,00)	(42,20)
110	SDN 004 Teluk Bintan	47.111,98	78.731,76	(31.619,78)	(40,16)
111	SDN 005 Teluk Bintan	51.969,62	286.280,20	(234.310,58)	(81,85)
112	SDN 006 Teluk Bintan	38.541,00	78.231,74	(39.690,74)	(50,73)
113	SDN 007 Teluk Bintan	34.225,00	70.894,54	(36.669,54)	(51,72)
114	SDN 008 Teluk Bintan	31.321,95	41.198,22	(9.876,27)	(23,97)
115	SDN 009 Teluk Bintan	105.684,00	73.969,10	31.714,90	42,88
116	SDN 010 Teluk Bintan	36.358,20	145.427,81	(109.069,61)	(75,00)
117	SDN 011 Teluk Bintan	36.042,39	40.322,95	(4.280,56)	(10,62)
118	SDN 012 Teluk Bintan	30.268,00	111.720,52	(81.452,52)	(72,91)
119	SDN 013 Teluk Bintan	42.783,00	23.737,93	19.045,07	80,23



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
120	SDN 014 Teluk Bintan	35.900,00	68.221,24	(32.321,24)	(47,38)
121	SDN 001 Toapaya	372.129,00	257.228,87	114.900,13	44,67
122	SDN 002 Toapaya	624.533,00	1.267.971,73	(643.438,73)	(50,75)
123	SDN 003 Toapaya	34.575,00	78.330,79	(43.755,79)	(55,86)
124	SDN 004 Toapaya	846.887,00	736.682,89	110.204,11	14,96
125	SDN 005 Toapaya	120.306,76	81.639,33	38.667,43	47,36
126	SDN 006 Toapaya	22.207,00	90.666,80	(68.459,80)	(75,51)
127	SMPN 1 Bintan	4.726.295,00	2.749.335,90	1.976.959,10	71,91
128	SMPN 2 Bintan	1.796.768,00	931.806,28	864.961,72	92,83
129	SMPN 3 Bintan	986.838,00	658.969,44	327.868,56	49,75
130	SMPN 4 Bintan	391.075,00	270.667,88	120.407,12	44,49
131	SMPN 5 Bintan	1.323.093,00	759.515,10	563.577,90	74,20
132	SMPN 6 Bintan	1.385.940,46	1.047.955,55	337.984,91	32,25
133	SMPN 7 Bintan	518.055,92	1.122.797,11	(604.741,19)	(53,86)
134	SMPN 8 Bintan	292.186,00	272.903,50	19.282,50	7,07
135	SMPN 9 Bintan	545.745,64	603.672,93	(57.927,29)	(9,60)
136	SMPN 10 Bintan	358.254,46	259.036,71	99.217,75	38,30
137	SMPN 11 Bintan	1.438.367,71	619.598,47	818.769,24	132,15
138	SMPN 12 Bintan	3.399.417,52	1.000.381,00	2.399.036,52	239,81
139	SMPN 13 Bintan	416.457,50	487.333,10	(70.875,60)	(14,54)
140	SMPN 14 Bintan	54.395,00	410.971,41	(356.576,41)	(86,76)
141	SMPN 15 Bintan	210.245,11	107.506,98	102.738,13	95,56
142	SMPN 16 Bintan	540.568,58	236.230,97	304.337,61	128,83
143	SMPN 17 Bintan	1.272.846,07	940.376,36	332.469,71	35,35
144	SMPN 18 Bintan	393.435,00	995.086,86	(601.651,86)	(60,46)
145	SMPN 19 Bintan	448.217,00	453.144,85	(4.927,85)	(1,09)
146	SMPN 20 Satu Atap Pulau Pucung	104.683,26	166.649,04	(61.965,78)	(37,18)
147	SMPN 21 Satu Atap Teluk Bintan	71.345,00	64.602,70	6.742,30	10,44
148	SMPN 22 Satu Atap Mapur	65.569,00	362.519,58	(296.950,58)	(81,91)
149	SMPN 23 Satu Atap Mantang	154.003,00	126.054,07	27.948,93	22,17
150	SMPN 24 Bintan	376.037,00	175.743,66	200.293,34	113,97
151	SMPN 26 Satu Atap Bintan Timur	16.059,00	0,00	16.059,00	0,00
152	SMPN 27 Satu Atap Gunung Kijang	17.437,44	6.997,00	10.440,44	149,21
153	SMPN 28 Bintan	146.556,00	93.780,33	52.775,67	56,28
154	SMPN 25 Satu Atap Selat Limau	73.207,00	567,27	72.639,73	12.805,14
155	SMPN 21 Satu Atap Mantang	0,00	222,49	(222,49)	(100,00)
156	SMAN 8 Bintan	0,00	166.341,73	(166.341,73)	(100,00)
157	SMKN 4 Bintan	0,00	75.443,43	(75.443,43)	(100,00)
158	PPK BLUD Puskesmas Teluk Sebung	11.565,00	13.739,00	(2.174,00)	(15,82)
159	PPK BLUD Puskesmas Teluk Sasah	9.093,00	6.706,00	2.387,00	35,59
160	PPK BLUD Puskesmas Kijang	11.512,00	6.439,00	5.073,00	78,79
161	PPK BLUD Puskesmas Tanjung Uban	16.585,00	9.591,00	6.994,00	72,92
162	PPK BLUD Puskesmas Kawal	21.113,00	14.487,00	6.626,00	45,74



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
163	Puskesmas Kelong	9.762,00	5.706,00	4.056,00	71,08
164	Puskesmas Mantang	18.766,00	26.027,00	(7.261,00)	(27,90)
165	Puskesmas Toapaya	13.821,00	9.215,00	4.606,00	49,98
166	Puskesmas Teluk Bintan	18.859,00	7.410,00	11.449,00	154,51
167	Puskesmas Tambelan	22.889,00	12.523,00	10.366,00	82,78
168	Puskesmas Berakit	9.276,00	6.454,00	2.822,00	43,72
169	Puskesmas Sri Bintan	5.797,00	4.116,00	1.681,00	40,84
170	Puskesmas Kuala Sempang	21.756,00	4.813,00	16.943,00	352,03
171	Puskesmas Sei. Lekop	10.988,00	5.794,00	5.194,00	89,64
172	Puskesmas Numbing	4.318,00	8.602,00	(4.284,00)	(49,80)
173	Rumah Sakit Umum Daerah	67.188,00	101.682,00	(34.494,00)	(33,92)
174	Kelurahan Sungai Enam	0,00	2.442,00	(2.442,00)	(100,00)
175	Kelurahan KijangKota	0,00	5.561,00	(5.561,00)	(100,00)
176	Kelurahan Sungai Lekop	311,00	95.926,44	(95.615,44)	(99,68)
177	Kelurahan Gunung Lengkuas	2.604,00	568,00	2.036,00	358,45
178	Kelurahan Kawal	2.368,00	1.772,00	596,00	33,63
179	Kelurahan Tembeling Tanjung	276,00	3.192,00	(2.916,00)	(91,35)
180	Kelurahan TanjungUban	336,00	1.109,00	(773,00)	(69,70)
181	Kelurahan TanjungUbanUtara	687,00	5.955,00	(5.268,00)	(88,46)
182	Kelurahan TanjungUbanTimur	0,00	696,00	(696,00)	(100,00)
183	Kelurahan Tanjung Uban Selatan	242,00	68.000,00	(67.758,00)	(99,64)
184	Kelurahan Teluk Sekuni	6.137,00	2.456,00	3.681,00	149,88
185	Kelurahan TanjungPermai	788,00	1.260,00	(472,00)	(37,46)
186	Kelurahan Teluk Lobam	2.934,00	590,00	2.344,00	397,29
187	Kelurahan ToapayaAsri	0,00	1.178,00	(1.178,00)	(100,00)
188	BLUD Dana Bergulir	65.882.992,00	67.780.695,00	(1.897.703,00)	(2,80)
189	BOP TK-SD Satap SDN 001 Mantang	632,00	0,00	632,00	0,00
190	DAK SMPN 8 Bintan	930,00	0,00	930,00	0,00
191	KB Adinda Mandiri	623,00	0,00	623,00	0,00
192	KB AL Hikmah	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
193	KB Ananda	797,00	0,00	797,00	0,00
194	KB Anggerek Ladi	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
195	KB AR-Riyadhussholihin	826,00	0,00	826,00	0,00
196	KB Asy Syifa	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00
197	KB Bina Sejahtera	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
198	KB Bintang Kejora	414,00	0,00	414,00	0,00
199	KB Buah Hati	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
200	KB Bukit Timah	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00
201	KB Cahaya Hati	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00
202	KB Cahaya Indah	2.076,00	0,00	2.076,00	0,00
203	KB GIN Kecil Indah	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00
204	KB Harapan Jaya	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
205	KB Intan Payung	2.941,00	0,00	2.941,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
206	KB Kandil Bahar	4.298,00	0,00	4.298,00	0,00
207	KB Kasih Bunda	656,00	0,00	656,00	0,00
208	KB Kasih Ibu	820,00	0,00	820,00	0,00
209	KB Mandiri	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
210	KB Mawar Asri	899,00	0,00	899,00	0,00
211	KB Mutiara Bunda	889,00	0,00	889,00	0,00
212	KB Nilam Permata Bintan I	518,00	0,00	518,00	0,00
213	KB Padimas	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00
214	KB PAUD Cahaya Fastabiqul Khairat	1.366,00	0,00	1.366,00	0,00
215	KB PAUD Cinta Nusantara	886,00	0,00	886,00	0,00
216	KB Pelita Hati	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00
217	KB Permata Bintan	1.376,00	0,00	1.376,00	0,00
218	KB Permata Hati	820,00	0,00	820,00	0,00
219	KB Permata Ibu	410,00	0,00	410,00	0,00
220	KB Permata Mantang	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
221	KB Putra Putri Ceria	717,00	0,00	717,00	0,00
222	KB RA Kartini	579,00	0,00	579,00	0,00
223	KB Sayang Ibu	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
224	KB Sengkuang	1.782,00	0,00	1.782,00	0,00
225	KB Seruni	860,00	0,00	860,00	0,00
226	KB Sri Kemalai	428,00	0,00	428,00	0,00
227	KB Terumbu Karang	345,00	0,00	345,00	0,00
228	KB Tunas Bentan	420,00	0,00	420,00	0,00
229	KB Tunas Muda	492,00	0,00	492,00	0,00
230	KB Tutwuri Handayani	412,00	0,00	412,00	0,00
231	KELOMPOK Bermain AL-Janatunnaim	335,00	0,00	335,00	0,00
232	KELOMPOK Bermain Bina Cahaya	966,00	0,00	966,00	0,00
233	Kelompok Bermain Kemala Sari	616,00	0,00	616,00	0,00
234	Kelompok Bermain Malin Indah	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00
235	KELOMPOK Bermain Tenggiri	448,00	0,00	448,00	0,00
236	PAUD AL-Hasanah II	933,00	0,00	933,00	0,00
237	PAUD KB Kenanga	877,00	0,00	877,00	0,00
238	PAUD KB Mutiara	760,00	0,00	760,00	0,00
239	PAUD KB TUNAS Harapan	1.678,00	0,00	1.678,00	0,00
240	PAUD Sri Merak	4.763,00	0,00	4.763,00	0,00
241	PAUD Tiara	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
242	PKBM Bintan Sari	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
243	PKBM Harapan Insani	9.830,00	0,00	9.830,00	0,00
244	PKBM Insan Cendikia	3.126,00	0,00	3.126,00	0,00
245	PKBM Karang Bertuah	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00
246	PKBM Maju Lestari	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00
247	PKBM Nilam Permata Bintan	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00
248	PKBM Persada Bahari	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
249	POS PAUD Air Glubi Indah	984,00	0,00	984,00	0,00
250	POS PAUD Anggrek	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
251	POS PAUD Berseri	990,00	0,00	990,00	0,00
252	POS PAUD Galang Batang	792,00	0,00	792,00	0,00
253	POS PAUD Langgeng	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00
254	POS PAUD Lengkuas Indah	624,00	0,00	624,00	0,00
255	POS PAUD Lestari	984,00	0,00	984,00	0,00
256	POS PAUD Melati Indah	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
257	POS PAUD Mutiara	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
258	POS PAUD Nala	748,00	0,00	748,00	0,00
259	POS PAUD Nusa Indah	2.116,00	0,00	2.116,00	0,00
260	POS PAUD Nusa Indah II	835,00	0,00	835,00	0,00
261	POS PAUD Nusa Indah IV	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00
262	POS PAUD Permata Bunda	1.778,00	0,00	1.778,00	0,00
263	POS PAUD Sengkuang	1.777,00	0,00	1.777,00	0,00
264	POS PAUD Sri Melati	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00
265	POS PAUD Widuri	531,00	0,00	531,00	0,00
266	Satuan Pendidikan Non Formal Kab.Bintan	7.961,00	0,00	7.961,00	0,00
267	SDN 004 Tambelan	41.394,00	0,00	41.394,00	0,00
268	SPS Kemala Kasih	78,00	0,00	78,00	0,00
269	SPS Mutiara Ibu	777,00	0,00	777,00	0,00
270	SPS Nusa Indah I	630,00	0,00	630,00	0,00
271	Taman kanak Kanak Antam Kijang	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00
272	TK Ceria Bintan	675,00	0,00	675,00	0,00
273	TK Knadil Bahar	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00
274	TK Negeri Pembina Bintan Timur	3.183,00	0,00	3.183,00	0,00
275	TK Negeri Pembina II	792,00	0,00	792,00	0,00
276	TK Numbing Jaya	1.121,00	0,00	1.121,00	0,00
277	TK Pedesaan Gunung Kijang	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00
278	TK Permata Bintan	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00
279	TK Satu Atap SDN 002 Bintan Pesisir	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
280	TK SD Satu Atap	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
281	TK SD Satu Atap SDN 001 Teluk Bintan	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
282	TK SDN 008 Satu Atap Pulau Pucung	214,00	0,00	214,00	0,00
283	TK Surya Kebenaran	238,00	0,00	238,00	0,00
284	TK Tadika Berseri	1.778,00	0,00	1.778,00	0,00
285	TK Terumbu Karang	369,00	0,00	369,00	0,00
286	TK Tirta Eka Pertiwi	305,00	0,00	305,00	0,00
287	TK Tunas Muda	720,00	0,00	720,00	0,00
288	TK IT Alamanda	258,00	0,00	258,00	0,00
Jumlah		1.992.359.653,76	2.657.024.904,59	(664.665.250,83)	(25,02)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

7.5.4.1.1.4.2 Pendapatan Bunga Deposito

Pendapatan Bunga Deposito terdiri dari :

Tabel 7.5.172 Pendapatan Bunga Deposito – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	Rekening Deposito pada Bank BPR	1.147.311.472,00	1.095.025.040,00	52.286.432,00	4,77
2	Rekening Deposito pada Bank BNI'46	122.819.181,00	108.821.919,00	13.997.262,00	12,86
3	Rekening Deposito pada Bank RIAU	818.388.318,00	1.145.277.136,00	(326.888.818,00)	(28,54)
4	Rekening Deposito pada Bank BRI	644.407.228,00	5.157.555.030,00	(4.513.147.802,00)	(87,51)
5	Rekening Deposito pada Bank BSM	195.026.965,17	238.762.589,84	(43.735.624,67)	(18,32)
6	Rekening Deposito pada Bank BTN	421.267.123,29	1.108.271.232,86	(687.004.109,57)	(61,99)
7	Rekening Deposito pada Bank Mandiri	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rekening Deposito pada Bank Bukopin	217.636.979,00	1.226.157.514,00	(1.008.520.535,00)	(82,25)
Jumlah		3.566.857.266,46	10.079.870.461,70	(6.513.013.195,24)	(64,61)

7.5.4.1.1.4.3 Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan Denda Pajak terdiri dari :

Tabel 7.5.173 Pendapatan Denda Pajak – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	501.683.801,98	1.156.126.136,17	(654.442.334,19)	(56,61)
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	261.136.240,50	775.000.683,22	(513.864.442,72)	(66,31)
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	3.368.182,04	(3.368.182,04)	(100,00)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	762.435,00	124.125,00	638.310,00	514,25
5	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	154.980,00	19.380,00	135.600,00	699,69
6	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	308.090,00	0,00	308.090,00	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	18.945.633,00	0,36	18.945.632,64	5.262.675.733,33
8	Pendapatan Denda BPHTB	1.280.320,00	25.000,00	1.255.320,00	5.021,28
9	Pendapatan Denda PBBP2	488.816.111,02	3.352.025.852,53	(2.863.209.741,51)	(85,42)
10	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	0,00	30.000,00	(30.000,00)	(100,00)
Jumlah		1.273.087.611,50	5.286.719.359,32	(4.013.631.747,82)	(75,92)

7.5.4.1.1.4.4 Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Denda Retribusi terdiri dari :

Tabel 7.5.174 Pendapatan Denda Retribusi – LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
1	Pendapatan Denda Perizinan Tertentu	0,00	59.155.999,14	(59.155.999,14)	(100,00)
Jumlah		0,00	59.155.999,14	(59.155.999,14)	(100,00)

7.5.4.1.1.4.5 Pendapatan Pengembalian

Pendapatan Pengembalian terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 7.5.175 Pendapatan dari Pengembalian – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Gaji / Tunjangan / Pegawai	485.097.821,00	13.508.400,00	471.589.421,00	3.491,08
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	43.218.147,00	23.768.727,00	19.449.420,00	81,83
3	Pendapatan dari Pengembalian Kegiatan/Belanja	0,00	610.119.930,92	(610.119.930,92)	(100,00)
4	Pendapatan dari Pengembalian Hibah	0,00	57.000,00	(57.000,00)	(100,00)
5	Pendapatan dari Pengembalian JKK	429.333.909,56	127.729,00	429.206.180,56	336.028,76
6	Pendapatan dari Pengembalian IWP	0,00	1.152.364,00	(1.152.364,00)	(100,00)
Jumlah		957.649.877,56	648.734.150,92	308.915.726,64	47,62

Tabel 7.5.176 Rincian Perbedaan Pengakuan Akun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	44.123.918.368,55	46.673.165.663,15	(2.549.247.294,60)

Selisih antara Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA Tahun 2021 adalah sebesar (Rp2.549.247.294,60). Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 7.5.177 Selisih Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Penambahan		
1	Penambahan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	699.610,00
2	Penambahan Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	308.090,00
3	Penambahan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	125.460,00
4	Penambahan Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	420.000,00
5	Penambahan Piutang Pendapatan Denda PBB Perkotaan dan Pedesaan	484.742.624,02
6	Penambahan Pendapatan Denda Pajak Hotel	413.597.525,81
7	Penambahan Pendapatan Denda Pajak Restoran	257.845.950,59
8	Penambahan Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD (Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas)	4.809.033,75
9	Penambahan Piutang Puskesmas BLUD Tahun 2021	61.349.430,00
10	Penambahan Piutang JKN di FKTP Tahun 2021	3.605.000,00
11	Penambahan Piutang BLUD RSUD Tahun 2021	502.710.127,00
12	Penambahan Piutang Denda Retribusi IMB Tahun 2020	38.773.485,72
Jumlah		1.768.986.336,89
Pengurangan		
1	Pembayaran piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan (Angsuran RD)	131.188.105,00
2	Pembayaran Piutang Pendapatan Denda PBB Perkotaan dan Pedesaan	885.606.468,00
3	Koreksi Pendapatan Denda Pajak Hotel	1.716.552.474,18
4	Koreksi Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.413.323.803,31
5	Pendapatan Bagi Hasil Dana Bergulir Sayur atas Piutang Tahun Sebelumnya	600.000,00
6	Pendapatan atas Piutang Puskesmas BLUD Tahun 2020	67.922.981,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

7	Pendapatan atas Piutang JKN di FKTP Tahun 2020	5.405.000,00
8	Pendapatan atas Piutang BLUD RSUD Tahun 2020	97.634.800,00
Jumlah		4.318.233.631,49
Total Selisih		(2.549.247.294,60)

7.5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER - LO

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan. Realisasi Pendapatan Transfer yang dicapai pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp833.349.256.759,00 yang terdiri dari:

**Tabel 7.5.178 Pendapatan Transfer – LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO	719.308.629.856,00	722.155.163.785,00	(0,39)
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	44.420.166.000,00	48.435.489.000,00	(8,29)
3	Transfer Antar Daerah – LO	69.620.460.903,00	57.202.425.095,00	21,71
Jumlah		833.349.256.759,00	827.793.077.880,00	0,67

7.5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan untuk periode Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 7.5.179 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil	95.825.732.510,00	0,00	0,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	20.980.151.516,00	(100,00)
3	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	0,00	73.338.382.811,00	(100,00)
4	Dana Alokasi Umum	476.841.183.000,00	486.117.569.000,00	(1,91)
5	Dana Alokasi Khusus	90.479.520.346,00	82.333.109.139,00	9,89
6	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	56.162.194.000,00	59.385.951.319,00	(5,43)
Jumlah		719.308.629.856,00	722.155.163.785,00	(0,39)

7.5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk periode Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 7.5.180 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya- LO
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	%
1	Dana Insentif Daerah	44.420.166.000,00	48.435.489.000,00	(8,29)
2	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
3	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00
4	Dana Desa	0,00	0,00	0,00
Jumlah		44.420.166.000,00	48.435.489.000,00	(8,29)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

7.5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.181 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	%
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor – LO	12.746.141.518,00	10.575.003.934,00	20,53
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	6.184.300.116,00	5.557.616.193,00	11,28
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	39.856.867.424,00	29.864.663.000,00	33,46
4	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan – LO	51.142.415,00	53.863.716,00	(5,05)
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok – LO	10.782.009.430,00	11.151.278.252,00	(3,31)
	Jumlah	69.620.460.903,00	57.202.425.095,00	21,71

**Tabel 7.5.182 Rincian Perbedaan Pengakuan Akun Pendapatan Transfer Antara LRA Dengan LO
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Transfer	833.349.256.759,00	870.158.338.817,00	(36.809.082.058,00)

Selisih pendapatan transfer sebesar (Rp36.809.082.058,00). Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 7.5.183 Selisih Pendapatan Transfer
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Penambahan		
1	Koreksi ekuitas saldo awal pada Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2020	51.237.863,00
2	Penambahan Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 221 Tahun 2022	19.731.542.871,00
	Jumlah	19.782.780.734,00
Pengurangan		
1	Realisasi Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun Anggaran 2019 sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 172 Tahun 2021	14.009.129.771,00
2	Realisasi Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat Tahun 2019 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020	2.396.571.821,00
3	Realisasi Dana Desa yang dhanya di akui pada LRA sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ	40.186.161.200,00
	Jumlah	56.591.862.792,00
	Total Selisih	(36.809.082.058,00)

7.5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp79.150.017.110,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.184 Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah – LO	39.063.385.715,00	69.429.415.687,00	(43,74)
2	Pendapatan Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya - LO	40.086.631.395,00	0,00	0,00
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	500.000.000,00	(100,00)
Jumlah		79.150.017.110,00	69.929.415.687,00	13,19

Pendapatan Lainnya sebesar Rp79.150.017.110,00 terdiri dari Pendapatan Hibah Aset Tetap ke OPD di Kabupaten Bintan sebesar Rp39.063.385.715,00, Pendapatan Dana BOS sebesar Rp29.204.438.000,00 dan Pendapatan dari Pengembalian Hibah sebesar Rp10.882.193.395,00.

Pendapatan Hibah terdiri dari:

7.5.4.13.1 Pendapatan Hibah – LO

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp39.063.385.715,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.185 Pendapatan Hibah – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	34.406.937.223,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LO	62.204.992,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri – LO	4.594.243.500,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Hibah – LO	0,00	539.894.000,00	(100,00)
5	Pendapatan Hibah Pariwisata	0,00	31.339.813.513,00	(100,00)
6	Pendapatan Hibah Dana BOS – LO	0,00	25.259.499.700,00	(100,00)
7	Pendapatan Hibah BA BUN - LO	0,00	12.290.208.474,00	(100,00)
Jumlah		39.063.385.715,00	69.429.415.687,00	(43,74)

Tabel 7.5.186 Pendapatan Hibah – LO Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO				
1	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Sosial	175.000.000,00	0,00	0,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	11.697.652.057,00	0,00	0,00
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	104.775.000,00	0,00	0,00
5	Dinas Perikanan	16.838.554.716,00	0,00	0,00
6	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.590.955.450,00	0,00	0,00
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00
Jumlah A		34.406.937.223,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LO				
1	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
2	Kecamatan Bintan Utara	13.613.644,00	0,00	0,00



3	Kecamatan Bintan Pesisir	880.000,00	0,00	0,00
4	Kecamatan Tambelan	2.178.802,00	0,00	0,00
5	Kecamatan Mantang	880.000,00	0,00	0,00
6	Kecamatan Toapaya	3.854.010,00	0,00	0,00
7	Kecamatan Teluk Sebong	3.016.406,00	0,00	0,00
8	Kecamatan Teluk Bintan	2.807.005,00	0,00	0,00
9	Kecamatan Gunung Kijang	4.691.614,00	0,00	0,00
10	Kecamatan Bintan Timur	24.921.298,00	0,00	0,00
11	Kecamatan Seri Kuala Lobam	5.362.213,00	0,00	0,00
Jumlah B		62.204.992,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri – LO				
1	Dinas Pendidikan	4.594.243.500,00	0,00	0,00
Jumlah C		4.594.243.500,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah – LO				
1	Dinas Sosial	0,00	24.194.000,00	(100,00)
2	Badan Pendapatan Daerah	0,00	515.700.000,00	(100,00)
Jumlah D		0,00	539.894.000,00	(100,00)
Pendapatan Hibah Pariwisata				
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	31.339.813.513,00	(100,00)
Jumlah E		0,00	31.339.813.513,00	(100,00)
Pendapatan Hibah Dana BOS – LO				
1	Dinas Pendidikan	0,00	25.259.499.700,00	(100,00)
Jumlah F		0,00	25.259.499.700,00	(100,00)
Pendapatan Hibah BA BUN - LO				
1	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	12.290.208.474,00	(100,00)
Jumlah G		0,00	12.290.208.474,00	(100,00)
Total (Jumlah a + b + c + d + e + f)		39.063.385.715,00	69.429.415.687,00	(43,74)

7.5.4.1.3.2 Pendapatan Dana Darurat – LO

Pada Tahun 2021 tidak terdapat pendapatan dana darurat pada Pemerintah Kabupaten Bintan.

Tabel 7.5.187 Pendapatan Dana Darurat - LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	%
1	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

7.5.4.1.3.3 Pendapatan Lainnya – LO3

Realisasi Pendapatan Lainnya – LO Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp40.086.631.395,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.188 Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan - LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah Dana BOS – LO	29.204.438.000,00	0,00	0,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Hibah	10.882.193.395,00	0,00	0,00
Jumlah		40.086.631.395,00	0,00	0,00

**Tabel 7.5.189 Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan - LO Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	29.204.438.000,00	0,00	0,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	10.882.193.395,00	0,00	0,00
Jumlah		40.086.631.395,00	0,00	0,00

Tabel 7.5.190 Rincian Perbedaan Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	79.150.017.110,00	40.086.631.395,00	39.063.385.715,00

Selisih lain-lain pendapatan daerah yang sah disebabkan karena pendapatan hibah yang berupa asset tetap sebesar Rp39.063.385.715,00 hanya menambah nilai asset tetap dan pendapatan hibah LO pada tahun 2021.

7.5.4.1.1 PENDAPATAN LUAR BIASA – LO

Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memiliki realisasi Pendapatan Luar Biasa – LO untuk periode Tahun 2021.

7.5.4.2 BEBAN - LO

Beban - LO adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam suatu periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Beban Pemerintah Kabupaten Bintan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.085.648.976.712,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.191 Beban Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	%
1	Beban Operasi	852.533.146.991,57	959.405.730.784,45	(11,14)
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	159.345.959.312,00	142.544.989.492,00	11,79
3	Beban Transfer	68.095.752.066,00	71.943.558.560,00	(5,35)
4	Beban Tak Terduga	5.674.118.343,00	0,00	0,00
Jumlah		1.085.648.976.712,57	1.173.894.278.836,45	(7,52)

7.5.4.2.1 BEBAN OPERASI

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp852.533.146.991,57 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.192 Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	%
1	Beban Pegawai – LO	476.609.153.074,00	572.331.639.534,00	(16,73)
2	Beban Persediaan – LO	87.788.776.317,85	63.416.991.653,99	38,43
3	Beban Jasa – LO	183.530.430.162,12	105.269.802.790,25	74,34
4	Beban Pemeliharaan – LO	19.537.376.812,00	20.295.933.396,00	(3,74)
5	Beban Perjalanan Dinas – LO	24.922.899.828,00	42.099.547.913,00	(40,80)
6	Beban Hibah-LO	48.297.301.381,00	88.125.075.325,00	(45,19)
7	Beban Bantuan Sosial-LO	3.939.600.000,00	56.523.325.108,00	(93,03)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	%
8	Beban Penyisihan Piutang - LO	4.173.489.948,07	7.949.506.515,79	(47,50)
9	Beban Lain-Lain – LO	3.734.119.468,53	3.393.908.548,42	10,02
	Jumlah	852.533.146.991,57	959.405.730.784,45	(11,14)

7.5.4.2.1.1 Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp476.609.153.074,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.193 Beban Pegawai - LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Pegawai	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Beban Gaji Pokok ASN	153.205.347.898,00	152.699.087.251,00	506.260.647,00	0,33
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	14.965.530.419,00	15.011.282.016,00	(45.751.597,00)	(0,30)
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	6.694.122.396,00	7.964.435.950,00	(1.270.313.554,00)	(15,95)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	8.954.135.190,00	8.508.575.000,00	445.560.190,00	5,24
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.094.961.434,00	2.165.200.000,00	(70.238.566,00)	(3,24)
6	Beban Tunjangan Beras ASN	9.573.944.703,00	8.294.335.020,00	1.279.609.683,00	15,43
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	74.473.075,00	72.199.737,00	2.273.338,00	3,15
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	2.266.927,00	2.195.661,00	71.266,00	3,25
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	13.977.782.780,00	13.236.900.400,00	740.882.380,00	5,60
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	314.656.360,00	313.928.647,00	727.713,00	0,23
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	943.969.075,00	941.815.944,00	2.153.131,00	0,23
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	136.438.167.990,00	3.142.304.400,00	133.295.863.590,00	4.241,98
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.100.359.280,00	1.170.090.000,00	(69.730.720,00)	(5,96)
14	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7.043.351.600,00	5.576.169.000,00	1.467.182.600,00	26,31
15	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.900.000.000,00	3.684.000.000,00	216.000.000,00	5,86
16	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	54.018.074.658,00	191.007.431.531,00	(136.989.356.873,00)	(71,72)
17	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.369.171.581,00	0,00	3.369.171.581,00	0,00
18	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	290.572.000,00	0,00	290.572.000,00	0,00
19	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	33.924.882.200,00	0,00	33.924.882.200,00	0,00
20	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	491.071.800,00	207.744.000,00	283.327.800,00	136,38
21	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	523.750.000,00	31.898.708.020,00	(31.374.958.020,00)	(98,36)
22	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.123.667.671,00	0,00	1.123.667.671,00	0,00
23	Beban Honorarium	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00
24	Beban Uang Representasi DPRD	558.180.000,00	0,00	558.180.000,00	0,00
25	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	73.294.200,00	0,00	73.294.200,00	0,00
26	Beban Tunjangan Beras DPRD	83.717.520,00	0,00	83.717.520,00	0,00
27	Beban Uang Paket DPRD	47.796.000,00	0,00	47.796.000,00	0,00
28	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	809.361.000,00	0,00	809.361.000,00	0,00
29	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	71.983.800,00	0,00	71.983.800,00	0,00
30	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	17.706.675,00	17.858.925,00	(152.250,00)	(0,85)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Beban Pegawai	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
31	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.129.000.000,00	3.118.500.000,00	10.500.000,00	0,34
32	Beban Tunjangan Reses DPRD	493.500.000,00	514.500.000,00	(21.000.000,00)	(4,08)
33	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan	526.749,00	0,00	526.749,00	0,00
34	Beban Pembulatan Gaji DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.958.868.416,00	0,00	1.958.868.416,00	0,00
36	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.954.160.000,00	2.587.200.000,00	366.960.000,00	14,18
37	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	0,00	54.600.000,00	0,00
38	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.708.000,00	0,00	6.708.000,00	0,00
39	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	0,00	98.280.000,00	0,00
40	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.807.480,00	0,00	6.807.480,00	0,00
41	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	234.270,00	0,00	234.270,00	0,00
42	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
43	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.469.120,00	0,00	5.469.120,00	0,00
44	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	0,00	112.320,00	0,00
45	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	0,00	336.960,00	0,00
46	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	428.457.859,00	0,00	428.457.859,00	0,00
47	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	57.656.250,00	0,00	57.656.250,00	0,00
48	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	193.200.000,00	189.000.000,00	4.200.000,00	2,22
49	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	450.040.000,00	560.000.000,00	(109.960.000,00)	(19,64)
50	Beban Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Beban Pegawai BLUD	12.048.895.378,00	9.654.150.751,00	2.394.744.627,00	24,81
52	Beban Tunjangan Badan Musyawarah – LO	0,00	16.899.750,00	(16.899.750,00)	(100,00)
53	Beban Tunjangan Badan Anggaran – LO	0,00	16.899.750,00	(16.899.750,00)	(100,00)
54	Beban Uang Paket - LO	0,00	47.628.000,00	(47.628.000,00)	(100,00)
55	Beban Tunjangan Komisi - LO	0,00	32.246.550,00	(32.246.550,00)	(100,00)
56	Beban Tunjangan Badan Kehormatan – LO	0,00	6.120.450,00	(6.120.450,00)	(100,00)
57	Beban Tunjangan Perumahan - LO	0,00	1.469.700.000,00	(1.469.700.000,00)	(100,00)
58	Beban Uang Jasa Pengabdian - LO	0,00	3.255.000,00	(3.255.000,00)	(100,00)
59	Tunjangan Lainnya –Tunjangan Remunerasi	0,00	1.932.269.000,00	(1.932.269.000,00)	(100,00)
60	Beban Uang Lembur Non PNS - LO	0,00	1.260.000,00	(1.260.000,00)	(100,00)
61	Insentif Pemungutan Pajak Hotel – LO	0,00	764.464.893,00	(764.464.893,00)	(100,00)
62	Insentif Pemungutan Pajak Restoran	0,00	529.846.655,00	(529.846.655,00)	(100,00)
63	Insentif Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	85.710.871,00	(85.710.871,00)	(100,00)
64	Insentif Pemungutan Pajak Reklame	0,00	21.412.900,00	(21.412.900,00)	(100,00)
65	Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	645.447.117,00	(645.447.117,00)	(100,00)
66	Insentif Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	647.174.132,00	(647.174.132,00)	(100,00)
67	Insentif Pemungutan Pajak Parkir	0,00	6.971.362,00	(6.971.362,00)	(100,00)
68	Insentif Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	421.882.154,00	(421.882.154,00)	(100,00)
69	Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan	0,00	846.289.169,00	(846.289.169,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Beban Pegawai	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
	Perkotaan				
70	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum	0,00	2.120.000,00	(2.120.000,00)	(100,00)
71	Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)
72	Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	149.989.856,00	(149.989.856,00)	(100,00)
73	Beban Uang Transportasi PNS	0,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(100,00)
74	Beban Uang Transportasi Non PNS	0,00	895.482.100,00	(895.482.100,00)	(100,00)
75	Beban Insentif Jaga Insentif Jaga Medis/Paramedis Non PNS	0,00	279.990.000,00	(279.990.000,00)	(100,00)
76	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	0,00	227.883.100,00	(227.883.100,00)	(100,00)
77	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	0,00	21.100.000,00	(21.100.000,00)	(100,00)
78	Beban Honorarium Peserta Kegiatan (Uang Saku Harian)	0,00	102.300.000,00	(102.300.000,00)	(100,00)
79	Beban Honorarium Tim / Kelompok Kerja - LO	0,00	488.786.098,00	(488.786.098,00)	(100,00)
80	Beban Honorarium Pengawas Lapangan - LO	0,00	30.725.000,00	(30.725.000,00)	(100,00)
81	Beban Honorarium Petugas Lapangan - LO	0,00	385.100.000,00	(385.100.000,00)	(100,00)
82	Beban Honorarium Insentif Petugas - LO	0,00	1.966.349.166,00	(1.966.349.166,00)	(100,00)
83	Beban Honorarium Petugas Lapangan / Upah Pekerja / Buruh	0,00	32.863.011.356,00	(32.863.011.356,00)	(100,00)
84	Beban Honorarium Pegawai Honorarier/tidak tetap - LO	0,00	56.096.592.560,00	(56.096.592.560,00)	(100,00)
85	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS - LO	0,00	1.357.287.900,00	(1.357.287.900,00)	(100,00)
86	Beban Honorarium Peserta Kegiatan (Uang Saku Harian)	0,00	1.408.563.000,00	(1.408.563.000,00)	(100,00)
87	Beban Honorarium Tim / Kelompok Kerja	0,00	2.760.114.672,00	(2.760.114.672,00)	(100,00)
88	Beban Honorarium Insentif Petugas	0,00	3.235.154.720,00	(3.235.154.720,00)	(100,00)
	Jumlah	476.609.153.074,00	572.331.639.534,00	(95.722.486.460,00)	(16,73)

Adapun beban Pegawai berdasarkan OPD Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.5.194 Beban Pegawai - LO Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Pegawai	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	169.450.792.115,00	194.113.796.941,00	(24.663.004.826,00)	(12,71)
2	Dinas Kesehatan	85.065.101.020,00	100.517.964.411,00	(15.452.863.391,00)	(15,37)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.814.069.730,00	8.611.604.748,00	(1.797.535.018,00)	(20,87)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.774.789.982,00	14.795.507.106,00	(11.020.717.124,00)	(74,49)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	14.020.516.855,00	16.833.077.445,00	(2.812.560.590,00)	(16,71)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.991.544.400,00	6.813.571.853,00	(822.027.453,00)	(12,06)
7	Dinas Sosial	3.440.731.046,00	4.129.218.329,00	(688.487.283,00)	(16,67)
8	Dinas Tenaga Kerja	2.607.806.792,00	3.220.418.735,00	(612.611.943,00)	(19,02)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.145.279.951,00	5.070.626.567,00	(925.346.616,00)	(18,25)
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.442.566.610,00	9.679.305.804,00	(1.236.739.194,00)	(12,78)
11	Dinas Lingkungan Hidup	5.219.010.001,00	5.719.896.312,00	(500.886.311,00)	(8,76)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.325.601.562,00	5.069.441.206,00	(743.839.644,00)	(14,67)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.412.735.167,00	3.917.294.283,00	(504.559.116,00)	(12,88)
14	Dinas Perhubungan	5.297.088.408,00	5.770.721.752,00	(473.633.344,00)	(8,21)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Beban Pegawai	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.142.999.866,00	5.712.970.593,00	(569.970.727,00)	(9,98)
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	5.202.459.874,00	5.883.238.712,00	(680.778.838,00)	(11,57)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.681.495.951,00	5.552.751.427,00	(871.255.476,00)	(15,69)
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3.300.773.167,00	3.681.726.193,00	(380.953.026,00)	(10,35)
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.352.361.107,00	5.686.565.021,00	(1.334.203.914,00)	(23,46)
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3.384.916.282,00	3.605.859.236,00	(220.942.954,00)	(6,13)
21	Dinas Perikanan	6.171.861.437,00	6.903.853.601,00	(731.992.164,00)	(10,60)
22	Sekretariat Daerah	18.195.735.434,00	36.775.824.482,00	(18.580.089.048,00)	(50,52)
23	Inspektorat Daerah	6.885.643.110,00	7.936.137.334,00	(1.050.494.224,00)	(13,24)
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.218.138.171,00	6.981.198.548,00	(763.060.377,00)	(10,93)
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	24.128.131.894,00	25.645.436.626,00	(1.517.304.732,00)	(5,92)
26	Badan Pendapatan Daerah	10.236.467.259,00	12.053.948.147,00	(1.817.480.888,00)	(15,08)
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.015.603.015,00	4.349.767.146,00	4.665.835.869,00	107,27
28	Sekretariat DPRD	14.524.570.108,00	14.680.989.122,00	(156.419.014,00)	(1,07)
29	Kecamatan Bintan Utara	4.564.599.845,00	5.636.956.801,00	(1.072.356.956,00)	(19,02)
30	Kecamatan Bintan Pesisir	1.699.727.550,00	2.236.422.642,00	(536.695.092,00)	(24,00)
31	Kecamatan Tambelan	1.917.587.045,00	2.875.210.846,00	(957.623.801,00)	(33,31)
32	Kecamatan Mantang	1.825.759.962,00	2.032.406.626,00	(206.646.664,00)	(10,17)
33	Kecamatan Toapaya	2.577.042.506,00	3.206.260.443,00	(629.217.937,00)	(19,62)
34	Kecamatan Teluk Sebong	3.049.597.708,00	3.535.267.752,00	(485.670.044,00)	(13,74)
35	Kecamatan Teluk Bintan	3.012.251.400,00	3.694.780.133,00	(682.528.733,00)	(18,47)
36	Kecamatan Gunung Kijang	3.110.790.346,00	3.662.018.931,00	(551.228.585,00)	(15,05)
37	Kecamatan Bintan Timur	4.589.725.541,00	7.300.415.814,00	(2.710.690.273,00)	(37,13)
38	Kecamatan Seri Kuala Lobam	3.277.810.815,00	4.248.039.271,00	(970.228.456,00)	(22,84)
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.535.470.042,00	4.191.148.595,00	(655.678.553,00)	(15,64)
	Jumlah	476.609.153.074,00	572.331.639.534,00	(95.722.486.460,00)	(16,73)

Tabel 7.5.195 Rincian Perbedaan Beban Pegawai Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Pegawai	476.609.153.074,00	476.609.153.074,00	0,00

7.5.4.2.1.2 Beban Persediaan - LO

Beban Persediaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp87.794.986.317,85 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.196 Beban Persediaan - LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	BebanPersediaan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.989.765.040,00	4.753.491.437,00	(1.763.726.397,00)	(37,10)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	4.639.845.914,00	1.893.330.578,00	2.746.515.336,00	145,06
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.780.945.950,00	6.746.606.983,00	1.034.338.967,00	15,33
4	Beban Bahan-Bahan Baku	827.957.550,00	373.671.290,00	454.286.260,00	121,57
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	525.811.244,00	552.920.638,00	(27.109.394,00)	(4,90)
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	20.584.500,00	84.229.600,00	(63.645.100,00)	(75,56)
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.142.637.550,00	380.914.900,00	761.722.650,00	199,97
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	29.516.749,78	0,00	29.516.749,78	0,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	9.641.616.615,70	3.674.035.147,00	5.967.581.468,70	162,43



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	BebanPersediaan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	939.779.288,00	0,00	939.779.288,00	0,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	233.157.649,00	349.052.486,00	(115.894.837,00)	(33,20)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	21.905.940,00	22.305.500,00	(399.560,00)	(1,79)
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	49.918.000,00	0,00	49.918.000,00	0,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	72.476.800,00	4.528.000,00	67.948.800,00	1.500,64
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	79.791.200,00	0,00	79.791.200,00	0,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.023.549.151,60	7.597.738.638,00	425.810.513,60	5,60
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	760.324.448,00	0,00	760.324.448,00	0,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.626.040.228,76	0,00	10.626.040.228,76	0,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	315.814.730,00	399.276.545,00	(83.461.815,00)	(20,90)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	320.973.018,21	87.387.690,00	233.585.328,21	267,30
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.800.338.424,50	0,00	1.800.338.424,50	0,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.337.492.991,20	1.636.208.488,00	701.284.503,20	42,86
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	25.216.000,00	0,00	25.216.000,00	0,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	290.258.376,00	88.897.727,00	201.360.649,00	226,51
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	133.925.750,00	267.142.350,00	(133.216.600,00)	(49,87)
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.687.601.430,96	1.109.004.031,87	6.578.597.399,09	593,20
27	Beban Obat-Obatan-Obat	8.257.477.964,20	8.615.921.939,00	(358.443.974,80)	(4,16)
28	Beban Obat-Obatan-Obat-Obat Lainnya	1.206.769.897,00	0,00	1.206.769.897,00	0,00
29	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Beban Natura dan Pakan-Natura	2.405.530.470,00	283.148.500,00	2.122.381.970,00	749,56
32	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	196.739.315,94	0,00	196.739.315,94	0,00
33	Beban Makanan dan Minuman Rapat	4.662.234.205,00	0,00	4.662.234.205,00	0,00
34	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.399.247.909,00	0,00	1.399.247.909,00	0,00
35	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	25.865.000,00	0,00	25.865.000,00	0,00
36	Belanja makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	809.795.680,00	0,00	809.795.680,00	0,00
37	Belanja makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	4.695.000,00	0,00	4.695.000,00	0,00
38	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.014.026.492,00	0,00	5.014.026.492,00	0,00
39	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	120.450.000,00	0,00	120.450.000,00	0,00
40	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	42.790.000,00	0,00	42.790.000,00	0,00
41	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00	0,00
42	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	266.586.100,00	0,00	266.586.100,00	0,00
43	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	402.067.610,00	0,00	402.067.610,00	0,00
44	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	46.887.500,00	0,00	46.887.500,00	0,00
45	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	17.819.406,00	0,00	17.819.406,00	0,00
46	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	8.531.150,00	0,00	8.531.150,00	0,00
47	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	5.899.300,00	0,00	5.899.300,00	0,00
48	Beban Pakaian Adat Daerah	806.252.699,00	0,00	806.252.699,00	0,00
49	Beban Pakaian Batik Tradisional	50.184.200,00	0,00	50.184.200,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Beban Persediaan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
50	Beban Pakaian Olahraga	457.033.071,00	256.837.553,00	200.195.518,00	77,95
51	Beban Pakaian Paskibraka	132.217.000,00	0,00	132.217.000,00	0,00
52	Beban Pakaian Jas/Safari	67.375.000,00	0,00	67.375.000,00	0,00
53	Beban Komponen-Komponen Peralatan	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
54	Beban Komponen-Komponen Lainnya	13.540.000,00	0,00	13.540.000,00	0,00
55	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	277.209,00	0,00	277.209,00	0,00
56	Beban Pipa-Pipa Lainnya	31.109.600,00	0,00	31.109.600,00	0,00
57	Beban Barang Souvenir Kerajinan Tradisional Daerah	0,00	9.900.000,00	(9.900.000,00)	(100,00)
58	Beban Barang Penunjang Perlombaan	0,00	165.507.520,00	(165.507.520,00)	(100,00)
59	Beban Barang Hadiah	0,00	638.850.807,00	(638.850.807,00)	(100,00)
60	Beban Persediaan Pengisian Bahan Pendingin AC	0,00	9.180.000,00	(9.180.000,00)	(100,00)
61	Beban Persediaan Alat Sekolah/Praktek/Percontohan	0,00	294.903.771,00	(294.903.771,00)	(100,00)
62	Beban Persediaan Alat Rumah Tangga / Dapur	0,00	428.420.373,00	(428.420.373,00)	(100,00)
63	Beban Peralatan Perawatan Arsip	0,00	6.689.600,00	(6.689.600,00)	(100,00)
64	Beban Persediaan Makanan Pokok	0,00	1.431.817.814,12	(1.431.817.814,12)	(100,00)
65	Beban Persediaan Bahan Medis (ampul, Masker, dll)	0,00	10.485.381.812,00	(10.485.381.812,00)	(100,00)
66	Beban Persediaan Bahan Baku Bengkel	0,00	12.885.000,00	(12.885.000,00)	(100,00)
67	Beban Persediaan Bahan Baku Industri Rumahan (Home Industry)	0,00	46.804.000,00	(46.804.000,00)	(100,00)
68	Beban Persediaan Seminar Kit	0,00	1.342.002.224,00	(1.342.002.224,00)	(100,00)
69	Beban Persediaan Bahan Baku Pakaian (Kain, Benang, Kancing, dll)	0,00	14.437.500,00	(14.437.500,00)	(100,00)
70	Beban Persediaan bahan baku tanaman hias dan kelengkapannya	0,00	281.383.250,00	(281.383.250,00)	(100,00)
71	Beban Persediaan Bahan Pembelajaran	0,00	1.156.388.397,00	(1.156.388.397,00)	(100,00)
72	Beban Persediaan Bahan/Material Kesehatan	0,00	41.330.290,00	(41.330.290,00)	(100,00)
73	Beban Persediaan Peralatan Kerja	0,00	325.642.410,00	(325.642.410,00)	(100,00)
74	Beban Persediaan Bahan Penunjang Perlombaan	0,00	111.076.900,00	(111.076.900,00)	(100,00)
75	Beban Persediaan Perlengkapan Sekolah	0,00	7.130.691.565,00	(7.130.691.565,00)	(100,00)
76	Beban Persediaan Air Bersih	0,00	25.620.000,00	(25.620.000,00)	(100,00)
77	Beban Persediaan Bahan Kemasan	0,00	29.700.000,00	(29.700.000,00)	(100,00)
78	Beban Persediaan Bahan Tanah Urug	0,00	30.520.800,00	(30.520.800,00)	(100,00)
79	Beban Barang Piala	0,00	221.207.600,00	(221.207.600,00)	(100,00)
Jumlah		87.788.776.317,85	63.416.991.653,99	24.371.784.663,86	38,43

Adapun beban persediaan berdasarkan OPD Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.5.197 Beban Persediaan – LO Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Persediaan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	14.801.362.669,53	18.061.123.044,87	(3.259.760.375,34)	(18,05)
2	Dinas Kesehatan	34.041.884.889,54	14.296.759.019,12	19.745.125.870,42	138,11
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.556.871.492,00	2.325.103.630,00	(768.232.138,00)	(33,04)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.628.738.208,00	2.212.998.700,00	(584.260.492,00)	(26,40)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	443.016.780,00	580.638.000,00	(137.621.220,00)	(23,70)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	579.572.847,00	90.062.810,00	489.510.037,00	543,52
7	Dinas Sosial	1.214.516.634,00	652.637.800,00	561.878.834,00	86,09



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Beban Persediaan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
8	Dinas Tenaga Kerja	309.093.126,00	224.815.350,00	84.277.776,00	37,49
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	516.672.793,00	159.277.960,00	357.394.833,00	224,38
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	421.522.174,00	566.668.536,00	(145.146.362,00)	(25,61)
11	Dinas Lingkungan Hidup	2.908.685.920,00	268.094.500,00	2.640.591.420,00	984,95
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.405.808.475,00	368.635.019,00	1.037.173.456,00	281,36
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	950.464.597,00	207.742.813,00	742.721.784,00	357,52
14	Dinas Perhubungan	784.539.178,00	327.115.751,00	457.423.427,00	139,84
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	554.842.198,00	262.097.800,00	292.744.398,00	111,69
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	625.016.947,00	325.341.250,00	299.675.697,00	92,11
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	313.218.141,00	223.718.210,00	89.499.931,00	40,01
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	924.501.457,00	805.337.770,00	119.163.687,00	14,80
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.010.535.260,00	731.488.313,00	279.046.947,00	38,15
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	255.976.374,00	241.687.365,00	14.289.009,00	5,91
21	Dinas Perikanan	361.228.629,78	237.868.260,00	123.360.369,78	51,86
22	Sekretariat Daerah	6.060.049.742,00	2.526.477.435,00	3.533.572.307,00	139,86
23	Inspektorat Daerah	319.280.595,00	146.207.316,00	173.073.279,00	118,38
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.407.219.138,00	675.900.850,00	1.731.318.288,00	256,15
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.670.058.847,00	11.262.498.743,00	(9.592.439.896,00)	(85,17)
26	Badan Pendapatan Daerah	861.901.327,00	277.410.600,00	584.490.727,00	210,70
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	483.314.135,00	227.757.760,00	255.556.375,00	112,21
28	Sekretariat DPRD	2.630.268.819,00	557.431.927,00	2.072.836.892,00	371,85
29	Kecamatan Bintan Utara	1.295.941.437,00	656.766.101,00	639.175.336,00	97,32
30	Kecamatan Bintan Pesisir	346.053.450,00	227.012.100,00	119.041.350,00	52,44
31	Kecamatan Tambelan	619.108.645,00	306.187.700,00	312.920.945,00	102,20
32	Kecamatan Mantang	437.155.989,00	321.053.650,00	116.102.339,00	36,16
33	Kecamatan Toapaya	824.114.490,00	317.072.365,00	507.042.125,00	159,91
34	Kecamatan Teluk Sebong	374.126.300,00	844.020.450,00	(469.894.150,00)	(55,67)
35	Kecamatan Teluk Bintan	462.872.639,00	390.121.350,00	72.751.289,00	18,65
36	Kecamatan Gunung Kijang	1.189.253.714,00	376.628.380,00	812.625.334,00	215,76
37	Kecamatan Bintan Timur	809.212.491,00	748.358.646,00	60.853.845,00	8,13
38	Kecamatan Seri Kuala Lobam	951.032.115,00	334.498.580,00	616.533.535,00	184,32
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	439.743.655,00	52.375.800,00	387.367.855,00	739,59
	Jumlah	87.788.776.317,85	63.416.991.653,99	24.371.784.663,86	38,43

7.5.4.2.1.3 Beban Jasa - LO

Beban Jasa periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp183.530.430.162,12 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 7.5.198 Beban Jasa - LO Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021

No	Beban Jasa	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.444.284.480,00	0,00	1.444.284.480,00	0,00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.276.164.432,00	0,00	5.276.164.432,00	0,00
3	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	470.388.000,00	0,00	470.388.000,00	0,00
4	Beban Honorarium Rohaniwan	8.305.110.000,00	0,00	8.305.110.000,00	0,00
5	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00
6	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	23.600.000,00	0,00	23.600.000,00	0,00
7	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	733.600.000,00	0,00	733.600.000,00	0,00
8	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	23.433.672.500,00	0,00	23.433.672.500,00	0,00
9	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	19.442.401.057,00	10.840.565.696,00	8.601.835.361,00	79,35
10	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	58.276.000,00	66.202.000,00	(7.926.000,00)	(11,97)
11	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.234.456.900,00	0,00	3.234.456.900,00	0,00
12	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	144.680.000,00	0,00	144.680.000,00	0,00
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	0,00
14	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.800.700.000,00	0,00	1.800.700.000,00	0,00
15	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	457.200.000,00	0,00	457.200.000,00	0,00
16	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	684.750.000,00	0,00	684.750.000,00	0,00
17	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	316.500.000,00	0,00	316.500.000,00	0,00
18	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	330.000.000,00	0,00	330.000.000,00	0,00
19	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	154.865.000,00	50.200.000,00	104.665.000,00	208,50
20	Beban Jasa Tenaga Administrasi	24.307.329.260,00	0,00	24.307.329.260,00	0,00
21	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	342.793.500,00	0,00	342.793.500,00	0,00
22	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	335.600.000,00	0,00	335.600.000,00	0,00
23	Beban Jasa Tenaga Ahli	3.192.644.700,00	4.745.435.505,00	(1.552.790.805,00)	(32,72)
24	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	14.160.691.813,00	1.708.514.330,00	12.452.177.483,00	728,83
25	Beban Jasa Tenaga Keamanan	682.600.000,00	12.900.000,00	669.700.000,00	5.191,47
26	Beban Jasa Tenaga Supir	460.642.584,00	0,00	460.642.584,00	0,00
27	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	95.977.500,00	246.989.800,00	(151.012.300,00)	(61,14)
28	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	30.950.000,00	0,00	30.950.000,00	0,00
29	Beban Jasa Tata Rias	17.347.000,00	0,00	17.347.000,00	0,00
30	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	212.020.000,00	0,00	212.020.000,00	0,00
31	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	273.814.854,00	0,00	273.814.854,00	0,00
32	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	9.815.517,30	44.461.335,95	(34.645.818,65)	(77,92)
33	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	3.864.000,00	0,00	3.864.000,00	0,00
34	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	189.832.500,00	0,00	189.832.500,00	0,00
35	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	181.434.250,00	248.919.000,00	(67.484.750,00)	(27,11)
36	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	17.780.000,00	0,00	17.780.000,00	0,00
37	Beban Jasa Kalibrasi	173.380.244,00	68.054.800,00	105.325.444,00	154,77
38	Beban Jasa Pengolahan Sampah	37.842.400,00	0,00	37.842.400,00	0,00
39	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	722.246.010,00	0,00	722.246.010,00	0,00
40	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.484.647.400,00	5.906.273.194,00	(4.421.625.794,00)	(74,86)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Beban Jasa	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
41	Beban Tagihan Telepon	326.878.346,00	352.143.729,00	(25.265.383,00)	(7,17)
42	Beban Tagihan Air	395.779.700,00	378.055.726,00	17.723.974,00	4,69
43	Beban Tagihan Listrik	13.396.578.128,15	14.543.291.258,00	(1.146.713.129,85)	(7,88)
44	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	550.195.400,00	837.166.000,00	(286.970.600,00)	(34,28)
45	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.929.471.941,00	3.257.127.335,00	672.344.606,00	20,64
46	Beban Paket/Pengiriman	7.667.500,00	7.011.000,00	656.500,00	9,36
47	Belanja Penambahan Daya	14.815.500,00	0,00	14.815.500,00	0,00
48	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	221.174.323,00	0,00	221.174.323,00	0,00
49	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinasi	2.097.600.000,00	0,00	2.097.600.000,00	0,00
50	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	9.160.612.699,00	3.121.550.889,00	6.039.061.810,00	193,46
51	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	596.635.424,00	0,00	596.635.424,00	0,00
52	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.356.189.000,00	0,00	8.356.189.000,00	0,00
53	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.058.982.400,00	0,00	1.058.982.400,00	0,00
54	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.724.116.200,00	2.527.829.058,00	3.196.287.142,00	126,44
55	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.777.223.510,00	1.619.961.245,00	157.262.265,00	9,71
56	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	66.500.000,00	0,00	66.500.000,00	0,00
57	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	664.588.300,00	3.496.317.300,00	(2.831.729.000,00)	(80,99)
58	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	33.105.000,00	0,00	33.105.000,00	0,00
59	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	82.800.000,00	0,00	82.800.000,00	0,00
60	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.858.163.200,00	2.670.884.800,00	(812.721.600,00)	(30,43)
61	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	140.911.600,00	119.975.796,00	20.935.804,00	17,45
62	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	158.372.000,00	128.577.750,00	29.794.250,00	23,17
63	Beban Sewa Mebel	21.366.840,00	0,00	21.366.840,00	0,00
64	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	145.691.500,00	191.061.000,00	(45.369.500,00)	(23,75)
65	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	98.410.000,00	276.558.800,00	(178.148.800,00)	(64,42)
66	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	112.397.200,00	24.750.000,00	87.647.200,00	354,13
67	Beban Sewa Sumber Tenaga	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	0,00
68	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00
69	Beban Sewa Personal Computer	130.000,00	1.500.000,00	(1.370.000,00)	(91,33)
70	Beban Sewa Peralatan Mainframe	69.630.000,00	524.968.939,00	(455.338.939,00)	(86,74)
71	Beban Sewa Peralatan Jaringan	256.740.000,00	21.917.000,00	234.823.000,00	1.071,42
72	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	427.509.166,67	1.336.793.230,30	(909.284.063,63)	(68,02)
73	Beban Sewa Bangunan Gudang	265.250.000,00	93.500.000,00	171.750.000,00	183,69
74	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	370.797.300,00	0,00	370.797.300,00	0,00
75	Beban Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
76	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	179.560.000,00	228.069.200,00	(48.509.200,00)	(21,27)
77	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
78	Beban Sewa Rumah Negara Golongan II	343.000.000,00	409.500.000,00	(66.500.000,00)	(16,24)
79	Beban Sewa Hotel	1.641.125.400,00	2.003.392.999,00	(362.267.599,00)	(18,08)
80	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	46.517.500,00	0,00	46.517.500,00	0,00
81	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Beban Jasa	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
82	Beban Sewa Tanaman	41.525.000,00	0,00	41.525.000,00	0,00
83	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.266.947.800,00	0,00	1.266.947.800,00	0,00
84	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	17.975.000,00	0,00	17.975.000,00	0,00
85	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	74.794.500,00	0,00	74.794.500,00	0,00
86	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	786.731.000,00	0,00	786.731.000,00	0,00
87	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.004.860.450,00	0,00	1.004.860.450,00	0,00
88	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	175.824.000,00	0,00	175.824.000,00	0,00
89	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	593.639.997,00	0,00	593.639.997,00	0,00
90	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.709.047.150,00	0,00	1.709.047.150,00	0,00
91	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	99.621.500,00	0,00	99.621.500,00	0,00
92	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	(34.760.000,00)	0,00	(34.760.000,00)	0,00
93	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	7.581.680,00	0,00	7.581.680,00	0,00
94	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	124.927.000,00	0,00	124.927.000,00	0,00
95	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Keuangan	403.499.300,00	0,00	403.499.300,00	0,00
96	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.052.645.000,00	45.161.000,00	1.007.484.000,00	2.230,87
97	Beban Sosialisasi	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00
98	Beban Bimbingan Teknis	477.990.000,00	857.853.000,00	(379.863.000,00)	(44,28)
99	Beban Diklat Kepemimpinan	22.125.000,00	0,00	22.125.000,00	0,00
100	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	464.816.340,00	0,00	464.816.340,00	0,00
101	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	87.310.000,00	0,00	87.310.000,00	0,00
102	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	3.792.428.500,00	0,00	3.792.428.500,00	0,00
103	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	3.373.959.966,00	66.260.000,00	3.307.699.966,00	4.992,00
104	Beban Cetak	0,00	7.750.750.808,00	(7.750.750.808,00)	(100,00)
105	Beban Penggandaan	0,00	4.202.976.012,00	(4.202.976.012,00)	(100,00)
106	Beban Jasa TV Kabel	0,00	4.040.000,00	(4.040.000,00)	(100,00)
107	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0,00	75.912.500,00	(75.912.500,00)	(100,00)
108	Beban Makanan dan Minuman Rapat	0,00	2.464.400.953,00	(2.464.400.953,00)	(100,00)
109	Beban Makanan dan Minuman Tamu	0,00	1.616.156.260,00	(1.616.156.260,00)	(100,00)
110	Beban makanan dan minuman kegiatan	0,00	11.161.523.320,00	(11.161.523.320,00)	(100,00)
111	Beban makanan dan minuman Harian KDH/WKDH	0,00	906.924.040,00	(906.924.040,00)	(100,00)
112	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	49.808.000,00	(49.808.000,00)	(100,00)
113	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	259.243.600,00	(259.243.600,00)	(100,00)
114	Beban Pakaian Dinas Resmi (PSR)	0,00	35.640.000,00	(35.640.000,00)	(100,00)
115	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	36.792.800,00	(36.792.800,00)	(100,00)
116	Beban Pakaian kerja lapangan	0,00	442.820.733,00	(442.820.733,00)	(100,00)
117	Beban Pakaian Wearpack	0,00	13.612.500,00	(13.612.500,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Beban Jasa	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
118	Beban Pakaian Khusus Laboratorium	0,00	5.940.000,00	(5.940.000,00)	(100,00)
119	Beban Pakaian Jas Hujan/Mantel	0,00	2.344.584,00	(2.344.584,00)	(100,00)
120	Beban Atribut Pakaian Kerja - Masker Khusus Polusi/Polution Mask	0,00	3.223.000,00	(3.223.000,00)	(100,00)
121	Beban Atribut Pakaian Kerja - Safety Gloves	0,00	13.612.500,00	(13.612.500,00)	(100,00)
122	Beban Atribut Pakaian Kerja - Safety shoes	0,00	42.096.000,00	(42.096.000,00)	(100,00)
123	Beban Atribut Pakaian Kerja - Topi kontruksi/Safety Hat/Hard Hat	0,00	35.740.000,00	(35.740.000,00)	(100,00)
124	Beban Atribut Pakaian Kerja - Alat Keamanan (Baton/Pentungan/Borgol/Knuckle/StunGun dll)	0,00	8.333.600,00	(8.333.600,00)	(100,00)
125	Beban Atribut Pakaian Kerja - Alat penerang (Senter, Lampu dll)	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	757.447.900,00	(757.447.900,00)	(100,00)
127	Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	102.927.000,00	(102.927.000,00)	(100,00)
128	Beban Pakaian Olahraga	0,00	985.791.400,00	(985.791.400,00)	(100,00)
129	Beban Pakaian Bercorak Kesenian, Kebudayaan	0,00	77.396.000,00	(77.396.000,00)	(100,00)
130	Beban Pakaian Seragam Paripurna	0,00	43.189.300,00	(43.189.300,00)	(100,00)
131	Beban Pakaian Hitam/Putih	0,00	91.748.800,00	(91.748.800,00)	(100,00)
132	Beban Jasa Sertifikasi	0,00	32.382.760,00	(32.382.760,00)	(100,00)
133	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	322.863.500,00	(322.863.500,00)	(100,00)
134	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	1.390.869.750,00	(1.390.869.750,00)	(100,00)
135	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	471.409.000,00	(471.409.000,00)	(100,00)
136	Beban Jasa Konsultansi Hukum	0,00	120.000.000,00	(120.000.000,00)	(100,00)
137	Beban Jasa Konsultansi Penilaian	0,00	296.389.500,00	(296.389.500,00)	(100,00)
138	Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	0,00	298.005.229,00	(298.005.229,00)	(100,00)
139	Beban Pakaian Khusus Kegiatan	0,00	523.060.420,00	(523.060.420,00)	(100,00)
140	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara	0,00	702.040.656,00	(702.040.656,00)	(100,00)
141	Beban sewa mesin Generator/Genset	0,00	63.830.000,00	(63.830.000,00)	(100,00)
142	Beban Jasa Instalasi Jaringan Telepon/Fax/Internet/PABX	0,00	17.358.000,00	(17.358.000,00)	(100,00)
143	Beban Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan	0,00	4.371.925,00	(4.371.925,00)	(100,00)
144	Beban Jasa Tukang Bangunan	0,00	721.991.700,00	(721.991.700,00)	(100,00)
145	Beban sewa Proyektor/Infocus	0,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)	(100,00)
146	Beban sewa Printer	0,00	2.760.025,00	(2.760.025,00)	(100,00)
147	Beban sewa Meja	0,00	250.000,00	(250.000,00)	(100,00)
148	Beban Sewa Panggung	0,00	2.970.000,00	(2.970.000,00)	(100,00)
149	Beban Uang hadiah perlombaan/turnamen/pertandingan	0,00	193.950.000,00	(193.950.000,00)	(100,00)
150	Beban Uang Pembinaan Prestasi	0,00	430.500.000,00	(430.500.000,00)	(100,00)
151	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator PNS	0,00	1.276.835.000,00	(1.276.835.000,00)	(100,00)
152	Beban Jasa Penghargaan Pengabdian	0,00	129.120.000,00	(129.120.000,00)	(100,00)
153	Beban Jasa BOP PAUD	0,00	72.600.000,00	(72.600.000,00)	(100,00)
154	Belanja Sewa Alat Ukur	0,00	3.923.961.000,00	(3.923.961.000,00)	(100,00)
Jumlah		183.530.430.162,12	105.269.802.790,25	78.260.627.371,87	74,34

Adapun beban jasa berdasarkan OPD Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.5.199 Beban Jasa – LO Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Jasa	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penuruna n (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	30.960.176.683,45	11.825.320.525,95	19.134.856.157,50	161,81
2	Dinas Kesehatan	51.693.512.359,00	25.515.125.499,00	26.178.386.860,00	102,60
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.115.221.568,00	1.299.031.711,00	3.816.189.857,00	293,77



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Beban Jasa	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14.450.869.926,00	1.963.612.885,00	12.487.257.041,00	635,93
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2.134.849.000,00	579.335.100,00	1.555.513.900,00	268,50
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	695.667.024,00	444.829.933,00	250.837.091,00	56,39
7	Dinas Sosial	1.502.651.432,00	1.312.944.357,00	189.707.075,00	14,45
8	Dinas Tenaga Kerja	422.705.270,00	1.073.911.336,00	(651.206.066,00)	(60,64)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.231.965.913,00	530.158.959,00	701.806.954,00	132,38
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.459.118.468,00	239.380.715,00	2.219.737.753,00	927,28
11	Dinas Lingkungan Hidup	11.478.294.557,00	178.780.425,00	11.299.514.132,00	6.320,33
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	833.296.033,67	518.484.982,00	314.811.051,67	60,72
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.313.830.474,00	459.240.300,00	854.590.174,00	186,09
14	Dinas Perhubungan	1.319.907.723,00	305.602.745,00	1.014.304.978,00	331,90
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.195.685.525,00	6.712.824.545,00	(3.517.139.020,00)	(52,39)
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	906.189.957,00	414.473.153,30	491.716.803,70	118,64
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.045.308.775,00	313.764.747,00	731.544.028,00	233,15
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	972.901.825,00	1.938.678.550,00	(965.776.725,00)	(49,82)
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.049.087.085,00	3.485.071.119,00	(1.435.984.034,00)	(41,20)
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	535.777.837,00	292.350.298,00	243.427.539,00	83,27
21	Dinas Perikanan	1.091.134.652,00	662.732.163,00	428.402.489,00	64,64
22	Sekretariat Daerah	22.438.038.441,00	12.187.476.009,00	10.250.562.432,00	84,11
23	Inspektorat Daerah	547.483.873,00	171.853.494,00	375.630.379,00	218,58
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.915.228.505,00	3.971.782.159,00	(1.056.553.654,00)	(26,60)
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.468.282.863,00	15.402.526.627,00	(8.934.243.764,00)	(58,01)
26	Badan Pendapatan Daerah	2.200.213.013,00	1.024.180.159,00	1.176.032.854,00	114,83
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.345.898.180,00	952.921.533,00	392.976.647,00	41,24
28	Sekretariat DPRD	3.193.775.864,00	3.760.680.560,00	(566.904.696,00)	(15,07)
29	Kecamatan Bintan Utara	1.120.213.946,00	831.414.030,00	288.799.916,00	34,74
30	Kecamatan Bintan Pesisir	412.316.097,00	420.183.873,00	(7.867.776,00)	(1,87)
31	Kecamatan Tambelan	591.383.800,00	490.801.050,00	100.582.750,00	20,49
32	Kecamatan Mantang	395.879.888,00	351.614.050,00	44.265.838,00	12,59
33	Kecamatan Toapaya	880.114.594,00	755.056.700,00	125.057.894,00	16,56
34	Kecamatan Teluk Sebung	584.328.111,00	666.515.163,00	(82.187.052,00)	(12,33)
35	Kecamatan Teluk Bintan	604.815.544,00	546.347.552,00	58.467.992,00	10,70
36	Kecamatan Gunung Kijang	1.007.036.238,00	970.318.682,00	36.717.556,00	3,78
37	Kecamatan Bintan Timur	1.796.135.712,00	1.341.767.949,00	454.367.763,00	33,86
38	Kecamatan Seri Kuala Lobam	903.070.692,00	661.811.368,00	241.259.324,00	36,45
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	718.062.714,00	696.897.784,00	21.164.930,00	3,04
	Jumlah	183.530.430.162,12	105.269.802.790,25	78.260.627.371,87	74,34

7.5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan - LO

Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp19.537.376.812,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.200 Beban Pemeliharaan - LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Pemeliharaan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.697.306.000,00	0,00	1.697.306.000,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.653.795.790,00	0,00	1.653.795.790,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Beban Pemeliharaan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	401.222.000,00	0,00	401.222.000,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.059.600,00	0,00	7.059.600,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	116.218.300,00	4.765.156,00	111.453.144,00	2.338,92
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	149.954.640,00	0,00	149.954.640,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	125.500.450,00	0,00	125.500.450,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	38.995.000,00	0,00	38.995.000,00	0,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	21.642.000,00	0,00	21.642.000,00	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	23.907.000,00	0,00	23.907.000,00	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perangkapan Kantor	8.971.000,00	564.747.500,00	(555.776.500,00)	(98,41)
14	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	619.223.100,00	873.996.172,00	(254.773.072,00)	(29,15)
15	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	113.955.500,00	504.000,00	113.451.500,00	22.510,22
16	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	141.273.920,00	0,00	141.273.920,00	0,00
17	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	708.898.740,00	0,00	708.898.740,00	0,00
18	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	260.457.800,00	0,00	260.457.800,00	0,00
19	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Meja Kerja Pejabat	19.937.045,00	0,00	19.937.045,00	0,00
20	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Meja Rapat Pejabat	5.670.000,00	0,00	5.670.000,00	0,00
21	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	17.517.500,00	450.000,00	17.067.500,00	3.792,78
22	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	43.835.000,00	2.970.000,00	40.865.000,00	1.375,93
23	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	31.282.240,00	29.573.500,00	1.708.740,00	5,78
24	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	18.920.000,00	29.920.000,00	(11.000.000,00)	(36,76)
25	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	61.316.550,00	189.979.716,00	(128.663.166,00)	(67,72)
26	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Beban Pemeliharaan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
	Kedokteran Gigi				
27	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00
28	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00	0,00
29	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	58.206.500,00	59.675.000,00	(1.468.500,00)	(2,46)
30	Belanja PemeliharaanAlat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	0,00
31	Belanja PemeliharaanAlat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
32	Belanja PemeliharaanAlat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00
33	Belanja PemeliharaanAlat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	0,00
34	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	15.720.000,00	29.964.000,00	(14.244.000,00)	(47,54)
35	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	610.707.000,00	383.400.550,00	227.306.450,00	59,29
36	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	15.070.000,00	253.701.136,00	(238.631.136,00)	(94,06)
37	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	0,00
38	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	304.023.664,00	11.067.000,00	292.956.664,00	2.647,12
39	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	313.830.900,00	237.148.500,00	76.682.400,00	32,34
40	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	59.533.000,00	363.678.900,00	(304.145.900,00)	(83,63)
41	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
42	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	164.769.000,00	0,00	164.769.000,00	0,00
43	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	51.463.500,00	188.809.500,00	(137.346.000,00)	(72,74)
44	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
45	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.042.408.295,00	5.360.767.606,00	(318.359.311,00)	(5,94)
46	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	402.413.101,00	0,00	402.413.101,00	100,00
47	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	332.962.440,00	0,00	332.962.440,00	0,00
48	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.680.486.191,00	327.637.000,00	1.352.849.191,00	412,91
50	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	29.425.000,00	0,00	29.425.000,00	0,00
51	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	191.668.887,00	752.478.479,00	(560.809.592,00)	(74,53)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Beban Pemeliharaan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
	Fasilitas Umum				
52	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	81.941.951,00	0,00	81.941.951,00	0,00
53	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	17.484.500,00	707.988.260,00	(690.503.760,00)	(97,53)
54	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	136.735.500,00	0,00	136.735.500,00	0,00
55	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	130.930.000,00	0,00	130.930.000,00	0,00
56	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	69.767.500,00	74.580.000,00	(4.812.500,00)	(6,45)
57	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.846.123.177,00	84.925.000,00	1.761.198.177,00	2.073,83
58	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	570.572.288,00	0,00	570.572.288,00	0,00
59	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	992.197.243,00	378.761.216,00	613.436.027,00	161,96
60	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	21.935.100,00	14.947.075,00	6.988.025,00	46,75
61	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	19.970.500,00	4.100.000,00	15.870.500,00	387,09
62	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	34.479.500,00	281.559.910,00	(247.080.410,00)	(87,75)
63	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	9.887.900,00	0,00	9.887.900,00	0,00
64	Beban Jasa Service	0,00	1.498.855.255,00	(1.498.855.255,00)	(100,00)
65	Belanja jasa Service/Docking	0,00	84.213.800,00	(84.213.800,00)	(100,00)
66	Beban Penggantian Suku Cadang	0,00	3.286.679.950,00	(3.286.679.950,00)	(100,00)
67	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	2.214.998.675,00	(2.214.998.675,00)	(100,00)
68	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	256.371.000,00	(256.371.000,00)	(100,00)
69	Belanja Pengecatan Kendaraan	0,00	162.838.000,00	(162.838.000,00)	(100,00)
70	Beban Pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	0,00	99.000.000,00	(99.000.000,00)	(100,00)
71	Beban Pemeliharaan Website	0,00	369.987.200,00	(369.987.200,00)	(100,00)
72	Beban Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan	0,00	23.540.000,00	(23.540.000,00)	(100,00)
73	Beban perawatan Billboard	0,00	82.496.700,00	(82.496.700,00)	(100,00)
74	Beban Perawatan lampu hias jalan	0,00	169.772.000,00	(169.772.000,00)	(100,00)
75	Beban Perawatan lampu hias taman	0,00	49.889.000,00	(49.889.000,00)	(100,00)
76	Beban Perawatan Buku	0,00	12.824.900,00	(12.824.900,00)	(100,00)
77	Beban Perawatan Maket/Miniat/Diorama	0,00	31.560.100,00	(31.560.100,00)	(100,00)
78	Beban Perawatan CPU	0,00	13.707.600,00	(13.707.600,00)	(100,00)
79	Beban Perawatan UPS/Stabilizer	0,00	2.497.000,00	(2.497.000,00)	(100,00)
80	Beban Perawatan Hard Drive/Ekternal Harddisk	0,00	1.450.000,00	(1.450.000,00)	(100,00)
81	Beban Perawatan Perlengkapan Gedung Kantor	0,00	422.846.340,00	(422.846.340,00)	(100,00)
82	Beban Perawatan Proyektor	0,00	7.770.000,00	(7.770.000,00)	(100,00)
83	Beban Perawatan Sound System	0,00	44.805.100,00	(44.805.100,00)	(100,00)
84	Beban Perawatan Wireless/Wired Microphone	0,00	6.384.000,00	(6.384.000,00)	(100,00)
85	Beban Perawatan Amplifiers/Mixer	0,00	10.995.000,00	(10.995.000,00)	(100,00)
86	Beban Perawatan Speaker	0,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(100,00)
87	Beban Perawatan CCTV	0,00	29.496.500,00	(29.496.500,00)	(100,00)
88	Beban Perawatan Drone	0,00	6.303.000,00	(6.303.000,00)	(100,00)
89	Beban Perawatan Mesin Generator/Genset	0,00	158.115.100,00	(158.115.100,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Beban Pemeliharaan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
90	Beban Perawatan Mesin Listrik Tenaga Surya/Solar Cell	0,00	28.552.000,00	(28.552.000,00)	(100,00)
91	Beban Perawatan Network Audio	0,00	4.290.000,00	(4.290.000,00)	(100,00)
Jumlah		19.537.376.812,00	20.295.933.396,00	(758.556.584,00)	(3,74)

Adapun beban pemeliharaan berdasarkan OPD Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.5.201 Beban Pemeliharaan – LO Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Pemeliharaan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	2.545.819.151,00	838.783.318,00	1.707.035.833,00	203,51
2	Dinas Kesehatan	1.426.599.757,00	1.970.223.055,00	(543.623.298,00)	(27,59)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.115.200.690,00	930.521.928,00	2.184.678.762,00	234,78
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.104.735.435,00	3.477.490.635,00	(2.372.755.200,00)	(68,23)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	57.868.400,00	117.213.700,00	(59.345.300,00)	(50,63)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150.036.150,00	244.238.126,00	(94.201.976,00)	(38,57)
7	Dinas Sosial	63.959.900,00	267.120.750,00	(203.160.850,00)	(76,06)
8	Dinas Tenaga Kerja	234.859.327,00	77.318.900,00	157.540.427,00	203,75
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50.948.200,00	49.750.700,00	1.197.500,00	2,41
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	22.199.000,00	106.981.151,00	(84.782.151,00)	(79,25)
11	Dinas Lingkungan Hidup	796.546.965,00	98.545.500,00	698.001.465,00	708,30
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	251.244.825,00	57.848.100,00	193.396.725,00	334,32
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	87.149.000,00	411.311.700,00	(324.162.700,00)	(78,81)
14	Dinas Perhubungan	543.530.595,00	79.030.000,00	464.500.595,00	587,75
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	147.206.400,00	691.593.615,00	(544.387.215,00)	(78,71)
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	9.316.000,00	223.680.300,00	(214.364.300,00)	(95,84)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	203.939.150,00	30.151.600,00	173.787.550,00	576,38
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	124.103.550,00	101.266.400,00	22.837.150,00	22,55
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	215.316.188,00	145.755.480,00	69.560.708,00	47,72
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	125.539.600,00	262.096.700,00	(136.557.100,00)	(52,10)
21	Dinas Perikanan	96.342.900,00	195.910.500,00	(99.567.600,00)	(50,82)
22	Sekretariat Daerah	2.798.069.874,00	552.668.960,00	2.245.400.914,00	406,28
23	Inspektorat Daerah	59.706.000,00	1.348.189.028,00	(1.288.483.028,00)	(95,57)
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	192.946.600,00	3.763.658.067,00	(3.570.711.467,00)	(94,87)
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	765.429.500,00	385.408.900,00	380.020.600,00	98,60
26	Badan Pendapatan Daerah	130.295.000,00	289.285.100,00	(158.990.100,00)	(54,96)
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	31.123.000,00	177.418.800,00	(146.295.800,00)	(82,46)
28	Sekretariat DPRD	2.261.960.041,00	403.362.294,00	1.858.597.747,00	460,78
29	Kecamatan Bintan Utara	18.233.000,00	154.468.500,00	(136.235.500,00)	(88,20)
30	Kecamatan Bintan Pesisir	72.764.000,00	351.015.259,00	(278.251.259,00)	(79,27)



No	Beban Pemeliharaan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
31	Kecamatan Tambelan	568.401.985,00	130.900.300,00	437.501.685,00	334,23
32	Kecamatan Mantang	9.350.000,00	103.654.400,00	(94.304.400,00)	(90,98)
33	Kecamatan Toapaya	186.012.624,00	51.981.400,00	134.031.224,00	257,84
34	Kecamatan Teluk Sebong	9.191.280,00	119.318.100,00	(110.126.820,00)	(92,30)
35	Kecamatan Teluk Bintan	200.309.186,00	78.477.900,00	121.831.286,00	155,24
36	Kecamatan Gunung Kijang	63.318.900,00	718.234.127,00	(654.915.227,00)	(91,18)
37	Kecamatan Bintan Timur	541.749.789,00	980.227.203,00	(438.477.414,00)	(44,73)
38	Kecamatan Seri Kuala Lobam	33.160.750,00	217.116.500,00	(183.955.750,00)	(84,73)
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	222.894.100,00	93.716.400,00	129.177.700,00	137,84
	Jumlah	19.537.376.812,00	20.295.933.396,00	(758.556.584,00)	(3,74)

7.5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas - LO

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp24.922.899.828,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.202 Beban Perjalanan Dinas - LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	13.121.728.713,00	0,00	13.121.728.713,00	0,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.801.171.115,00	0,00	11.801.171.115,00	0,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	22.439.617.212,00	(22.439.617.212,00)	(100,00)
4	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	19.659.930.701,00	(19.659.930.701,00)	(100,00)
	Jumlah	24.922.899.828,00	42.099.547.913,00	(17.176.648.085,00)	(40,80)

Adapun beban perjalanan dinas berdasarkan OPD Per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.5.203 Beban Perjalanan Dinas Per OPD – LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	882.310.120,00	1.776.799.743,00	(894.489.623,00)	(50,34)
2	Dinas Kesehatan	5.788.292.499,00	4.566.638.417,00	1.221.654.082,00	26,75
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.576.381.650,00	1.951.561.706,00	(375.180.056,00)	(19,22)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	418.489.624,00	1.268.669.425,00	(850.179.801,00)	(67,01)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	57.672.706,00	360.680.269,00	(303.007.563,00)	(84,01)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	121.394.893,00	349.643.695,00	(228.248.802,00)	(65,28)
7	Dinas Sosial	357.204.748,00	682.471.783,00	(325.267.035,00)	(47,66)
8	Dinas Tenaga Kerja	171.508.495,00	447.214.264,00	(275.705.769,00)	(61,65)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	568.510.311,00	510.533.597,00	57.976.714,00	11,36
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	259.063.243,00	477.315.811,00	(218.252.568,00)	(45,72)
11	Dinas Lingkungan Hidup	247.017.067,00	232.387.611,00	14.629.456,00	6,30



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	189.595.818,00	515.433.331,00	(325.837.513,00)	(63,22)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	326.150.166,00	629.546.572,00	(303.396.406,00)	(48,19)
14	Dinas Perhubungan	563.238.814,00	744.459.059,00	(181.220.245,00)	(24,34)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	276.676.566,00	671.765.395,00	(395.088.829,00)	(58,81)
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	555.154.305,00	309.962.365,00	245.191.940,00	79,10
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	293.470.023,00	795.202.178,00	(501.732.155,00)	(63,09)
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	121.044.981,00	470.367.138,00	(349.322.157,00)	(74,27)
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	136.649.300,00	652.927.611,00	(516.278.311,00)	(79,07)
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	155.454.465,00	376.192.954,00	(220.738.489,00)	(58,68)
21	Dinas Perikanan	533.349.920,00	974.799.039,00	(441.449.119,00)	(45,29)
22	Sekretariat Daerah	1.943.934.639,00	3.599.867.225,00	(1.655.932.586,00)	(46,00)
23	Inspektorat Daerah	1.143.612.019,00	1.529.391.708,00	(385.779.689,00)	(25,22)
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.049.714.881,00	2.417.977.834,00	(1.368.262.953,00)	(56,59)
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	643.706.753,00	1.248.686.584,00	(604.979.831,00)	(48,45)
26	Badan Pendapatan Daerah	405.815.826,00	697.649.745,00	(291.833.919,00)	(41,83)
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	321.143.984,00	1.340.582.829,00	(1.019.438.845,00)	(76,04)
28	Sekretariat DPRD	5.247.506.551,00	10.740.881.687,00	(5.493.375.136,00)	(51,14)
29	Kecamatan Bintan Utara	68.400.000,00	125.317.200,00	(56.917.200,00)	(45,42)
30	Kecamatan Bintan Pesisir	60.400.000,00	178.948.000,00	(118.548.000,00)	(66,25)
31	Kecamatan Tambelan	80.348.000,00	188.629.600,00	(108.281.600,00)	(57,40)
32	Kecamatan Mantang	22.050.000,00	94.107.195,00	(72.057.195,00)	(76,57)
33	Kecamatan Toapaya	29.225.000,00	134.870.400,00	(105.645.400,00)	(78,33)
34	Kecamatan Teluk Sebong	32.325.000,00	125.750.000,00	(93.425.000,00)	(74,29)
35	Kecamatan Teluk Bintan	35.400.000,00	153.336.700,00	(117.936.700,00)	(76,91)
36	Kecamatan Gunung Kijang	153.125.195,00	198.716.638,00	(45.591.443,00)	(22,94)
37	Kecamatan Bintan Timur	22.200.000,00	132.691.498,00	(110.491.498,00)	(83,27)
38	Kecamatan Seri Kuala Lobam	2.250.000,00	90.450.000,00	(88.200.000,00)	(97,51)
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	63.112.266,00	337.121.107,00	(274.008.841,00)	(81,28)
	Jumlah	24.922.899.828,00	42.099.547.913,00	(17.176.648.085,00)	(40,80)

**Tabel 7.5.204 Rincian Perbedaan Beban Barang Antara LRA Dengan LO
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Keterangan	LO (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa - LRA	327.840.463.570,98
2	Jumlah	327.840.463.570,98
3	Beban Persediaan – LO	87.788.776.317,85
4	Beban Jasa – LO	183.530.430.162,12
5	Beban Pemeliharaan – LO	19.537.376.812,00
6	Beban Perjalanan Dinas – LO	24.922.899.828,00



7	Jumlah (3+4+5+6)	315.779.483.119,97
8	Selisih (7-2)	(12.060.980.451,01)

Tabel 7.5.205 Selisih Belanja Barang LRA dan Beban Barang dan Jasa LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)
Penambahan		
1	Mutasi Tambah Utang Beban	639.867.363,43
2	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Persediaan	180.345.690,00
3	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Jasa	129.587.700,00
4	Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan	526.132.529,00
Jumlah		1.475.933.282,43
Pengurangan		
1	Mutasi Tambah Beban Dibayar Dimuka	14.395.833,33
2	Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa - Beban Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (LO) ke Beban Hibah	2.846.294.410,00
3	Mutasi Tambah Persediaan	5.012.211.121,11
4	Kapitalisasi Beban Persediaan ke Aset Tetap	1.780.437.390,00
5	Kapitalisasi Beban Jasa ke Aset Tetap	1.705.312.519,00
6	Kapitalisasi Beban Pemeliharaan ke Aset Tetap	2.178.262.460,00
Jumlah		13.536.913.733,44
Selisih		(12.060.980.451,01)

7.5.4.2.1.6 Beban Hibah - LO

Beban Hibah adalah Beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp48.297.301.381,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.206 Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Hibah	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	7.879.120.255,00	2.412.063.881,00	5.467.056.374,00	226,65
2	Dinas Kesehatan	190.017.743,00	6.803.019.922,00	(6.613.002.179,00)	(97,21)
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.119.943.490,00	0,00	3.119.943.490,00	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	4.876.962.871,00	4.884.810.853,00	(7.847.982,00)	(0,16)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00
6	Dinas Sosial	145.213.400,00	1.010.383.405,00	(865.170.005,00)	(85,63)
7	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	2.832.510.123,00	679.651.535,00	2.152.858.588,00	316,76
	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	361.432.500,00	(361.432.500,00)	(100,00)
8	Dinas Perhubungan	64.680.000,00	0,00	64.680.000,00	0,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan	5.177.988.730,00	114.956.600,00	5.063.032.130,00	4.404,30
10	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	1.378.233.000,00	0,00	1.378.233.000,00	0,00
11	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	99.341.000,00	33.212.300,00	66.128.700,00	199,11
12	Dinas Perikanan	13.752.373.446,00	11.432.038.978,00	2.320.334.468,00	20,30
13	Sekretariat Daerah	2.739.832.150,00	7.425.000,00	2.732.407.150,00	36.800,10
14	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Beban Hibah	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
15	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.010.420.000,00	58.118.591.880,00	(57.108.171.880,00)	(98,26)
16	Kecamatan Bintan Utara	629.563.000,00	211.959.000,00	417.604.000,00	197,02
17	Kecamatan Bintan Pesisir	0,00	199.972.000,00	(199.972.000,00)	(100,00)
18	Kecamatan Tambelan	18.865.000,00	0,00	18.865.000,00	0,00
19	Kecamatan Mantang	50.270.000,00	0,00	50.270.000,00	0,00
21	Kecamatan Toapaya	0,00	288.738.694,00	(288.738.694,00)	(100,00)
22	Kecamatan Teluk Sebung	69.355.000,00	14.960.000,00	54.395.000,00	363,60
23	Kecamatan Teluk Bintan	396.008.500,00	91.850.000,00	304.158.500,00	331,15
24	Kecamatan Gunung Kijang	604.517.760,00	443.731.200,00	160.786.560,00	36,24
25	Kecamatan Bintan Timur	461.598.500,00	888.677.577,00	(427.079.077,00)	(48,06)
26	Kecamatan Seri Kuala Lobam	53.105.800,00	127.600.000,00	(74.494.200,00)	(58,38)
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	747.381.613,00	0,00	747.381.613,00	0,00
	Jumlah	48.297.301.381,00	88.125.075.325,00	(39.827.773.944,00)	(45,19)

Adapun beban hibah berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.207 Beban Hibah Per Jenis Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Hibah	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3.500.000.000,00	27.130.451.454,00	(23.630.451.454,00)	(87,10)
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.582.843.490,00	0,00	1.582.843.490,00	0,00
3	Beban Hibah Uang kepada BUMD	0,00	18.719.590.813,00	(18.719.590.813,00)	(100,00)
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.692.716.400,00	4.200.200.000,00	(2.507.483.600,00)	(59,70)
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.226.658.795,00	0,00	5.226.658.795,00	0,00
6	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	35.436.483.340,00	33.897.151.445,00	1.539.331.895,00	4,54
7	Beban Hibah kepada Koperasi	221.200.000,00	0,00	221.200.000,00	0,00
8	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	3.430.300.000,00	(3.430.300.000,00)	(100,00)
9	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	747.381.613,00	747.381.613,00	0,00	0,00
10	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	(109.982.257,00)	0,00	(109.982.257,00)	0,00
	Jumlah	48.297.301.381,00	88.125.075.325,00	(39.827.773.944,00)	(45,19)

Adapun beban hibah berdasarkan jenisnya untuk masing-masing OPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.208 Beban Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Hibah	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Beban Hibah	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
2	Satuan Polisi Pamong Praja	2.000.000.000,0	0,00	2.000.000.000,0	0,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	27.130.451.454,00	(27.130.451.454,00)	(100,00)
	Jumlah	3.500.000.000,00	27.130.451.454,00	(23.630.451.454,00)	(87,10)

**Tabel 7.5.209 Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Beban Hibah	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.169.943.490,00	0,00	1.169.943.490,00	0,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	412.900.000,00	0,00	412.900.000,00	0,00
	Jumlah	1.582.843.490,00	0,00	1.582.843.490,00	0,00

**Tabel 7.5.210 Beban Hibah Uang Kepada Perusahaan Daerah / BUMD
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Beban Hibah	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	18.719.590.813,00	(18.719.590.813,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	18.719.590.813,00	(18.719.590.813,00)	(100,00)

**Tabel 7.5.211 Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Beban Hibah	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.200.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00
2	Kecamatan Gunung Kijang	492.716.400,00	0,00	48.985.200,00	0,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	4.200.200.000,00	(4.200.200.000,00)	(100,00)
	Jumlah	1.692.716.400,00	4.200.200.000,00	(2.507.483.600,00)	(59,70)

Tabel 7.5.212 Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021

No	Beban Hibah	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	2.043.556.645,00	0,00	2.043.556.645,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	68.470.000,00	0,00	68.470.000,00	0,00
4	Sekretariat Daerah	2.739.832.150,00	0,00	2.739.832.150,00	0,00
5	Kecamatan Bintang Timur	74.800.000,00	0,00	74.800.000,00	0,00
	Jumlah	5.226.658.795,00	0,00	5.226.658.795,00	0,00

Tabel 7.5.213 Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021

No	Beban Hibah	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	5.835.563.610,00	2.412.063.881,00	3.423.499.729,00	141,93
	Dinas Kesehatan	0,00	6.803.019.922,00	(6.803.019.922,00)	(100,00)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.808.492.871,00	4.884.810.853,00	(76.317.982,00)	(1,56)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Beban Hibah	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
4	Dinas Sosial	145.213.400,00	1.010.383.405,00	(865.170.005,00)	(85,63)
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.832.510.123,00	679.651.535,00	2.152.858.588,00	316,76
	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	361.432.500,00	(361.432.500,00)	(100,00)
6	Dinas Perhubungan	64.680.000,00	0,00	64.680.000,00	0,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	4.956.788.730,00	114.956.600,00	4.841.832.130,00	4.211,88
8	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	178.233.000,00	0,00	178.233.000,00	0,00
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	99.341.000,00	33.212.300,00	66.128.700,00	199,11
10	Dinas Perikanan	13.752.373.446,00	11.432.038.978,00	2.320.334.468,00	20,30
	Sekretariat Daerah	0,00	7.425.000,00	(7.425.000,00)	(100,00)
11	Badan Keuangan dan Aset Daerah	597.520.000,00	3.890.668.000,00	(3.293.148.000,00)	(84,64)
12	Kecamatan Bintan Utara	629.563.000,00	211.959.000,00	417.604.000,00	197,02
13	Kecamatan Tambelan	18.865.000,00	0,00	18.865.000,00	0,00
14	Kecamatan Mantang	50.270.000,00	0,00	50.270.000,00	0,00
15	Kecamatan Teluk Sebong	69.355.000,00	14.960.000,00	54.395.000,00	363,60
16	Kecamatan Teluk Bintan	396.008.500,00	91.850.000,00	304.158.500,00	331,15
17	Kecamatan Gunung Kijang	111.801.360,00	443.731.200,00	(331.929.840,00)	(74,80)
18	Kecamatan Bintan Timur	386.798.500,00	888.677.577,00	(501.879.077,00)	(56,47)
	Kecamatan Toapaya	0,00	288.738.694,00	(288.738.694,00)	(100,00)
	Kecamatan Bintan Pesisir	0,00	199.972.000,00	(199.972.000,00)	(100,00)
19	Kecamatan Seri Kuala Lobam	53.105.800,00	127.600.000,00	(74.494.200,00)	(58,38)
	Jumlah	35.436.483.340,00	33.897.151.445,00	1.539.331.895,00	4,54

Tabel 7.5.214 Beban Hibah Kepada Koperasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Hibah	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan perdagangan	221.200.000,00	0,0	221.200.000,00	0,00
	Jumlah	221.200.000,00	0,00	221.200.000,00	0,00

Tabel 7.5.215 Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Hibah	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	3.430.300.000,00	(3.430.300.000,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	3.430.300.000,00	(3.430.300.000,00)	(100,00)

Tabel 7.5.216 Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Hibah	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	747.381.613,00	747.381.613,00	0,00	0,00
	Jumlah	747.381.613,00	747.381.613,00	0,00	0,00

**Tabel 7.5.217 Rincian Perbedaan Beban Hibah Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Hibah	48.297.301.381,00	45.560.989.228,00	2.736.312.153,00

Selisih beban hibah LO dan belanja hibah LRA disebabkan karena adanya reklasifikasi beban persediaan yang diserahkan ke masyarakat ke beban hibah sebesar Rp2.846.294.410,00 dan beban hibah dari Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi persediaan sebesar Rp109.982.257,00.

7.5.4.2.1.7 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.939.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.218 Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Bantuan Sosial	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Sosial	3.939.600.000,00	0,00	3.939.600.000,00	0,00
2	Badan keuangan dan Aset Daerah	0,00	56.523.325.108,00	(56.523.325.108,00)	(100,00)
	Jumlah	3.939.600.000,00	56.523.325.108,00	(52.583.725.108,00)	(93,03)

Adapun beban bantuan sosial berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.219 Beban Bantuan Sosial Berdasarkan Jenisnya Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Bantuan Sosial	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	3.939.600.000,00	56.244.445.108,00	(52.304.845.108,00)	(93,00)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan	0,00	278.800.000,00	(278.800.000,00)	(100,00)
	Jumlah	3.939.600.000,00	56.523.245.108,00	(52.583.645.108,00)	(93,03)

Tabel 7.5.220 Rincian Perbedaan Beban Bantuan Sosial Antara LRA Dengan LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Keterangan	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial	3.939.600.000,00	3.939.600.000,00	0,00

7.5.4.2.1.8 Beban Penyisihan Piutang

Beban tersebut adalah Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.173.489.948,07 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.221 Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(134.626.341,13)	579.753.760,45	(714.380.101,58)	(123,22)
2	Beban Penyisihan Pajak Restoran	(10.300.560,19)	563.829.995,44	(574.130.555,63)	(101,83)
3	Beban Penyisihan Pajak Hiburan	491.433.833,34	(172.085.073,47)	663.518.906,81	(385,58)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
4	Beban Penyisihan Pajak Reklame	73.406.414,88	(294.939.809,80)	368.346.224,68	(124,89)
5	Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	181.147,62	2.210.631.803,93	(2.210.450.656,31)	(99,99)
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(2.900,00)	2.900,00	(5.800,00)	(200,00)
7	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	9.225,00	0,00	9.225,00	0,00
8	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(614.372.068,53)	(273.468.311,75)	(340.903.756,78)	124,66
9	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.151.633.078,08	5.268.596.155,75	(2.116.963.077,67)	(40,18)
10	Beban Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	778.682,00	75.678,00	703.004,00	928,94
11	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	(7.050.000,00)	0,00	(7.050.000,00)	0,00
12	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	8.432.385,00	0,00	8.432.385,00	0,00
13	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	20.768.818,62	82.945.292,18	(62.176.473,56)	(74,96)
14	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	(5.600.000,00)	(2.520.000,00)	(3.080.000,00)	122,22
15	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.163.380.036,03	0,00	1.163.380.036,03	0,00
16	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	5.185.399,87	0,00	5.185.399,87	0,00
17	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	1.992.508,88	(13.382.394,74)	15.374.903,62	(114,89)
18	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.103.516,29	8.474.177,70	(2.370.661,41)	(27,98)
19	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	(9.000,00)	(23.975,00)	14.975,00	(62,46)
20	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	22.145.772,31	(8.383.682,90)	30.529.455,21	(364,15)
Jumlah		4.173.491.969,07	7.949.506.515,79	(3.776.016.567,72)	(47,50)

7.5.4.2.1.9 Beban lain-lain

Beban tersebut adalah Beban lain-lain periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.734.119.468,53 adalah beban lain-lain atas *ekstrakomptabel* dari belanja modal aset tetap karena tidak memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap, pembulatan nilai belanja modal/aset tetap dan pembulatan kelebihan setor utang PFK.

Tabel 7.5.222 Beban Lain-Lain Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Lain-Lain	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	1.749.072.013,00	2.108.242.950,00	(359.170.937,00)	(17,04)
2	Dinas Kesehatan	660.431.637,00	617.005.743,00	43.425.894,00	7,04
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.403.800,00	0,00	32.403.800,00	0,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	11.108.300,00	17.358.000,00	(6.249.700,00)	(36,00)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	17.820.000,00	(17.820.000,00)	(100,00)
6	Dinas Sosial	3.647.600,00	0,00	3.647.600,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Beban Lain-Lain	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
7	Dinas Tenaga Kerja	0,00	8.580.000,00	(8.580.000,00)	(100,00)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.164.030,00	935.000,00	8.229.030,00	880,11
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	0,33	0,00	0,33	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.307.500,00	24.633.180,00	(19.325.680,00)	(78,45)
12	Dinas Perhubungan	26.214.650,00	0,00	26.214.650,00	0,00
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	3.705.350,00	(3.705.350,00)	(100,00)
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	15.603.500,00	(15.603.500,00)	(100,00)
15	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	110.385.000,00	0,00	110.385.000,00	0,00
16	Dinas Perikanan	685.285.700,00	0,00	685.285.700,00	0,00
17	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	0,00	20.793.000,00	(20.793.000,00)	(100,00)
18	Sekretariat Daerah	2.810.500,00	224.513.025,00	(221.702.525,00)	(98,75)
19	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.881.000,20	0,00	1.881.000,20	0,00
20	Badan Pendapatan Daerah	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
21	Sekretariat DPRD	6.160.000,00	21.450.000,00	(15.290.000,00)	(71,28)
22	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	0,00	20.955.000,00	(20.955.000,00)	(100,00)
23	Kecamatan Bintan Utara	26.035.644,00	0,00	26.035.644,00	0,00
24	Kecamatan Bintan Pesisir	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	0,00
25	Kecamatan Tambelan	26.356.802,00	36.300.000,00	(9.943.198,00)	(27,39)
26	Kecamatan Mantang	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00
27	Kecamatan Toapaya	76.164.010,00	0,00	76.164.010,00	0,00
28	Kecamatan Teluk Sebong	5.704.406,00	1.320.000,00	4.384.406,00	332,15
29	Kecamatan Teluk Bintan	3.667.461,00	9.999.000,00	(6.331.539,00)	(63,32)
30	Kecamatan Gunung Kijang	18.407.614,00	48.738.800,00	(30.331.186,00)	(62,23)
31	Kecamatan Bintan Timur	225.063.388,00	167.279.000,42	57.784.387,58	34,54
32	Kecamatan Seri Kuala Lobam	42.078.413,00	8.734.000,00	33.344.413,00	381,78
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	19.943.000,00	(19.943.000,00)	(100,00)
	Jumlah	3.734.119.468,53	3.393.908.548,42	340.210.920,11	10,02

Adapun beban lain-lain berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.223 Beban Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Lain-Lain	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Beban Ekstrakomptabel	3.734.119.468,00	3.252.862.691,00	481.256.777,00	14,79
2	Pembulatan Nilai Belanja Modal/Aset Tetap	0,33	0,42	(0,09)	(21,43)
3	Pembulatan Kelebihan Setor Utang PFK	0,20	0,00	0,20	0,00
4	Beban Pembayaran Pajak atas Pengembalian Belanja Modal Netto	0,00	10.758.382,00	(10.758.382,00)	(100,00)
5	Beban Pengembalian Belanja RSUD BLUD	0,00	130.287.475,00	(130.287.475,00)	(100,00)
	Jumlah	3.734.119.468,53	3.393.908.548,42	340.210.920,11	10,02

7.5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp159.345.959.312,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 7.5.224 Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	50.123.805.027,00	42.675.464.014,00	7.448.341.013	17,45
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	32.454.466.514,00	24.386.845.473,00	8.067.621.041	33,08
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	73.402.803.881,00	71.768.476.934,00	1.634.326.947	2,28
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	3.166.112.177,00	3.453.940.557,00	(287.828.380)	(8,33)
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	198.771.713,00	260.262.514,00	(61.490.801,00)	(23,63)
Jumlah		159.345.959.312,00	142.544.989.492,00	16.800.969.820,00	11,79

7.5.4.2.2.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan Mesin Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp50.123.805.027,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.5.225 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	5.475.092.718,00	3.999.804.570,00	1.475.288.148,00	36,88
2	Dinas Kesehatan	17.483.582.052,00	14.931.515.453,00	2.552.066.599,00	17,09
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	904.608.483,00	820.866.135,00	83.742.348,00	10,20
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.746.283.632,00	2.307.592.222,00	(561.308.590,00)	(24,32)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	321.968.778,00	301.456.677,00	20.512.101,00	6,80
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	587.328.929,00	695.551.148,00	(108.222.219,00)	(15,56)
7	Dinas Sosial	303.631.090,00	169.290.430,00	134.340.660,00	79,36
8	Dinas Tenaga Kerja	194.495.137,00	191.549.338,00	2.945.799,00	1,54
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	618.713.785,00	484.090.553,00	134.623.232,00	27,81
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	321.387.969,00	385.404.765,00	(64.016.796,00)	(16,61)
11	Dinas Lingkungan Hidup	913.562.029,00	865.399.022,00	48.163.007,00	5,57
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	755.251.552,00	765.792.802,00	(10.541.250,00)	(1,38)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	228.241.695,00	247.846.104,00	(19.604.409,00)	(7,91)
14	Dinas Perhubungan	1.394.744.724,00	1.567.304.039,00	(172.559.315,00)	(11,01)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	652.764.651,00	636.507.508,00	16.257.143,00	2,55
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	460.521.366,00	442.918.616,00	17.602.750,00	3,97
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	336.547.089,00	354.440.458,00	(17.893.369,00)	(5,05)
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	88.450.165,00	108.919.683,00	(20.469.518,00)	(18,79)
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	358.849.077,00	536.423.063,00	(177.573.986,00)	(33,10)
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	457.268.190,00	396.877.129,00	60.391.061,00	15,22
21	Dinas Perikanan	6.389.609.277,00	634.505.567,00	5.755.103.710,00	907,02
22	Sekretariat Daerah	2.814.643.825,00	2.801.375.470,00	13.268.355,00	0,47
23	Inspektorat Daerah	88.978.106,00	109.240.985,00	(20.262.879,00)	(18,55)
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	479.805.512,00	537.269.123,00	(57.463.611,00)	(10,70)
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.325.643.574,00	2.208.967.718,00	(883.324.144,00)	(39,99)
26	Badan Pendapatan Daerah	735.671.123,00	762.188.664,00	(26.517.541,00)	(3,48)
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya	172.607.406,00	199.897.456,00	(27.290.050,00)	(13,65)



No	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
	Manusia				
28	Sekretariat DPRD	990.953.812,00	852.387.749,00	138.566.063,00	16,26
29	Kecamatan Bintan Utara	356.501.313,00	511.823.529,00	(155.322.216,00)	(30,35)
30	Kecamatan Bintan Pesisir	139.464.478,00	196.273.830,00	(56.809.352,00)	(28,94)
31	Kecamatan Tambelan	307.094.944,00	339.651.761,00	(32.556.817,00)	(9,59)
32	Kecamatan Mantang	167.780.180,00	186.997.195,00	(19.217.015,00)	(10,28)
33	Kecamatan Toapaya	592.925.706,00	753.643.173,00	(160.717.467,00)	(21,33)
34	Kecamatan Teluk Sebong	369.659.250,00	426.977.673,00	(57.318.423,00)	(13,42)
35	Kecamatan Teluk Bintan	237.004.560,00	384.781.954,00	(147.777.394,00)	(38,41)
36	Kecamatan Gunung Kijang	516.885.906,00	580.761.899,00	(63.875.993,00)	(11,00)
37	Kecamatan Bintan Timur	430.205.543,00	512.640.129,00	(82.434.586,00)	(16,08)
38	Kecamatan Seri Kuala Lobam	353.536.295,00	404.694.781,00	(51.158.486,00)	(12,64)
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	51.541.106,00	61.835.643,00	(10.294.537,00)	(16,65)
	Jumlah	50.123.805.027,00	42.675.464.014,00	7.448.341.013,00	17,45

Adapun beban penyusutan peralatan dan mesin berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.226 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Beban Penyusutan Alat Angkutan	6.868.337.602,00	9.421.624.775	(2.553.287.173,00)	(27,10)
2	Beban Penyusutan Alat Bengkel Dan Alat Ukur	3.735.791.430,00	846.079.723	2.889.711.707,00	341,54
3	Beban Penyusutan Alat Besar	872.256.745,00	824.105.180	48.151.565,00	5,84
4	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	197.084,00	0,00	197.084,00	0,00
5	Beban Penyusutan Alat Kantor Dan Rumah Tangga	11.344.567.012,00	10.194.743.349	1.149.823.663,00	11,28
6	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Dan Kesehatan	12.140.917.309,00	9.953.458.568	2.187.458.741,00	21,98
7	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	123.603.531,00	87.009.722	36.593.809,00	42,06
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	1.653.836.496,00	1.135.957.851	517.878.645,00	45,59
9	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	133.640.831,00	136.722.721	(3.081.890,00)	(2,25)
10	Beban Penyusutan Alat Pertanian	2.387.822.791,00	97.028.011	2.290.794.780,00	2.360,96
11	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1.891.543.798,00	1.971.976.007	(80.432.209,00)	(4,08)
12	Beban Penyusutan Komputer	8.302.459.407,00	7.335.960.714	966.498.693,00	13,17
13	Beban Penyusutan Peralatan Olah Raga	21.940.708,00	4.599.625	17.341.083,00	377,01
14	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	11.998.541,00	0,00	11.998.541,00	0,00
15	Beban Penyusutan Rambu – Rambu	634.891.742,00	666.197.768	(31.306.026,00)	(4,70)
	Jumlah	50.123.805.027,00	42.675.464.014,00	7.448.341.013,00	17,45

7.5.4.2.2.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp32.454.466.514,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.227 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Per OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	7.038.290.825,00	9.310.690.964,00	(2.272.400.139,00)	(24,41)
2	Dinas Kesehatan	2.333.140.231,00	1.971.425.482,00	361.714.749,00	18,35
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.685.648.130,00	2.946.875.340,00	(261.227.210,00)	(8,86)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.449.470.006,00	2.178.310.042,00	271.159.964,00	12,45
5	Satuan Polisi Pamong Praja	6.670.334,00	6.670.334,00	0,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana	2.104.960,00	2.104.960,00	0,00	0,00



No	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
	Daerah				
7	Dinas Sosial	304.851.877,00	306.685.211,00	(1.833.334,00)	(0,60)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	74.652.481,00	72.322.435,00	2.330.046,00	3,22
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	139.124.870,00	145.331.331,00	(6.206.461,00)	(4,27)
10	Dinas Lingkungan Hidup	92.179.239,00	93.150.647,00	(971.408,00)	(1,04)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28.160.918,00	48.275.860,00	(20.114.942,00)	(41,67)
12	Dinas Perhubungan	273.795.250,00	273.711.706,00	83.544,00	0,03
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	955.068,00	955.068,00	0,00	0,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	88.205.848,00	88.205.848,00	0,00	0,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.522.923.443,00	265.802.496,00	7.257.120.947,00	2.730,27
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	12.489.414,00	10.320.912,00	2.168.502,00	21,01
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	876.944.717,00	515.520.557,00	361.424.160,00	70,11
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	241.699.184,00	241.699.184,00	-	-
19	Dinas Perikanan	961.668.284,00	66.658.571,00	895.009.713,00	1.342,68
20	Sekretariat Daerah	1.706.462.232,00	1.698.254.143,00	8.208.089,00	0,48
21	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.512.871.100,00	62.586.512,00	1.450.284.588,00	2.317,25
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	281.957.808,00	303.110.840,00	(21.153.032,00)	(6,98)
23	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	134.559.054,00	134.559.054,00	0,00	0,00
24	Sekretariat DPRD	1.095.819.644,00	1.094.039.894,00	1.779.750,00	0,16
25	Kecamatan Bintan Utara	316.459.956,00	305.219.157,00	11.240.799,00	3,68
26	Kecamatan Bintan Pesisir	250.846.618,00	250.846.618,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Tambelan	296.172.560,00	295.249.109,00	923.451,00	0,31
28	Kecamatan Mantang	242.292.968,00	242.292.968,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Toapaya	209.942.796,00	203.969.709,00	5.973.087,00	2,93
30	Kecamatan Teluk Sebong	370.768.461,00	369.104.031,00	1.664.430,00	0,45
31	Kecamatan Teluk Bintan	220.069.326,00	215.648.353,00	4.420.973,00	2,05
32	Kecamatan Gunung Kijang	222.181.087,00	221.831.472,00	349.615,00	0,16
33	Kecamatan Bintan Timur	279.557.694,00	264.414.615,00	15.143.079,00	5,73
34	Kecamatan Seri Kuala Lobam	169.405.456,00	163.431.178,00	5.974.278,00	3,66
35	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12.124.675,00	17.570.872,00	(5.446.197,00)	(31,00)
	Jumlah	32.454.466.514,00	24.386.845.473,00	8.067.621.041,00	33,08

Adapun beban penyusutan gedung dan bangunan berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.228 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Bangunan Gedung	32.229.258.684,00	24.206.353.829,00	8.022.904.855,00	33,14
2	Monumen	170.749.642,00	149.494.313,00	21.255.329,00	14,22
3	Tugu Titik Kontrol/Pasti	54.458.188,00	30.997.331,00	23.460.857,00	75,69
	Jumlah	32.454.466.514,00	24.386.845.473,00	8.067.621.041,00	33,08

7.5.4.2.2.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp73.402.803.881,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 7.5.229 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	20.099.176,00	46.488.784,00	(26.389.608,00)	(56,77)
2	Dinas Kesehatan	278.513.343,00	171.695.980,00	106.817.363,00	62,21
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	56.183.860.271,00	57.022.495.459,00	(838.635.188,00)	(1,47)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.682.007.823,00	10.293.332.409,00	1.388.675.414,00	13,49
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.247.125,00	1.247.125,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial	1.455.582,00	1.455.582,00	0,00	0,00
7	Dinas Tenaga Kerja	749.741,00	666.447,00	83.294,00	12,50
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.569.745,00	31.900.795,00	(21.331.050,00)	(66,87)
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16.553.466,00	16.276.999,00	276.467,00	1,70
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.547.111,00	2.547.111,00	0,00	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	790.625,00	790.625,00	0,00	0,00
12	Dinas Perhubungan	2.400.196.747,00	2.123.111.967,00	277.084.780,00	13,05
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.512.500,00	1.512.500,00	0,00	0,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	2.832.723,00	2.832.723,00	0,00	0,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.774.750,00	2.609.750,00	165.000,00	6,32
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	494.780,00	494.780,00	0,00	0,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	19.521.625,00	16.209.441,00	3.312.184,00	20,43
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.749.000,00	1.749.000,00	0,00	0,00
19	Dinas Perikanan	517.421.291,00	125.823.115,00	391.598.176,00	311,23
20	Sekretariat Daerah	43.478.434,00	45.143.851,00	(1.665.417,00)	(3,69)
21	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.119.017,00	4.119.017,00	0,00	0,00
22	Badan Keuangan dan Aset Daerah	882.735.222,00	1.136.201.212,00	(253.465.990,00)	(22,31)
23	Badan Pendapatan Daerah	485.375,00	485.375,00	0,00	0,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.012.143,00	2.012.143,00	0,00	0,00
25	Sekretariat DPRD	11.893.625,00	8.716.469,00	3.177.156,00	36,45
26	Kecamatan Bintan Utara	387.093.258,00	171.311.231,00	215.782.027,00	125,96
27	Kecamatan Bintan Pesisir	3.798.602,00	3.798.602,00	-	-
28	Kecamatan Tambelan	72.540.095,00	51.594.833,00	20.945.262,00	40,60
29	Kecamatan Mantang	2.947.615,00	2.947.615,00	-	-
30	Kecamatan Toapaya	100.166.808,00	58.899.693,00	41.267.115,00	70,06
31	Kecamatan Teluk Sebong	102.555.540,00	66.997.806,00	35.557.734,00	53,07
32	Kecamatan Teluk Bintan	35.603.717,00	11.301.124,00	24.302.593,00	215,05
33	Kecamatan Gunung Kijang	85.729.645,00	67.629.277,00	18.100.368,00	26,76
34	Kecamatan Bintan Timur	338.074.168,00	192.049.587,00	146.024.581,00	76,03
35	Kecamatan Seri Kuala Lobam	183.103.533,00	80.458.847,00	102.644.686,00	127,57
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.569.660,00	1.569.660,00	0,00	0,00
	Jumlah	73.402.803.881,00	71.768.476.934,00	1.634.326.947,00	2,28

Adapun beban penyusutan gedung dan bangunan berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.230 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Bangunan Air	10.844.317.784,00	10.161.317.810,00	682.999.974,00	6,72
2	Instalasi	1.738.045.972,00	1.342.000.116,00	396.045.856,00	29,51
3	Jalan Dan Jembatan	58.081.624.878,00	57.485.333.004,00	596.291.874,00	1,04
4	Jaringan	2.738.815.247,00	2.779.826.004,00	(41.010.757,00)	(1,48)
	Jumlah	73.402.803.881,00	71.768.476.934,00	1.634.326.947,00	2,28

**7.5.4.2.2.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya**

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp3.166.112.177,00 dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 7.5.231 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.166.112.177,00	3.453.940.557,00	(287.828.380)	(8,33)
	Jumlah	3.166.112.177,00	3.453.940.557,00	(287.828.380)	(8,33)

Adapun beban penyusutan Aset Tetap Lainnya berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.232 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Aset tetap Dalam renovasi	3.166.112.177,00	3.453.940.557,00	(287.828.380)	(8,33)
	Jumlah	3.166.112.177,00	3.453.940.557,00	(287.828.380)	(8,33)

7.5.4.2.2.5 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp198.771.713,00 dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 7.5.233 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per OPD
Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021**

No	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	34.354.100,00	29.843.184,00	4.510.916,00	15,12
2	Dinas Kesehatan	40.828.223,00	69.809.990,00	(28.981.767,00)	(41,52)
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	1.311.200,00	(1.311.200,00)	(100,00)
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27.995.000,00	27.995.000,00	0,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	21.517.100,00	21.517.100,00	0,00	0,00
7	Dinas Perikanan	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	0,00
8	Sekretariat Daerah	12.736.800,00	31.789.717,00	(19.052.917,00)	(59,93)
9	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.876.350,00	11.526.350,00	(1.650.000,00)	(14,32)
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah	9.592.000,00	9.592.000,00	0,00	0,00
11	Badan Pendapatan Daerah	1.958.000,00	15.066.333,00	(13.108.333,00)	(87,00)
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.403.440,00	29.403.440,00	0,00	0,00
13	Kecamatan Bintang Utara	497.200,00	497.200,00	0,00	0,00
14	Kecamatan Toapaya	753.500,00	753.500,00	0,00	0,00
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	1.897.500,00	(1.897.500,00)	(100,00)
	Jumlah	198.771.713,00	260.262.514,00	(61.490.801,00)	(23,63)

Adapun beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud berdasarkan jenisnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.234 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Lisensi Dan Frenchise	18.920.000,00	241.342.514,00	(222.422.514,00)	(92,16)
2	Software	179.851.713,00	18.920.000,00	160.931.713,00	850,59
	Jumlah	198.771.713,00	260.262.514,00	(61.490.801,00)	(23,63)

7.5.4.2.3 Beban Transfer

Beban Transfer berupa Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan Lainnya berupa Dana Bantuan Partai Politik pada Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.235 Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	%
	Beban Bagi Hasil			
1	Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	14.428.578.300,00	0,00	0,00
2	Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	856.787.500,00	0,00	0,00
	Jumlah A	15.285.365.800,00	0,00	0,00
	Beban Bantuan Keuangan			
1	Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
2	Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	52.810.386.266,00	71.943.558.560,00	(26,59)
	Jumlah B	52.810.386.266,00	71.943.558.560,00	(26,59)
	Total (Jumlah A + Jumlah B)	68.095.752.066,00	71.943.558.560,00	(5,35)

7.5.4.2.4 Beban Tak Terduga

Beban Tak Terduga berupa realisasi belanja tak terduga pada Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.236 Beban Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	%
1	Beban Tak Terduga – LO	5.674.118.343,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.674.118.343,00	0,00	0,00

Beban Tak terduga – LO Pemerintah Kabupaten Bintan untuk periode Tahun 2021 merupakan bantuan sosial tidak terencana korban bencana alam, bantuan pengobatan masyarakat tidak mampu, bantuan penanganan Covid-19, bantuan musibah meninggal dunia, pengembalian kelebihan dana hibah pariwisata Tahun 2020 dan pengembalian atas kesalahan penyeteroran jasa giro Pemerintah kota Tanjungpinang. Untuk tahun 2020 beban tak terduga diklasifikasikan sebagai beban luar biasa.

7.5.4.2.5 Surplus Non Operasional

Realisasi Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2021 sebesar Rp0,00.

Tabel 7.5.237 Defisit Non Operasional Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	%
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	%
3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

7.5.4.2.6 Defisit Non Operasional

Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2021 sebesar Rp115.908.179.409,00 merupakan penghapusan aset tetap.

Rincian penghapusan aset tetap per OPD sebagai berikut :

**Tabel 7.5.238 Defisit Non Operasional Penghapusan Aset Tetap
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan	3.127.758.455,00	83.161.170.828,00	(80.033.412.373,00)	(96,24)
2	Dinas Kesehatan	1.280.000.000,00	(2.313.807.537,00)	3.593.807.537,00	(155,32)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	519.925.507,00	0,00	519.925.507,00	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.395.030.892,00	84.000,00	2.394.946.892,00	2.851.127,25
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	163.028.000,00	(163.028.000,00)	(100,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	12.203.957,00	(12.203.957,00)	(100,00)
7	Dinas Sosial	938.000.001,00	0,00	938.000.001,00	0,00
8	Dinas Tenaga Kerja	2.941.200.000,00	0,00	2.941.200.000,00	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	15.000,00	(15.000,00)	(100,00)
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.202.073.861,00	127.371.308,00	6.074.702.553,00	4.769,29
11	Dinas Lingkungan Hidup	3.690.472.317,00	43.068.681,00	3.647.403.636,00	8.468,81
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.819.222.970,00	0,00	1.819.222.970,00	0,00
13	Dinas Perhubungan	0,00	(2.965.713,00)	2.965.713,00	(100,00)
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	345.130.500,00	(345.130.500,00)	(100,00)
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	840.000.000,00	0,00	840.000.000,00	0,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.521.742.509,00	0,00	9.521.742.509,00	0,00
17	Sekretariat Daerah	93.750.000,00	300.000,00	93.450.000,00	31.150,00
18	Kecamatan Bintan Utara	0,00	135.000,00	(135.000,00)	(100,00)
19	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.050.681.741,00	645.334,00	4.050.036.407,00	627.587,64
20	Badan Keuangan dan Aset Daerah	74.577.349.773,00	12.769.236.853,00	61.808.112.920,00	484,04
21	Sekretariat DPRD	0,00	8.245.737,00	(8.245.737,00)	(100,00)
22	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.910.971.383,00	0,00	3.910.971.383,00	0,00
	Jumlah	115.908.179.409,00	94.313.861.948,00	21.594.317.461,00	22,90

7.5.4.2.7 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa berupa realisasi belanja tak terduga pada Tahun Anggaran 2020. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 090 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk Tahun Anggaran 2021 beban tak terduga tidak lagi diklasifikasikan ke beban luar biasa melainkan ke rekening ke beban tak terduga itu sendiri. Rincian beban luar biasa sebagai berikut :



Tabel 7.5.239 Beban Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	%
1	Beban Luar Biasa – LO	0,00	2.959.000.570,00	(100,00)
	Jumlah	0,00	2.959.000.570,00	(100,00)

Beban Tak terduga – LO Pemerintah Kabupaten Bintan untuk periode Tahun 2020 merupakan bantuan penanganan Covid-19 yang disalurkan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah.

7.5.4.3 SURPLUS/DEFISIT – LO

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021 surplus sebesar Rp133.327.613.735,06.

7.5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Pemerintah Kabupaten Bintan menyajikan Laporan Arus Kas dengan menggunakan **Metode Langsung**, dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran disajikan dengan arus kas netto.

Tabel 7.5.240 Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	%
1	Arus Kas Aktivitas Operasi	138.084.607.314,94	137.108.102.044,63	0,71
2	Arus Kas Aktivitas Investasi	(151.013.347.825,33)	(194.190.406.074,42)	(22,23)
3	Arus Kas Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00
4	Arus Kas Aktivitas Transitoris	619.117.499,80	(450,00)	(137.581.766,62)
	Jumlah	(12.309.623.010,59)	(57.082.304.479,79)	(78,44)

7.5.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi, yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Tabel 7.5.241 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	%
1	Arus Kas Masuk	1.065.804.683.596,92	1.167.071.044.947,45	(8,68)
2	Arus Kas Keluar	927.720.076.281,98	1.029.962.942.902,82	(9,93)
	Jumlah	138.084.607.314,94	137.108.102.044,63	0,71

Berdasarkan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2021 adalah sebesar Rp138.084.607.314,94 meningkat sebesar Rp976.505.270,31 dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp137.108.102.044,63. Realisasi arus kas aktivitas operasi tersebut dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

**7.5.5.1.1 ARUS KAS MASUK**

Realisasi Arus Kas Masuk sebesar Rp1.065.804.683.596,92 merupakan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi yang berasal dari:

7.5.5.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Saldo Realisasi Pajak Daerah sejumlah Rp130.059.598.323,77 adalah Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.242 Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	(%)
1	Pajak Hotel	13.241.827.713,99	26.975.009.780,15	(50,91)
2	Pajak Restoran	6.213.190.825,03	11.134.932.754,04	(44,20)
3	Pajak Hiburan	373.205.305,00	2.093.843.083,80	(82,18)
4	Pajak Reklame	510.125.857,00	574.645.756,00	(11,23)
5	Pajak Penerangan Jalan	12.984.150.557,00	13.081.011.557,00	(0,74)
6	Pajak Parkir	69.858.633,00	141.470.500,00	(50,62)
7	Pajak Air Tanah	3.552.000,00	5.900.000,00	(39,80)
8	Pajak Sarang Burung Walet	1.450.000,00	3.500.000,00	(58,57)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	13.029.623.287,00	16.822.447.684,00	(22,55)
10	PBB-P2	59.452.301.412,00	19.522.637.376,00	204,53
11	BPHTB	24.180.312.733,75	17.461.344.864,00	38,48
	Jumlah	130.059.598.323,77	107.816.743.354,99	20,63

7.5.5.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah sejumlah Rp7.601.797.691,00 adalah Saldo Arus Kas Masuk dari Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.243 Pendapatan Retribusi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	(%)
1	Retribusi Jasa Umum			
	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	42.411.500,00	56.055.000,00	(24,34)
	b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	123.900.000,00	100.700.000,00	23,04
	c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	11.995.000,00	44.563.000,00	(73,08)
	d. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	72.252.700,00	58.514.400,00	23,48
2	Retribusi Jasa Usaha			
	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	506.610.000,00	534.168.813,00	(5,16)
	b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	151.342.500,00	2.227.768.000,00	(93,21)
	c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	6.554.000,00	0,00	100,00
3	Retribusi Perijinan Tertentu			
	a. Retribusi Izin Mendirikan bangunan	5.175.323.191,00	2.303.213.411,00	124,70
	b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	56.000.000,00	53.000.000,00	5,66
	c. Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian	0,00	0,00	0,00
	d. Retribusi Izin Trayek	90.000,00	1.365.000,00	(93,41)
	e. Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	1.455.318.800,00	2.381.618.600,00	(38,89)
	Jumlah	7.601.797.691,00	7.760.966.224,00	(2,05)

**7.5.5.1.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Realisasi Pendapatan Bagian Laba BUMD Tahun 2021 dan Tahun 2020 sebesar Rp11.411.312.907,00 dan Rp8.959.879.482,00 yang berasal dari:

**Tabel 7.5.244 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	(%)
1	BUMD BPR BINTAN	1.778.554.464,00	2.264.445.431,00	(21,46)
2	BUMD PT. BIS	0,00	144.536.026,00	(100,00)
3	Deviden Bagian Laba Bank Riau Kepri	9.632.758.443,00	6.550.898.025,00	47,04
Jumlah		11.411.312.907,00	8.959.879.482,00	27,36

7.5.5.1.1.4 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain – lain PAD yang Sah merupakan pendapatan diluar pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bintan untuk periode tahun anggaran 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 7.5.245 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021**

NO	URAIAN	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	(%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	377.868.105,00	89.575.716,00	321,84
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.127.200,00	0,00	0,00
3	Jasa Giro	1.992.359.653,76	2.657.024.904,59	(25,02)
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	600.000,00	0,00	100,00
5	Pendapatan Bunga	3.566.857.266,46	10.079.870.461,70	(64,61)
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	289.849.200,00	(100,00)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	158.980.221,80	61.574.020,56	158,19
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	4.130.831.096,57	1.391.200.341,98	196,93
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	111.933.661,00	(100,00)
10	Pendapatan dari Pengembalian	957.705.473,56	648.734.150,92	47,63
11	Penerimaan Lain-Lain	0,00	496.777.434,71	(100,00)
12	Pendapatan BLUD	32.605.539.485,00	0,00	0,00
13	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	4.286.411,00	1.405.447,00	204,99
14	Dana Kapitasi JKN pada FKTP/Puskesmas yang telah disetor ke Kas Daerah	2.874.010.750,00	107.197.300,00	2.581,05
15	Pendapatan dari BLUD RSUD	0,00	30.113.153.094,00	(100,00)
16	Pendapatan dari Puskesmas JKN	0,00	2.628.937.800,00	(100,00)
17	Pendapatan dari Puskesmas BLUD	0,00	4.692.082.379,00	(100,00)
18	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LRA	0,00	243.331.400,00	(100,00)
Jumlah		46.673.165.663,15	53.612.647.311,46	(12,94)

7.5.5.1.1.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil

Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil sebesar Rp98.171.066.468,00 merupakan Arus Kas Masuk dari penerimaan Dana Bagi Hasil sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 7.5.246 Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak	26.871.516.690,00	23.975.591.557,00	12,08
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	71.299.549.778,00	169.766.679.316,00	(58,00)
Jumlah		98.171.066.468,00	193.742.270.873,00	(49,33)

7.5.5.1.1.5.1 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp26.871.516.690,00 merupakan Arus Kas Masuk dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.247 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	9.026.348.987,00	5.557.750.170,00	62,41
2	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan pasal 21	16.966.847.200,00	17.017.114.942,00	(0,30)
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 25/29	857.257.000,00	1.376.228.679,00	(37,71)
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	21.063.503,00	24.497.766,00	(14,02)
Jumlah		26.871.516.690,00	23.975.591.557,00	12,08

7.5.5.1.1.5.2 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp71.299.549.778,00 merupakan Arus Kas Masuk dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.248 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil dari Pentambangan Minyak Bumi	2.397.403.700,00	29.998.397.771,00	(92,01)
2	Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	63.044.917.349,00	134.547.375.146,00	(53,14)
3	Dana Bagi Hasil dari Iuran Tetap (<i>Land rent</i>)	24.673.475,00	18.142.050,00	36,00
4	Dana Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (<i>Royalti</i>)	4.081.075.600,00	4.355.407.037,00	(6,30)
5	Dana Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	76.979.504,00	59.081.023,00	30,29
6	Dana Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.674.500.150,00	788.276.289,00	112,43
Jumlah		71.299.549.778,00	169.766.679.316,00	(58,00)

7.5.5.1.1.6 Penerimaan Dana Alokasi Umum

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Bintan untuk periode Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp476.841.183.000,00 dan Rp486.117.569.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 1,91%.

7.5.5.1.1.7 Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Bintan untuk periode Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp146.641.714.346,00 dan Rp141.719.060.458,00 atau mengalami kenaikan sebesar 3,47%.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

7.5.5.1.1.7.1 Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik Pemerintah Kabupaten Bintan untuk periode Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp90.479.520.346,00 dan Rp82.333.109.139,00 atau mengalami kenaikan sebesar 9,89%.

7.5.5.1.1.7.2 Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik Pemerintah Kabupaten Bintan untuk periode Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp56.162.194.000,00 dan Rp59.385.951.319,00 atau mengalami penurunan sebesar 5,43%.

7.5.5.1.1.8 Penerimaan Dana Insentif Daerah

Realisasi penerimaan Dana Penyesuaian Pemerintah Kabupaten Bintan merupakan Dana Insentif Daerah. Penerimaan Dana Insentif Daerah tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp44.420.166.000,00 dan Rp48.435.489.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 8,29%.

7.5.5.1.1.9 Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi

Realisasi penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi Pemerintah Kabupaten Bintan untuk periode tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp63.898.047.803,00 dan Rp61.807.106.031,00 atau mengalami kenaikan sebesar 3,38%.

7.5.5.1.1.10 Penerimaan Bantuan Keuangan

Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan dari Provinsi pada Pemerintah Kabupaten Bintan untuk periode tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp500.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00%.

7.5.5.1.1.11 Penerimaan Hibah

Pendapatan Hibah merupakan pendapatan Dana BOS yang ditransfer oleh pusat. Realisasi pendapatan hibah untuk periode tahun anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp56.599.313.213,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00%.

7.5.5.1.1.12 Penerimaan dari Pendapatan Lainnya

Penerimaan lainnya pada tahun 2021 merupakan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dan pendapatan Dana BOS yang dianggarkan dan direalisasikan pada pendapatan transfer, sehingga arus kas masuk pada Penerimaan dari Pendapatan Lainnya untuk tahun anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp40.086.631.395,00 dan Rp0,00 atau mengalami peningkatan sebesar 100,00%.

7.5.5.1.2 ARUS KAS KELUAR

Realisasi arus Kas Keluar sejumlah Rp927.720.076.281,98 merupakan saldo Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Operasi yang terdiri dari:

Tabel 7.5.249 Arus Kas Keluar Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)
1	Pembayaran Pegawai	476.580.386.274,00	571.093.939.534,00	(16,55)
2	Pembayaran Barang	327.869.230.370,98	257.761.202.728,82	27,20



No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)
3	Pembayaran Bunga	0,00	0,00	0,00
4	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00	0,00
5	Pembayaran Hibah	45.560.989.228,00	57.292.591.880,00	(20,48)
6	Pembayaran Bantuan Sosial	3.939.600.000,00	5.530.925.108,00	(28,77)
7	Pembayaran Belanja Tak Terduga	5.674.118.343,00	68.340.725.092,00	(91,70)
8	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/kota	15.285.365.800,00	0,00	0,00
9	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	52.810.386.266,00	69.943.558.560,00	(24,50)
Jumlah		927.720.076.281,98	1.029.962.942.902,82	(9,93)

7.5.5.2 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Realisasi meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, sebagai berikut.

Tabel 7.5.250 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)
1	Arus Kas Masuk	5.000.000,00	2.250.000,00	122,22
2	Arus Kas Keluar	151.018.347.825,33	194.192.656.072,42	(22,23)
Jumlah		(151.013.347.825,33)	(194.190.406.074,42)	(22,23)

7.5.5.2.1 ARUS KAS MASUK

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2021 sebesar Rp5.000.000,00 yaitu Arus kas masuk dari Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen.

7.5.5.2.2 ARUS KAS KELUAR

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi digunakan untuk pembentukan dana cadangan, pembayaran belanja modal, meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Aset Lainnya serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut.

Tabel 7.5.251 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2	Perolehan Tanah	994.839.115,00	228.080.000,00	336,18
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	39.826.077.526,00	55.793.587.959,00	(28,62)
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	63.060.135.647,33	88.506.594.506,42	(28,75)
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	43.580.037.497,00	41.930.206.113,00	3,93
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.954.288.040,00	5.634.208.496,00	(65,31)
7	Perolehan Aset Lainnya	2.970.000,00	99.979.000,00	(97,03)
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.600.000.000,00	2.000.000.000,00	(20,00)
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
Jumlah		151.018.347.825,33	194.192.656.074,42	(22,23)

7.5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam



jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Pada TA 2021 nihil.

Tabel 7.5.252 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)
1	Arus Kas Masuk	0,00	0,00	0,00
2	Arus Kas Keluar	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

7.5.5.4 ARUS KAS AKTIVITAS TRANSITORIS

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pemerintah daerah. Pada TA 2021, jumlah total Arus Kas Aktivitas Transitoris adalah Rp619.117.449,80. Jumlah total tersebut didapat dari Arus Kas Masuk Rp62.989.317.921,80 dikurangi Arus Kas Keluar Rp62.370.200.422,00.

Tabel 7.5.253 Arus Kas Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	Arus Kas Masuk	62.989.317.921,80	62.309.991.419,00	1,09
2	Arus Kas Keluar	62.370.200.422,00	62.309.991.869,00	0,10
Jumlah		619.117.449,80	(450,00)	(137.581.766,62)

7.5.5.4.1 ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris realisasinya meliputi arus kas masuk TA 2021 sebesar Rp62.989.317.921,80 dan TA 2020 sebesar Rp62.309.991.419,00.

Arus Kas Masuk berasal dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar sebesar Rp62.370.200.421,80 yang merupakan penerimaan potongan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Iuran Wajib Pegawai (IWP) yang terdiri dari iuran Taspen dan BPJS dan Tabungan Perumahan (Taperum) pada Tahun 2021 serta Penerimaan Retribusi IMB sebesar Rp593.407.500,00 dan Retribusi IMTA sebesar Rp25.710.000,00 yang harus disetor ke Kas Negara.

7.5.5.4.2 ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Realisasi kas keluar dari aktivitas Non Anggaran yang digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga (PFK) dan pengeluaran lainnya. Adapun nilainya sebesar sebesar Rp62.370.200.422,00 pada Tahun 2021 merupakan pengeluaran dari PPN, PPh, IWP dan Taperum.

7.5.5.5 SALDO AKHIR KAS

Saldo akhir kas sebesar Rp136.779.170.359,09 adalah merupakan jumlah saldo kas akhir di BUD, kas di PPK-BLUD, Kas di Puskesmas non BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.254 Rincian Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)
1	Saldo Kas di Kas Daerah	136.778.186.778,09	149.088.637.773,68	(8,26)



No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	(%)
2	Saldo Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	983.581,00	55.596,00	1.669,16
4	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	100.000,00	(100,00)
5	Saldo Kas Dana BOS	0,00	0,00	0,00
6	Saldo Kas Lainnya di JKN Kapitasi	0,00	0,00	0,00
7	Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	4.363.160,00	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas		136.783.533.519,09	149.088.793.369,68	(8,26)

Nilai saldo akhir kas pada Neraca yaitu sebesar Rp136.783.533.519,09 sedangkan saldo akhir kas menurut LAK yaitu sebesar Rp136.779.170.359,09. Terdapat selisih saldo akhir kas menurut LAK dan Neraca yaitu sebesar Rp4.363.160,00 yang merupakan saldo kas lainnya di Bendahara Pengeluaran BKAD. Saldo tersebut merupakan potongan gaji atas pinjaman pegawai antara lain iuran koperasi, pinjaman bank dan arisan yang belum disetorkan oleh bendahara pengeluaran.

7.5.5.5.1 KAS DI KAS DAERAH

Saldo Akhir Kas di BUD pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp136.779.170.359,09 yang merupakan jumlah Kenaikan/Penurunan Kas sebesar (Rp12.309.623.010,59) dengan Saldo Awal Kas di BUD sebesar Rp149.087.793.369,68.

Terdapat perbedaan antara pencatatan jumlah Saldo Akhir Kas di BUD menurut Laporan Arus Kas dengan Saldo Akhir Kas di BUD menurut Rekening Koran. Selisih tersebut disebabkan Saldo Akhir Kas di BUD menurut Laporan Arus Kas termasuk Sisa Kas Dana Kapitasi yang masih berada pada Bendahara Dana Kapitasi dan Kas di Bendahara BLUD. Pada Tahun 2021 Laporan Arus Kas BLU dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum sesuai PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU.

Saldo Akhir Kas menurut Laporan Arus Kas sebesar Rp136.779.170.359,09 terdiri dari sisa kas yang ada di rekening BUD sebesar Rp121.893.481.631,56, sisa kas di BLUD sebesar Rp12.940.786.698,47, sisa kas dana BOS sebesar Rp1.619.373.844,06, sisa kas di Bendahara Dana Kapitasi sebesar Rp324.544.604,00 dan sisa kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp983.581,00. Saldo Akhir Kas berbeda dengan SILPA LRA dan LPSAL dikarenakan pada LAK terdapat penerimaan retribusi sebesar Rp619.117.500,00 pada aktivitas penerimaan transitoris dan kelebihan setor pajak non anggaran sebesar Rp0,20 pada aktivitas pengeluaran transitoris.

7.5.5.5.2 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp983.581,00 terdapat pada kas di bendahara pengeluaran BKAD.

7.5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, surplus atau defisit-LO pada periode yang bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.



Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

7.5.6.1 EKUITAS AWAL

Saldo Ekuitas Awal Tahun 2021 sebesar Rp2.552.025.244.633,75 merupakan ekuitas akhir Tahun 2020.

Tabel 7.5.255 Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	%
1	Ekuitas Awal	2.552.025.244.633,75	2.709.676.257.111,53	(5,82)
	Jumlah	2.552.025.244.633,75	2.709.676.257.111,53	(5,82)

7.5.6.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Penambahan/Penambahan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit pada Laporan Operasional pada akhir periode pelaporan. Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021 sebesar Rp133.327.613.735,06.

Tabel 7.5.256 Surplus/Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	(%)
1	Suplus/Defisit-LO	133.327.613.735,06	193.100.128.235,43	(30,95)
	Jumlah	133.327.613.735,06	193.100.128.235,43	(30,95)

7.5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Pemerintah Kabupaten Bintan terdiri dari :

7.5.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Pada TA. 2021 Pemerintah Kabupaten Bintan tidak terdapat koreksi nilai persediaan.

7.5.6.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Pada TA. 2021 Pemerintah Kabupaten Bintan tidak terdapat selisih revaluasi aset tetap.

7.5.6.3.3 Lain - Lain

Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp4.882.442.570,97 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.5.257 Koreksi Ekuitas Lain-lain Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)
1	Koreksi Pajak Hiburan	(Rp28.307.022,00)
2	Koreksi Pajak Parkir	(Rp11.174.000,00)
3	Koreksi Denda Pajak Hotel	(Rp1.435.453.459,68)
4	Koreksi Denda Pajak Restoran	(Rp1.167.800.644,28)
5	Koreksi Denda Pajak Hiburan	(Rp2.830.702,00)
6	Koreksi Denda Pajak PBB P2	(Rp3.503.843.742,68)
7	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Reklame	(Rp208.410.053,28)



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)
8	Koreksi Saldo Ekuitas PD. BPR Bintan	(Rp135.457.625,00)
9	Koreksi Piutang Pusat	(Rp51.237.863,00)
10	Koreksi Saldo Ekuitas PT. BIS	(Rp64.147.367,00)
11	Koreksi Pajak Reklame	Rp250.546.774,80
12	Koreksi Penghapusan Alat Angkutan Bermotor	(358.303.000,00)
13	Koreksi Penghapusan Rumah Dinas	(556.499.000,00)
14	Koreksi Reklas ke Tanaman dari Gedung Bangunan	(34.675.594,00)
15	Koreksi Kurang Penyajian Aset Rumah Dinas	2.072.737.149,00
16	Koreksi Penghapusan Penyusutan Alat Angkutan Bermotor	358.303.000,00
17	Koreksi Pengurangan Piutang Denda Pajak Hotel atas SK Pengurangan Sanksi	(6.157.775,73)
18	Koreksi Pengurangan Penyisihan Piutang Denda Pajak Hotel atas SK Pengurangan Sanksi	30.788,88
19	Koreksi Pengurangan Penyusutan Gedung Bangunan (Taman)	237.565,00
Jumlah		(4.882.442.570,97)

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Bintan sebesar Rp4.882.442.570,97 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.5.258 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	(693.628.522,00)
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
3	Lain – Lain	(4.882.442.570,97)	0,00
4	Selisih Revaluasi Tanah	0,00	38.700.029.551,00
5	Selisih Revaluasi Gedung dan Bangunan	0,00	4.764.714.860,00
6	Selisih Revaluasi Ekstrakompatabel	0,00	(197.921.546,00)
7	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	(6.642.952.341,00)
8	Koreksi Piutang Pajak	0,00	(90.080.890,60)
9	Koreksi Piutang Lainnya	0,00	(160.751.596,12)
10	Koreksi Bagian Lancar TPTGR	0,00	(6.645.175,00)
11	Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	(709.458.329,64)
12	Koreksi atas Nilai Aset Tetap Tahun Sebelumnya	0,00	485.809.747,00
Jumlah		(4.882.442.570,97)	35.449.115.757,64

7.5.6.4 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2021 sebesar Rp2.413.812.461.352,72 dengan rincian sebagai berikut.

- Ekuitas Awal	Rp2.552.025.244.633,75
- Surplus/Defisit-LO	(Rp133.327.613.735,06)
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar	(Rp4.882.442.570,97)
- Ekuitas Akhir	<u>Rp2.413.815.188.327,72</u>



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 7.5.259 Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	(%)
1	Ekuitas Akhir	2.413.815.188.327,72	2.552.025.244.633,75	(5,42)
	Jumlah	2.413.815.188.327,72	2.552.025.244.633,75	(5,42)



7.6 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

7.6.1 Kondisi Geografis dan Perangkat Daerah

Kabupaten Bintan secara geografis terletak antara 0°06'17"-1°34'52" Lintang Utara dan 104°12'47" Bujur Timur di sebelah Barat 108°02'27" Bujur Timur di sebelah Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Natuna, Anambas dan Malaysia
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga.
- 3) Sebelah Barat : Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.
- 4) Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Barat

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan seluruhnya mencapai 87.717,84 Km², luas daratannya hanya 1,50 persen atau sebesar 1.319,51 Km² saja dan luas lautnya 86.398,33 Km² (98,50 persen). Secara administratif, Kabupaten Bintan terbagi atas 10 Kecamatan, 15 Kelurahan, 36 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Gunung Kijang, yaitu 503,12 Km². Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Tambelan dengan luas 169,42 Km².

Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 49 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Dilihat dari topografinya, pulau-pulau di Kabupaten Bintan sangat bervariasi. Umumnya dibentuk oleh perbukitan rendah membundar yang dikelilingi oleh daerah rawa-rawa. Wilayah Kabupaten Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama Paparan kontinental yang disebut Paparan Sunda. Morfologi pulau Bintan tidak memiliki perbedaan ketinggian yang menyolok yaitu antara 0-350 meter dari muka laut.

Penonjolan puncak-puncak bukit antara lain Gunung Bintan 348 meter, Gunung Bintan Kecil 196 meter. Bukit-bukit lainnya merupakan bukit-bukit dengan ketinggian dibawah 100 meter. Bukit-bukit tersebut merupakan daerah hulu-hulu sungai yang sebagian besar mengalir kearah Utara dan Selatan dengan pola sub paralel, sedangkan pola anak-anak sungainya berpola sub radial. Sungai-sungai itu umumnya pendek-pendek, dangkal dan tidak lebar. Pada umumnya wilayah Kabupaten Bintan beriklim tropis. Pada Tahun 2010 di wilayah Kabupaten Bintan temperatur rata-rata terendah sebesar 21,2 derajat celsius dan tertinggi rata-rata sebesar 34,2 derajat celsius dengan kelembaban nisbi rata-rata tercatat sekitar 84 persen.

Pemerintah Kabupaten Bintan pada TA 2016 memiliki 3 (tiga puluh Sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari dua sekretariat (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD), satu kantor (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja), tujuh badan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat Daerah), sembilan belas dinas (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup,



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan dan olah raga, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), dan sepuluh kecamatan (Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Mantang, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Toapaya).

Kondisi OPD Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2019 mengalami perubahan jumlahnya menjadi 39 OPD. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan perubahan terakhir Nomor 9 Tahun 2015, Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka OPD yang tahun dibentuk Pemerintah Kabupaten Bintan mulai tahun 2021 adalah, sebagai berikut.

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Sosial
8. Dinas Tenaga Kerja
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

- 20 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
- 21 Dinas Perikanan
- 22 Sekretariat Daerah
- 23 Inspektorat Daerah
- 24 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 25 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
- 26 Badan Pendapatan Daerah
- 27 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 28 Sekretariat DPRD
- 29 Kecamatan Bintan Utara
- 30 Kecamatan Bintan Pesisir
- 31 Kecamatan Tambelan
- 32 Kecamatan Mantang
- 33 Kecamatan Toapaya
- 34 Kecamatan Teluk Sebong
- 35 Kecamatan Teluk Bintan
- 36 Kecamatan Gunung Kijang
- 37 Kecamatan Bintan Timur
- 38 Kecamatan Seri Kuala Lobam
- 39 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Disamping memiliki 39 (tiga puluh sembilan) OPD di atas pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bintan juga memiliki Tujuh Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan dua Perusahaan Daerah. Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) terdiri dari:

- 1) Pola Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD Bertahap Puskesmas (5 Puskesmas)
- 2) Pola Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD Bertahap Dana Bergulir
- 3) Pola Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD Bertahap RSUD Kabupaten Bintan

Ketiga jenis PPK-BLUD tersebut statusnya adalah PPK-BLUD Bertahap yang berarti belum PPK-BLUD penuh sehingga merupakan entitas akuntansi dari dinas teknis terkait, yaitu untuk PPK-BLUD Bertahap Puskesmas Teluk Sebong, Puskesmas Kijang, Puskesmas Tanjung Uban, Puskesmas Teluk Sasah dan Puskesmas Kawal dibawah koordinasi Dinas Kesehatan. Sedangkan PPK PPK-BLUD Bertahap Dana Bergulir berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan RSUD Bintan berdiri secara mandiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 7 Tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja RSUD Kabupaten Bintan dan Surat Keputusan Bupati Bintan nomor 566/XI/2014 tentang penerapan status PPK-BLUD bertahap pada RSUD Bintan.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Pemerintah Kabupaten Bintan juga memiliki investasi permanen yaitu penyertaan modal pada Bank Riau Kepri. Jumlah penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.38.078.900.000,00 atau menguasai kepemilikan saham sebesar 3,49% yang meliputi 380.789 lembar saham. Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bintan tidak melakukan penambahan setoran penyertaan modal kepada Bank Riau Kepri.

7.6.2 Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Koordinasi dengan instansi vertikal di Kabupaten Bintan dilaksanakan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yaitu suatu forum konsultasi dan koordinasi antara Bupati dengan pejabat-pejabat TNI dan Polri di daerah serta aparatur pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas nasional dan pembangunan nasional di daerah, sesuai Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), Keanggotaannya terdiri dari Bupati, Ketua DPRD, Komandan Kodim, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri dan ditambah Ketua Pengadilan Negeri yang kedudukannya disejajarkan. Berdasarkan pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 dimaksud, musyawarah pimpinan daerah mempunyai tujuan:

- 1) Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
- 2) Melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;
- 3) Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional.

Sedangkan Forum Koordinasi Muspida, sesuai keputusan presiden tersebut di atas mempunyai fungsi :

- 1) Membina keserasian hubungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah Daerah.
- 2) Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan menyinkronisasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) Memantapkan sistem dan tata cara penyelenggaraan kebijakan/ program pemerintah dan pemerintah daerah dalam penguatan penyelenggaraan pemerintah guna mewujudkan stabilitas lokal, regional dan nasional.
- 4) Melakukan deteksi dini atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban umum, keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketahanan negara dan menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya.
- 5) Menentukan pola operasional penyelesaian permasalahan yang timbul di daerah dengan berpedoman pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya guna mewujudkan keterpaduan dan sinergisitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, koordinasi vertikal selain



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

dilaksanakan melalui forum muspida, koordinasi juga dilaksanakan melalui rapat kerja yang dilaksanakan secara berkala setiap bulan sekali dan atau secara insidental yang bersifat situasional. Rapat koordinasi instansi vertikal disamping dilakukan melalui forum muspida juga dilakukan dengan seluruh instansi vertikal yang ada di Kabupaten Bintan.

Instansi vertikal sebagai perangkat departemen-departemen atau lembaga-lembaga pemerintah bukan departemen dan perangkat pemerintah propinsi yang mempunyai lingkungan kerja di Kabupaten Bintan, saat ini terdiri dari Badan Pertanahan Nasional, Biro Pusat Statistik, Kantor Departemen Agama, BRI Cabang, UPPJ PLN, PT Telkom, Perum Pegadaian, PT Pos, Gudang Dolog, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Bank BNI, Bank Danamon, Bank Riau, Bank BPR Kepri, PD BPR Bintan, PT BIS, PT Bintan Anugerah Bersama dan UPTD Dinas Pendapatan Propinsi dan lain-lain. Dengan terselenggaranya rapat koordinasi instansi vertikal dan perusahaan dimaksud, diharapkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat dapat dihindari atau diminimalisir. Disamping itu kemungkinan terjadinya tumpang tindih atau *overlapping* kegiatan dapat dihindari.

7.6.3 Pembinaan Batas Wilayah

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembinaan batas wilayah adalah mengacu pada kebijakan Pemerintah, yaitu dibidang Pemerintahan Umum Sub Bidang Pembinaan Wilayah Perbatasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 dimaksud pembinaan batas wilayah diarahkan pada Perbatasan Daerah, Toponimi (penyelidikan nama tempat) dan pemetaan wilayah, Pengembangan wilayah perbatasan, dan Penetapan luas wilayah.

- 1) Kebijakan perbatasan daerah dilaksanakan dengan menetapkan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan yang dituangkan ke dalam Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Kebijakan toponimi dan pemetaan wilayah, dilaksanakan melalui :
 - Penetapan toponimi dan pemetaan wilayah.
 - Pengelolaan toponimi dan pemetaan wilayah skala Kabupaten.
 - Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan wilayah skala kabupaten.
- 3) Kebijakan pengembangan wilayah perbatasan, dilakukan melalui :
 - Penetapan wilayah perbatasan skala kabupaten;
 - Pengelolaan wilayah perbatasan skala kabupaten;
 - Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten.
- 4) Kebijakan penetapan luas wilayah, dilakukan melalui :
 - Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi;
 - Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

7.6.4 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Pada awal tahun 2021 terjadi peningkatan intensitas curah hujan dan perubahan cuaca ekstrim di wilayah Kabupaten Bintang sehingga terjadi kebakaran, banjir, tanah longsor, badai dan angin kencang di beberapa wilayah. Adapun bencana yang terjadi di Kabupaten Bintang per wilayah sebagai berikut.

Tabel 7.6.1 Data Bencana yang terjadi di Kabupaten Bintang Tahun 2020

NO	TANGGAL/JAM		KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JENIS BENCANA
1	01 Januari 2021	20:30 WIB	Tembeling Tanjung	Teluk Bintang	Angin Puting Beliung
2	02 Januari 2021	09:30 WIB	Dendun	Mantang	Angin Kencang
3	04 Januari 2021	05:30 WIB	Mantang Lama	Mantang	Air Laut Pasang dan Runtuhnya Batu Miring Penahan Pantai
4	10 Januari 2021	03:30 WIB	Tembeling Tanjung	Teluk Bintang	Angin Puting Beliung
5	10 Januari 2021	07:00 WIB	Numbing	Bintang Pesisir	Pohon Tumbang
6	10 Januari 2021	07:00 WIB	Numbing	Bintang Pesisir	Angin Kencang
7	13 Januari 2021	07:30 WIB	Numbing	Bintang Pesisir	Meluapnya air laut (banjir ROB)
8	18 Januari 2021	13:30 WIB	Tembeling Tanjung	Teluk Bintang	Angin Puting Beliung
9	19 Januari 2021	14:30 WIB	Pengujan	Teluk Bintang	Angin Kencang
10	21/01/21	Pkl. 16.00 Wib	KP. Gesek Belakang SMP Kel. Toapaya	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
11	23/01/21	Pkl. 13.00 - 14.20 Wib	KP. Masiran RT 007/002 Kel. Desa Gn. Kijang	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
12	24/01/21	Pkl. 13.30 - 14.00 Wib	Km 23 Kel. Toapaya	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
13	24/01/21	Pkl. 14.30 - 18.00 Wib	Km 29 Kel. Toapaya Induk	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
14	26/01/21	Pkl. 18.30 - 19.35	Kp. Plores Rt 01/01 Kel. Desa Gn. Kijang	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
15	27/01/21	Pkl. 13.00 - 14.00 wib	Jl. Wakatobi Kel. Kawal	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
16	24/01/21	Pkl. 13.08 - 14.00 wib	Jl. Wacopek Kel. Kijang Kota	Bintang Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
17	25/01/21	Pkl. 09.30 - 11.30 wib	Jl. Korindo SMKN I Bintim	Bintang Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
18	28/01/21	Pkl. 14.00 - 16.30 wib	Jl. Alumina Bintim	Bintang Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
19	24/01/21	Pkl. 14.45 Wib	Jl. Indunsuri Perum. Citra Onyx	Bintang Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
20	15/02/2021	Pkl. 10.30 Wib	Km 27 depan Polsek Gn. Kijang	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
21	15/02/2021	Pkl. 13.00 Wib	Kp. Banjar lama	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
22	15/02/2021	Pkl. 16.00 Wib	Kp. Namling Desa Toapaya Induk	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
23	16/02/201	Pkl. 12.55 Wib	Daerah kawasan Hotel Residence	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

24	17/02/2021	Pkl. 09. 30 Wib	Km 18 Kp Mentras	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
25	17/02/2021	Pkl 10.35 Wib	Jl.. Korindo kebun dalam	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
26	17/02/2021	Pkl. 19.30 Wib	Kp. Mengkurus Rt 01/ Rw 01	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
27	18/02/2021	Pkl. 20.00 Wib	Depan kantor pemberdayaan perempuan ceruk ijuk	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
28	18/02/2021	Pkl. 18.22 Wib	Depan pesantren tabu ireng	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
29	19/02/2021	Pkl. 16.00 Wib	Kp. Namling Desa Toapaya Induk	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
30	20/02/201	Pkl. 12.55 Wib	Daerah kawasan Hotel Residence	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
31	21/02/2021	Pkl. 09. 30 Wib	Km 18 Kp Mentras	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
32	17/02/2021	Pkl. 19.30 Wib	Kp. Mengkurus Rt 01/ Rw 01	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
33	18/02/2021	Pkl. 20.00 Wib	Depan kantor pemberdayaan perempuan ceruk ijuk	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
34	18/02/2021	Pkl. 18.22 Wib	Depan pesantren tabu ireng	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
35	19/02/2021	Pkl. 16.00 Wib	Kp. Namling Desa Toapaya Induk	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
36	20/02/201	Pkl. 12.55 Wib	Daerah kawasan Hotel Residence	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
37	21/02/2021	Pkl. 09. 30 Wib	Km 18 Kp Mentras	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
38	23/02/2021	Pkl 10.35 Wib	Jl.. Korindo kebun dalam	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
39	17/02/2021	Pkl. 19.30 Wib	Kp. Mengkurus Rt 01/ Rw 01	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
40	18/02/2021	Pkl. 20.00 Wib	Depan kantor pemberdayaan perempuan ceruk ijuk	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
41	18/02/2021	Pkl. 18.22 Wib	Depan pesantren tabu ireng	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
42	19/02/2021	Pkl. 16.00 Wib	Kp. Namling Desa Toapaya Induk	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
43	20/02/201	Pkl. 12.55 Wib	Daerah kawasan Hotel Residence	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
44	21/02/2021	Pkl. 09. 30 Wib	Km 18 Kp Mentras	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
45	23/02/2021	Pkl 10.35 Wib	Jl.. Korindo kebun dalam	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
46	20/02/2021	Pkl. 10.00 Wib	Km 19 Jalan Uban Lama	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

47	20/02/2021	Pkl. 14.30 Wib	Km 17 Jalan Uban Lama	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
48	21/02/2021	Pkl. 15.22 Wib	Kp. Galang batang dekat lola resort	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
49	22/02/2021	Pkl. 13.30 Wib	KM 25	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
50	22/02/2021	Pkl. 19.20 Wib	Jl. Manunggal X	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
51	23/02/2021	Pkl. 09.00 Wib	Depan rumah bahagia karang rejo	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
52	23/02/2021	Pkl. 16.10 Wib	Kp. Pulau Ladi	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
53	24/02/2021	Pkl. 09. 30 Wib	Kp. Sidoarjo	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
54	24/02/2021	Pkl. 11.40 Wib	Km 17 Kp. Rawa bangun	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
55	24/02/2021/	Pkl. 23.00 Wib	Kp. Kawal Pantai/ Pantai Setres	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
56	25/02/2021	Pkl. 13.30 Wib	Kp. Masiran Desa Gn. Kijang	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
57	25/02/2021	Pkl. 15.30 Wib	Km 39 Kp. Kangboi	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
58	26/02/2021	Pkl. 15.22 Wib	Jl. Wakatobi	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
59	27/02/2021	PKI. 16.30 Wib	Kp. Masiran Desa	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
60	28/02/2021	Pkl. 17.28 Wib	Kp. Jeropet 3	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
61	23/02/2021	Pkl. 16.10 Wib	Kp. Pulau Ladi	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
62	24/02/2021	Pkl. 09. 30 Wib	Kp. Sidoarjo	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
63	24/02/2021	Pkl. 11.40 Wib	Km 17 Kp. Rawa bangun	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
64	24/02/2021/	Pkl. 23.00 Wib	Kp. Kawal Pantai/ Pantai Setres	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
65	25/02/2021	Pkl. 13.30 Wib	Kp. Masiran Desa Gn. Kijang	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
66	25/02/2021	Pkl. 15.30 Wib	Km 39 Kp. Kangboi	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
67	26/02/2021	Pkl. 15.22 Wib	Jl. Wakatobi	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
68	27/02/2021	PKI. 16.30 Wib	Kp. Masiran Desa	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
69	28/02/2021	Pkl. 17.28 Wib	Kp. Jeropet 3	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

70	28/02/2021	Pkl. 12.24 Wib	Jl. Raya Tanjungpinang Tg. Uban km 64 KP. Ekang Darat	Teluk Sebong	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
71	28/02/2021	Pkl. 17.16 Wib	Jl. Raya Tanjungpinang Dusun Jago	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
72	13/02/2021	Pkl. 14.00 Wib	Jl. Kolong Enam	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
73	14/02/2021	Pkl. 12.00 Wib	Jl. Nusantara Inayah Bintan	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
74	15/02/2021	Pkl. 13.24 Wib	Jl. Nusantara Km 22	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
75	17/02/2021	Pkl. 13.00 Wib	Jl. Nusantara km 23	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
76	18/02/2021	Pkl. 12.35 Wib	Jl. Nusantara Km 22 PLTU Kijang	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
77	19/02/2021	Pkl. 15.05 Wib	Jl. Nusantara Gardu Induk PLTU Kijang	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
78	20/02/2021	Pkl. 11.45 Wi	Jl. Nusantara Kampung Budi Mulya	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
79	21/02/2021	Pkl. 12.00 Wib	Jl. Lingkar wacopek	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
80	22/02/2021	Pkl. 12.00 Wib	Jl. Kolong enam Kijang	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
81	22/02/2021	Pkl. 19.00 Wib	Jl. Korindo Kampung Jawa	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
82	24/02/2021	Pkl. 13.45 Wib	Jl. Tanah Kuning Kijang Kota	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
83	27/02/2021	Pkl. 14.30 Wib	Jl. Korindo Ktr Desa Gn. Kijang	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
84	28/02/2021	Pkl. 13.25 Wib	Jl. Alumina Depan Ktr DPPKD	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
85	03/02/2021	Pkl. 17.00 Wib	Kp. Kangboi	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
86	02/02/2021	Pkl. 17.15-18.20 Wib	Jl. Kampung Lengkuas Rt 02/02 Kel. Kijang Kota	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
87	03/03/2021	Pkl. 13.15-19.27 Wib	Jl. Kp. Limau Tengah, Kp. Limau Manis Desa Kuala Sempang	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
88	03/03/2021	Pkl. 15.15-16.50 Wib	Jl. Nusantara Km 23 Kel. Kijang Kota	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
89	04 Maret 2021	02:45 WIB	Tanjung Uban Kota	Bintan Utara	Kebakaran Rumah
90	15/03/2021	Pkl. 10.00-12.00 Wib	Kp. Masiran dekat kantor Koramil Desa Gn. Kijang	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
91	15/03/2021	Pkl. 13.00-18.00 Wib	Kp. Bangsun Kel. Kawal	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
92	15/03/2021	Pkl. 21.00-23.30 Wib	Kp. Kawal Darat Kel. Kawal	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
93	15/03/2021	Pkl. 01.00-05.00 Wib	Jl. Berek Motor Kel. Kijang Kota	Bintan Timur	Kebakaran Rumah



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

94	16/03/2021	Pkl. 14.00-20.30 Wib	Kp. Jawa Desa Toapaya Utara	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
95	16/03/2021	Pkl. 14.30-16.00 Wib	Jl. Nusantara Lintas Timur FTZ	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
96	17/03/2021	Pkl. 15.00-18.00 Wib	Kp. Masiran desa Gn. Kijang	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
97	18/03/2021	Pkl. 15.00-18.30 Wib	Kp. Masiran desa Gn. Kijang	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
98	19/03/2021	Pkl. 12.30-19.00 Wib	Desa Gn. Kijang Kp. Polres RT 10 RW 02	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
99	20/03/2021	Pkl. 12.00-20.00 Wib	Bukit Piatu Desa Gn. Kijang	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
100	20/03/2021	Pkl. 15.00-16.30 Wib	Jl. Nusantara Km 20 Area Hutan lindung Kel. Gn. Lengkuas	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
101	21/03/2021	Pkl. 11.00-17.30 Wib	Kp. Galang Batang Desa Gn. Kijang	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
102	21/03/2021	Pkl. 23.00-01.00 Wib	Depan panti jompo Kp. Karang Rejo Kel. Kawal	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
103	21/03/2021	Pkl. 14.12-18.00 Wib	Jl. Raya Busung (Taman Firdaus) Kel. Teluk Lobam	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
104	22/03/2021	Pkl. 4.00-14.45 Wib	Jl. Pringgondani Kel. Tg. Uban Timur	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
105	26/03/2021	Pkl. 15.00-17.00 Wib	Jl. Korindo SMKN 2 Bintan Kel. Sei Lekop	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
106	26/03/2021	Pkl. 15.00-17.00 Wib	Jl. Korindo SMKN 2 Bintan Kel. Sei Lekop	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
107	02/04/2021	14.15-15.40	Jl. Berdikari (Ktr Lurah Tg. Uban Timur) Kp. Sukadamai Kel. Tg. Uban Timur	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
108	04/04/2021	12.30-13.30	Kp. Kawal Pantai Kel. Kawal	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
109	10/04/2021	15.45-18.00	Jl. Korindo belakang SMK 2	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
110	14/04/2021	11.50-12.20	Jl. Mangga KP. Baru Kel. Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
111	02/04/2021	14.15-15.40	Jl. Berdikari (Ktr Lurah Tg. Uban Timur) Kp. Sukadamai Kel. Tg. Uban Timur	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
112	04/04/2021	12.30-13.30	Kp. Kawal Pantai Kel. Kawal	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
113	10/04/2021	15.45-18.00	Jl. Korindo belakang SMK 2	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
114	14/04/2021	11.50-12.20	Jl. Mangga KP. Baru Kel. Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
115	21/04/2021	11.00-13.00	Jl. Korindo Perum. Telaga Surya	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
116	22/04/2021	15.45-18.00	Jl. Korindo belakang SMK 2	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

					belukar
117	23/04/2021	11.50-12.20	Jl. Mangga KP. Baru Kel. Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
118	10/04/2021	15.45-18.00	Jl. Korindo belakang SMK 2	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
119	14/04/2021	11.50-12.20	Jl. Mangga KP. Baru Kel. Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
120	21/04/2021	11.00-13.00	Jl. Korindo Perum. Telaga Surya	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
121	22/04/2021	15.45-18.00	Jl. Korindo belakang SMK 2	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
122	23/04/2021	11.50-12.20	Jl. Mangga KP. Baru Kel. Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
123	21/04/2021	11.00-13.00	Jl. Korindo Perum. Telaga Surya	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
124	22/04/2021	15.45-18.00	Jl. Korindo belakang SMK 2	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
125	23/04/2021	11.50-12.20	Jl. Mangga KP. Baru Kel. Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
126	26/04/2021	11.50-12.20	Jl. Mangga KP. Baru Kel. Tg. Uban Utara	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
127	28/04/2021	11.00-13.00	Jl. Korindo Perum. Telaga Surya	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
128	03/05/2021	18.54-20.20	Jl. Raya Busung Desa Busung	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
129	07/05/2021	18.54-20.20	Jl. Raya Busung Desa Busung	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
130	09/05/2021	18.54-20.20	Jl. Raya Busung Desa Busung	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
131	12/05/2021	18.54-20.20	Jl. Raya Busung Desa Busung	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
132	04 Juni 2021	06:00 WIB	Toapaya Asri	Toapaya	Kebakaran Rumah
133	25/07/2021	10.00 s/d 12.30	Jl. Korindo Perum. Telaga Surya	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
134	28/07/2021	18.30 s/d 22.00	Jl. Nusantara km 22 Kijang	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
135	25/07/2021	11.23 s/d 13.00	Jl. Berdikari 2 Kp. Sukadamai Tanjung Uban Timur	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
136	31/07/2021	10.00 s/d 11.30	Km 16 Jl Lintas Barat, Perumahan Korem	Toapaya	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
137	23/09/2021	10.30 s/d 13.00	Jl. Musi	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
138	01/09/2021	15.56 s/d 16.43	Jl. Kp. Harapan Kp. Sukadamai Desa Teluk Sasah	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
139	23/09/2021	10.30 s/d 13.00	Jl. Musi	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

140	01/09/2021	15.56 s/d 16.43	Jl. Kp. Harapan Kp. Sukadamai Desa Teluk Sasah	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
141	16/09/2021	07,25 s/d 08,30	Jl. M. Tahir Latif (Mesjid Al Muhajirin) Kp. Baru	Bintan Utara	Pembersihan Sisa Banjir
142	16/09/2021	12,00 s/d 14,00	Jl. Wakatobi Kel.Kawal	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
143	21/09/2021	15,30 s/d 17,00	Kp. GI Batang Rt 08/04	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
144	23/09/2021	10,30 s/d 17,30	Km 27 Toapaya Asri Rt 01 Rw 01	Toapaya Asri	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
145	26/09/2021	13,30 s/d 20,00	Rt 01/01 Dusun I Desa Malang Rapat	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
146	16/09/2021	12,00 s/d 14,00	Jl. Wakatobi Kel.Kawal	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
147	21/09/2021	15,30 s/d 17,00	Kp. GI Batang Rt 08/04	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
148	23/09/2021	10,30 s/d 17,30	Km 27 Toapaya Asri Rt 01 Rw 01	Toapaya Asri	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
149	26/09/2021	13,30 s/d 20,00	Rt 01/01 Dusun I Desa Malang Rapat	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
150	14/10/2021	13,30 s/d 15,00	Kp. Karang Rejo Kel. Kawal	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
151	16/09/2021	12,00 s/d 14,00	Jl. Wakatobi Kel.Kawal	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
152	21/09/2021	15,30 s/d 17,00	Kp. GI Batang Rt 08/04	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
153	23/09/2021	10,30 s/d 17,30	Km 27 Toapaya Asri Rt 01 Rw 01	Toapaya Asri	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
154	26/09/2021	13,30 s/d 20,00	Rt 01/01 Dusun I Desa Malang Rapat	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
155	01 Oktober 2021	18:40 WIB	Busung	Seri Kuala Lobam	Angin Puting Beliung
156	13 Oktober 2021	08:00 WIB	Toapaya Utara	Toapaya	Kebakaran Rumah
157	14/10/2021	13,30 s/d 15,00	Kp. Karang Rejo Kel. Kawal	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
158	04/10/2021	18,25	Jl. Industri Teluk Lobam	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
159	06/10/2021	14,30	JL. Eka Bhakti Kp. Baru tanjung uban utara	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
160	14/10/2021	11,45	Jl. Raya Busung Teluk Lobam	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
161	14/10/2021	13,30 s/d 15,00	Kp. Karang Rejo Kel. Kawal	Gunung Kijang	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
162	04/10/2021	18,25	Jl. Industri Teluk Lobam	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
163	06/10/2021	14,30	JL. Eka Bhakti Kp. Baru tanjung uban utara	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
164	14/10/2021	11,45	Jl. Raya Busung Teluk Lobam	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

					belukar
165	04/10/2021	18,25	Jl. Industri Teluk Lobam	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
166	04/10/2021	18,25	Jl. Industri Teluk Lobam	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
167	06/10/2021	14,30	JL. Eka Bhakti Kp. Baru tanjung uban utara	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
168	14/10/2021	11,45	Jl. Raya Busung Teluk Lobam	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
169	04/10/2021	18,25	Jl. Industri Teluk Lobam	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
170	06/10/2021	14,30	JL. Eka Bhakti Kp. Baru tanjung uban utara	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
171	14/10/2021	11,45	Jl. Raya Busung Teluk Lobam	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
172	11/10/2021	15,30 s/d 17,30	Jl. Nusantara km 20 Kijang Seraya	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
173	11/10/2021	15,30 s/d 17,30	Jl. Nusantara km 20 Kijang Seraya	Bintan Timur	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
174	27/11/2021	05:00 WIB	Kampung Hilir	Tambelan	Kebakaran Rumah
175	15/12/2021	11.50 s/d 12.40	Jl. Mekarsari Tanjung Uban Timur	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
176	17/12/2021	13.32 s/d 14.45	Jl. Raya Busung Teluk Lobam	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
177	21/12/2021	11.20 s/d 13.00	Jl. Manggar Kp. Bugis Tanjung Uban Utara	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
178	15/12/2021	11.50 s/d 12.40	Jl. Mekarsari Tanjung Uban Timur	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
179	17/12/2021	13.32 s/d 14.45	Jl. Raya Busung Teluk Lobam	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
180	21/12/2021	11.20 s/d 13.00	Jl. Manggar Kp. Bugis Tanjung Uban Utara	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
181	17/12/2021	13.32 s/d 14.45	Jl. Raya Busung Teluk Lobam	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
182	21/12/2021	11.20 s/d 13.00	Jl. Manggar Kp. Bugis Tanjung Uban Utara	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
183	21/12/2021	11.20 s/d 13.00	Jl. Manggar Kp. Bugis Tanjung Uban Utara	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
184	17/12/2021	13.32 s/d 14.45	Jl. Raya Busung Teluk Lobam	Seri Kuala Lobam	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
185	21/12/2021	11.20 s/d 13.00	Jl. Manggar Kp. Bugis Tanjung Uban Utara	Bintan Utara	Kebakaran hutan/lahan/semak belukar
186	22/12/2021	18:30 WIB	Tanjung Uban Kota	Bintan Utara	Gelombang Pasang



7.6.4.1 Upaya Pengendalian Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan

A. Pencegahan

1. Koordinasi para pihak (masyarakat, Pemda, praktisi, pemegang ijin usaha, LSM, TNI/POLRI, akademisi)
 - Koordinasi program dan anggaran terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - Mengembalikan jejaring kerja yang mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - Sharing informasi dan teknologi pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - Membentuk Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di setiap Desa.

B. Penanganan Pasca

1. Identifikasi: areal bekas terbakar, penyebab kebakaran, luas kebakaran, tipe vegetasi terbakar, pengaruh terhadap lingkungan/ ekosistem dan informasi untuk mendukung penegakan hukum.
2. Monitoring dan pemeriksaan lokasi terbakar.
3. Penegakan hukum (*Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)*, POLRI dan Kejaksaan).
4. Pelaporan.

7.6.4.2 Uraian Belanja Tidak Terduga (BTT) :

Penanganan bencana alam di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021 menggunakan APBD melalui Belanja Tidak Terduga Dana BTT untuk penggunaan dana darurat bencana dengan dasar harus ada Penetapan status darurat bencana oleh Kepala Daerah. Langkah-langkah status darurat bencana oleh Kepala Daerah yang diambil untuk penggunaan dana BTT :

1. Membuat analisis cuaca oleh BMKG
2. Rapat koordinasi dengan FKPD untuk penetapan status darurat
3. Membuat keputusan Bupati untuk status darurat bencana daerah
4. Membuat keputusan pos komando darurat bencana
5. Membuat rencana kebutuhan belanja bencana berdasarkan identifikasi pelaksanaan di lapangan

Langkah-langkah yang diambil guna menanggulangi bencana tersebut adalah :

1. Melaksanakan evakuasi kepada masyarakat yang terkena bencana ke tempat yang aman
2. Membuat dapur umum di tempat lokasi bencana
3. Pendataan korban bencana kerusakan material dan fasilitas publik
4. Menyalurkan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang terkena bencana

7.6.4.3 Uraian Belanja Bantuan Sosial Tak Terencana (BTR) :

Sumber dana untuk penanggulangan bencana dan pemberian bantuan kepada korban bencana berasal dari APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021 pos Belanja Bantuan Sosial Tak Terencana (BTR) yang pengelolaannya dibawah tanggung jawab Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dibayarkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.

Langkah-langkah yang diambil guna menanggulangi bencana tersebut adalah :

1. Melaksanakan pendataan dan memverifikasi terhadap kerusakan akibat pascabencana



2. Memberikan bantuan berupa uang dari dana APBD pos belanja bantuan sosial tak terencana (BTR)

7.6.5 Pengelolaan Kawasan Khusus

Jenis kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah meliputi : kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otorita, kawasan kelautan dan kedirgantaraan sepanjang yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi:

- 1) Kawasan Sumber Daya Alam, meliputi: Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 2) Kawasan Sumber Daya Buatan, meliputi: Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya;
- 3) Kawasan Kepentingan Umum, meliputi: Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum.

Kebijakan daerah dalam pengelolaan kawasan khusus sesuai dengan kewenangan yang diserahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, antara lain meliputi:

- 1) Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan SDA;
- 2) Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan;
- 3) Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten/kota;
- 4) Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan.

Sebagian wilayah Kabupaten Bintan atau secara *enclave area* telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas pajak (*Free Trade Zone*). Hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sehingga telah dibentuk Badan Pengelola Kawasan Kabupaten Bintan (BPK Bintan). BPK Bintan tersebut telah melaksanakan pelayanan satu atap atas semua jenis perijinan di Kabupaten Bintan sehingga dapat mempermudah semua jenis investasi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Untuk lebih mempercepat iklim investasi dan pembangunan daerah telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta tatalaksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

7.6.6 Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Untuk menjamin rasa aman, tentram, dan tertib dikalangan masyarakat dari tindak kriminalitas dan gangguan yang mengancam masyarakat, pada dasarnya bukan sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang dalam hal ini aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk bertanggung jawab atas ketertiban dan ketenteraman umum masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Otonomi Daerah yang menghasilkan daerah otonom, daerah mempunyai keleluasaan untuk mengatur urusan rumah tangganya dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah dengan prasyarat adanya demokratisasi dalam penyelenggaraan negara, telah membawa masyarakat kepada tuntutan-tuntutan ke arah pemenuhan kebutuhan yang bersifat lokal. Satpol PP mempunyai peran menegakkan peraturan perundang-undangan daerah, banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah.

Tugas Satpol PP bersama-sama dengan PNS adalah menegakkan peraturan daerah dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang maupun lembaga. Satpol PP juga aktif penertiban dan menjaga ketertarikan di tempat-tempat umum seperti: pemasangan reklame yang tidak sesuai ketentuan, pedagang kaki lima yang melakukan aktifitasnya tidak pada tempatnya, tempat hiburan, tempat-tempat usaha; pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan; pelaksanaan Ijin Gangguan (HO); pelanggaran terhadap kebersihan, keindahan dan ketertiban dan lain-lain. Beberapa permasalahan tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap warga/masyarakat. Untuk itu perlu dilaksanakan langkah-langkah *preventif* diantaranya melakukan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan daerah, melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

7.6.7 Penyelenggaraan Pembinaan Keuangan Desa

Pemerintah Kabupaten Bintan memiliki 36 Desa yang tersebar pada 9 Kecamatan yang pengelolaan keuangannya dilaksanakan secara otonom/mandiri berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Untuk menjamin tertib pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Bintan telah membentuk OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta didukung Tim Pembina Desa yang terdiri dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan sebagai Pembina Aparatur Pemerintahnya, BAPPEDA Kabupaten Bintan sebagai Pembina Perencanaan Desa dan BPKAD Kabupaten Bintan sebagai Pembina Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi verifikasi pencairan dana bantuan desa berikut tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu didampingi juga oleh Tim Pendamping Desa yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan gaji yang bersumber dana dari APBN (Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal), Pada Tahun Anggaran 2018 bantuan keuangan desa disalurkan langsung ke rekening kas desa terdiri dari alokasi dana desa bersumber APBD Kabupaten Bintan dan dana desa bersumber dari APBN, dengan target dan realisasi sebagai berikut.

Tabel 7.6.2 Data Anggaran dan Realisasi Dana Desa APBD dan APBN Kabupaten Bintan Tahun 2021

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Desa Lancang Kuning	1.241.895.000,00	1.241.895.000,00	100,00
2	Desa Seborg Perih	1.559.446.000,00	1.559.446.000,00	100,00
3	Desa Seborg Lagoi	1.677.896.000,00	1.677.896.000,00	100,00
4	Desa E kang Anculai	2.727.699.000,00	2.727.699.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Desa Sri Bintan	1.166.918.000,00	1.166.918.000,00	100,00
6	Desa Pengudang	1.459.266.000,00	1.459.266.000,00	100,00
7	Desa Berakit	1.719.620.000,00	1.719.620.000,00	100,00
8	Desa Pangkil	1.161.943.000,00	1.161.943.000,00	100,00
9	Desa Penaga	868.351.000,00	868.351.000,00	100,00
10	Desa Pengujan	2.262.003.000,00	2.262.003.000,00	100,00
11	Desa Bintang Buyu	978.969.000,00	978.969.000,00	100,00
12	Desa Tembeling	1.222.432.000,00	1.222.432.000,00	100,00
13	Desa Malang Rapat	1.132.644.000,00	1.132.644.000,00	100,00
14	Desa Teluk Bakau	958.317.000,00	958.317.000,00	100,00
15	Desa Gunung Kijang	1.488.667.000,00	1.488.667.000,00	100,00
16	Desa Batu Lepuk	895.718.000,00	895.718.000,00	100,00
17	Desa Kampung Melayu	3.138.944.000,00	3.138.944.000,00	100,00
18	Desa Kampung Hilir	1.239.734.000,00	1.239.734.000,00	100,00
19	Desa Pulau Pinang	3.367.534.000,00	3.367.534.000,00	100,00
20	Desa Mentebung	1.442.192.000,00	1.442.192.000,00	100,00
21	Desa Pengikik	1.928.070.000,00	1.928.070.000,00	100,00
22	Desa Kukup	1.170.411.000,00	1.170.411.000,00	100,00
23	Desa Toapaya	1.899.600.000,00	1.899.600.000,00	100,00
24	Desa Toapaya Selatan	1.867.197.000,00	1.867.197.000,00	100,00
25	Desa Toapaya Utara	2.463.896.700,00	2.463.896.700,00	100,00
26	Desa Mantang Lama	1.010.409.000,00	1.010.409.000,00	100,00
27	Desa Mantang Besar	1.438.618.000,00	1.438.618.000,00	100,00
28	Desa Mantang Baru	745.060.000,00	745.060.000,00	100,00
29	Desa Dendun	1.071.507.000,00	1.071.507.000,00	100,00
30	Desa Mapur	1.472.454.000,00	1.472.454.000,00	100,00
31	Desa Numbing	1.096.382.000,00	1.096.382.000,00	100,00
32	Desa Kelong	1.195.052.000,00	1.195.052.000,00	100,00
33	Desa Air Glubi	1.387.045.000,00	1.387.045.000,00	100,00
34	Desa Kuala Sempang	918.371.000,00	918.371.000,00	100,00
35	Desa Busung	698.647.000,00	698.647.000,00	100,00
36	Desa Teluk Sasah	736.977.000,00	736.977.000,00	100,00
Total		52.809.884.700,00	52.809.884.700,00	100,00

Realisasi dana desa sebesar Rp52.809.884.700,00 telah disalurkan 100% dan dari anggaran sebesar Rp52.809.884.700,00. Realisasi dana desa telah ditransfer ke rekening masing-masing kas desa sesuai jumlah alokasi dana desa Tahun Anggaran 2021.

7.6.8 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bintan pada tahun anggaran 2021 telah melaksanakan kewajiban perpajakan antara lain memungut, mencatat, menyetorkan dan menatausahakan dengan saldo awal per 01 Januari 2021 sebesar Rp0,00 pemungutan sebesar Rp62.370.200.421,80 Penyetoran sebesar Rp62.370.200.421,80 sehingga terdapat saldo akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 7.6.3 Kewajiban Perpajakan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2020

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2021 (Rp)	Pemungutan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo 31 Desember 2021 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	0,00	11.524.585.689,00	11.524.585.689,00	0,00
2	Taperum	0,00	3.530.132.975,00	3.530.132.975,00	0,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	0,00	20.243.358.168,80	20.243.358.168,80	0,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	1.453.970.942,00	1.453.970.942,00	0,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	506.859.209,00	506.859.209,00	0,00
6	Pajak PPh Ps. 4 ayat 2	0,00	2.660.856.761,00	2.660.856.761,00	0,00
7	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	0,00	22.338.808.485,00	22.338.808.485,00	0,00
8	Pajak PPh – Final	0,00	111.628.192,00	111.628.192,00	0,00
9	Iuran Wajib Pegawai	0,00	11.524.585.689,00	11.524.585.689,00	0,00
Jumlah		0,00	62.370.200.421,80	62.370.200.421,80	0,00



7.7 PENUTUP

Peranan Kabupaten Bintang sebagai pusat sistem keuangan daerah, pelayanan, perikanan dan pertanian baik dalam skala lokal, regional dan nasional, akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan seluruh *stakeholder* apabila dikelola dengan sistem pemerintahan yang efektif dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang handal dan profesional. Pembangunan sistem pemerintahan yang efektif memerlukan lingkungan politik yang diilhami oleh amanat reformasi, sehingga mampu memberikan koridor-koridor yang jelas tentang apa yang akan dituju dari agenda Kabupaten Bintang yang telah disepakati. Bentuk kesepakatan tersebut telah dituangkan melalui berbagai produk-produk aturan selama beberapa periode yang berkelanjutan yang akan dijadikan koridor penilaian penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Bintang telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bintang di masa yang akan datang dan berhadapan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa. Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 disajikan sesuai kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum periode berikutnya.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pemerintah Kabupaten Bintang Tahun 2021 ini disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan pengguna Laporan Keuangan, atas perhatian serta kerjasama yang sinergis kami ucapkan terima kasih.